Peraturan Bupati
Nomor 18 Tahun 2023

Tentang

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
## TAHUN 2024

## Optimalisasi Potensi Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bulukumba2023

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
# INSPEKTORAT DAERAH
*Jl. Srikaya No. 2 Bulukumba Tlp.(0413) 81070*

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**
**RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2024**
**PEMERITAH KABUPATEN BULUKUMBA**

Kami telah mereviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Substansi Informasi yang dimuat menjadi tanggung jawab tim penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Bulukumba.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024, apakah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat beberapa hal yang menjadi catatan untuk segera dilakukan perbaikan oleh Tim Penyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun Anggaran 2024 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati sehingga RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan.

Bulukumba, 30 Juni 2023
**An.Inspektur Daerah**
**Sekretaris**

**Muhammad Nurjalil, SH.,MH**
Pangkat : Pembina TK.I
NIP. 19671104 199803 1 005

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diunah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta menindaklanjuti Pasal 149 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025, RPJMD Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, dan Rencana Kerja Pemerintah, program strategis provinsi dan nasional untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan provinsi dan nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.

(2) RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 dijadikan sebagai:
   a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
   b. acuan dan/atau pedoman dalam penyelarasan bagi Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam wilayah Daerah untuk mendukung capaian target dan sasaran pembangunan Daerah; dan
   c. dasar penyusunan KUA dan PPAS serta sebagai landasan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

## BAB III
## SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

### Pasal 3

(1) RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   BAB I PENDAHULUAN
   BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
   BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
   BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
   BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
   BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
   BAB VII PENUTUP

(2) Rincian sistematika RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV
## RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 4

(1) RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

(2) Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

### Pasal 5

Dalam rangka penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024:

a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 sebagai bahan acuan pembahasan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama DPRD; dan
b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah bersama DPRD.

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan dimaksud.
(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, dapat diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan/atau perubahan dokumen pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 hasil pembahasan bersama DPRD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 7 Juli 2023
BUPATI BULUKUMBA,

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 7 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 18

# Daftar Isi


**Daftar Tabel** ..... iii

**Daftar Gambar** ..... xiv

**Daftar Grafik** ..... xv

**Daftar Kuadran** ..... xvii

**Lampiran – lampiran** ..... xviii

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **I-1**

1.1 Latar Belakang ..... I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... I-4
1.4 Maksud Dan Tujuan ..... I-5
1.5 Sistematika Dokumen RKPD ..... I-6

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH** ..... **II-1**

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah ..... II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II-9
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ..... II-42
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... II-129
2.1.5 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemeritah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 ..... II-132
2.2 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... II-143
2.2.1 Evaluasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... II-145
2.3 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistanable Development Goals* (TPB/SDGs) ..... II-147
2.3.1 Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ..... II-162
2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ..... II-165
2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah ..... II-285
2.5.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah ..... II-285
2.5.2 Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah) ..... II-285
2.6 Isu Strategis ..... II-291
2.6.1 Isu Strategis Global ..... II-292
2.6.2 Isu Straegis Nasional ..... II-297
2.6.3 Isu Strategis Daerah ..... II-299
2.7 Inovasi Daerah ..... II-303

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH** ..... **III-1**

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III-1
3.1.1 Prospek Dan Tantangan Perekonomian Daerah ..... III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III-14
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III-14

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja ..... III-18
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayan Daerah ..... III-23
3.3 Pendanaan Pembangunan Lainnya ..... III-25
3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ..... III-25
3.3.2 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ..... III-25
3.3.3 Pembiayaan Utang Daerah ..... III-26
**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... IV-1**
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan ..... IV-1
4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 ..... IV-10
4.2.1 Sinergitas Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba ..... IV-10
4.2.2 Sinergitas Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba ..... IV-13
4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... IV-14
4.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 ..... IV-33
4.3 Dukungan Terhadap Prioritas Provinsi dan Nasional ..... IV-35
4.3.1 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba dan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ..... IV-35
4.3.2 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 ..... IV-43
4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bulukumba ..... IV-55
4.4.1 Bidang Pemerintahan ..... IV-55
4.4.2 Bidang Ekonomi dan Keuangan ..... IV-55
4.4.3 Bidang Pembangunan ..... IV-57
4.4.4 Bidang Kesejahteraan Rakyat ..... IV-57
4.5 Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Suistainable Development Goals (SDGs)* dengan RKPD Tahun 2024 ..... IV-58
**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V-1**
5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2024 ..... V-1
5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 ..... V-1
5.3. Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... V-15
**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... VI-1**
6.1 Indikator Makro Pembangunan ..... VI-1
6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... VI-1
6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) ..... VI-2
6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... VI-18
6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Suistainable Development Goals* (TPB/SDGs) ..... VI-20
**BAB VII PENUTUP ..... VII-1**
7.1 Kaidah Pelaksanaan ..... VII-1
7.2 Kesimpulan ..... VII-2

# Daftar Tabel

Tabel II-1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bulukumba ..... II-1
Tabel II-2 Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-6
Tabel II-3 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022 ..... II-7
Tabel II-4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba, 2022 ..... II-8
Tabel II-5 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022 ..... II-8
Tabel II-6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-9
Tabel II-7 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022 ..... II-9
Tabel II-8 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulukumba (persen), 2018-2022 ..... II-11
Tabel II-9 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ..... II-12
Tabel II-10 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 – 2022 ..... II-13
Tabel II-11 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 – 2022 ..... II-13
Tabel II-12 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022 ..... II-14
Tabel II-13 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022 ..... II-16
Tabel II-14 Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2018-2022 ..... II-17
Tabel II-15 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022 ..... II-17
Tabel II-16 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ..... II-18
Tabel II-17 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bulukumba tahun 2022 ..... II-19
Tabel II-18 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022 ..... II-20
Tabel II-19 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022 ..... II-22
Tabel II-20 Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Bulukumba ..... II-24
Tabel II-21 Perbandingan Capaian Rata-Rata lama Sekolah Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022 ..... II-26
Tabel II-22 ..... II-28
Tabel II-23 Perbandingan Capaian Umur Harapan Hidup (UUH-Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi, Selatan dengan Nasional, 2018-2022 ..... II-30
Tabel II-24 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bulukumba ..... II-31
Tabel II-25 Perbandingan Pengeluaran Perkapita Masyarakat (Ribu Rp/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022..II-33
Tabel II-26 Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB dan ADHK) Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2018-2022 ..... II-35
Tabel II-27 Perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita ADHB dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Tahun 2018-2022 ..... II-35
Tabel II-28 Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2022 ..... II-38

Tabel II-29 Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian Kabupaten Bulukumba 2020-2022 II-38
Tabel II-30 Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2022 ..... II-39
Tabel II-31 Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2022 ..... II-39
Tabel II-32 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Bulukumba 2020-2022 ..... II-39
Tabel II-33 Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata; Kabupaten Bulukumba 2020-2022 ... II-39
Tabel II-34 Indeks Daya saing infrastruktur Kabupaten Bulukumba 2020-2022 ..... II-40
Tabel II-35 Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2022 ..... II-40
Tabel II-36 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri Kabupaten Bulukumba 2020-2022 ..... II-40
Tabel II-37 Indeks Pendidikan Kabupaten Bulukumba 2020-2022 ..... II-40
Tabel II-38 Indeks Kesehatan Kabupaten Bulukumba 2020-2022 ..... II-41
Tabel II-39 Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi Kabupaten Bulukumba 2020-2022 ..... II-41
Tabel II-40 Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani Kabupaten Bulukumba 2020-2022 ..... II-41
Tabel II-41 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bulukumba 2020-2022 ..... II-41
Tabel II-42 Skor LPPD/Kategori Kabupaten Bulukumba 2020-2022 ..... II-41
Tabel II-43 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bulukumba 2020-2022 ..... II-42
Tabel II-44 Perkembangan Indikator Sektor Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Bulukumba 2018– 2022 ..... II-42
Tabel II-45 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 - 2022 ..... II-43
Tabel II-46 Perkembangan APM Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 ..... II-43
Tabel II-47 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) ..... II-44
Tabel II-48 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 – 2022 ..... II-44
Tabel II-49 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 – 2022 ..... II-45
Tabel II-50 Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022 ..... II-45
Tabel II-51 Rasio Guru-Murid dan Sekolah Kabupaten Bulukumba,Tahun 2018 - 2022 . II-46
Tabel II-52 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-46
Tabel II-53 Angka Kematian Bayi (AKB)Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022..... II-46
Tabel II-54 Angka Kematian Balita (AKBa)Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 .... II-47
Tabel II-55 Angka Kematian Neonatal Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022..... II-47
Tabel II-56 Angka Kematian Ibu (AKI)Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-48
Tabel II-57 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ...II-48
Tabel II-58 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk ..... II-49
Tabel II-59 Rasio Rumah Sakit dan Rasio Klinik Per Satuan Penduduk ..... II-49
Tabel II-60 Rasio Dokter Per Satuan PendudukKabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 II-50
Tabel II-61 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-50
Tabel II-62 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-50

Tabel II-63 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) ..... II-51
Tabel II-64 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-51
Tabel II-65 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA ..... II-52
Tabel II-66 Tingkat Prevalensi Tuberkolosis ..... II-52
Tabel II-67 Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-53
Tabel II-68 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD ..... II-53
Tabel II-69 Angka Kejadian Malaria Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-54
Tabel II-70 Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-54
Tabel II-71 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-55
Tabel II-72 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022..II-55
Tabel II-73 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-56
Tabel II-74 Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-56
Tabel II-75 Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-57
Tabel II-76 Proporsi Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-57
Tabel II-77 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-58
Tabel II-78 Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-58
Tabel II-79 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-58
Tabel II-80 Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-58
Tabel II-81 Persentase Permukiman yang Tertata Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-59
Tabel II-82 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh ..... II-59
Tabel II-83 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau ..... II-59
Tabel II-84 Persentase rumah tinggal bersanitasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-60
Tabel II-85 Persentase penduduk berakses air minum Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-60
Tabel II-86 Persentase areal kawasan kumuh Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ...II-60
Tabel II-87 Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan ..... II-61
Tabel II-88 Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 ..... II-61
Tabel II-89 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban. Ketentraman dan Keindahan ..... II-61
Tabel II-90 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota ..... II-62
Tabel II-91 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di KabupatenBulukumba Tahun 2018 – 2022 ..... II-62
Tabel II-92 Persentase Penegakan PERDA) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 II-62
Tabel II-93 Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi ..... II-63
Tabel II-94 Jumlah Korban Bencana yang Ditangani ..... II-63
Tabel II-95 Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial di ..... II-64

Tabel II-96 Perentase PMKS yang tertanganidi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 ..... II-64
Tabel II-97 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap daruratdi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 ..... II-65
Tabel II-98 Persentase penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 ....II-65
Tabel II-99 Angka sengketa pengusaha-pekerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 ..... II-66
Tabel II-100 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) ..... II-66
Tabel II-101 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 ..... II-66
Tabel II-102 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 ..... II-67
Tabel II-103 Besaran Pemeriksaan Perusahaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 ..... II-67
Tabel II-104 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 ..... II-67
Tabel II-105 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 ..... II-68
Tabel II-106 Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 ..... II-68
Tabel II-107 Rasio daya serap tenaga kerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 II-68
Tabel II-108 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 ..... II-68
Tabel II-109 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat... II-69
Tabel II-110 Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 ..... II-69
Tabel II-111 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 ..... II-69
Tabel II-112 Partisipasi perempuan di lembaga swasta Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 ..... II-70
Tabel II-113 Rasio KDRT Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 ..... II-70
Tabel II-114 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 ..... II-70
Tabel II-115 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan Terpadu Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 ..... II-70
Tabel II-116 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022..... II-71
Tabel II-117 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 ..... II-71
Tabel II-118 Indikator Urusan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022..... II-72
Tabel II-119 Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-72
Tabel II-120 Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten BulukumbaTahun 2018-2022 ..... II-73
Tabel II-121 Luas Lahan Bersetifikat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022..... II-73
Tabel II-122 Penyelesaian kasus tanah Negara di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-73

Tabel II-123 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-74
Tabel II-124 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-74
Tabel II-125 Hasil Pengukuruan IKTL Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-74
Tabel II-126 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-75
Tabel II-127 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA ..... II-75
Tabel II-128 Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-75
Tabel II-129 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-76
Tabel II-130 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-76
Tabel II-131 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-76
Tabel II-132 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 II-76
Tabel II-133 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-77
Tabel II-134 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-77
Tabel II-135 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kotaKabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-77
Tabel II-136 Timbulan sampah yang ditangani Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 II-78
Tabel II-137 Persentase jumlah sampah yang tertangani Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-78
Tabel II-138 TabelOperasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-79
Tabel II-139 Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-79
Tabel II-140 Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-79
Tabel II-141 Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-80
Tabel II-142 Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-80
Tabel II-143 Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-80
Tabel II-144 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang Baik Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-83
Tabel II-145 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-83
Tabel II-146 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-84
Tabel II-147 Persentase PKK aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-84
Tabel II-148 Persentase Posyandu aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-85

Tabel II-149 Persentase LSM aktif dan Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-86
Tabel II-150 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-86
Tabel II-151 Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022..... II-87
Tabel II-152 Persentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung Kb Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-87
Tabel II-153 Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Bulukumba 2018-2022 ..... II-88
Tabel II-154 Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yg Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-88
Tabel II-155 Jumlah Sektor Yg Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-88
Tabel II-156 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-89
Tabel II-157 Rata-rata jumlah anak per keluarga Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-89
Tabel II-158 Ratio Akseptor KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022..... II-90
Tabel II-159 Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-90
Tabel II-160 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19)Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-90
Tabel II-161 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-91
Tabel II-162 Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-91
Tabel II-163 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-91
Tabel II-164 Persentase Tinggkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-92
Tabel II-165 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-92
Tabel II-166 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-92
Tabel II-167 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-93
Tabel II-168 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-93
Tabel II-169 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-93
Tabel II-170 Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dibidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-94
Tabel II-171 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber- KB Mandiri Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 .II-94

Tabel II-172 Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..II-94
Tabel II-173 Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022..... II-95
Tabel II-174 Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KB/KR Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-95
Tabel II-175 Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di Setiap Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022..... II-95
Tabel II-176 Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-96
Tabel II-177 Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022..... II-96
Tabel II-178 Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-96
Tabel II-179 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-96
Tabel II-180 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-97
Tabel II-181 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Bulukumba..... II-97
Tabel II-182 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten BulukumbaTahun 2018-2022 ..... II-97
Tabel II-183 Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-98
Tabel II-184 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-98
Tabel II-185 Pemasangan Rambu-Rambu Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-98
Tabel II-186 Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-98
Tabel II-187 Rasio Ijin Trayek Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022..... II-99
Tabel II-188 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022..... II-99
Tabel II-189 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-99
Tabel II-190 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022.....II-100
Tabel II-191 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 .....II-100
Tabel II-192 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 .....II-100
Tabel II-193 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022.....II-101
Tabel II-194 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 .....II-101
Tabel II-195 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 II-101
Tabel II-196 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022.....II-101
Tabel II-197 Jumlah Nilai Investor Berskala Nasional PMA/PMDN Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022.....II-102

Tabel II-198 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-102
Tabel II-199 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-103
Tabel II-200 Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-103
Tabel II-201 Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-104
Tabel II-202 Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-104
Tabel II-203 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-105
Tabel II-204 Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-105
Tabel II-205 Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-106
Tabel II-206 Buku ”Kabupaten Dalam Angka” Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-106
Tabel II-207 Buku ”PDRB” Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-106
Tabel II-208 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-107
Tabel II-209 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-107
Tabel II-210 Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-108
Tabel II-211 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-108
Tabel II-212 Tabel Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-109
Tabel II-213 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-109
Tabel II-214 Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-109
Tabel II-215 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-110
Tabel II-216 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-110
Tabel II-217 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-110
Tabel II-218 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-111
Tabel II-219 Capaian Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-111
Tabel II-220 Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-112
Tabel II-221 Kunjungan Wisata Kabupaten Bulukumba 2018-2022 ..... II-112
Tabel II-222 Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Bulukumba 2018-2022 ..... II-112
Tabel II-223 PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Bulukumba 2018-2022 ..... II-112
Tabel II-224 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-113
Tabel II-225 Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-113
Tabel II-226 Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Bulukumba 2018-2022 ..... II-113
Tabel II-227 Jumlah Pelanggan listrik Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-114
Tabel II-228 Cakupan Bina Kelompok Perdagangan di Kabupaten Bulukumba 2018-2022 ..... II-114
Tabel II-229 Jumlah Pasar berdasarkan Kecamatan, Tipe serta Alamat Kabupaten Bulukumba tahun 2020 ..... II-115

Tabel II-230 Produktivitas Sektor Industri di Kabupaten Bulukumba, 2018-2022.....II-116
Tabel II-231 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 .....II-116
Tabel II-232 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kabupaten BulukumbaTahun 2018-2022 .....II-117
Tabel II-233 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 .....II-117
Tabel II-234 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 .....II-118
Tabel II-235 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun2018-2022 .....II-118
Tabel II-236 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022.....II-118
Tabel II-237 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022.....II-118
Tabel II-238 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 .....II-119
Tabel II-239 Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022.II-119
Tabel II-240 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022.....II-120
Tabel II-241 Persentase belanja pendidikan (20%) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 .....II-120
Tabel II-242 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 .....II-120
Tabel II-243 Penetapan APBD (tepat waktu/tidak)Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 .....II-121
Tabel II-244 Bagi hasil kabupaten/kota dan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 .....II-121
Tabel II-245 Persentase PAD terhadap PendapatanKabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 .....II-122
Tabel II-246 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 .....II-123
Tabel II-247 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 .....II-123
Tabel II-248 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 .....II-123
Tabel II-249 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 .....II-124
Tabel II-250 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 .....II-124
Tabel II-251 Persentase tindak lanjut temuan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022...II-124
Tabel II-252 Persentase pelanggaran Pegawai Kabupaten Bulukumba 2018-2022 .....II-125
Tabel II-253 Jumlah temuan BPK Kabupaten Bulukumba 2018-2022.....II-125
Tabel II-254 Persentase implementasi rencana Kelitbangan Kabupaten Bulukumba 2018-2022 .....II-125
Tabel II-255 Persentase pemanfaatan hasil KelitbanganKabupaten Bulukumba 2018-2022 .....II-126
Tabel II-256 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Kabupaten Bulukumba 2018-2022 .....II-126

Tabel II-257 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Kabupaten Bulukumba 2018-2022 ....II-127
Tabel II-258 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kabupaten Bulukumba 2018-2022....II-127
Tabel II-259 Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba 2018-2022 II-128
Tabel II-260 Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Bulukumba 2018-2022 ....II-128
Tabel II-261 Rasio tempat ibadah persatuan penduduk Kabupaten Bulukumba 2018-2022 ....II-128
Tabel II-262 Nilai Tukar Petani Tahun 2018-2022 ....II-130
Tabel II-263 Kesesuaian Pemanfataan Ruang Sesuai RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ....II-131
Tabel II-264 Hasil Analis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 ....II-132
Tabel II-265 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) ....II-143
Tabel II-266 Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..II-148
Tabel II-267 Identifikasi Masalah hambatan dan kendala dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ....II-162
Tabel II-268 Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD....II-166
Tabel II-269 Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD ....II-168
Tabel II-270 Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD ....II-170
Tabel II-271 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 ....II-172
Tabel II-272 Skala Nilai Peringkat Kinerja....II-174
Tabel II-273 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Keuangan Evaluasi Hasil RKPD ....II-174
Tabel II-274 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba ....II-177
Tabel II-275 Daftar Inovasi Kabupaten Bulukumba ....II-304
Tabel III-1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... III-5
Tabel III-2 Perbandingan Laju Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022. III-6
Tabel III-3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 .... III-6
Tabel III-4 Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... III-6
Tabel III-5 Perkembangan Indeks Gini Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022. III-7
Tabel III-6 Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Kabupaten Bulukumba Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022 (persen) ....III-10
Tabel III-7 Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2018- 2022....III-11
Tabel III-8 Realisasi, Asumsi dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2024 ....III-17
Tabel III-9 Realisasi, Asumsi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2024 ....III-22
Tabel III-10 Realisasi, Asumsi dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2024....III-24
Tabel III-11 Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022III-25
Tabel IV-1 Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026 ....IV-2

Tabel IV-2 Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 IV-2
Tabel IV-3 Tujuan dan sasaran serta target Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... IV-4
Tabel IV-4 Keterkaitan RKPD Kab. Bulukumba Tahun 2023 antara sasaran RPJPD Kab. Bulukumba Tahun 2005-2025 dengan sasaran RPD Prov. Sulawesi Selatan 2024-2026 dan RPJMN 2020-2024 ..... IV-7
Tabel IV-5 Prioritas Nasional dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... IV-12
Tabel IV-6 Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ... IV-13
Tabel IV-7 Sasaran Pembangunan Tahun 2024 ..... IV-16
Tabel IV-8 Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2024 ..... IV-19
Tabel IV-9 Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah untuk Tahun 2024 ..... IV-22
Tabel IV-10 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2024 ..... IV-24
Tabel IV-11 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2024 dengan Sasaran RPJMD untuk Tahun 2024 ..... IV-31
Tabel IV-12 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2024 ..... IV-33
Tabel IV-13 Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Terhadap Prioritas Provinsi Tahun 2024 ..... IV-36
Tabel IV-14 Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2024 ..... IV-44
Tabel IV-15 Indikator Kinerja Makro Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... IV-55
Tabel IV-16 Matriks Integrasi TPB/SDGs Terhadap Program Prioritas RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... IV-60
Tabel V-1 Rincian Rencana Pendanaan Tahun 2024 ..... V-1
Tabel V-2 Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... V-3
Tabel V-3 Rekap pagu Matriks Rencana Kerja dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 Kabupaten Bulukumba ..... V-15
Tabel V-4 Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... V-17
Tabel VI-1 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2024 ..... VI-1
Tabel VI-2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2024 Kabupaten Bulukumba ..... VI-2
Tabel VI-3 Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022 dan Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023-2024 Kabupaten Bulukumba ..... VI-3
Tabel VI-4 Capaian Indikator SPM Tahun 2022 dan Target Indikator SPM Tahun 2023-2024 Kabupaten Bulukumba ..... VI-18
Tabel VI-5 Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 VI-21

# Daftar Gambar

Gambar I-1 Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... I-4
Gambar II-1 Peta Administratif Kabupaten Bulukumba ..... II-1
Gambar II-2 Peta Topografi Bulukumba ..... II-2
Gambar II-3 Peta Geologi Bulukumba ..... II-3
Gambar II-4 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bulukumba ..... II-4
Gambar IV-1 Tema RKP Tahun 2024 dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 ..... IV-11
Gambar IV-2 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 ..... IV-12
Gambar IV-3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 ..... IV-12

# Daftar Grafik

Grafik II-1 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, 2022 ..... II-3
Grafik II-2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bulukumba Menurut Kecamatan Tahun 2022 ..... II-7
Grafik II-3 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018-2022 ..... II-10
Grafik II-4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan target daerah dan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2022 ..... II-11
Grafik II-5 Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022 ..... II-15
Grafik II-6 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Target Daerah, dan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional ..... II-16
Grafik II-7 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara tahun 2018-2022 ..... II-17
Grafik II-8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (periode Agustus) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 – 2022 ..... II-19
Grafik II-9 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) Kabupaten Bulukumba Dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2022 ..... II-21
Grafik II-10 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Persen), Tahun 2022 ..... II-22
Grafik II-11 Perbandingan Perubahan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba ..... II-22
Grafik II-12 Perbandingan Capaian Gini Ratio dengan target Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2022 ..... II-23
Grafik II-13 Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2022 ..... II-25
Grafik II-14 Perbandingan Capaian IPM dengan target Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2022 ..... II-26
Grafik II-15 Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2022 ..... II-27
Grafik II-16 Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan Nasional, 2018-2022 ..... II-28
Grafik II-17 Perbandingan Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bulukumba, dengan Rata-Rata Wilayah Setara tahun 2021 ..... II-29
Grafik II-18 Perbandingan Capaian Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bulukumba, dengan Rata-Rata Wilayah Setara tahun 2018-2022 ..... II-31
Grafik II-19 Perbandingan Capaian harapan Lama sekolah (HLS-Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi, Selatan dengan Nasional, 2018-2022 ..... II-32
Grafik II-20 Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita (Juta Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, Tahun 2018-2022 ..... II-33
Grafik II-21 Perbandingan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan Nasional, 2018-2022 ..... II-34
Grafik II-22 Perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita ADHB dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Tahun 2018-202 ..... II-36
Grafik II-23 Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Capaian Nasional, Tahun 2022 ..... II-37
Grafik II-24 Perkembangan Laju Inflasi Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan ..... II-38
Grafik II-25 Rata-rata Nilai Konsumsi/Pengeluaran Per Rumah Tangga Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 ..... II-129

Grafik II-26 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Kabupaten Bulukumba 2018 – 2022 ..... II-129
Grafik II-27 Angka Kriminalitas yang tertangani Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-131
Grafik II-28 Rasio ketergantungan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 ..... II-131
Grafik III-1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian Tahun 2022, Perkiraan Capaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024 ..... III-9
Grafik III-2 PDRB Perkapita Sulawesi Selatan, Capaian 2022, Perkiraan 2023 dan Target 2024 ..... III-11
Grafik III-3 Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024 ..... III-12
Grafik III-4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024 ..... III-12
Grafik III-5 Gini Rasio Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional III-13
Grafik III-6 Inflasi Kabupaten Bulukumba, 2018-2022 ..... III-14

# Daftar Kuadran

Kuadran II-1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2022 (Analisis Kuadran Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Rata-Rata Capaian Wilayah) ..... II-10
Kuadran II-2 Analisis Kuadran Perubahan Angka Kemiskinan Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018-2022 ..... II-15
Kuadran II-3 Analisis Kuadran Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara (2018-2022) ..... II-18
Kuadran II-4 Analisis Kuadran Perubahan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018-2022 ..... II-21
Kuadran II-5 Analisis Kuadran Perubahan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018-2022 ..... II-23
Kuadran II-6 Analisis Kuadran Pertumbuhan IPM Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018 – 2022 ..... II-25
Kuadran II-7 Analisis Kuadran Pertumbuhan RLS Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018 – 2022 ..... II-27
Kuadran II-8 Analisis Kuadran Perubahan Nilai UHH Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018 – 2022 ..... II-29
Kuadran II-9 Analisis Kuadran Perubahan Nilai HLS Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018 - 2022 ..... II-32
Kuadran II-10 Analisis Kuadran Perubahan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah tahun 2022 ..... II-34
Kuadran II-11 Analisi Kuadran Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHB) Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah, Tahun 2018-2022 ..... II-36

# Lampiran – lampiran

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 18 TAHUN 2023 TANGGAL 7 JULI 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024

**LAMPIRAN**
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 18 TAHUN 2023
TANGGAL : 7 JULI 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Daerah sesuai dengan kewenangannya di wajibkan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam RKPD untuk setiap tahunnya. Serta dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 juga berpedoman pada RKP Nasional 2024 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024. Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Sistematika dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pada Pasal 16 Ayat (1) ini mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, Pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Dalam menyusun RKPD digunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari rembug warga, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada subtansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022 serta dinamika dampak sosial dan ekonomi. Adapun capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 3,81 %, Tingkat Kemiskinan 7,39 %, Tingkat Pengangguran Terbuka 1,26 %, Gini Ratio 0,361, Indeks Pembangunan Manusia 70,34 Angka/Nilai dan PDRB Perkapita (ADHB) 38,55 Juta/Rp.

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun RKPD ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1);

## 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai satu kesatuan dari seluruh rangkaian proses perencanaan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan keterkaitan tersebut dapat dilihat dengan mengukur target kinerja yang ditetapkan pada setiap dokumen perencanaan, serta dengan melihat tingkat konsistensi, kesesuaian tujuan, serta tahapan penyusunan dan pelaksanaan tiap dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang merupakan upaya pemerintah dalam merealisasikan target pembangunan jangka panjang daerah Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada alur berikut:

**Gambar I-1**
**Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

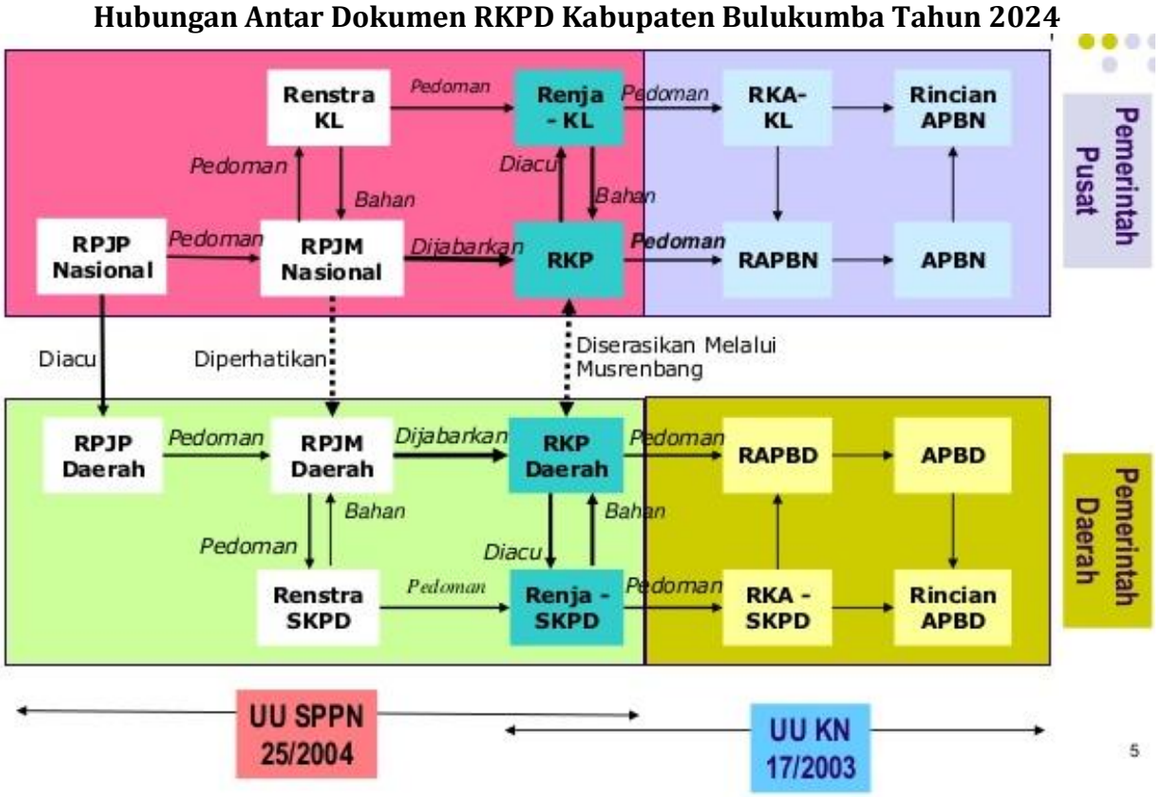


*Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah*

RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 mengacu berbagai substansi dalam RKP nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara nasional, RKP nasional harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024. Meskipun RKPD harus berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bulukumba, tetapi dinamika nasional dalam rentang waktu tahuan tidak dapat diabaikan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan Kabupaten Bulukumba

Selanjutnya, RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 juga harus mengacu berbagai substansi dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024. Dinamika regional tahunan memerlukan antisipasi ataupun dukungan agar dapat memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Wilayah Kabupaten Bulukumba yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan,

sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan Provinsi terkait dengan keberadaan kota atau kabupaten lain di sekitar wilayah Kabupaten Bulukumba dan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 berpedoman dan merupakan penjabaran Tahun Ketiga dari RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 terkait perencanaan di tahun 2024. Program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD diuraikan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Selain untuk menjabarkan, melalui RKPD dapat diketahui hasil-hasil capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode perencanaan dalam RPJMD.

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal.. Sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanahkan bahwa Peraturan Bupati tentang RKPD dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten, sebagai landasan penyusunan rancangan APBD yang akan dibahas antara Bupati dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD.

## 1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 yaitu:

1. Penjabaran dari Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
2. Pedoman perumusan dan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
3. Pedoman penyelerasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten; dan
4. Pedoman dalam memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
5. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
6. Pedoman untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
7. Sebagai tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 yaitu:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2024;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan provinsi Sulawesi-Selatan.

## 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB ini memuat latar belakang penyusunan dokumen RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan BAB serta garis besar isi setiap BAB didalamnya.

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Pada BAB ini dijelaskan mengenai gambaran umum kondisi daerah, aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan, Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, serta permasalahan pembangunan dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Pada BAB ini dijelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Pada BAB ini dijelaskan secara eksplisit terkait tema, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 disinergikan dengan perencanaan tingkat provinsi dan nasional.

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Pada BAB ini dijelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD tahun rencana, instansi pelaksana/OPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya dalam bentuk matriks program dan rencana kegiatan pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Pada BAB ini ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

**BAB VII PENUTUP**

Pada BAB ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154.58 km$^2$.

Adapun dengan batas -batas wilayah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan selayar
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

**Gambar II-1**
**Peta Administratif Kabupaten Bulukumba**

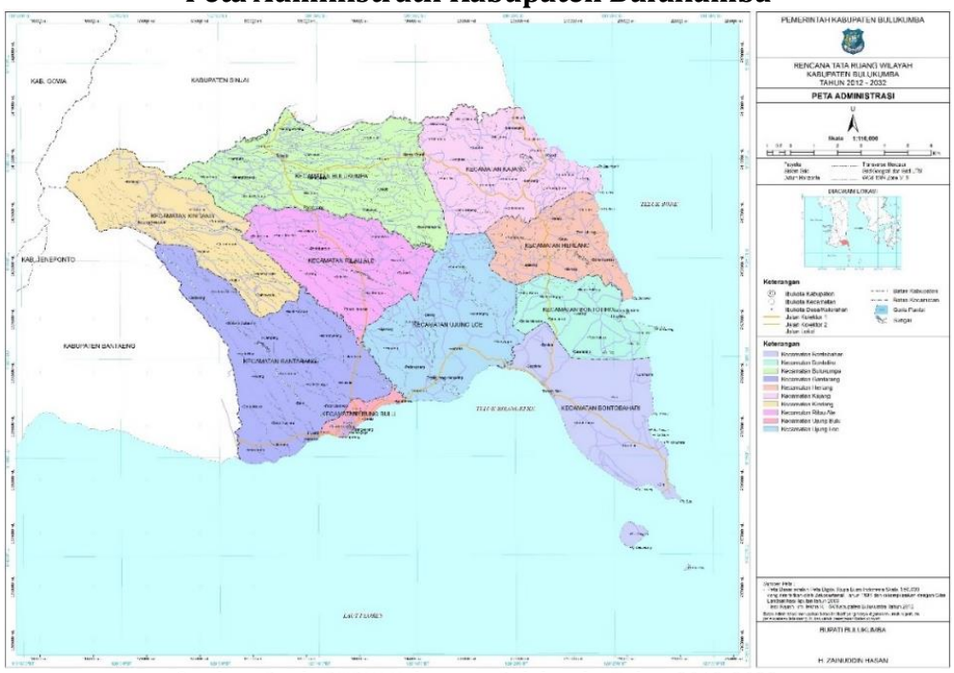


*Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032*

Kabupaten Bulukumba memiliki kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa, yang masing-masing seluas 173.51 km$^2$ dan 171.33 km$^2$ . Sementara, Kecamatan Ujung Bulu yang merupakan pusat kota memiliki luas wilayah terkecil hanya sekitar 14.44 km$^2$. Kabupaten Bulukumba secara administratif terdiri dari 10 kecamatan, 27 kelurahan dan 109 desa. Adapun luas wilayah pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel II-1 berikut.

**Tabel II-1**
**Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bulukumba**

| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa | Lingk. | Dusun | Luas Wilayah (km2) | % Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gantarang | 3 | 18 | 8 | 82 | 173,51 | 15,03 |
| 2. | Ujung Bulu | 9 | 0 | 31 | - | 14,44 | 1,25 |
| 3. | Ujung Loe | 1 | 12 | 4 | 42 | 144,31 | 12,50 |
| 4. | Bontobahari | 4 | 4 | 13 | 13 | 108,6 | 9,41 |
| 5. | Bontotiro | 1 | 12 | 5 | 45 | 78,34 | 6,79 |
| 6. | Herlang | 2 | 6 | 10 | 27 | 68,79 | 5,96 |

| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa | Lingk. | Dusun | Luas Wilayah (km2) | % Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Kajang | 2 | 17 | 11 | 100 | 129,06 | 11,18 |
| 8. | Bulukumpa | 3 | 14 | 7 | 76 | 171,33 | 14,84 |
| 9. | Rilau Ale | 1 | 14 | 5 | 58 | 117,53 | 10,18 |
| 10. | Kindang | 1 | 12 | 4 | 46 | 148,67 | 12,88 |
| Kabupaten Bulukumba | | **27** | **109** | **98** | **489** | **1.154,58** | **100.00** |

*Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032*

## 1. Letak dan Kondisi Geografis

Secara Geografis, Kabupaten Bulukumba berada terletak diantara 05°20´-05°40´ Lintang Selatan (LS) dan 119°58´-120°28´ Bujur Timur (BT) dan secara wilayah, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu phinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

## 2. Topografi

Kabupaten Bulukumba memiliki daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Disamping itu. Kabupaten Bulukumba memiliki Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Dan juga terdapat Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang. yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50.28% maka dataran tinggi mencapai 49.72%. Untuk lebih jelasnya topografi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar II-2**
**Peta Topografi Bulukumba**

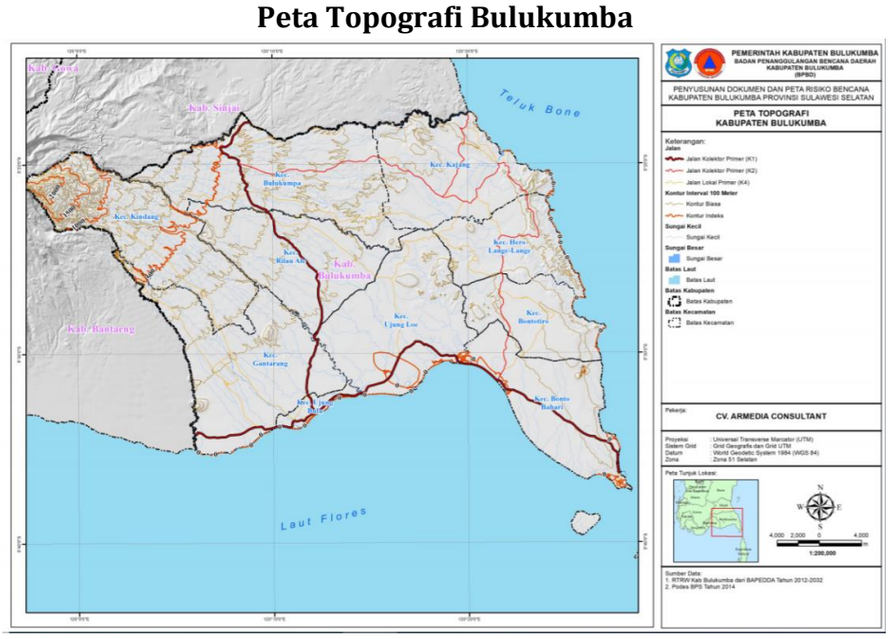


*Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032*

Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95.4 persen berada pada ketinggian 0 sampai dengan 500 meter Di Atas Permukaan Laut (DPL) dengan tingkat kemiringan tanah 0-400. Sementara itu, untuk kecamatan dengan jarak terjauh dari Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Kajang sekitar 62 km. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Grafik II-1**
**Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, 2022**

| Kecamatan | Tinggi Wilayah (mdpl) | Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Gantarang | 25 | 5 |
| Ujung Bulu | 0 | 1 |
| Ujung Loe | 26 | 11 |
| Bonto Bahari | 26 | 27 |
| Bontotiro | 100 | 35 |
| Herlang | 80 | 42 |
| Kajang | 80 | 62 |
| Bulukumpa | 100 | 31 |
| Rilau Ale | 100 | 24 |
| Kindang | 500 | 33 |

*Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023*

## 3. Geologi

Keberadaan satuan batuan yang menyusun geomorfologi Bulukumba mempunyai dimensi yang berbeda-beda. Batuan tertua berumur Miosen tengah (Bedrock) berada pada pemekaran dasar laut Teluk Bone sementara batuan termuda berumur Plistosen berada pada sesar Walanae di daratan Bulukumba (Formasi Lompobattang). Hal ini menandakan sistem tektonik yang bekerja tidak selalu sama. Untuk lebih jelasnya geologi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar II-3**
**Peta Geologi Bulukumba**

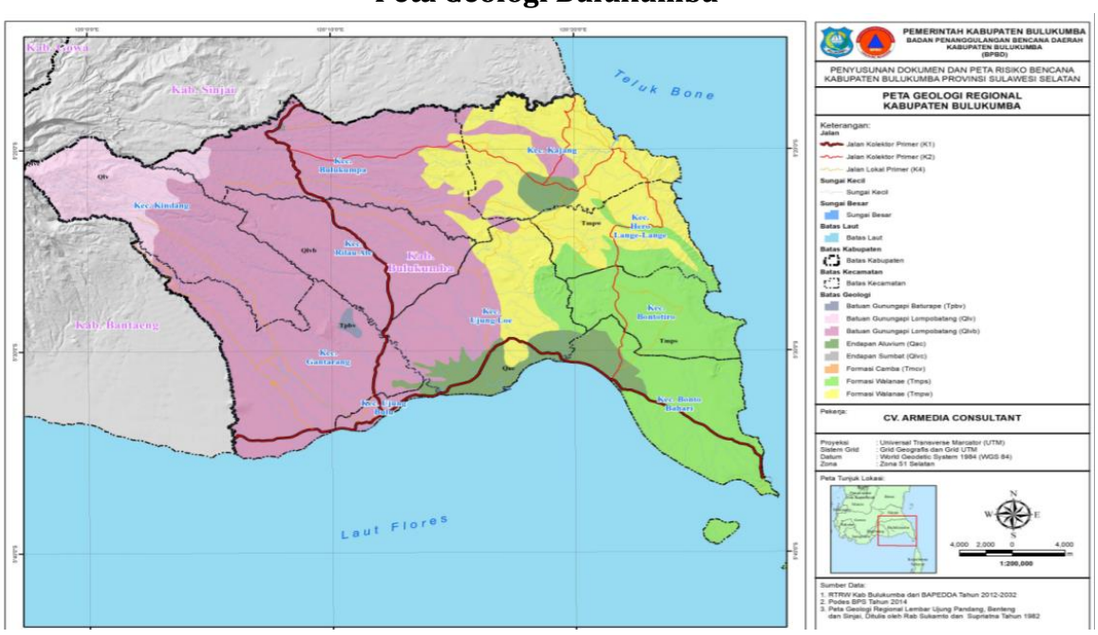


*Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032*

## 4. Hidrologi

Sungai di Kabupaten Bulukumba ada 43 aliran yang terdiri dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 772,5 km dan yang terpanjang adalah

sungai Balangbessi yakni 65.30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai Balibo yakni 5 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 Ha. Untuk lebih jelasnya hidrologi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar II-4 dan Tabel II-2 dibawah ini.

**Gambar II-4**
**Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bulukumba**

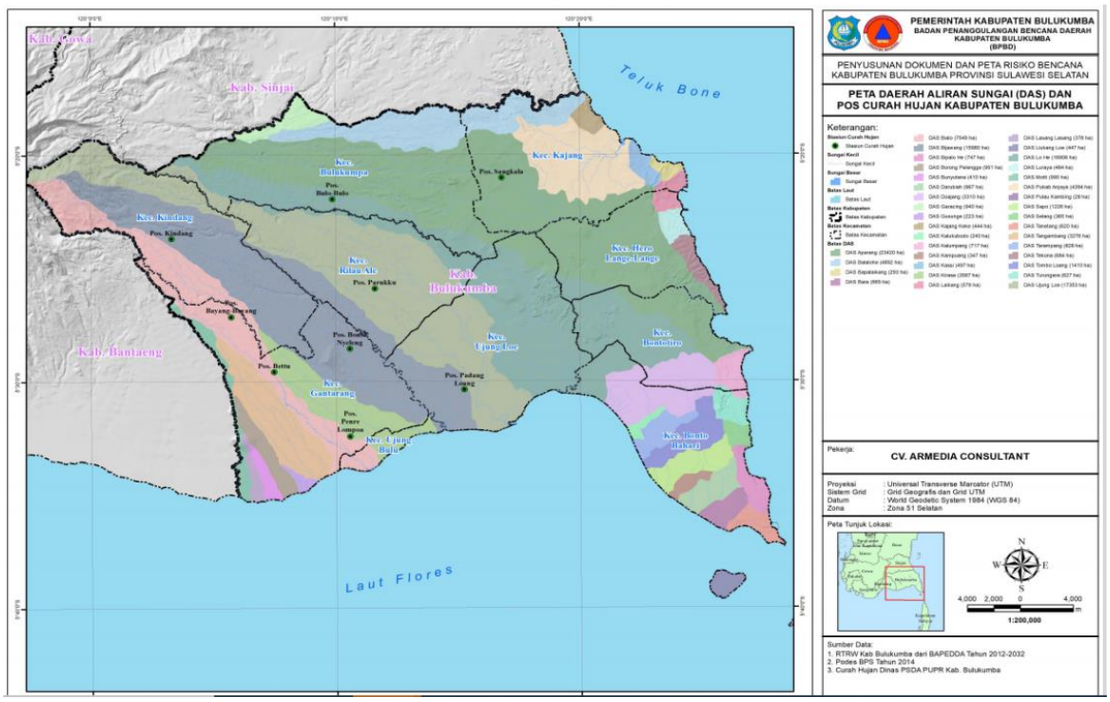


*Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032*

## 5. Klimatologi

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23.82 °C – 27.68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki 14 (empat belas) stasiun penakar hujan yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan. Intensitas curah hujan cukup tinggi di periode pertengahan desember sampai dengan pertengahan bulan maret. Dan sepanjang tahun Kabupaten Bulukumba mendapatkan curah hujan berada di atas 1000 mm/ tahun di seluruh kecamatan. Hampir sebagian besar Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan sebagian bagian selatan sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang, sedangkan pada sebagian bagian selatan curah hujannya rendah.
Curah hujan di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

- Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun, meliputi Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa.
- Curah hujan antara 1500 – 2000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Ujung Loe, Ujung Bulu, Bonto Tiro, Rilau Ale dan Kajang.
- Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, dan Kecamatan Bonto bahari.

### 2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Letak wilayah Kabupaten Bulukumba yang berhadapan langsung dengan Laut Flores menjadikan wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki gelombang pasang yang cukup tinggi. Daerah rawan abrasi terdapat di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari dan Kecamatan Herlang. Selain Abrasi,

Gempa Bumi juga kerap terjadi walaupun masih dalam magnitudo yang rendah, merupakan salah satu wilayah yang dilintasi oleh sesar aktif, yaitu Sesar Walanae membentang dari arah barat laut hingga tenggara di wilayah Sulawesi Selatan. Sesar ini memiliki panjang sekitar 130 Km dan tergolong jenis sesar strike-slip (sesar geser). Berdasarkan data seismisitas di wilayah Bulukumba dan sekitanya 5 tahun terakhir (data 2016- 2020) telah terjadi sebanyak 82 kejadian dan sebanyak 9 kejadian gempa bumi dirasakan selama 10 tahun terakhir (2009-2020).

Gempa bumi di wilayah Bulukumba dan sekitarnya didominasi oleh Gempabumi dangkal (H <60 km) dengan rentang magnitudo antara M 2.0 hingga M 5.0. peningkatan aktivitas terjadi pada tahun 2018 dimana jumlah gempa bumi menjadi 4-5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan aktivitas terjadi pada bulan Oktober hingga Desember 2018 pasca terjadinya Gempabumi Palu-Donggala.

Berdasarkan peta rawan tsunami, wilayah Bulukumba termasuk kedalam wilayah yang rawan terhadap tsunami. Hal ini dikarenakan secara historis Bulukumba pernah dilanda tsunami. Tsunami tersebut dibangkitkan oleh gempa bumi kuat yang terjadi di Utara Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terjadi pada tahun 1820 dan 1992. Kedua tsunami tersebut membangkitkan tsunami masing-masing setinggi 10 meter dan 25 meter. Tsunami tersebut melanda wilayah Bulukumba yaitu Kelurahan Terang Terang dan Desa Nipa- Nipa Kampong Nipa.

Potensi bencana berkaitan dengan tanah longsor, banjir dan angin puting beliung masih cukup besar dirasakan oleh masyarakat Bulukumba, mengingat letak Kabupaten Bulukumba yang tepat di Kaki Gunung Lompobattang dan beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti DAS Bialo, DAS Bijawang, DAS Balantieng, DAS Bonto Mate'ne, DAS Annyorang dan DAS Sangkala. Kondisi tanah yang labil dan perbukitan sehingga kerap terjadinya tanah longsor disaat intensitas hujan yang cukup tinggi. Tanah longsor terjadi di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kindang, Gantarang, Rilau Ale dan Kajang. Hasil survei juga menunjukkan bahwa kawasan lereng Gunung Lompobattang sudah mulai gundul dan berpontensial banjir bandang, karna aliran air dari puncak ke lereng gunung akan semakin besar.

Kebakaran merupakan bencana yang paling sering terjadi utamanya di musim kemarau. Untuk memadamkan kebakaran telah disediakan armada berjumlah 11 (sebelas) unit tetapi diantaranya 2 (dua) unit dalam kondisi rusak berat. Untuk mempercepat akses layanan ke titik lokasi kebakaran, maka sektor pemadam kebakaran ditempatkan disetiap kecamatan.

Jumlah personil pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan khusus Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulukumba berjumlah 117 orang. Sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub urusan kebakaran daerah/kota, disebutkan bahwa setiap 1 unit kendaraan mobil pemadam kebakaran dioperasikan oleh 6 personil dengan pembagian tugas : 1 orang sebagai komandan regu, 1 orang sebagai pengemudi sekaligus operator pompa dan 4 orang anggota petugas damkar yang dilengkapi dengan alat pelindung diri aparatur.

Selama tahun 2018- 2022 terjadi beberapa bencana di Kabupaten Bulukumba yang menimbulkan keprihatinan dan kerugian, baik berupa kerugian material dan non material. Sedangkan lokasi yang mengalami bencana tersebar di sepuluh kecamatan telah di rincikan berdasarkan data bencana lima tahun terakhir

Dari Keseluruhan bencana yang terjadi pada tahun 2018- 2022 telah ditempuh Tanggap Darurat korban bencana alam yang menyelenggarakan setelah terjadinya bencana alam (Pasca Bencana). Kegiatan tersebut meliputi kegiatan pemberian bantuan berupa

makanan dan pendirian shelter/hunian sementara bagi korban bencana serta rehabilitasi dan Rekonstruksi bangunan dan fasilitas umum.

Solusi yang di tempuh dalam mengatasi bencana terjadi yaitu telah dilayani dan diberikan bantuan berupa bantuan darurat yaitu :

- Makanan siap saji
- Tambahan gizi
- Alat dapur
- Peralatan makanan
- Terpal (Tenda gulung)
- Seragam sekolah
- Kebutuhan makanan baku

Untuk status bencana yang terjadi selama 5 tahun terakhir di wilayah Kabupaten Bulukumba hanya dikategorikan sebagai bencana lokal dan regional dan penanganannya bersumber dari APBD dan APBN.

Langkah pencegahan antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana antara lain :

1. Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC), Tanggap Darurat Bencana (Tagana), Satgas Damkar, dll;
2. Melaksanakan Posko Siaga Bencana;
3. Mempersiapkan Logistik;
4. Mempersiapkan Shelter (Hunian sementara) untuk masyarakat yang terkena bencana;
5. Mengkordinasikan kepada SKPD yang terkait;

**Tabel II-2**
**Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| No | Kecamatan | Jumlah | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Banjir | Tanah Longsor | Petir | Gempa Bumi | Kebakaran | Angin Kencang | Puting Beliung | Abrasi | Kebakaran Lahan | Operasi Penyelamatan dan Pencarian |
| 1 | Ujung Bulu | 5 | - | - | - | 20 | 32 | - | 4 | 4 | 7 |
| 2 | Ujung Loe | 3 | - | - | - | 2 | 12 | 2 | - | - | - |
| 3 | Gantarang | 5 | 1 | - | - | 6 | 29 | - | - | 1 | 2 |
| 4 | Kindang | 2 | 7 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | 1 |
| 5 | Bulukumpa | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | Riluau Ale | 3 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - |
| 7 | Kajang | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 8 | Herlang | - | 3 | - | - | 1 | 9 | 3 | - | - | 1 |
| 9 | Bonto Bahari | - | - | - | 6 | 2 | 5 | - | 1 | - | 3 |
| 10 | Bonto Tiro | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |

*Sumber : BPBD Kab. Bulukumba, 2023*

### 2.1.1.3 Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Bulukumba berdasarkan data BPS penduduk tahun 2022 adalah 443.292 jiwa, yang terdiri atas 216.265 jiwa penduduk laki-laki dan 227.027 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk di Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 0,74 persen. Sementara itu besarnya rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 96 persen, selengkapnya pada gambar berikut.

**1. Kepadatan Penduduk**

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bulukumba tahun 2022 mencapai 378,86 jiwa/km$^2$. Kepadatan Penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk

tertinggi terletak di Kecamatan Ujung Bulu dengan kepadatan sebesar 3.366,85 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kindang sebesar 218,39 jiwa/Km².

**Grafik II-2**
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bulukumba Menurut Kecamatan Tahun 2022**

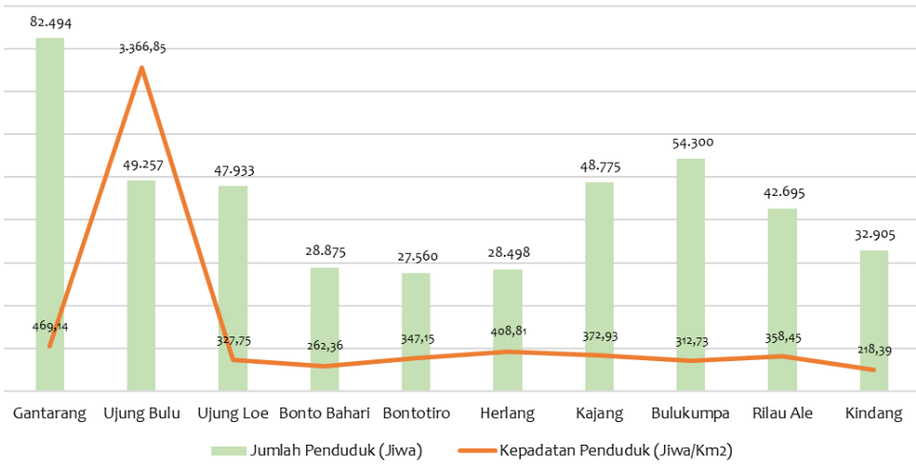


*Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba. 2023 (Diolah)*

Sebagaimana Tabel diatas menunjukkan bahwa Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar ialah Kecamatan Gantarang, dengan jumlah penduduk sebesar 82.494 jiwa dan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Bontotiro dengan jumlah penduduk sebesar 27.560 jiwa. Komposisi penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2022 jika dilihat dari diagram penduduk menunjukkan jenis ekspansif dimana jumlah penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan dan pada tahun 2020 dilakukan Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk pada tahun tersebut.

Berdasarkan data pada Tabel di bawah, pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba sebanyak 418.326 jiwa. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 mencapai 443.292 jiwa. Artinya selama lima tahun terkahir, jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba bertambah sekitar 24.966 jiwa atau 5,97 persen. Selengkapnya pada tabel berikut

**Tabel II-3**
**Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022**

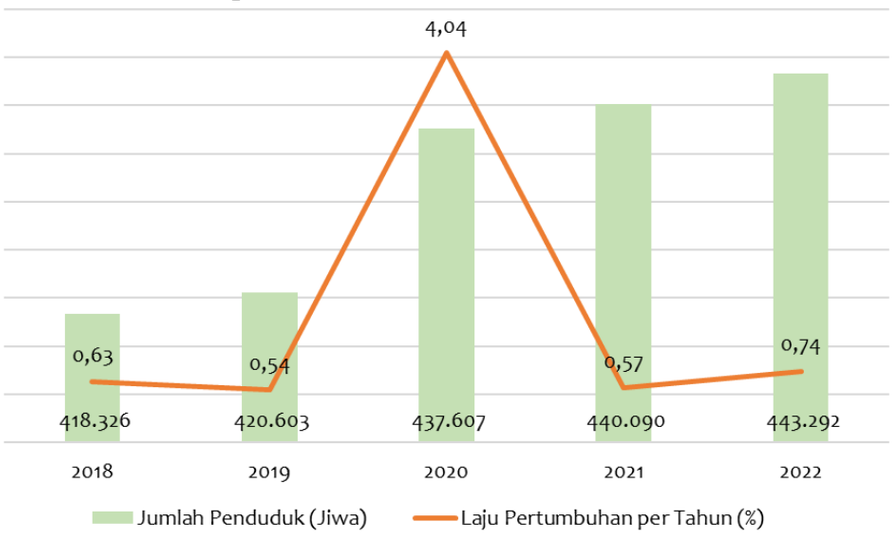


*Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba. 2023 (Diolah)*

**2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi/ rendahnya tingkat kelahiran. jumlah penduduk lansia serta dapat mencerminkan angka beban tanggungan. Angka beban tanggungan atau yang sering disebut Dependency Ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun & 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun). Dependency ratio dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-4**
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba, 2022**

| Kelompok Umur | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| | Laki-Laki | Perempuan | |
| 0–4 | 16.086 | 15.337 | 31.423 |
| 5–9 | 16.114 | 15.434 | 31.548 |
| 10–14 | 17.878 | 17.219 | 35.097 |
| 15–19 | 17.778 | 17.707 | 35.485 |
| 20–24 | 17.850 | 18.148 | 35.998 |
| 25–29 | 17.281 | 18.124 | 35.405 |
| 30–34 | 16.952 | 17.696 | 34.648 |
| 35–39 | 16.590 | 17.903 | 34.493 |
| 40–44 | 16.604 | 17.747 | 34.351 |
| 45–49 | 15.771 | 16.798 | 32.569 |
| 50–54 | 13.631 | 14.864 | 28.495 |
| 55–59 | 10.435 | 12.182 | 22.617 |
| 60–64 | 8.740 | 9.938 | 18.678 |
| 65–69 | 6.296 | 7.291 | 13.587 |
| 70–74 | 4.306 | 5.219 | 9.525 |
| 75+ | 3.953 | 5.420 | 9.373 |
| **Bulukumba** | **216.265** | **227.027** | **443.292** |

*Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023*

Selanjutnya, untuk mengetahui komposisi penduduk di Kabupaten Bulukumba menurut jenis kelaminnya. Rasio Jenis Kelamin (RJK) tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel, Informasi mengenai Rasio Jenis Kelamin dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-5**
**Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022**

| Kelompok Umur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **0 - 14** | 102,13 | 102,06 | 104,59 | 104,48 | 104,35 |
| **15 - 65** | 87,24 | 87,31 | 93,79 | 93,96 | 94,12 |
| **65 +** | 68,78 | 69,15 | 81,13 | 81,14 | 81,18 |
| **Total** | 89,55 | 89,54 | 95,22 | 95,24 | 95,26 |

*Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba. 2023 (Diolah)*

Pada tahun 2022, Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba sebesar 96 (dibulatkan). Artinya, setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 96 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, penduduk perempuan di Kabupaten Bulukumba lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jika dilihat menurut kelompok umur, komposisi penduduk usia 0-14

tahun justru menunjukkan perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Pada Tahun 2022, Rasio Jenis Kelamin untuk penduduk usia 0-14 tahun adalah sebesar 104,35. Sementara itu, untuk penduduk usia 15-16 tahun dan usia 65 tahun keatas komposisinya menunjukkan lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Rasio Jenis Kelamin penduduk usia 15-65 tahun sebesar 94,12 pada tahun 2022. Untuk penduduk usia 65 tahun keatas Rasionya sebesar 81,18.

### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, serta Seni Budaya dan Olahraga.

#### 2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis terhadap fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi Kumulatif, PDRB per kapita, Indeks Gini dan Kemiskinan.

**1. Petumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 sebesar 3,81 persen mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya sebesar 4,76 persen. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya yakni dari 4,65 persen menjadi 4,11 persen sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional mengalami kenaikan yakni 3,69 persen menjadi 5,31 persen.. Selengkapnya pada tabel di bawah ini.

**Tabel II-6**
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022**

| No. | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Kab. Bulukumba | % | 5,05 | 5,49 | 0,43 | 4,76 | 3,81 |
| 2 | Prov. Sulawesi Selatan | % | 7,06 | 6,92 | -0,70 | 4,65 | 4,11 |
| 3 | Nasional | % | 5,20 | 5,00 | -2,10 | 3,69 | 5,31 |

*Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2023*

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022 mengalami tren yang berfluktuasi, namun secara rata-rata mengalami perlambatan pada periode tersebut, dimana dengan kondisi pandemi covid-19 serta adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memberi konstribusi yang cukup besar akan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada hampir seluruh Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, pertumbuhan rata-ratanya masih relatif berimbang pada daerah setara, diantaranya Bulukumba, Jeneponto, Wajo, Sidrap dan Enrekang. Pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir terhadap daerah setara dengan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-7**
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022**

| Kabupaten/Kota | Pertumbuhan Ekonomi | | | | | Perubahan Persentase Pertumbuhan Ekonomi | Rata-rata capaian wilayah setara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Bulukumba | 5,05 | 5,49 | 0,43 | 4,76 | 3,81 | -0,95 | 3,91 |
| Jeneponto | 6,29 | 5,47 | 0,16 | 5,40 | 2,52 | -2,88 | 3,97 |
| Wajo | 1,08 | 4,06 | -1,17 | 6,77 | 2,29 | -4,48 | 2,61 |
| Sidrap | 5,02 | 4,65 | -0,59 | 5,54 | 3,51 | -2,03 | 3,63 |
| Enrekang | 3,26 | 5,43 | 1,25 | 6,36 | 2,31 | -4,05 | 3,72 |

*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022*

Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba mengalami perlambatan sebesar 3,81 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 4,76 persen. Adapun perbandingan Perkembangan pertumbuhan ekononi khususnya wilayah yang setara dengan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik II-3**
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi**
**dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018-2022**

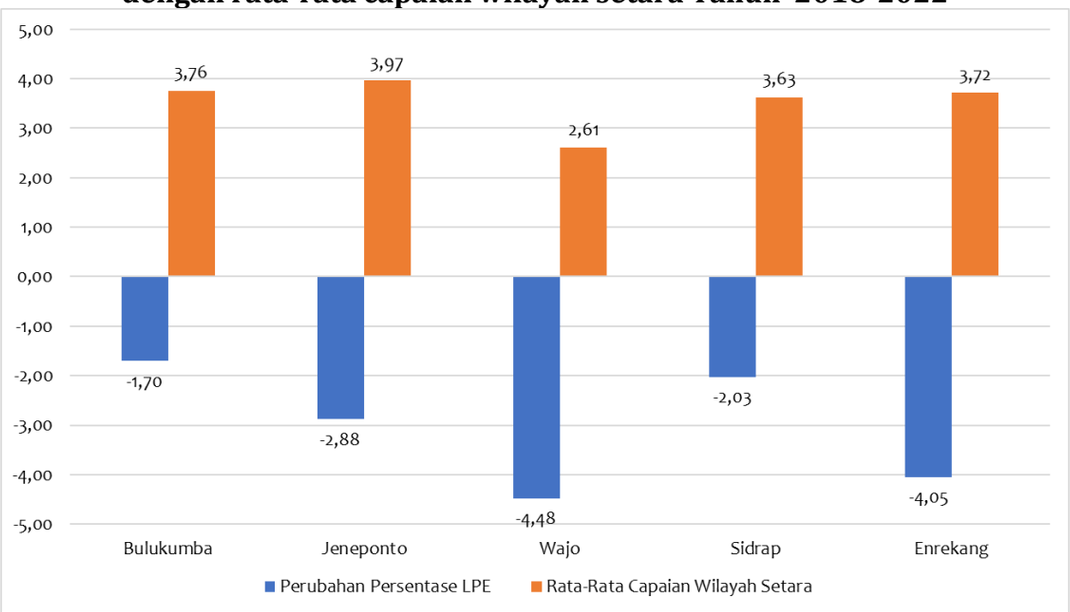


*Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023 (diolah)*

Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 secara Kuadran dapat dilihat pada gambar tabel berikut.

**Kuadran II-1**
**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2022**
**(Analisis Kuadran Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Rata-Rata Capaian Wilayah)**

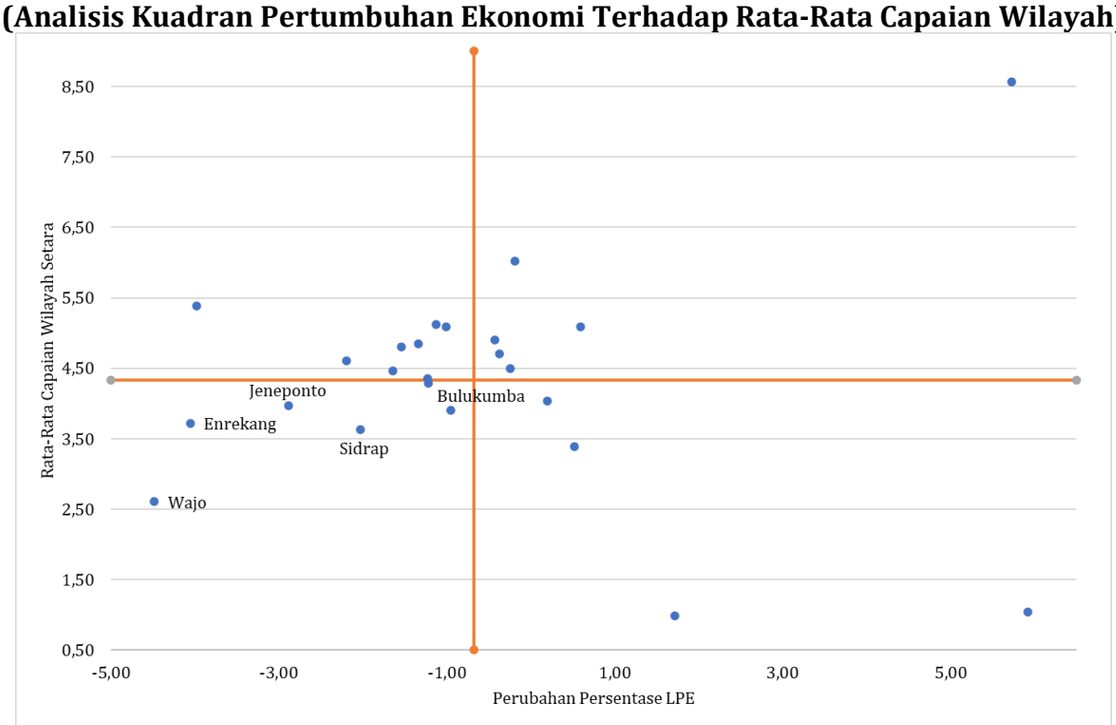


*Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023 (diolah)*

Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 belum mencapai target. Target Pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam perubahan RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2022 yaitu sebesar 4,98-6,60 persen dengan capaian yang sebesar 3,81 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2022 masih rendah jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,11 persen, dan Nasional sebesar 5,31 persen.

Adapun perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba dan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional sebagaimana pada grafik berikut.

**Grafik II-4**
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan target daerah dan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2022**

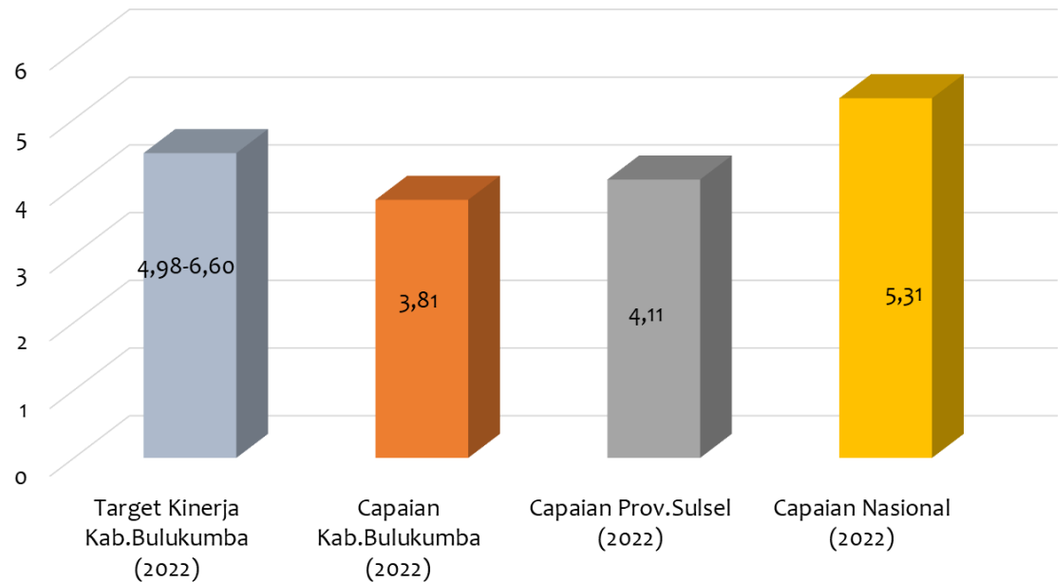


*Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023 (diolah)*

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Atas Dasar harga Konstan menurut lapangan usaha terdapat 11 kategori yang mengalami pertumbuhan positif dan yang paling terbesar yaitu pada Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) mengalami pertumbuhan sebesar 19,98 persen pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yaitu 5,88 persen sedangkan lapangan usaha yang mengalami kontraksi sebanyak 4 kategori dan yang mengalami kontraksi paling besar adalah kategori M,N Jasa Perusahan dengan capaian tahun 2022 sebesar -3,26 persen dari tahun sebelumnya sebesar 6,98 persen..

**Tabel II-8**
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulukumba (persen), 2018-2022**

| Lapangan Usaha | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,06 | 2,13 | -1,12 | 3,65 | 0,61 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 12,85 | 3,14 | 2,09 | 3,06 | -2,31 |
| C | Industri Pengolahan | 3,96 | 11,76 | -3,59 | 5,72 | 8,41 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 6,95 | 7,24 | 3,76 | 8,90 | 12,68 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 6,34 | 1,52 | 5,11 | 0,01 | 9,71 |
| F | Konstruksi | 9,59 | 3,27 | 5,11 | 5,12 | 7,12 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 9,73 | 9,93 | -1,25 | 6,51 | 5,37 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 9,46 | 9,67 | -14,41 | 5,95 | 10,17 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 16,8 | 5,22 | -1,99 | 5,88 | 19,98 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 9,27 | 7,66 | 11,92 | 4,42 | 6,79 |

| Lapangan Usaha | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 5,37 | 9,65 | 9,00 | 7,54 | 7,80 |
| L | Real Estate | 6,88 | 2,18 | 1,03 | 3,28 | 6,19 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 9,88 | 10,43 | -4,44 | 6,98 | -3,26 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 8,4 | 10,35 | -0,43 | 4,36 | -0,41 |
| P | Jasa Pendidikan | 9,12 | 3,31 | 9,27 | 4,12 | -0,19 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 9,66 | 5,71 | 6,31 | 6,39 | 10,07 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 13,11 | 11,91 | -1,20 | 8,81 | 17,63 |
| | **Produk Domestik Regional Bruto** | 5,05 | 5,49 | 0,43 | 4,76 | 3,81 |

*Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023*

Nilai PDRB Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan di berbagai sektor lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Bulukumba Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2022 sebesar 9.357,11 triliun rupiah, capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 yang nilainya sebesar 9.013,58 triliun rupiah. sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-9**
**Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**
**Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)**
**Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 – 2022**

| Lapangan Usaha | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2021** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 3.205,54 | 3.273,77 | 3.237,17 | 3.355,17 | 3.375,52 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 178,00 | 183,59 | 187,42 | 193,16 | 188,70 |
| C | Industri Pengolahan | 531,40 | 593,90 | 572,55 | 605,31 | 656,24 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 14,65 | 15,71 | 16,30 | 17,75 | 20,00 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 3,28 | 3,33 | 3,50 | 3,50 | 3,84 |
| F | Konstruksi | 736,06 | 760,12 | 798,97 | 839,87 | 899,64 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.313,97 | 1.444,43 | 1.426,38 | 1.519,22 | 1.600,79 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 181,50 | 199,06 | 170,37 | 180,51 | 198,87 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 55,91 | 58,83 | 57,66 | 61,05 | 73,25 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 317,01 | 341,29 | 381,98 | 398,86 | 425,95 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 277,46 | 304,23 | 331,60 | 356,59 | 384,41 |
| L | Real Estate | 385,26 | 393,67 | 397,74 | 410,78 | 436,21 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 1,63 | 1,80 | 1,72 | 1,84 | 1,78 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 508,42 | 561,04 | 558,61 | 582,95 | 580,57 |
| P | Jasa Pendidikan | 254,14 | 262,55 | 286,88 | 298,70 | 298,13 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 91,79 | 97,03 | 103,15 | 109,74 | 120,79 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 65,32 | 73,10 | 72,22 | 78,58 | 92,43 |
| | **Produk Domestik Regional Bruto** | 8.121,33 | 8.567,46 | 8.604,20 | 9.013,58 | 9.357,11 |

*Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023*

Tahun 2022 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Bulukumba mencapai 17.233,31 trilyun rupiah, nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 15.868,86 trilyun rupiah. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-10**
**Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 – 2022**

| Lapangan Usaha | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 * | 2022 * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 5.108,85 | 5.277,24 | 5.369,18 | 5.932,13 | 6.394,12 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 372,53 | 384,75 | 401,04 | 418,58 | 421,46 |
| C | Industri Pengolahan | 858,20 | 973,45 | 950,30 | 1.027,68 | 1.150,82 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 14,92 | 15,94 | 16,32 | 17,55 | 19,98 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4,11 | 4,33 | 4,57 | 4,87 | 5,40 |
| F | Konstruksi | 1.343,77 | 1.447,69 | 1.543,90 | 1.690,34 | 1.901,44 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2.165,28 | 2.443,28 | 2.463,87 | 2.684,24 | 2.923,62 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 307,38 | 339,97 | 301,70 | 338,75 | 397,41 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 98,28 | 108,36 | 106,66 | 114,06 | 138,59 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 407,89 | 459,68 | 516,01 | 550,88 | 596,45 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 442,49 | 501,22 | 547,00 | 605,56 | 697,13 |
| L | Real Estate | 594,23 | 618,54 | 626,14 | 648,71 | 697,34 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 4,31 | 4,84 | 4,76 | 5,17 | 5,20 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 802,42 | 907,92 | 919,62 | 969,45 | 971,48 |
| P | Jasa Pendidikan | 411,82 | 427,43 | 475,62 | 506,76 | 507,89 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 163,52 | 185,69 | 204,18 | 224,47 | 248,61 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 98,91 | 114,26 | 114,61 | 129,66 | 156,40 |
| | **Produk Domestik Regional Bruto** | 13.198,92 | 14.214,59 | 14.565,49 | 15.868,86 | 17.233,31 |

*Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023*

Struktur PDRB Kabupaten Bulukumba menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2022 masih didominasi oleh Lima lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (37,10 persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,96 persen); Konstruksi (11,03 persen); Industri Pengolahan (6,68 persen), serta Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial (5,64 persen).

**Tabel II-11**
**Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 – 2022**

| Lapangan Usaha | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 38,71 | 37,13 | 36,86 | 37,38 | 37,10 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 2,82 | 2,71 | 2,75 | 2,64 | 2,45 |
| C | Industri Pengolahan | 6,5 | 6,85 | 6,52 | 6,48 | 6,68 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| F | Konstruksi | 10,18 | 10,18 | 10,6 | 10,65 | 11,03 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 16,4 | 17,19 | 16,92 | 16,92 | 16,96 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 2,33 | 2,39 | 2,07 | 2,13 | 2,31 |

| Lapangan Usaha | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,74 | 0,76 | 0,73 | 0,72 | 0,80 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 3,09 | 3,23 | 3,54 | 3,47 | 3,46 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,35 | 3,53 | 3,76 | 3,82 | 4,05 |
| L | Real Estate | 4,5 | 4,35 | 4,3 | 4,09 | 4,05 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 6,08 | 6,39 | 6,31 | 6,11 | 5,64 |
| P | Jasa Pendidikan | 3,12 | 3,01 | 3,27 | 3,19 | 2,95 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,24 | 1,31 | 1,4 | 1,41 | 1,44 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 0,75 | 0,8 | 0,79 | 0,82 | 0,91 |
| | **Produk Domestik Regional Bruto** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023*

## 2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Salah satu aspek penting dalam mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah penyediaan data kemiskinan yang akurat. Secara umum, pada periode tahun 2018-2022, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada Tahun 2021. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi *Covid-19*.

Pada tahun 2022 Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba sebesar 31.290 jiwa, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2021 yang jumlahnya sebesar 31.310 Jiwa. Persentase penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 7,39 persen, capaian tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang jumlahnya sebesar 7,43 persen. Pada tahun 2022, Garis Kemiskinan sebesar Rp. 390.040/kapita/bulan.

**Tabel II-12**
**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022**

| Kabupaten/ Kota | Persentase Penduduk Miskin | | | | | Perubahan Persentase Penduduk Miskin | Rata-Rata Capaian Wilayah Setara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Bulukumba | 7,48 | 7,26 | 7,10 | 7,43 | 7,39 | -0,04 | 7,33 |
| Takalar | 9,00 | 8,70 | 8,44 | 8,25 | 8,25 | 0,00 | 8,53 |
| Sinjai | 9,28 | 9,14 | 9,00 | 8,84 | 8,80 | -0,04 | 9,01 |
| Soppeng | 7,50 | 7,25 | 7,59 | 7,53 | 7,49 | -0,04 | 7,47 |
| Wajo | 7,50 | 6,91 | 6,95 | 6,46 | 6,57 | 0,11 | 6,88 |
| Sidrap | 5,16 | 4,79 | 5,05 | 5,04 | 5,11 | 0,07 | 5,03 |
| Pinrang | 8,81 | 8,46 | 8,86 | 8,81 | 8,79 | -0,02 | 8,75 |
| Luwu Timur | 7,23 | 6,98 | 6,85 | 6,94 | 6,81 | -0,13 | 6,96 |
| Parepare | 5,59 | 5,26 | 5,44 | 5,40 | 5,41 | 0,01 | 5,42 |

*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 (diolah)*

Jika diperbandingkan persentase penduduk miskin secara rata-rata dalam kurun waktu tahun 2018-2022, persentase kemiskinan tertinggi berada pada Kabupaten Sinjai dengan nilai rata-rata sebesar 9,01 persen dan disusul oleh Kabupaten Pinrang sebesar 8,75 persen. Adapun rata-rata persentse kemiskinan yang terendah adalah Sidrap yaitu 5,03

persen, demikian pula perubahan persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan dan daerah setaranya dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik II-5**
**Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022**

*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 (diolah)*

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi kemiskinan, baik itu berdasarkan jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskinnya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

**Kuadran II-2**
**Analisis Kuadran Perubahan Angka Kemiskinan Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018-2022**

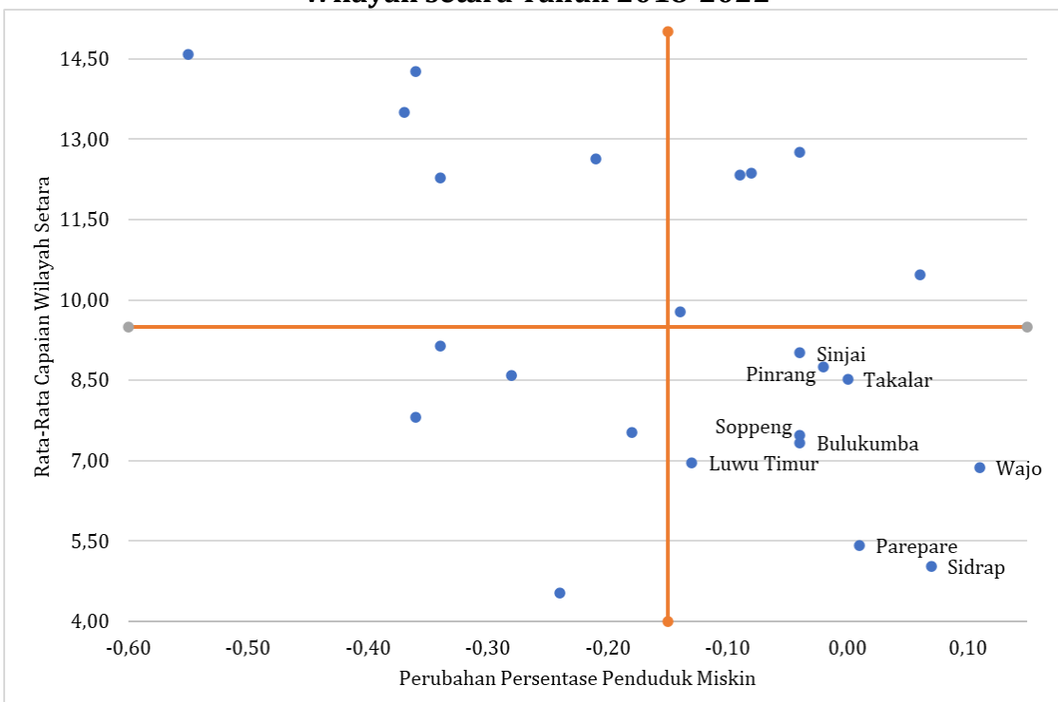


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 (diolah)*

Adapun target Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 adalah 6,62 persen dengan capai diangka 7,39 persen (lebih tinggi daripada angka target), ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan

jumlah penduduk miskin dari perhitungan target sebelumnya. Akan tetapi Kabupaten Bulukumba masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang mencapai angka 9,57 persen dan 8,63 persen. Secara lengkap perbandingan antara target Kabupaten Bulukumba dengan capaian perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik II-6**
**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Target Daerah, dan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional**

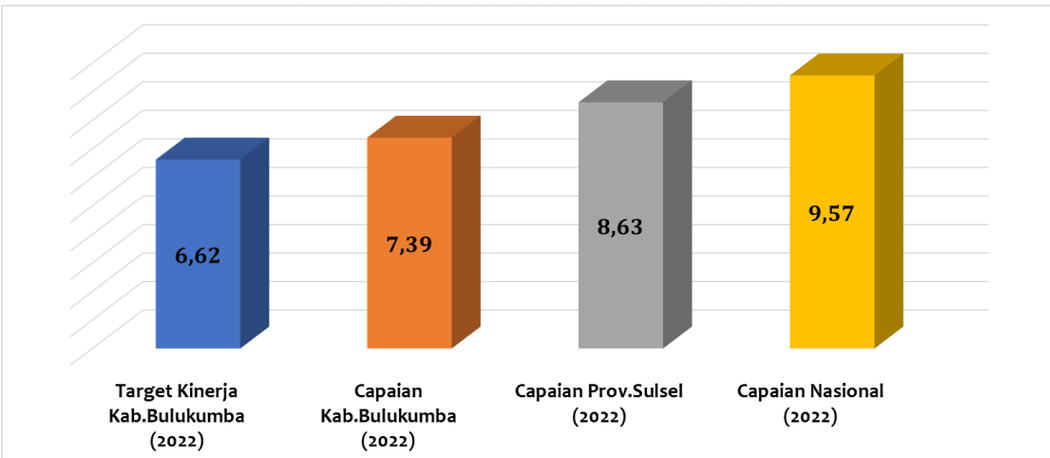


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 (diolah)*

Periode tahun 2018-2022 garis kemiskinan di Kabupaten Bulukumba terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, garis kemiskinan mencapai Rp.369.022, kemudian meningkat menjadi Rp.390.040 atau meningkat sebesar Rp.21.018,-/kapita/bulan pada tahun 2021. Jika diperbandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, rata-rata capaian Garis Kemiskinan Kabupaten Bulukumba masih lebih rendah dalam kurun waktu 2018-2022. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-13**
**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022**

| Wilayah/Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Garis Kemiskinan Kab. Bulukumba | Rp/Kapita/ Bulan | 310.753 | 330.161 | 351.180 | 369.022 | 390040 |
| Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan | Rp/Kapita/ Bulan | 315.738 | 341.555 | 362.031 | 384.455 | 399.755 |
| Garis Kemiskinan Nasional | Rp/Kapita/ Bulan | 408.962 | 423.231 | 338.699 | 486.168 | 505.469 |

*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 (diolah)*

Ditinjau dari jumlah penduduk diatas garis kemiskinan menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba sebesar 92,52 persen, lebih tinggi dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan 90,94 persen dan Nasional 90,34 persen. Demikian pula halnya pada tahun 2022, penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba sebesar 92,61 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk diatas garis kemiskinan Sulawesi Selatan sebesar 91,37 persen, dan Nasional yaitu 90,43 persen.

**Tabel II-14**
**Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2018-2022**

| Wilayah | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ***Penduduk di Atas Garis Kemiskinan*** | | | | | | |
| **Kab. Bulukumba** | % | 92,52 | 92,74 | 92,90 | 92,57 | 92,61 |
| **Prov. Sulawesi Selatan** | % | 90,94 | 91,31 | 91,28 | 91,22 | 91,37 |
| **Nasional** | % | 90,34 | 90,59 | 90,22 | 90,29 | 90,43 |

*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

Perbandingan penduduk diatas garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional tersebut, menunjukkan bahwa kinerja penurunan kemiskinan kabupaten Bulukumba lebih baik daripada kinerja penurunan kemiskinan di Sulawesi Selatan dan Nasional.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada tahun 2022 Jumlah Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba sebesar 0,99 nilai indeks, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang nilainya sebesar 1,00 nilai indeks. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-15**
**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (Persen) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022**

| Kabupaten/ Kota | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | | | | | Perubahan Persentase | Rata-Rata Capaian Wilayah Setara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Bulukumba | 1,06 | 0,60 | 0,71 | 1,00 | 0,99 | -0,01 | 0,87 |
| Bantaeng | 1,74 | 1,35 | 0,97 | 1,23 | 1,32 | 0,09 | 1,32 |
| Gowa | 1,25 | 0,92 | 1,18 | 1,38 | 1,13 | -0,25 | 1,17 |
| Wajo | 1,24 | 1,06 | 0,98 | 0,79 | 0,86 | 0,07 | 0,99 |
| Sidrap | 0,94 | 0,6 | 0,82 | 0,64 | 0,86 | 0,22 | 0,77 |
| Makassar | 1,11 | 0,6 | 0,58 | 0,76 | 0,8 | 0,04 | 0,77 |

*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

Pada tahun 2021 perubahan tertinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan dialami oleh Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Bantaeng sebesar 0,22 poin dan 0,09 poin, dan perubahan yang terendah adalah Kabupaten Gowa dengan nilai perubahan sebesar -0,25 poin, Adapun Perbandingan Pertumbuhan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Bulukumba dengan wilayah setara tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik II-7**
**Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara tahun 2018-2022**

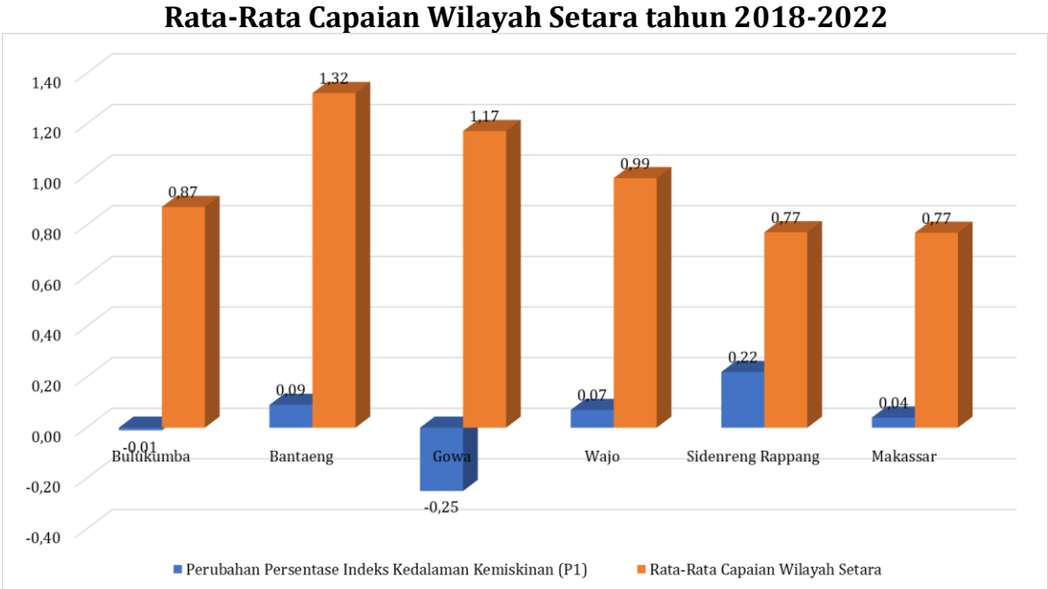


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi kemiskinan, baik itu berdasarkan perubahan P1 dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut

**Kuadran II-3**
**Analisis Kuadran Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara (2018-2022)**

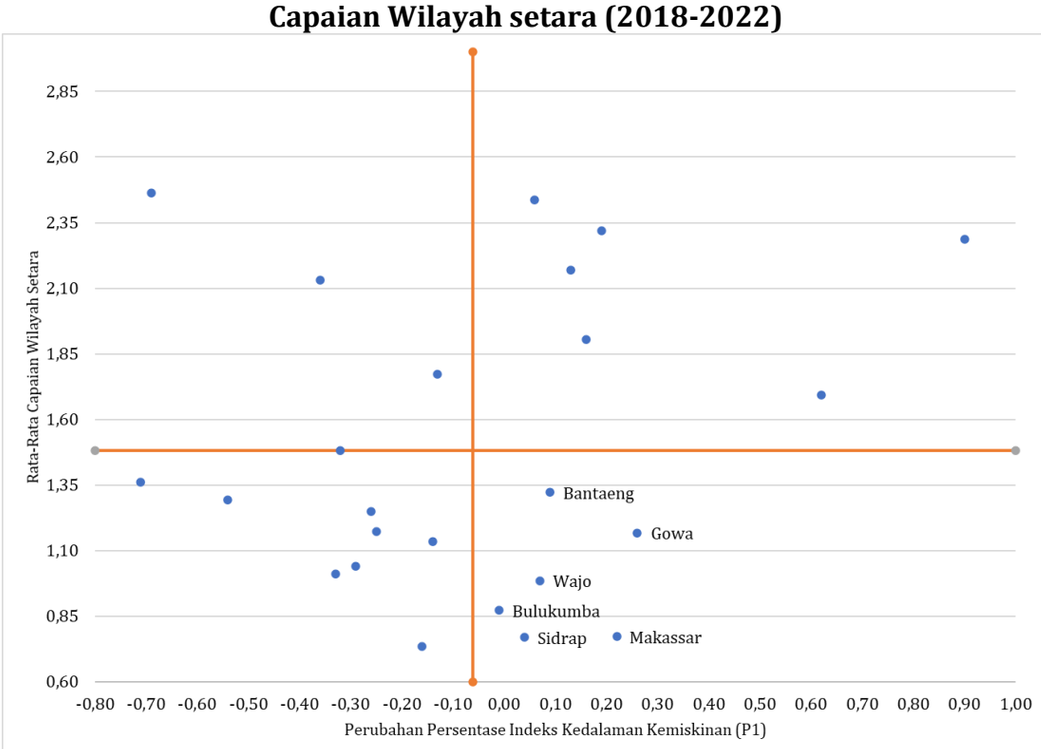


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

Ditinjau dari Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan tren yang berfluktuasi selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bulukumba sebesar 1,06 lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan 1,68 dan capaian Nasional yaitu 1,63. Demikian pula halnya pada tahun 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bulukumba menurun sebesar 0,99 lebih rendah dibandingkan dengan capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Sulawesi Selatan sebesar 1,36, dan Nasional yaitu 1,58. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-16**
**Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)**
**Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2018-2022**

| Wilayah | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Kab. Bulukumba** | 1,06 | 0,60 | 0,71 | 1,00 | 0,99 |
| **Prov. Sulawesi Selatan** | 1.68 | 1.63 | 1.65 | 1,39 | 1,36 |
| **Nasional** | 1.63 | 1.50 | 1.75 | 1,67 | 1,58 |

*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

### 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 adalah sebesar 212.606 jiwa, yang terdiri dari 205.932 jiwa penduduk yang berkerja, dan 6.674 jiwa pengangguran terbuka. Selain itu, jumlah bukan angkatan kerja adalah 112.182 jiwa, dengan rincian 17.281 jiwa penduduk yang bersekolah, 76.483 jiwa penduduk yang mengurus rumah tangga, dan 18.418 jiwa lainnya. Untuk tahun 2021 Tingkat Pengangguran di Kabupaten Bulukumba adalah 3,24 persen dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah

63,41 persen. Untuk lebih jelasnya statistik ketenagakerjaan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Tabel II-17**
**Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bulukumba tahun 2022**

| Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| | Laki-Laki | Perempuan | |
| **I. Angkatan Kerja** | **127.537** | **85.941** | **213.478** |
| 1. Bekerja | 126.485 | 84.295 | 210.780 |
| 2. Pengangguran Terbuka | 1.052 | 1.646 | 2.698 |
| **II. Bukan Angkatan Kerja** | **24.625** | **88.974** | **113.599** |
| 1. Sekolah | 8.703 | 9.880 | 18.583 |
| 2. Mengurus Rumah Tangga | 9.876 | 75.224 | 85.100 |
| 3. Lainnya | 6.046 | 3.870 | 9.916 |
| **Jumlah** | **152.162** | **174.915** | **327.077** |

*Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023*

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2021 sebanyak 213.478 orang. Penduduk Usia Kerja terbagi atas 2 yaitu : 1) Bukan Angkatan Kerja sebanyak 113.599 orang. 2) Angkatan kerja mencapai 213.478 orang. Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja 210.780 orang dan pengangguran 2.698 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja, dan merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 sebesar 65,46 persen. Indikator ini mengalami perlambatan -0,29 persen dibanding TPAK Agustus 2021. Penurunan TPAK disebabkan menurunnya angkatan kerja. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Grafik II-8**
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (periode Agustus)**
**Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 – 2022**

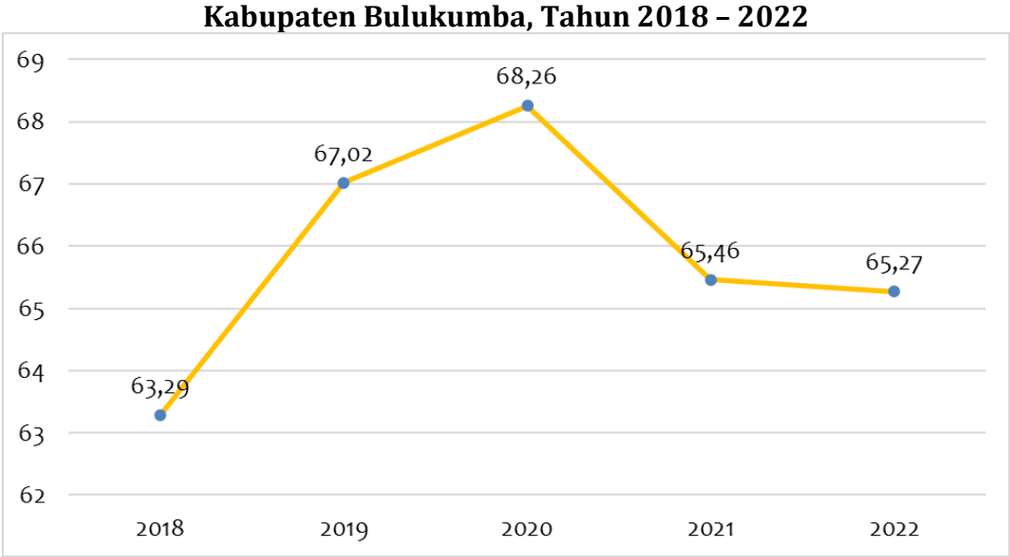


*Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023*

Definisi baku dari penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan Sakernas 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 definisi pengangguran mengalami penyesuaian/perluasan menjadi sebagai berikut: Penganggur adalah mereka

yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (jobless). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai pengganggur terbuka (open unemployment).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkannya. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 adalah sebesar 1,26 persen. Pada Agustus 2022, nilai TPT mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 1,88 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2021 sebesar 212.606 Orang, capaian ini mengalami peningkatan dengan capaian Angkatan Kerja tahun 2022 yaitu sebesar 213.478 orang. Pada tahun 2022 tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bulukumba sebesar 65,27 persen.

Tingkat pengangguran terbuka untuk daerah wilayah setara dengan kabupaten Bulukumba mengalami tren berfluktuatif. TPT tertinggi adalah Kabupaten Pinrang sebesar 2,79 persen dan terendah dialami oleh Kabupaten Toraja Utara hanya sebesar 0,58 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-18**
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022**

| Kabupaten/ Kota | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | | | | | Rata-Rata Capaian Wilayah Setara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Selayar | 1,74 | 1,10 | 2,44 | 2,81 | 1,49 | 1,92 |
| Bulukumba | 3,42 | 3,06 | 3,42 | 3,14 | 1,26 | 2,86 |
| Bantaeng | 3,39 | 3,65 | 4,27 | 4,07 | 2,72 | 3,62 |
| Takalar | 3,57 | 3,78 | 4,16 | 3,93 | 2,63 | 3,61 |
| Bone | 2,56 | 3,01 | 3,20 | 4,15 | 2,27 | 3,04 |
| Wajo | 3,51 | 3,00 | 4,33 | 4,32 | 2,54 | 3,54 |
| Pinrang | 2,80 | 2,91 | 4,19 | 4,06 | 2,79 | 3,35 |
| Enrekang | 1,61 | 2,15 | 2,44 | 2,34 | 0,58 | 1,82 |

*Sumber : Ketenagakerjaan Kab. Bulukumba (BPS Kab. Bulukumba), Tahun 2023*

Dari data TPT untuk 24 Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Selatan, sebagian besar mengalami penurunan TPT dari tahun 2022. Capaian ini merupakan upaya dari pemerintah pusat dengan adanya beberapa program untuk pemulihan ekonomi mulai dari tingat kabupaten/kota, propinsi dan pusat dengan mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke beberapa sektor yang tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba dengan wilayah setara tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik II-9**
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) Kabupaten Bulukumba Dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2022**

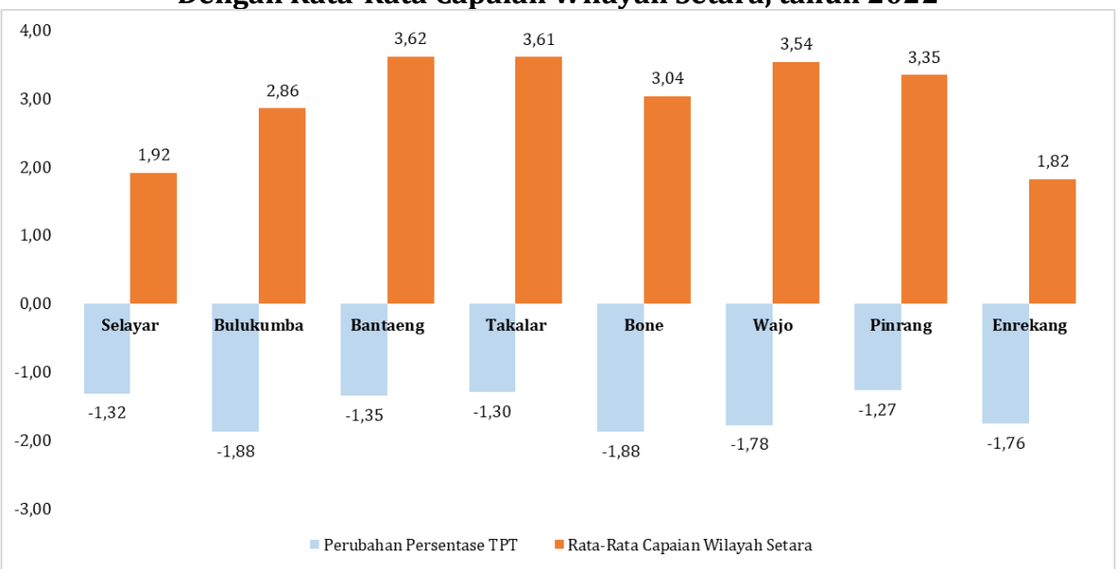


*Sumber : Ketenagakerjaan Kab. Bulukumba (BPS Kab. Bulukumba), Tahun 2023*

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), baik itu berdasarkan perubahan dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

**Kuadran II-4**
**Analisis Kuadran Perubahan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018-2022**

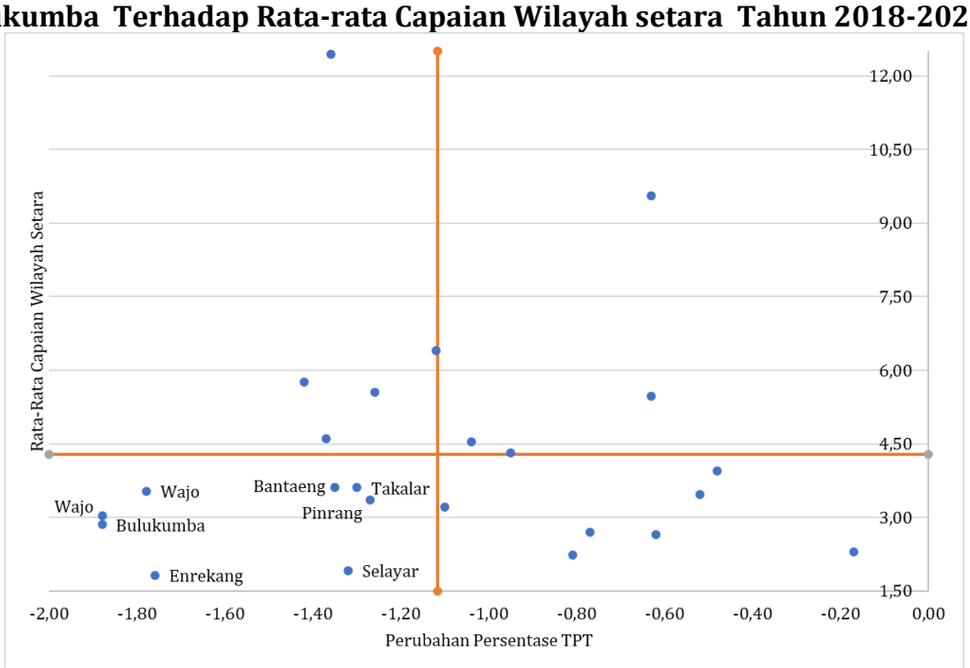


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (diolah)*

Capaian Kinerja untuk TPT Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 sebesar 1,26 persen, ini menandakan bahwa Capaian Kinerja mengalami perubahan yang positif karena ditandai dengan adanya penurunan jumlah pengangguran terbuka dari tahun sebelumnya. Dan perbandingan TPT Kabupaten Bulukumba jauh lebih baik dibanding dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dimana angka pengangguran terbuka mencapai 4,54 persen dan 5,86 persen. Ini menandakan bahwa angka pengangguran terbuka untuk provinsi dan nasional jauh lebih besar dibanding angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bulukumba. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Grafik II-10**
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Persen), Tahun 2022**

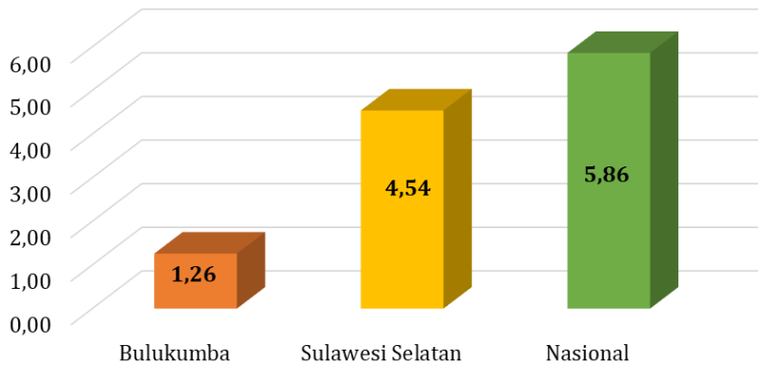


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023*

**4. Gini Ratio**

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Kabupaten Bulukumba berfluktuasi selama periode tahun 2018-2022. Gini Ratio pada tahun 2018 menjadi 0,354 dan pada tahun 2022 nilai Gini Ratio di kabupaten Bulukumba naik hingga mencapai 0,361.

**Tabel II-19**
**Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022**

| Kabupaten/ Kota | Gini Ratio | | | | | Rata-Rata Capaian Wilayah Setara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Bulukumba | 0,354 | 0,377 | 0,371 | 0,362 | 0,361 | 0,365 |
| Takalar | 0,358 | 0,482 | 0,360 | 0,368 | 0,375 | 0,389 |
| Enrekang | 0,389 | 0,359 | 0,366 | 0,362 | 0,346 | 0,364 |
| Luwu Timur | 0,398 | 0,387 | 0,405 | 0,396 | 0,394 | 0,396 |
| Makassar | 0,383 | 0,390 | 0,400 | 0,400 | 0,395 | 0,394 |
| Parepare | 0,382 | 0,350 | 0,373 | 0,381 | 0,379 | 0,373 |

*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

Adapun perubahan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba tahun 2022 adalah sebesar 0,365, dan mengalami penurunan jika dibandingkan capaian Gini Ratio tahun 2021 yang nilainya mencapai 0,3268 atau mengalami peningkatan 0,001 poin. Adapun perbandingan Pertumbuhan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara secara lengkap rata-rata Capaian Wilayah Setara dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik II-11**
**Perbandingan Perubahan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2018-2022**

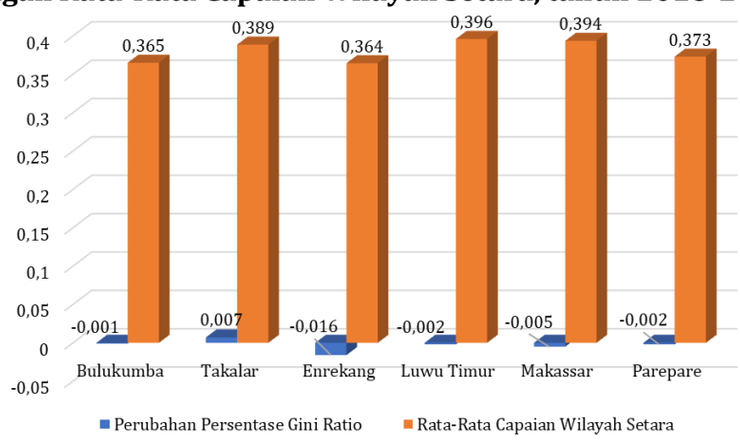


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi Gini Ratio, baik itu berdasarkan perubahan dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

**Kuadran II-5**
**Analisis Kuadran Perubahan Gini Ratio Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018-2022**

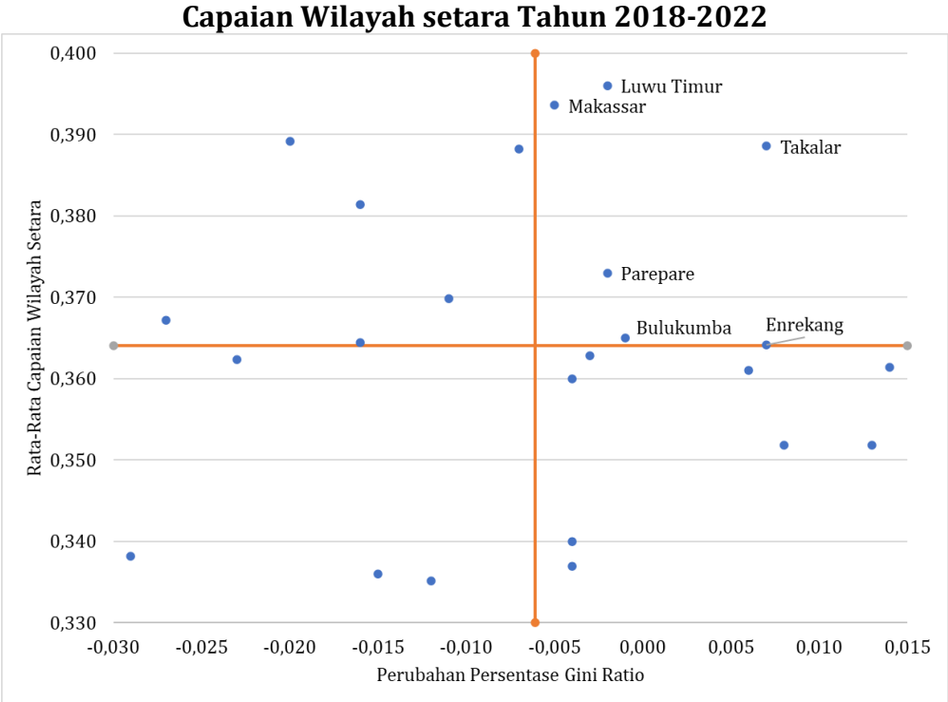


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

Jika dibandingkan dengan capaian Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, terlihat bahwa ketimpangan di Kabupaten Bulukumba lebih rendah. Meskipun secara nasional beberapa tahun terakhir angka *Gini Ratio* mengalami penurunan sampai dengan September 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. Namun demikian, akibat adanya pandemi *Covid-19*, Secara lengkap Perbandingan Capaian Gini Ratio Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Capaian Nasional Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik II-12**
**Perbandingan Capaian Gini Ratio dengan target Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2022**

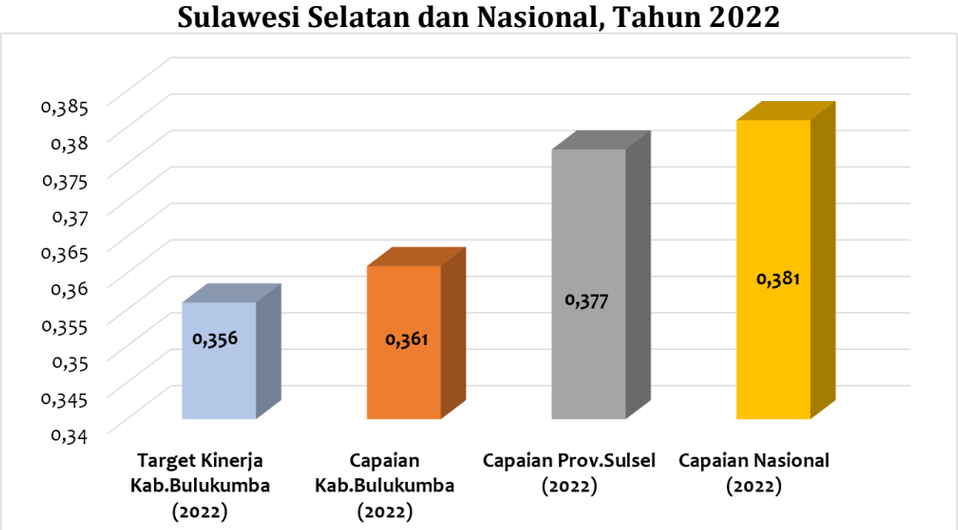


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

**5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Konsep pembangunan manusia menjadi sebuah konsep yang terukur untuk mengkuru kemajuan suatu negara. Secara umum. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk *(enlarging people choice)*. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat *(a long and healthy life)*, pengetahuan *(knowledge)*, dan standard hidup layak *(decent standard of living)*. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masingmasing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Bulukumba terus mengalami kemajuan selama periode 2018 hingga 2022. IPM Kabupaten Bulukumba meningkat dari 67,70 pada tahun 2018 menjadi 70,34 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Bulukumba rata-rata tumbuh sebesar 0,72 persen pada periode 2018 - 2022. Capaian IPM Kabupaten Bulukumba., secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-20**
**Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Bulukumba**
**dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022**

| Kabupaten/ Kota | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | | | | Rata-Rata Capaian Wilayah Setara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Bulukumba | 67,70 | 68,28 | 68,99 | 69,62 | 70,34 | 68,99 |
| Bantaeng | 67,76 | 68,30 | 68,73 | 68,99 | 69,69 | 68,69 |
| Jeneponto | 63,33 | 64,00 | 64,26 | 64,56 | 65,13 | 64,26 |
| Takalar | 66,07 | 66,94 | 67,31 | 67,72 | 68,31 | 67,27 |
| Gowa | 68,87 | 69,66 | 70,14 | 70,29 | 70,99 | 69,99 |
| Sinjai | 66,24 | 67,05 | 67,50 | 67,75 | 68,33 | 67,37 |
| Maros | 68,94 | 69,50 | 69,86 | 70,41 | 71,00 | 69,94 |
| Pangkep | 67,71 | 68,29 | 68,72 | 69,21 | 69,79 | 68,74 |
| Bone | 65,04 | 65,67 | 66,06 | 66,40 | 67,01 | 66,04 |

| Kabupaten/ Kota | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | | | | Rata-Rata Capaian Wilayah Setara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Soppeng | 67,60 | 68,26 | 68,67 | 68,99 | 69,70 | 68,64 |
| Wajo | 68,57 | 69,05 | 69,15 | 69,62 | 70,26 | 69,33 |
| Toraja Utara | 68,49 | 69,23 | 69,33 | 69,75 | 70,36 | 69,43 |

*Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2022 (diolah)*

**Grafik II-13**
**Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2022**

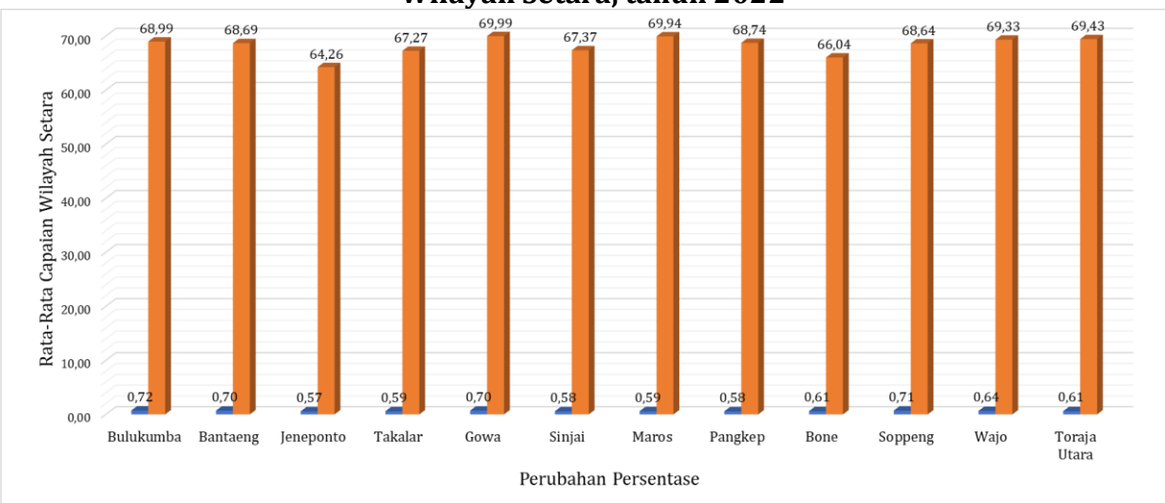


*Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2022, (diolah)*

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi capaian IPM, baik itu berdasarkan nilai pertumbuhan dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

**Kuadran II-6**
**Analisis Kuadran Pertumbuhan IPM Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018 – 2022**

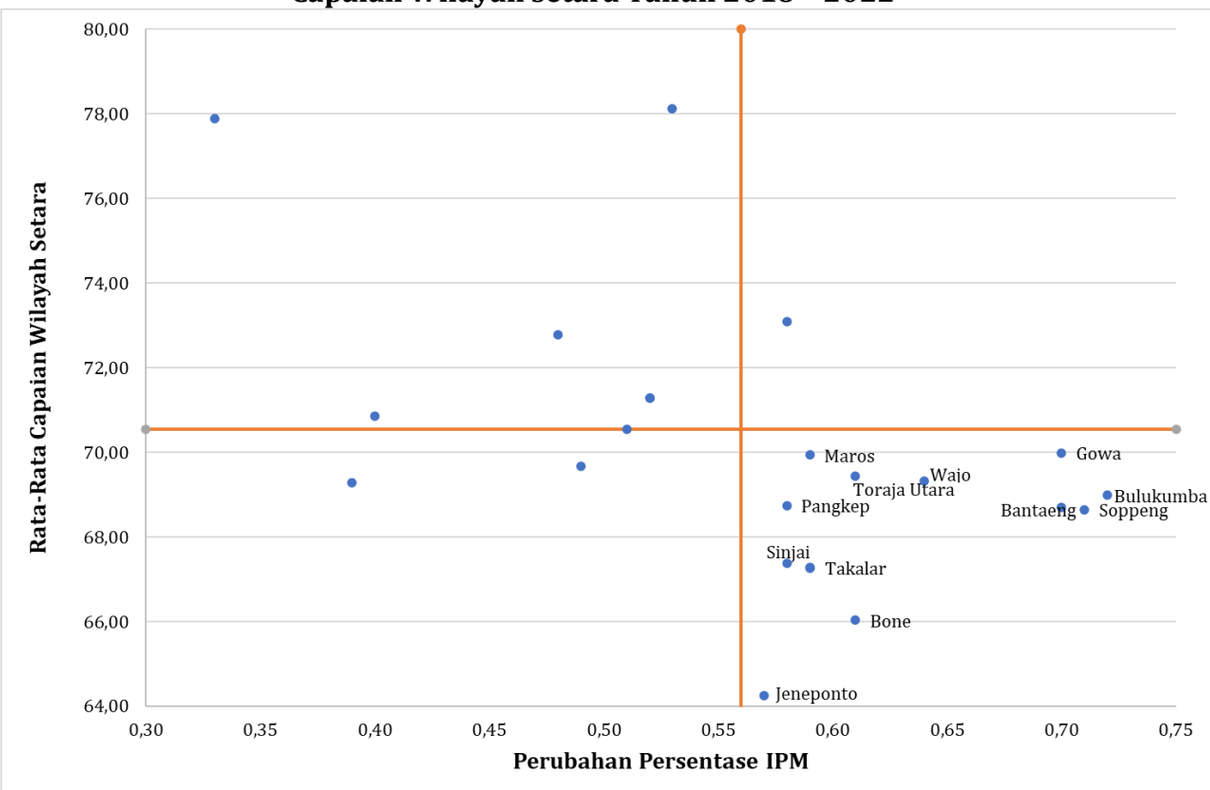


*Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2022, (diolah)*

Adapun target IPM Kabupaten Bulukumba tahun 2022 adalah 70,11 poin, dengan capaian 70,11 poin. Adapun capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 72,82 dan capaian IPM Nasional yaitu sebesar 72,91 poin. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik II-14**
**Perbandingan Capaian IPM dengan target Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2022**

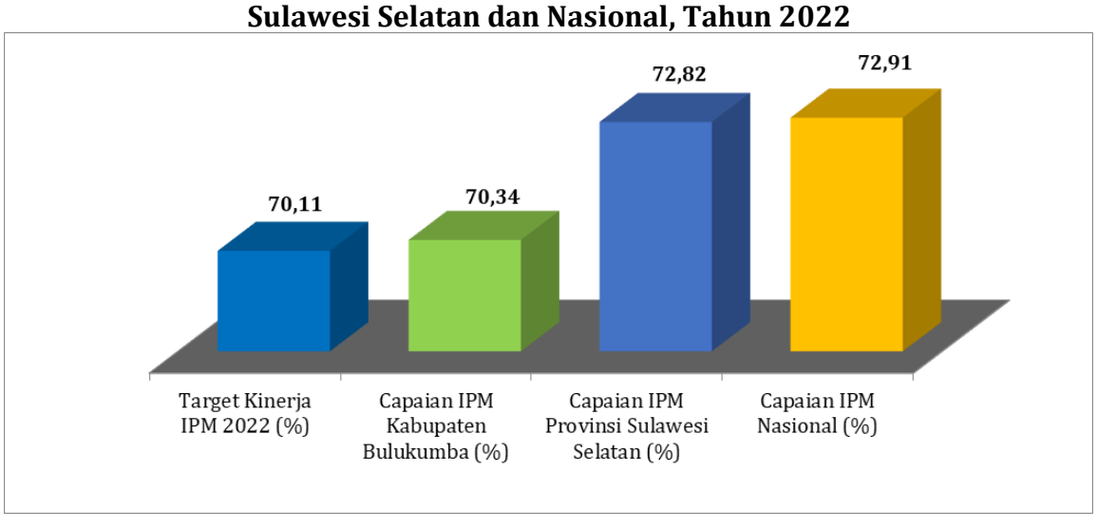


*Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2023, (diolah)*

### 6. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Salah satu aspek dalam pengkuran IPM adalah rata-rata lama sekolah. Lama sekolah yang menggambarkan dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2018 hingga 2022. Rata-Rata Lama Sekolah di kabupaten Bulukumba rata-rata tumbuh 2,27 persen per tahun selama periode 2018 hingga 2022. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Bulukumba yang lebih baik. Hingga tahun 2022, secara rata-rata penduduk Kabupaten Bulukumba usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II).

Jika dibandingkan dengan daerah setara, Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 menempati ukuran keenam dari 10 kabupaten rata-rata capaian wilayah setara sebesar 7,65 tahun, adapun urutan pertama diraih oleh Kabupaten Gowa dengan nilai RLS sebesar 8,10 tahun dan diikuti dengan Kabupaten Pinrang sebesar 7,89 tahun dan Kabupaten Sidrap sebesar 7,79 tahun. Tahun yang terendah lama sekolah adalah Kabupaten Jeneponto dengan capaian RLS sebesar 6,53 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah secara lengkap dapat lihat pada tabel berikut..

**Tabel II-21**
**Perbandingan Capaian Rata-Rata lama Sekolah Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022**

| Kabupaten/ Kota | Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) | | | | | Rata-Rata Capaian Wilayah Setara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Bulukumba | 7,34 | 7,43 | 7,67 | 7,82 | 8,01 | 7,65 |
| Jeneponto | 6,21 | 6,48 | 6,59 | 6,60 | 6,75 | 6,53 |
| Takalar | 6,91 | 7,18 | 7,29 | 7,49 | 7,64 | 7,30 |
| Gowa | 7,75 | 7,97 | 8,19 | 8,20 | 8,40 | 8,10 |
| Pangkep | 7,49 | 7,60 | 7,66 | 7,92 | 8,05 | 7,74 |
| Bone | 6,97 | 6,98 | 7,15 | 7,23 | 7,36 | 7,14 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppeng | 7,63 | 7,74 | 7,81 | 7,82 | 7,96 | 7,79 |
| Wajo | 6,79 | 6,80 | 6,81 | 7,05 | 7,16 | 6,92 |
| Sidenreng Rappang | 7,79 | 7,83 | 7,84 | 7,94 | 8,04 | 7,89 |
| Pinrang | 7,84 | 7,85 | 7,86 | 7,87 | 8,04 | 7,89 |

*Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2022, (diolah)*

Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2022 pada daerah setara dengan Kabupaten Bulukumba untuk urutan tertinggi ditempati oleh Kabupaten Gowa dengan pertumbuhan sebesar 0,20 poin dan Kabupaten Sidrap dengan posisi RLS terendah dengan nilai 0,10 poin. Secara lengkap perkembangan rata-rata lama sekolah selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik II-15**
**Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2022**

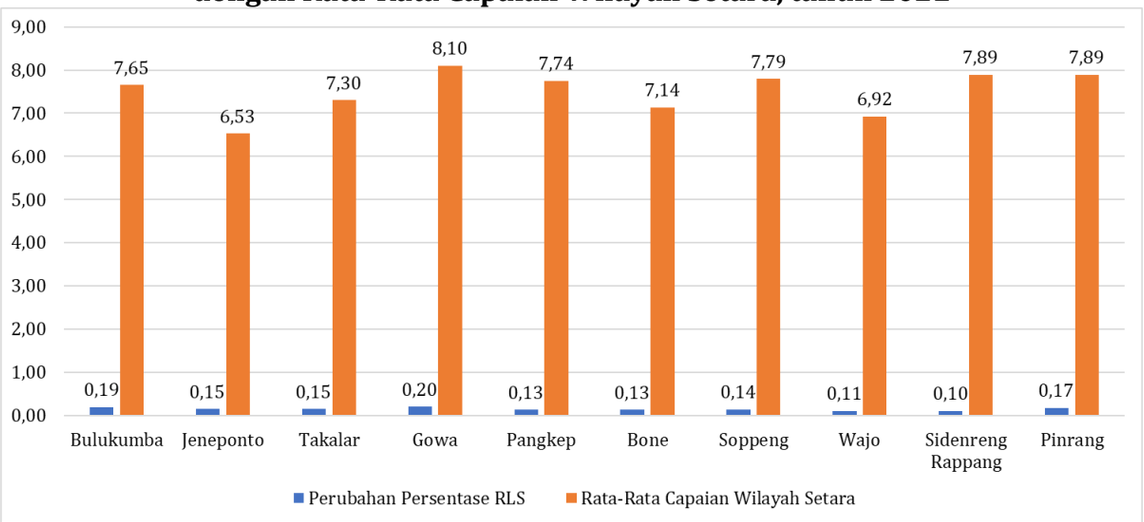


*Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2022, (diolah)*

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi capaian RLS, baik itu berdasarkan nilai perubahan RLS dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

**Kuadran II-7**
**Analisis Kuadran Pertumbuhan RLS Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018 – 2022**

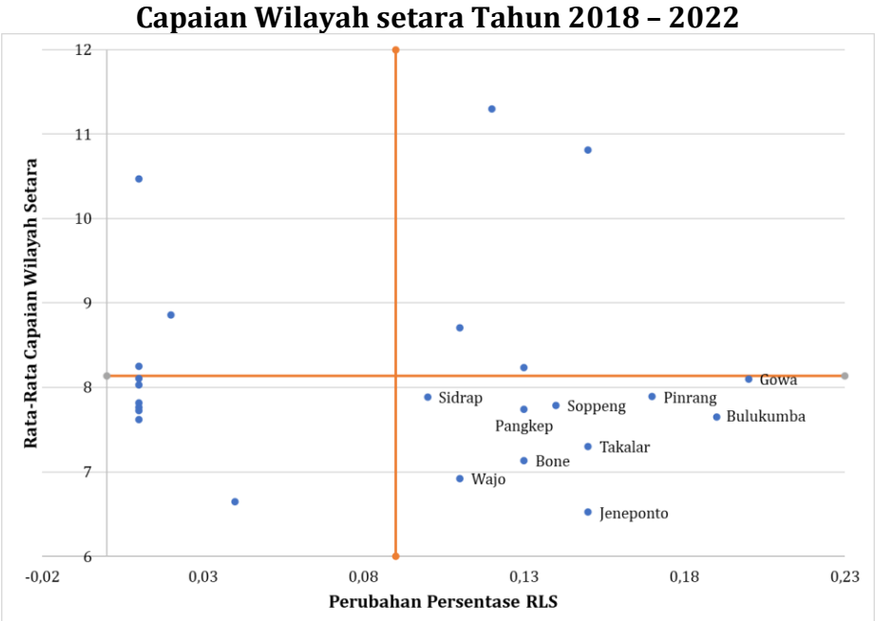


*Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2023, (diolah)*

Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bulukumba , Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional periode 2018-2022, menyajikan fakta bahwa capaian Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan dan secara Nasional lebih tinggi daripada Capaian RLS Kabupaten Bulukumba. Peningkatan RLS baik di level Kabupaten, Nasional maupun Provisinsi Sulawesi Selatan mengalami peningktan setiap tahun. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik II-16**
**Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan Nasional, 2018-2022**

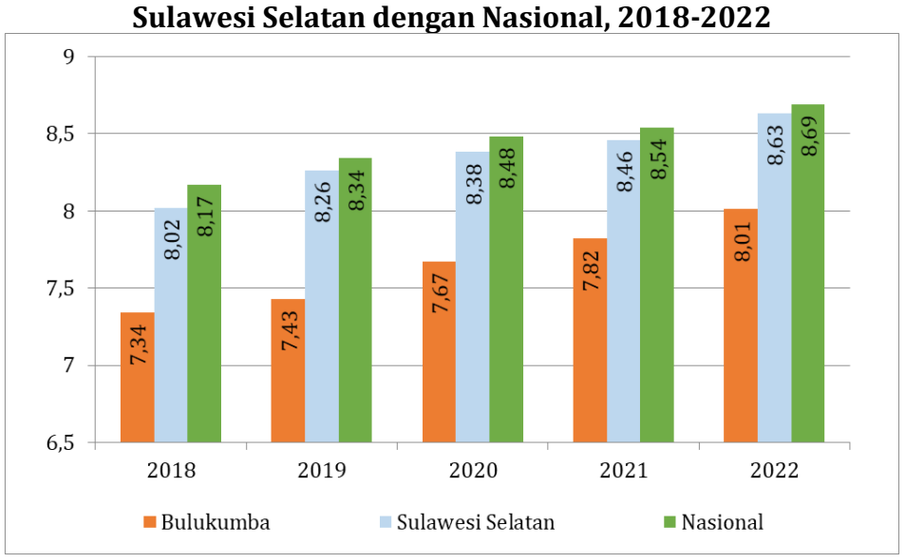


*Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Desember 2022, (diolah)*

## 7. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2018 hingga tahun 2022, Kabupaten Bulukumba telah berhasil meningkatkan UHH saat lahir sebesar 0,60 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,46 persen per tahun. Pada tahun 2018, UHH saat lahir di Kabupaten Bulukumba hanya sebesar 67,27 tahun dan pada tahun 2022 telah mencapai 68,51 tahun. Jika diperbandingkan dengan daerah setara Kabupaten Bulukumba, penduduk dengan capaian umur terpanjang tahun 2022 ada di Kabupaten Luwu Utara yaitu 69,03 tahun, sedangkan daerah yang penduduk dengan usia terpendek adalah Kabupaten Jeneponto yaitu 66,81 tahun. Perbandingan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (Tahun) Sulawesi Selatan dengan Wilayah Setara, 2018-2022 secara lengkap dapat dilihat pada table berikut

**Tabel II-22**
**Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bulukumba**

| Kabupaten/ Kota | Usia Harapan Hidup (Tahun) | | | | | Rata-Rata Capaian Wilayah Setara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Bulukumba | 67,27 | 67,69 | 67,92 | 68,10 | 68,51 | 67,90 |
| Jeneponto | 65,89 | 66,24 | 66,39 | 66,49 | 66,81 | 66,36 |
| Takalar | 66,64 | 67,01 | 67,18 | 67,30 | 67,64 | 67,15 |
| Pangkep | 66,12 | 66,49 | 66,66 | 66,78 | 67,12 | 66,63 |
| Bone | 66,50 | 66,88 | 67,07 | 67,21 | 67,57 | 67,05 |
| Wajo | 66,79 | 67,17 | 67,35 | 67,48 | 67,82 | 67,32 |
| Luwu Utara | 67,90 | 68,31 | 68,51 | 68,67 | 69,03 | 68,48 |

*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

Jika memperhatikan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) selama 5 tahun terakhir (2018-2022), secara rata-rata UHH Kabupaten Bulukumba sebesar 67,90 tahun. Adapun untuk daerah setara dengan Kabupaten Bulukumba, yang memiliki rata-rata UHH tertinggi dicapai oleh kabupaten Luwu Utara dengan nilai 68,48 Tahun dan yang terendah ditempati oleh Kabupaten Jeneponto yaitu 66,36 tahun. Adapun pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 terjadi di Kabupaten Bulukumba yaitu 0,41 tahun, pertumbuhan terendah dicapai oleh Kabupaten Jeneponto dengan nilai 0,32 tahun. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut

**Grafik II-17**
**Perbandingan Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bulukumba, dengan Rata-Rata Wilayah Setara tahun 2021**

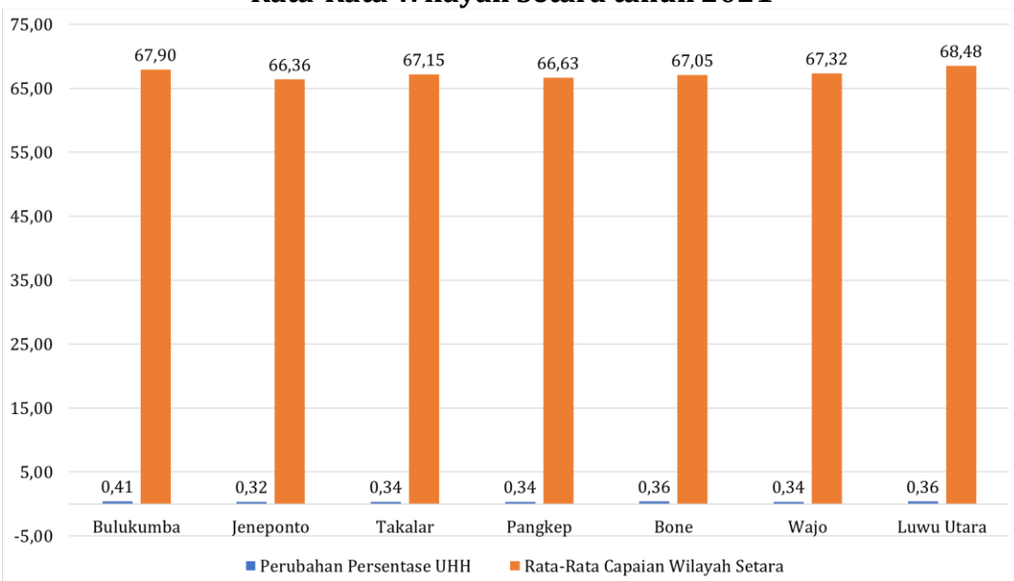


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi capaian UHH baik itu berdasarkan nilai perubahan UHH, pertumbuhan UHH dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

**Kuadran II-8**
**Analisis Kuadran Perubahan Nilai UHH Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018 – 2022**

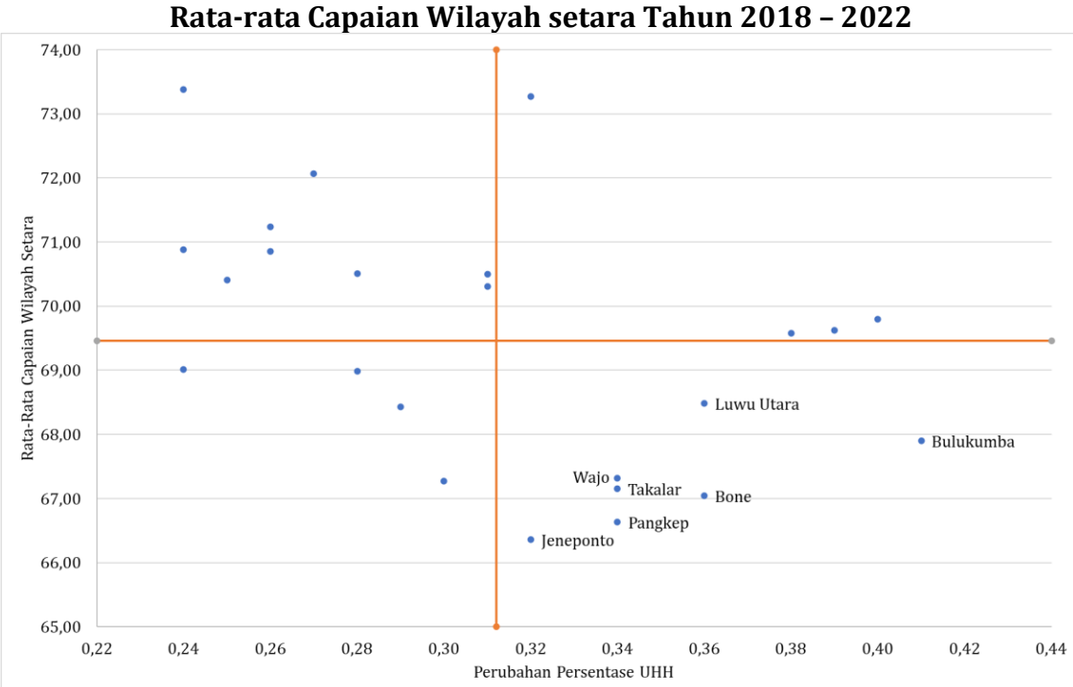


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

Jika memperhatikan capaian Usia Harapan Hidup (UHH) skala Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan secara nasional tahun 2018-2022. Maka capaian UHH Kabupaten Bulukuba masih berada jauh dibandingkan dengan capaian UHH Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Mekipun demikian, Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bulukumba dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Perbandingan Capaian Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH - Tahun) Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nasional tahun 2018-2022 secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut

**Tabel II-23**
**Perbandingan Capaian Umur Harapan Hidup (UUH-Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi, Selatan dengan Nasional, 2018-2022**

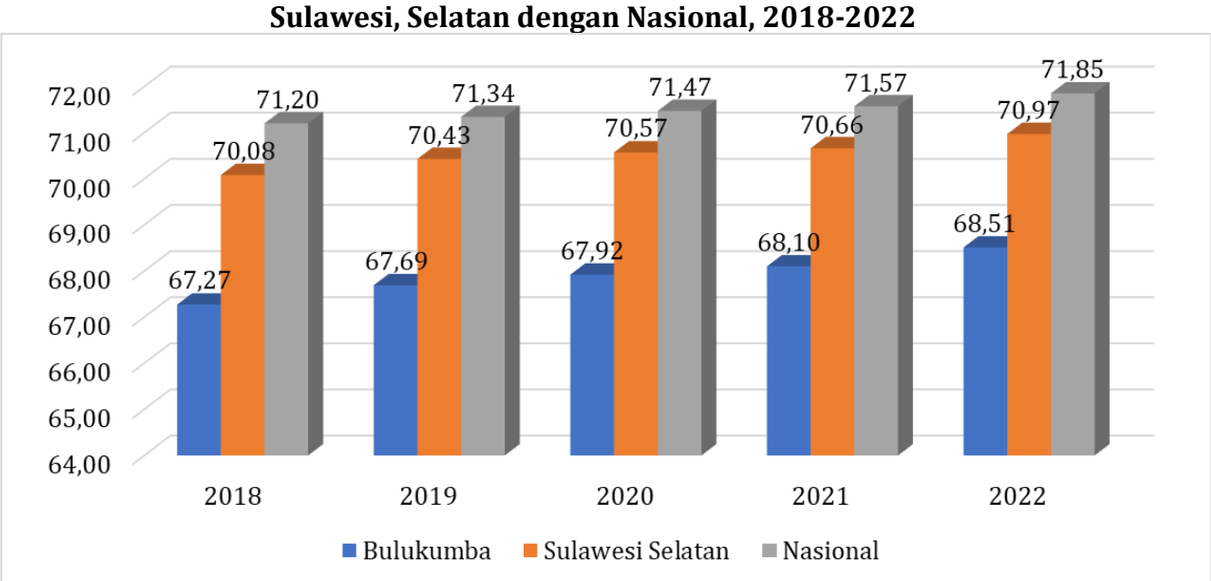


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

**8. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Selain Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) juga menjadi penentu IPM. Harapan lama sekolah yang menggambarkan dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Selama kurun waktu tahun 2018-2022 di Kabupaten Bulukumba kedua indikator ini mengalami pertumbuhan yang positif. Tahun 2018 HLS Kabupaten Bulukumba sebesar 12,79 tahun dan tahun 2022 nilai HLS sebesar 13,42 tahun. Indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan rata peningkatan sebesar 0,51 persen setiap tahunnya.

Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2022, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bulukumba telah mencapai 13,42 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus Diploma I. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Bulukumba yang lebih baik. Jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian wilayah setara Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022, rata-rata capaian wilayah setara HLS tertinggi ditempati oleh Kabupaten Pinrang dengan nilai RLS sebesar 13,23 tahun, dan Kabupaten yang nilai capaian rata-rata HLS terendah adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 12,02 tahun. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-24**
**Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022**

| No. | Kabupaten/ Kota | Harapan Lama Sekolah (HLS) | | | | | Rata-Rata Capaian Wilayah Setara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Kepulauan Selayar | 12,46 | 12,48 | 12,65 | 12,66 | 12,67 | 12,58 |
| 2 | Bulukumba | 12,79 | 12,91 | 13,17 | 13,41 | 13,42 | 13,14 |
| 3 | Jeneponto | 11,95 | 11,97 | 11,98 | 12,10 | 12,11 | 12,02 |
| 4 | Pangkep | 12,41 | 12,51 | 12,76 | 12,77 | 12,78 | 12,65 |
| 5 | Sidenreng Rappang | 12,91 | 12,93 | 12,94 | 12,95 | 13,01 | 12,95 |
| 6 | Pinrang | 13,20 | 13,22 | 13,23 | 13,24 | 13,25 | 13,23 |
| 7 | Luwu Utara | 12,39 | 12,42 | 12,43 | 12,57 | 12,58 | 12,48 |
| 8 | Luwu Timur | 12,81 | 12,82 | 12,83 | 12,84 | 13,00 | 12,86 |

*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

Dari segi pertumbuhan, Kabupaten Luwu Timur adalah daerah yang tertinggi nilai pertumbuhannya di Tahun 2022, yaitu sebesar 1,246 persen, dan daerah setara yang menempati pertumbuhan terendah adalah Kabupaten Bulukumba dengan angka pertumbuhan sebesar 0,075 persen.

Perbandingan Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata Capaian Wilayah Setara pada Tahun 2018-2022 memperlihatkan bahwa Kabupaten Bulukumba adalah daerah yang menduduki posisi keempat sebesar 12,86 tahun setelah Kabupaten Pangkep sebesar 13,23, Sidrap sebesar 13,14 tahun dan Urutan Ketiga Kepulauan Selayar yakini 12,95. dan daerah setara yang terendah adalah Kabupaten Jeneponto dengan angka HLS sebesar 12,02 tahun. Secara lengkap dapat diliat pada grafik berikut.

**Grafik II-18**
**Perbandingan Capaian Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bulukumba, dengan Rata-Rata Wilayah Setara tahun 2018-2022**

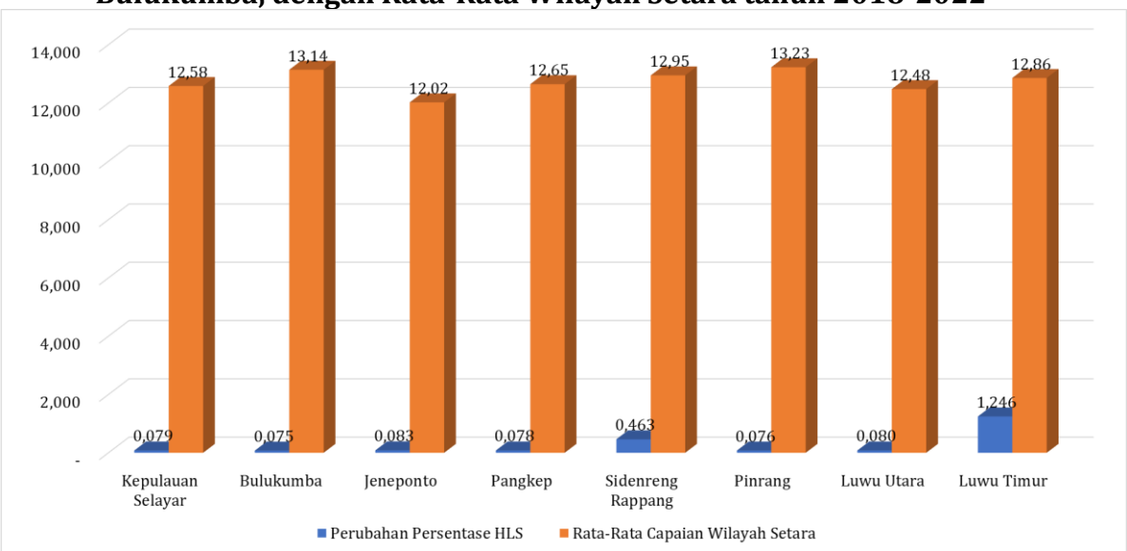


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi capaian HLS baik itu berdasarkan nilai perubahan HLS, pertumbuhan HLS dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

**Kuadran II-9**
**Analisis Kuadran Perubahan Nilai HLS Terhadap**
**Rata-rata Capaian Wilayah setara Tahun 2018 - 2022**

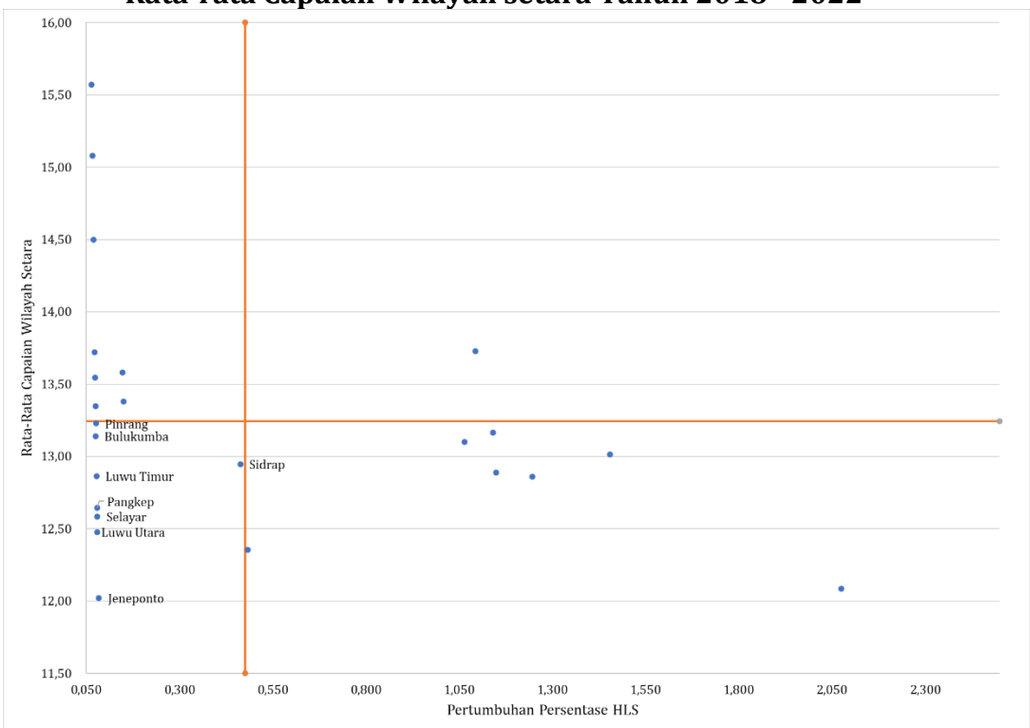


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

Adapun Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi selatan dengan Nasional tahun 2018-2022. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sulawesi Selatan masih di atas capaian HLS Kabupaten Bulukumba dan Nasional pada kurun waktu tersebut. Sementara itu, jika capaian HLS Kabupaten Bulukumba dibandingkan dengan capaian HLS Nasional, pada kurun waktu 2018-2022, capaian HLS Kabupaten Bulukumba masih berada di bawah capaian HLS Nasional. Namun, pada tahun 2022 capaian HLS Kabupaten Bulukumba 13,42 tahun sudah berada diatas capaian HLS Nasional 13,10 tahun. Adapun secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik II-19**
**Perbandingan Capaian harapan Lama sekolah (HLS-Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi, Selatan dengan Nasional, 2018-2022**

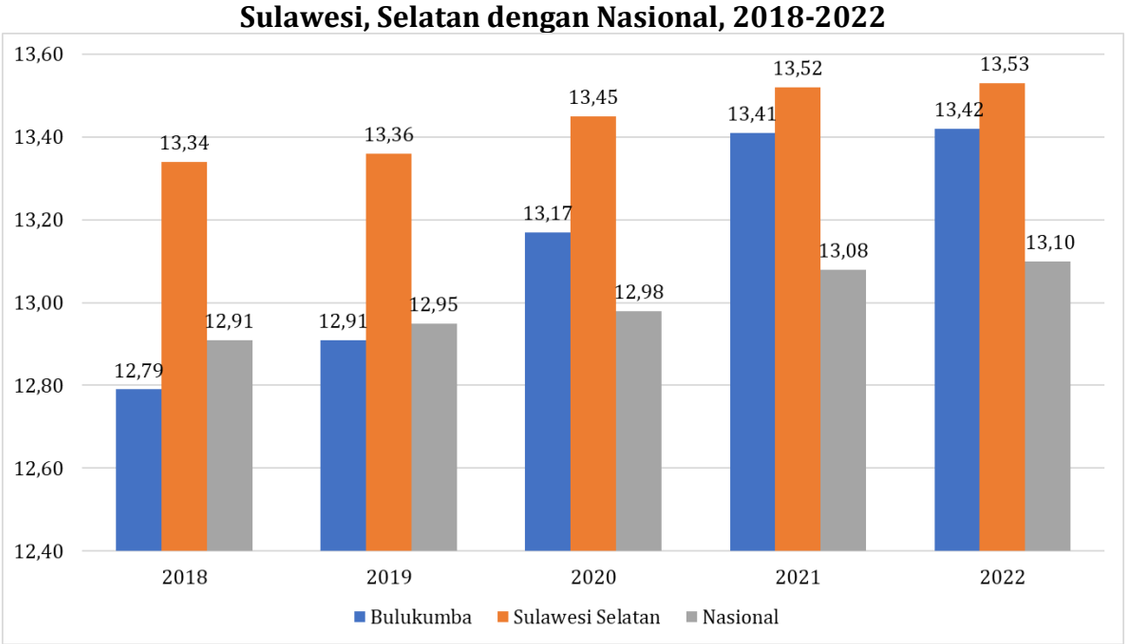


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

**9. Pengeluaran Perkapita**

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Dari tahun ke tahun, pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Indonesia terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Indonesia mencapai Rp11,156 juta per tahun, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,28 persen. Adapun pada tahun 2021 untuk semua wilayah setara dengan Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan, Hal ini tentunya menjadi anomali ditengah tekanan pertumbuhan ekonomi hingga kontraksi akibat pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Bulukumba mencapai 10,632 juta rupiah per tahun, atau bertumbuh sebesar 1,13 persen dibanding tahun 2020 (10,513 juta per tahun). Selama lima tahun terakhir, pengeluaran per kapita disesuaikan kabupaten Bulukumba rata-rata tumbuh sebesar 1,00 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan capaian Pengeluaran perkapita wilayah setara tahun 2021, Kabupaten Bulukumba menempati posisi kedua dengan nilai Pengeluaran perkapita yang disesuaikan sebesar 10,435 juta rupiah setelah Kabupaten Enrekang sebesar 10,732 juta rupiah, dan Pengeluaran perkapita terendah adalah Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp 7,158 juta rupiah. Perbandingan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan Wilayah Setara, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-25**
**Perbandingan Pengeluaran Perkapita Masyarakat (Ribu Rp/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2018 – 2022**

| Kabupaten/ Kota | Pengeluaran per Kapita (Juta Rupiah) | | | | | Rata-Rata Capaian Wilayah Setara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Kepulauan Selayar | 8,67 | 9,03 | 8,97 | 9,06 | 9,45 | 9,03 |
| Bulukumba | 10,33 | 10,48 | 10,51 | 10,63 | 10,94 | 10,58 |
| Gowa | 9,18 | 9,37 | 9,39 | 9,50 | 9,81 | 9,45 |
| Toraja Utara | 7,78 | 8,08 | 8,10 | 8,13 | 8,49 | 8,12 |

*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

Adapun rata-rata capaian pengeluaran per kapita disesuaikan hingga pada tahun 2022 untuk kabupaten setara dengan Kabupaten Bulukumba, nilai tertinggi dicapai oleh Kabupaten Enrekang angka Rp 10,58 Juta Rupiah dan terendah adalah Kabupaten Tojara Utara sebesar Rp 8,12 Juta Rupiah. Adapun perubahan pengeluaran per kapita disesuaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Selayar sebesar 0,390 poin. dan perubahan pengeluaran per kapita disesuaikan terendah terjadi di Kabupaten Gowa dengan nilai 0,306 poin. Secara lengkap perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik II-20**
**Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita (Juta Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Setara, Tahun 2018-2022**

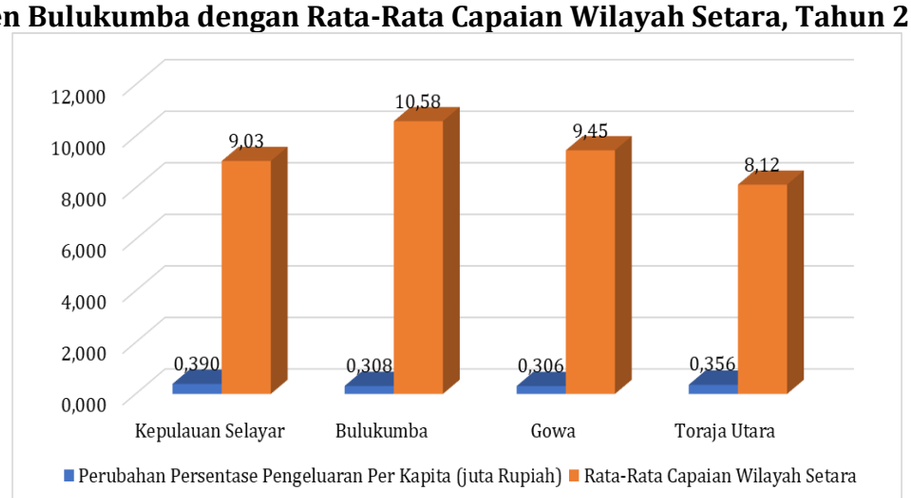


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

Wilayah setara dapat ditentukan dengan menggunakan analisis kuadran, dimana dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki kemiripan karakteristik dan kondisi capaian pengeluaran per kapita disesuaikan baik itu berdasarkan nilai perubahan, pertumbuhan dan rata-rata capaiannya. Selengkapnya pada gambar kuadran berikut.

**Kuadran II-10**
**Analisis Kuadran Perubahan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Bulukumba Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah tahun 2022**

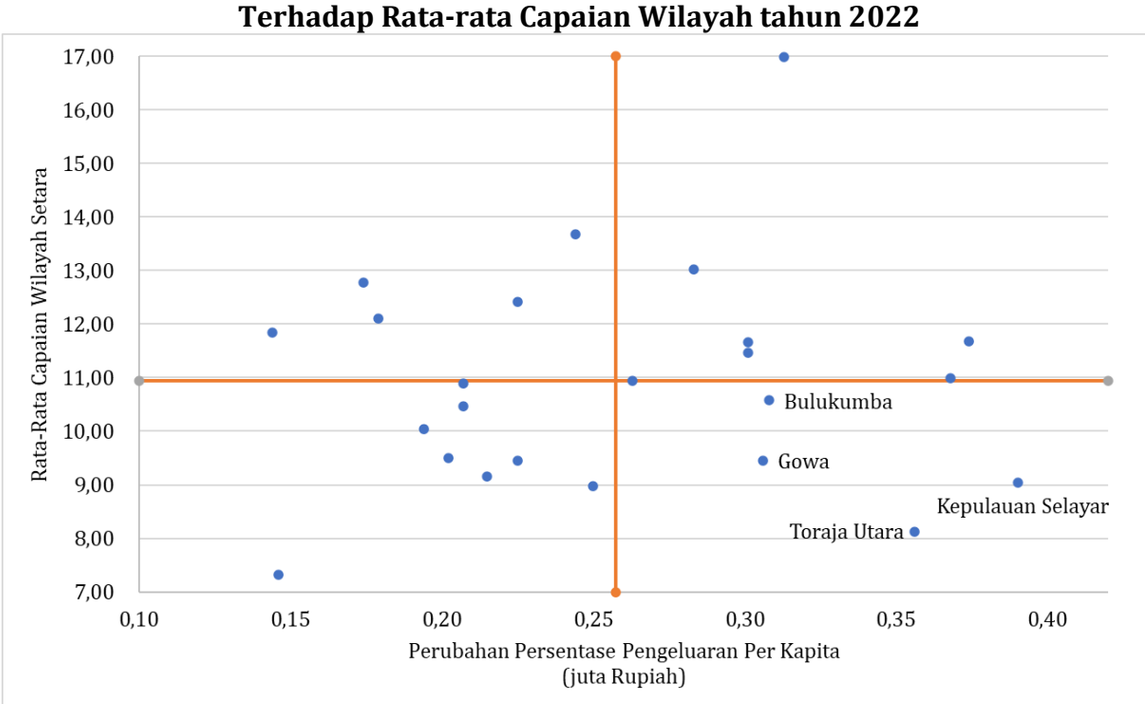


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, capaian pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022 masih lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada tahun 2022 capaian pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 10,58 juta rupiah, Provinsi Sulawesi selatan sebesar Rp.11,43 juta, dan Nasional Rp.11,48 juta. Perbandingan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Sulawesi Selatan dengan Nasional secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik II-21**
**Perbandingan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan Nasional, 2018-2022**

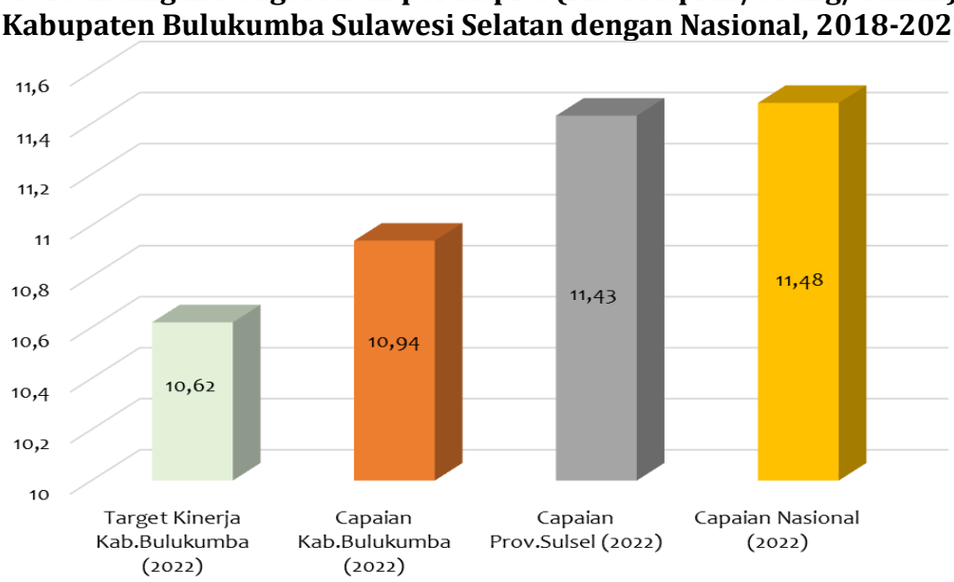


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

**10. PDRB Perkapita**

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapitanya, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2018-2022 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2018, PDRB per kapita tercatat sebesar 31,55 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022 yang tercatat sebesar 38,55 juta rupiah. Jika capaian PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 65,59 juta rupiah dan Nasional capaian Nasional sebesar 71,00 juta rupiah, maka nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulukumba masih jauh tertinggal. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-26**
**Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB dan ADHK) Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **PDRB/PDB Perkapita (ADHB)** | | | | | | |
| Bulukumba | Juta Rp | 31,55 | 33,96 | 33,34 | 36,06 | 38,55 |
| Sulawesi Selatan | Juta Rp | 52,64 | 57,18 | 55,68 | 59,66 | 65,59 |
| Nasional | Juta Rp | 55,99 | 59,07 | 56,90 | 62,20 | 71,00 |
| **PDRB/PDB Perkapita (ADHK)** | | | | | | |
| Bulukumba | Juta Rp | 19,41 | 20,46 | 19,69 | 20,48 | 21,10 |
| Sulawesi Selatan | Juta Rp | 35,25 | 37,35 | 36,25 | 37,57 | 39,12 |
| Nasional | Juta Rp | 39,34 | 41,02 | 39,78 | 40,78 | 42,46 |

*Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023 (diolah)*

PDRB Perkapita merupakan indikator yang menggambarkan kesejahteraan rakyat. Jika melihat PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) khususnya wilayah yang setara dengan Kabupaten Bulukumba, daerah setara yang memiliki PDRB Perkapita tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan nilai PDRB ADHB sebesar 48,33 juta rupiah, dan daerah yang memiliki nilai PDRB ADHB terendah adalah Kabupaten Jeneponto yaitu sebesar 27,08 Juta Rupiah. Selangkapnya pada tabel berikut..

**Tabel II-27**
**Perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita ADHB dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Tahun 2018-2022**

| Kabupaten/ Kota | PDRB per Kapita (Ribu Rupiah) | | | | | Rata-Rata Capaian Wilayah Setara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Kep. Selayar | 43,62 | 47,99 | 46,73 | 49,54 | 53,76 | 48,33 |
| Bulukumba | 31,55 | 33,96 | 33,34 | 36,06 | 38,88 | 34,76 |
| Jeneponto | 26,03 | 27,74 | 25,70 | 27,26 | 28,69 | 27,08 |
| Takalar | 31,51 | 34,42 | 34,03 | 36,76 | 40,18 | 35,38 |
| Gowa | 25,08 | 27,50 | 28,20 | 30,44 | 32,70 | 28,78 |
| Sinjai | 41,88 | 45,05 | 43,74 | 47,05 | 51,29 | 45,80 |
| Barru | 38,10 | 41,80 | 40,36 | 43,43 | 47,50 | 42,24 |
| Bone | 43,87 | 47,81 | 45,68 | 48,80 | 53,67 | 47,97 |
| Sidrap | 43,25 | 46,49 | 44,12 | 47,19 | 51,00 | 46,41 |
| Enrekang | 32,81 | 35,28 | 33,55 | 36,06 | 39,14 | 35,36 |
| Tana Toraja | 29,31 | 31,66 | 27,10 | 28,36 | 30,09 | 29,30 |

| Kabupaten/ Kota | PDRB per Kapita (Ribu Rupiah) | | | | | Rata-Rata Capaian Wilayah Setara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Luwu Utara | 38,65 | 41,65 | 41,07 | 44,33 | 48,96 | 42,93 |
| Toraja Utara | 37,84 | 41,08 | 37,37 | 39,16 | 42,18 | 39,53 |
| Palopo | 40,32 | 43,79 | 43,66 | 46,52 | 51,18 | 45,09 |

*Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023 (diolah)*

Adapun perkembangan PDRB Per kapita ADHB pada daerah setara dengan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Toraja Utara sebesar 4,86 poin, dan pertumbuhan terendah dialami oleh Kabupaten Sdirap sebesar 1,43 poin. Adapun pertumbuhan PDRB Per kapita ADHB Kabupaten Bulukumba berada pada angka 1,73 poin. Untuk nilai rata-rata PDRB Perkapita pada daerah setara, Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi daerah yang tertinggi nilai capaiannya, yaitu sebesar 48,33 juta rupiah, dan Kabupaten Jeneponto menjadi daerah yang memiliki capaian terendah dengan nilai rata-rata sebesar 27,08 juta rupiah. Adapun nilai rata-rata PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Bulukumba sebesar 34,76 juta rupiah. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik II-22**
**Perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita ADHB dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, Tahun 2018-202**

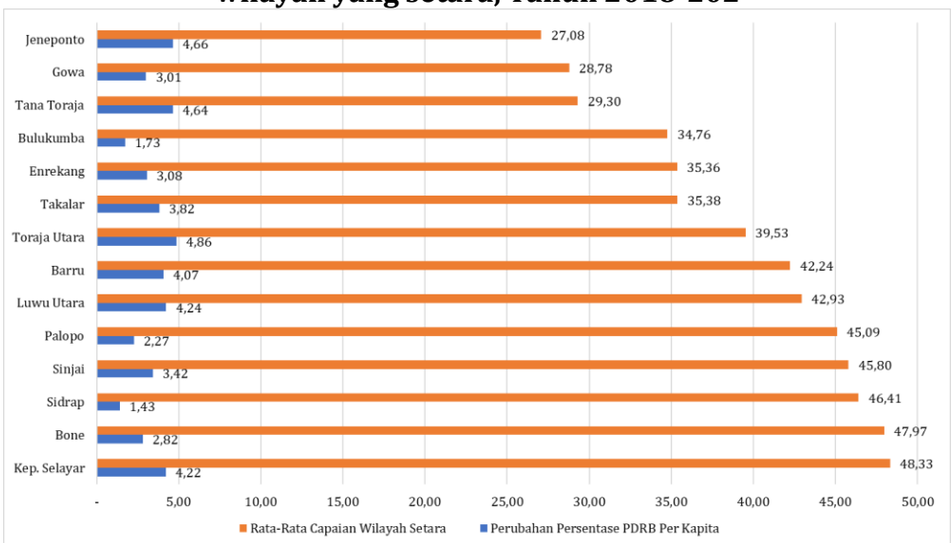


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

Gambaran perkembangan PDRB Per kapita ADHB Kabupaten Bulukumba dan daerah setara pada tahun 2022 secara kuadran dapat dilihat pada gambar berikut.

**Kuadran II-11**
**Analisi Kuadran Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHB) Terhadap Rata-rata Capaian Wilayah, Tahun 2018-2022**

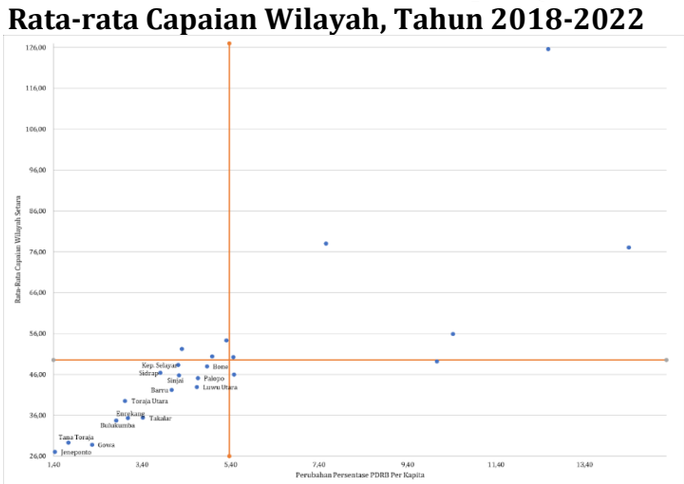


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah)*

Jika dibandingkan capaian Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US$4.783,9 dan PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan ADHB tahun 2021 sebesar 65,59 juta rupiah, capaian PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Bulukumba masih jauh lebih rendah yaitu hanya sebesar 38,55 juta rupiah dan mencapai nilai yang ditargetkan yaitu 38,20 persen dan kurun waktu lima tahun terakhir (2018-2022) terjadi tren kenaikan setiap tahunnya. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik II-23**
**Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Capaian Nasional, Tahun 2022**

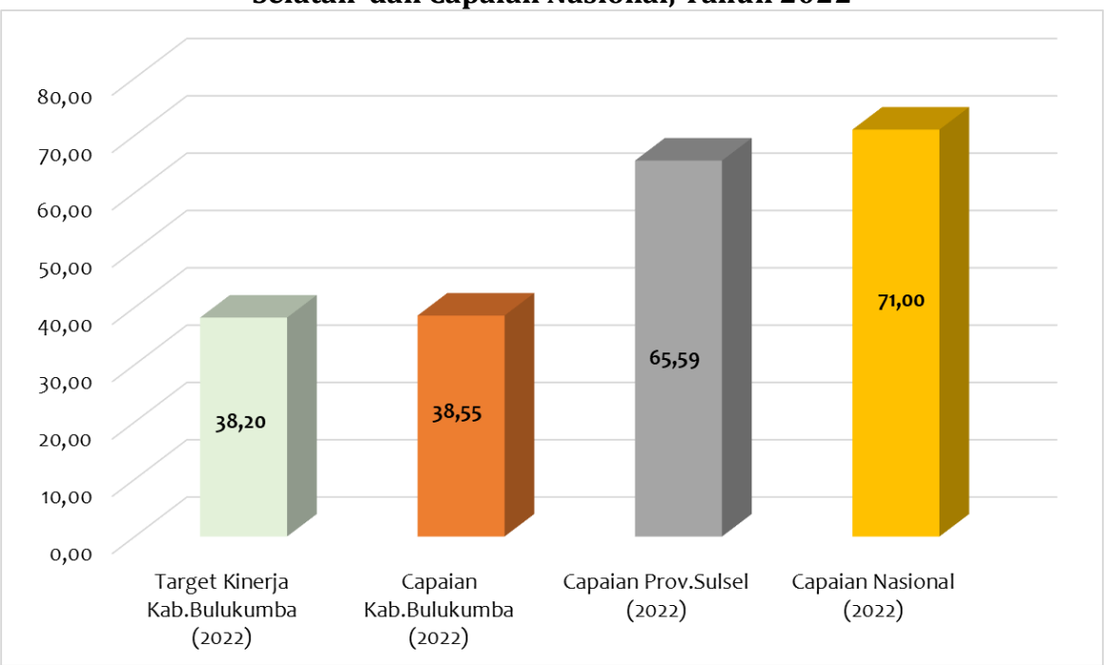


*Sumber : Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2023 (diolah)*

**11. Inflasi**

Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas. namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian. dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian tingkat inflasi harus diupayakan tidak menyebabkan kemerosotan perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan karena, inflasi kerap terjadi secara tiba-tiba, sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian jika tidak mampu mengatasinya dengan cepat.

Inflasi IHK Nasional pada Desember 2022 tercatat menjadi 0,66% (mtm) sehingga inflasi IHK 2022 menjadi 5,51% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2021 sebesar 1,87% (yoy) dan lebih tinggi dari sasaran 3,0+1%, terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022, dan untuk Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami inflasi sebesar 0,72% (mtm) atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,25% (mtm). Peningkatan bulanan utamanya disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan permintaan masyarakat pada momen HBKN Natal dan jelang akhir tahun serta adanya gangguan pasokan komoditas. Dengan perkembangan tersebut, keseluruhan tahun 2022 angka inflasi Sulsel tercatat sebesar 5,77% (yoy) sedangkan pada Desember 2022 di Bulukumba terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 4,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,51. Dari 5 kota IHK di Sulawesi Selatan, inflasi yoy tertinggi terjadi di Parepare sebesar

6,66 persen dengan IHK sebesar 115,98 sedangkan untuk inflasi yoy terendah terjadi di Bulukumba sebesar 4,12 persen dengan IHK sebesar 113,51.

Jika pada tahun 2022 nilai Inflasi Kabupaten Bulukumba diperbandingkan dengan nilai inflasi Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, Tingkat Inflasi di Kabupaten Bulukumba masih rendah dengan nilai 4,12 persen, dibandingkan tingkat inflasi Nasional sebesar 5,51 persen dan Provinsi Sulawesi Selata lebih tinggi yang mencapai sebesar 5,77 persen.

**Grafik II-24**
**Perkembangan Laju Inflasi Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2018-2022**

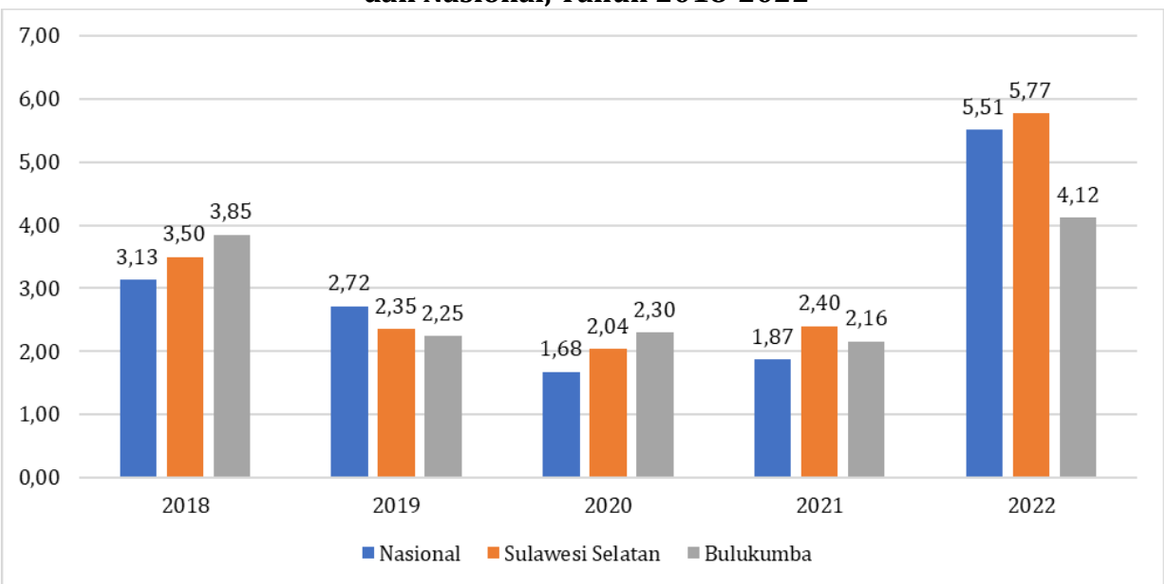


*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022*

### 12. Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Selama kurung waktu 2020-2022 kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bulukumba mengalami fluktuatif (cenderung naik turun), dapat dilihat pada tabel kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

**Tabel II-28**
**Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB** | | 24,80 | 24,32 | 24,42 |

### 13. Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian

Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan tiap tahunnya, dilihat pada tahun 2020 mengalami penurunan diakibatkan pasca Covid-19 yang menghambat transaksi pertanian namun pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 3,81 persen.

**Tabel II-29**
**Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian Kabupaten Bulukumba 2020-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian** | | -0,77 | 1,48 | 3,81 |

**14. Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB;**

Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB antara tahun 2020-2022 mengalami peningkatan fluktuasi.

**Tabel II-30**
**Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB** | | 11,94 | 12,95 | 12,57 |

**15. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan**

Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2022 mengalami peningkatan fluktuasi, salah satu penyebab sehingga terjadi penurunan pada tahun 2022 adalah kondisi perubahan cuaca.

**Tabel II-31**
**Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan** | | -1,93 | 8,78 | -0,31 |

**16. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD;**

Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tahun 2020-2025. Sementara kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil. Peningkatan jumlah tempat wisata sampai dengan tahun 2022 dan penetapan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional menjadi potensi peningkatan PAD dari sektor pariwisata sehingga menjadi sektor unggulan di Kabupaten Bulukumba ke depannya.

**Tabel II-32**
**Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Bulukumba 2020-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD** | | 2,6 | 3,41 | 4,47 |

**17. Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata;**

Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini memberikan implikasi bahwa jika pendapatan asli daerah meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Hal ini karena pendapatan asli daerah merupakan salah satu dari faktor penilaian pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang merupakan slaah satu sektor pertumbuhan ekonomidiambil salah satunya dari pendapatan asli daerah, sehingga semakin meningkatpendapatan asli daerah akan sangat membantu pembangunan dalam rangka menyukseskan pertumbuhan ekonomi. Pada Sektor Pariwiasata mengalami peningkatan fluktuasi dikarena minat wisatawan yang berpengaruh terhadap kebijakan penangan Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan minat kunjungan berkurang namun tetapi pemerintah tetap melakukan dorongan kegiatan khususnya pada tahun 2021 setelah pandemi covid-19 sehingga pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata meningkat menjadi 58,85 persen.

**Tabel II-33**
**Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata; Kabupaten Bulukumba 2020-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata** | | 1,31 | 58,85 | 22,48 |

**18. Indeks Daya saing infrastruktur;**

Perkembangan Indeks Daya saing infrastruktur Kabupaten Bulukumba Tahun 2020-2022 mengalami peningkatan stangan.

**Tabel II-34**
**Indeks Daya saing infrastruktur Kabupaten Bulukumba 2020-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Indeks Daya saing infrastruktur;** | | 85 | 80 | 80 |

**19. Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB;**

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nlai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

**Tabel II-35**
**Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba 2020-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB** | | 23,44 | 23,39 | 24,12 |

**20. Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri;**

Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri antara tahun 2020-2022 mengalami peningkatan fluktuasi.

**Tabel II-36**
**Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri Kabupaten Bulukumba 2020-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri** | | -4,85 | 12,23 | 6,68 |

### 2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

**1. Indeks Pendidikan**

Dari angka RLS dan HLS akan diperoleh indeks pendidikan yang merupakan salah satu penyusun IPM. Pada tahun 2022 ,indeks pendidikan Kabupaten Bulukumba sebesar 63,98 Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 63,32.

**Tabel II-37**
**Indeks Pendidikan Kabupaten Bulukumba 2020-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Indeks Pendidikan** | | 62,15 | 63,32 | 63,98 |

**2. Indeks Kesehatan;**

Indeks Kesehatan Kabupaten Bulukumba terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 sebesar 74,00 menjadi 74,63 pada tahun 2022.

**Tabel II-38**
**Indeks Kesehatan Kabupaten Bulukumba 2020-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Indeks Kesehatan** | | 73,72 | 74,00 | 74,63 |

**3. Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi**

Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2020-2022 mengalami peningkatan fluktuasi dikarenakan jumlah usia pemuda berbeda pada tiap tahunnya dan kegiatan pelaksanaan kepemudaan.

**Tabel II-39**
**Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi**
**Kabupaten Bulukumba 2020-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi** | Persen | 18 | 41,67 | 10,71 |

**4. Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani**

Menjaga kerukunan agama harus meneladani tiga konsep kerukunan beragama yakni kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Adapun Capaian Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-40**
**Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani**
**Kabupaten Bulukumba 2020-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani** | Persen | 100 | 100 | 100 |

**5. Indeks Reformasi Birokrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Adapun Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 dengan Indeks 1,81 atau kategori Cukup, untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-41**
**Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bulukumba 2020-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Indeks Reformasi Birokrasi** | | CC | CC | CC (59,46) |

**6. Skor LPPD/Kategori**

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik di antara yang terjelek dalam pengisian realisasi capaian masing-masing.

**Tabel II-42**
**Skor LPPD/Kategori Kabupaten Bulukumba 2020-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Skor LPPD/Kategori;** | | n/a | n/a* | 3,5025 |

**7. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya

**Tabel II-43**
**Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bulukumba 2020-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Indeks Kepuasan Masyarakat** | | 2,51-3,25 | 2,51-3,25 | 3,25 |

**2.1.2.3 Seni Budaya dan Olahraga**

Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dari hasil-hasil pembangunan yang dapat meningkatkan jumlah kelompok seni dan budaya dan jumlah kelompok olahraga di Kabupaten Bulukumba. Hasil-hasil pembangunan seni dan budaya selama periode 2018-2022, menunjukkan bahwa jumlah kelompok seni dan budaya di Kabupaten Bulukumba mengalami penurunan dari segi volume pelaksanaan kegiatan, hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba yang menyatukan penyelenggaraan seni dan budaya kedalam kegiatan festival phinisi pada tahun 2018, dan kegiatan tersebut telah menjadi agenda tahunan.

Untuk pembangunan di bidang keolahragaan, cakupan pembinaan olahraga secara umum mengalami penurunan yang drastis. Pada tahun 2018 pembinaan yang dilakukan sebesar 50 persen dan menurun pada tahun 2019 menjadi 25 persen dan tahun 2020 terjadi penurunan pembinaan secara drastis menjadi 8,33 persen. Namun pada tahun 2021 dan tahun 2022 terjadi peningkatan pembinaan olahraga, yaitu terjadi peningkatan 75 persen di tahun 2021 dan 85,71 persen di tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh karena penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional tingkat Propinsi (PORPROV) tahun 2022 ditempatkan di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai sebagai Tuan Rumah.

Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga menjadi faktor utama belum optimalnya pembinaan kelompok olahraga dalam masyarakat, faktor lain adalah keterbatasan anggaran dalam pembinaan dan pelaksanaan event olah raga. akan tetapi pada tahun 2021 cakupan pembinaan oahraga meningkat sebesar 75,00 persen, Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu Festival Phinisi. Adapun data perkembangan indikator seni budaya dan olahraga di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-44**
**Perkembangan Indikator Sektor Seni Budaya dan Olahraga**
**Kabupaten Bulukumba 2018– 2022**

| Tahun | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Kali | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Cakupan pembinaan olahraga | % | 50 | 25 | 8,33 | 75,00 | 85,71 |

*Sumber:Dinas Periwisata Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Bulukumba tahun 2022*

**2.1.3 Aspek Pelayanan Umum**

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan. baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan.

**2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar daerah Kabupaten Bulukumba. yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

**A. Urusan Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah sehingga pemerintah minimal harus mengalokasikan dana 20% dari APBD untuk pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan pendidikan dapat dinilai dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.

**1. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka PartisipasI Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan flujtuasi dikarenakan SMP/MTs yang tidak merata sehingga sebagian anak kesulitan untuk menjangkau fasilitas pendidikan. Selain itu, permasalahan ekonomi keluarga juga menjadi salah satu faktor penyebab anak usia sekolah tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs. Kondisi geografis Kabupaten Bulukumba juga menjadi kendala dalam pemerataan pendidikan. Penyebaran sarana pendidikan menjadi penting dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin kurang merata penyebarannya di Kabupaten Bulukumba, sehingga anak usia sekolah yang ada di daerah terpencil dihadapkan pada keterbatasan akses pendidikan lanjutan. Untuk mengetahui perkembangan APK SD/MI dan APK SMP/MTs di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022, selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-45**
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 - 2022**

| No | Indikator | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **APK SD** | % | 108,09 | 113,1 | 112,49 | 106,38 | 113,27 |
| 2 | **APK SMP** | % | 87,9 | 87,75 | 90,74 | 81,88 | 86,46 |

*Sumber: BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2023*

**2. Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka partisipasi murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Hal ini juga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, sebab pengukuran APM menggunakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia sekolah yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan.

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Perhitungan partisipasi murni sejak tahun 2007, tidak hanya menghitung siswa pada sekolah formal, tetapi juga termasuk siswa yang menempuh pendidikan pada pendidikan non formal (Paket A. Paket B. dan Paket C).

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Bulukumba mengalami tren yang berfluktuasi selama periode 2018-2022. Pada tiap tahunnya terjadi peningkatan dilihat pada tahun 2022 untuk APM SD/MI sebesar 99,55 dan APM SMP/MTs sebesar 83,05.

**Tabel II-46**
**Perkembangan APM Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| No. | Indikator | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | APM SD/MI | % | 98,75 | 98,48 | 98,32 | 98,06 | 99,55 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | APM SMP/MTs | % | 82,21 | 82,36 | 83,37 | 74,01 | 83,05 |

*Sumber: BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2023*

Data diatas menunjukkan bahwa secara umum, capaian APM pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 belum terlalu optimal, mengingat tren capaian indikator yang berfluktuasi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan adalah aksesibilitas sekolah yang belum optimal. Selain itu beberapa faktor yang penghambat pencapaian target antara lain sarana dan prasarana pendidikan dan penguatan penerapan regulasi wajib belajar yang belum optimal.

**3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut untuk 1000 penduduk. APS dihitung untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu. Capaian APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Pembangunan pendidikan pada dasarnya adalah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, pemerintah daerah diperlukan untuk secara berkelanjutan melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengetahui perkembangan capaian APS usia 7 -12 Tahun, APS usia 13 - 15 Tahun, dan APS usia 16 - 18 Tahun di Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2020 dapat diilhat pada tabel berikut.

**Tabel II-47**
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| No. | Indikator | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | APS 7 -12 Tahun | % | 98,93 | 98,77 | 98,80 | 99,06 | 99,55 |
| 2. | APS 13 - 15 Tahun | % | 92,36 | 93,14 | 91,91 | 93,91 | 92,72 |
| 3. | APS 16 - 18 Tahun | % | 74,43 | 74,04 | 74,37 | 73,92 | 74,39 |

*Sumber: Statistik Kesejahteraan Kabupaten Bulukumba 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba 2023*

**4. Angka Putus Sekolah**

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Angka Putus Sekolah (APS) bertujuan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan. Selain itu, APS berfungsi untuk melihat keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur.

Capaian Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 di semua jenjang pendidikan menunjukkan tren yang berfluktuasi, hal ini menunjukkan belum optimalnya intervensi pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam penanganan Angka Putus Sekolah. Hal ini dikarenakan keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kualitas pendidikan masih belum optimal. Untuk mengetahui perkembangan capaian APS SD/MI dan APS SMP/MTs, di Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022 dapat diilhat pada tabel berikut.

**Tabel II-48**
**Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bulukumba,**
**Tahun 2018 – 2022**

| No. | Indikator | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | APS SD/MI | % | 0,28 | 0,5 | 0,03 | 0,8 | 0,57 |
| 2. | APS SMP/MTs | % | 0,66 | 0,9 | 0,11 | 1,2 | 0,15 |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2023*

**5. Angka Kelulusan**

Angka Kelulusan (AL) merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang terakhir. Pada tahun 2021, Angka Kelulusan di Kabupaten Bulukumba sudah mencapai 100 persen namun pada tahun 2022 terjadi penurunan kelulusan diakibatkan proses pembelajaran kurang efektif karena dipengaruhi pembatasan tatap muka (Pandemi *Covid-19*). Hal ini sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai dan juga sesuai dengan standar penilaian minimal Dinas Pendidikan. Perkembangan Angka Kelulusan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-49**
**Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018 – 2022**

| No. | Indikator | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AL SD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 95,76 |
| 2. | AL SMP | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,68 |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2023*

**6. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**

Kualitas guru saat ini dipandang sesuatu hal yang sangat penting karena seorang guru memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya sebagai pendidik, guru juga turut serta dalam menghasilkan lulusan peserta didik yang berkualitas dan bermutu. Olehnya itu, guru diharuskan memiliki sertifikasi pendidikan minimal S1/D-IV.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2020, rata-rata capaian guru dengan kualifikasi lulusan S1/D-IV sebesar 88,91 persen. Pada tahun 2020 jumlah guru dengan status sarjana mengalami penurunan drastis sebesar 92,08 persen hal ini dikarenakan adanya pengalihan kewenangan urusan SMA/MA/SMK dari kabupaten menjadi urusan provinsi, serta adanya guru yang pindah tugas. Untuk tahun 2021 jumlah guru lulusan S1 sebesar 70,59 persen dan tahun 2022 sebesar 85,15, Adapun perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-50**
**Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022**

| No. | Indikator | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | % | 85,40 | 98,48 | 92,08 | 70,59 | 85,15 |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2023*

**7. Rasio guru/murid sekolah**

Rasio guru dan murid sekolah menggambarkan bagaimana beban kerja guru dalam mengajar, melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid di kelas.

Untuk rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang menurun pada kurun waktu tersebut, tahun 2017 nilai rasionya sebesar 1:28 dan mengalami penurunan pada tahun 20201 menjadi 1:15,

Sedangkan untuk rasio Guru/Murid SMA mengalami penurunan di tahun 2018-2022, tahun 2017 nilai rasionya sebesar 1:27 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 1:9, Tren penurunan rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah pada periode tahun 2018-2022 disebabkan oleh karena pada tahun 2017 jumlah tenaga pendidikan/guru yang dihitung adalah hanya Tenaga Pendidikan/Guru yang berstatus ASN diperbandingkan dengan jumlah siswa, sehingga nilainya berada di atas nilai rasio ideal (1:20), sementara pada tahun 2018-2021 jumlah tenaga pendidikan/guru yang dihitung adalah Jumlah Tenaga Pendidikan/Guru yang berstatus ASN dan Guru Honorer yang diperbandingkan dengan jumlah murid jenjang pendidikan dasar dan menengah, sehingga capaiannya mengalami penurunan jauh lebih rendah kecuali Rasio guru/murid

sekolah pendidikan Dasar pada tahun 2021 meningkat dikarenakan adanya penetapan dan pengangkatan ASN pada tahun tersebut. Capaian Rasio Guru-Murid dan Sekolah di Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel II-51**
**Rasio Guru-Murid dan Sekolah Kabupaten Bulukumba,Tahun 2018 - 2022**

| No. | Indikator | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rasio guru/murid sekolah pendidikan Dasar | Rasio | 1 : 14 | 1 : 14 | 1 : 13 | 1 : 15 | 1 : 13 |
| 2. | Rasio guru terhadap murid pendidikan Menengah | Rasio | 1 : 12 | 1 : 12 | 1 : 9 | 1 : 9 | 1 : 9 |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2023*

**8. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 tahun ke Atas**

Salah satu indikator penilaian mendasar dari tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah adalah dengan melihat angka melek huruf (AMH). Melek huruf sendiri adalah kemampuan membaca dan menulis, dimana seseorang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Sedangkan seseorang hanya dapat membaca dan menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf. Indikator ini dapat dijadikan gambaran peningkatan kualitas sumber daya manusia disuatu daerah.

Pada Tahun 2021, Angka Melek Huruf di Kabupaten Bulukumba sebesar 89,9 persen, nilai tersebut menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang nilainya sebesar 90,3 persen. Pada tahun 2020 masih terdapat sebesar 9,7 persen Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang buta huruf, dan kelompok umur yang paling tinggi jumlah buta hurufnya adalah penduduk yang berusia 50 tahun ke atas. Angka Melek Huruf Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022, selengkapnya dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-52**
**Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| No. | Indikator | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Angka Melek Huruf (AMH) | % | 92,5 | 92,9 | 90,3 | 89,9 | 93,31 |

*Sumber: BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba Tahun 2023*

**B. Urusan Kesehatan**

**1. Angka Kematian Bayi**

Infant Mortality Rate atau Angka Kematian Bayi (AKB ) merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, baik pada tataran kabupaten, provinsi maupun nasional. Selain itu, program - program kesehatan di Indonesia banyak yang menitik beratkan pada upaya penurunan AKB.

Angka Kematian Bayi merujuk kepada jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. jumlah kematian bayi menurut laporan Puskesmas di Kabupaten Bulukumba berfluktuasi pada 2017 - 2018 mengalami peningkatan sebesar (10,91 per 1000 KH),sedangkan tahun 2019-201 mengalami penurunan menjadi (0,29 per 1000 KH) begitupun pada tahun 2022 menjadi 0,009 per 1000 KH. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel II-53**
**Angka Kematian Bayi (AKB)Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Jumlah Kematian Bayi** | Kasus | 69 | 64 | 51 | 20 | 34 |

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran HidupKelahiran Hidup** | Angka | 10,91 | 10,05 | 7,53 | 2,90 | 5,24 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022*

**2. Angka Kematian Balita**

Sepanjang tahun 2018-2022, Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup dari tahun cenderung mengalami penurunan, Rata-rata kematian Balita disebabkan oleh Diare dan Pneumonia, penyebab ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada saat anak sakit. Ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor risiko serta tata laksana dalam penanganan balita sakit yang belum kuat. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-54**
**Angka Kematian Balita (AKBa)Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Jumlah Kematian Balita** | Kasus | 88 | 70 | 54 | 50 | 16 |
| **Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup** | Angka | 14,06 | 10,99 | 7,98 | 7,5 | 9,99 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023*

**3. Angka Kematian Neonatal**

Sepanjang tahun 2018-2022, angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup mengalami tren yang fluktuatif dan pada tahun 2022 tidak ditemukan Kematian Neonatal. Kematian Neonatal umumnya disebabkan oleh BBLR dan Asfiksia, hal ini berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu hamil yang melahirkan bayi BBLR dan kemampuan petugas dalam mendeteksi dan tata laksana awal bayi beresiko serta dukungan sarana prasarana dalam penanganan bayi baru lahir bermasalah. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi baru lahir, dan kualitas kesehatan. ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-55**
**Angka Kematian Neonatal Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Jumlah Kematian Neonatal** | Kasus | 72 | 51 | 45 | 50 | 0 |
| **Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup** | Angka | 11,51 | 8,01 | 6,65 | 7,29 | 0,00 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023*

**4. Angka Kematian Ibu (AKI)**

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain. Penyebab kematian ibu di Kabupaten Bulukumba terutama dikarenakan hipertensi dalam kehamilan dan pendarahan. Berdasarkan dua penyebab kematian tersebut, pengoptimalan program Antenatal Care (ANC) atau disebut juga Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan akan berdampak besar dalam mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan dan kematian. Sebaran kasus kematian ibu.

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2018 - 2022 cenderung berfluktuasi, kematian ibu di tahun 2017 kematian ibu meningkat menjadi 92,91 kasus dan pada tahun 2018 kasus kematian ibu meningkat lagi menjadi 110,64 kasus, pada tahun 2019 turun menjadi 47,10 kasus kematian dan pada tahun 2020 terdapat sebanyak 59,08 kasus kematian dan menglmi peningktn angkat kematian ibu per 100.000 kelahiran sebesar 145,88 kasus dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 137,59 per 100.000. Beberapa faktor penyebab terjadinya kondisi ini diantaranya kondisi fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana di beberapa Kecamatan untuk penanganan kegawat daruratan maternal dan neonatal masih belum optimal, distribusi SDM kesehatan yang kompeten untuk kasus kegawat daruratan belum merata ditingkat puskesmas, serta belum optimalnya pelayanan Antenatal Care (ANC) sesuai standar pada semua Kecamatan sehingga deteksi resiko terlambat diketahui. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-56**
**Angka Kematian Ibu (AKI)Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Jumlah Ibu Hamil Yang Meninggal karena Hamil, Bersalin dan Nifas** | Orang | 7 | 3 | 4 | 10 | 9 |
| **Jumlah Kelahiran Hidup** | Orang | 6.327 | 6.370 | 6.770 | 6.855 | 6.522 |
| **Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup** | Per 100.00 kelahiran | 110,64 | 47,10 | 59,08 | 145,88 | 137,99 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022*

**5.** Rasio Posyandu per satuan balita

Keberadaan Posyandu dinilai dengan strata pratama, madya, purnama dan mandiri sehingga indikator keberhasilan Posyandu diukur dengan strata purnama dan mandiri, dimana jumlah Posyandu Purnama dan Mandiri terhadap per satuan balita, cenderung mengalami peningkatan. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari minat masyarakat untuk menjadi kader posyandu semakin meningkat. Disamping itu bertambahnya posyadu juga dipicu oleh meningkatnya kepercayaan orang tua akibat layanan posyandu yang dianggap baik. Perkembangan rasio posyandu per satuan balita disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II-57**
**Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Jumlah Posyandu** | Unit | 562 | 581 | 593 | 593 | 597 |
| **Jumlah Balita** | Orang | 42.409 | 29.886 | 25.192 | 25.371 | 26.358 |
| **Rasio Posyandu per satuan Balita** | Per 1.000 Balita | 13.25 | 19,44 | 23,54 | 23.37 | 22,65 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022*

**6. Rasio Puskesmas dan Pustu Persatuan penduduk**

**a. Rasio puskesmas per satuan penduduk**

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan terdepan bagi masyarakat, terus ditingkatkan baik dari jumlah maupun kualitas pelayanannya. Pada Tahun 2021 jumlah puskesmas di Kabupaten Bulukumba sebanyak 20 Unit.

**b. Rasio pustu per satuan penduduk**

Puskesmas Pembantu ( pustu) adalah sarana kesehatan yang terdepan di Masyarakat dan merupakan bagian jaringan pelayanan dari Puskesmas yang mengemban tugas memberikan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi Promotif,

Preventif dan kuratif. Pada tahun 2021 terdapat 61 unit Pustu yang tersebar di 10 Kecamatan dan 136 Desa/Kelurahan.

Rasio ketersediaan puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, menunjukkan kondisi yang stagnan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Peningkatan jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) hanya pada tahun 2021 sebanyak 60 Pustu pada tahun 2017, kemudian menignkat lagi menjadi 61 Pustu hingga pada tahun 2021. Angka rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, dapat dilihat di tabel berikut.

**Tabel II-58**
**Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Jumlah Penduduk** | Orang | 418.326 | 420.603 | 437.607 | 445.699 | 463.981 |
| **Jumlah Puskesmas** | Unit | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **Jumlah Puskesmas Pembantu** | Unit | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| **Jumlah Puskesmas dan Puskesmas pembantu Pustu)** | Unit | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| **Rasio Puskesmas dan Pustu** | Per 1000 Penduduk | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0.17 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023*

**c. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk**

Rasio ketersediaan Rumah Sakit per Satuan penduduk menunjukkan kondisi yang stagnan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Untuk kondisi tahun 2021, Kabupaten Bulukumba memiliki 2 unit Rumah Sakit tipe B dan 17 klinik kesehatan, sehingga kedepannya diperlukan upaya pemerintah daerah untuk membangun rumah sakit tipe C dan D di daerah kecamatan yang jaraknya jauh dari ibukota kabupaten, agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat bisa dimaksimalkan. Angka Rasio Rumah Sakit dan Rasio Klinik per Satuan Penduduk, dapat dilihat di tabel berikut.

**Tabel II-59**
**Rasio Rumah Sakit dan Rasio Klinik Per Satuan Penduduk**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Jumlah Penduduk** | Orang | 418.326 | 420.603 | 437.607 | 445.699 | 463.981 |
| **Jumlah Rumah Sakit** | Unit | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| **Jumlah Poliklinik** | Unit | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| **Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk** | Per 1000 Penduduk | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0.004 |
| **Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk** | Per 1000 Penduduk | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0.04 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023*

**d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk**

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang termasuk tenaga kesehatan dalam kelompok tenaga medis terdiri atas dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

Rasio Dokter per satuan penduduk di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2017- 2021 mengalami tren yang meningkat pada kurun waktu tersebut. Pada tahun 2018-2022 jumlah dokter umum dan spesialis mengalami penurunan sebesar 0,099 mendi 0,14 per 1000 penduduk, Perkembangan Rasio Dokter per satuan penduduk di Kabupaten Bulukumba selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-60**
**Rasio Dokter Per Satuan PendudukKabupaten Bulukumba**
**Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Jumlah Dokter Umum/Spesialis** | Orang | 40 | 40 | 34 | 64 | 118 |
| **Jumlah Penduduk** | Orang | 418.326 | 420.603 | 437.607 | 445.699 | 463.981 |
| **Rasio Dokter Per Satuan Penduduk** | Per 1000 Penduduk | 0,096 | 0,095 | 0,078 | 0,14 | 0.25 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023*

**e. Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk**

Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk di Kabupaten Bulukumba selama tahun 2017-20201 mengalami tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2017 dan 2018 jumlah Dokter sebanyak 83 orang (0,188- 0,198), tahun 2019 meningkat menjadi 96 orang (0,198), tahun 2020 kembali menurun menjadi 88 orang (0,209), namun pada tahun 2021 jumlah dokter bertambah menjadi 114 orang (0,256). Perkembangan Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk di Kabupaten Bulukumba selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-61**
**Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Jumlah Tenaga Medis** | Orang | 83 | 96 | 88 | 114 | 153 |
| **Jumlah Penduduk** | Orang | 418.326 | 420.603 | 437.607 | 445.699 | 463.981 |
| **Rasio Tenaga Medis/Penduduk** | Angka Per 1000 Penduduk | 0,198 | 0,228 | 0,209 | 0,256 | 0.33 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023*

**f. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan**

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2017 sebesar 86,67 persen, tahun 2018 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan turun menjadi 85,45 persen, kemudian tahun 2019 persalinan oleh tenaga kesehatan menurun ke angka 79,51 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 86,35 persen hingga tahun 2021 meningkt sebesar 87,46. Ini diakibatkan karena adanya peran aktif tenaga medis/kesehatan melakukan sosialisasi terkait keselamatan ibu bersalin dan meningkatnya sarana dan prasarana pada seluruh layanan kesehatan. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-62**
**Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatandi satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu** | Orang | 6221 | 5788 | 6776 | 6855 | 6541 |
| **Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayahkerja dalam kurun waktu yang sama** | Orang | 7280 | 7280 | 7847 | 7847 | 7655 |
| **Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan** | % | 85,45 | 79,51 | 86,35 | 87.46 | 85,45 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023*

**g. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**

Penyelenggaraan imunisasi di Indonesia diukur dengan cakupan *UCI (Universal Child Immunization)* yaitu suatu kondisi dimana minimal 80 persen bayi yang berada dalam suatu desa telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap,Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan campak) Bentuk pelayanan kesehatan bayi berupa pemberian imunisasi rutin bagi bayi umur 0 – 1 tahun (BCG, DPT, Polio, Campak, HB) yang dilakukan di Posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-63**
**Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Jumlah Desa/Kelurahan UCI** | Desa/Kel | 136 | 136 | 45 | 87 | 123 |
| **Jumlah SeluruhDesa/Kelurahan** | Desa/Kel | 136 | 136 | 136 | 36 | 136 |
| **Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)** | % | 100 | 100 | 33,1 | 63,97 | 90.44 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023*

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa cakupan pemberian imunisasi di Kabupaten Bulukumba Periode 2018-2022 menunjukkan konsistensi capaian sebesar 100 persen antara tahun 2017-2019, namun terjadi penurunan pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 smpai tahun 2021 merupakan tahun merebaknya wabah pandemi *Covid-19*, dimana dilakukan pembatasan sosial sehingga kegiatan ini hanya mampu menjangkau 87 desa/kelurahan atau hanya sebesar 63,97 persen.

**h. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan**

Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, dari tahun 2017 sampai 2021, menunjukkan tren yang berfluktuasi, dan cakupannya telah mencapai 100 persen. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor diantaranya meningkatnya surveilans gizi, sehingga kasus-kasus yg terjadi semuanya dapat ditemukan dan dilakukan intervensi penatalaksanaan kasus gizi buruk. Selain itu tersedianya aplikasi by name by addres Pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) sehingga data antropometri balita dan status gizinya tercatat dengan baik, selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II-64**
**Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Jumlah Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan** | Balita | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 |
| **Jumlah seluruh Balita Gizi Buruk yang ditemukan** | Balita | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 |
| **Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan** | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021*

**i. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA**

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC selama 3 tahun (2017-2019) menunjukkan adanya peningkatan yaitu tahun 2017 sebanyak 52,0 persen, tahun 2018 sebanyak 58,4 persen dan tahun 2019 sebanyak 67,4 persen dan tahun 2020 menurun menjadi 39,4 persen dan ditahun 2021 meningkat sebesar 71,3 persen . Hal ini disebabkan karena kurangnya masyarakat untuk melakukan pemerikasaan kesehatan akibat gejala yang di timbulkan bagi penderita penyakit TBC hampir mirip dengan gejala bagi penderita *Covid-19* dan adanya pembatasan layanan kesehatan masyarakat akibat pandemic. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-65**
**Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati** | Jiwa/ Orang | 338 | 390 | 237 | 385 | 530 |
| **Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)** | Jiwa/ Orang | 579 | 579 | 602 | 540 | 828 |
| **Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA** | % | 58,4 | 67,4 | 39,4 | 71,3 | 64.0 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023*

**j. Tingkat Prevalensi Tuberkolosis (Per 100.000 Penduduk)**

Prevalensi Kasus TBC untuk semua tipe menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup siginifikan. Tahun 2017 dan tahun 2018 meningkat menjadi 637 orang, tahun 2019 kembali mengalami peningkatan penderita sebanyak 651 orang, dan pada tahun 2020 jumlah penderita TBC menurun menjadi 346 orang dan pad tahun 2021 kasusu penderita TBC meningkat sangat drastis sebesar 5400 orang. Peningkatan Prevalensi Kasus TBC disebabkan dengan adanya rekomendasi Kementerian Kesehatan untuk melakukan penyisiran kasus di Rumah Sakit baik Pemerintah maupun Swasta karena masih banyaknya kasus TBC yang ditemukan namun tidak terlaporkan. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-66**
**Tingkat Prevalensi Tuberkolosis**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Jumlah Kasus Penderita TBC** | Orang | 637 | 651 | 346 | 5400 | 767 |
| **Jumlah Penduduk** | Orang | 418.326 | 420.603 | 437.607 | 445.699 | 463.981 |
| **Tingkat Prevalensi Tuberkolosis** | Per 100.000 penduduk | 152,27 | 154,78 | 79,07 | 121,16 | 165,31 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023*

**k. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis**

Angka kematian pada Penderita TBC pada tahun 2017 sebanyak 6,0, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 5,7, tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 7,4 dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 3,2 per 100.000 penduduk dan pada tahun 2021 kembali meningktsebear 6,48 . Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-67**
**Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2022 |
| **Jumlah Kematian karena TB** | Jiwa | 24 | 31 | 14 | 35 | 39 |
| **Jumlah Penduduk** | Orang | 418.326 | 420.603 | 437.607 | 445.699 | 463.981 |
| **Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis** | Per 100.000 Penduduk | 5,7 | 7,4 | 3,2 | 6,48 | 8,41 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021*

Beberapa hal yang menjadi penyebab kematian penderita TBC masih tinggi adalah:

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih dini bila ditemukan gejala awal TBC.
- Keterlambatan dalam mengakses fasilitas kesehatan karena stigma yang masih ada di masyarakat.
- Pengobatan yang tidak tuntas sehingga risiko kematian semakin tinggi.
- Penyebab utama kematian bukan karena penyakit TBC tapi adanya penyakit komorbid (penyakit penyerta) lainnya.

**l. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Bulukumba tahun 2017-202 menunjukkan tren yang fluktuatif secara jumlah, namun bersifat konstan dari segi capaian penanganan selama periode tersebut. Tahun 2017 turun menjadi 110 orang, tahun 2018 jumlahnya naik menjadi 152 orang, tahun 2019 jumlahnya kembali naik menjadi 275 kasus, namun tahun 2020 jumlah penderita penyakit DBD turun menjadi 160 orang dan pada tahun 2021 jumlah penderita mengalami penuruan sbesar 112 orang. Dari segi penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022 capaiannya sebesar 100%

**Tabel II-68**
**Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Jumlah keseluruhan penderita DBD** | Jiwa | 152 | 275 | 160 | 112 | 141 |
| **Jumlah penderita DBD yang ditemukan** | Jiwa | 152 | 275 | 160 | 112 | 141 |
| **Cakupan Penemuan dan Penanganan Pederita Penyakit DBD** | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023*

**m. Angka kejadian Malaria**

Pengendalian penyakit malaria telah menunjukkan pencapaian program yang cukup baik. Hal ini terlihat dari Angka Kejadian Malaria yang diukur dengan Annual Parasite Incidence (API) yang menjadi indikator keberhasilan upaya penanggulanganmalaria cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa segala upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan memiliki nilai signifikan dalam pengendalian malaria.

Pencapaian kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya peningkatan sumber daya manusia baik dalam diagnosis dan tata laksana, serta manajemen program, dan peningkatan kapasitas tenaga laboran dalam pemeriksaan sediaan darah malaria. Selain itu dilakukan juga surveilans migrasi dan penyelidikan epidemiologi kasus positif malaria, penemuan suspek malaria baik secara aktif maupun pasif, pelaksanaaan Penyelidikan Epidemiologi (PE) 1-2-5 terhadap semua kasus positif malaria, serta pemberian pengobatan sesuai standar kepada penderita malaria. Angka kejadian malaria di kabupaten Bulukumba Tahun 2018 - 2022 menunjukkan tren yang berfluktuasi, namun secara keseluruhan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya pada tahun 2021 yakni 10 kasus penderita malaria. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-69**
**Angka Kejadian Malaria Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Jumlah Penderita Malaria** | Orang/ kasus | 43 | 23 | 5 | 10 | 23 |
| **Jumlah Penduduk** | Jiwa | 418.326 | 420.603 | 437.607 | 445.699 | 463.981 |
| **Angka Kejadian Malaria** | Per 100.000 Penduduk | 10,28 | 5,47 | 1,19 | 0,02 | 4,96 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023*

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukanberbagai factor yang menghambat diantaranya masih belum maksimalnya keterlibatan lintas sektor dan lintas program dalam hal penemuan kasus, minimnya anggaran pencegahan dan pengendalian malaria, serta tidakadanya regulasi daerah yang dapat mendukung pencegahan dan pengendalian malaria.

**n. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total Populasi**

Prevalensi HIV dari total populasi di Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Tahun 2017 terdapat 21 orang penderita HIV/AIDS dengan angka prevalensi sebesar 0,005, dan pada tahun 2021 jumlah penderita HIV/AIDS meningkat menjadi 34 orang atau 0,34 dari total populasi penduduk. Sesuai dengan tingkat epidemiologi, Kabupaten Bulukumba adalah epidemiologi terkonsentrasi artinya kasus HIV yang ada tinggi tapi berada di populasi-populasi tertentu, belum sampai ke masyarakat umum. Kendala yang dihadapi diantaranya belum semua Puskesmas dan Rumah Sakit melakukan penemuan kasus HIV dan sistem pencatatan dan pelaporan dengan Aplikasi sistem Informasi HIV AIDS belum digunakan maksimal karena terkendala sarana komputer dan jaringan wifi. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-70**
**Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Jumlah Penderita HIV/AIDS** | Orang | 42 | 66 | 38 | 34 | 64 |
| **Jumlah Penduduk** | Jiwa | 418.326 | 420.603 | 437.607 | 445.699 | 463.981 |
| **Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi per 100.000** | % | 0,010 | 0,016 | 0,009 | 0,34 | 13.79 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023*

**o. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin**

Pemerintah Pusat melalui Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin sejak tahun 2008 yang merupakan peralihan program Asuransi Miskin (ASKESKIN) dan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Kabupaten Bulukumba melalui Program Jaminan Kesehatan Gratis yang keduanya sekarang telah berintegrasi menjadi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berupaya untuk menghadapi permasalahan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan penjaminan/pembebasan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang berlaku. Selain itu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat miskin didukung dengan penganggaran kegiatan-kegiatan operasional untuk meningkatkan penyediaan serta efektivitas berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat non personal seperti penyuluhan kesehatan, regulasi pelayanan kesehatan dan penyediaan obat, keamanan dan kesehatan makanan, pengawasan terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan pemukiman dan realokasi berbagai sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan daerah miskin dan masyarakat tidak mampu.Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-71**
**Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Jumlah Masyarakat Miskin yang dilayani (rujukan)** | Jiwa | 8.480 | 9.483 | 6.010 | 75,698 | |
| **Jumlah Penerima PBI KJN** | Jiwa | 208.227 | 187.225 | 118.100 | 214.079 | |
| **Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin** | % | 4,07 | 5,06 | 5,09 | 35,36 | 8,27 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023*

**p. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4**

Berdasarkan data di bawah, cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) berfluktuasi dari tahun ke tahun dan masih ada disparitas antar Kabupaten/kota yang variasinya cukup besar selain adanya kesenjangan, ditemukan juga ibu hamil yang tidak menerima pelayanan dimana seharusnya diberikan saat kontak dengan tenaga kesehatan (missed opportunity). Selain faktor tersebut adanya pernikahan dini sehingga ibu hamil malu kontak dengan petugas kesehatan dan pada akhirnya terlambat memperoleh pelayanan antenatal lengkap sesuai standar yang seharusnya diperoleh oleh ibu hamil, kondisi geografis yang sulit akses ke fasilitas kesehatan sehingga ibu hamil tidak rutin datang memeriksakan kehamilannya dimana setiap ibu hamil seharusnya mendapatkan pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu : 1 kali pada trimester ke-1 (0-12 minggu), 1 kali pada trimester ke-2 (>12-24 minggu), dan 2 kali pada trimester ke-3 (>24 minggu sampai dengan kelahiran). Jika ibu hamil tidak memperoleh pelayanan seperti tersebut di atas padamasa kehamilan, maka tidak dapat dilaporkan sebagai cakupan kunjungan ibu hamillengkap (K4), kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan jika ada keluhan, penyakit dan gangguan kehamilan. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-72**
**Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Jumlah Ibu Hamil yang memeriksakan Kandungan (K4)** | Orang | 5.943 | 5.262 | 6.026 | 4,497 | 5.771 |
| **Jumlah Ibu Hamil** | Orang | 7.625 | 7.265 | 8.220 | 8,220 | 8.220 |
| **Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4** | % | 77,94 | 72,43 | 73,3 | 92,42 | 70.21 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2021*

Secara umum penyebab masih adanya ibu hamil yang tidak memperoleh pelayanan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) diantaranya belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan, kondisi tempat tinggal ibu hamil dan keluarga yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan (wilayah terpencil, serta adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau sampai masa persalinannya).

Meskipun demikian, beberapa faktor yang mendukung peningkatan cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Bulukumba diantaranya, adanya regulasi terkait pelayanan Standal Minimal untuk Pelayanan Antenatal Care yang sesuai SOP, kunjungan oleh tenaga kesehatan kepada ibu hamil, adanya keterlibatan da perhatian tokoh masyarakat dan kader agar setiap ibu hamil memeriksakan diri kepada tenaga kesehatan secara teratur, memperkuat Komunikasi, Infomasi dan Edukasi kepada Kader dan Masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan, adanya pelaksanaan kelas ibu hamil di Desa dalam upaya untuk peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga, serta berjalannya Pemantauan Wilayah Setempat Program Kesehatan Ibu dan Anak

**q. Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 Bulan keluarga miskin**

Data pemberian makanan Pendamping ASI untuk khusus untuk keluarga miskin, tidak tersedia disebabkan dalam juknis MP-ASI yg dikeluarkan oleh kemenkes, Prioritas pemberian MP-ASI adalah diperuntukkan bagi baduta kategori kurus (BB/TB) <-2 SD sehingga tanpa memandang status kemiskinan semua balita kategori kurus mendapatkan MP-ASI. Begitu pula untuk keluarga miskin bila balitanya memiliki status gizi baik maka tidak diberikan MP-ASI. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-73**
**Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin** | % | 77,94 | 63,63 | 45,25 | 71,31 | 52,65 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023*

**r. Cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin**

Cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang berfluktuasi, tahun 2017 nilainya sebesar 68,21 persen, tahun 2019 mningkat menjadi 80,56 persen, dan tahun 2020 capaian tersebut turun lagi menjadi 52,37 persen da di tahun 2021 meningkat m jadi 60,4 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-74**
**Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin** | % | 93.75 | 80,56 | 52,37 | 60,4 | 85,687 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2023*

## C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### 1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Infrastruktur jalan merupakan instrumen penting untuk mengakselerasikan perwujudan posisi Kabupaten Bulukumba sebagai pilar utama pembangunan di kawasan selatan. Infrastruktur jalan yang berkualitas akan berdampak langsung terhadap efisiensi sektor-sektor lainnya sebagai akibat dari terinduksinya biaya transportasi dan meningkatnya waktu tempuh, yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.510/X/2016 tentang Penetapan status Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Bulukumba, menurut statusnya panjang jalan Kabupaten Bulukumba meningkat dari 1.039,17 Km menjadi 1.211,516 Km. Perubahan Keputusan Bupati terhadap kewenangan jalan berdampak pada persentase kondisi jalan yang menurun pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018-2019 panjang jalan dalam kondisi baik meningkat akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 persentase kondisi jalan baik kembali mengalami penurunan disebabkan oleh kondisi penggangaran dan terpenuhinya target kondisi jalan yang baik di tahun 2020 dan 2021, Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-75**
**Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Panjang Jalan Kondisi baik | Km | 704,74 | 848,74 | 630,57 | 560,393 | 718,90 |
| Panjang jalan kondisi sedang | Km | 506,77 | 362,776 | 556,81 | 157,954 | 165,43 |
| Panjang jalan Keseluruhan | Km | 1.211,516 | 1.211,516 | 1.211,516 | 1.147,72 | 1.147,72 |
| **Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik** | % | 0,582 | 0,701 | 0,520 | 0,49 | 0,62 |

*Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Bulukumba tahun 2023*

### 2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Pembangunan jalan dilakukan untuk menunjang akses/pergerakan sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, sedangkan perhitungan panjang jalan didasarkan pada SK Menteri, SK Gubernur dan SK Bupati/Walikota. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba dari tahun 2017 sampai tahun 2021 menunjukkan tren yang stagnan selama priode tersebut. Selengkapnya pada tabel berikut:

**Tabel II-76**
**Proporsi Panjang Jalan Per Satuan Penduduk**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Uraian Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Panjang Jalan Nasional | Km | 87,452 | 87,452 | 87,452 | 87,452 | 87,452 |
| Panjang Jalan Provinsi | Km | 83,76 | 83,76 | 83,76 | 83,76 | 83,76 |
| Panjang Jalan Kab/Kota | Km | 1.211,52 | 1.211,52 | 1.211,52 | 1.147,72 | 1.211,516 |
| **Total Panjang Jalan** | Km | 1.382,728 | 1.382,728 | 1.382,728 | 1.318,932 | 1.318,932 |
| **Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk** | Km/jml penduduk | 0,0033 | 0,0033 | 0,0032 | 0,0052 | 0,0030 |

*Sumber: Dinas PUTR Kab. Bulukumba, tahun 2023*

### 3. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m) di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2018-2022 mengalami tren peningkatan pada priode tersebut. Tahun 2018 capaianya sebasar 82,84 persen, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 98,97 persen namun pada tahun 2021 tidak dilakukan pengukuruan

karena terjadi perubahan kelembagaan perangkat daerah, yang pada awal pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menangani fisik pembangunan trotoar dan drainase/saluran pembuangan air untuk permukiman dan perumahan dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

**Tabel II-77**
**Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Uraian Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air | Km | 82,84 | 91,77 | 95,49 | n/a | 98,97 |

*Sumber: Dinas PUTR Kab. Bulukumba, tahun 2023*

**4.** Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik

Berdasarkan Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan fluktuasi ini dikarenakan keadaan bencana alam dan berubahnya luas keseluruhan irigasi pada tahun 2022 di Kabupaten Bulukumba karena adanya perpindahan kewenangan.

**Tabel II-78**
**Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Uraian Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Luas Irigasi dalam kondisi baik | Km | 15.065 | 15.658 | 16.408 | 17.226 | 8.246 |
| Luas Keseluruhan irigasi | Km | 20.777 | 20.777 | 20.777 | 20.777 | 10.160 |
| **Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik** | % | 72,51 | 75,36 | 78,97 | 82,91 | 81,16 |

*Sumber: Dinas PUTR Kab. Bulukumba, tahun 2023*

**5.** Rasio Jaringan Irigasi

Berdasarkan capaian Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan fluktuasi ini dikarenakan irigasi yang dikerjakan pada tahun sebelumnya mengalami kerusakan yang diakibatkan bencana alam yang diantar longsor, hujan deras dan faktor usia pada bangunan tersebut.

**Tabel II-79**
**Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Uraian Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Panjang saluran irigasi | Km | 17.872 | 12.409 | 3.804 | 19.244 | 10.160 |
| Luas lahan budidaya pertanian (Dipakai luas sawah kewenangan Kabupaten) | Ha | 20.777 | 20.777 | 20.777 | 20.777 | 20.777 |
| **Rasio Jaringan Irigasi** | | 0,86 | 0,60 | 0,18 | 0,93 | 0,49 |

*Sumber: Dinas PUTR Kab. Bulukumba, tahun 2023*

## D. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

### 1. Rasio rumah layak huni

Capaian Rasio Rumah Layak Huni di Bulukumba Tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan fluktuasi dikarenakan jumlah penduduk dan jumlah rumah layak huni pada tiap tahun meningkat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-80**
**Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Rumah Layak Huni | RT | 103.200 | 103.200 | 103.300 | 103.610 | 192.250 |
| Jumlah Penduduk | Orang | 418.326 | 420.603 | 437.607 | 440.090 | 443292 |
| Rasio Rumah Layak Huni | | 0,247 | 0,245 | 0,236 | 0,235 | 0,434 |

*Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2023*

**2. Persentase permukiman yang tertata**

Persentase permukiman yang tertata dimana capaian dari tahun 2018-2022 mengalami capaian fluktuatif dikarenakan Luas Area Permukiman Tertata pada tiap tahunnya berbeda disebakan bencana alam maupun kondisi permukiman yang mengalami perubahan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-81**
**Persentase Permukiman yang Tertata**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Luas Area Permukiman Tertata | $M^2$ | 73.880 | 77.820 | 80.153 | 80.253 | 72.153 |
| Luas Area Permukiman Keseluruhan | $M^2$ | 122.641 | 122.641 | 122.641 | 122.641 | 122.641 |
| Persentase permukiman yang tertata | % | 60,24 | 63,45 | 65,36 | 65,44 | 58,83 |

*Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2023*

**3. Persentase lingkungan permukiman kumuh**

Persentase lingkungan permukiman kumuh kabupaten Bulukumba pada tahun 2018 – 2022 mengalami peningkatan tiap tahun, ini dapat dilihat dari data capaian pada tahun 2017 sebesar 5,00 persen dan pada tahun 2021 sebesar 11,5 persen namun pada tahun 2022 menurun menjadi 9,41 persen dikarenakan Luas Lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2021 seluas 13.666 $M^2$ turun menjadi 11.133 $M^2$ pada tahun 2022. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-82**
**Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Luas Lingkungan Permukiman Kumuh | $M^2$ | 8.576 | 11.296 | 13.476 | 13.666 | 11.133 |
| Luas Wilayah | $M^2$ | 118.252 | 118.252 | 118.252 | 118.252 | 118.252 |
| Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh | % | 7,25 | 9,55 | 11,40 | 11,56 | 9,41 |

*Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2023*

**4. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau**

Untuk indikator Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dari tahun 2018-2022 dimana jumlah permukiman layak huni pada tahun 2018 sebesar 102.768 unit rumah selanjutnya terjadi peningkatan sampai tahun 2022 yaitu 103.498 unit. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-83**
**Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 201 | 2022 |
| Jumlah Rumah Tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau | | 102.768 | 103.029 | 103.290 | 103.368 | 103.498 |
| Jumlah rumah tangga MBR | | 111.585 | 111.585 | 111.843 | 111.843 | 111.843 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau | % | 92,10 | 92,33 | 92,35 | 92,42 | 92,54 |

*Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2023*

**5. Persentase rumah tinggal bersanitasi**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi dasar pokok pelaksanaan PSU Permukiman di daerah yang ditindaklanjuti dengan PP No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjelaskan kembali pentingnya penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman yang mencakup kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pedoman dan sIstem pembiayaan serta peran masyarakat yang terkoordinasi dalam lintas fungsiyang berelanjutan dan terpadu. Sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat baik yang berada diluar permukiman umum maupun di Kawasan kumuh meliputi air bersih, drainase lingkungan (sanitasi) dan jalan lingkungan yang merupakan prasrana permukiman menjadi tanggungjawab negara agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan menghuni rumah layak huni. Saat ini masih banyak polemik terkait ketersediaan atau sengketa lahan, oleh karena itu dibutuhkan peran serta pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga perencanaan awal lokasi sampai dengan penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan. Adapun Persentase rumah tinggal bersanitasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022 selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-84**
**Persentase rumah tinggal bersanitasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi | | 91.270 | 90.970 | 90.020 | 90.289 | 76.391 |
| Jumlah Rumah Tinggal | | 118.252 | 118.252 | 118.252 | 118.252 | 118.252 |
| Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi | % | 77,18 | 76,93 | 76,13 | 76,35 | 64,60 |

*Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2023*

**6. Persentase penduduk berakses air minum**

Persentase penduduk berkases air minum dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2017 Persentase penduduk berkases air minum Sebesar 82.19. tahun 2018 Persentase penduduk berkases air minum mengalami peningkatan sebesar 87.77 persen, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 84.4 persen dan pada tahun 2021 mngalami peingkatan sebesar 84,26 persen hingga pada tahun 2022 menjadi 85,48 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-85**
**Persentase penduduk berakses air minum Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase penduduk berakses air minum | % | 87.77 | 83.52 | 84.4 | 84,26 | 85,48 |

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2023*

**7. Persentase areal kawasan kumuh**

Persentase areal kawasan kumuh dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-86**
**Persentase areal kawasan kumuh Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luas Kawasan Kumuh | $M^2$ | 16.542 | 64.000 | 11.799 | 12.799 | 13.879 |
| Luas Wilayah | $M^2$ | 122.641 | 115.467 | 115.467 | 115.467 | 115.467 |
| Persentase Areal Kawasan Kumuh | % | 13,49 | 55,43 | 10,22 | 11,08 | 12,02 |

*Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan, 2023*

**8. Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan**

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan dari tahun 2018-2022 pada dasarnya mengalami pertumbuhan fluktuasi dikarenakan jumlah bangunan ber-IMB tiap tahunnya dilakukan peningkatan jumlah terdaftar namun jumlah bangunan tiap tahunnya bertambah dan diantaranya terverifikasi belum memiliki IMB. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-87**
**Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan | % | 5,58 | 2,15 | 2,97 | 6,02 | 0,42 |

*Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, & Pertanahan Kab. Bulukumba, 2023*

**E. Urusan Ketetraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat**

**1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)**

Pada tahun 2018-2022, Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) mengalami penurunan dalam segi cakupan ataupun persentase ini didasarkan pada jumlah penduduk bertambah sedangkan jumlah Linmas tetap dan penyebab lainnya hal ini disebabkan karena berkurangnya Jumlah Petugas Linmas setelah diadakan peremajaan data Linmas dari 10 Kecamatan.

**Tabel II-88**
**Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)**
**di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Petugas Linmas | | 1.606 | 1.360 | 1.360 | 1.330 | 1.330 |
| Jumlah Penduduk | | 418.326 | 420.603 | 437.607 | 440.090 | 443.292 |
| Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | | 0,38 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,30 |

*Sumber: Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba. 2023*

**2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3**

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban. Ketentraman dan Keindahan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022 , pada Tahun 2018 capaian sebesar 82.89%, tahun 2019 sebesar 71,11%, pada tahun 2020 sampai 2022 menjadi 100% ini menunjukkan tinggat penyelesaian pelanggaran K3 semakin baik.

**Tabel II-89**
**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban. Ketentraman dan Keindahan**
**di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Pelanggaran K3 yang diselesaikan | | 315 | 224 | 306 | 313 | 83 |
| Jumlah Laporan Pelanggaran K3 | | 380 | 315 | 306 | 313 | 83 |
| Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 | | 82,89 | 71,11 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba. 2023*

**3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota**

Persentase tingkat capaian pada tahun 2018-2022 mengalami penurunan dalam segi Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran disebabkan jumlah penduduk mengalami peningkatan sementara jumlah mobil pemadam kebakaran tetap yakni pada tahun 2018 sebanyak 13 unit namun pada tahun 2019-2022 menjadi 12 unit.

**Tabel II-90**
**Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran | Unit | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Jumlah Penduduk | Orang | 418.326 | 420.603 | 437.607 | 440.090 | 443.292 |
| Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten | % | 0,00311 | 0,00285 | 0,00274 | 0,00273 | 0,00271 |

*Sumber: Sumber: Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba. 2023*

**4. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**

Presentase capaian pada tahun 2018 sebesar 83,33%, tahun 2019 sebesar 98,90% dan ditahun 2020 sampai 2022 meningkat menjadi 100% hal ini dikarenakan ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran sudah semakin meningkat dengan adanya penempatan Posko Pemadam Kebakaran di 4 Sektor Kecamatan diantaranya : Sektor Dampang mencakup wilayah Gantarang-Kindang, Sektor Tanete mencakup wilayah Bulukumpa-Rilau Ale, Sektor Bonto Bahari mencakup wilayah Bonto Bahari-Bonto Tiro, Sektor Kajang mencakup Wilayah Kajang-Herlang.

**Tabel II-91**
**Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di KabupatenBulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Keterangan (dalam persen) | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran kurang satu jam setelah pengaduan | Menit | 90 | 180 | 80 | 80 | 73 |
| Jumlah kejadian | Kasus | 108 | 182 | 80 | 80 | 73 |
| Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK | | 83,33 | 98,9 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba. 2023*

**5. Presentase Penegakan Perda**

Presentase tingkat capaian pada pada tahun 2018 yaitu 45,85% namun turun pada tahun 2019 menjadi 34.12% kemudian meningkat kembali menjadi 100% ditahun 2020 - 2022. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pelanggaran peraturan daerah, terutama yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum semakin berkurang selama periode 2018-2022.

**Tabel II-92**
**Persentase Penegakan PERDA) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah penyelasaian Penegakan Perda yang memuat saksi | | 94 | 58 | 60 | 94 | 60 |
| Jumlah Pelanggaran Perda | | 205 | 170 | 60 | 94 | 60 |

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Penegakan Perda | % | 45,85 | 34,12 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba. 2023*

**F. Urusan Sosial**

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba adalah menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial difokuskan pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Jumlah dan jenis PMKS mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Data capaian pada indikator RPJMD diperoleh berdasarkan dari jumlah PMKS dan data indikator lain diluar PMKS yang ditangani yang selanjutnya dihitung sesuai dengan formula atau rumus pada masing-masing indikator untuk memperoleh capaian baik dalam satuan Unit, Buah maupun persentase. Dalam penetapan jumlah data tersebut diperoleh dari masing-masing bidang teknis yang menangani sesuai indikator RPJMD yang telah ditentukan. Berikut penjelasan pada masing-masing indikator :

**1. Sarana Sosial seperti Panti Sosial**

Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi , dalam hal ini Panti Asuhan pada tahun 2018 berjumlah 18 Buah, Tahun 2019 sampai 2022 mengalami penurunan jumlah yaitu menjadi 13 unit yang diakibatkan panti sosial tersebut berdasarkan hasil akreditasi oleh Tim dari Kemensos RI dinyatakan tidak terdaftar pada Dinas Sosial karena tidak dapat memenuhi persyaratan untuk terdaftar pada Dinas Sosial.

**Tabel II-93**
**Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi diKabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi | Unit | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 |

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2023*

- Faktor pendukung capaian indikator adanya koordinasi dan kerjasama dengan pihak lembaga/panti sosial dalam pengajuan akreditasi dan keterangan terdaftar pada Dinas Sosial.
- Faktor penghambat capaian indikator, Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial tidak secara rutin melengkapi dokumen pengajuan akreditasi lembaga.

**2. Jumlah Korban Bencana yang Ditangani**

Untuk Jumlah Korban Bencana yang Ditangani pada tahun 2018 – 2022 mencapai 100% karena semua korban bencana dapat dilayani sesuai dengan target yang ditetapkan.

**Tabel II-94**
**Jumlah Korban Bencana yang Ditangani diKabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | Orang | 147 | 483 | 365 | 60 | 26 |
| Populasi korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | Orang | 147 | 483 | 365 | 60 | 26 |
| **Persentase** | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2023*

- Faktor pendukung capaian indikator, koordinasi dan kerjasama antar instansi baik pusat dan daerah dalam penyediaan logistik bagi korban bencana.
- Faktor penghambat capaian indikator, masih rendahnya program mitigasi bencana bagi masyarakat.

**3. Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial**

Sesuai dengan data yang disajikan secara umum berfluktuatif dimana pada Tahun 2018 mencapai 100% dan megalami penurunan pada Tahun 2020 dan 2021 Sebesar 98.6 mejadi 26.8 salah satu faktor penurunan capaian dari tahun 2018 diakibatkan karena jumlah PMKS yang memperoleh masih relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada namun pada tahun 2022 tercapai 100%.

**Tabel II-95**
**Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah PMKS yang diberikan bantuan | Orang | 38,358 | 38,773 | 42,592 | 48.503 | 25.463 |
| Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan | Orang | 38,358 | 42,149 | 43,179 | 180.686 | 25.463 |
| **Persentase** | | 100,00 | 91,99 | 98,64 | 26,84 | 100,0 |

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2023*

- Faktor pendukung capaian indikator, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Faktor penghambat capaian indikator, jumlah dan jenis PMKS yang tidak di dukung dengan data yang valid dan akurat

**4. Perentase PMKS yang tertangani**

Perentase PMKS yang tertangani dari tahun 2017-2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan dari target yang ditentukan. Pada Tahun 2020 dan 2021 PMKS yang tertangani ada pada 73.57% dan 26.8% sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 57,5% lebih rendah dari tahun tahun sebelumnya.

**Tabel II-96**
**Perentase PMKS yang tertanganidi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah PMKS yang tertangani | Orang | 38.097 | 39.713 | 31.767 | 48.503 | 26.099 |
| Jumlah PMKS yang ada | Orang | 38.358 | 42.149 | 43.179 | 180.686 | 45.365 |
| **Persentase** | | **99.3** | **94.2** | **73.6** | **26.8** | **57,5** |

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2023*

- Faktor pendukung capaian indikator, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Faktor penghambat capaian indikator, jumlah dan jenis PMKS yang tidak di dukung dengan data yang valid dan akurat.

**5. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat**

pada akhir capaian RPJMD mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu diakibatkan oleh adanya pengurangan anggaran (*refocusing* penanggulangan *Covid-19*) pada program dan kegiatan yang menangani kegiatan tersebut tetapi pada tahun 2021 dan 2022 mengalmi peningkatan sebesar 100%.

**Tabel II-97**
**Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap daruratdi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | Orang | 146 | 480 | 270 | 60 | 26 |
| Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | Orang | 147 | 483 | 365 | 60 | 26 |
| **Persentase** | | **99.3** | **99.4** | **74.0** | **100** | **100** |

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2023*

- Faktor pendukung capaian indikator, koordinasi dan kerjasama antar instansi baik pusat dan daerah dalam penyediaan logistik bagi korban bencana.
- Faktor penghambat capaian indikator, masih rendahnya program mitigasi bencana bagi masyarakat.

**6. Persentase penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial**

Pada tahun 2018-2022 capaian Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial mengalami nilai fluktuasi dikarenakan target untuk Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial berbeda pada tiap tahunnya. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-98**
**Persentase penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | Orang | 1,837 | 2,148 | 2,251 | 31 | 1.088 |
| Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial | Orang | 1,964 | 2,160 | 3,039 | 33 | 1.119 |
| **Persentase** | | **93.5** | **99.4** | **74.1** | **93.9** | **97,23** |

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2023*

- Faktor pendukung capaian indikator, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Faktor penghambat capaian indikator, jumlah dan jenis PMKS yang tidak di dukung dengan data yang valid dan akurat serta masih terbatasnya jumlah pekerja sosial profesional dalam penanganan disabilitas dan lansia.

### 2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada layanan urusan wajib non pelayanan pemerintah daerah diantaranya yaitu Tenaga Kerja; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.

**A. Urusan Tenaga Kerja**

**1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun**

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja merupakan perbandingan antara jumlah sengketa pengusaha pekerja dibagi jumlah Perusahaan. Angka sengketa Pengusaha Pekerja pertahunnya mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 sebesar 4,98 persen, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 19,09 persen, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan secara signifikan menjadi 0,93 persen, pada tahun 2021 sebesar 1,18 persen dan pada tahun 2022 menjadi 23,26 persen dimna jumlah sengketa pengusaha pekerja 4 kasus sedangkan jumlah perusahaan 172 unit, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel II-99**
**Angka sengketa pengusaha-pekerja**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun | % | 4,98 | 19,09 | 0,93 | 1,18 | 23,26 |

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023*

**2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama, tahun 2018-2022 berbeda pada tiap tahunnya namun pada tahun 2022 kasus yang tercatat berjumlah 4 kasus dan diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB). Hal ini disebabkan banyak faktor antara lain pihak pihak memang mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan, pihak yang mewakili dalam melakukan perundingan mediasi sangat mempengaruhi pula tingkat keberhasilan penyelesaian, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terutama tentang penyelesaian secara Perjanjian Bersama, faktor budaya dan sosial ekonomi perusahaan. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-100**
**Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | % | 66,0 | 62,0 | 38,0 | 38,0 | 100,0 |

*Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023*

**3. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek**

Persentase besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta jamsostek berfluktuasi. Dimana pada tahun 2018 sebesar 30 persen sampai dengan tahun 2020 sampai 2021 meningkat menjadi 100 persen namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 97,30 persen dimana jumlah pekerja/buruh sebesar 3.853 orang sedangkan yang memperoleh program jamsostek 3.749 orang. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-101**
**Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | % | 30 | 94 | 100 | 100 | 97,30 |

*Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023*

**4. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Ditempatkan**

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 sebesar 0,25 persen, tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,38 persen dan tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan menjadi 1 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-102**
**Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Ditempatkan**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Besaran pencari kerja yang terdaftar yang Ditempatkan | % | 25 | 138 | 100 | 100 | 25 |

*Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023*

**5. Besaran Pemeriksaan Perusahaan**

Besaran pemeriksaan di Perusahaan kurun waktu 2017 – 2020 berfluktuatif, dimana pada tahun 2017 sebesar 0,31 persen, naik menjadi 0,64 persen pada tahun 2018, turun sebesar 0,60 persen di tahun 2019 dan t mengalami penigkatan pada tahun 2020 menjadi 32 persen dan menurun di thun 2021 sebesar 20 persen. Selengkapnya pada tabel berikut

**Tabel II-103**
**Besaran Pemeriksaan Perusahaan**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Besaran Pemeriksaan Perusahaan | % | 0,64 | 0,60 | 32 | 20 | 0,24 |

*Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023*

**6. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan**

Besaran pengujian peralatan di Perusahaan kurun waktu 2017 – 2020 berfluktuatif, dimana pada tahun 2017 sebesar 1 persen, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,028 persen, namun pada tahun 2019 meningkat menjadi0,826 persen dan pada tahun 2020 mengalami peningkat menjadi 3 persendan kembali mengalami penurunan ditahun 2021 sebesar 2,00 Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-104**
**Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan | % | 0,028 | 0,826 | 3,00 | 2,00 | 0,06 |

*Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023*

**7. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi**

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi kurun waktu 2018-2022 mengalami fluktuatif, pada tahun pada tahun 2018 mengalami sebesar 68 persen, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 80 dan pada tahun 2020 samapi 2021 mengalami penurunan menjadi 53 persen dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 91,43 persen dikarenakan .Pelatihan berbasis kompetensi sangat dibutuhkan dalam kaitan meningkatkan skill tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar kerja. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-105**
**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi | % | 68,0 | 80,0 | 52,0 | 53,0 | 91,43 |

*Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023*

**8. Rasio lulusan S1/S2/S3**

Data lulusan S1/S2/S3 dan jumlah penduduk berasal dari data statistik (Bulukumba dalam Angka) menunjukkan bahwa lulusan tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 718,00 per 10.000 penduduk dan terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah pada tahun 2018 sebesar 439,56 per 10.000 penduduk. Peningkatan terhadap perbandingan tersebut cukup signifikan yakni sekitar 47,92 persen, menunjukkan tingkat kemampuan secara finansial dalam pembiayaan kuliah anak dan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya pendidikan yang semakin membaik di masyarakat. Selain itu banyaknya universitas di Kabupaten Bulukumba semakin membuka peluang kelanjutan pendidikan di Kabupaten Bulukumba.

**Tabel II-106**
**Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio lulusan S1/S2/S3 | | 439,56 | 739,36 | 758,83 | 718,00 | 741,80 |

*Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023*

**9. Rasio daya serap tenaga kerja**

Daya serap tenaga kerja dalam kurun waktu empat tahun paling tinggi pada tahun 2019 sebesar 55,42 persen sedangkan daya serap tenaga kerja terendah pada tahun 2017 sebesar 0,477 persen. Banyaknya lowongan kerja pada sektor perdagangan, wirausaha, pertanian dan lainya. Menyebabkan peningkatan daya serap tenaga kerja pada tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya pandemic *Covid-19*.

**Tabel II-107**
**Rasio daya serap tenaga kerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio daya serap tenaga kerja | % | 30,89 | 55,42 | 49,68 | 46,86 | 43,21 |

*Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023*

**10. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan**

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan pada tahun 2022 tenaga kerja yang dilatih 160 orang sesuai dengan jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat. Pelatihan berbasis kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam memberdayakan UKM, memperluas peluang usaha, meningkatkan produktivitas UKM. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-108**
**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan | % | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023*

**11. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat**

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat kurun waktu 2017-2020 mengalami fluktuatif, dimana, pada tahun 2017 sebesar 0,64 persen, pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan menjadi 0,74 persen,pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menurun menjadi 0,53 persen. Pelatihan berbasis masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberdayakan UKM, memperluas peluang usaha, meningkatkan produktivitas UKM. Selengkapnya pada tabel berikut

**Tabel II-109**
**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat | % | 0,74 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,47 |

*Sumber: Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2023*

**B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**1. Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.**

Pada tahun 2017 jumlah pekerja perempuan turun menjadi 63.183 orang, namun untuk pekerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun yang sama berjumlah 3.677 orang (5,8%). Pada tahun 2018 jumlah pekerja perempuan meningkat sebanyak 69.149 orang sementara pekerja perempuan di lembaga pemerintah berjumlah 3601 (5,2%). Pada tahun 2019 jumlah pekerja perempuan berjumlah 83.583 orang, sementara pekerja perempuan di lembaga pemerintah menurun menjadi 3592 (4,3%) orang dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 jumlah pekerja perempuan meningkat menjadi 92.095 orang sementara jumlah pekerja peremuan di lembaga pemerintah sebesar 3670 orang, secara keseluruhan jumlah pekerja perempuan naik dari tahun sebelumnya namun secara persentase menurun dari 4,3% menjadi 4.0%. dn di tahun 2021 persntase partisiapsi perempuan di lembaga pemerintahan menurun sebesar 3,7 %

**Tabel II-110**
**Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah Kabupaten Bulukumba**
**Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah | % | 5.2 | 4.3 | 4,0 | 3,7 | 4,4 |

*Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2023*

**2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD**

Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba dari tahun 2018 – 2022 sejumlah 40 total kursi. Pada tahun 2018 perempuan yang menduduki kursi terdapat 7 orang dan pada tahun 2019 menjadi 8 orang yang terpilih pada pemilu DPRD periode 2019-2024 namun pada tahun 2020-2022 berkurang menjadi 7 orang dikarenakan 1 oang mengikuti pemilu pilkada pada tahun 2020.

**Tabel II-111**
**Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | % | 17,50 | 20,00 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |

*Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2023*

**3. Partisipasi perempuan di lembaga swasta.**

Pada tahun 2018-2022 jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan meningkat pada tiap tahunnya dikarenakan penegakan kesetaraan gender telah diberlakukan dan melihat dari jumlah penduduk kabupaten didominasi oleh perempuan.

**Tabel II-112**
**Partisipasi perempuan di lembaga swasta**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partisipasi perempuan di lembaga swasta | % | 69,14 | 83,58 | 92,09 | 92,09 | 96 |

*Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2023*

**4. Rasio KDRT**

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2008-2022, mengalami penurunan ini berdasarkan kasus yang ditemukan dan dilaporkan..

**Tabel II-113**
**Rasio KDRT Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah KDRT | | 37 | 38 | 12 | 8 | 3 |
| Rasio KDRT | | 0,027 | 0,027 | 0,136 | 0,091 | 0,034 |

*Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2023*

**5. Partisipasi angkatan kerja perempuan**

**Tabel II-114**
**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Partisipasi angkatan kerja perempuan | % | 96,39 | 96,38 | 97,07 | 97,77 | 96,00 |

*Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2023*

**6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan Terpadu**

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih didalam unit pelayanan terpadu. Mulai Tahun 2018 sampai dengan 2022 semua kasus terlayani 100 % oleh pelayanan terpadu.

**Tabel II-115**
**Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan Terpadu**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu | Laporan | 148 | 128 | 46 | 52 | 32 |

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu | Laporan | 148 | 128 | 46 | 52 | 32 |
| Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Bulukumba, 2021*

**7. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.**

Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan Kesehatan oleh tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit pada tahun 2018-2022 Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS dan Jumlah seluruh korban KTP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KTP/A dan ke RS berbeda pada tiap tahunnya.

**Tabel II-116**
**Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS | Korban | 16 | 12 | 10 | 3 | 15 |
| Jumlah seluruh korban KTP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KTP/A dan ke RS | Korban | 148 | 128 | 46 | 150 | 186 |
| Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit | | 10,81 | 9,38 | 21,74 | 2,00 | 8,06 |

*Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2023*

**8. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak**

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang disidangkan kembali meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 148 perkara dan sebanyak 144 perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan sehingga persentase meningkat menjadi 97.30% dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 jumlah perkara kekerasan yang disidangkan menurun (sebanyak 128 perkara) dan lebih banyak perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan (sebanyak 125 perkara) sehingga persentase meningkat menjadi 97.66. Sedangkan pada tahun 2020 – 2022 persentase cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 100% karena semua perkara yang disidangkan mendapat putusan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu sebanyak 1 perkara.

**Tabel II-117**
**Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak | Perkara | 144 | 125 | 1 | 15 | 10 |
| Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan | Perkara | 148 | 128 | 1 | 15 | 10 |
| Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak | | 97,30 | 97,66 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*Sumber: Dinas PPKB & PPPA, Kabupaten Bulukumba 2023*

## C. Urusan Pangan

### 1. Ketersediaan pangan utama

Pangan utama berdasarkan konsumsi masyarakat di Kabupaten Bulukumba adalah beras, berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator ketersediaan pangan utama, menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan pangan utama di Kabupaten Bulukumba masih surplus dengan kondisi pertahun rata-rata diatas 300 %. Faktor utama yang mempengaruhi stabilitas ketersediaan pangan utama adalah keseimbangan antara tingkat produksi pangan dan jumlah penduduk, ini didasarkan pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi pada tahun 2017 sebesar 306,75 % dan pada tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan 393,10 % dan pad tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan sebesar 368,95%.Seperti pada tabel berikut.

**Tabel II-118**
**Indikator Urusan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ketersediaan pangan utama | | 381,58 | 393,10 | 389,13 | 368,95 | 100 |

*Sumber:Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2023*

### 2. Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein

Pada periode 2018-2022 rata-rata pertumbuhan ketersediaan energi dan ketersediaan protein tiap tahunnya meningkat namun pada tahun 2021 mengalami penurunan diakibatkan *Covid 19* yang menyebabkan pasokan kebutuhan berkurang akan tetapi pada tahun 2022 meningkat signifikasi karena telah tidak diberlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein meningkat drastis.

**Tabel II-119**
**Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Protein**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ketersediaan Energi | kkl/kap/hari | 6.904,22 | 8.424,75 | 7.423,66 | 2.662,51 | 17.766,98 |
| Ketersediaan Protein | gram/kap/hari | 228,54 | 226,01 | 240,77 | 69,0 | 919,76 |

*Sumber:Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2023*

### 3. Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan

Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah komoditi yang dijadikan sampel pengawasan terhadap komoditi unggulan yang ditetapkan Kementerian. Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengawasan sejak

terbentuknya Dinas Ketahanan Pangan yaitu pada tahun 2017, kegiatan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan meningkat pada tahun 2022.Seperti pada tabel berikut.

**Tabel II-120**
**Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan**
**Kabupaten BulukumbaTahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | | 45,45 | 91 | 36 | 60 | 90 |

*Sumber:Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2021*

## D. Urusan Pertanahan

### 1. Persentase luas lahan yang bersertifikat

Kinerja urusan Pertanahan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki kepedulian dalam memfasilitasi masyarakat guna memiliki lahan yang memiliki kekuatan hukum. Sejak tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Bulukumba sudah memfasilitasi program pemberian sertifikat gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam mendata aset Pemerintah berupa penerbitan sertifikat tanah melalui pendanaan secara komprehensif adalah langkah konkrit didalam menertibkan aset dan ketersediaan anggaran yang mencukupi sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan program dan kegiatan. Sehingga perlu dilakukan langkah konkrit dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap.

**Tabel II-121**
**Luas Lahan Bersetifikat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Luas Lahan Bersertifikat | $m^2$ | 256.978.093 | 270.937.227 | 278.530.635 | 297.190.635 | 297.222.607 |
| Jumlah Luas Wilayah | $m^2$ | 1.154.580.000 | 1.154.580.000 | 1.154.580.000 | 1.154.580.000 | 1.154.580.000 |
| Persentase Luas Lahan Bersetifikat | % | 22,26 | 23,47 | 24,12 | 25,74 | 25,74 |

*Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, 2023*

### 2. Penyelesaian kasus tanah negara

Persentase Penyelesaian kasus tanah negara dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2017 Penyelesaian kasus tanah negara mengalami peningkatan sebesar 100 persen. namun pada tahun 2018 Penyelesaian kasus tanah negara mengalami penurunan sebesar 40,00 persen, dan pada tahun 2019 Penyelesaian kasus tanah negara pada tahun mengalami peningkatan sebesar 66,67 persen, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 50,00 persen dan pada tahun 2021 mngalai peningkatan sebesar 75,00 persn . Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel II-122**
**Penyelesaian kasus tanah Negara di Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Kasus yang diselesaikan | Kasus | 6 | 10 | 5 | 12 | 1 |
| Jumlah Kasus yang terdaftar | Kasus | 15 | 15 | 10 | 16 | 5 |
| Penyelesaian Kasus Tanah Negara | % | 40,00 | 66,67 | 50,00 | 75,00 | 20,00 |

*Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, 2023*

## E. Urusan Lingkungan Hidup

### 1. Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air

Pengukuran indeks kualitas air telah dilakukan / dihitung dari tahun ke tahun dengan menggunakan metode indeks pencemaran (IP). Pengujian kualitas air sungai di Kabupaten Bulukumba dilakukan sebanyak 6 (enam) sungai besar yaitu Sungai Balantieng, Sungai Bijawang, Sungai Anyorang, Sungai Bialo, Sungai Lolisang, dan Sungai Raowa. Hasil pengukuran menunjukkan indeks dari tahun 2017 – 2018 menunjukkan kondisi tercemar berat dengan indeks 1,19 tahun 2017 dan indeks 2,60 tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 – 2020 menunjukkan kondisi baik (memenuhi baku mutu) dengan indeks 0,50 tahun 2019 serta 0,63 tahun 2020. Hasil ini tentu saja disimpulkan bahwa pengelolaan kualitas air sungai cukup baik dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Dan pada tahun 2021 kualitas air sungai cukup baik yaitu sebesar 61,00 dan pada tahun 2022 menurun menjadi 55,00.

**Tabel II-123**
**Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Air (IKA) | % | 2,60 | 81,90 | 78,23 | 61,00 | 55,00 |

*Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023*

### 2. Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara

Pengukuran indeks kualitas udara telah dilakukan / dihitung dimulai dari tahun 2018, sedangkan untuk tahun 2017 tidak dilaksanakan pengujian kualitas udara. Pengujian kualitas udara ambien dilakukan pada 4 (empat) titik utama yang dianggap representatif mewakili kondisi udara di Kabupaten Bulukumba. Adapun lokasi pemantauan udara yaitu BTN Ujung Bulu (perumahan), Kantor Bupati (perkantoran), Terminal (Transportasi), serta Pabrik PT.PP Lonsum, Tbk (Industri). Hasil indeks kualitas udara ambien di ke empat titik tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Bulukumba cukup baik. Tentu ini merupakan hasil yang diharapkan dalam upaya menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Bulukumba khususnya kualitas udara ambien.

**Tabel II-124**
**Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Udara (IKU) | % | 85,46 | 90,88 | 88,30 | 84,64 | 92,13 |

*Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023*

### 3. Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan

Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 mencapai 23,64 persen. Tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 23,56 persen dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 28,89 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II-125**
**Hasil Pengukuruan IKTL Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Hasil Pengukuruan IKTL | % | 22,63 | 22,72 | 23,64 | 23,56 | 28,89 |

*Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023*

**4. Pembinaan dan Pengawasanterkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota**

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan sebesar 82,35 persen namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 68,62 persen dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 95,93 persen dan pada tahun 2022 mencapai 100 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II-126**
**Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota | % | 72,54 | 82,35 | 68,62 | 95,93 | 100 |

*Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023*

**5. Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA**

Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA, sejak 2017 Terbentuk 1 Kelompok Masyarakat Hukum adat Ammatoa Kajang setelah terbitnya perbub Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang

**Tabel II-127**
**Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Terfasilitasi Pendampingan PengakuanMHA | Kelompok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023*

**6. Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional**

Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional pada tahun 2017 sampai dengan 2022 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II-128**
**Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional | Klp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2021*

**7. Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional**

Terverifikasi hak kearifan lokal atauhak pengetahuan tradisional pada tahun 2017 sampai dengan 2022 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II-129**
**Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional | Klp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023*

**8. Penetapan hak MHA**

Penetapan hak MHA pada tahun 2017 sampai dengan 2022 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II-130**
**Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Penetapan hak MHA | Klp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023*

**9. Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan**

Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada tahun 2017 sampai dengan 2022 sebesar 100 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II-131**
**Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023*

**10. Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana**

Terfasilitasipenyediaan sarana/prasarana pada tahun 2017 sampai dengan 2022 sebesar 100 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II-132**
**Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023*

**11. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat**

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat pada tahun 2017 sampai dengan 2022 sebesar 1 Kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II-133**
**Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat | Klp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023*

**12. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup**

Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup pada tahun 2017 Penghargaan Adywiyata Kabupaten 9 Sekolah,Provinsi 1 Sekolah, Nasional 1 Sekolah 2018 Penghargaan Adywiyata Kabupaten 13 sekolah ,Provinsi 8 Sekolah,Nasional 1 sekolah sedangkan 2019 hanya penghargaan tingkat Kabupaten 10 Sekolah dan tahun 2020 tidak ada penilaian karena COVID-19 DAN DITAHUN 2021 sebanyak 2 sekolah

**Tabel II-134**
**Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | Sekolah | ada | ada | Tidak ada | ada | Tidak ada |

*Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023*

**13. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerahkabupaten/kota.**

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerahkabupaten/kota. pada tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 100 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II-135**
**Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kotaKabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. | | | | | | |

*Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023*

**14. Timbulan sampah yang ditangani**

Jumlah pengurangan Timbulan sampah yang tertangani dari tahun 2017 sampai tahun 2020 berdasarkan data Jakstrada sebagai berikut, pada Tahun 2017 Jumlah timbulan sampah yang tertangani sebesar 2.521,28 Ton dengan persenase 4,18 % dari total timbulan sampah sebesar 60.331 ton. Pada Tahun 2018 Jumlah timbulan Sampah yang tertangani sebesar 10.754,36 Ton dengan persentase 17,83 % dari total timbulan sampah sebanyak 60.331 ton, pada Tahun 2019 jumlah timbulan sampah tertangani sebesar 12.767.36 ton dengan persentase 20,75 % dari total timbulan sampah sebanyak 61,538 ton sedangkan pada Tahun 2020 jumlah timbulan sampah yang tertangani sebanyak 12,957.00 ton dengan persentase 20,64 % dari total timbulan sampah sebanyak 62,769 ton. Dan pada tahun 2022 persentase timbulan sampah yang tertangani sebesar 26,03 persen.

**Tabel II-136**
**Timbulan sampah yang ditangani**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Timbulan sampah yang ditangani | % | 17,83 | 20,75 | 20,64 | 24,95 | 26,03 |

*Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023*

**15. Persentase jumlah sampah yang tertangani**

Jumlah Penanganan sampah yang tertangani dari tahun 2017 sampai tahun 2020 berdasarkan data Jakstrada sebagai berikut pada tahun 2017 Jumlah sampah yang tertangani sebesar 5.801,07 Ton dengan persenase 9,60 % dari total timbulan sampah sebesar 60.331 ton, pada tahun 2018 Jumlah Sampah yang tertangani sebesar 28,329.11 Ton dengan persentase 46,96% dari total timbulan sampah sebanyak 60.331 ton, pada tahun 2019 jumlah sampah tertangani sebesar 49.275.00 ton dengan persentase 80,07 % dari total timbulan sampah sebanyak 61,538 ton, sedangkan pada tahun 2020 jumlah sampah yang tertangani sebanyak 46,172.50 ton dengan persentase 73,56 % dari total timbulan sampah sebanyak 62,769 ton.Penyebab turunnya penanganan sampah yang tertangani ditahun 2020 disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana dibidang pengangkutan serperti mobil pengangkut sampah dan motor sampah dan adanya proses pengelolaaan sampah dari sumber melalui pemilahan di Bank sampah.

**Tabel II-137**
**Persentase jumlah sampah yang tertangani**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase jumlah sampah yang tertangani | % | 46,96 | 80,07 | 73,56 | 86,63 | 73,13 |

*Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023*

**16. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota**

Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota ,Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71 Nilai Adipura Tahun 2019 belum keluar sedangkan Adipura Tahun 2020 tidak ada karena COVID- 19 dan pada tahun 2022 Adipura keluar sebesar 74,00 persen.

**Tabel II-138**
**TabelOperasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota | % | 77,03 | 0 | 0 | 26,24 | 74,00 |

*Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023*

**17. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri)**

Pengelolaan Limbah B3 dari industri dan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) sesuai kewenangan yang diatur dalam PP 22 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaaan lingkungan hidup adalah melakukan pengelolaan pada tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 dan pengumpul Limbah B3.Pelaporan pengelolaan limbah B3 disesuaikan dengan peraturan bupati No 81 Tahun 2015 tentang tata cara pelaporan pengelolaan LB3 dan dilakukan secara berkala atau satu kali dalam 3 bulan.

**Tabel II-139**
**Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri)**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri) | Ton/ Kg | 22,07 | 36,75 | 25,13 | 35 | 35,00 |

*Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023*

**18. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001**

Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 pada tahun 2018 sampai dengan 2022 sebesar 1 Buah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II-140**
**Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 | Buah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023*

**19. Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan**

Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan pada tahun 2017 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan sebesar 29,86 Persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II-141**
**Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan | % | 22,63 | 22,72 | 23,64 | 29,86 | 29,86 |

*Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba,2022*

**20. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan**

Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhanpada tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 25 Persen. Dan pada tahun 2022 meningkat sebesar 32,36 persen .Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II-142**
**Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan | % | 25 | 25 | 25 | 32,36 | 32,36 |

*Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba,2022*

**21. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati**

Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk tahun 2017 terdapat satu dokumen keaneka ragaman hayati yang priodesasinya selama 5 tahun yang digunakan sebagai dasar bagi pengolahan terpadu keanekaragaman hayati di Kabupaten Bulukumba. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II-143**
**Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati | Dok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Sumber :DLHK Kabupaten Bulukumba, 2023*

**F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

**1. Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk**

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan salah satuidentitas resmi yang wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yangtelah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin sebagai bukti diri bahwaorang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi diIndonesia. Untuk memenuhi hal tersebut, Pemerintah senantiasa memberidukungan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan akses pelayananpublik yang mensyaratkan penggunaan KTP-el serta mendorong masyarakatuntuk segera memiliki KTP-el. Di sisi lain, pengadaan blangko KTP-el yangmasih menjadi kewenangan pemerintah

pusat sehingga ketersediaan blangkoKTP-el di Kabupaten/Kota sangat tergantung akan alokasi anggaran pengadaanblangko KTP-el di Ditjen kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri danpendistribusiannya ke instansi pelaksana di Kabupaten/Kota.

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun ber KTP-el | Orang | 318.331 | 317.864 | 317.477 | 326.380 | 357.885 |
| Jumlah Penduduk Wajib KTP-el | Orang | 318.331 | 317.864 | 317.497 | 326.701 | 326.701 |
| Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 1,095 |

*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bulukumba, 2023*

**2. Rasio bayi berakta kelahiran**

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwakelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkaithubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Akte kelahiransangat penting peranannya untuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya.Untuk itu, pelayanan terkait penerbitan akta kelahiran semakin dipermudahtermasuk dengan adanya inovasi pelayanan secara daring atau online. Namundalam beberapa hal, masih ada sebagian masyarakat yang tingkat kesadarandan pemahamannya yang masih rendah sehingga tidak segera melakukanpengurusan akta kelahiran bayinya setelah lahir. Terkait dengan bayi beraktekelahiran merupakan penduduk berusia 0-5 tahun kurang 1 hari yang telahmemiliki akte kelahiran

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah bayi berakte kelahiran | Orang | 4.182 | 4.518 | 2.248 | 7.405 | 25.173 |
| Jumlah bayi | Orang | 6.258 | 6.370 | 5.649 | 8.174 | 26.504 |
| Rasio bayi berakta kelahiran | | 0,668 | 0,709 | 0,398 | 0,906 | 0,950 |

*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bulukumba, 2023*

**3. Rasio pasangan berakta nikah.**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkanbahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Bagimereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatandilakukan di kantor urusan agama (KUA). Sedangkan bagi yang bergamaKatolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu, pencatatan perkawinannyadilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta Perkawinansangat penting bagi setiap penduduk yang telah menikah sebab merupakan alatbukti otentik kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakanpencatatan perkawinan. Adanya program nasional percepatan penerbitan aktakelahiran, secara tidak langsung mendorong peningkatan rasio pasanganberakte nikah sebab seharusnya pemohon akta kelahiran melampirkan bukunikah/akta perkawinan orang tuanya. Masih banyaknya akte perkawinan yangtelah diterbitkan sebelumnya secara konvensional dan belum terintegrasidengan SIAK, menyebabkan datanya perkawinannya belum tercatat dalamSIAK. Demikian halnya dengan Akte perkawinan untuk penduduk muslimsepenuhnya dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA), adapun data hasilpelayanan penerbitan buku nikah yang dilakukan KUA belum sepenuhnyaterintegrasi dengan data base dinas kependudukan dan pencatatan sipil (SIAK)

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah pasangan nikah berakte nikah | | 3.100 | 11.885 | 11.885 | 177 | 179 |
| Jumlah keseluruhan pasangan nikah | | 110.940 | 218.762 | 218.762 | 177 | 179 |
| Rasio pasangan berakta nikah | | 0,028 | 0,054 | 0,054 | 1,000 | 1,000 |

*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bulukumba, 2023*

**4. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.**

Pemanfaatan data kependudukan adalah pemanfaatan data dari hasilpendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui sIstem informasiadministrasi kependudukan kepada lembaga pengguna melalui pemberian hakakses oleh menteri dalam negeri. Dalam impelementasi pemberian hak akses,menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipilmemberikan akses kedalam basis data melalui Data Warehouse (DWH) yangtersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan melaluijaringan komuniksi data. Dalam implementasi pemanfaatan datakependudukan telah diatur terkait tatacara dan kewenangan pemberian hakakses data kependudukan yang mana kewenangan dari Pemerintah ProvinsiSulawesi Selatan dapat melaksanakan perjanjian kerjasama pemberian hakakses pemanfaatan data kependudukan kepada Dinas atau Lembaga Penggunaskala provinsi atau badan hukum yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pusat sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatandata Kependudukan.

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bulukumba, 2023*

**5. Cakupan penerbitan KTP-el**

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwakelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatansipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkaithubungan keperdataan penduduka. Akte kelahiran sangat penting peranannyauntuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya. Untuk itu, pelayananterkait penerbitan akta kelahiran semakin dipermudah termasuk denganadanya inovasi pelayanan secara daring atau online. Namun dalam beberapahal, masih ada sebagian masyarakat yang tingkat kesadaran danpemahamannya yang masih rendah sehingga tidak segera melakukanpengurusan akta kelahiran hingga terkadang penduduk sudah berusia lanjutnamun belum memiliki Akta Kelahiran. Terkait dengan penerbitan aktakelahiran penduduk 0-17 tahun Data Konsolidasi Bersih (DKB) yangditerbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri merupakan dasar untukmenentukan persentase penerbitan akta kelahiran yaitu jumlah penduduk 0-17tahun yang telah berakte kelahiran dibanding dengan jumlah penduduk 0-17tahun dikalikan 100 persen

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan | | 318.331 | 317.864 | 317.477 | 326.380 | 357.885 |
| Jumlah penduduk wajib KTP | | 318.331 | 317.864 | 317.497 | 326.701 | 326.701 |
| Cakupan penerbitan KTP-el | % | 100,00 | 100,00 | 99,99 | 99,90 | 109,55 |

*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bulukumba, 2023*

**6. Cakupan penerbitan akte kelahiran**

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwakelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkaithubungan keperdataan penduduka. Akte kelahiran sangat penting peranannyauntuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya. Untuk itu, pelayananterkait penerbitan akta kelahiran semakin dipermudah termasuk denganadanya inovasi pelayanan secara daring atau online. Namun dalam beberapahal, masih ada sebagian masyarakat yang tingkat kesadaran danpemahamannya yang masih rendah sehingga tidak segera melakukanpengurusan akta kelahiran hingga terkadang penduduk sudah berusia lanjutnamun belum memiliki Akta Kelahiran. Terkait

dengan penerbitan aktakelahiran ini merupakan seluruh penduduk wajib memiliki Akta Kelahiran

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran | | 4.182 | 199.647 | 2.248 | 7.405 | 138.243 |
| Jumlah kelahiran | | 6.258 | 238.448 | 5.649 | 8.174 | 124.479 |
| Cakupan penerbitan akte kelahiran | % | 66,83 | 83,73 | 39,79 | 90,59 | 111,06 |

*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bulukumba, 2023*

## G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

### 1. Sarana dan Prasarana perkantoran Pemerintahan desa yang baik

Jumlah Desa yang memiliki sarana dan Prasarana perkantoran Pemerintahan desa yang baik pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan positif ini dipengaruhi oleh bebarapa hal pendukung diantaranya keseriusan pemerintah Desa dalam mengembangkan dan menata desanya sesuai dengan potensi desa yang dimiliki serta adanya dukungan anggaran baik yang bersumber dari ADD dan BDD serta tidak kalah pentingnya faktor pendukung yang sangat menentukan adalah pembinaan dan pendampingan dari pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terus memberikan pembinaan kepada seluruh aparat pemerintahan desa baik dari segi pelaksanaan pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa, perencanaan dan penganggaran di desa, penataan kelembagaan desa dan setiap tahunnya diadakan evaluasi perkembangan desa dan Lomba desa dengan tujuan melihat sejauh mana perkembangan desa. Pada tahun 2022 seluruh Desa dari 109 desa di kabupaten Bulukumba memiliki sarana dan prasana Kantor desa yang baik yang mendukung dalam proses pelayanan administrasi masyarakat di desa dan jalannya pemerintahan di desa.

**Tabel II-144**
**Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang Baik**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang Baik | | 66,97 | 67,89 | 68,81 | 73,39 | 73,39 |

*Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2023*

### 2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan (LPM)

Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan (LPM) memiliki kontribusi dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa sehingga keberadaannya dibutuhkan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan kegaiatan di Desa, namun belum Optimalnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang terdapat di 109 desa yang ada dikabupaten Bulukumba, sehingga Pemerintah kabupaten Bulukumba dalam hal ini Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus berupaya melakukan pembinaan dan koordinasi kepada Pemerintah Desa agar desa yang belum optimal dan belum jalan lembaga pemberdayaannya agar kiranya di aktifkan kembali guna menunjang program pemerintah Desa.

**Tabel II-145**
**Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |

*Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2023*

**3. Kelompok Binaan PKK**

Jumkah PKK yang ada dikabupaten Bulukumba dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 terdiri 146 kelompok yang terdiri dari 109 PKK ditingkat Desa, 27 kelompok PKK tingkat kelurahan dan 10 kelompok PKK di tingkat Kecamatan. Keberadaan PKK ditingkat desa/Kelurahan dan Kecamatan memiliki peran yang sangat aktif, baik itu kegiatan yang ada didesa/Kelurahan, Kecamatan maupun kegiatan ditingkat Kabupaten. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan memiliki peran penting dalam proses pembangunan serta pemanfaatan potensi sumber daya alam didesa/kelurahan maupun dikecamatan untuk dikelolah semaksimal mungkin dalam peningkatan taraf hidup masyarakat didesa terutama kalangan ibu rumah tangga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bekerjasama dengan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulukumba dari tahun 2017 sampai 2021 senantiasa melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok Binaan PKK yang yang ada ditingkat kecamatan, Desa dan Kelurahan agar lebih aktif dan produktif mengambil peran dalam kegiatan pemberdayaan ibu ibu rumah tangga di Desa baik itu dalam hal sosialiasi terkait Pemanfaatan halaman rumah tangga yang produktif, manfaat pemberian ASI eksklusif untuk bayi, Pencegahan Gizi buruk untuk anak balita serta kegiatan lainnya yang berkontribusi dalam hal pembangunan ditingkat Desa/kelurahan.

**Tabel II-146**
**Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |

*Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2023*

**4. Persentase PKK Aktif**

Persentase PKK aktif dari tahun 2018-2022 di Kabupaten Bulukumba setiap tahunnya 136 PKK dari Jumlah PKK di kabupaten Bulukumba atau setiap tahunnnya mencapai target angka 100 %. Kegiatan PKK baik itu ditingkat Desa/Kelurahan, kecamatan dan kabupaten setiap tahunnya dilaksanakan sebagai wujud peran aktif PKK dalam proses pembangunan dan pemberdayaan perempuan, diharapkan kedepan dalam menunjang Kegiatan PKK ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dibutuhkan dukungan penganggaran yang cukup baik itu yang bersumber dari dana Desa dan APBD kabupaten, dalam hal sosialiasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kader dan pengurus PKK, kegiatan sosialisasi dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang dan penataan kelembagaan.

**Tabel II-147**
**Persentase PKK aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase PKK aktif | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2023*

**5. Persentase Posyandu Aktif**

Persentase Posyandu aktif pada tahun 2018 adalah (99,63%) 544 Posyandu dari jumlah Posyandu 546 posyandu yang tersebar di 10 Kecamatan dikabupaten Bulukumba, yang diklasifikasikan dalam empat tingkatan strata yaitu pratama, Madya, Purnama dan Mandiri, dan pada tahun 2015 samapai 2016 tingkatan posyandu di Bulukumba terdiri dari : Pratama 137 Posyandu, Madya 255 Posyandu, Purnama 151 Posyandu dan mandiri 3 Posyandu, Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkoordinasi dengan OPD terkait dalam hal ini dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk terus berusaha dalam peningkatan jumlah posyandu dan peningkatan strata posyandu setiap tahunnya, dan alhamdulillah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 total jumlah Posyandu dikabupaten Bulukumba mengalami peningkatan dari sebelumnya 546 posyandu menjadi 577 Posyandu, ada penambahan 31 jumlah posyandu dan persentase posyandu aktif mencapai angka 100 %. Adapun klasifikasi tingkatan Posyandu di tahun 2019 sampai 2020 terdiri dari : Pratama 147 Posyandu, Madya 274 Posyandu, Purnama 153 Posyandu dan Mandiri 3 Posyandu. Untuk lebih meningkatkan strata posyandu diperlukan dukungan penganggaran dan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia kader posyandu yang ada ditingkat desa serta sarana dan prasarana penunjang lainnya, ini menjadi tugas dan target kinerja tahun berikutnya agar kiranya strata posyandu atau tingkatan posyandu strata mandiri dapat ditingkat jumlah posyandu yang tersebar di sepuluh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba.

**Tabel II-148**
**Persentase Posyandu aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Posyandu aktif | | 99,63 | 99,63 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2023*

**6. Program Pemberdayaan Masyarakat**

Program pemberdayaan masyarakat desa dari tahun 2018-2022 berjalan dengan baik dimana setiap tahunnya desa melakukan kegiatan baik itu sifatnya pembangunan infrastruktur dan kegiatan yang sifatnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dan seluruh potensi yang ada didesa tersebut dengan tujuan menggerakkan roda perekonomian didesa sesuai dengan tujuan pengelolaan dana desa, bahwa dana desa tersebut dikelolah dan dirasakan sendiri manfaatnya oleh masyarakat yang ada di desa tersebut., Pengelolaan dana Desa diatur dalam beberapa peraturan tentang petunjuk teknis pengelolaan dana Desa diantaranya : Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana Desa, PMK No.205/PMK 07/2019 tentang pengelolaan dana Desa, PP No.60 tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN dan Perbub No.69 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa. Salah satu kegiatan peningkatan ekonomi di desa dengan dibentuknya Bumdes di 109 Desa dengan tujuan agar usaha ekonomi kecil menengah dan potensi unggulan didesa dapat dimanfaatkan dan dikembangkan melalui wadah Bumdes, namun kendala yang dihadapi dalam program pemberdayaan masyarakat adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat desa terkait dengan peran aktif masyarakat dalam program pemberdayaan, Perlunya peningkatan kapasitas Sumber daya manusia aparat pemerintah desa serta pengelolah kegiatan termasuk didalmnya pengurus Bumdes, Perlunya penataan Kelembagaan di desa dengan baik agar menunjang program dan kegiatan yang telah direncakan oleh pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa telah melakukan bergabagai upaya pembinaan dan pendampingan termasuk didalamnya melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada aparat pemerintah desa, pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat didesa termasuk didalamya pengelolah

Bumdes, namun kendala yang kami hadapi adalah kurangnya penganggaran yang bersumber dari APBD kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pelatihan di 109 Desa di Kabupaten Bulukumba.

**Tabel II-149**
**Persentase LSM aktif dan Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase LSM aktif | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |

*Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, 2023*

## H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan pewujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk menskenario kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia.

### 1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah1) Kelahiran. Kelahiran bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain menikah di usia muda dan tidak melaksanan program keluarga berencana yang menyebabkan meningkatnya angka kelahiran. Adapun kesertaan KB pada pasangan usia subur menjadi penghambat jumlah kelahiran. 2) Kematian. Kematian juga dapat di pengaruhi beberapa faktor yaitu pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang menyebabkan angka kematian antara lain, tidak menjaga kesehatan, kurang sarana kesehatan di wiliyah tersebut seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Apotik, kemiskinan yang berlebihan yang menyebabkan kurangnya asupan gizi, wilayah perperangan, bencana alam, pola makan tidak teratur dan wabah penyakit. Adapun faktor yang menghambat kematian antara lain menjaga kesehatan, pola makan yang teratus, makan yang bergizi, sedikitnya angka kemiskinan, sarana kesehatan yang lengkap. 3) Migrasi. Penduduk yang datang bisa saja orang yang dari luar wilayah datang ke wilayah kita yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, hal ini bisa menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk. Sebaliknya penduduk yang pergi ke wilayah lain yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, dalam jumlah yang banyak, seperti menjadi TKI, bisa menyebabkan menurunnya jumlah penduduk. Beberapa faktor tersebut yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bulukumba. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-150**
**Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | % | 0,63 | 0,54 | 0,57 | 1,04 | 0,63 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**2. Total Fertility Rate (TFR)**

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan, juga untuk menangani permasalahan penduduk antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk maka diperlukan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk. Pengendalian fertilitas merupakan salah satu cara untuk mengendalikan jumlah penduduk. Dan pengendalian jumlah penduduk lainnya adalah mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan tempat).

Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap perempuan, dan merupakan ukuran untuk seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, serta tingkat urbanisasi. Tingkat pendapatan yang semakin tinggi akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi, karena orangtua menginginkan kualitas yang baik untuk anak-anaknya. Demikian juga jika pendidikan dan kesehatan seseorang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap penurunan fertilitas, terlebih jika didukung dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran demi kualitas generasi. Selengkanya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-151**
**Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Total Fertility Rate (TFR) | % | 2,309 | 2,320 | 2,318 | 2,309 | 2,130 |

*Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Bulukumba, 2021*

**3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB**

Capaian persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam membangun daerah melalui Kampung KB pada tahun 2018 - 2020 terbentuk 11 kampung KB dan 22 perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB namun pada tahun 2021-2022 jumlah perangkat daerah berkurang menjadi 27 Perangkat daerah yang sebelumnya 36 perangkat daerah sehingga mempengaruhi Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB.

**Tabel II-152**
**Persentase Perangkat Daerah(Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung Kb Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB | % | 61,11 | 61,11 | 61,11 | 81,48 | 81,48 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**4. Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk**

Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk pada tahun 2021-2022 mengalami perubahan dikarenakan mengalami perubahan kelembagan sehingga perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk berkurang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-153**
**Persentase Perangkat Daerah Dinas/Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Bulukumba 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk | | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 |
| Jumlah semua perangkat daerah | | 36 | 36 | 36 | 27 | 27 |
| Persentase Perangakat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 11,11 | 11,11 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**5. Jumlah Kebijakan (Peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yg mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk**

Jumlah Kebijakan (Peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yg mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 masing-masing di tetapkan 1 dokumen adapun Surat Edaran Bupati Nomor 188.6/386/DPPKB tentang Pengalokasian Dana Desa dalam Upaya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Bulukumba. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-154**
**Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yg Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Kebijakan (Peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yg mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk | Dok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**6. Jumlah Sektor Yg Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan**

Jumlah sektor yg menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2018-2022 ada enam organisasi perangkat daerah yang memanfaatkan data profil. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-155**
**Jumlah Sektor Yg Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah sektor yg menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | | 1. Dinas DUK CAPIL 2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB | 1. Dinas DUK CAPIL 2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB | 1. Dinas DUK CAPIL 2. BAPPEDA 3. DIKNAS 4. DINKES 5. BPS 6. DPPKB | 1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB | 1, Dinas DUK CAPIL 2. Bappelitbangda 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB,P3A |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**7. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan**

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan pada tahun 2018-2022 ada tiga organisasi perangkat daerah yang melakukan pendidikan kependudukan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-156**
**Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan | | 1.Disdikbud 2.IBI 3.Panti Asuhan Aisya | 1.Disdikbud 2.IBI 3.PKBM | 1.Disdikbud 2.IBI 3.PKBM | 1. Disdikbud 2. IBI 3. PKBM | 1. Disdikbud 2. IBI 3. PKBM |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**8. Rata-rata jumlah anak per keluarga**

Rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2018-2022 dengan adanya sosialisasi Kampung KB sehingga pengendalian penduduk untuk Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga mengalami penurunan pada tahun 2022. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-157**
**Rata-rata jumlah anak per keluarga Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah anak | | 14.214 | 14.021 | 14.214 | 14.521 | 13.560 |
| Jumlah keluarga | | 63.251 | 65.321 | 65.321 | 65.321 | 65.321 |
| Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga | | 22,47 | 21,46 | 21,76 | 22,23 | 20,76 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**9. Ratio Akseptor KB**

Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel II-158**
**Ratio Akseptor KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Akseptor KB | | 7.453 | 8.574 | 9.619 | 6.170 | 9.619 |
| Jumlah pasangan usia subur | | 68.984 | 70.501 | 71.429 | 61.163 | 71.429 |
| Ratio Akseptor KB | % | 10,80 | 12,16 | 13,47 | 10,09 | 13,47 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**10. Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49**

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk perempuan kawin atau perempuan yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern. Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 – 49 di Kabupaten Bulukumba berfluktuatif.

**Tabel II-159**
**Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah peserta KB aktif | | 54.626 | 53.071 | 51.028 | 45.711 | 53.550 |
| Jumlah pasangan usia subur | | 68.984 | 70.501 | 68.913 | 61.163 | 71.429 |
| Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 | % | 79,19 | 75,28 | 74,05 | 74,74 | 74,97 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**11. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)**

Pada tabel berikutnya memperlihatkan terdapat kecenderungan bahwa suatu kabupaten/kota yang memiliki ASFR 15-19 tahun tinggi, maka akan memiliki prevalensi stunting yang tinggi pula. Sedangkan untuk kabupaten/kota yang memiliki ASFR 15-19 tahun rendah, maka akan memiliki kecenderungan prevalensi stunting yang juga rendah. Dapat dilihat pada tabel pada tahun 2018 nilai ASFR masih terlalu tinggi namun dengan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dapat diturunkan pada tahun 2022 menjadi 23,5.

**Tabel II-160**
**Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19)Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) | % | 89,79 | 89,79 | 89,79 | 67,18 | 23,5 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**12. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun**

Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun dapat dilihat pada tabel berikut .

**Tabel II-161**
**Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah pasangan usia subur dengan istri diumur kurang 20 th | | 2.898 | 3.018 | 3.020 | 3.057 | 2.912 |
| Jumlah pasangan usia subur | | 68.984 | 70.501 | 71.429 | 68.913 | 61.163 |
| Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun | % | 4,20 | 4,28 | 4,23 | 4,44 | 4,76 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**13. Cakupan PUS Yang Ingin Ber- KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)**

Bahwa selama ini unmet need menjadi penyumbang cukup besar terhadap belum berpartisipasinya PUS dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana. Berdasarkan persentase capaian unmet need pada tahun 2018 capaian sebesar 15,68 sampai pada tahun 2022 sebesar 11,62 persen belum ber KB selebihnya adalah hamil dan ingin anak segera, PUS yang hamil dan ingin anak segera secara normatif adalah bukanlah sasaran penyuluh agar mau Ber- KB sehingga PUS dalam kategori IKT dan IKD ini yang harus digarap agar menjadi peserta KB. Fenomena unmet need KB bersifat multidimensial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karasteristik demografi sosial ekonomi, sikap dan kualitas pelayanan.

**Tabel II-162**
**Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani | | 11.057 | 11.057 | 8.387 | 8.342 | 7.110 |
| Jumlah pasangan usia subur | | 70.501 | 70.501 | 71.429 | 68.913 | 61.163 |
| Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need) | % | 15,68 | 15,68 | 11,74 | 12,11 | 11,62 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**14. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang dapat lihat bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun penyebab meningkatnya Persentase Pungganaan Kontrasepsi Jangka Panjang adalah adanya kesadaran masyarakat untuk ber-KB dan menggunakan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang untuk menjaragkan kehamilan dan menjaga jarak kelahiran, juga dapat mengurangi resiko kematian ibu dan bayi karena jarak kelahiran yag terlalu dekat. Penyebab menurunnya persentase penggunaan MKJP yaitu dropping alokon dari BKKBN Pusat sangat terbatas karena ada masalah internal di BKKBN Pusat terkait pengadaan ALOKON MKJP, sehingga berpengaruh pada penggunaan MKJP namun pada tahun 2020 persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang 18,51. disini bisa dilihat bahwa mengalami penurunan yang sangat signifikan disebabkan karena pada bulan maret 2020 wabah *Covid-19* melanda Indonesia sehinggga pelayanan KB di seluruh Indonesia terbatas dan rata rata faskes tidak bisa melayani pemasangan Alokon MKJP akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022 mulai mengalami peningkatan sebesar yaitu 20,57 dan 20,77.

**Tabel II-163**
**Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP | | 1.984 | 2.164 | 9.408 | 10.496 | 6.641 |
| Jumlah akseptor KB | | 4.077 | 6.484 | 50.836 | 51.028 | 31.981 |
| Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | % | 48,66 | 33,37 | 18,51 | 20,57 | 20,77 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**15. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**

Indikator Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Tahun 2017 12,90%, Sedangkan persentase keberlangsungan pemakaian kontrasepsi pada tahun 2019 11,96 Penyebab menurunnya keberlangsungan pemakaian kontrasepsi yaitu dropping alokon dari BKKBN Pusat sangat terbatas karena ada masalah internal di BKKBN Pusat terkait pengadaan ALOKON MKJP, sehingga berpengaruh pada penggunaan MKJP.

Sedangkan tahun 2021 kembali mengalami peningkatan dengan persentase 35,05 dikarenakan Dropping Alokon dari BKKBN Pusat sudah stabil sehingga pemakaian kontrasepsi bisa meningkat.

**Tabel II-164**
**Persentase Tinggkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi | | 18.558 | 6.205 | 20.204 | 18.558 | 11.441 |
| Jumlah akseptor KB | | 50.426 | 51.871 | 50.836 | 51.028 | 31.981 |
| Persentase Tinggkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi | % | 36,80 | 11,96 | 39,74 | 36,37 | 35,77 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**16. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita**

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita pada tahun 2018 mencapai 52,32 persen meningkat pada tahun 2022 menjadi 80,95 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-165**
**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB | | 1.984 | 2.182 | 4.284 | 1.532 | 1.819 |
| Jumlah anggota kelompok BKB | | 3.792 | 3.792 | 5.291 | 1.845 | 2.247 |
| Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | % | 52,32 | 57,54 | 80,97 | 83,04 | 80,95 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**17. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB**

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB pada tahun 2018 mencapai 46,67 persen dan terus meningkat pada tahun 2022 mencapai 71,54 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-166**
**Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB | | 1.235 | 1.475 | 2.488 | 2.488 | 2.488 |
| Jumlah anggota kelompok BKL | | 2.646 | 2.646 | 3.478 | 3.478 | 3.478 |
| Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- KB | % | 46,67 | 55,74 | 71,54 | 71,54 | 71,54 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**18. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB**

Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Pada tahun 2017 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber- KB sebanyak 23.11 persen sampai pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan sebanyak 75.31 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-167**
**Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber- KB**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB | | 951 | 1.031 | 2.283 | 579 | 922 |
| Jumlah anggota kelompok BKL | | 2.186 | 2.186 | 3.176 | 803 | 1.279 |
| Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber-KB | % | 43,50 | 47,16 | 71,88 | 72,10 | 72,09 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**19. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan**

Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) berjumlah 1 unit di Kabupaten Bulukumba sehingga capaian pada tahun 2018-2022 mencapai 10 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-168**
**Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**20. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa**

Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-169**
**Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah PIK R/M | | 36 | 36 | 43 | 43 | 25 |
| Jumlah kecamatan | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cakupan Remaja dalam PIK R/M | % | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 4,3 | 2,5 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**21. Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk**

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk telah terpenuhi berdasarkan Jumlah PKB/PLKB yaitu 74 unit dan semuanya didayagunakan.

**Tabel II-170**
**Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dibidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**22. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber- KB Mandiri**

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan pada tahun 2018 mencapai 19,35 persen dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 26,00 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-171**
**Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber- KB Mandiri Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber- KB mandiri | % | 19,35 | 15,79 | 15,00 | 27,00 | 26,00 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**23. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa PPKBD Setiap Desa/ Kelurahan**

Rasio petugas pembantu pembina KB Desa PPKBD setiap Desa/ Kelurahan pada tahun 2018 sampai pada tahun 2022 telah terpenuhi dikarenkan sudah ada Petugas Pembantu Pembina KB Desa PPKBD di Setiap Desa maupun kelurahan. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-172**
**Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio petugas pembantu pembina kB Desa PPKBD setiapDesa/ Kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**24. Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat**

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat pada tahun 2018-2022 sudah terpenuhi.Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-173**
**Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**25. Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KB/KR Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan**

Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengn BPJS dan memberikan pelayanan KB/KR yang sesuai dengan standarisasi pelayanan pada tahun 2018 mencapai 23,56 persen dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 86,91 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-174**
**Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KB/KR Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS | | 45 | 45 | 45 | 45 | 166 |
| Jumlah Faskes dan jejaring | | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Persentase Faskes Dan Jejarinya (Seluruh Tingkatan Wilayah) yg Bekerja Sama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KB/KR yg Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan | % | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 86,91 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**26. Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di Setiap Desa**

Penyediaan informasi data makro keluarga di setiap desa pada tahun 2018-2022 tidak mengalami peningkatan atau penurunan yaitu 100 persen Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-175**
**Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di Setiap Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan penyediaan informasi data makro keluarga di setiap desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**27. Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)**

Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) pada tahun 2018-2022 yaitu 0 persen ini dikarenkan belum adanya laporan maupun kasus tentang Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-176**
**Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**28. Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga**

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga pada tahun 2018 mencapai 89,16 persen dan pada tahun 2022 terpenuhi menjadi 100 persen. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut

**Tabel II-177**
**Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | % | 89,16 | 89,16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*Sumber : Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Bulukumba, 2023*

**29. Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak**

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak pada tahun. selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-178**
**Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | % | 51,08 | 53,44 | 20,16 | 100,00 | 83,90 |

*Sumber : Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Bulukumba, 2023*

**30. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita**

Rata-rata usia kawin pertama wanita pada tahun 2018-2022 berkisaran diumur 22 tahun ke atas. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-179**
**Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rata-rata usia kawin pertama wanita | % | 22,00 | 22,14 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

**31. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes**

Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes pada tahun 2018 sampai pada tahun 2022. Pada tahun 2017 0,0057 persen namun pada tahun 2018 capaian indikator

mengalami penurunan menjadi 0 persen, pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,0057 dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 0 persen, dan pada tahun 2021 sebesar Selengkapnya dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-180**
**Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes | % | 0 | 0,0057 | 0 | 0,618 | 0,01 |

*Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Bulukumba, 2023*

## I. Urusan Perhubungan

### 1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan Umum pada tahun 2018-2022 mengalami penurunan diakibatkan karena beberapa angkutan yang mengalami kerusakan yang sudah tidak layak apalagi di pengaruhi adanya angkutan seperti TAXI, Kurir dan sudah banyak masyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi.

**Tabel II-181**
**Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Bulukumba**
**Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah arus penumpang angkutan Umum | Unit | 23.500 | 20.500 | 14.500 | 17.500 | 9.125 |

*Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2023*

### 2. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis pada tahun 2018-2022. Pada tahun 2017 jumlah pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis sebanyak 3 unit di antanranya jumlah pelabuhan sebanyak 2 unit yaitu pelabuhan Leppe dan Pelabuhan Bira 1 Terminal Bulukumba.

**Tabel II-182**
**Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis**
**Kabupaten BulukumbaTahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | Unit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

*Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2023*

### 3. Persentase layanan angkutan darat

Persentase layanan angkutan darat tahun 2018 -2022 mengalami peningkatan fluktuasi diakibatkan kurangnya layanan sehingga kendaraan angkutan tidak beroprasi, peningkatan jumlah penumpang angkutan yang singnifikan terjadi pada tahun 2022 karena telah berakhir pandemi Covid-19 atau sudah tidak terlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

**Tabel II-183**
**Persentase Layanan Angkutan Darat**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Angkutan Darat | *Unit* | 432 | 332 | 172 | 51 | 44.571 |
| Jumlah Penumpang Angkutan Darat | *Unit* | 23.500 | 20.500 | 14.500 | 14.448 | 3.865.350 |
| Persentase Layanan Angkutan Darat | % | 1,84 | 1,62 | 1,19 | 0,35 | 1,15 |

*Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2023*

**4. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan posifif pada tiap tahunnya kecuali pada tahun 2021 Pengujian Kendaraan tidak beroperasi dikarenakan Peralatan untuk uji KIR Kendaraan mengalami kerusakan

**Tabel II-184**
**Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah angkuatan umum yang tidak memiliki KIR | *Unit* | 874 | 2.003 | 6.734 | 0 | 4.3979 |
| Jumlah angkutan umum | *Unit* | 5.912 | 6.329 | 7.758 | 0 | 4.4571 |
| Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum | *%* | 14,78 | 31,65 | 86,80 | 0,00 | 98,67 |

*Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2023*

**5. Pemasangan Rambu-rambu**

Pemasangan Rambu-rambu pada tahun 2018-2020 dilaksanakan pada tiap tahunnya namun untuk tahun 2021-2022 tidak laksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran setelah melewati masa Covid-19.

**Tabel II-185**
**Pemasangan Rambu-Rambu Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah pemasangan Rambu-rambu | | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| Jumlah rambu -rambu yang seharusnya tersedia | | 5 | 3 | 35 | 0 | 0 |
| Pemasangan Rambu-Rambu | | 60,00 | 100,00 | 48,57 | 0,00 | 0,00 |

*Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2023*

6. **Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum**

Peningkatan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum pada tahun pada tahun 2022 mengalami peningkatan signifikan dikarenakan pada tahun 2018-2021 diukur/dihitung berdasarkan jumlah orang yang terangkut namun pada tahun 2022 diakumulasikan berdasarkan orang dan barang, untuk barang sejumlah 3.865.350 unit dan orang 129.575 jiwa.

Hal lain yang mendasari Ini Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum berbeda pada tiap tahunnya dikarenakan masyarakat dalam mengangkut orang/barang sudan menggunakan kendaraan pribadinya.

**Tabel II-186**
**Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | Orang | 23.500 | 20.500 | 14.500 | 12.000 | 3.994.925 |

*Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2023*

**7. Rasio Ijin Trayek**

Rasio ijin trayek pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017 Rasio ijin trayek sebesar 0.002 Persen. Sampai pada tahun 2021 terus mengalami penurunan sebesar 0.001 Persen. Ini diakibatkan karena jumlah ijin trayek karena semakin banyaknya angkutan yang beroperasi pada tahun 2020.

**Tabel II-187**
**Rasio Ijin Trayek Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio ijin trayek | % | 0.001 | 0.008 | 0.005 | 0,001 | 0,0005 |

*Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukmba, 2023*

**J. Urusan Komunikasi dan Informatika**

**1. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer**

Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi yang tersurvei dilaksanakan pada tahun 2019 yaitu 60 % dan seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Bulukumba dan untuk tahun berikutnya tidak dilakukan survei dikarenakan tidak adanya data dari statistik sektoral. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-188**
**Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 20211 | 2022 |
| Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer | % | Tidak dilakukan survei | 60 | Tidak dilakukan survei | Tidak dilakukan survei | Tidak dilakukan survei |

*Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukmba, 2023*

**2. Cakupan Layanan Telekomunikasi**

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi Cakupan layanan komunikasi dari Tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami dengan pencapaian stagnan namun tidak dihitung pada tahun 2022 karena keterbatasan anggaran. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-189**
**Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan Layanan Telekomunikasi | | 1.154,58 | 1.154,58 | 1.154,58 | 1.154,58 | n/a |

*Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukmba, 2023*

**3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon**

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon mengalami fluktuatif dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sedangkan pada

tahun 2020 dan 2021 tidak dilakukan survei karena adanya covid 19 sehingga diadakan pembatasan. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-190**
**Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | % | 82 | 82 | Tidak dilakukan survei | Tidak dilakukan survei | Tidak dilakukan survei |

*Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukmba, 2022*

**4. Proporsi rumah tangga dengan akses internet**

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Proporsi rumah tangga dengan akses internet. Proporsi rumah tangga dengan akses internet pada tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 tidak dilakukan survei karena adanya covid 19 sehingga diadakan pembatasan dan tidak adanya data dari statistik sektoral. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-191**
**Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Proporsi rumah tangga dengan akses internet | | 39 | 0 | Tidak dilakukan survei | Tidak dilakukan survei | Tidak dilakukan survei |

*Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukmba, 2022*

**5. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer Pribadi**

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Proporsi rumah tangga dengan akses internet pada tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 tidak dilakukan survei karena adanya covid19 sehingga diadakan pembatasan dan tidak adanya data dari statistik sektoral. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-192**
**Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer Pribadi | | 0 | 60 | Tdk dilakukan survei | Tdk dilakukan survei | Tdk dilakukan survei |

*Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bulukumba, 2023*

**6. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah**

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah. persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dari tahun 2018-2022 mencapai target. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-193**
**Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bulukmba, 2023*

## K. Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah

### 1. Persentase Koperasi Aktif

Perkembangan persentase koperasi aktif pada tahun 2018-2022 secara umum mengalami berfluktuasi ini disebabkan oleh pembinaan, pendampingan serta penyuluhan yang dilakukan serta kesadaran dari para pengurus dan anggota koperasi itu sendiri, dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-194**
**Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Koperasi aktif | | 203 | 201 | 202 | 201 | 200 |
| Jumlah Keseluruhan koperasi | | 284 | 286 | 286 | 286 | 295 |
| Persentase koperasi aktif | % | 71,48 | 70,28 | 70,63 | 70,28 | 67,80 |

*Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulukumba, 2023*

### 2. Perkembangan Persentase Usaha Mikro Dan Kecil

Untuk perkembangan persentase usaha mikro dan kecil pada tahun 2018-2022 secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian ini tentu perlu diapresiasi secara positif karena menjadi tanda bahwa perekonomian UKM di Kabupaten Bulukumba cukup hidup dan berkontribusi baik bagi masyarakat. Secara lengkap indikator urusan koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II-195**
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah usaha mikro dan kecil | | 37.720 | 38.120 | 76.816 | 76.906 | 76.927 |
| Jumlah seluruh UKM | | 39.262 | 39.662 | 78.392 | 78.482 | 78.503 |
| Persentase Usaha Mikro Dan Kecil | % | 96,07 | 96,11 | 97,99 | 97,99 | 97,99 |

*Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bulukumba, 2023*

## L. Urusan Penanaman Modal

### 1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor berskala nasional baik PMA maupun PMDN pada tahun 2018-2022 mengalami perubahan pada tiap tahunnya namun pada tahun 2023 investor yang masuk berjumlah 35 Investor dikarenakan diperlukannya untuk pemulihan ekonomi setelah pasca pandemi *Covid-19*. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-196**
**Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Investor | 51 | 51 | 58 | 117 | 35 |

*Sumber: Dinas PM,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukmba, 2023*

**2. Jumlah nilai Investor berskala nasional PMA/PMDN**

Jumlah nilai Investor berskala nasional PMA/PMDN pada tahun 2018-2022 berbeda pada tiap tahunnya. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-197**
**Jumlah Nilai Investor Berskala Nasional PMA/PMDN**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah nilai Investor berskala nasional PMA/PMDN | Rp (juta) | 599.891 | 50.200 | 1.225.838 | 244.255 | 54.322 |

*Sumber: Dinas PM,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukmba, 2023*

**3. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)**

Urusan penanaman modal diukur melalui indikator. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)pada tahun 2017 sebesar 99 persen, tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 635 persen, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -92 persen, tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 2.342 persen, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -79 dan turun pada tahun 2022 menjadi -79,55 persen dikarenakan kurang investor asing yang masuk. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-198**
**Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | % | 635 | -92 | 243 | -79 | -79,55 |

*Sumber: Dinas PM,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukmba, 2023*

**M. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

Urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat melalui indikator cakupan pembinaan olahraga, cakupan pelatih yang bersertifikasi, cakupan pembinaan atlet muda, jumlah atlet berprestasi dan persentase Wirausaha Muda. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada deskripsi berikut.

**1. Persentase organisasi pemuda yang aktif**

Indikator kinerja persentasi organisasi pemuda yang aktif diperoleh dengan membagi jumlah organisasi pemuda yang aktif dengan jumlah organisasi pemuda yang terdaftar. Organisasi pemuda yang aktif ini berdasarkan laporan dari komite nasional pemuda Indonesia dan organisasi pemuda lainnya yang mendapatkan pembinaan dari dinas pemuda dan olahraga. Dari data di bawah dapat di lihat bahwa capaian kinerja setiap tahun selalu mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini tentunya berkat dukungan anggaran yang cukup memadai pada kegiatan pengembangan dan pembinaan kepemudaan seperti anggaran Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Anggaran untuk kegiatan Karya Ilmiah

Remaja. Namun tentunya perlu intervensi anggaran yang lebih besar untuk peningkatan sumber daya manusia pemuda di Kabupaten Bulukumba.

**Tabel II-199**
**Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah organisasi pemuda yg aktif | | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Jumlah seluruh organisasi pemuda | | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif | % | 82,14 | 83,93 | 85,71 | 87,50 | 89,29 |

*Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023*

**2. Persentasi Wirausaha Muda Pemula**

Kabupaten Bulukumba berdasarkan data Persentasi Wirausaha Muda Pemula pada tahun 2018 mencapai 2,29 persen dan pada tahun 2019-2022 mengalami peningkatan yakni 2,59 persen dengan kondisi stagnan dengan jumlah wirausaha muda mencapai 259 orang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yakni 229 orang.

**Tabel II-200**
**Persentase Wirausaha Muda**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase wirausaha muda | % | 2,29 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |

*Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023*

**3. Cakupan Pembinaan Olahraga**

Cakupan pembinaan merupakan pembagian antara jumlah cabang olahraga yang di bina dengan jumlah cabang olahraga yang terdaftar. Pada tahun 2018, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga sebanyak 6 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan sebanyak 250%. Adapun cabang olahraga di maksud adalah atletik, taekwondo, pencak silat, bola volley, billiard dan karate. Jumlah cabang olahraga yang di bina olah dinas pemuda dan olahraga pada tahun sama dari pada tahun sebelumnya dikarenakan keterbatasan anggaran dan tidak adanya even besar yang diselenggarakan.

Sedangkan pada tahun 2019, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga mengalami kenaikan lagi dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 12 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan sebanyak 25%. Adapun cabang olahraga yang di bina tersebut adalah atletik, taekwondo, pencak silat, karate, bulutangkis, sepak takraw, billiard, bola volley, futsal, tenis meja, tenis lapangan dan basket. Pada tahun 2020 jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga naik 2 kali lipat dari tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2018 dilaksanakan pekan olahraga daerah (PORDA) yang dilaksanakan di kabupaten pinrang. Pada ajang 4 tahunan ini, kabupaten Bulukumba berhasil meloloskan 12 cabang olahraga yang selanjutnya dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga.

Pada tahun 2019, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga sebanyak 6 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan sebanyak 25%. Adapun cabang olahraga yang di bina tersebut adalah atletik, taekwondo, pencak silat, karate, sepak takraw, billiard, bola volley. Jumlah ini tentunya menurun dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut terjadi defisit anggaran pada pemerintah kabupaten Bulukumba sehingga harus dilakukan rasionalisasi anggaran. Hal ini

tentunya berdampak pada terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembinaan cabang-cabang olahraga sedangkan pada tahun anggaran 2021, jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan olah dinas pemuda dan olahraga hanya 2 cabang olahraga, sehingga jika dipersentasikan hanya 8,33%. Adapun cabang olahraga yang di bina tersebut adalah atletik dan taekwondo. Jumlah cabang olahraga yang dibina sangat terbatas di karenakan adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan banyaknya agenda olahraga yang dibatalkan dan dilakukannya refocussing anggaran.

**Tabel II-201**

**Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah cabang olahraga yang dibina | | 12 | 6 | 2 | 18 | 24 |
| Jumlah seluruh cabang olahraga yang terdaftar | | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 |
| Cakupan Pembinaan Olahraga | | 50,00 | 25,00 | 8,33 | 75,00 | 85,71 |

*Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023*

**4. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan**

Cakupan pelatih yang bersertifikat dimaksud merupakan pembagian antara jumlah pelatih olahraga yang berlisensi dengan jumlah pelatih olahraga yang terdaftar pada tahun 2018 jumlah pelatih olahraga yang berlisensi sebanyak 12 orang atau 20,69% dari total jumlah pelatih yang terdaftar. Penambahan ini terjadi dikarenakan pada tahun anggaran 2018, dinas pemuda dan olahraga mengalokasikan anggaran untuk pelatihan wasit/pelatih olahraga berlisensi untuk 5 orang. Pada tahun 2019, jumlah pelatih olahraga yang berlisensi sebanyak 15 orang atau 25,86% dari total jumlah pelatih yang terdaftar. Jumlah kenaikan pelatih berlisensi dari tahun sebelumnya sebanyak 3 orang. jumlah ini sangat kecil dibanding kebutuhan, hal ini dikarenakan kurang adanya dana yang mendukung kegiatan tersebut, selain itu adanya rasionalisasi anggaran pemerintah daerah menyebabkan beberapa kegiatan di hapus atau di kurangi volumenya, salah satunya kegiatan pelatihan pelatih olahraga berlisensi sedangkan pada tahun 2020, jumlah pelatih olahraga yang berlisensi tidak mengalami penambahan. Hal ini dikarenakan kurang adanya dana yang mendukung kegiatan tersebut, selain itu adanya *pandemic covid 19* yang menyebabkan banyak kegiatan olahraga yang di batalkan untuk menghindari banyak kerumunan, salah satunya pelatihan pelatih berlisensi. Lain dari pada itu, adanya *pandemic covid 19* juga menyebabkan harus dilakukannya refocusing anggaran pada dinas pemuda dan olahraga, yang dampaknya terdapat banyak kegiatan yang di hilangkan, salah satunya adalah kegiatan pelatihan pelatih berlisensi tetapi pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan sebesar 29,31%

**Tabel II-202**

**Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah pelatih bersertifikat | | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Jumlah seluruh pelatih | | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan | | 20,69 | 25,86 | 25,86 | 29,31 | 29,31 |

*Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023*

**5. Cakupan Pembinaan Atlet Usia Dini**

Cakupan pembinaan atlet usia dini dimaksud merupakan pembagian antara jumlah atlet usia dini yang dibina dengan jumlah atlet usia dini yang terdaftar. Atlet usia dini yang di maksud adalah atlet yang status nya masih belajar di sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Persentasi ini sangat kecil dibanding jumlah atlet yg ada dan peningkatannya pun sangat kecil dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan kurang adanya dana yang mendukung kegiatan tersebut. Selain dari pada itu, tidak adanya *tallent scouting* dan pemandu bakat menyebabkan sulitnya mencari atlet muda yang berbakat. Selain itu juga adanya pandemic covid 19 menyebabkan harus dilakukan nya rasionalisasi dan refocusing anggaran yang tentunya berimbas pada harus di hilangkannya beberapa kegiatan. Faktor anggaran juga yang menjadi salah satu factor kegiatan pembinaan atlet usia dini hanya difokuskan untuk pelatihan dan pembinaan kepada atlet yang betul-betul berbakat dan mempunyai prospek mendapatkan prestasi di tingkat provinsi dan nasional.

**Tabel II-203**

**Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah atlet pelajar yang dibina | | 40 | 60 | 85 | 100 | 123 |
| Jumlah seluruh atlet pelajar | | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Cakupan pembinaan atlet muda | | 23,95 | 35,93 | 50,90 | 59,88 | 73,65 |

*Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023*

**6. Jumlah Atlet Berprestasi**

Jumlah atlet berprestasi adalah jumlah medali yang di peroleh oleh atlet dari berbagai kejuaraan-kejuaraan yang di ikuti cabang-cabang olahraga yang di bina olah dinas pemuda dan olahraga pada tahun 2017, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet sebanyak 13 medali yang terdiri dari 5 medali emas, 3 medali perak dan 5 medali perunggu. Dari 13 medali tersebut di peroleh pada 4 cabang olahraga yaitu atletik, taekwondo, billiard dan bola volley pantai. Perolehan ditargetkan mendapatkan 13 medali atau jika di persentasikan mencapai 100% dari target.

Sedangkan pada tahun 2018, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet sebanyak 26 medali yang terdiri dari 5 medali emas, 7 medali perak dan 14 medali perunggu. Dari 26 medali tersebut di peroleh pada 6 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo, billiard dan bola volley pantai. Perolehan medali ini pada tahun 2018 ditargetkan mendapatkan 15 medali atau jika di persentasikan mencapai 173% dari target.

Pada tahun 2019, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet sebanyak 31 medali yang terdiri dari 10 medali emas, 11 medali perak dan 20 medali perunggu. Dari 31 medali tersebut di peroleh pada 5 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo dan bola volley pantai. Perolehan medali ini jauh melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021, dimana di tahun 2019 dinas pemuda dan olahraga ditergetkan mendapatkan 15 medali atau jika di persentasikan mencapai 206% dari target. Hal ini tidak lepas dari fokus nya pembinaan yang dilakukan olah dinas pemuda dan olahraga terhadap atlet yang berbakat dan cabang olahraga yang berpotensi mendulang medali.

Pada tahun 2020, jumlah prestasi yang diperoleh oleh atlet hanya 3 medali yang terdiri dari 1 medali perak dan 2 medali perunggu. Dari 3 medali tersebut di peroleh pada 1 cabang olahraga yaitu atletik. Pada tahun 2020 dinas pemuda dan olahraga ditargetkan mendapatkan 13 medali atau jika di persentasikan hanya mencapai 23,07% dari target. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan banyaknya agenda kejuaraan-kejuaraan olahraga yang dibatalkan pelaksanaan nya, selain itu adanya pandemi covid 19 juga menyebabkan dilakukannya rasionalisasi dan refocusing anggaran. Dan pada tahun 2021 terdapat 3 medali dari 11 orang atlet.

**Tabel II-204**

**Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun |
|---|---|---|

| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah atlet berprestasi | % | 26 | 31 | 3 | 11 | 3 |

*Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023*

**7. Jumlah Prestasi Olahraga**

Jumlah prestasi olahraga adalah jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali dari berbagai kejuaraan-kejuaraan yang di ikuti cabang-cabang olahraga yang di bina olah dinas pemuda dan olahraga. Pada tahun 2018, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh oleh dinas pemuda dan olahraga dari 6 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo, billiard dan bola volley pantai. Pada tahun 2019, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh oleh dinas pemuda dan olahraga di peroleh dari 5 cabang olahraga yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo dan bola volley pantai. Peningkatan ini terjadi tidak lepas dari adanya dukungan dan sinergitas dalam penyelenggaraan dan pembinaan cabang olahraga.

Pada tahun 2020, jumlah prestasi olahraga yang diperoleh oleh dinas pemuda dan olahraga dari 1 cabang olahraga yaitu atletik.dan di tahun 2021 sebanyak 3 prestasi Jika dilihat dari hasil ini sangat kurang sekali, hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan banyaknya agenda kejuaraan-kejuaraan olahraga yang dibatalkan pelaksanaannya dan pada tahun 2022 terdapat 2 prestasi yang diraih.

**Tabel II-205**
**Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah prestasi olahraga | % | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 |

*Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023*

**N. Urusan Statistik**

Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Bulukumba dapat diukur oleh indikator ketersediaan Buku "Kabupaten Dalam Angka" dan Buku "PDRB". Buku Kabupaten Bulukumba Dalam Angka telah tersedia setiap tahunnya..

**1. Buku ”Kabupaten Dalam Angka”**

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Buku ”kabupaten dalam angka”. Buku “kabupaten dalam angka” dari tahun 2017 sampai 2021 mencapai target dengan tersedia buku Kabupaten dalam Angka. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-206**
**Buku ”Kabupaten Dalam Angka” Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Buku ”kabupaten dalam angka” | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

*Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bulukumba, 2023*

**2. Buku ”PDRB”**

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator Buku ”PDRB”. Buku ”PDRB” dari tahun 2017 sampai 2021 mencapai target dengan tersedia Buku ”PDRB”. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-207**
**Buku ”PDRB” Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Buku ”PDRB” | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

*Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bulukumba, 2023*

**O. Urusan Persandian**

Kabupaten Bulukumba telah menggunakan persandian dalam mengelola informasi penting daerah. Pada tahun 2018-2022 Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah sudah mencapai 100 persen karena semua sistem komunikasi sudah berbasis digital.

| URAIAN | SATUAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023*

**P. Urusan Kebudayaan**

**1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya**

Pelayanan pada urusan kebudayaan ditentukan oleh indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya. Pada tahun 2017 sebanyak 3 festival seni kebudayaan yang dilaksanakan dan tahun 2019 meningkat menjadi 5 jenis festival seni dan budaya yang sudah menjadi agenda rutin Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah: Festival Pinisi, Songkabala Bantilang, Gowes Hutan Karet, Jelajah Hutan Karet , dan Andingingi. Pada tahun 2021 menurun menjadi 1 kegiatan festival seni budaya yang dapat dilaksanakan karena adanya pandemi *Covid-19* begitupun pada tahun 2022 festival yang diselenggarakan yakni Festival Phinisi. Adapun secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-208**
**Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Buah | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber:Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2023*

**2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan**

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. serta jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan pendataan sistem informasi sejaran purbakala Kabupaten Bulukumba dan di data banyak sekali situs sejarah dan purbakala yang bisa didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bulukumba dalam mendukung indikator jumlah cagar budaya yang dilestarikan adalah pendataan cagar budaya untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Pada tahun 2018 sebanyak 50 benda situs cagar budaya yang dilestarikan dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 58 cagar budaya yang dilestarikan.

**Tabel II-209**
**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Cagar | 50 | 57 | 58 | 58 | 58 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2021*

**3. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara Terpadu**

Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu mulai tahun 2018-2022 sebanyak 2 jumlah cagar budaya yang dikelola yaitu Cagar Budaya Pasanggrahan Tanete di Kecamatan Bulukumpa dan Kompleks Makam Dato Tiro Di Kecamatan Bontotiro.

**Tabel II-210**
**Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah cagar budaya yang dikelola secara Terpadu | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

*Sumber:Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2023*

**Q. Urusan Perpustakaan**

**1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun**

Jumlah kunjungan perpustakaan pada tahun 2018-2022 berbeda pada tiap tahunnya dikarenkan Jumlah orang dalam populasi yang dilayani dengan yang berkunjungan bervariasi, namun pada tahun 2020 menurun drastis dikarenakan dimulainya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan kekhawatir untuk berkunjung ke Perpustakaan.

Hal lain yang menjadi kendala dalam kegiatan layanan perpustakaan adalah:

a. Sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang memadai dalam memberikan pelayanan, yaitu kondisi gedung yang tidak representative, berpengaruh pada penataan ruang, jauh dibawah standar pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.
b. Jumlah armada yang digunakan dalam memberikan layanan eksternal masih kurang untuk menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bulukumba

**Tabel II-211**
**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | | 82,78 | 80,54 | 9,55 | 1,11 | 6,34 |

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2023*

**2. Jumlah Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah**

Formulasi yang digunakan untuk menghitung persentase Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah jumlah judul buku yang tersedia diperpustakaan daerah dibagi dengan jumlah eksemplar buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah. Pada tahun 2018 Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sebanyak 8.503 judul dan 19.810 eksamplar atau 42,92%. Terdapat penambahan buku sebanyak 451 judul dan 2.292 eksamplar. Jumlah pengadaan buku mengalami penurunan sebesar 3.04% dari tahun sebelumnya, tahun 2019 Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sebanyak 8.628 judul dan 20.150 eksamplar atau 42,82%. Terdapat penambahan buku sebanyak 125 judul dan 340 eksemplar. Jumlah pengadaan buku turun sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya sedangkan pada tahun 2020 Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sebanyak 10.684 judul dan 24.828 eksemplar atau 3.03%. Penambahan buku sebanyak 2.056 judul dan 4.678 eksemplar. Jumlah pengadaan buku meningkat sebanyak 0,21 % dari tahun sebelumnya.dan pada tahun 2021 jumlah buku yang tersedia sebanyak 42,96% dan pada tahun 2022 meningkat yakni 71,54 persen.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penambahan jumlah buku adalah Kondisi keuangan daerah /minimnya anggaran daerah yang dialokasikan untuk pengadaan

buku setiap tahunnya sehingga diharapkan peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan pengadaaan buku perpustakaan.

**Tabel II-212**
**Tabel Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah koleksi judul buku | | 8.503 | 8.628 | 10.684 | 10.727 | 15.933 |
| Jumlah koleksi jumlah buku | | 19.810 | 20.150 | 24.828 | 24.969 | 22.272 |
| Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah | | 42,92 | 42,82 | 43,03 | 42,96 | 71,54 |

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2023*

**3. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk**

Formulasi yang digunakan untuk menghitung rasio perpustakaan per satuan penduduk adalah jumlah perpustakaan dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah perpustakaan pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah perpustkaan sebanyak 300 unit dan terus bertambah hingga pada tahun 2022 sudah sebanyak 707 Unit.

Kendala yang dialami dalam penambahan jumlah perpustakaan adalah masih terdapat beberapa desa dan kecamatan yang belum membentuk perpustakaan umum di tengah tengah masyarakat.

**Tabel II-213**
**Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rasio perpustakaan persatuan penduduk | Rasio | 0,72 | 0,71 | 0,95 | 1,07 | 1,61 |

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2023*

**4. Rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun**

Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan pada tahun 2018-2022 mengalami penuruan secara drastis yang diakibatkan oleh adanya pembatasan pelayanan akibat *Covid-19*. Hal lain yang menjadi kendala dalam kegiatan layanan perpustakaan adalah:

a. Sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang memadai dalam memberikan pelayanan, yaitu kondisi gedung yang tidak representative, berpengaruh pada penataan ruang, jauh dibawah standar pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.
b. Jumlah armada yang digunakan dalam memberikan layanan eksternal masih kurang untuk menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bulukumba
c. Alokasi anggaran pelayanan masih perlu ditingkatkan.

**Tabel II-214**
**Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun | Orang | 290.784 | 294.447 | 35.925 | 3.107 | 27.884 |

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2023*

**5. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan**

Jumlah judul koleksi judul buku perpustakaan mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Hal yang menjadi kendala adalah daya tampung gedung perpustakaan yang

terbatas untuk menampung buku dan sarana pendukung lainnya, sehingga buku yang ada kami layankan dalam bentuk layanan *book loan* (Peminjaman buku) ke perpustakaan sekolah, perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat.

**Tabel II-215**
**Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | Judul | 8.503 | 8.628 | 10.684 | 10.727 | 15.933 |

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2023*

**6. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat**

Formulasi yang digunakan untuk menghitung jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat adalah: Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat dibagi dengan jumlah pustkawan di Kabupaten Bulukumba. Faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat adalah kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola perpustakaan , sehingga diharapkan tahun tahun selanjutnya alokasi anggaran pembinaan SDM dapat ditingkatkan untuk pelaksanaan diklat dan pembinaan kepustakawanan.

**Tabel II-216**
**Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat | | 302 | 302 | 302 | 302 | 335 |
| Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai | | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 |
| Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat | % | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 53,26 |

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2023*

**R. Urusan Kearsipan**

**1. Peningkatan SDM pengelola kearsipan.**

Peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola kearsipan dari tahun 2018-2022 sudah mencapai target dikarenakan Jumlah SDM pengelola kearsipan yang dibina sudah sesuai dengan Jumlah pengelola arsip di Daerah.

**Tabel II-217**
**Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Peningkatan SDM pengelola kearsipan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2023*

2. **Presentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku**.

Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku untuk tahun 2022 adalah sebesar 5,56 persen atau 2 perangkat daerah. Hal ini disebabkan oleh aktifnya dan respons positif dari Lembaga Kearsipan Daerah yang menindaklanjuti kebijakan pemerintah tentang pentingnya pengelolaan arsip secara baku di masing-masing instansipemerintah untuk

kemudahan dalam menelusuri arsip sebagai alat bukti dalam administrasi pemerintah dan juga sebagai identitas bangsa. Keaktifan para arsiparis dalam melaksanakan pembinaan pada instansi pemerintah dan juga swasta dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis. Atas dorongan inilah maka seluruh arsiparis yang diberikan tanggungjawab dalam pembinaan pengelolaanarsip terus menindaklanjuti agar tata kelola arsip di Provinsi Sulawesi Selatansemakin baik dai tahun ketahun. Namun faktor penghambat pencapaian target adalah jumlah arsip yang harus dikelola atau di berikan pembinaan terikat oleh regulasi dalam pelaksanaan pembinaan.

**Tabel II-218**
**Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip secara baku | | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Jumlah Perangkat Daerah | | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 |
| Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku | % | 6,52 | 2,17 | 2,17 | 8,33 | 5,56 |

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2023*

### 2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah diantaranya yaitu Pariwisata, Pertanian, Perdagangan. Perindustrian, serta Kelautan dan Perikanan.

**A. Urusan Kelautan dan Perikanan**

**1. Produksi Perikanan**

Produksi perikanan secara umum mengalami fluktuasi Jumlah Produksi Ikan dalam produksi perikanan, ini dapat dilihat pada data capaian pada tahun 2018 sebanyak jumlah 239.380 ton dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 222.951 ton. Hal ini disebabkan oleh pengaruh perubahan cuaca ekstrim yang menghambat aktivitas nelayan dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan yang sering terjadi ditahun 2022. selengkapnya dapat dilihat pada tabel:

**Tabel II-219**
**Capaian Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Produksi Ikan | ton | 239.380 | 235.999 | 252.416 | 282.727 | 222.951 |
| Perikanan tangkap | ton | 53.456 | 52.652 | 53.860 | 53.830 | 54.911 |
| Perikanan Budidaya | ton | 185.924 | 183.345 | 198.556 | 228.897 | 168.040 |
| Target Daerah | ton | 180.842 | 189.062 | 197.282 | 238.359 | 240.743 |
| Cakupan Produksi perikanan | | 132,37 | 124,83 | 127,95 | 118,61 | 92,61 |

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, 2023*

**2. Cakupan Bina Kelompok Tani Mengalami Penurunan Sebesar**

Kategori kelompok yang dibina adalah kelompok yang sudah mendapat bantuan dari Dinas Perikanan Bulukumba, bantuan yang diberikan tersebut bukan hanya berupa bantuan fisik namun juga berupa bantuan non fisik seperti penyelenggaraan pelatihan teknis perikanan seperti Penangkapan ikan dan budidaya perikanan.

Kesulitan dalam meningkatkan persentase binaan kelompok adalah semakin meningkatnya jumlah kelompok tiap tahun sehingga meskipun bantuan yang diberikan ke kelompok masyarakat juga bertambah namun laju penanmbahan jumlah kelompok perikanan juga cukup besar.Oleh karena itu, terjadi fluktuasi bahkan cenderung penurunan persentasi cakupan binaan kelompok karena anggaran Dinas dari tahun ke tahun semakin menurun yang berdampak pada semakin kurangnya bantuan yang diserahkan ke kelompok masyarakat semantara jumlah kelompok juga semakin meningkat.

**Tabel II-220**
**Cakupan Bina Kelompok Tani**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kelompok yang mendapat bantuan | | 376 | 458 | 539 | 620 | 702 |
| Jumlah Kelompok | | 662 | 687 | 776 | 958 | 958 |
| Cakupan Bina Kelompok Perikanan | | 56,80 | 66,67 | 69,46 | 64,72 | 73,28 |

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, 2023*

## B. Urusan Pariwisata

### 1. Kunjungan wisata

Indikator kinerja urusan pariwisata dapat dilihat dari fluktuasi kunjungan wisatawan domestic dan mancanegara, lama kunjungan wisatawan, dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata. Dari angka kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan dari tahun 2017sampai dengan tahun 2021. Total Angka kunjungan wisatawan tahun 2017 sebanyak 203.770 Orang Sedangkan Pada tahun 2018 sampai 2021 mengalami kenaikan sebanyak 266.296 sampai 366.176 0rang.

**Tabel II-221**
**Kunjungan Wisata Kabupaten Bulukumba 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Kunjungan wisata | Orang | 266.296 | 280.590 | 301.507 | 366.176 | 373.095 |

*Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023*

### 2. Lama Kunjungan Wisata

Untuk indikator lama kunjungan wisatawan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 tetap yaitu 2-4 hari. Hal ini juga tergantung pada hari-hari libur Panjang yang cukup menarik animo wisatawan untuk menginap di Kawasan wisata.

**Tabel II-222**
**Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Bulukumba 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lama Kunjungan Wisata | Hari | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |

*Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023*

### 3. PAD sektor pariwisata

**Tabel II-223**
**PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Bulukumba 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| PAD sektor pariwisata | Milyar | 3,07 | 3,27 | 3,75 | 5,96 | 5,37 |

*Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2023*

## C. Urusan Pertanian

### 1. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan terhadap PDRB

Berdasarkan tabel diatas terlihat, terjadi penurunan nilai kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba secara terus menerus dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Hal ini disebabkan antara lain; 1) semakin berkurangnya tenaga kerja dibidang pertanian khususnya subsektor tanaman pangan karena meningkatnya penggunaan alsintan, 2) semakin menurunnya penerapan teknologi tepat guna oleh petani, 3) semakin berkembangnya sektor jasa lainnya, 4) terjadinya anomali iklim yang menyebabkan kekeringan dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang sering menggagalkan panen serta, 5) kurangnya dana stimulan bagi petani misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

**Tabel II-224**
**Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB | % | 28.72 | 26.62 | 26.31 | 26.31 | 25,48* |

*Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2023*

### 2. Cakupan bina kelompok tani

Capaian Bina Kelompok Tani selama tahun 2018 yaitu 61,20 persen dan pada tahun 2022 menjadi 53,35 persen dengan Jumlah Kelompok Tani memperoleh bantuan 1.496 kelompok sedangkan Jumlah keseluruhan kelompok Tani yakni 2.804 kelompok. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II-225**
**Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan bina kelompok tani | % | 61,20 | 53,73 | 71,18 | 36,66 | 53,35 |

*Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2023*

Untuk komoditi peternakan, salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Bulukumba adalah sapi potong, ayam ras petelur dan ayam ras pedaging. Peningkatan jumlah populasi pada Ayam Ras Pedaging mengalami peningkatan yang signifikan sedangkan untuk komditas Sapi Potong dan Ayam Ras Petelur mengalami penurunan dibanging pada tahun sebelumnya. Untuk perkembangan populasi dari tiga jenis komoditas unggulan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-226**
**Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Bulukumba 2018-2022**

| Komoditas | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapi Potong | Ekor | 75.993 | 76.434 | 76.797 | 77.658 | 71.801 |
| Ayam Ras Pedaging | Ekor | 2.381.401 | 2.550.438 | 2.309.930 | 3.694.020 | 4.384.830 |
| Ayam Ras Petelur | Ekor | 452.158 | 463.793 | 638.724 | 1.176.858 | 839.001 |

*Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2023*

## D. Urusan Kehutanan

Pengelolaan hutan pasca penetapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah memiliki kewenangan atas kawasan hutan. mulai dari perencanaan. perizinan. dan implementasi pengelolaan hutan dan pengawasan. Pemerintah mempunyai kewenangan mengontrol

proses perencanaan dan pemantauan sumberdaya hutan termasuk pengukuhan kawasan hutan yang secara implementasi berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Kewenangan pengurusan kehutanan oleh provinsi meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. rehabilitasi dan reklamasi hutan. dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Kewenangan kabupaten dalam pengelolaan kawasan hutan meliputi pengelolaan taman hutan raya. penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten/kota. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi. Hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/kota.

**E. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

**1. Jumlah rumah tangga pengguna listrik**

jumlah rumah tangga pengguna listrik tahun 2018-2022 pada tiap tahunnya mengalami peningkatan. Kabupaten Bulukumba bekerjasama dengan PT. PLN Cabang Bulukumba. Melalui program tersebut terdapat KK yang berada dibeberapa kecamatan, dan beberapa desa terpencil/pelosok desa seperti Desa Pattiroang, Kacibo, Parampakku, Bonto Nangka, Kampung Baru, Tokombeng, yang selama ini belum menikmati listrik sekarang ini sudah dapat menikmatinya. Selanjutnya di tahun 2020 ini Kabupaten Bulukumba masuk dalam 5 kabupaten yang mendapatkan program LISA (Listrik Desa) oleh PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sulselbar.

**Tabel II-227**
**Jumlah Pelanggan listrik**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Pelanggan listrik | | 108.402 | 113.994 | 119.221 | 125.204 | 129.572 |

*Sumber : BPS & PLN Kabupaten Bulukumba, 2023*

**F. Urusan Perdagangan**

**1. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal**

Persentase cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 jumlah kelompok pedagang/usaha formal tidak menerima bantuan. Namun pada tahun 2020 jumlah kelompok yang menerima bantuan Coolbox 0,85 persen dan jumlah kelompok yang menerima bantuan Tenda 0,51 Persen sehingga diperoleh capaian sebesar 0,68 persen dan pada tahun 2021 jumlah kelompok pedagang/usaha formal tidak menerima bantuan . Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-228**
**Cakupan Bina Kelompok Perdagangan di Kabupaten Bulukumba 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | % | 0 | 0 | 0,68 | 0 | 0,72 |

*Sumber: Dinas Perdagangan ,Perindustrian koperasi dan UMKM Kabupaten Bulukumba, 2023*

**2. Jumlah Pasar**

Jumlah pasar yang tersebar di semua Kecamatan di Kabupaten Bulukumba sebanyak 43 yang dihitung dari berbagai tipe pasar, tipe A sebanyak 1 Unit, tipe B sebanyak 15 Unit, tipe C sebanyak 26 Unit, dan tipe D sebanyak 1 Unit. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II-229**
**Jumlah Pasar berdasarkan Kecamatan, Tipe serta Alamat**
**Kabupaten Bulukumba tahun 2020**

| No | Uraian | Tipe | Alamat |
|---|---|---|---|
| | **UJUNG BULU** | | |
| 1 | Pasar Sentral | A | Caile |
| 2 | Pasar Kasuara | C | Tanah Kongkong |
| 3 | Pasar Cekkeng | B | Terang-terang |
| | **GANTARANG** | | |
| 1 | Pasar Kalimassang | C | Mariorennu |
| 2 | Pasar Ponre | B | Matteko |
| 3 | Pasar Gunung Jati | B | Bontomacinna |
| 4 | Pasar Mannaungi | C | Gantarang |
| 5 | Pasar Dampang | C | Dampang |
| 6 | Pasar Bonto Nyeleng | C | Bonto Nyeleng |
| 7 | Pasar Borong Tellu | C | Bukit Tinggi |
| 8 | Pasar Bangkeng Buki | C | Bengkeng Buki |
| | **KINDANG** | | |
| 1 | Pasar Borong Rappoa | B | Borong Rappoa |
| 2 | Pasar Pa'Baeng-Baeng | C | Anrihua |
| 3 | Pasar Cilibbo | C | Cilibbo |
| 4 | Pasar Tapolloe | C | Benteng Palioi |
| | **UJUNG LOE** | | |
| 1 | Pasar Dannuang | B | Dannuang |
| 2 | Pasar Ulu Tedong | B | Gantarang |
| 3 | Pasar Allu/Tamatto | C | Tammatto |
| 4 | Pasar Seppang | C | Seppang |
| | **HERLANG** | | |
| 1 | Pasar Batu Asang | B | Singa |
| 2 | Pasar Gunturu | C | Gunturu |
| 3 | Pasar Tanuntung | C | Tanuntung |
| 4 | Pasar Kupang | C | Kupang |
| | **KAJANG** | | |
| 1 | Pasar Kassi | C | Kassi |
| 2 | Pasar Kalimporo | B | Kalimporo |
| 3 | Pasar Maleleng | C | Maleleng |
| | **RILAU ALE** | | |
| 1 | Pasar Bontomanai | B | Bontomanai |
| 2 | Pasar Palampang | B | Palampang |
| 3 | Pasar Balimbing | C | Bonto Mate'ne |
| 4 | Pasar Swatani | C | Swatani |
| 5 | Pasar Sampeang | B | Desa Bonto Haru |
| | **BULUKUMPA** | | |
| 1 | Pasar Tanete | B | Tanete |
| 2 | Pasar Balang Riri | C | Bajiminasa |
| 3 | Pasar Dinding | D | Jojjolo |
| 4 | Pasar Salassae | C | Salasae |
| | **BONTO BAHARI** | | |

| No | Uraian | Tipe | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | Pasar Tanah Beru | B | Sapolohe |
| 2 | Pasar Ara | C | Ara |
| 3 | Pasar Bira | C | Bira |
| | **BONTO TIRO** | | |
| 1 | Pasar Batang | C | Batang |
| 2 | Pasar Hila-Hila | C | Ekatiro |
| 3 | Pasar Bonto Tangnga | B | Bonto Tangga |
| 4 | Pasar Basokeng | C | Dwitiro |
| 5 | Pasar Tamalanrea | B | Tamalanrea |

*Sumber: Dinas Perdagangan ,Perindustrian koperasi dan UMKM Kabupaten Bulukumba, 2023*

**G. Urusan Perindustrian**

**1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**

Perkembangan kinerja sektor perindustrian dapat diukur melalui indikator cakupan bina kelompok pengrajin. Perkembangan produktivitas sektor industri di Kabupaten Bulukumba dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2017 sapai 2018cakupan bina kelompok pengrajin sebanyak 0 persen dimana tidak ada kelompok yang menerima bantuan, namun pada tahun 2019 sampai dengan 2020 penerima bantuan kelompok sebanyak 2 kelompok dengan persentase 0,14 persen dabn ditahun 2021 sebsar 0,10 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-230**
**Produktivitas Sektor Industri di Kabupaten Bulukumba, 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cakupan bina kelompok pengrajin | % | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,17 |

*Sumber: Dinas Perdagangan ,Perindustrian koperasi dan UMKM Kabupaten Bulukumba, 2023*

**2.1.3.4 Fokus Penunjang Urusan**

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah diantaranya yaitu perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatih; dan pengawasan.

**A. Urusan Perencanaan**

**1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA**

Keberhasilan pelayanan pada urusan perencanaan dapat dilihat pada indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah memiliki dokumen RPJPD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba 2005-2025.

**Tabel II-231**
**Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada/ Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

*Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2023*

**2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA**

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 dan pada periode tahun 2021 – 2026 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.

**Tabel II-232**
**Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kabupaten BulukumbaTahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada/ Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

*Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2023*

Dengan berbedanya tahun perencanaan di Kabupaten Bulukumba dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dinamika pembangunan yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi terhadap penyusunan dokumen perencanaan Jangka Menengah Daerah, namun dengan meningkatkan sistem yang berbasis pada teknologi informasi sehinggah dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas dokumen RPJMD Kabupaten Bulukumba.

**3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA**

Pemerintah Kabupaten Bulukumba setiap tahunnya menyusun dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA. Namun karna Adanya perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian/ Lembaga terkait penyusunan dokumen perencanaan dan juga kebijakan perencanaan pada tingkat global/nasional (pembangunan berkelanjutan) sehingga memerlukan penyesuaian untuk dokumen perencanaan ditingkat daerah, serta dengan adanya perbedaan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah dinilai cukup mempengaruhi pencapaiantarget ini. Namun dengan adanya teknologi informasi yang dikembangkan sehingga dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba dapat konsisten, koheren, transparan, efektif dan efisien.

**Tabel II-233**
**Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada/ Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

*Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2023*

**4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA**

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menetapkan peraturan daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Bulukumba Tahun 2012-2032 dan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan.

**Tabel II-234**
**Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

*Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2023*

**5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**

Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah jumlah program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Dari tahun 2018-2022, konsistensi jumlah program RPJMD dan jumlah program RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-235**
**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | | 117,31 | 114,62 | 105,38 | 120,38 | 100 |

*Sumber: Bappelitbngda Kabupaten Bulukumba, 2023*

**6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD**

Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD adalah jumlah program RKPD tahunan dibagi jumlah program RPJMD yang harus dilakukan pada tahun berkenaan. Dari tahun 2018-2022, jumlah program RKPD dan jumlah program APBD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-236**
**Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 |

*Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2023*

**7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW**

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW di Kabupaten Bulukumba telah menyesuaikan dengan dokumen perencanaan RPJPD,RPJMD dan RKPD.

**Tabel II-237**
**Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2023*

**B. Urusan Keuangan**

**1. Opini BPK terhadap laporan keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemerika Keuangan, Pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba terdiri dari Neraca per 31 desember, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas untuk tahun berakhir dan catatan atas laporan keuangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian yang wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan pengendalian intern yang memadai atas Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pada kondisi awal tahun 2017 yang bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan sehingga BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan opini. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keungan tersebut BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 sampai dengan 2021 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal material , posisi laporan keuangan pemerintah daerah Per 31 desember berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, arus kas, perubahan ekuitas sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan. Penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah pada akhir periode tahun 2021 dan 2022 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**Tabel II-238**

**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Opini BPK terhadap laporan keuangan | Opini | WTP | WTP | WDP | WTP | WTP |

*Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba, 2023*

**2. Persentase SILPA terhadap APBD**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran, sedangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) menyebutkan bahwa SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD Munculnya SILPA terjadi karena serapan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih minim, sehingga terdapat realisasi pendapatan yang lebih dari yang dianggarkan. Selain itu, terjadinya SILPA juga karena adanya kegiatan atau program pemerintah daerah yang belum terselesaikan serta adanya pembatalan proyek yang hendak dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.

**Tabel II-239**

**Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase SILPA terhadap APBD | % | 1,32 | 1,86 | 3,83 | 4,23 | 6,77 |

*Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba, 2023*

**3. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana**

Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2018-2022 Persentase program/kegiatan yang masuk dalam APBD terlaksana 100 persen.

**Tabel II-240**
**Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba, 2023*

**4. Persentase belanja pendidikan (20%)**

Berdasarkan amanat Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 49 ayat 1 mengatur dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal dialokasikan sebesar 20% dari APBD dan APBN.

**Tabel II-241**
**Persentase belanja pendidikan (20%) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase belanja pendidikan (20%) | % | 32,69 | 30,54 | 32,00 | 21,10 | 18,44 |

*Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba, 2023*

**5. Persentase belanja kesehatan (10%)**

Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa besaran anggaran pemerintah Daerah dialokasikan minimal 10% dari total anggaran APBD diluar gaji.

**Tabel II-242**
**Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase belanja kesehatan (10%) | % | 17,59 | 19,31 | 18,84 | 22,10 | 18,44 |

*Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba, 2023*

**6. Penetapan APBD (tepat waktu/tidak)**

Otonomi daerah sebagai bentuk pelimpahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda), mengakibatkan pemda memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Salah satunya adalah pemda diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan keuangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. 3 Tahun 2004). Pengertian mengenai keuangan daerah telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. 3 Tahun 2006) sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,

transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai Tulisan Hukum – UJDIH BPK RI Perwakilan Riau 2 suatu rencana keuangan tahunan pemda. APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

Secara garis besar, penyusunan APBD terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
3. Penyiapan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD);
4. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD;
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranper KDH) mengenai Penjabaran APBD;
6. Evaluasi serta penetapan Ranperda APBD dan Ranper KDH mengenai Penjabaran APBD.

Adapun APBD yang telah di Perdakan pada tahun 2018-2022 dapat dilihat sebagao berikut:

- Perda APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 27 Desember 2018
- Perda APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Nomor 9 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019
- Perda APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Nomor 9 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020
- Perda APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Nomor 9 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2021
- Perda APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Nomor 9 Tahun 2020 Tanggal 31 Desember 2022

**Tabel II-243**

**Penetapan APBD (tepat waktu/tidak)Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Penetapan APBD (tepat waktu/tidak) | | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |

*Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba, 2023*

**7. Bagi hasil kabupaten/kota dan Desa**

Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 bahwa pemerintah kabupaten mengalokasikan 10% dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

**Tabel II-244**

**Bagi hasil kabupaten/kota dan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Bagi hasil kabupaten/kota dan Desa | | 0,11 | 0,32 | 0,23 | 0,22 | 0,54 |

*Sumber: BPKPD Kabupaten Bulukumba, 2023*

**8. Persentase PAD terhadap Pendapatan**

Persentase PAD terhadap pendapatan adalah kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah. Keberhasilan dalam menjalankan perekonomian disuatu daerah tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Salah satu unsur dari Pendapatan Daerah adalah pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantugan daerah kepada pusat. Dengan Kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah Daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah.

Berdasarkan persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2018 mengalami penurunan yang hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 9.65 persen dikarenakan turunnya penerimaan BLUD, adanya salah satu potensi pajak yakni pajak Galian C yang tidak dapat dipungut lagi di Daerah, penerimaan Pajak bumi dan bangunan yang mengalami penurunan karena adanya beberapa obyek pajak yang dobel dan tidak diketahui keberadaannya serta retribusi pelayanan parkir karena tidak dipungutnya parkir pada pasar-pasar kecamatan. Periode 2018-2019 kembali mengalami kenaikan yang dapat memberikan kontribusi sebesar 11.63%. Pada Tahun ini semua kelompok pajak,retribusi dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami peningkatan penerimaan dari tahun pada tahun 2018. Ini disebabkan karena telah digunakannya alat transaksi pajak ( M-Pos ) pada beberapa hotel, restoran dan rumah makan walaupun tidak semua pelaku usaha dapat dipasangi. Sektor parawisata juga mengalami kenaikan retribusi tempat rekreasi karena meningkatnya kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri. Pada tahun 2019-2020 kembali mengalami Penurunan yang hanya memberikan kontribusi sebesar 11.39 persen. Ini karena adanya pandemi *Covid-19* yany terjadi pada maret 2020-2021. Tahun 2020-2022 penerimaan pajak mengalami penurunan karena adanya aturan pemerintah pembatasan skala besar dimana semua orang dilarang bepergian dan berkerumum yang berdampak pada penutupan beberapa tempat rekreasi yang mengakibatkan menurunnya tingkat hunian hotel dyang berdampak pula pada penerimaan para pengusaha restoran dan rumah makan sehingga tidak mampu membayar pajak sesuai yang ditetapkan. Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Daerah. Karena PAD merupakan sumber keuangan terbesar bagi Daerah, maka Pemerintah Daerah harus mampu mengembangkan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan PAD

**Tabel II-245**

**Persentase PAD terhadap PendapatanKabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase PAD terhadap Pendapatan | % | 9,65 | 11,63 | 11,39 | 11,19 | 11,95 |

*Sumber: Bapenda Kabupaten Bulukumba, 2022*

**C. Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**

Keberhasilan kinerja pelayanan pada urusan kepegawaian serta diklat dapat dilihat pada indikator yaitu persentase peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur dan persentase jabatan struktural yang terisi berserta indikator pendukung lainnya. Berikut adalah perkembangan indikator urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

**1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan**

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018-2022 rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama kurang lebih dari tiga bulan dan pemenuhan 20 jam pelajaran yang diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 70 yang ditindak lanjuti dalam PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS atas hak PNS pada Pasal 203 ayat A tentang Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 Jam pelajaran dalam 1 tahun. Pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan pejabat struktural (PKA,PKP,PKN) dan Juga pelatihan Dasar CPNS/Pelatihan Prajabatan CPNS yang dianggarkan oleh BKPSDM/difasilitasi oleh BKPSDM Kab Bulukumba. Pelatihan Fungsional yang berhubungan dengan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan tidak menjadi bagian dari kegiatan BKPSDM. Pada tahun 2018 – 2022 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan sebanyak 3 bulan.

**Tabel II-246**
**Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan | Bulan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

*Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2023*

**2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal**

ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2022 mencapai 74,53 persen dari Jumlah total ASN yang ada pada Kabupaten Bulukumba.

**Tabel II-247**
**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 38,71 | 100 | 96,77 | 74,19 | 74,53 |

*Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2023*

**3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural**

Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural pada tahun 2022 mencapai 37,73 jumlah total jabatan.

**Tabel II-248**
**Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | % | 50,59 | 55,81 | 47,06 | 14,71 | 37,73 |

*Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2023*

**4. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah**

Jumlah jabatan pimpinan tinggi lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2021 sebanyak 40 jabatan yang terdiri atas sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten, 3 (tiga) Staf Ahli Bupati Sekretaris DPRD, Inspektur Kabupaten, Kasatpol PP dan Damkar, 6 (enam) Kepala Badan, dan 24 (Dua Puluh Empat) Kepala Dinas namun pada tahun 2022 berubah menjadi 32 Jabatan dikarenakan terjadi perubahan kelembangan yang telah diatur pada Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pengangkatan jabatan pimpinan tinggi tersebut dilakukan melalui proses seleksi terbuka. Dalam Pelaksanaan seleksi Jabatan Tinggi Pratama yang dilakukan belum memenuhi empat elemen sistem MERIT yang terdiri dari Transparansi, Netralitas, Kemampuan Individu dan non Diskriminasi dengan menyeluruh. Namun dalam aspek transparansi terdapat salah satu alat ukur yang sudah terpenuhi oleh seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilakukan disetiap Instansi yaitu menerbitkan Informasi tentang seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dan dalam aspek non diskriminasi terdapat alat ukur yang sudah terpenuhi dalam seleksi jabatan tinggi pratama yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama dan kemampuan individu melalui tes cat dan wawancara oleh panitia seleksi.

**Tabel II-249**
**Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | Jabatan | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 |

*Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2023*

**5. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah**

Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 sebanyak 538 jabatan, penurunan ini terjadi dikarenakan Jabatan administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) telah resmi dialihkan ke jabatan fungsional.

**Tabel II-250**
**Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | Jabatan | 2.613 | 2.425 | 2.297 | 2.093 | 538 |

*Sumber : BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2021*

## D. Urusan Pengawasan

### 1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Indikator kinerja pertama untuk bidang urusan pengawasan adalah persentase tindak lanjut temuan. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan dan dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2021 tinjak lanjut temuan mulai berkurang sebesar 56,60 persen dari tahun sebelumnya.

Rendahnya penyelesaian tindak lanjut antara lain disebabkan oleh komitmen dan penerapan tata kelola tindak lanjut yang rendah. OPD sebagai auditan banyak yang tidak menjadikan tindak lanjut sebagai prioritas. Selain itu mekanisme *reward and punishment* terhadap OPD yang cepat dan yang lambat menindaklanjuti temuan belum dilakukan. Secara umum persentase tindak lanjut temuan sebagaimana Tabel berikut ini:

**Tabel II-251**
**Persentase tindak lanjut temuan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase tindak lanjut temuan | % | 61.9 | 54.2 | 59.5 | 56,60 | 68,4 |

*Sumber: Inspektorat Daerah, Kabupaten Bulukumba, 2023*

**2. Persentase Pelanggaran Pegawai**

Indikator ini dihitung dengan cara jumlah ASN yang dikenai sanksi dibagi jumlah total ASN dan dikalikan dengan 100%. Dalam rentang waktu lima tahun sejak tahun 2018 – 2022, jumlah ASN yang dikenai sanksi mengalami fluktuasi diana pada tahun 2017 ampai 2019 mengalami peningktan sebesar 0,106 menjadi 3,15 persen dan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penuruna sebesar 0,273 hingg 0,13

**Tabel II-252**

**Persentase pelanggaran Pegawai Kabupaten Bulukumba 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase pelanggaran Pegawai | % | 0.26 | 0.315 | 0.273 | 0,13 | 0,246 |

*Sumber: Inspektorat Daerah, Kabupaten Bulukumba, 2023*

**3. Jumlah Temuan BPK**

Pada 2017 hingga pada Tahun 2020 terus mengalami penurunan. Di Tahun 2021 ada 14 temuan terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan. Trend penurunan jumlah temuan BPK ini tentu saja suatu hal yang harus terus dipertahankan melalui sinergitas yang terjaga dengan seluruh OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Adapun trend penurunan jumlah temuan BPK sebagaimana tergambar pada Tabel berikut:

**Tabel II-253**

**Jumlah temuan BPK Kabupaten Bulukumba 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah temuan BPK | Temuan | 17 | 10 | 9 | 14 | 7 |

*Sumber: Inspektorat Daerah, Kabupaten Bulukumba, 2023*

**E. Urusan Penelitian dan Pengembangan**

**1. Persentase implementasi rencana Kelitbangan**

Capaian indikator urusan Penelitian dan Pengembangan dapat diketahui dari beberapa indikator. Untuk Indikator Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan pada tahun 2018 jumlah kajian yang direncanakan mencapai 58.33% (Dari 24 kajian yang direncanakan terealisasi 14 kajian), pada tahun 2019, jumlah kajian yang direncanakan mencapai 48.28% (Dari 29 kajian yang direncanakan terealisasi 14 kajian), dan pada tahun 2020, jumlah kajian yang direncanakan mencapai 6.06% (Dari 33 kajian yang direncanakan terealisasi 2 kajian) dan pada tahun 2021 jumlah kajian mencapai sebesar 85,71 persen dan pada tahun 2022 dari 5 kajian yang direncanakan terealisasi 3 kajian.

Berdasarkan realisasi jumlah kajian setiap tahun dari tahun 2017-2017 berfluktuasi tergantung besarnya pagu anggaran. Data indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II-254**

**Persentase implementasi rencana Kelitbangan Kabupaten Bulukumba 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase implementasi rencana Kelitbangan | % | 58,33 | 48,28 | 6,06 | 85,71 | 60,00 |

*Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2023*

**2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**

Pada tahun 2018, jumlah kajian yang dimanfaatkan mencapai 16.67% (Dari 24 kajian

yang rencana akan dimanfaatkan terealisasi hanya 4 kajian). Karena anggaran pada tahun tersebut kurang memadai dan masih kurang dimanfaatkan sehingga hanya terealisasi 4 kajian, pada tahun 2019, jumlah kajian yang dimanfaatkan mencapai 24.14% (Dari 29 kajian yang rencana akan dimanfaatkan terealisasi hanya 7 kajian). Karena anggaran pada tahun tersebut kurang memadai dan masih kurang dimanfaatkan sehingga hanya terealisasi 7 kajian sedangkan pada tahun 2020, jumlah kajian yang dimanfaatkan mencapai 12.12% (Dari 33 kajian yang rencana akan dimanfaatkan terealisasi hanya 4 kajian) dan pada tahun 2021 dan 2022 jumlah kajian yang dimanfaatkan mecapai sebesar 100 persen. Data indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II-255**

**Persentase pemanfaatan hasil KelitbanganKabupaten Bulukumba 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan | | 16.67 | 24.14 | 12.12 | 100 | 100 |

*Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2023*

**3. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Derah**

Pada tahun 2018, jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebanyak 42.85% (Dari 14 SKPD yang rencananya akan difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, hanya 6 SKPD terealisasi), pada tahun 2019, jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebanyak 62.5% (Dari 16 SKPD yang rencananya akan difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, hanya 10 SKPD terealisasi) sedangkan pada tahun 2020, jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebanyak 11.11% (Dari 18 SKPD yang rencananya akan difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, hanya 2 SKPD terealisasi). Dan ditahun 2021 jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebesar 70,00 persen dan pada tahun 2022 perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah mencapai 100 persen. Data indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II-256**

**Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Kabupaten Bulukumba 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | | 42.85 | 62.5 | 11.11 | 70.00 | 100 |

*Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2023*

**4. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah:**

Pada tahun 2018, jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah mencapai 66.67% (Dari target 30 kebijakan yang rencana diterapkan, hanya 20 kajian yang terealisasi), pada tahun 2019, jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah mencapai 83.33% (Dari target 30 kebijakan yang rencana diterapkan, hanya 25 kajian yang terealisasi) sedangkan pada tahun 2020, jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah mencapai 33.33% (Dari target 30 kebijakan yang rencana diterapkan, hanya 10 kajian yang terealisasi) dan pada tahun 2021 julah kajian inovasi yang diterapkan di daerah mencapai 33,33 persen dan pada tahun 2022 Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah sudah mencapai 100 persen. Data indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel II-257**
**Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah**
**Kabupaten Bulukumba 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | | 66.67 | 83.33 | 33.33 | 33,33 | 100 |

*Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, 2023*

## F. Sekretariat Dewan

Berikut ini adalah perkembangan indikator Sekretariat Dewan pada unsur penunjang atau pendukung daerah di Kabupaten Bulukumba.

1. **Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten**

Rencana kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD untuk tahun 2017 sampai 2021 oleh sekretariat DPRD secara administrasi tidak di disusun dalam bentuk surat keputusan nanti setelah 2018 sejak berlakunya PP 12 tahun 2018 sekretariat DPRD mulai menyusun rencana kerja alat kelengkapan DPRD dalam bentuk surat keputusan. Untuk capaian 2018-2022 sudah tersedia/ada Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD.

**Tabel II-258**
**Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD**
**Kabupaten Kabupaten Bulukumba 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

*Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, 2023*

2. **Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)**

Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang No 12 tahun 2009 tentang pemerintahan daerah, juga undang-undang No 27 tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD dan Peraturan Pemerintahan No 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tiga fungsi yaitu :

1) Fungsi Legislasi
2) Fungsi Anggaran
3) Fungsi Pengawasan

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut maka DPRD memiliki sekretariat DPRD, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 32 tahun 2004 dan dipertegas dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, bahwa sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi DPRD. Yang meliputi penyelenggaraan administrasi sekretariat DPRD, penyelenggaran administrasi keuangan DPRD mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD.

**Tabel II-259**
**Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

*Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, 2023*

3. **Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD**

Berdasarkan kedudukan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam menunjang tugas-tugas DPRD, Maka Sekretariat DPRD menyusun indikator kinerja yang menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil yang dihubungkan dengan Visi yang di emban, Penetapan indikator kinerja bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi & Misi Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah.

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD menetapkan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tabel sebagai berikut :

**Tabel II-260**
**Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Bulukumba 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

*Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, 2023*

## G. Sekretariat Daerah

Dari sisi agama, mayoritas penduduk Bulukumba beragama Islam. Menurut catatan Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 terdapat 270 protestan, 232 katolik, 9 Hindu dan 52 penganut budha di Bulukumba. Jumlah tempat peribadatan yaitu total 977 Masjid, 133 Mushola , dan 1 gereja.

**Tabel II-261**
**Rasio tempat ibadah persatuan penduduk Kabupaten Bulukumba 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja) | Unit | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.280 | 1.154 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Penduduk | Jiwa | 418.326 | 420.603 | 437.607 | 440.090 | 443.292 |
| **Rasio tempat ibadah persatuan penduduk** | | **2,67** | **2,66** | **2,55** | **2,91** | **2,60** |

*Sumber: Sekretariat Daerah, Kemenang, BPS Kabupaten Bulukumba, 2023*

### 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur. Fokus Iklim Berinvestasi dan Fokus Sumber Daya Manusia.

**A. Kemampuan Ekonomi Daerah**

1) **Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terus mengalami tren fluktuasi di Kabupaten Bulukumba pada 2018-2022, pada tahun 2018 mencapai rata-rata 619.271 Rupiah/Bulan dan pada tahun 2022 meningkat menjadi rata-rata 980.966 Rupiah/Bulan. sebagaimana grafik dibawah ini.

**Grafik II-25**
**Rata-rata Nilai Konsumsi/Pengeluaran Per Rumah Tangga**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

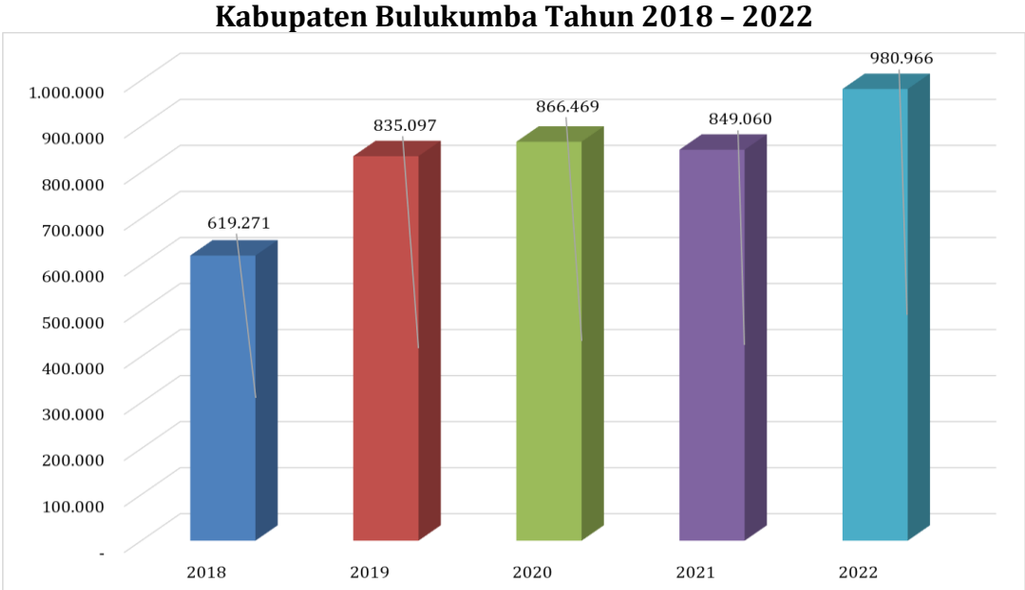


*Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023*

2) **Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita**

Konsumsi non pangan Bulukumba Rata-rata Pengeluaran per Kapita menurut kelompok makanan sebesar 521.478 rupiah dan non makanan sebesar 459.488 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pangan semakin menjadi bukan konsumsi utama masyarakat sebagaimana gambar dibawah ini

**Grafik II-26**
**Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita**
**Kabupaten Bulukumba 2018 – 2022**

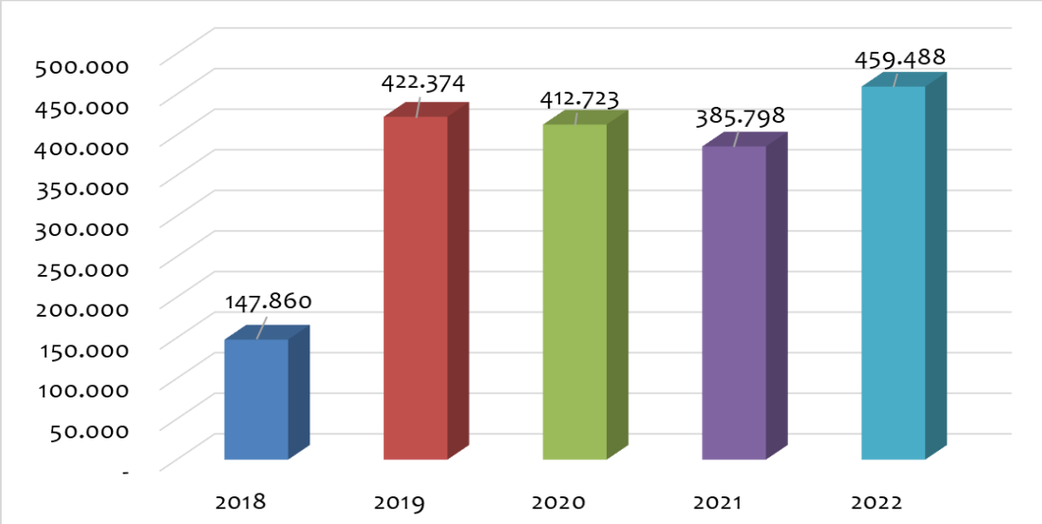


*Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023*

3) **Nilai Tukar Petani**

Nilai tukar petani merupakan indikator ukuran tingkat kesejahteraan petani. Nilai tukar petani menggambarkan kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan produksi dan kebutuhan hidup dari nilai produksi yang diperoleh. Nilai tukar petani dapat diukur pada setiap subsektor petanian. Nilai Tukar Petani menunjukkan tingkat pendapatan petani dibandingkan apa yang mereka keluarkan untuk melakukan usaha tani. Angka 100 merupakan tingkat impas antara pendapatan dan pengeluaran.

Sementara itu, untuk Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan fluktuatif, pada tahun 2021 tingkat kemampuan/daya beli petani menurun menjadi 98,55 persen diakibatkan oleh pandemi *Covid-19* dikarenakan terjadinya pembatasan transaksi berskala besar namun pada tahun 2022 meningkat kembali atau sudah berada di atas 100 yang menandakan bahwa yang diterima oleh petani lebih besar jika dibandingkan dengan yang dibayarkan.

**Tabel II-262**
**Nilai Tukar Petani Tahun 2018-2022**

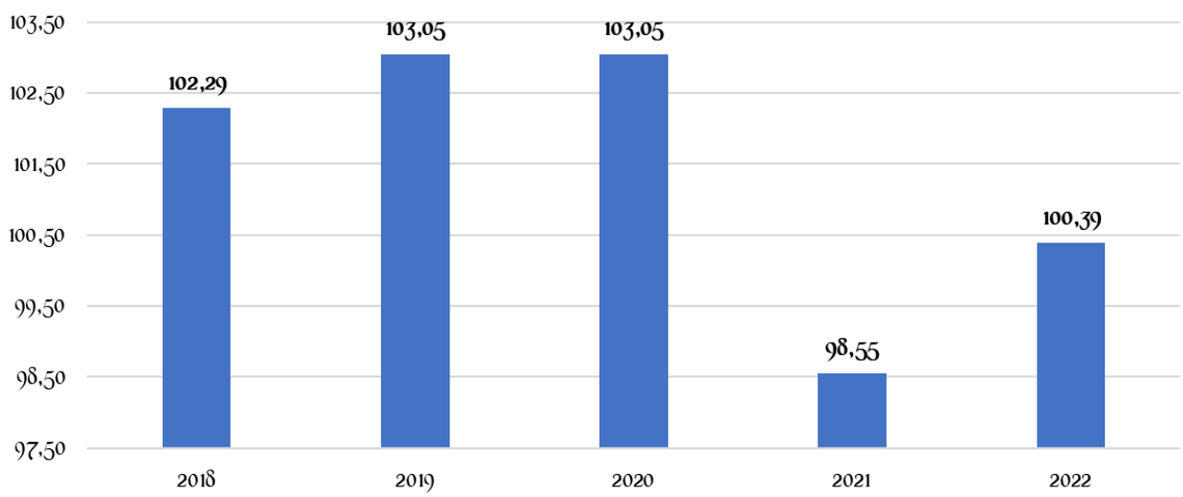


*Sumber Data : Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan 4 2019-2022*

## B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Ketaatan Terhadap RTRW

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bulukumba menargetkan sebanyak 65% ruang dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan tata ruang. dan realisasinya sudah sesuai dengan target. Realisasi ini masih belum optimal menunjukkan adanya pencapaian pada tahun 2019 karena realisasi pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang

masih sebesar 80%. Artinya hingga tahun 2019 baru 80% ruang yang sesuai RTRW dan di tahun 2021 sebesr 81 % dan pada tahun 2022 menjadi

**Tabel II-263**
**Kesesuaian Pemanfataan Ruang Sesuai RTRW**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukan Tata Ruang | | 65 | 70 | 80 | 81 | 100 |

*Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba, 2023*

## C. Fokus Iklim Berinvestasi

### 1) Kriminalitas

Secara umum, fungsi Jumlah Tindak Pidana ini adalah untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, informasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kejahatan dan fenomena perkelahian massal yang terjadi di wilayah Indonesia. Berikut ini adalah Angka Kriminalitas Tertangani dengan membangingkan jumlah penduduk dengan Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun di Kabupaten Bulukumba dari kurun waktu. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini

**Grafik II-27**
**Angka Kriminalitas yang tertangani**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

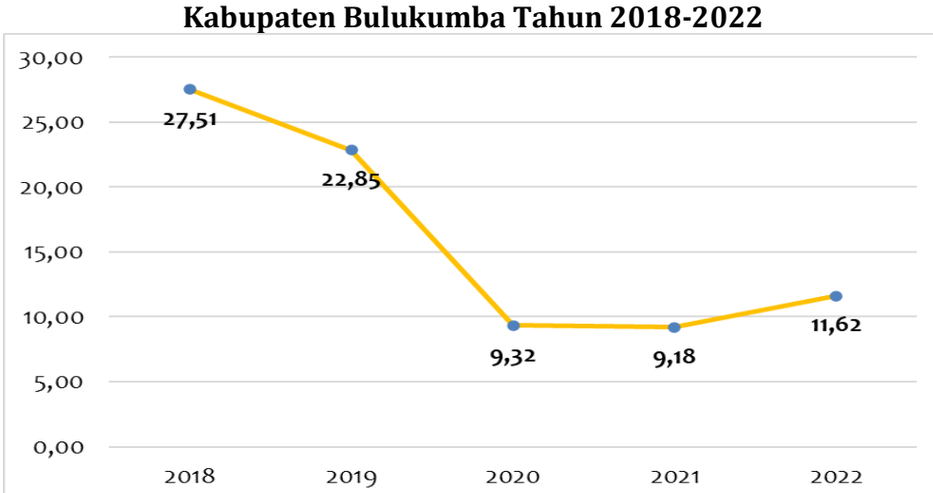


*Sumber: Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023*

## D. Fokus Sumberdaya Manusia

### 1) Rasio Ketergantungan

Semakin tingginya persentase *dependency ratio*/ rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Angka rasio ketergantungan di Bulukumba mengalami peningkatan pada tahun 2018 namun turun pada tahun 2022 menjadi 41,75. Dari Rasio Ketergantungan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 sebesar 41,75 artinya setiap 100 orang yang produktif (berusia kerja) mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang (yang belum produktif dan atau tidak produktif lagi).

**Grafik II-28**
**Rasio ketergantungan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

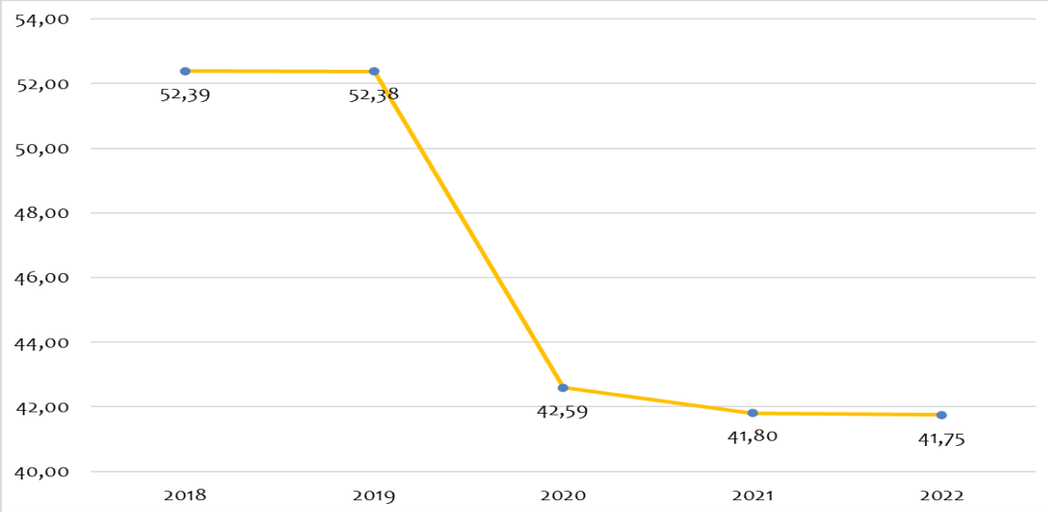


*Sumber: Sumber: Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023, diolah*

### 2.1.5 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemeritah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Pengolahan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis data mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, dan informasi terkait dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Untuk mengetahui capaia nindikator kinerja dari setiap aspek/fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja. Sebagai gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah tahun 2022 capaian Indikator Kinerja Daerah sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dijabarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel II-264**
**Hasil Analis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022**

| | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Target 2022 | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **INDIKATOR KIERJA KUNCI (IKK)** | | | | |
| **1** | | | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | |
| **1** | | | **Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi** | | | | |
| 1 | 1 | 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 3,81 | 3,85 | < |
| 1 | 1 | 2 | PDRB ADHK | Rp, Miliar | 9.357,11 | 8.944,66 | > |
| 1 | 1 | 3 | Laju inflasi | % | 4,12 | 2,62 | < |
| 1 | 1 | 4 | PDRB Perkapita ADHB | Rp, Juta | 38,88 | 39,15 | < |
| 1 | 1 | 5 | Gini Ratio | % | 0,361 | 0,367 | > |
| 1 | 1 | 6 | Persentase Penduduk miskin | % | 7,39 | 6,61 | < |
| **1** | | | **Kesejahteraan sosial** | | | | |
| 1 | 2 | 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 70,34 | 70,11 | > |
| 1 | 2 | 2 | Angka Usia Harapan Hidup | angka | 68,51 | 68,82 | < |
| 1 | 2 | 3 | Angka Harapan Lama Sekolah | angka | 13,42 | 13,84 | > |
| 1 | 2 | 4 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | angka | 8,01 | 7,84 | > |
| 1 | 2 | 5 | Pengeluaran Per Kapita Riil | Juta Rupiah | 10,94 | 10,61 | > |
| 1 | 2 | 6 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | % | 65,27 | 70,16 | > |
| 1 | 2 | 7 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 1,26 | 3,47 | > |

| | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Target 2022 | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | Persentase Balita Gizi Buruk | % | 0,03 | 0,03 | = |
| **1** | | | **Seni Budaya Dan Olahraga** | | | | |
| 1 | 3 | 1 | Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya | kali | 1 | 5 | < |
| 1 | 3 | 2 | Cakupan Pembinaan Olahraga | % | 85,71 | 3,13 | < |
| **2** | | | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | |
| **2** | | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | |
| **2** | **1** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan** | | | | |
| 2 | 1 | 1 | **Angka Partisipasi Kasar (APK)** | | | | |
| | | | *SD* | % | 113,27 | 114,15 | < |
| | | | *SMP* | % | 86,46 | 94,86 | < |
| 2 | 1 | 2 | **Angka Partisipasi Murni (APM)** | | | | |
| | | | *SD* | % | 99,55 | 98,67 | > |
| | | | *SMP* | % | 83,05 | 84,47 | < |
| 2 | 1 | 3 | **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** | | | | |
| | | | *7-12 Tahun* | % | 99,55 | 98,87 | > |
| | | | *14-15 Tahun* | % | 92,72 | 92,27 | > |
| | | | *16-18 Tahun* | % | 74,39 | 75,58 | < |
| 2 | 1 | 4 | **Angka Putus Sekolah** | | | | |
| | | | *SD* | % | 0,57 | 0,00 | < |
| | | | *SMP* | % | 0,15 | 0,00 | < |
| 2 | 1 | 5 | **Angka Kelulusan** | | | | |
| | | | *SD* | % | 99,55 | 100 | < |
| | | | *SMP* | % | 92,72 | 100 | < |
| 2 | 1 | 6 | Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV | % | 98,68 | 100 | < |
| 2 | 1 | 7 | Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar | rasio | 85,15 | 1:9 | > |
| 2 | 1 | 8 | Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah | rasio | 1:13 | 1:8 | = |
| 2 | 1 | 9 | Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas | % | 1:9 | 91,57 | < |
| **2** | **2** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan** | | | | |
| 2 | 2 | 1 | Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup | | 5,24 | 5,24 | = |
| 2 | 2 | 2 | Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup | | 9,99 | 9,99 | = |
| 2 | 2 | 3 | Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup | | 0 | 0,00 | = |
| 2 | 2 | 4 | Angka Kematian Ibu | | 137,99 | 52,32 | > |
| 2 | 2 | 5 | Rasio Posyandu Per Satuan Balita | | 22,65 | 27,14 | < |
| 2 | 2 | 6 | Rasio Puskesmas Dan Pustu | | 0,17 | 0,19 | < |
| 2 | 2 | 7 | Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk | | 0,004 | 0,002 | = |
| 2 | 2 | 8 | Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk | | 0,04 | 0,04 | = |
| 2 | 2 | 9 | Rasio Dokter Per Satuan Penduduk | | 0,25 | 0,094 | > |
| 2 | 2 | 10 | Rasio Tenaga Medis/Penduduk | | 0,33 | 0,234 | > |
| 2 | 2 | 11 | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | % | 90,44 | 85,45 | > |
| 2 | 2 | 12 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | % | 100 | 100 | = |
| 2 | 2 | 13 | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan | % | 100 | 100 | = |
| 2 | 2 | 14 | Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta | % | 64 | 44,2 | > |
| 2 | 2 | 15 | Tingkat Prevalensi Tuberkolosis | *Per 1000 Penduduk* | 165,31 | 101,325 | > |

| | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Target 2022 | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 16 | Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis | *Per 1000 Penduduk* | 8,41 | 3,23 | > |
| 2 | 2 | 17 | Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD | % | 100 | 100 | = |
| 2 | 2 | 18 | Angka Kejadian Malaria | *Per 1000 Penduduk* | 4,96 | 1,46 | > |
| 2 | 2 | 19 | Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi | % | 13,79 | 0,009 | > |
| 2 | 2 | 20 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | % | 8,27 | 8,27 | = |
| 2 | 2 | 21 | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 | % | 70,21 | 73,55 | < |
| 2 | 2 | 22 | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin | % | 52,65 | 52,65 | = |
| 2 | 2 | 23 | Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin | % | 85,68 | 85,68 | = |
| **2** | **3** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang** | | | | |
| 2 | 3 | 1 | Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik | % | 0,890 | 0,639 | > |
| 2 | 3 | 2 | Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk | | 0,0030 | 0,0032 | = |
| 2 | 3 | 3 | Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air | % | 98,97 | 98,93 | > |
| 2 | 3 | 4 | Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik | % | 81,16 | 80,79 | > |
| 2 | 3 | 5 | Rasio Jaringan Irigasi | | 0,49 | 0,21 | > |
| **2** | **4** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman** | | | | |
| 2 | 4 | 1 | Rasio Rumah Layak Huni | | 0,434 | 0,248 | > |
| 2 | 4 | 2 | Persentase Pemukiman Yang Tertata | % | 58,83 | 71,57 | < |
| 2 | 4 | 3 | Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh | % | 9,41 | 11,61 | < |
| 2 | 4 | 4 | Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau | % | 92,54 | 93,76 | < |
| 2 | 4 | 5 | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi | % | 64,60 | 83,34 | < |
| 2 | 4 | 6 | Persentase Penduduk Berakses Air Minum | % | 85,48 | 84,89 | > |
| 2 | 4 | 7 | Persentase Areal Kawasan Kumuh | % | 12,02 | 0,00 | > |
| 2 | 4 | 8 | Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan | | 0,42 | 8,67 | < |
| **2** | **5** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** | | | | |
| 6 | 5 | 1 | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | % | 0,30 | 0,31 | < |
| 2 | 5 | 2 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | | 100 | 100 | = |
| 2 | 5 | 3 | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota | % | 0,00271 | 0,00303 | = |
| 2 | 5 | 4 | Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | | 100 | 100 | = |
| 2 | 5 | 5 | Persentase Penegakan Perda | % | 100 | 100 | = |
| **2** | **6** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Sosial** | | | | |

| | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Target 2022 | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 1 | Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi | unit | | 13 | < |
| 2 | 6 | 2 | Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani | % | 100 | 100 | = |
| 2 | 6 | 3 | Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial | % | 100,00 | 98,42 | > |
| 2 | 6 | 4 | Persentase PMKS Yang Tertangani | % | 57,53 | 70,80 | < |
| 2 | 6 | 5 | Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat | % | 100,00 | 91,66 | > |
| 2 | 6 | 6 | Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial | % | 97,23 | 82,73 | > |
| **2** | | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | |
| **2** | **1** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja** | | | | |
| 2 | 1 | 1 | Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun | % | 23,26 | 0,00 | > |
| 2 | 1 | 2 | Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) | % | 100,0 | 0,15 | > |
| 2 | 1 | 3 | Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek | % | 97,30 | 2,76 | > |
| 2 | 1 | 4 | Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan | % | 66,47 | 1,94 | > |
| 2 | 1 | 5 | Besaran Pemeriksaan Perusahaan | % | 0,24 | 0,24 | = |
| 2 | 1 | 6 | Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan | % | 0,06 | 0,06 | = |
| 2 | 1 | 7 | Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | % | 91,43 | 0,75 | > |
| 2 | 1 | 8 | Rasio Lulusan S1/S2/S3 | Per 10,000 | 741,80 | 741,80 | = |
| 2 | 1 | 9 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | | 43,21 | 78,34 | < |
| 2 | 1 | 10 | Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan | | 100 | 1,01 | > |
| 2 | 1 | 11 | Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat | | 0,47 | 0,47 | = |
| **2** | **2** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak** | | | | |
| 2 | 2 | 1 | Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah | % | 4,40 | 4,4 | > |
| 2 | 2 | 2 | Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD | % | 17,50 | 24,00 | < |
| 2 | 2 | 3 | Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta | % | 96,00 | 83,62 | > |
| 2 | 2 | 4 | Rasio KDRT | | 0,034 | 0,002 | > |
| 2 | 2 | 5 | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | % | 96,00 | | |
| 2 | 2 | 6 | Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu | % | 100,00 | 100 | = |
| 2 | 2 | 7 | Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas | % | 8,06 | 77,2511 | < |

| | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Target 2022 | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit | | | | |
| 2 | 2 | 8 | Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak | % | 100,00 | 100 | = |
| **2** | **3** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Pangan** | | | | |
| 2 | 3 | 1 | Ketersediaan Pangan Utama | | 100 | 444,01 | < |
| 2 | 3 | 2 | Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari) | | 17.766,98 | 9.844,21 | > |
| 2 | 3 | 3 | Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari) | | 919,76 | 231,77 | > |
| 2 | 3 | 4 | Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) | | 90 | 78,39 | > |
| **2** | **4** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan** | | | | |
| 2 | 4 | 1 | Persentase Luas Lahan Bersetifikat | % | 25,74 | 26,67 | < |
| 2 | 4 | 2 | Penyelesaian Kasus Tanah Negara | % | 20,00 | 68,95 | < |
| **2** | **5** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup** | | | | |
| 2 | 5 | 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 60,31 | 62,91 | < |
| 2 | 5 | 2 | Indeks Kualitas Air | Poin | 55,00 | 58,85 | < |
| 2 | 5 | 3 | Indeks Kualitas Udara | Poin | 92,13 | 84,74 | > |
| 2 | 5 | 5 | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota | % | 100 | 100 | = |
| 2 | 5 | 6 | Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA | % | 1 | 1 | = |
| 2 | 5 | 7 | Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional | Kelompok | 1 | 1 | = |
| 2 | 5 | 8 | Penetapan Hak MHA | Kelompok | 1 | 1 | = |
| 2 | 5 | 9 | Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan | Kelompok | 100 | 100 | = |
| 2 | 5 | 10 | Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana | Kelompok | 100 | 100 | = |
| 2 | 5 | 11 | Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat | Kelompok | 1 | 1 | = |
| 2 | 5 | 12 | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup | Kelompok | 0 | Ada | > |
| 2 | 5 | 13 | Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota, | sekolah | 100 | 100 | = |
| 2 | 5 | 14 | Timbulan Sampah Yang Ditangani | % | 26,03 | 27,22 | < |
| 2 | 5 | 15 | Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani | % | 73,13 | 94,88 | < |
| 2 | 5 | 16 | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota | % | 74 | 25,20 | > |
| 2 | 5 | 17 | Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri) | Ton/Kg | 35 | 38,36 | < |

| | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Target 2022 | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 18 | Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001 | Buah | 1 | 1 | < |
| 2 | 5 | 19 | Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan | % | 29,86 | 32,00 | < |
| 2 | 5 | 20 | Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan | % | 32,36 | 34,64 | < |
| 2 | 5 | 21 | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati | Dok | 0 | 0 | = |
| **2** | **6** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil** | | | | |
| 2 | 6 | 1 | Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk, | | 1,095 | 1 | > |
| 2 | 6 | 2 | Rasio bayi berakta kelahiran, | | 0,950 | 0,8 | > |
| 2 | 6 | 3 | Rasio pasangan berakta nikah, | | 1,000 | 0,5 | > |
| 2 | 6 | 4 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | | Ada | 100 | > |
| 2 | 6 | 5 | Cakupan penerbitan KTP-el | % | 109,55 | 100 | > |
| 2 | 6 | 6 | Cakupan penerbitan akte kelahiran | % | 111,06 | 80 | > |
| **2** | **7** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa** | | | | |
| 2 | 7 | 1 | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik | % | 73,39 | 100 | < |
| 2 | 7 | 2 | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan (LPM) | | 100,00 | 146 | < |
| 2 | 7 | 3 | Persentase Lsm Aktif | % | 9,09 | 100 | < |
| 2 | 7 | 4 | Persentase PKK Aktif | % | 100,00 | 100 | = |
| 2 | 7 | 5 | Persentase Posyandu Aktif | % | 100,00 | 100 | = |
| 2 | 7 | 6 | Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | 100 | < |
| 2 | 7 | 7 | Rata-rata jumlah kelompok Binaan PKK | | 100,00 | 93 | > |
| **2** | **8** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** | | | | |
| *2* | 8 | 1 | Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | *%* | 0,63 | 0,54 | > |
| *2* | 8 | 2 | Total Fertility Rate (TFR) | *%* | 2,130 | 2,44 | < |
| *2* | 8 | 3 | Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB | *%* | 81,48 | 73,59 | > |
| *2* | 8 | 4 | Persentase Perangakat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | *%* | 11,11 | 14,99 | < |
| *2* | 8 | 5 | Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tengtang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk | *%* | 1 | 1 | = |
| *2* | 8 | 6 | Jumlah Sektor Yang Menyapakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan | | 1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB | 1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB | = |

| | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Target 2022 | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 7 | Jumlah Kerja Sama Penyelengaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan, | | 1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM | 1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM | = |
| 2 | 8 | 8 | Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga | % | 20,76 | 18,19 | > |
| 2 | 8 | 9 | Ratio Akseptor Kb | % | 13,47 | 16,92 | < |
| 2 | 8 | 10 | Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 | % | 74,97 | 75,16 | < |
| 2 | 8 | 11 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) | | 23,5 | 89,79 | > |
| 2 | 8 | 12 | Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun | % | 4,76 | 4,41 | > |
| 2 | 8 | 13 | Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need) | % | 11,62 | 12,48 | < |
| 2 | 8 | 14 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | % | 20,77 | 37,32 | < |
| 2 | 8 | 15 | Persentase Tinggkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi | % | 35,77 | 46,97 | < |
| 2 | 8 | 16 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | % | 80,95 | 92,61 | < |
| 2 | 8 | 17 | Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber-Kb | % | 71,54 | 74,96 | < |
| 2 | 8 | 18 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- KB | % | 72,09 | 81,76 | < |
| 2 | 8 | 19 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan | % | 10 | 10 | = |
| 2 | 8 | 20 | Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa | % | 2,5 | 1,39 | > |
| 2 | 8 | 21 | Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksaaan Pembangunan Daerah Di Bdang Pengendalian Penduduk | % | 100 | 100 | = |
| 2 | 8 | 22 | Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri | % | 26,00 | 25,95 | > |
| 2 | 8 | 23 | Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan | % | 100 | 100 | = |
| 2 | 8 | 24 | Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat | % | 100 | 100 | = |
| 2 | 8 | 25 | Persentase Faskes Dan Jejarinya ( Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan | % | 86,91 | 38,85 | > |
| 2 | 8 | 26 | Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa | % | 100 | 100 | = |
| 2 | 8 | 27 | Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Sesual (Ims) | % | 0,000 | 0,000 | = |
| 2 | 8 | 28 | Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga | % | 100,00 | 100 | = |
| 2 | 8 | 29 | Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak | % | 83,90 | 38,38 | > |
| 2 | 8 | 30 | Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita | % | 22,00 | 22,64 | < |

| | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Target 2022 | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 31 | Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes | % | 0,01 | 0,01 | = |
| **2** | **9** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan** | | | | |
| 2 | 9 | 1 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | Unit | 3 | 3 | = |
| 2 | 9 | 2 | Jumlah arus penumpang angkutan Umum | Unit | 9.125 | 14.100 | < |
| 2 | 9 | 3 | Persentase Layanan Angkutan Darat | % | 1,15 | 1,23 | < |
| 2 | 9 | 4 | Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum | % | 98,67 | 92,40 | > |
| 2 | 9 | 5 | Pemasangan Rambu-Rambu | | 0,00 | 66,01 | < |
| 2 | 9 | 6 | Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum | Orang/Barang | 3.994.925 | 26.480 | > |
| 2 | 9 | 7 | Rasio Ijin Trayek | | 0,0005 | 0,008 | < |
| **2** | **10** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika** | | | | |
| 2 | 10 | 1 | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer | | N/A | 87 | > |
| 2 | 10 | 2 | Cakupan Layanan Telekomunikasi | % | N/A | 0,76 | > |
| 2 | 10 | 3 | Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon | % | N/A | 83,90 | > |
| 2 | 10 | 4 | Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet | | N/A | 54,87 | > |
| 2 | 10 | 5 | Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi | | N/A | 86,90 | > |
| **2** | **11** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah** | | | | |
| 2 | 11 | 1 | Persentase koperasi aktif | % | 67,80 | 74,73 | < |
| 2 | 11 | 2 | Persentase Usaha Mikro Dan Kecil | % | 97,99 | 98,43 | < |
| **2** | **12** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal** | | | | |
| 2 | 12 | 1 | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) | Investor | 35 | 66 | < |
| 2 | 12 | 2 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | Rp (juta) | 54.322 | 763.915 | < |
| 2 | 12 | 3 | Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN | % | -79,55 | 10 | < |
| **2** | **13** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga** | | | | |
| 2 | 13 | 1 | Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif | % | 89,29 | 88,93 | > |
| 2 | 13 | 2 | Persentase wirausaha muda | | 2,59 | 3,13 | < |
| 2 | 13 | 3 | Cakupan Pembinaan Olahraga | % | 85,71 | 22,17 | > |
| 2 | 13 | 4 | Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan | % | 29,31 | 36,20 | < |
| 2 | 13 | 5 | Cakupan pembinaan atlet muda | % | 73,65 | 48,43 | > |
| 2 | 13 | 6 | Jumlah atlet berprestasi | | 3 | 18 | < |
| 2 | 13 | 7 | Jumlah prestasi olahraga | | 2 | 3 | < |
| **2** | **14** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Statistik** | | | | |
| 2 | 14 | 1 | Buku "Kabupaten Dalam Angka" | | Ada | Ada | > |
| 2 | 14 | 2 | Buku "PDRB" | | Ada | Ada | > |
| **2** | **15** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Persandian** | | | | |

| | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Target 2022 | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 1 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah, | % | 100 | 100 | = |
| **2** | **16** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan** | | | | |
| 2 | 16 | 1 | Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya | | 1 | 3 | < |
| 2 | 16 | 2 | Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan | | 58 | 58 | > |
| 2 | 16 | 3 | Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu | | 2 | 2 | = |
| **2** | **17** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan** | | | | |
| 2 | 17 | 1 | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | | 6,34 | 38,52 | < |
| 2 | 17 | 2 | Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah | | 71,54 | 43,90 | > |
| 2 | 17 | 3 | Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk | | 1,61 | 1,43 | > |
| 2 | 17 | 4 | Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun | Orang | 27.884 | 63.322 | < |
| 2 | 17 | 5 | Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan | Judul | 15.933 | 11.704 | > |
| 2 | 17 | 6 | Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat | % | 53,26 | 57,21 | < |
| **2** | **18** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan** | | | | |
| 2 | 18 | 1 | Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan | % | 100.00 | 100.00 | = |
| 2 | 18 | 2 | Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku | % | 5,56 | 1,24 | > |
| **2** | | | **Urusan Pemerintahan Pilihan** | | | | |
| **2** | **1** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan** | | | | |
| 2 | 1 | 1 | Cakupan Produksi perikanan | % | 92,61 | 129 | < |
| 2 | 1 | 2 | Perikanan tangkap | ton | 54.911 | 56.098,1 | < |
| 2 | 1 | 3 | Perikanan Budidaya | ton | 168.040 | 5176 | > |
| 2 | 1 | 4 | Cakupan Bina Kelompok Perikanan | % | 73,28 | 70,6 | > |
| **2** | **2** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata** | | | | |
| **2** | **2** | 1 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara | Orang | 373.095 | 373.095 | > |
| 2 | 2 | 2 | Lama Kunjungan Wisata | Hari | 2-4 | 2-4 | = |
| 2 | 2 | 3 | PAD Sektor Pariwisata | % | 5,37 | 5,37 | = |
| **2** | **3** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian** | | | | |
| 2 | 3 | 1 | Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB | | 25,48* | 25,56 | > |
| 2 | 3 | 2 | Cakupan bina kelompok tani | % | 53,35 | 76,2 | < |
| 2 | 3 | 3 | Jumlah Populasi Ternak | | 5.295.632 | 3.202.906 | > |
| | | | *Sapi Potong* | *Ekor* | 71.801 | 78.729 | < |
| | | | *Ayam Ras Pedaging* | *Ekor* | 4.384.830 | 2.414.546 | > |
| | | | *Ayam Ras Petelur* | *Ekor* | 839.001 | 709.631 | > |
| **2** | **4** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral** | | | | |
| 2 | 4 | 1 | Jumlah rumah tangga pengguna listrik | RT | 129.572 | 100.890 | |

| | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Target 2022 | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **5** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan** | | | | |
| 2 | 5 | 1 | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | % | 0,72 | 0,72 | = |
| 2 | 5 | 2 | Jumlah Pasar | Unit | 40 | 43 | < |
| **2** | **6** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian** | | | | |
| **2** | | 1 | Cakupan bina kelompok pengrajin | % | 0,17 | 0,17 | = |
| **2** | | | **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan** | | | | |
| **2** | **1** | | **Sekretariat Daerah** | | | | |
| **2** | **1** | 1 | Rasio tempat ibadah persatuan penduduk | | 2,60 | 2,72 | < |
| **2** | **2** | | **Sekretariat DPRD** | | | | |
| 2 | 2 | 1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | > |
| 2 | 2 | 2 | Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | > |
| 2 | 2 | 3 | Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | > |
| **2** | | | **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** | | | | |
| **2** | **1** | | **Perencanaan** | | | | |
| 2 | 1 | 1 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | > |
| 2 | 1 | 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | > |
| 2 | 1 | 3 | Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | > |
| 2 | 1 | 4 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD | % | 100 | 100 | = |
| 2 | 1 | 5 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD | % | 100 | 100 | = |
| 2 | 1 | 6 | Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW | % | 100 | 100 | = |
| **2** | **2** | | **Keuangan** | | | | |
| **2** | **2** | 1 | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | | WTP | WTP | > |
| 2 | 2 | 2 | Persentase SILPA Terhadap APBD | % | 6,77 | 3,25 | > |
| 2 | 2 | 3 | Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana | % | | 0 | = |
| 2 | 2 | 4 | Persentase Belanja Pendidikan (20%) | % | 28,05 | 21,20 | > |
| 2 | 2 | 5 | Persentase Belanja Kesehatan (10%) | % | 18,44 | 19,24 | < |
| 2 | 2 | 6 | Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak) | Tepat Waktu/ Tidak | Tepat Waktu | Tepat Waktu | > |
| 2 | 2 | 7 | Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa | | 0,54 | 0,42 | > |
| 2 | 2 | 8 | Persentase PAD terhadap Pendapatan | % | 11,95 | 10,81 | > |

| | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Target 2022 | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **3** | | **Kepegawaian** | | | | |
| 2 | 3 | 1 | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan | Bulan | 3 | 3 | = |
| 2 | 3 | 2 | Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal | % | 74,53 | 89,03 | < |
| 2 | 3 | 3 | Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural | % | 37,73 | 77,92 | < |
| **2** | **4** | | **Pendidikan Dan Pelatihan** | | | | |
| 2 | 4 | 1 | Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah | Jabatan | 32 | 29 | > |
| 2 | 4 | 2 | Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah | Jabatan | 538 | 1836,64 | < |
| **2** | **5** | | **Penelitian Dan Pengembangan** | | | | |
| 2 | 5 | 1 | Persentase implementasi rencana Kelitbangan | % | 60 | 8,53 | > |
| 2 | 5 | 2 | Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah | % | 100 | 11,29 | > |
| 2 | 5 | 3 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | % | 100 | 60,87 | > |
| 2 | 5 | 4 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah, | | 100 | 100 | = |
| **2** | | | **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan** | | | | |
| **2** | **6** | | **Inspektorat Daerah** | | | | |
| 2 | 6 | 1 | Persentase tindak lanjut temuan | % | 68,4 | 68,40 | = |
| 2 | 6 | 2 | Persentase pelanggaran Pegawai | % | 0,13 | 0,246 | < |
| 2 | 6 | 3 | Jumlah temuan BPK | Temuan | 7 | 7 | = |
| **2** | | | **Unsur Pemerintahan Umum** | | | | |
| **2** | **7** | | **Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | |
| 2 | 7 | 1 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Angka | 70 | 70 | = |
| 2 | 7 | 2 | Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah | % | 100 | 100 | = |
| 2 | 7 | 3 | Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat | Kali | 5 | 5 | = |
| **3** | | | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | |
| **3** | | | **Kemampuan Ekonomi Daerah** | | | | |
| 3 | 1 | 1 | Rata-rata Nilai Konsumsi Pengeluaran Per Rumah Tangga | | 980.966 | 938.435 | > |
| 3 | 2 | 2 | Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita | | 459.488 | 443.080 | > |
| 3 | 3 | 3 | Nilai Tukar Petani | | 100,39 | 104,02 | < |
| **3** | | | **Fasilitas Wilayah/Infrastruktur** | | | | |
| 3 | 1 | 1 | Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukan Tata Ruang | % | 100 | 88 | > |
| **3** | | | **Iklim Berinvestasi** | | | | |
| 3 | 1 | 1 | Angka Kriminalitas yang tertangani | % | 11,62 | 25,37 | < |
| **3** | | | **Sumberdaya Manusia** | | | | |
| 3 | 1 | 1 | Rasio Ketergantungan | | 41,75 | 39,05 | > |

Sesuai dengan Hasil Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 dari 259 total indikator terdapat 107 indikator melampaui dari target yang telah ditetapkan, dan sebanyak 66 indikator yang telah sesuai dengan target, sedangkan 86 indikator lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan.

## 2.2 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kinerja pemenuhan SPM Kabupaten Bulukumba diukur dari ketercapaian indikator pada masing-masing bidang urusan dan jenis pelayanan pada RPJMD Kabupaten Bulukumba, seperti pada tabel berikut.

**Tabel II-265**
**Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)**
**di Kabupaten Bulukumba, Tahun 2019-2022**

| No | Uraian | Satuan | Capaian SPM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | **PENDIDIKAN** | | | | | |
| 1.1 | **Pendidikan Dasar** | | | | | |
| 1 | persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) | % | 93,41 | 95 | 82,42 | 94,6 |
| | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa bedasarkan hasil asesmen nasional | | | | | |
| 1.2 | **Pendidikan Kesetaraan** | | | | | |
| 2 | Persentase WargaNegara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. | % | 94,56 | 94 | 7,49 | 94,2 |
| | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa bedasarkan hasil asesmen nasional | | | | | |
| 1.3 | **Pendidikan anak usia dini** | | | | | |
| 3 | Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | % | 96,27 | 67 | 84,76 | 83,9 |
| | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa bedasarkan hasil asesmen nasional | | | | | |
| 2 | **KESEHATAN** | | | | | |
| 2.1 | **Pelayanan Kesehatan ibu hamil jumlah** | | | | | |
| 4 | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar | % | 100 | 73,31 | 72,51 | 100 |
| 2.2 | **Pelayanan kesehatan ibu bersalin** | | | | | |
| 5 | Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) | % | 100 | 85,66 | 87,12 | 100 |
| 2.3 | **Pelayanan kesehatan bayi baru lahir** | | | | | |
| 6 | Persentas bayi baru lahir umur 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | % | 100 | 79 | 87,32 | 100 |
| 2.4 | **Pelayanan kesehatan balita** | | | | | |
| 7 | Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | 100 | 50,02 | 84,71 | 100 |
| 2.5 | **Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar** | | | | | |
| 8 | Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | % | 100 | 2,14 | 19,19 | 100 |
| 2.6 | **Pelayanan kesehatan pada usia produktif** | | | | | |
| 9 | Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | % | 100 | 4,46 | 49,94 | 100 |
| 2.7 | **Pelayanan kesehatan pada usia lanjut** | | | | | |
| 10 | Persentas orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | % | 100 | 31,41 | 41,96 | 67 |
| 2.8 | **Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi** | | | | | |
| 11 | Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | % | 100 | 7,88 | 13,81 | 100 |
| 2.9 | **Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus** | | | | | |
| 12 | Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitusyang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | % | 100 | 100 | 79,08 | 100 |

| No | Uraian | Satuan | Capaian SPM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **2.10** | **Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat** | | | | | |
| 13 | Persentas orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | % | 100 | 63,49 | 90.07 | 84 |
| **2.11** | **Pelayanan kesehatan orang terduga tubercolosis** | | | | | |
| 14 | Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC)yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | % | 100 | 100 | 27,01 | 100 |
| **2.12** | **Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefic ieny Virus)** | | | | | |
| 15 | Persentas orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | % | 100 | 40,63 | 52,12 | 100 |
| **3** | **PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG** | | | | | |
| **3.1** | **Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari** | | | | | |
| 16 | Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum seharihari | % | 83,53 | 84,4 | 84,26 | 90,26 |
| **3.2** | **Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic** | | | | | |
| 17 | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic | % | 75,96 | 76,12 | 76,26 | 97,49 |
| **4** | **PERUMAHAN DA PEMUKIMAN** | | | | | |
| **4.1** | **Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/k ota;** | | | | | |
| 18 | Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. | % | 100 | 54 | 100 | 1000 |
| **4.2** | **Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota** | | | | | |
| 18 | Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. | % | 100 | - | - | 93 |
| **5** | **KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | |
| **5.1** | **Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum** | | | | | |
| 20 | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada | % | 71,11 | 100 | 96,9 | 100 |
| **5.2** | **Pelayanan informasi rawan bencana** | | | | | |
| 21 | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5.3** | **Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** | | | | | |
| 22 | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5.4** | **Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana** | | | | | |
| 23 | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5.5** | **Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** | | | | | |
| 24 | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Uraian | Satuan | Capaian SPM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 6 | SOSIAL | | | | | |
| **6.1** | **Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti** | | | | | |
| 25 | Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | % | 92 | 89,8 | 54,55 | 97,64 |
| **6.2** | **Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti** | | | | | |
| 26 | persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | % | 90 | - | 90.91 | 94,20 |
| **6.3** | **Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti** | | | | | |
| 27 | Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | % | 92,8 | 41,18 | 67,57 | 99,13 |
| **6.4** | **Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti** | | | | | |
| 28 | persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti | % | 86,9 | - | 100 | 94,28 |
| **6.5** | **Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota** | | | | | |
| 29 | persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), 2024*

### 2.2.1 Evaluasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan pencapaian target indikator berdasarkan bidang urusan dapat dijelaskan bahwa :

1. Bidang Urusan Pendidikan

   Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan adalah :

   - Kurang Maksimalnya Pelaksanaan Koordinasi dalam Pelaksanaan Integritas SPM
   - Dari segi pendanaan Pemerintah Pusat sangat mendukung Anggaran untuk pelaksanaan penerapan SPM.

   Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :

   - Perubahan RPJMD
   - Koordinasi yang berkesinambungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan Pusat
   - Perencanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien

2. Bidang Urusan Kesehatan

   Target untuk semua indikator adalah 100% namun berdasarkan angka di atas tidak ada indikator yang mencapai target. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

   - Penentuan data sasaran yang merupakan data estimasi yang ditentukan oleh Pusdatin, dimana data tersebut berbeda dan lebih tinggi dari pada data di Kabupaten
   - Adanya mutasi pegawai yang terlalu cepat menyebabkan pergantian pengelola program di puskesmas yang telah terlatih
   - Pospindu di beberapa desa belum aktif, disebabkan belum lengkapnya pospindu kit
   - Buku register penderita di puskesmas belum lengkap.

   Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :

   - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas/pengelola program di puskesmas, memotivasipetugas untuk melakukan kunjungan rumah

- Monitoring dan evaluasi sebaiknya dilakukan setiap triwulan untuk mengetahui pencapaian cakupan
- Target beberapa indikator sebaiknya dibagi per triwulan sehingga mudah pencapainnya.

3. Bidang Pekerjaan Umum

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum adalah :

- Masih minimnya alokasi anggaran
- Sumber daya manusia pelayanan masih belum memenuhi standarisasi pelayanan.
- Kewenangan tidak melekat pada OPD yang bersangkutan sehingga dalam pencapaian target sulit terlaksana dengan baik seperti SPM Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas perumahan, Permukiman dan Pertanahan dan datanya berada pada OPD tersebut.
- Kurangnya tenaga personil.

Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :

- Mengusulkan penambahan anggaran untuk dialokasikan dalam pencapaian SPM
- Mengikuti pelatihan-pelatihan/diklat standarisasi/ bimbingan teknis pelayanan dalam pekerjaan.
- Mengusulkan agar diadakan perbaikan struktur organisasi serta kewenangannya.
- Serta mengusulkan tambahan personal/pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah.

4. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulukumba adalah :

- Kemampuan sumber daya manusia (SDM) anggota Polisi Pamong Praja dan Damkar yang belum cukup memadai dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja dan Damkar
- Dukungan anggaran yang belum memadai akibat kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja belum maskimal
- Disiplin dan Profesionalisme Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar yang masih kurang karena minimnya Diklat profesi dan bimbingan tehnis serta sarana dan prasarana pendukung

Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :

- Perlu bimbingan tekhnis dalam rangka peningkatan Sumber Daya Aparatur Anggota Satpol PP dan Damkar
- Perlunya tambahan anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
- Perlunya diklat terkait tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar dalam menunjang penegakan peraturan daerah .

5. Bidang Sosial

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Bulukumba adalah :

- Tidak tersedianya data akurat khususnya data PMKS dan PSKS
- Manajemen dan Jumlah SDM yang belum memadai
- Masih rendahnya alokasi anggaran pada kegiatan penanganan PMKS

Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah :

- Perlunya alokasi anggaran untuk kegiatan pendataan PMKS
- Peningkatan kualitas SDM dan penempatan SDM sesuai bidang tugasnya
- Perlunya pengalokasian anggaran terkait penanganan PMKS

## 2.3 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistanable Development Goals* (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable DevelopmentGoals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi- generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1) Tanpa Kemiskinan;
2) Tanpa Kelaparan;
3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4) Pendidikan Berkualitas;
5) Kesetaraan Gender;
6) Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7) Energi Bersih dan Terjangkau;
8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10) Berkurangnya Kesenjangan;
11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13) Penanganan Perubahan Iklim;
14) Ekosistem Lautan;
15) Ekosistem Daratan;
16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat kabupaten. Target-target SDGs ditingkat kabupaten telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang terukur serta dukungan pembiayaannya. Kabupaten Bulukumba melaksanakan 17 TPB yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II-266**
**Capaian Indikator TPB/SDGs**
**Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Satuan | Capaian | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Development Goals (TPB/SDGs) | | | | | | | |
| 1 | Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun | | | | | | | |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Persen | 8 | 7,86 | 7,1 | 7,43 | 7,39 | Dinas Sosial |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | Persen | 77,5 | 82,9 | 82,9 | 80,9 | NA | Dinas Kesehatan |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | Persen | 5,19 | 5,29 | 5,37 | 5,369 | NA | Dinas Sosial |
| 1.3.1.(c) | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. | Persen | 214 | 203 | 74,1 | 61,36 | 97,36 | Dinas Sosial |
| 1.3.1.(d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. | Rumah Tangga | 13817 | 13696 | 13696 | 15011 | 14945 | Dinas Sosial |
| 1.4.1.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Persen | 84,83 | 79,38 | 86,4 | 99,6 | 99 | Dinas Kesehatan |
| 1.4.1.(b) | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. | Persen | 96,19 | 96,19 | 96,19 | 90,2 | 99 | Dinas Kesehatan |
| 1.4.1.(c) | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | Persen | 64,63 | 64,63 | 64,63 | NA | NA | Dinas PPKB,PPPA |
| 1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. | Persen | 89,4 | 90,2 | 84,4 | 63,45 | 85,46 | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| 1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. | Persen | 89,9 | 90,8 | 36,9 | 57,26 | 76,87 | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| 1.4.1.(g) | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. | Persen | 107,91 | 104,81 | 89,43 | 88,89 | 87,53 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 1.4.1.(h) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. | Persen | 99 | 98,92 | 75,47 | 67,72 | 84,48 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 1.4.1.(j) | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. | Persen | 65,32% | 0,00% | 63,94% | 98,89% | 9829,00% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| No | Uraian | Satuan | Capaian | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1.4.1.(k) | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. | Rumah Tangga | 41176 | 42432 | 49747 | 49,74 | NA | PLN |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Orang | 0 | 1,18 | 3 | 3 | 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.5.1.(a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. | Lokasi | 23,07 | 10 | 10 | 10 | 10 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.5.1.(b) | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. | Orang | 200 | 345 | 345 | 60 | 26 | Dinas Sosial |
| 1.5.1.(c) | Pendampingan psikososial korban bencana sosial. | Orang | 200 | 345 | 345 | | NA | Dinas Sosial |
| 1.5.1.(d) | Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) | | | | Na | Na | NA | Dinas Sosial |
| 1.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | Rp | | | 500.000.000 | 1,518,000,000 | 500.000.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.5.3* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.a.1* | Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. | Persen | 23,82 | 23,4 | 23,4 | Na | NA | Dinas Sosial |
| 1.a.2* | Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. | Persen | 25,29 | 25,46 | 25,46 | Na | NA | Dinas Sosial |
| **2** | **Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan** | | | | | | | |
| 2.1.1* | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). | Persen | 0 | 0 | 0 | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2.1.1.(a) | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. | Persen | 3,79 | 2 | 10,9 | 4,81 | 5,96 | Dinas Kesehatan |
| 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. | Persen | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2.1.2.(a) | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. | Persen | 0% | 0% | 0% | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2.2.1* | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. | Persen | 1,1 | 1,05 | 8,27 | 6,86 | 5,4 | Dinas Kesehatan |
| 2.2.1.(a) | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. | Persen | 2,25 | 3,06 | 3,06 | Na | 5,4 | Dinas Kesehatan |
| 2.2.2* | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | Persen | 25,3 | 17,4 | 2,93 | 5,15 | 3,17 | Dinas Kesehatan |

| No | Uraian | Satuan | Capaian | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 2.2.2.(a) | Prevalensi anemia pada ibu hamil. | Persen | 21,17 | 22,56 | 16,46 | 14,86 | 12 | Dinas Kesehatan |
| 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. | Persen | 64,3 | | 74 | Na | 54,65 | Dinas Kesehatan |
| 2.2.2.(c) | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. | Persen | 80,9 | 89 | 74 | 86,9 | 88,5 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2.3.1* | Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). | | | | | NA | NA | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| **3** | **Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia** | | | | | | | |
| 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI). | Angka | 7 | 3 | 4 | 10 | 8 | Dinas Kesehatan |
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. | Persen | 75,5 | 79,38 | 86,4 | 87,46 | 99 | Dinas Kesehatan |
| 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Persen | 84,83 | 79,38 | 85,7 | 99,6 | 99 | Dinas Kesehatan |
| 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. | Angka | 5 | 10,99 | 7,98 | 0 | 0 | Dinas Kesehatan |
| 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | Angka | 6 | 8,01 | 6,65 | 7,29 | 1,27 | Dinas Kesehatan |
| 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | Angka | 9 | 10,05 | 7,53 | 0,29 | 1,27 | Dinas Kesehatan |
| 3.2.2.(b) | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | Persen | 97,72 | 97,72 | 97,72 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | Persen | 16 | 0,016 | 0,009 | 0,33 | 0,76 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | Orang | 122,54 | 122,54 | 122,54 | 131,71 | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.3.3* | Kejadian Malaria per 1000 orang. | Orang | 0,11 | 0,11 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.4.(a) | Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.5* | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). | Orang | 138 | 138 | 138 | 92 | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.4.1.(a) | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. | Persen | 1,58 | 0,24 | 0,24 | 0,4 | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi. | Persen | 86,1 | 75,3 | 7,46 | 15,01 | 16,48 | Dinas Kesehatan |
| 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. | Persen | 11,2 | 9,8 | 0,15 | 2,19 | 32,24 | Dinas Kesehatan |
| 3.4.2* | Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. | | 0 | 2 | | Na | 0 | Dinas Kesehatan |

| No | Uraian | Satuan | Capaian | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 3.5.1.(e) | Prevalensi penyalahgunaan narkoba. | | | | | Na | 0 | Dinas Kesehatan |
| 3.5.2* | Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. | | | | | Na | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.7.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. | | | 11,96 | 39,94 | 35,05 | 55,79 | Dinas PPKB,PPPA |
| 3.7.1.(a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | Persen | 64,63 | 75,28 | 74,97 | 78,62 | 55,75 | Dinas PPKB,PPPA |
| 3.7.1.(b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. | Persen | 48,66 | 33,37 | 18,51 | 17,84 | 10,2 | Dinas PPKB,PPPA |
| 3.7.2* | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | | | 89,79 | 89,79 | 67,18 | 23,05 | Dinas PPKB,PPPA |
| 3.7.2.(a) | Total Fertility Rate (TFR). | TFR | 6224 | 2,32 | 2,318 | 2,309 | 2,13 | Dinas PPKB,PPPA |
| 3.8.1 | Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung). | Persen | 68,62 | - | 68,62 | | NA | |
| 3.8.1.(a) | Unmet need pelayanan kesehatan. | Persen | 16,58 | 15,68 | 11,74 | 19,1 | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.8.2* | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. | Penduduk | 324287 | 348767 | 348767 | 348767 | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | Persen | 77,5 | 82,9 | 71,83 | 60,3 | NA | Dinas Kesehatan |
| 3.9.3.(a) | Proporsi kematian akibat keracunan. | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Kesehatan |
| 3.a.1* | Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. | Persen | 44,93 | 44,93 | 44,93 | 50,1 | 23,75 | Dinas Kesehatan |
| 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | Dinas Kesehatan |
| 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. | Persen | 885 | 0,001 | 0,368 | 2,53 | NA | Dinas Kesehatan |
| **4** | **Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua** | | | | | | | |
| 4.1.1* | Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar | Persen | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |

| No | Uraian | Satuan | Capaian | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. | | | | | | | |
| 4.1.1.(a) | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. | Persen | 80,95 | 96,75 | 90,29 | 100 | 89,71 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 4.1.1.(b) | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. | Persen | 57,17 | 58,9 | 71,43 | 100 | 68,11 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 4.1.1.(d) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. | Persen | 110,78 | 103,81 | 112,49 | 97,29 | 100,9 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 4.1.1.(e) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. | Persen | 110,9 | 102,91 | 90,74 | 82,04 | 92,03 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 4.1.1.(g) | Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. | Tahun | 12 | 12 | 7 | 7 | 100 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 4.2.2.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | Persen | 96,75 | 97,34 | 31,93 | 78,51 | 93,33 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 4.4.1* | Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). | Persen | 34,33 | 16 | 16 | 16 | 32 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 4.5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. | Persen | 107,91 | 104,81 | 104,81 | 78,37 | 82 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | Persen | 92,56 | 92,9 | 99,53 | 97,68 | 92,56 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 4.6.1.(b) | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. | Persen | 92,56 | 92,9 | 92,9 | 90,63 | 92,56 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, © air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). | Persen | 90 | 90 | 90 | 92 | 91 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 4.c.1* | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. | Persen | 65 | 65 | 46,8 | 58,75 | 47,05 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| **5** | **Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan** | | | | | | | |
| 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | Kebijakan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Dinas PPKB,PPPA |

| No | Uraian | Satuan | Capaian | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 5.2.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. | Persen | 38 | 31 | 21,74 | 22 | 9,3 | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | Persen | 85 | 71 | 71 | 17 | 23 | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.2.2* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | Persen | 13 | 22 | 22 | NA | NA | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | Persen | 65 | 56 | 56 | 100 | 100 | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. | Persen | 3 | 1 | 1 | NA | 27 | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.3.1.(a) | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. | | | NA | NA | NA | NA | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.3.1.(b) | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | | | 89,79 | 89,79 | 67,18 | 23,5 | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | Persen | 17,5 | 20 | 20 | 20 | NA | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | Persen | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | NA | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.6.1* | Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. | Persen | NA | NA | NA | NA | | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.6.1.(a) | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). | Persen | 16,58 | 15,68 | 11,74 | 10,78 | 28,49 | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.6.1.(b) | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. | Persen | 4,2 | 4,28 | 4,25 | 4,23 | NA | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | Persen | 91,83 | 92,46 | 92,46 | 0 | 84,46 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| **6** | **Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan** | | | | | | | |

| No | Uraian | Satuan | Capaian | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | Persen | 89,4 | 90,2 | 88,9 | 84,61 | 92,43 | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| 6.1.1.(b) | Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. | NA | | | NA | NA | 92,43 | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| 6.1.1.(c) | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. | Persen | 89,4 | 90,2 | 88,9 | 63,46 | 85,46 | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| 6.2.1.(a) | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. | | | | | 85,41 | 97,88 | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | Persen | 89,9 | 90,8 | 36,9 | 75,35 | 136 | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | Persen | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | Dinas Kesehatan |
| 6.2.1.(d) | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | Desa | 52,2 | 64,71 | 136 | 136 | NA | Dinas Kesehatan |
| 6.2.1.(f) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. | Desa | 0,79 | 1,13 | 1,13 | 74,71 | 74,71 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 6.3.1 | Proporsi limbah cair yang diolah secara aman | % | 75 | 19 | 19 | 19 | 8 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 6.3.1.(b) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. | | | NA | NA | NA | NA | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 6.3.2.(b) | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. | Indeks | 60 | 65 | 65 | 65 | NA | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 6.5.1.(a) | Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). | Sungai | 15 | 18 | 2 | NA | 55 | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| 6.5.1.(c) | Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. | | | | | NA | NA | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| 6.5.1.(g) | Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. | | Ada | Ada | | 30 | Ada | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| **7** | **Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua** | | | | | | | |
| 7.2.1* | Bauran energi terbarukan. | | | 42432 | 49747 | NA | NA | Sekda, Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 7.3.1* | Intensitas energi primer. | | | | | NA | NA | Sekda, Bagian Ekonomi dan Pengembangan |

| No | Uraian | Satuan | Capaian | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | | | | | | | Energi dan Sumber Daya Mineral |
| **8** | **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua** | | | | | | | |
| 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDB per kapita. | Persen | 5,05 | 5,49 | 0,43 | 5,49 | 0.43 | Bappelitbangda |
| 8.1.1.(a) | PDB per kapita. | Juta | 31,55 | 33,8 | 34,43 | 33.80 | 34,43 | Bappelitbangda |
| 8.2.1* | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. | Persen | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. | Persen | 51,73 | 51,95 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 8.3.1.(a) | Persentase tenaga kerja formal. | Persen | 44,47 | 44,75 | 44,75 | 21,68 | 21,68 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 8.3.1.(b) | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. | Persen | 55,12 | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 35,26 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. | Persen | 7,74 | 10,68 | 10,68 | 29,97 | 61,33 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja. | Rp | Rp86.000 | Rp90.000 | Rp34.143 | Rp34.143 | Rp34.143 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. | Persen | 4,12 | 4,35 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 8.5.2.(a) | Tingkat setengah pengangguran. | Persen | 31,82 | 32,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). | Persen | 37,33 | 38,09 | 38,09 | 58,3 | 58,3 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. | | | | | NA | 38 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara. | Orang | 3555 | 2260 | 293 | 60 | | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | Orang | 262741 | 278330 | 278330 | 326993 | | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 8.9.1.(c) | Jumlah devisa sektor pariwisata. | Rp | | | | NA | | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 8.9.2* | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. | | | | | 38 | | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 8.10.1* | Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa | ATM | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 8.10.1.(a) | Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum). | | | | | 2,5 | 2,5 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |

| No | Uraian | Satuan | Capaian | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 8.10.1.(b) | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. | Persen | 21,05 | 33,61 | 33,61 | 29,23 | 45,38 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **9** | **Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi** | | | | | | | |
| 9.1.2.(b) | Jumlah dermaga penyeberangan. | Dermaga | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Dinas Perhubungan |
| 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. | Persen | 7,35 | 7,47 | 7,47 | 6,48 | 6,68 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 9.2.1.(a) | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. | Persen | 0,74 | 1,2 | 5,4 | 5,72 | 5,72 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 9.2.2* | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. | | | | | Na | | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 9.3.1* | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. | | | | | 9,9 | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 9.3.2* | Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. | | | | | NA | | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 9.c.1* | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. | Persen | 25 | 50 | 50 | 50 | | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 9.c.1.(a) | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | Persen | 91,83 | 92,46 | 94,46 | 0 | 84,46 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 9.c.1.(b) | Proporsi individu yang menggunakan internet | Persen | 42 | 43 | 43 | 43 | 57,91 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| **10** | **Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara** | | | | | | | |
| 10.1.1* | Koefisien Gini. | Koefisien | 0,354 | 0,377 | 0,371 | Na | NA | Dinas Sosial |
| 10.1.1.(a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Persen | 7,48 | 7,26 | 7,1 | 7,43 | 7,39 | Dinas Sosial |
| 10.1.1.(b) | Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. | Desa | 5 | 0 | 0 | 109 | 109 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| No | Uraian | Satuan | Capaian | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 10.1.1.(c) | Jumlah desa tertinggal. | Desa | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 10.1.1.(d) | Jumlah Desa Mandiri. | Desa | 104 | 109 | 109 | 6 | 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 10.1.1.(e) | Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. | Desa | | | 74,40% | 80,20% | NA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 10.2.1* | Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. | Persen | 8,06 | 7,86 | 7,86 | Na | NA | Dinas Sosial |
| 10.3.1.(a) | Indeks Kebebasan Sipil. | | | | | NA | NA | Dinas Sosial |
| 10.3.1.(d) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | | | | | NA | NA | Sekda, Bagian Hukum dan HAM |
| 10.4.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | Persen | 5,194 | 5,289 | 5,369 | NA | NA | Dinas Sosial |
| **11** | **Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan** | | | | | | | |
| 11.1.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. | Persen | 92,09 | 92,33 | 92,35 | 92,35 | 100 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 11.3.2.(b) | Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. | | | | | | | Bappelitbangda |
| 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Orang | | 1,18 | 3 | 3 | 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 11.5.1.(a) | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 11.5.1.(c) | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. | | Ada | Ada | Ada | Ada | ada | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 11.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | Rp | | | 500.000.000 | 1,518,000,000 | 500000000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 11.6.1.(a) | Persentase sampah perkotaan yang tertangani. | Persen | 90,22 | 92,45 | 73,56 | 86,63 | 94,77 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 11.b.2* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **12** | **Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan** | | | | | | | |
| 12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). | Ton | 2,557 | 2,557 | 25,13 | 35 | 35 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 12.5.1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | Ton | 4,8 | 3,747 | 62,769 | 24,95 | 24,95 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 12.6.1.(a) | Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. | Perusahaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| No | Uraian | Satuan | Capaian | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 12.7.1.(a) | Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. | Ton | | | 14,33 | 14,33 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **13** | **Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya** | | | | | | | |
| 13.1.1* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | | Ada | Ada | Ada | Ada | 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 13.1.2* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Orang | | 1,18 | 3 | 3 | 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **14** | **Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan** | | | | | | | |
| 14.4.1* | Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman. | Ton | 53455,6 | 52651,6 | 53.860,10 | 53.830,30 | 55.522,60 | Dinas Perikanan |
| 14.6.1.(a) | Persentase kepatuhan pelaku usaha. | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Perikanan |
| 14.b.1.(b) | Jumlah nelayan yang terlindungi. | Nelayan | 838 | 867 | 867 | 867 | NA | Dinas Perikanan |
| **15** | **Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati** | | | | | | | |
| 15.1.1.(a) | Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. | Persen | 5 | | 29,86 | 29,86 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 15.3.1.(a) | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. | Persen | 0,002 | | 32,29 | 32,29 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 15.9.1.(a) | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. | Dokumen | Ada | Ada | Ada | ada | ada | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **16** | **Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan** | | | | | | | |
| 16.1.1.(a) | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. | Kasus | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 16.1.2.(a) | Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. | Kematian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 16.1.3.(a) | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. | Kasus | | | 7 | 3 | 78 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 16.1.4* | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. | Persen | | | 100 | 100 | 100 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 16.2.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. | RT | 3 | 1 | 1 | Na | | Dinas PPKB,PPPA |
| 16.2.1.(b) | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. | Orang | 148 | 128 | 128 | 19 | | Dinas PPKB,PPPA |
| 16.2.3.(a) | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. | Orang | 29 | 517 | 517 | 19 | | Dinas PPKB,PPPA |
| 16.5.1.(a) | Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). | | | Na | Na | Na | | Inspektorat |

| No | Uraian | Satuan | Capaian | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 16.6.1* | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. | Persen | 94,29 | 90,3 | 91,51 | 93,64 | 85,12 | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 16.6.1.(a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). | | WTP (100%) | WTP (100%) | WDP (50%) | wtp | WTP (100%) | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 16.6.1.(b) | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Persen | 60,02 | 61,14 | 61,14 | Na | B | Inspektorat |
| 16.6.1.(c) | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. | Persen | 16,79 | 90 | 97,16 | 90% | 97% | Sekda, Bagian Pembangunan |
| 16.6.1.(d) | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Persen | 54,11 | 55,15 | 55,71 | 55,71 | 68,91 | Sekda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
| 16.6.2.(a) | Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | | 0 | 0 | 0 | | | Bappelitbangda |
| 16.7.1.(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | Persen | 17,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | Dinas PPKB,PPPA |
| 16.7.1.(b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | Persen | 18,4 | 18,4 | 15 | Na | 0,2 | Dinas PPKB,PPPA |
| 16.9.1* | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. | | 73,4 | 73,4 | 75,12 | 78,59 | 97,31 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 16.9.1.(a) | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. | | | | | Na | 97,31 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 16.9.1.(b) | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. | Persen | 65,32 | 65,32 | 78 | Na | NA | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 16.10.2.(c) | Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | ASN | 1 | 1 | 1 | 80 | 98,29 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |

| No | Uraian | Satuan | Capaian | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 16.b.1.(a) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | | | | | | | Setda, Bagian Hukum dan HAM |
| **17** | **Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan** | | | | | | | |
| 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. | Rp | 130.060.914.218 | 1.487.677.783.317 | 1.478.492.269.014 | 1.369.367.217.359 | 1.375.869.878.068 | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 17.1.1.(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | Persen | 0,38 | 0,37 | 0,36 | NA | | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 17.1.2* | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. | Persen | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,95 | 2,43 | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 17.6.2.(b) | Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. | | | | | NA | 50 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 17.6.2.(c) | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband | Persen | 25 | 50 | 50 | 50 | NA | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 17.8.1* | Proporsi individu yang menggunakan internet. | Persen | 42 | 43 | 43 | 50 | 100 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 17.17.1.(a) | Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | | | | | | | Bappelitbangda |
| 17.17.1.(b) | Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | | | | | | | Bappelitbangda |
| 17.18.1.(a) | Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. | Persen | 80 | 97,73 | 100 | | 100 | Bappelitbangda |
| 17.18.1.(b) | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. | Persen | 80 | 66,67 | 66,67 | | 100 | Bappelitbangda |
| 17.18.1.(c) | Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). | | 80 | 6 | 6 | | NA | Bappelitbangda |
| 17.18.1.(d) | Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. | | | | | | | Bappelitbangda |

| No | Uraian | Satuan | Capaian | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 17.19.2.(b) | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 17.19.2.(c) | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. | Orang | 4000 | 7996 | 7996 | | NA | Bappelitbangda |
| 17.19.2.(d) | Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). | Persen | 100 | 100 | 100 | | | Bappelitbangda |

### 2.3.1 Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerahmemerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat kabupaten. Target-target SDGs ditingkat kabupaten telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang terukur serta dukungan pembiayaannya. Kabupaten Bulukumba melaksanakan 17 TPB yang terbagi atas 202 indikator yang menjadi kewenangan daerah, adapun hambatan dan kendala dalam pelaksanaan SDGs dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-267**
**Identifikasi Masalah hambatan dan kendala dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2022**

| No | Aspek | Hambatan dan Kendala | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | Kemiskinan | Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bulukumba salah satunya dengan semakin banyaknya bantuan yang berperan membantu pengentasan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba pada bulan maret 2020 sebesar 7,10 % atau menurun dibandingkan bulan maret 2019 sebesar 0,16 % poin. Jumlah penduduk miskin Kab.Bulukumba. Pada bulan maret 2020 sebesar 30 ribu jiwa. Jumlah ini menurun sebesar 0,49 ribu jiwa dibandingkan maret 2019 yang sebesar 30,49 ribu jiwa, namun pada tahun 2021 7,43%. Secara umum selama 5 Tahun terakhir,tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulukumba terus mengalami penurunan baik dari sisi persentase penduduk miskin maupun jumlah penduduk namun pada tahun 2021 meningkat diakibat covid-19 dan tahun 2022 terjadi penurunan angka kemiskinan menjadi 7,39% . | |
| 2 | Sosial | Realisasi capaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah keluarga penerima manfaat yang memperoleh program perlindungan sosial yang berasal dari Kementrian Sosial RI dalam rangka penanganan dampak Covid- 19. | |
| 3 | Bencana | Terjadinya peningkatan korban meninggal, hilang dan terkena dampak diakibatkan kondisi anomali cuaca yang lebih ekstrem. | |
| 4 | Kesehatan | Pengaruh sosial budaya masih sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan sehingga masih sangat diperlukan upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, intervensi pelacakan untuk kasus kekurangan gizi telah dilakukan secara maksimal dan surveilans gizi melalui E- PPBGM sudah dimonitor secara berkesinambungan, Pembatasan kegiatan sebagai dampak pandemic Covid 19 yang berpengaruh terhadap pencapaian program | |
| 5 | Ketahanan Pangan | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diperoleh dari hasil perhitungan survei konsumsi pangan pada 9 kelompok pangan meliputi : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang- kacangan, gula, sayuran dan buah. Selama 5 tahun terakhir capainnya fluktuatif disebabkan karena masih rendahnya daya konsumsi pada kelompok pangan tertentu misalnya buah dan sayuran, pangan hewani yang dipengaruhi oleh daya beli dan kesadaran pola konsumsi masyarakat yang masih rendah. | |
| 6 | Keuangan | Harga bahan pangan masih fluktuatif, Masih kurangnya alokasi anggaran terkait genderAlokasi anggaran yang masih rendah pada sektor pengelolaan air bersih dan sanitasi sehat, Refocusing anggaran sehingga | |

| No | Aspek | Hambatan dan Kendala | Ket |
|---|---|---|---|
| | | beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakanTerbatasnya anggaran pengelolaan lingkungan, Terbatasnya anggaran pengelolaan lingkunganKepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,berdasarkan hasil pemeriksaan BPK laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016,2017,2018 dan 2019 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi laporan keuangan pemerintah daerah per 31 desember berupa laporan Realisasi Anggaran (LRA), perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, arus kas, perubahan ekuitas sesuai dengan standard akuntasi pemerintah. Penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah pada akhir periode tahun 2020 memperoleh opini wajar dengan Pengecualian (WDP). Hal ini disebabkan adanya penyajian laporan yang material yang tidak diyakini kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pada 2021 kembali menjadi WTP.Terbatasnya anggaran dan Pada tahun 2016 Rasio Pajak Daerah Kab.Bulukumba terhadap PDRB memberikan kontribusi 0,327, tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 0,383.Tahun 2018 Nikai tersebut mengalami penurunan menjadi 0,382 selanjutnya pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 0,372 dan pada tahun 2020 turun menjadi0,362. Tren penurunan rasio pajak Daerah Kab.Bulukumba terhadap PDRB tahun 2018 sampai tahun 2020 bukanlah penurunan secara nilai karena jumlah pajak daerah yang diterima mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019, hanya saja nilai PDRB yang merupakan nilai pembai juga mengalami peningkatan yang signifikan pada kurun waktu tersebut. Sementara itu untuk tahun 2020 dan tahun 2021, penurunan terjadi dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia sampai kedaerah dan pada tahun 2022 memperoleh penilaian Opini BPK menjadi WTP | |
| 7 | Operasional | PMT yang diberikan kepada Bumil KEK tidak sepenuhnya dikomsumsi oleh ibu hamil, masih ada bayi balita yang tidak mendapat ASI Eksklusif, Capaian ini mengalami penurunan disebabkan jumlah guru sertifikasi yang pensiun cukup banyak dibanding jumlah lulusan baru. Hasil ini juga disebabkan guru yang baru diangkat baik cpns maupun honorer belum bersertifikast pendidik.Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunanPenerapan Reformasi Birokrasi masih berfokus pada pelaksanaan di tingkat Pemerintah Daerah, penerapan pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah belum sepenuhnya merata dan belum berjalan optimal. Selain itu , pelaksanaan reformasi birokrasi masih berfokus terhadap pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan reformasi belum memberikan dampak perubahan yang signifikan,; | |
| 8 | Sumber Daya Manusia | Masih rendahnya tingkat kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil; ; Masih terbatasnya kemampuan sebagian besar kader bina keluargaPenempatan tenaga pendidik belum dilakukan secara merata, masih terdapat kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas antara kawasan pedesaan dan perkotaanCakupan Perempuan dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang mendapat layanan mulai tahun 2018 sampai dengan 2022 semua kasus terlayani 100% oleh pelayanan terpaduMasih kurangnya kualitas SDM sehingga kurang mampu bersaing dalam dunia kerjaRendahnya kulaitas SDM masyarakat didesaBelum sebandingnya jumlah kegiatan yang harus diawasi dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan jumlah tenaga teknis yang melakukan pengawasan dan pengendalian BencanaTerbatasnya SDM dan sarana prasaranaMasih terbatasnya kualitas SDM pengelola Data dan Informasi | |
| 9 | Kelembagaan | Belum optimalnya koordinasi antar sektor dalam menurunkan angka kematian ibu, Anak balita dan bayi Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. Kekerasan yang terjadi pada tahun 2021 sebesar 19 orang, masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait perlindungan terhadap perempuanKurang optimalnya kelembagaan pengelola air bersih dan | |

| No | Aspek | Hambatan dan Kendala | Ket |
|---|---|---|---|
| | | sanitasi sehat Kurangnya kelembagaan pengelolaan lingkungan Kurangnya kelembagaan mitigasi bencana | |
| 9 | | Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah PAUD di karenakan masih minimnya kesadaran serta pengetahuan orangtua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini sebelum anak disekolahkan ke tingkat pendidikan dasar | |
| 10 | Regulasi | Tahun 2017 : RAD (Rencana Aksi Daerah) PUG, Tahun 2018 : 1.SK Bupati No.188.45.463 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pokja Plus, 2. SK Bupati No.188.45.464 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak, 3. SK Bupati No.188.45.465 tentang pembentukan tim tekhnis anggaran responsif gender. Tahun 2019 : Perda No.1 Tahun 2019 penyelenggaraan Kabupaten Layak anak dan masih berlangsung pada tahun 2021.Kebijakan belum fokus pemerataan wilayahMasih kurangnya regulasi tata kelola lingkunganMasih kurangnya regulasi mitigasi bencana | |
| 11 | Politik | Jumlah kursi di keanggotaan DPRD dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 jumlah kursi yang diduduki perempuan sebanyak 7 kursi dari total kursi 40 dengan presentase sebesar 17,50% dan pada Tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami peningkatan kursi perempuan menjadi 8 kursi dengan presentase 20%.Proporsi kursi yang diduduki perempuan DPRD kabupaten bulukumba, jumlah total kursi di keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba dari Tahun 2015 sampai tahun 2020 sebesar 40 total kursi.Pada tahun 2015 sampai tahun 2018 jumlah kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kab.Bulukumba sebesar 7 Kursi jika dipersentasekan hanya 17,50% namun pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dan tahun 2021-2022 jumlah kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kab.Bulukumba meningkat dari 17,50% menjadi 20% salah satu penyebab terjadinya peningkatan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah karena meningkatnya partisipasi yang mendukung pemberdayaan perempuan. | |
| 12 | Air Minum layak | Tidak tersedia data karena berdasarkan Rumah tangga sanitasi Kab.Bulukumba masih berada pada level “Layak” | |
| 13 | ODF/ sanitasi | Desa/Kelurahan yang ODF dengan kategori akses jamban di Masyarakat | |
| 14 | Air Limbah | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat tidak ada peningkatan untuk tahun 2020 | |
| 15 | Lainya | Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tekanan yang cukup berat terhadap perekonomian. | |
| 16 | Pertumbuhan ekonomi Desa Tertinggal; | Di Kabupaten Bulukumba tidak terdapat daerah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal | |
| 17 | Desa Mandiri | Alokasi Anggaran untuk tahun 2021, ditetapkan 6 desa di Kab.Bulukumba sebagai desa Mandiri dengan kriteria syarat dipilihnya 6 desa : IDM (Indeks Desa Membangun) sudah mencapai nilai lebih besar 0,8 IDM, Indeks Sosial, Indeks Kebutuhan ekonomi, indeks kebutuhan ekologi ini merupakan validasi mulai dari tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten. | |
| 18 | Penataann kota | Untuk jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP belum ada di Kab.Bulukumba | |
| 19 | Transportasi | Berkurangnya jumlah ketersediaan kendaraan angkutan umum sehingga capaian realisasi berkurang. Kemudian juga dipengaruhi meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi. | |
| 20 | Kebencanaan | Dokumen strategi pengurangan resiko bencana dan Dokumen regulasi SPM kebencanaan di tingkat daerah hanya terwujud di tahun 2019 di akibatkan alokasi anggaran yang tidang mendukung | |

## 2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

### 1. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Bulukumba melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dankeuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis,efisien, dan efektif, ini bertujuan antara lain:

a. untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan denganpelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
b. serta konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
c. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikatorkinerja yang telah ditetapkan.

### 2. Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan

Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan konsistensi program, Kegiatan dan Sub-kegiatan antara RKPD dengan RPJMD, RKPD dengan APBD.

**Tabel II-268**
**Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD**

| No. | Perangkat Daerah | Jumlah Program | | | | Program Yang Sama | | | | Program Tidak Sama | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RPJMD | RKPD | Renja - PD | APBD | RKPD & RPJMD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | APBD & RPJMD | RKPD & RPJMD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | APBD & RPJMD |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| 1 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | 2 |
| 2 | Dinas Kesehatan Kab Bulukumba | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 3 | RSUD H.A. Sultan Dg. Radja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5 |
| 5 | Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Bulukumba | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 8 | Dinas Sosial | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - |
| 10 | Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab Bulukumba | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 12 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | - | - | 1 |
| 13 | Dinas Perhubungan | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 14 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 15 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | - | - | 2 |
| 16 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 |
| 17 | Dinas Perikanan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 18 | Dinas Pariwisata,Pemuda Dan Olahraga | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 19 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - |
| 20 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 21 | Sekertariat Daerah | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 22 | Sekertariat DPRD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 23 | Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |

| No. | Perangkat Daerah | Jumlah Program | | | | Program Yang Sama | | | | Program Tidak Sama | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RPJMD | RKPD | Renja - PD | APBD | RKPD & RPJMD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | APBD & RPJMD | RKPD & RPJMD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | APBD & RPJMD |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| 24 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 25 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 26 | Inspektorat Daerah | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 27 | Kantor Kecamatan Ujung Bulu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 28 | Kantor Kecamatan Ujung Loe | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 29 | Kantor Kecamatan Bulukumpa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 30 | Kantor Kecamatan Rilau Ale | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 31 | Kantor Kecamatan Gantarang | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 32 | Kantor Kecamatan Kindang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 33 | Kantor Kecamatan Herlang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 34 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 35 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 36 | Kantor Kecamatan Kajang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 37 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - |

*Sumber : Bappelitbangda Kab. Bulukumba, 2023*

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi penjabaranprogram RPJMD ke dalam RKPD dan APBD antara lain sebagai berikut:

1. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD
   a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah 184 program (jumlah pada kolom 3), dan jumlah program dalam RKPD Tahun 2022 juga berjumlah 166 program (jumlah pada kolom 4).
   b. Antara dokumen RPJMD dan RKPD terdapat selisih 18 program diantara kedua dokumen tersebut.
2. Kesesuaian program RKPD dan Renja-PD
   a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 166 program (jumlah pada kolom 4), dan jumlah program dalam Renja-PD adalah 166 program (jumlah pada kolom 5).
   b. Antara dokumen RKPD dan Renja-PD tidak terdapat program yang selisih diantara keduanya.
      a. Kesesuaian program RKPD dan APBD
   a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 166 program (jumlahpada kolom 4), sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 166 program (jumlah pada kolom 6).
   b. Antara dokumen RKPD dan Renja-PD tidak terdapat program yang selisih diantara keduanya.
      b. Kesesuaian program RPJMD dan APBD
   a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah 184 program, sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 166 program (kolom 10). Dengan demikian terdapat 18 program yang tidak sesuai antara kedua dokumen (jumlah pada kolom14).
   b. Seluruh program yang tidak sesuai antara kedua dokumen tersebut merupakan program RPJMD yang tidak dianggarkan dalam APBD.

Menjadi hal penting yang termuat dalam RPJMD adalah program pembangunan daerah. Program tersebut sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun kegiatan dalam Renstra-PD. Kegiatan dalam Renstra-PD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD. Selanjutnya kegiatan dalam Renja-PD menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dalam RKPD yang kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan kegiatan pada KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan R-APBD untuk ditetapkan menjadikegiatan dalam APBD dengan Peraturan Daerah. Adapun gambaran konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD sebagai berikut:

**Tabel II-269**
**Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD**

| No. | Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan | | | Kegiatan Yang Sama | | | Kegiatan Tidak Sama | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RKPD | Renja - PD | APBD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | Renja & APBD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | Renja & APBD |
| 1 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - |
| 2 | Dinas Kesehatan | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | - |
| 3 | RSUD H.A. Sultan Dg. Radja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | - |
| 5 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |

| No. | Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan | | | Kegiatan Yang Sama | | | Kegiatan Tidak Sama | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RKPD | Renja - PD | APBD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | Renja & APBD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | Renja & APBD |
| | Kebakaran Dan Penyelamatan | | | | | | | | | |
| 8 | Dinas Sosial | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - |
| 10 | Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab Bulukumba | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
| 12 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - |
| 13 | Dinas Perhubungan | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
| 14 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 15 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - |
| 16 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 17 | Dinas Perikanan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - |
| 18 | Dinas Pariwisata,Pemuda Dan Olahraga | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - |
| 19 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - | - |
| 20 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | - | - |
| 21 | Sekertariat Daerah | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - |
| 22 | Sekertariat DPRD | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
| 23 | Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - |
| 24 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
| 25 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - |
| 26 | Inspektorat Daerah | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - |
| 27 | Kecamatan Ujung Bulu | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - |
| 28 | Kecamatan Ujung Loe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| 29 | Kecamatan Bulukumpa | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
| 30 | Kecamatan Rilau Ale | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| 31 | Kecamatan Gantarang | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| 32 | Kecamatan Kindang | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| 33 | Kecamatan Herlang | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| 34 | Kecamatan Bonto Tiro | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - |
| 35 | Kecamatan Bonto Bahari | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| 36 | Kecamatan Kajang | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| 37 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - |

*Sumber : Bappelitbangda Kab. Bulukumba, 2023*

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD dan Renja-PD.
   a. Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 448 (jumlah pada kolom 3) dan Renja-PD adalah sejumlah 448 (jumlah pada kolom 4). Jumlah kegiatan untuk kedua dokumen konsisten adalah 448 kegiatan. (jumlah pada kolom 6), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 0 (jumlah pada kolom 8).
   b. Untuk jumlah kegiatan Antara RKPD dan Renja-PD telah sesuai. C.Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan Renja-PD adalah sebesar 100 %.
2. RKPD dan APBD.
   a. Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 448 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 448 (jumlah pada kolom 5). Jumlah kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 448 (jumlah pada kolom 7),sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 0 (jumlah pada kolom10).
   b. Dari 3 kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD tersebut adalah kegiatan RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD demikian pula sebaliknya. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 100%. Ketidaksesuaian kegiatan antara RKPD dan APBD tersebut disebabkanantara lain dukungan anggaran dalam pelaksaan kegiatan yang masih kurang.

Untuk pelaksanaan RKPD tahun 2022 sudah mengacu kepada permendagri 90 tahun 2020 yang dalam pelaksanaan penjabarannya memuat rincian sampai pada sub kegiatan. Sebagai bentuk dari pelaksanaan evaluasi terkait konsistensi pelaksanaan sub kegiatan pada RKPD terhadap Renja Perangkat daerah, RKPD terhadap APBD. Adapun gambaran konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD sebagai berikut:

**Tabel II-270**
**Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD**

| No. | Perangkat Daerah | Jumlah Sub Kegiatan | | | Sub Kegiatan Yang Sama | | | Sub Kegiatan Tidak Sama | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RKPD | Renja | APBD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | Renja & APBD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | Renja & APBD |
| 1 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 77 | 77 | 75 | 75 | 75 | 75 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | RSUD H.A. Sultan Dg. Radja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | - |
| 5 | Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Bulukumba | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | - | - |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
| 8 | Dinas Sosial | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | - | - |
| 10 | Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | - |
| 12 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 1 | 1 | 1 |

| No. | Perangkat Daerah | Jumlah Sub Kegiatan | | | Sub Kegiatan Yang Sama | | | Sub Kegiatan Tidak Sama | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RKPD | Renja | APBD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | Renja & APBD | Renja & RKPD | APBD & RKPD | Renja & APBD |
| | Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | |
| 13 | Dinas Perhubungan | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - |
| 14 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - |
| 15 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | - | - |
| 16 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Dinas Perikanan | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Dinas Pariwisata,Pemuda Dan Olahraga | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - | - |
| 19 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | - | - | - |
| 20 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | - |
| 21 | Sekertariat Daerah | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | - | - | - |
| 22 | Sekertariat DPRD | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | - | - | - |
| 24 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | - | - | - |
| 25 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - |
| 26 | Inspektorat Daerah | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | - | - |
| 27 | Kantor Kecamatan Ujung Bulu | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | - |
| 28 | Kantor Kecamatan Ujung Loe | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - |
| 29 | Kantor Kecamatan Bulukumpa | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - |
| 30 | Kantor Kecamatan Rilau Ale | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | - |
| 31 | Kantor Kecamatan Gantarang | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Kantor Kecamatan Kindang | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - |
| 33 | Kantor Kecamatan Herlang | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - |
| 34 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
| 35 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
| 36 | Kantor Kecamatan Kajang | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - |
| 37 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 | 2 | 2 |

*Sumber : Bappelitbangda Kab. Bulukumba, 2023*

Berdasarkan data yang tercantum dalam table diatas, dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD dan Renja-PD.
   a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1.177 (jumlah pada kolom 3) dan Renja-PD adalah sejumlah 1.177 (jumlah pada kolom 4). Jumlah sub kegiatan untuk kedua dokumen konsisten adalah 1.177 (jumlah pada kolom 6), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 0 (jumlah padakolom 9).
   b. Untuk jumlah sub kegiatan Antara RKPD dan Renja-PD telah sesuai.
   c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan Renja-PD adalah sebesar 100%.
2. RKPD dan APBD.
   a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1.177 (jumlah pada kolom 3)dan APBD adalah sejumlah 1.166 (jumlah pada kolom 5). Jumlah sub kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 1.166 (jumlah pada kolom 7), sedangkan sub kegiatan yang tidak sesuai adalah 11 (jumlah pada kolom 10).
   b. Dari 11 sub kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD tersebut adalah sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD mendapatkan untuk alokasi Anggaran disebabkan perubahan anggaran untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.
   c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 99,07%..
3. Renja-PD dan APBD
   a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1.177 (jumlah pada kolom 3)dan APBD adalah sejumlah 1.166 (jumlah pada kolom 5). Jumlah subkegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 1.166 (jumlah pada kolom 7), sedangkan sub kegiatan yang tidak sesuai adalah 11 (jumlah pada kolom 10).
   b. Dari 11 sub kegiatan yang tidak sesuai antara Renja-PD dan APBD tersebut adalah sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD mendapatkan untuk alokasi Anggaran

### 3. Capaian Pendanaan dan Kinerja RKPD 2022

Pengukuran capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/kegiatan RKPD Perubahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022, digunakan beberapa kriteria penilaian seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel II-271**
**Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022**

| No. | Perangkat Daerah | APBD | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | 427.683.353.105,00 | 398.676.424.175,00 | 93,22 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 171.613.468.624,00 | 141.994.974.607,00 | 82,74 |
| 3 | Rsud H.A. Sultan Dg. Radja | 124.134.979.399,00 | 107.826.499.464,20 | 86,86 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | 206.336.501.284,00 | 173.577.235.634,00 | 84,12 |
| 5 | Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Bulukumba | 22.861.398.926,00 | 18.580.925.367,80 | 81,28 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 16.159.830.304,00 | 15.975.354.331,00 | 98,86 |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | 11.621.183.946,00 | 11.157.026.574,00 | 96,01 |
| 8 | Dinas Sosial | 5.306.671.798,00 | 5.148.048.061,00 | 97,01 |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 16.183.976.308,00 | 14.895.002.560,00 | 92,04 |

| No. | Perangkat Daerah | APBD | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil | 4.809.331.841,00 | 4.295.038.999,00 | 89,31 |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab Bulukumba | 6.475.987.985,00 | 6.185.106.639,00 | 95,51 |
| 12 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PPPA | 12.849.260.230,00 | 10.137.205.644,00 | 78,89 |
| 13 | Dinas Perhubungan | 19.804.277.131,00 | 18.606.623.051,00 | 93,95 |
| 14 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian | 4.362.786.856,00 | 4.038.860.269,00 | 92,58 |
| 15 | Dinas Penanaman Modal PTSP Dan Tenaga Kerja | 6.759.878.536,00 | 5.908.918.483,00 | 87,41 |
| 16 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah | 4.801.622.700,00 | 3.752.466.617,00 | 78,15 |
| 17 | Dinas Perikanan | 13.434.084.936,00 | 11.618.926.219,00 | 86,49 |
| 18 | Dinas Pariwisata,Pemuda Dan Olahraga | 14.650.043.863,00 | 12.885.446.511,00 | 87,96 |
| 19 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | 37.028.331.603,00 | 31.704.889.732,00 | 85,62 |
| 20 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM | 90.582.643.262,00 | 13.669.664.385,00 | 15,09 |
| 21 | Sekertariat Daerah | 24.874.889.058,00 | 22.902.476.661,00 | 92,07 |
| 22 | Sekertariat DPRD | 40.460.773.518,00 | 36.662.086.085,00 | 90,61 |
| 23 | Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 9.254.518.497,00 | 7.934.561.504,00 | 85,74 |
| 24 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah | 212.136.647.686,00 | 195.792.039.610,00 | 92,30 |
| 25 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM | 5.936.506.696,00 | 5.574.213.047,00 | 93,90 |
| 26 | Inspektorat Daerah | 11.053.246.905,00 | 9.005.802.020,00 | 81,48 |
| 27 | Kantor Kecamatan Ujung Bulu | 15.096.339.561,00 | 14.607.148.015,00 | 96,76 |
| 28 | Kantor Kecamatan Ujung Loe | 3.120.079.462,00 | 2.536.070.453,00 | 81,28 |
| 29 | Kantor Kecamatan Bulukumpa | 5.830.343.788,00 | 5.485.379.381,00 | 94,08 |
| 30 | Kantor Kecamatan Rilau Ale | 4.248.837.190,00 | 3.953.151.576,00 | 93,04 |
| 31 | Kantor Kecamatan Gantarang | 6.513.965.312,00 | 5.926.385.268,00 | 90,98 |
| 32 | Kantor Kecamatan Kindang | 2.718.453.956,00 | 2.433.440.538,00 | 89,52 |
| 33 | Kantor Kecamatan Herlang | 3.870.570.718,00 | 3.661.444.490,00 | 94,60 |
| 34 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro | 3.396.788.161,00 | 3.306.560.864,00 | 97,34 |
| 35 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari | 7.110.641.893,00 | 6.181.505.568,00 | 86,93 |
| 36 | Kantor Kecamatan Kajang | 4.834.273.166,00 | 4.555.162.859,00 | 94,23 |
| 37 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 3.506.117.166,00 | 3.015.208.714,00 | 86,00 |
| | **Jumlah Belanja** | **1.581.422.605.370,00** | **1.344.167.273.976,00** | **85,00** |

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Bulukumba tahun 2022 adalah Rp.1.581.422.605.370,00,- anggaran tersebut terbagi atas 37 perangkat daerah. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 sebesar 85,00%, Pengukuran capaian target kinerja outcome/output pada Program/kegiatan/sub kegiatan yang diakumulasi berdasarkan urusan dan penyerapan dana Program/kegiatan/sub kegiatan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022, adapaun Skala Nilai Peringkat Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-272**
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Simbol |
|---|---|---|---|
| 1 | 91% ≤ 100% | SANGAT TINGGI | ST |
| 2 | 76% ≤ 90% | TINGGI | T |
| 3 | 66% ≤ 75% | SEDANG | S |
| 4 | 51% ≤ 65% | RENDAH | R |
| 5 | ≤ 50% | SANGAT RENDAH | SR |

*Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja dari 37 perangkat daerah hanya 1 perangkat daerah yang masuk dalam kategori Sangat Rendah yaitu Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (15,09%) ini dikarenakan ada belanja transfer yang tidak sempat dibayarkan, kategori Tinggi berjumlah 19 Perangkat Daerah dan Kategori sangat tinggi berjumlah 17.

**Tabel II-273**
**Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Keuangan Evaluasi Hasil RKPD**

| No | Urusan | Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kinerja | Predikat | Keu | Predikat |
| | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | |
| 1 | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan | 60,24 | **R** | 56,11 | **R** |
| 2 | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan | 80,50 | **T** | 72,00 | **S** |
| 3 | Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 83,46 | **T** | 67,82 | **S** |
| 4 | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 88,24 | **T** | 75,16 | **S** |
| 5 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 96,74 | **ST** | 96,00 | **ST** |
| 6 | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial | 96,57 | **ST** | 95,24 | **ST** |
| | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | |
| 1 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | 67,20 | **S** | 68,07 | **S** |
| 2 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 62,51 | **R** | 62,42 | **R** |
| 3 | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan | 77,78 | **T** | 72,92 | **S** |
| 4 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan | 90,00 | **T** | 78,59 | **T** |
| 5 | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup | 98,68 | **ST** | 96,70 | **ST** |
| 6 | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 98,94 | **ST** | 96,24 | **ST** |
| 7 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 95,14 | **ST** | 91,47 | **ST** |
| 8 | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 85,31 | **T** | 86,23 | **T** |
| 9 | Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan | 94,25 | **ST** | 82,58 | **T** |
| 10 | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika | 88,09 | **T** | 85,20 | **T** |
| 11 | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah | 88,27 | **T** | 82,25 | **T** |
| 12 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | 99,02 | **ST** | 98,09 | **ST** |
| 13 | Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga | 98,95 | **ST** | 98,56 | **ST** |
| 14 | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik | 100,00 | **ST** | 100,00 | **ST** |

| No | Urusan | Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kinerja | Predikat | Keu | Predikat |
| 15 | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian | 100,00 | **ST** | 100,00 | **ST** |
| 16 | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | 69,61 | **S** | 69,60 | **S** |
| 17 | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan | 99,19 | **ST** | 92,58 | **ST** |
| 18 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan | 100,00 | **ST** | 99,66 | **ST** |
| | **Urusan Pemerintahan Pilihan** | | | | |
| 1 | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan | 93,27 | **ST** | 76,48 | **T** |
| 2 | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata | 86,93 | **T** | 83,43 | **T** |
| 3 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | 91,43 | **ST** | 82,96 | **T** |
| 4 | Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan | 99,67 | **ST** | 93,39 | **ST** |
| 5 | Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan | 82,06 | **T** | 82,18 | **T** |
| 6 | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian | 99,33 | **ST** | 92,75 | **ST** |
| | **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan** | | | | |
| 1 | Sekretariat Daerah | 98,96 | **ST** | 93,45 | **ST** |
| 2 | Sekretariat DPRD | 93,39 | **ST** | 76,04 | **T** |
| | **Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang** | | | | |
| 1 | Perencanaan | 78,83 | **T** | 76,40 | **T** |
| 2 | Keuangan | 86,98 | **T** | 76,38 | **T** |
| 3 | Kepegawaian, | 94,69 | **ST** | 86,47 | **T** |
| 4 | Pendidikan Dan Pelatihan | 100,00 | **ST** | 99,00 | **ST** |
| 5 | Penelitian Dan Pengembangan | 77,20 | **T** | 72,36 | **S** |
| | **Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan** | | | | |
| 1 | Pengawasan | 89,66 | **T** | 73,33 | **S** |
| | **Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan** | | | | |
| 1 | Kecamatan | 98,36 | **ST** | 92,60 | **ST** |
| | Unsur Pemerintahan Umum | | | | |
| 1 | Kesatuan Bangsa Dan Politik | 90,94 | **T** | 73,34 | **S** |
| | **RKPD Kabupaten Bulukumba** | 89,51 | **T** | 83,85 | **T** |

*Sumber : Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2022*

**4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah**

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan tahun 2022 dipengaruhi oleh:

a) Adanya pinjaman daerah dari pemerintah pusat sebesar 75 Milyar yang tidak masuk ke dalam kas daerah. Sehingga realisasinya dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah rendah.

b) Adanya PNS yang pensiun di bulan Februari dan Mei 2022, adanya penganggaran untuk honararium sebanyak 2 org yang terealisasi hanya 1 org serta ada sisa tender dari belanja modal yaitu pengadaan sarana dan prasarana, rehabilitasi gedung kantor, tender website, dan sisa pengawasan.

c) Kurangnya jumlah kasus terhadap perempuan yang mendapatkan layanan pendampingan sesuai petunjuk teknis penggunaan DAK non fisik perlindungan perempuan dan anak dan adanya kelebihan pembayaran gaji dan tpp, serta kelebihan pembayaran listrik dan wifi.

d) Adanya klaim ganda atas lokasi tanah untuk Perluasan Pasar Tanete dan tidak didapatkan kesepakatan harga tanah lokasi TPA Borong Manempa Desa Polewali antara pemilik lahan dan tim pengadaan tanah kabupaten.

e) Banyaknya tugas mandatory yang harus dilaksanakan bersamaan namun penugasan yg dapat dibayarkan hanya satu dan banyaknya perubahan jadwal bimtek dan jadwal bimtek yg bertepatan dengan penugasan yang penting dan mendesak (hps, penanganan inflasi, reviu parsial)

f) Beberapa paket infrastruktur gagal tender diantaranya Pembangunan Lanjutan Mall Pelayanan Publik.

g) Penetapan Perubahan APBD 2022 tidak terjadi kesepakatan antara Bupati dan DPRD Kabupaten Bulukumba sehingga beberapa kegiatan yang akan mengalami pergeseran dan tambah kurang anggaran serta penyesuaian nomenklatur tidak dapat direalisasikan.

**5. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah:**

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 dalam pencapaian keberhasilan kinerja disampaikan sebagai berikut:

1) Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2) Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
3) Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
4) Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
5) Adannya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
6) Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;
7) Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**:

1) Peningkatan pemahaman aparatur perangkat daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.
2) Penyusunan dokumen rencana dan anggaran sesuai dengant ahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundangan.
3) Pengelolaan data yang baik. Sebagai bentuk tindak lanjut dan rekomendasi dari penyajian data-data tersebut diatas, maka rekomendasi sebagai Identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat serta tindak lanjut bisa bermanfaat bagi keberhasilan pencapaian kinerja dan daya serap anggaran antara lain karena :

Untuk lebih jelasnya terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dapat dilihat pada berikut:

# Tabel II-258
# Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba
# Tahun Anggaran 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **2** | **0** | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belummenyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan (SPM)Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **2** | **2.01** | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | **Presentase bangunan kondisi baik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Penambahan RKB | Paket | 60,00 | | | | 2,00 | 390.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 3 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Sekolah | 5,00 | | | | 11,00 | 1.172.858,05 | 522.231,50 | 10,01 | 478.317,79 | 91,00 | 40,78 | 91,59 | 10,01 | 478.318 | 200,20 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 4 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Paket | 60,00 | | | | 23,00 | 1.390.488,90 | 231.808,85 | 21,85 | 221.172,25 | 95,00 | 15,91 | 95,41 | 21,85 | 221.172 | 36,42 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 5 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Sekolah | 60,00 | | | | 11,00 | 1.410.031,90 | 788.267,60 | 7,62 | 544.718,14 | 69,25 | 38,63 | 69,10 | 7,62 | 544.718 | 12,70 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 6 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Paket | 61,00 | | | | 42,00 | 6.147.078,60 | 1.356.395,65 | 40,32 | 1.257.331,20 | 96,00 | 20,45 | 92,70 | 40,32 | 1.257.331 | 66,10 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 8 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Paket | 5,00 | | | | 2,00 | 1.798.000,00 | 192.850,00 | 1,02 | 97.740,00 | 50,78 | 5,44 | 50,68 | 1,02 | 97.740 | 20,31 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 9 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | % | | | | | ##### | 1.000.000,00 | - | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 10 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | % | | | | | ##### | 500.000,00 | - | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 26 | Pengadaan Mebel Sekolah | | % | | | | | ##### | 100.000,00 | - | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 27 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Sekolah | 349,00 | | | | 55,00 | 7.148.879,55 | 2.342.568 | 54,40 | 2.316.210,94 | 98,90 | 32,40 | 98,87 | 54,40 | 2.316.211 | 15,59 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 28 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa SD yang mengikuti Lomba KSN Tingkat Kabupaten dan Nasional | Kegiatan | 349,00 | | | | 1,00 | 640.000,00 | 117.207,00 | 0,31 | 35.946,00 | 30,68 | 5,62 | 30,67 | 0,31 | 35.946 | 0,09 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 29 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah PTK yang Mendapatkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | PTK | 12,00 | | | | 5,00 | 50.000,00 | 489.445,200 | 0,02 | 1.500,00 | 0,40 | 3,00 | 0,31 | 0,02 | 1.500 | 0,17 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 29 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Sekolah Dasar | Sekolah | 12,00 | | | | ##### | 25.693.374,30 | 42.416.291,225 | 350,00 | 39.340.297,47 | 100,00 | 153,11 | 92,75 | 350,00 | 39.340.297 | 2916,67 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan Dana BOS | Sekolah | 12,00 | | | | ##### | 50.000,00 | 112.185,000 | 278,01 | 89.005,05 | 79,43 | 178,01 | 79,34 | 278,01 | 89.005 | 2316,71 | 0,00 | |
| **1** | **1** | **2** | **2.02** | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | **Presentase bangunan kondisi baik** | | | | | | | | | | | | | | | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 12 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Paket | 90,00 | | | | 5,00 | 1.000.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 14 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Paket | 30,00 | | | | 5,00 | 1.000.000,00 | 796.410,00 | 4,15 | 661.226,17 | 83,05 | 66,12 | 83,03 | 4,15 | 661.226 | 13,84 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 15 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Paket | 5,00 | | | | 5,00 | 1.000.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 17 | Pembangunan Laboratorium | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Labolatorium | Paket | 5,00 | | | | 5,00 | 1.000.000,00 | 1.244.762,00 | 3,91 | 973.133,31 | 78,20 | 97,31 | 78,18 | 3,91 | 973.133 | 78,20 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 18 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Sekolah | 5,00 | | | | 10,00 | 1.522.500,00 | 5.355.777,86 | 9,03 | 4.831.885,93 | 90,27 | 317,37 | 90,22 | 9,03 | 4.831.886 | 180,54 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 32 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Paket | 70,00 | | | | 12,00 | 3.560.331,95 | 1.194.954,00 | 9,15 | 911.068,64 | 76,25 | 25,59 | 76,24 | 9,15 | 911.069 | 13,07 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 36 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru | Paket | 1,00 | | | | 19,00 | 3.266.904,10 | 331.936,00 | 15,10 | 263.834,91 | 79,49 | 8,08 | 79,48 | 15,10 | 263.835 | 1510,31 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Paket | 1,00 | | | | 4,00 | 173.264,80 | 47.420,00 | 3,39 | 40.156,36 | 84,69 | 23,18 | 84,68 | 3,39 | 40.156 | 338,76 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 4 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Paket | 95,00 | | | | 7,00 | 1.131.473,85 | 331.936,00 | 5,04 | 239.033,98 | 72,05 | 21,13 | 72,01 | 5,04 | 239.034 | 5,31 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 41 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Labolatorium | Paket | 70,00 | | | | 14,00 | 3.775.564,50 | 373.428,00 | 10,50 | 279.203,48 | 75,00 | 7,40 | 74,77 | 10,50 | 279.203 | 15,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Paket | 100,00 | | | | 19,00 | 2.535.404,80 | 982.555,60 | 17,53 | 889.957,46 | 92,25 | 35,10 | 90,58 | 17,53 | 889.957 | 17,53 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 42 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Mebeluer Sekolah | Paket | 100,00 | | | | 1,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 1,00 | 49.950,00 | 100,00 | 33,30 | 99,90 | 1,00 | 49.950 | 1,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 42 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Paket | 100,00 | | | | 14,00 | 1.075.904,00 | 1.078.127,00 | 14,00 | 1.077.940,00 | 100,00 | 100,19 | 99,98 | 14,00 | 1.077.940 | 14,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 42 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa SMP yang mengikuti Lomba KSN Tingkat Kabupaten dan Nasional | Kegiatan | 100,00 | | | | 1,00 | 390.000,00 | 117.309,00 | 0,60 | 70.617,70 | 60,21 | 18,11 | 60,20 | 0,60 | 70.618 | 0,60 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 42 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOS | Sekolah | 100,00 | | | | 70,00 | 11.160.218,00 | 17.131.177,05 | 70,00 | 15.734.102,22 | 100,00 | 140,98 | 91,84 | 70,00 | 15.734.102 | 70,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Sekolah | 100,00 | | | | 70,00 | 50.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| **1** | **1** | **2** | **2.03** | | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | **Persentase warga negara usia 5 – 6 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | | | | | | | | | | | | | | | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 1 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Sekolah | 3,00 | - | | | 3,00 | 1.340.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 2 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Sekolah | 3,00 | | | | 1,00 | 396.012,00 | 629.598,05 | 1,00 | 426.897,00 | 100,00 | 107,80 | 67,80 | 1,00 | 426.897 | 33,33 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 3 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Sekolah | 4,00 | | | | 1,00 | 3.520.295,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 4 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Sekolah | 100,00 | | | | 15,00 | 329.010,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Sekolah | 3,00 | | | | 1,00 | 80.000,00 | 36.820,95 | 1,00 | 16.676,00 | 100,00 | 20,85 | 45,29 | 1,00 | 16.676 | 33,33 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Sekolah | 174,00 | | | | 2,00 | 50.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOP PAUD | Sekolah | 358,00 | | | | ##### | 8.232.200,00 | 8.365.800,00 | 368,00 | 6.715.289,00 | 100,00 | 81,57 | 80,27 | 368,00 | 6.715.289 | 102,79 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| **1** | **1** | **2** | **2.04** | | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | | | | | | | | | | | | | | | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.04 | 1 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Sekolah | | | | | 2,00 | 50.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.04 | 15 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Sekolah | 1,00 | | | | 1,00 | 50.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.04 | 16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOP Kesetaraan | Sekolah | 1,00 | | | | 24,00 | 4.240.000,00 | 2.337.700,00 | 24,00 | 2.605.617,25 | 100,00 | 61,45 | 111,46 | 24,00 | 2.605.617 | 2400,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **78,68** | **59,25** | **74,55** | | | **713,01** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **R** | **S** | | | **ST** | **SR** | |
| **1** | **1** | **4** | **0.00** | | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **4** | **2.01** | | **Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 4 | 2.01 | 1 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | PTK | 1,00 | - | 0,00 | ######## | 105,00 | 1.570.000,00 | 79.977,00 | 73,50 | 48.882,80 | 70,00 | 3,11 | 61,12 | 73,50 | 1.200.566 | 7350,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **70,00** | **1,56** | **61,12** | | | **918,75** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **S** | **SR** | **R** | | | **ST** | **SR** | |
| **1** | **1** | **5** | **0.00** | | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | **Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **5** | **2.02** | | **Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | **Persentase Satuan Pendidikan Dasar Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 5 | 2.02 | 2 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Kegiatan | 100,00 | | | | 1,00 | 50.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **SR** | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| **1** | **1** | **1** | **0.00** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun | Dokumen | 1,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 6.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun | Dokumen | 1,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 50.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | | | | | 1,00 | 25.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.01 | 6 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun | Dokumen | | | | | 5,00 | 25000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| **1** | **1** | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | jumlah pegawai merima gaji dan tunjangan | bulan | 60,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 381.429.405,58 | 336.372.581,25 | 12,00 | 316.711.846,81 | 100,00 | 83,03 | 94,16 | 12,00 | 316.711.847 | 20,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan | bulan | 60,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 16.320,00 | 1.248.000,00 | 12,00 | 1.207.550,00 | 100,00 | 7399,20 | 96,76 | 12,00 | 1.207.550 | 20,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 1 | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan | bulan | 60,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 1.383.027,00 | 39.000,00 | 12,00 | 39.000,00 | 100,00 | 2,82 | 100,00 | 12,00 | 39.000 | 20,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran | Dokumen | 60,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 25.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat | Orang | | | | | 2,00 | 75.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.05 | 1 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Mahasiswa S1 Berprestasi yang Menerima Bantuan | Orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 130,00 | 550.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Pesentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia | Paket | | | | | 180,00 | - | 2.059,00 | 180,00 | 2.059,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 180,00 | 2.059 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia | Paket | | | | | 180,00 | 2.962,50 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia | Paket | | | | | 1,00 | 45.000,00 | 47.808,97 | 1,00 | 47.808,97 | 100,00 | 106,24 | 100,00 | 1,00 | 47.809 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia | Lembar | | | | | ###### | 10.000,00 | 5.012,70 | 28571,00 | 5.012,70 | 100,00 | 50,13 | 100,00 | ##### | 5.013 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 4 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Tamu yang difasiltasi | Orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 786,00 | 33.000,00 | 4.764,00 | 786,00 | 4.764,00 | 100,00 | 14,44 | 100,00 | 786,00 | 4.764 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan dan diikuti | Kegiatan | 0,00 | - | 0,00 | - | 13,00 | 93.798,00 | 7.800,00 | 10,99 | 6.593,00 | 84,54 | 7,03 | 84,53 | 10,99 | 6.593 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan dan diikuti | Kegiatan | 0,00 | - | 0,00 | - | 13,00 | 13.260,00 | 15.480,00 | 13,00 | 15.404,10 | 100,00 | 116,17 | 99,51 | 13,00 | 15.404 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah jasa penunjang yang disiapkan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa komunikasi, Biaya tagihan air dan listrik yang terbayarkan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 144.270,26 | 20.545,95 | 12,00 | 14.525,28 | 100,00 | 10,07 | 70,70 | 12,00 | 14.525 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa komunikasi, Biaya tagihan air dan listrik yang terbayarkan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 17.757,00 | 115.468,98 | 12,00 | 99.635,02 | 100,00 | 561,10 | 86,29 | 12,00 | 99.635 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 48.000,00 | 5.595,00 | 12,00 | 5.595,00 | 100,00 | 11,66 | 100,00 | 12,00 | 5.595 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 39.800,00 | 166.247,78 | 12,00 | 166.021,78 | 100,00 | 417,14 | 99,86 | 12,00 | 166.022 | 0,00 | 0,00 | |
| **1** | **1** | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **persentase barang milik yang disiapkan dan terpelkihara dalam kondisi baik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Roda 2 Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Roda 4 | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 1.200,00 | 18.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | bulan | | | | | 12,00 | 15.000,00 | | | 8.762,47 | 0,00 | 58,42 | 0,00 | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2.09 | 6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Ketersediaan Kendaraan Jabatan/dinas Dalam Kondisi Baik | Unit | | | | | 37,00 | 58.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-** | 0,00 | **0,00** | |
| 1 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang kondisi baik | Paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 15.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | % | | | | | 100,00 | 3.200,50 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kondisi baik | Paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 1.696.900,00 | 16.445,00 | 5,00 | 16.445,00 | 100,00 | 0,97 | 100,00 | 5,00 | 16.445 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **92,30** | **589,23** | **88,79** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | **486.011.695,141** | **427.234.747,105** | | **398.568.734,18** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)** | **60,24** | **162,51** | **56,11** | | | **407,94** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)** | **R** | **ST** | **R** | | | **ST** | **SR** | |
| **2** | **2** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 2 | **2** | **0.00** | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **%ib hmil y dpt ply ksht str, %ib hmil y dpt fslts ply ksht,%byi br lhr umr 0-28 hri y dpt ply ksht str,%Blit y brmr 0–59 bln y dpt ply ksht, %nk usi pndidkn dsr y dpt ply ksht str,%org brusi lbh dr 60 th y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit Hiprtnsi y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit DM y dpt ply ksht str,%ODG brt y dpt ply ksht str,%org trdg TBCy dpt ply ksht str,%prslin difslts ply ksht,%Blit y dpt ply ksht ssi str,Rso pksms trhdp jml pddk%org brusi 15-59 th y dpt ply ksht str, Rasio pksmas trhdp jml pddk** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | **2** | **2.01** | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Cakupan ketersediaanSarana, Prasarana dan AlkesUKP dan UKM Rujukan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2.01 | 1 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Tersedianya Fasilitas Kesehatan penunjang puskesmas | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 200.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.01 | 4 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Tersedianya rumah dinas bagi tenaga kesehatan di puskesmas | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 919.477,47 | 14.993,00 | 2,00 | 14.993,00 | 100,00 | 1,63 | 100,00 | 2,00 | 14.993 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.01 | 5 | Pengembangan Rumah Sakit | tersedianya rumah sakit yang memadai | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 10.000.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.01 | 6 | Pengembangan Puskesmas | Terlaksananya BLUD Puskesmas | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 246.638,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.01 | 8 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | tersedianya rumah sakit yang memadai | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 5.000.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.01 | 9 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Terlaksananya rehab puskesmas | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 17,00 | 34.010.565,61 | 2.269.886,56 | 16,94 | 2.203.234,59 | 99,67 | 6,48 | 97,06 | 16,94 | 2.203.235 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.01 | 9 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Terlaksananya rehabilitasi gedung PSC dan Pustu | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 750.932,00 | 231.697,01 | 2,00 | 231.656,498 | 100,00 | 30,85 | 99,98 | 2,00 | 231.656 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 2 | 2 | 2,01 | 10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Tersedianya pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2.01 | 12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Terpenuhinya sarana fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas, pustu dan poskesdes | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 1.234.184,99 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.01 | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Tersedianya sarana dan prasaraana kantor pelayanan yang memadai sesuai SPM, Tersedianya sarana dan prasarana kantor untuk puskesmas | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 6.970.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.01 | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Tersedianya sarana dan prasaraana kantor pelayanan yang memadai sesuai SPM, Tersedianya sarana dan prasarana kantor untuk puskesmas | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 492.998,52 | 7.126.486,23 | 2,00 | 4.023.868,59 | 66,67 | 816,20 | 56,46 | 2,00 | 4.023.869 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase ketersediaan alkes sesuai standar | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 70,00 | 7.398.085,50 | 10.426.585,87 | 70,00 | 9.590.501,41 | 100,00 | 129,63 | 91,98 | 70,00 | 9.590.501 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai sesuai standar | % | 12,00 | - | 0,00 | - | 90,00 | 8.900.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.01 | 15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Persentase pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai sesuai standar | % | 12,00 | - | 0,00 | - | 90,00 | 93.646,32 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.01 | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Persentase pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai sesuai standar | % | 12,00 | - | 0,00 | - | 90,00 | 3.000.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.01 | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Persentase pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai sesuai standar | % | 12,00 | - | 0,00 | - | 90,00 | 1.505.128,68 | 3.990.564,73 | 89,25 | 3.803.606,90 | 99,17 | 252,71 | 95,32 | 89,25 | 3.803.607 | 743,78 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.01 | 17 | Pengadaan Obat, Vaksin | Persentase pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai sesuai standar | % | 12,00 | - | 0,00 | - | 90,00 | 1.000.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.01 | 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Persentase pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai sesuai standar | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 90,00 | 2.289.874,39 | 5.009.205,00 | 90,00 | 3.217.331,05 | 100,00 | 140,50 | 64,23 | 90,00 | 3.217.331 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.01 | 18 | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai sesuai standar | % | 12,00 | - | 0,00 | - | 90,00 | 3.800.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 2 | 2 | 2.01 | 19 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 90,00 | 208.950,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | **2** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat , upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | persentase bumil anemi, persentase bumil kek, persentase bumil yang memiliki calon pendonor, Persentasi ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC terpadu minimal 4 kali | % | | | | | 39 | 48.980,71 | 83.926,90 | 21,32 | 43.124,90 | 54,67 | 88,04 | 51,38 | 21,32 | 43.125 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | persentase pengelolaan kesehatan jiwa dan NAPZA | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 30,00 | 500.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | persentase pengelolaan kesehatan jiwa dan NAPZA | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 30,00 | 500.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 76,00 | 1.863.393,95 | 313.118,00 | 4,35 | 11.900,00 | 5,73 | 0,64 | 3,80 | 4,35 | 11.900 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | persentase pengelolaan kesehatan jiwa dan NAPZA | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 30,00 | 500.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase bayi baru lahir mendapat IMD | % | | | | | 62 | 29.081,33 | 11.391,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 75,00 | 31.499,86 | 24.682,00 | 68,63 | 21.027,00 | 91,50 | 66,75 | 85,19 | 68,63 | 21.027 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase penjaringan anak sekolah kelas 1 dan kelas 7 | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 92,00 | 19.426,58 | 8.476,70 | 69,00 | 4.568,00 | 75,00 | 23,51 | 53,89 | 69,00 | 4.568 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkti | % | | | | | 30,00 | 31.499,57 | 19.954,00 | 10,00 | 3.979,00 | 33,33 | 12,63 | 19,94 | 10,00 | 3.979 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 55,00 | 11.821,43 | 9.375,52 | 45,83 | 6.094,20 | 83,33 | 51,55 | 65,00 | 45,83 | 6.094 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi | % | | | | | 20,00 | 120.998,53 | 19.999,88 | | 3.979,00 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 20,00 | 30.210,62 | 19.983,50 | 10,00 | 3.904,00 | 50,00 | 12,92 | 19,54 | 10,00 | 3.904 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | cakupan pelayanan kesehatan DM sesuai standar | % | | | | | 75 | 30.210,62 | 19.999,70 | 66,25 | 11.889,00 | 88,33 | 39,35 | 59,45 | 66,25 | 11.889 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | cakupan pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 75,00 | 41.999,90 | 19.999,80 | 71,25 | 16.604,80 | 95,00 | 39,54 | 83,02 | 71,25 | 16.605 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB Paru | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 80,00 | 42.000,00 | 99.883,71 | 80,00 | 99.081,10 | 100,00 | 235,91 | 99,20 | 80,00 | 99.081 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV/AIDS | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 92,00 | 24.232,52 | 9.375,72 | 23,00 | 2.174,00 | 25,00 | 8,97 | 23,19 | 23,00 | 2.174 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Persentase tanggap darurat pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana | % | | | | | 100,00 | 30.000,00 | 68.882,30 | 93,04 | 45.435,30 | 93,04 | 151,45 | 65,96 | 93,04 | 45.435 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | cakupan pemberian asi eksklusif | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 50,00 | 588.859,47 | 1.086.725,70 | 45,24 | 862.247,18 | 90,48 | 146,43 | 79,34 | 45,24 | 862.247 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 26.249,76 | 18.699,99 | 90,29 | 16.354,00 | 90,29 | 62,30 | 87,45 | 90,29 | 16.354 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan 5 pilar STBM | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 222.310,05 | 176.399,91 | 9,40 | 154.228,26 | 93,98 | 69,38 | 87,43 | 9,40 | 154.228 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Persentase keluarga/ rumah tangga ber PHBS | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 61,00 | 99.749,85 | 18.751,86 | 60,99 | 18.449,37 | 99,99 | 18,50 | 98,39 | 60,99 | 18.449 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Persentaase kelompok yang memanfaatkan TOGA dan akupresure | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 50,00 | 68.960,77 | 9.375,93 | 50,00 | 9.374,93 | 100,00 | 13,59 | 99,99 | 50,00 | 9.375 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Persentasi peringatan dini KLB yang di respon | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 92,00 | 35.553,13 | 5.592,00 | 91,51 | 4.416,00 | 99,47 | 12,42 | 78,97 | 91,51 | 4.416 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Terlaksananya pengendalian penyakit jiwa bagi ODMK | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 20,00 | 29.586,34 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | persentase pengelolaan kesehatan jiwa dan NAPZA | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 30,00 | 77.700,16 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 21 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | persentase kelompok yang melaksanakan UKGS dan UKGM | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 60,00 | 56.886,40 | 69.950,00 | 50,00 | 50.717,00 | 83,33 | 89,15 | 72,50 | 50,00 | 50.717 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 22 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Persentasi upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 19.500,00 | 54.990,00 | 0,00 | 6.272,00 | 0,00 | 32,16 | 11,41 | 0,00 | 6.272 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 23 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | cakupan pelayanan kesehatan penderita kusta sesuai standar | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 83,00 | 367.499,55 | - | 72,63 | 45.932,00 | 87,50 | 12,50 | 0,00 | 72,63 | 45.932 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 25 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Persentasi Universal Health Coverage - jaminan kesehatan masyarakat (UHC-JKM) | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 80,00 | 61.736.532,40 | 63.101.631,01 | 64,48 | 50.782.674,10 | 80,60 | 82,26 | 80,48 | 64,48 | 50.782.674 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 26 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Persentasi penemuan kasus penyalah gunaan NAPZA di Fasyankes dan sekolah | % | | | | | 30 | 36.749,48 | 4.999,83 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 27 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Persentasi peringatan dini KLB yang di respon | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 92,00 | 20.033,77 | 5.460,00 | 88,94 | 4.998,00 | 96,67 | 24,95 | 91,54 | 88,94 | 4.998 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 28 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Persentase pokja desa/ kelurahan sehat yang aktif | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 71,00 | 236.250,27 | 100.000,23 | 70,64 | 84.525,05 | 99,49 | 35,78 | 84,52 | 70,64 | 84.525 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 29 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas | % | | | | | 100 | 16.789.296,25 | 17.239.475,72 | 61,20 | 10.547.292,28 | 61,20 | 62,82 | 61,18 | 61,20 | 10.547.292 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | cakupan pelayanan kesehatan penderita kusta sesuai standar | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 83,00 | 7.500.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Persentase penerapan manajemen puskesmas sesuai standar | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 80,00 | 25.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Persentase puskesmas yang terakreditasi utama | % | | | | | 63 | 1.349.545,94 | 570.803,93 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Persentase pemberian imunisasi dasar lengkap | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 95,00 | 535.499,84 | 26.399,92 | 90,25 | 18.483,20 | 95,00 | 3,45 | 70,01 | 90,25 | 18.483 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Persentase penemuan kasus new emerging disease (COVID-19) | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 36.749,69 | 10.976,00 | 1,50 | 7.217,00 | 75,00 | 19,64 | 65,75 | 1,50 | 7.217 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 38 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | cakupan pelayanan kesehatan penderita kusta sesuai standar | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 83,00 | 500.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.02 | 39 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | persentase respon cepat layanan darurat (PSC) | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 368.178,90 | 217.282,98 | 2,00 | 210.235,80 | 100,00 | 57,10 | 96,76 | 2,00 | 210.236 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | **2** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi** | **Persentasi instansi/sarana kesehatan yg menerapkan sistem informasi berbasis teknologi (web)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2.03 | 1 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Persentase faskes yang menerapkan sistem informasi kesehatan berbasis IT | % | | | | | 100,00 | 711.254,29 | 4.225,21 | 100,00 | 4.205,21 | 100,00 | 0,59 | 99,53 | 100,00 | 4.205 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.03 | 1 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | cakupan pelayanan kesehatan penderita kusta sesuai standar | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 83,00 | 800.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.03 | 2 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | cakupan pelayanan kesehatan penderita kusta sesuai standar | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 83,00 | 250.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.03 | 2 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Persentase faskes yang menerapkan sistem informasi kesehatan berbasis IT | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 50,00 | 48.265,95 | 53.519,91 | 50,00 | 53.519,91 | 100,00 | 110,89 | 100,00 | 50,00 | 53.520 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.03 | 3 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | cakupan pelayanan kesehatan penderita kusta sesuai standar | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 83,00 | 380.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.03 | 3 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Persentase faskes yang menerapkan sistem informasi kesehatan berbasis IT | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 50,00 | 5.000.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | **2** | **2.04** | | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu layanan kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2.04 | 3 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentasi pengelolaan rumah sakit dan faskes lainnya sesuai standar | uskesma | 0,00 | - | 0,00 | - | 20,00 | 15.995,60 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.04 | 4 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Indeks kepuasan masyarakat/indeks kepuasan layanan | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 339.706,57 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 2.04 | 4 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | terlaksananya pelayanan rujukan kesehatan | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 339.706,57 | 139.554,39 | 88,33 | 117.391,30 | 88,33 | 34,56 | 84,12 | 88,33 | 117.391 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **73,85** | **71,37** | **63,90** | | **86.236.115** | **15,83** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **S** | **S** | **R** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 2 | **3** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | **3** | **2.02** | | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | **Persentasi pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 2 | 3 | 2.02 | 1 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sesuai standar | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 85,00 | 11.767,98 | 9.375,83 | 85,00 | 8.757,80 | 100,00 | 74,42 | 93,41 | 85,00 | 8.758 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 3 | 2.02 | 2 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Persentase pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sesuai standar | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 85,00 | 4.053.491,50 | 2.908.424,81 | 49,30 | 1.578.274,81 | 58,00 | 38,94 | 54,27 | 49,30 | 1.578.275 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 3 | 2.02 | 2 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sesuai standar | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 85,00 | 23.904,20 | 14.999,90 | 85,00 | 14.709,87 | 100,00 | 61,54 | 98,07 | 85,00 | 14.710 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | **Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota** | **persentasi praktek tenaga kesehatan yg dibina dan diawasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Persentase praktik tenaga kesehatan yang dibina dan di awasi sesuai standar | % | | | | | 40,00 | 10.500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan | % | | | | | 80,00 | 12.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | **3** | **2.02** | | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentasi tenaga kesehatan yg telah ditingkatkan kompetensinya** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 3 | 2.02 | 1 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai standar | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 75,00 | 311.716,41 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **86,00** | **58,30** | **81,91** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **R** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 2 | **4** | **0.00** | | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **Persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar,Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | **4** | **2.01** | | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | **Pesentasi apotek, toko obat, toko alkes, optikal dan Umot yg memiliki izin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 4 | 2.01 | 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan) | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 60,00 | 20.999,78 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 4 | 2.01 | 2 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan) | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 80,00 | 21.471,03 | 38.959,90 | 80,00 | 38.902,90 | 100,00 | 181,19 | 99,85 | 80,00 | 38.903 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | **4** | **2.02** | | **Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga** | **Persentasi PKRT yg duawasi dan bersertifikat laik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 4 | 2.02 | 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Persentase pengawasan toko alkes dan optic di kabupaten bulukumba | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 50,00 | 24.611,97 | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | **4** | **2.03** | | **Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga** | **Persentasi produksi pangan industri Rumah tangga yg duawasi dan bersertifikat laik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 4 | 2.03 | 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 50,00 | 122.559,08 | 121.390,10 | 46,91 | 103.436,10 | 93,81 | 84,40 | 0,00 | 46,91 | 103.436 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 2 | **4** | **2.04** | | **Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)** | **Persentasi TPM dan DAM yg diawasi dan bersertifikat laik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 4 | 2.04 | 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Persentasi sarana air minum yang di periksa sesuai standar | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 94,00 | 15.749,83 | 13.015,99 | 92,29 | 12.722,90 | 98,18 | 80,78 | 97,75 | 92,29 | 12.723 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | **4** | **2.05** | | **Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan** | **Persentasi pembinaan pd sentra nakanan jajanan dan pemberian stiker** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 4 | 2.05 | 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Persentasi tempat pengelolaan pangan yang memenuhi syarat sesuai standar | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 44,00 | 7.348,63 | 7.342,50 | 44,00 | 5.393,00 | 100,00 | 73,39 | 73,45 | 44,00 | 5.393 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | **4** | **2.06** | | **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | **Persentasi pengawasan post market pd produksi dan produk makanan minunan IRT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 4 | 2.06 | 1 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | persentasi pangan IRT yang memenuhi syarat | % | | | | | 100 | 77.986,56 | 292.287,50 | 100,00 | 268.241,80 | 100,00 | 343,96 | 91,77 | 100,00 | 268.242 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **98,40** | **152,74** | **72,56** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **S** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 2 | **5** | **0.00** | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Keluarga Ber PHBS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | **5** | **2.01** | | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **persentasi kelompok masyarakat di desa/kelurahan yg berpartisipasi dlm pembangunan kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 5 | 2.01 | 1 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persentasi desa kelurahan panrita siaga aktif purnama atau mandiri | desa/kel | | | | | 136 | 560.025,62 | 79.890,02 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | **5** | **2.02** | | **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **persentasi masyarakat ditempat kerja dan tempat umum yg ber PHBS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 5 | 2.02 | 1 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Meningkatnya pemanfaatan media promosi kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk ber PHBS | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 39,00 | 141.750,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentasi UKBM yg purnama atau mandiri** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 5 | 2.02 | 1 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Persentasi posyandu purnama dan mandiri | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 20,00 | 75.850,00 | 9.999,90 | 20,00 | 9.909,00 | 100,00 | 13,06 | 99,09 | 20,00 | 9.909 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **50,00** | **6,53** | **49,55** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **SR** | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 2 | **1** | **0.00** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra, Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan | Dokumrn | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 35.444,07 | 12.299,76 | 3,00 | 12.299,76 | 100,00 | 34,70 | 100,00 | 3,00 | 12.300 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan | Dokumrn | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 5.909,81 | 4.999,98 | 0,75 | 2.310,00 | 75,00 | 39,09 | 46,20 | 0,75 | 2.310 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan | Dokumrn | | | | | 10 | 38.321,54 | 1.378,41 | 10,00 | 1.378,20 | 100,00 | 3,60 | 99,98 | 10,00 | 1.378 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **% Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 2 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12 | 47.849.404,26 | 52.285.789,74 | 12,00 | 50.989.724,29 | 100,00 | 106,56 | 97,52 | 12,00 | 50.989.724 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12 | 21.965.757,00 | 24.134.979,40 | 3,00 | 22.572.537,39 | 25,00 | 102,76 | 93,53 | 3,00 | 22.572.537 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 642.468,75 | 563.579,97 | 100,00 | 538.198,35 | 100,00 | 83,77 | 95,50 | 100,00 | 538.198 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.02 | 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi; Jumlah jenis penatausahaan, | bulan | | | | | 12 | 97.650,00 | 90.000,00 | 12,00 | 90.000,00 | 100,00 | 92,17 | 100,00 | 12,00 | 90.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.02 | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun | Laporan | 0,00 | - | 0,00 | - | 1 | 7.349,30 | 9.155,46 | 1,00 | 9.155,40 | 100,00 | 124,58 | 100,00 | 1,00 | 9.155 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.02 | 5 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan Keuangan Dinas | Dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1 | 1.108,80 | 1.089,00 | 1,00 | 1.089,00 | 100,00 | 98,21 | 100,00 | 1,00 | 1.089 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.02 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang di susun | Laporan | | | | | 18 | 13.311,46 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.02 | 7 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran | Laporan | 0,00 | - | 0,00 | - | 4 | 8.312,22 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | **1** | **2.04** | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **terlaksananya pengelolaan administrasi retribusi yankes di puskesmas dan jaringannya** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 2.04 | 1 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Terlaksananya penyetoran retribusi pelayanan kesehatan ke kas Daerah | % | | | | | 100 | 383.673,94 | 377.687,43 | 100,00 | 344.635,68 | 100,00 | 89,83 | 91,25 | 100,00 | 344.636 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai standar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 2.05 | 3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terlaksananya pendataan dan pengelolaan adaministrasi kepegawaian | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100 | 7.075,64 | 1.396,23 | 100,00 | 1.396,20 | 100,00 | 19,73 | 100,00 | 100,00 | 1.396 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.05 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12 | 10.596,60 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.05 | 1 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah peraturan perundang-undangan yang di sosialisasikan | bulan | | | | | 10 | 10.279,06 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya pelayanan administrasi umum di instansi kesehatan, puskesmas dan jaringannya** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada dinas kesehatan dan UPT | Paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 24 | 10.499,75 | 11.287,10 | 24,00 | 11.287,10 | 100,00 | 107,50 | 100,00 | 24,00 | 11.287 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Ketersediaan Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor Sesuai Kebutuhan | Paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1 | 24.854,66 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan rumah tangga | Paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1 | 6.180,18 | 8.585,01 | 1,00 | 8.573,00 | 100,00 | 138,72 | 99,86 | 1,00 | 8.573 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Logistik Kantor | Paket | | | | | 1 | 43.663,05 | 38.028,65 | 1,00 | 38.010,84 | 100,00 | 87,05 | 99,95 | 1,00 | 38.011 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan dinas | Paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1 | 8.303,40 | 6.340,95 | 1,00 | 6.340,50 | 100,00 | 76,36 | 99,99 | 1,00 | 6.341 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | terpenuhinya kebutuhan makan minum tamu dinas kesehatan | Paket | | | | | 1 | 7.836,36 | 10.559,00 | 1,00 | 9.479,00 | 100,00 | 120,96 | 89,77 | 1,00 | 9.479 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | Kegiatan | | | | | 40 | 122.866,44 | 80.714,00 | 40,00 | 80.713,919 | 100,00 | 65,69 | 100,00 | 40,00 | 80.714 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **terlaksananya pengadaan kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas operasiobal dan pusk keliling serta ambulans** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 2.07 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya kendaraan dinas Perorangan dan operasional | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 3 | 986.477,27 | 490.000,00 | 3,00 | 489.150,90 | 100,00 | 49,59 | 99,83 | 3,00 | 489.151 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **tersedianya jasa penunjang pelayanan urusan pemerintahan bidang kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya sarana telpon air dan listrik dilingkup dinas kesehatan dan UPT | Paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 24 | 586.024,98 | 319.255,98 | 23,80 | 312.222,35 | 99,17 | 53,28 | 97,80 | 23,80 | 312.222 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor dinas kesehatan | Paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1 | 8.704,50 | 8.704,30 | 1,00 | 8.704,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 8.704 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | terpenuhinya jasa kebersihan dan administrasi kantor dinas kesehstan | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12 | 604.642,50 | 579.000,00 | 12,00 | 424.950,00 | 100,00 | 70,28 | 73,39 | 12,00 | 424.950 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan bidang kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 2 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan kepala dinas kesehatan sehingga tetap layak pakai | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100 | 12.075,00 | 13.988,78 | 100,00 | 9.898,75 | 100,00 | 81,98 | 70,76 | 100,00 | 9.899 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksanya pemeliharaan kendaraan dinas kesehatan sehingga tetap layak pakai | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100 | 161.534,57 | 165.703,25 | 100,00 | 164.978,02 | 100,00 | 102,13 | 99,56 | 100,00 | 164.978 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | **1** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.10 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 86.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,86 | 85.253.962,08 | 86,00 | 99,13 | 85,25 | 0,86 | 85.253.962 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 2.10 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 40.262,96 | 74.957,53 | 0,72 | 46.624,95 | 71,67 | 115,80 | 62,20 | 0,72 | 46.625 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **94,27** | **82,54** | **92,09** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **T** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **356.180.278,5** | **295.748.448,0** | | **249.825.453,071** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)** | **80,50** | **74,30** | **72,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)** | **T** | **S** | **S** | | | **SR** | **SR** | |
| **2** | **3** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | **1** | **0.00** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen Perencanaan dan pelaporan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | **1** | **2.01** | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA, laporan realiasi fisik dan keuangan, laporan evaluasi, laporan kinerja serta laporan keuangan Perangkat Daerah | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 221.594,42 | 77.394,00 | 98,82 | 76.353,00 | 98,82 | 34,46 | 98,65 | 98,82 | 76.353 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.01** | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan Semesteran, Akhir Tahun | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 134.099,89 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 3 | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen laporan keuangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | **1** | **2.02** | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan Semesteran, Akhir Tahun | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 7.888.730,03 | 7.513.364,42 | 12,00 | 7.145.526,48 | 100,00 | 90,58 | 95,10 | 12,00 | 7.145.526 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.02** | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Perentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 160.000,00 | 424.460,00 | 12,00 | 423.070,00 | 100,00 | 264,42 | 99,67 | 12,00 | 423.070 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.02** | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Peningkatan Kualitas Aparatur Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan Semesteran, Akhir Tahun | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 190.593,20 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.02** | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 20.035,00 | 8.253,30 | 1,00 | 8.253,20 | 100,00 | 41,19 | 100,00 | 1,00 | 8.253 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | **1** | **2.05** | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Latpim III | orang | | | | | 2 | 147.295,00 | 20.230,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.05** | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Meningkatnya kemampuan ASN DPUTR | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 20,00 | 196.074,89 | 14.760,00 | 20,00 | 12.024,75 | 100,00 | 6,13 | 81,47 | 20,00 | 12.025 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di adakan dan di pelihara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | **1** | **2.06** | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen listrik kantor | item | 0,00 | - | 0,00 | - | 8,00 | 10.953,35 | 3.410,00 | 8,00 | 3.410,00 | 100,00 | 31,13 | 100,00 | 8,00 | 3.410 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.06** | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makan dan minum | | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 166.017,54 | 10.224,00 | 1,00 | 10.224,00 | 100,00 | 6,16 | 100,00 | 1,00 | 10.224 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.06** | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | bulan | | | | | 12,00 | 48.906,00 | 9.000,00 | 12,00 | 9.000,00 | 100,00 | 18,40 | 100,00 | 12,00 | 9.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.06** | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terdistribusinya surat kedinasan PSDA, Jasa Komunikasi, Listrik dan air. Tersedia Jasa Perizinan Kendaraan, Jasa Keuangan, Tenaga Kebersihan, Peralatan Listrik dan Instalasi yang baik, Terlaksananya Penatausahaan SKPD, terlaksananya Pengadaan Kendaraan DInas/Operasional, Perlengkapan Gedung Kantor, Peralatan Gedung Kantor, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan Gedung kantor, Rehab sedang/Berat Gedung kantor | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 6.523,76 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.06** | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat koordinasi | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 292.298,28 | 161.450,00 | 12,00 | 156.206,40 | 100,00 | 53,44 | 96,75 | 12,00 | 156.206 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.08** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | **1** | **2.08** | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasioanal yang tersedia | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 40.194,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.08** | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | bulan | | | | | 12,00 | 20.125,20 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di adakan dan di pelihara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | **1** | **2.08** | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasioanal yang tersedia | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 364.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.08** | 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebeleur yang tersedia | unit | | | | | 20,00 | 26.670,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.08** | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor | unit | | | | | 3,00 | 50.116,70 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di adakan dan di pelihara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | **1** | **2.08** | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya biaya wifi dan listrik | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 192.057,90 | 126.412,20 | 12,00 | 107.744,08 | 100,00 | 56,10 | 85,23 | 12,00 | 107.744 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 3 | **1** | **2.08** | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan pembayaran honorarium kegiatan keuangan dan tersedianya dokumen LPJ Keuangan | kegiatan | | | | | 1,00 | 70.702,54 | 39.630,00 | 1,00 | 27.130,00 | 100,00 | 38,37 | 68,46 | 1,00 | 27.130 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di adakan dan di pelihara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | **1** | **2.09** | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya mobil jabatan | % | | | | | 100,00 | 147.291,57 | 51.670,00 | 100,00 | 19.560,35 | 100,00 | 13,28 | 37,86 | 100,00 | 19.560 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.09** | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Trbayarnya STNK Kendaraan Dinas/Operasional dan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 124.466,85 | 118.720,00 | 91,67 | 83.767,32 | 91,67 | 67,30 | 70,56 | 91,67 | 83.767 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.09** | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya bangunan gedung kantor | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 33.436,76 | 115.000,00 | 100,00 | 114.717,50 | 100,00 | 343,09 | 99,75 | 100,00 | 114.718 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.09** | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya banguna gedung kantor | % | | | | | 100,00 | 31.830,00 | 13.200,00 | 80,00 | 10.360,00 | 80,00 | 32,55 | 78,48 | 80,00 | 10.360 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 3 | **1** | **2.09** | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya bangunan pendukung gedung kantor | % | | | | | 100,00 | 5.368,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **91,44** | **70,81** | **80,89** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **S** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 0.0.0 | 2 | 0.00 | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **Meningkatnya penanganan terhadap bangunan SDA berupa Pengendali Banjir, Saluran pembawa, Irigasi, Embung serta Normalisasi Saluran Sungai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.0.0 | 2 | 2.01 | | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Meningkatnya Fungsi Jaringan Irigasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.0.0 | 2 | 2.01 | 4 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase terlaksananaya penyusunan pola rencana pengelolaan SDA WS Kewengangan Kabupaten | % | 448,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 519.633,86 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0.0.0 | 2 | 2.01 | 6 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Persentase terlaksananaya Pembangunan/Rehabilitasi Embung dan bangunan penampung air lainnya | % | 448,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 390.984,22 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0.0.0 | 2 | 2.01 | 9 | Pembangunan Tanggul Sungai | Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan Tanggul sungai | % | 448,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 250.000,00 | 972.537,55 | 100,00 | 850.904,45 | 100,00 | 340,36 | 87,49 | 100,00 | 850.904 | 22,32 | 0,00 | |
| 3 | 0.0.0 | 2 | 2.01 | 11 | Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | Terlaksananya Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 207.182,80 | 343.572,66 | 100,00 | 272.635,00 | 100,00 | 131,59 | 79,35 | 100,00 | 272.635 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0.0.0 | 2 | 2.01 | 18 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Perentase terlaksananya kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | % | 448,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 16.800.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0.0.0 | 2 | 2.01 | 46 | Normalisasi/Restorasi Sungai | Perentase terlaksananya kegiatan | % | 448,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 1.258.100,70 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0.0.0 | 2 | 2.01 | 54 | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir | Perentase terlaksananya kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 1.017.224,66 | 916.096,52 | 100,00 | 870.514,47 | 100,00 | 85,58 | 95,02 | 100,00 | 870.514 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0.0.0 | 2 | 2.01 | 60 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Perentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 178.199,70 | 229.690,00 | 100,00 | 110.492,00 | 100,00 | 62,00 | 48,10 | 100,00 | 110.492 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0.0.0 | 2 | 2.01 | 61 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | Trbgnnya & Trplihrnya Embng Penampung Air Lainnya Kwsan Kritis daerah Tangkapan sungai,danau serta keg reboisasi & revegetasi trlksananya Pemb pengend banjir trlksananya pmbersihn pngrukan sungai,terlaksananya pemb prasarana pngman pantai tanggul pmcah ombak,terssnnya DED Jar Irigasi | % | | | | | 100,00 | 32.999,79 | 23.820,00 | 100,00 | 7.235,80 | 100,00 | 21,93 | 30,38 | 100,00 | 7.236 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0.0.0 | 2 | 2.02 | | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Mempertahankan Fungsi dan Kondisi serta Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 3 | 0.0.0 | 2 | 2.02 | 8 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Perentase terlaksananya kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 1.878.143,56 | 1.806.010,00 | 100,00 | 869.414,60 | 100,00 | 46,29 | 48,14 | 100,00 | 869.415 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0.0.0 | 2 | 2.02 | 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Perentase terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | % | | | | | 100,00 | 7.457.607,69 | 6.601.488,47 | 100,00 | 5.385.096,60 | 100,00 | 72,21 | 81,57 | 100,00 | 5.385.097 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0.0.0 | 2 | 2.02 | 21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Persentase terlaksananaya operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 1.000.000,00 | 968.226,00 | 100,00 | 968.226,00 | 100,00 | 96,82 | 100,00 | 100,00 | 968.226 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0.0.0 | 2 | 2.02 | 28 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Perentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | % | | | | | 100,00 | 103.454,96 | 40.420,00 | 100,00 | 34.191,00 | 100,00 | 33,05 | 84,59 | 100,00 | 34.191 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **98,87** | **72,74** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **S** | | | **SR** | **SR** | |
| **3** | **0.1.0** | **3** | **0.00** | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **Persentase rumah tangga pengguna air bersih** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **0.1.0** | **3** | **2.01** | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.1.0 | 3 | 2.01 | 3 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang terbangun di Kawasan Perkotaan | Unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 90,00 | 9.250.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0.1.0 | 3 | 2.01 | 4 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang terbangun di Kawasan Perdesaan | Unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 90,00 | 5.435.917,01 | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0.1.0 | 3 | 2.01 | 5 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang direhab di kawasan perkotaan | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 9.000.000,00 | 542.820,00 | 1,00 | 489.750,50 | 100,00 | 5,44 | 0,00 | 1,00 | 489.751 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0.1.0 | 3 | 2.01 | 6 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang direhab di kawasan perdesaan | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 5.502.622,00 | 8.237.038,44 | 1,00 | 5.289.492,62 | 100,00 | 96,13 | 64,22 | 1,00 | 5.289.493 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0.1.0 | 3 | 2.01 | 11 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Derah dan Kelompok Maskayarakat (BOP PAMSIMAS) | SR | 0,00 | - | 0,00 | - | 150,00 | 750.000,00 | 487.780,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **66,67** | **33,86** | **21,41** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **S** | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 0.1.0 | 5 | 0.00 | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.1.0 | 5 | 2.01 | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Rumah Tangga Bersanitasi dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.1.0 | 5 | 2.01 | 3 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota | Jumlah Pembangunan air limbah domestik pada kawasan perkotaan | % | | | | | 80,35 | 1.691.087,00 | 4.829.108,00 | 80,35 | 4.494.748,00 | 100,00 | 265,79 | 93,08 | 80,35 | 4.494.748 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0.1.0 | 5 | 2.01 | 4 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | umlah Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah pada kawasan perkotaan | Unit | | | | | 2,00 | 10.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0.1.0 | 5 | 2.01 | 5 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | Jumlah Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah pada kawasan permukiman | Unit | | | | | 2,00 | 10.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 3 | 0.1.0 | 5 | 2.01 | 11 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | Jumlah Pembangunan Pengelolaan air limbah domestik pada kawasan Permukiman | Unit | | | | | 5,00 | 10.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **265,79** | **93,08** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| **3** | **5.0.0** | **6** | **0.00** | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **Panjang drainase dalam kondisi baik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **5.0.0** | **6** | **2.01** | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Penjang Talud yang tebangun** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **5.0.0** | **6** | **2.01** | 1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah dokumen rencana sistem drainase | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 50.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| **3** | **5.0.0** | **6** | **2.01** | 5 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Panjang Drainase yang terbangun | m | 0,00 | - | 0,00 | - | 3000,00 | 12.872.250,01 | 17.307.756,04 | 1599,90 | 8.697.384,85 | 53,33 | 67,57 | 50,25 | ##### | 8.697.385 | 0,00 | 0,00 | |
| **3** | **5.0.0** | **6** | **2.01** | 7 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | Panjang Drainase yang terbangun | m | 0,00 | - | 0,00 | - | 200,00 | 1.100.000,00 | 1.046.204,85 | 200,00 | 594.295,00 | 100,00 | 54,03 | 56,80 | 200,00 | 594.295 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **76,67** | **60,80** | **53,53** | | | **22,32** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **R** | **R** | | | **SR** | **SR** | |
| **3** | **5.0.0** | **6** | **0.00** | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **Panjang drainase dalam kondisi baik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **5.0.0** | **6** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota** | **Penjang Talud yang tebangun** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **5.0.0** | **6** | **2.01** | 1 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pembangunan Drainase Lingkungan,Capaian Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)Capaian pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 195,00 | 35.369.872,99 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **44,64** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **SR** | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 0.1.0 | 8 | 0.00 | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **Rasio Rumah yang ber IMB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.1.0 | 8 | 2.01 | | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | **Jumlah Bangunan Gedung di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0.1.0 | 8 | 2.01 | 1 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Rekomendasi IMB Yang terbit ( BOP IMB) | bulan | | | | | 12,00 | 213.779,40 | 79.760,00 | 12,00 | 77.983,95 | 100,00 | 36,48 | 97,77 | 12,00 | 77.984 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0.1.0 | 8 | 2.01 | 2 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Gedung Pemerintah yang terbangun | Unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 51.846.240,00 | 41.373.945,34 | 9,00 | 32.326.328,99 | 90,00 | 62,35 | 78,13 | 9,00 | 32.326.329 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **95,00** | **49,41** | **87,95** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **T** | | | **SR** | **SR** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 3 | 5.0.0 | 10 | 0.00 | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **Persentase panjang jalan kabupaten dan jembatan dalam kondisi baik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5.0.0 | 10 | 2.01 | | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | **Dokumen Leger jalan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5.0.0 | 10 | 2.01 | 3 | Pengelolaan Leger Jalan | Jumlah dokumen leger jalan | Dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 450.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 5.0.0 | 10 | 2.01 | 4 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Jumlah Dokumen survey kondisi jalan | Dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 850.000,00 | 362.040,00 | 2,00 | 303.740,00 | 100,00 | 35,73 | 83,90 | 2,00 | 303.740 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 5.0.0 | 10 | 2.01 | 5 | Pembangunan Jalan | Panjang jalan yang terbangun | KM | 0,00 | - | 0,00 | - | 13,00 | 22.275.011,74 | 3.806.688,22 | 12,00 | 3.340.281,56 | 92,31 | 15,00 | 87,75 | 12,00 | 3.340.282 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 5.0.0 | 10 | 2.01 | 8 | Rekonstruksi Jalan | Panjang jalan yang direkonstruksi | KM | 0,00 | - | 0,00 | - | 8,00 | 12.475.494,00 | 19.923.472,79 | 7,27 | 17.979.617,82 | 90,91 | 144,12 | 90,24 | 7,27 | 17.979.618 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 5.0.0 | 10 | 2.01 | 9 | Rehabilitasi Jalan | Panjang jalan yang direhabilitasi | KM | 0,00 | - | 0,00 | - | 7,00 | 10.955.000,00 | 7.019.241,64 | 6,30 | 5.686.142,02 | 90,00 | 51,90 | 81,01 | 6,30 | 5.686.142 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 5.0.0 | 10 | 2.01 | 10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang jalan yang dipelihara | KM | 0,00 | - | 0,00 | - | 7,00 | 11.000.000,00 | 78.147.345,60 | 6,80 | 74.840.301,86 | 97,14 | 680,37 | 95,77 | 6,80 | 74.840.302 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 5.0.0 | 10 | 2.01 | 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang jalan yang dipelihara | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 27,00 | 3.500.000,00 | 1.015.186,97 | 24,00 | 893.914,17 | 88,89 | 25,54 | 88,05 | 24,00 | 893.914 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 5.0.0 | 10 | 2.01 | 12 | Pembangunan Jembatan | Jumlah jembatan yang dibangun | Unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 6.773.662,39 | 459.370,00 | 5,00 | 221.882,50 | 50,00 | 3,28 | 48,30 | 5,00 | 221.883 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 5.0.0 | 10 | 2.01 | 18 | Rehabilitasi Jembatan | Jumlah Jembatan yang direhabilitasi | Unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 1.800.000,00 | 860.775,00 | 3,00 | 613.650,00 | 100,00 | 34,09 | 71,29 | 3,00 | 613.650 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **88,66** | **123,75** | **80,79** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 5.0.0 | 11 | 0.00 | | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **Jumlah alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5.0.0 | 11 | 2.01 | | **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** | **Jumlah pelaku jasa konstruk yang diberdayakan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5.0.0 | 11 | 2.01 | 4 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah tenaga kerja trampil yang tersedia,Jumlah tenaga trampil yang sertifikasi | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 50.000,00 | 25.235,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 5.0.0 | 11 | 2.02 | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah alat dan bahan yang dibeli serta jumlah dok uji bahan dan material yang dihasilkan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5.0.0 | 11 | 2.02 | 7 | Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan | Terbelinya alat uji beton,Terbitnya dokumen uji material | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 61,00 | 47.000,00 | 74.946,30 | 53,68 | 65.654,00 | 88,00 | 139,69 | 87,60 | 53,68 | 65.654 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **44,00** | **34,92** | **43,80** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **SR** | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 5.0.0 | 12 | 0.00 | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **Rasio RTH per satuan luas luas wilayah perkotaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5.0.0 | 12 | 2.01 | | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota** | **Jumlah dok Kebijakan penataan ruang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5.0.0 | 12 | 2.01 | 3 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | tersedianya dokumen Kebijakan penataan ruang,Tersedianya persetujuan subtansi RTRW | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 377.697,00 | 96.262,00 | 100,00 | 56.084,62 | 100,00 | 14,85 | 58,26 | 100,00 | 56.085 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 5.0.0 | 12 | 2.04 | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **tersedianya dokumen Kebijakan penataan ruang,Tersedianya persetujuan subtansi RTRW** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5.0.0 | 12 | 2.04 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Frekuensi pengawasan yang dilaksanakan | kali | | | | | 12 | 55.960,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 5.0.0 | 12 | 2.04 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Frekuensi koordinasi TKPRD yang dilaksanakan | kali | | | | | 12 | 41.960,00 | 32.486,00 | 12,00 | 29.926,19 | 100,00 | 71,32 | 92,12 | 12,00 | 29.926 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **43,08** | **75,19** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **S** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | **245.446.466,37** | **206.336.501,28** | | **173.577.235,634** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)** | **83,46** | **72,04** | **67,82** | | | **3,72** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)** | **T** | **S** | **S** | | | **SR** | **SR** | |
| 4 | 0.1.03.01.00 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 0.00 | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, SAKIP, LAKIP. Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, LPPD, Laporan Triwulan, Laporan Realisasi.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | penyusunan Renja, Renstra, SAKIP, Rencana Aksi, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Laporan SPM, Laporan SPIP, LPPD dan LKPj, Laporan Realisasi serta Program Kerja dan Money OPD | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 30,00 | 58.439,284 | 41.254,00 | 30,00 | 41.019,20 | 100,00 | 70,19 | 99,43 | 30,00 | 41.019 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersusunnya Dokumen RKASKPD, DPA-SKPD, RKA-SKPD Perubahan, dan DPA-SKPD Perubahan | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 64.909,400 | 38.050,11 | 4,00 | 36.722,00 | 100,00 | 56,57 | 96,51 | 4,00 | 36.722 | 0,00 | 0,00 | |
| **4** | **0.1.0** | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum,Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | bulan | | | | | 12 | 4.061.079,919 | 3.181.315,66 | 9,24 | 2.388.440,36 | 77,00 | 58,81 | 75,08 | 9,24 | 2.388.440 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Jasa Administrasi Keuangan ASN yang Terbayarkan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12 | 268.949,250 | 145.170,00 | 12,00 | 132.240,00 | 100,00 | 49,17 | 91,09 | 12,00 | 132.240 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan SKPD | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12 | 189.630,000 | 103.740,00 | 12,00 | 100.560,00 | 100,00 | 53,03 | 96,93 | 12,00 | 100.560 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 2.02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1 | 5.448,800 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| **4** | **0.1.0** | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah ASN yang Mengikuti Diklatpim dan Bimbingan Teknis** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang Mengikuti Latpim | orang | | | | | 3 | 52.386,000 | 22.125,00 | 3,00 | 22.125,00 | 100,00 | 42,23 | 100,00 | 3,00 | 22.125 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek | orang | | | | | 3 | 25.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| **4** | **0.1.0** | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 5.968,850 | 5.055,50 | 12,00 | 5.045,25 | 100,00 | 84,53 | 99,80 | 12,00 | 5.045 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 417.950,000 | 49.761,10 | 7,20 | 16.960,00 | 60,00 | 4,06 | 34,08 | 7,20 | 16.960 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 26.000,000 | 4.998,65 | 12,00 | 4.984,40 | 100,00 | 19,17 | 99,71 | 12,00 | 4.984 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor dan Makan dan Minum Tamu Serta Rapat yang Tersedia | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 100.000,000 | 64.734,00 | 12,00 | 64.604,10 | 100,00 | 64,60 | 99,80 | 12,00 | 64.604 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Cetak Penggandaan yang Tersedia | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 11.348,410 | 10.000,32 | 12,00 | 9.975,00 | 100,00 | 87,90 | 99,75 | 12,00 | 9.975 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Biaya Rapat Kordinasi dan Konsultasi yang Terlaksanakan | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 32,00 | 200.000,000 | 96.166,00 | 32,00 | 95.954,85 | 100,00 | 47,98 | 99,78 | 32,00 | 95.955 | 0,00 | 0,00 | |
| **4** | **0.1.0** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 2.08 | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia | Unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 513.850,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 2.08 | 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang Tersedia | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 500.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| **4** | **0.1.0** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 71.700,000 | 71.700,00 | 12,00 | 46.190,13 | 100,00 | 64,42 | 64,42 | 12,00 | 46.190 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terjaganya kebersihan kantor,Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 24.000,000 | 24.000,00 | 11,04 | 22.000,00 | 92,00 | 91,67 | 91,67 | 11,04 | 22.000 | 0,00 | 0,00 | |
| **4** | **0.1.0** | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional,Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 70.049,150 | 41.444,00 | 12,00 | 41.192,73 | 100,00 | 58,81 | 99,39 | 12,00 | 41.193 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0.1.0 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 24.200,000 | 24.200,00 | 12,00 | 23.640,00 | 100,00 | 97,69 | 97,69 | 12,00 | 23.640 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **95,56** | **59,43** | **90,32** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **R** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| **4** | **0.1.0** | **2** | **0.00** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **Persentase rumah layak Huni dan kawasan kumuh** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| **4** | **0.1.0** | **2** | **2.01** | | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen/Database Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.1.0 | 2 | 2.01 | 1 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | jumlah dokumen perumahan rawan bencana dan yang terkena relokasi | Dokumen | | | | | 1,00 | 99.299,750 | 98.049,98 | 1,00 | 91.509,75 | 100,00 | 92,16 | 93,33 | 1,00 | 91.510 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0.1.0 | 2 | 2.01 | | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.1.0 | 2 | 2.01 | 1 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah korban bencana yang direhab | Dokumen | | | | | 1,00 | 5.000,000 | 142.690,40 | 0,33 | 3.839,90 | 33,33 | 76,80 | 2,69 | 0,33 | 3.840 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0.1.0 | 2 | 2.01 | 2 | Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlad Dokumen/DED rumah korban bencana dan yang terkena relokasi | Dokumen | | | | | 1,00 | 5.000,000 | 45.060,00 | 0,75 | 7.750,05 | 75,00 | 155,00 | 17,20 | 0,75 | 7.750 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0.1.0 | 2 | 2.01 | 4 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah rumah Bagi Korban Bencana yang Terbangun | Dokumen | | | | | 1,00 | 5.000,000 | 140.000,80 | 0,50 | 3.600,00 | 50,00 | 72,00 | 2,57 | 0,50 | 3.600 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **64,58** | **98,99** | **28,95** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **R** | **ST** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| **4** | **0.1.0** | **3** | **0.00** | | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **Terlaksananya Program Permukiman dan Permukiman Kumuh** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **0.1.0** | **3** | **2.02** | | **Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha** | **Jumlah Dokumen dan database Penetapan lokasi permukiman kumuh** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.1.0 | 3 | 2.02 | 1 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen penetapan lokasi perumahan dan permukiman Kumuh | Dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 99.008,800 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0.1.0 | 3 | 2.02 | 2 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Perencanaan dan rekomendasi Pencegahan Tumbuh kembang Permukiman Kumuh | Dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 48.928,950 | 587.020,00 | 1,00 | 583.109,10 | 100,00 | 1191,75 | 99,33 | 1,00 | 583.109 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0.1.0 | 3 | 2.02 | 3 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | Jumlah Pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 2.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| **4** | **0.1.0** | **3** | **2.03** | | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha** | **Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.1.0 | 3 | 2.03 | 2 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Database Rumah Layah huni,Tersedianya Rumah Layak huni untuk pencegahan tumbuh kembang permukiman Kumuh(100 Unit) | Unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 1.834.570,000 | 2.489.711,20 | 87,50 | 2.394.593,20 | 87,50 | 130,53 | 96,18 | 87,50 | 2.394.593 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0.1.0 | 3 | 2.03 | 6 | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | Terwujudnya pelaksanaan pembangunan Pemugaran Permukiman Kumuh | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 25,00 | 11.712.180,000 | 10.000.613,79 | 24,44 | 8.500.627,43 | 97,75 | 72,58 | 85,00 | 24,44 | 8.500.627 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **95,08** | **464,95** | **93,50** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| **4** | **0.1.0** | **5** | **0.00** | | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **0.1.0** | **5** | **2.01** | | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | **Jumlah Dokumen Perencanaan dan Ketersediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum Perumahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.1.0 | 5 | 2.01 | 2 | Jumlah PSU Perumahan yang terbangun dan jumlah sarana prasarana yang terpelihara | Tersedianya Prasarana sarana dan utilitas umum di perumahan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 364.797,000 | 297.797,10 | 11,73 | 261.612,30 | 97,75 | 71,71 | 87,85 | 11,73 | 261.612 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **97,75** | **71,71** | **87,85** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **S** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | **20.866.693,563** | **17.724.657,61** | | **14.898.294,747** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)** | **88,24** | **173,77** | **75,16** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)** | **T** | **ST** | **S** | | | **SR** | **SR** | |
| **1** | **5** | **0.0.0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| **1** | **5** | **0.0.0** | **0.00** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **5** | **0.0.0** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 0.0.0 | 2.01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Renja,Renja Perubahan,Renstra RKA, DPA dan Honorarium Operator | bulan | | | | | 12 | 35.680,000 | 40.822,000 | 12,00 | 37.821,94 | 100,00 | 106,00 | 92,65 | 12,00 | 37.822 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 5 | 0.0.0 | 2.01 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen evaluasi perangkat daerah Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV dan Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 4 | 16.104,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 5 | 0.0.0 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN dan adanya Transparansi dan AKuntabilitas Satpol.PP dan Damkar Terpenuhinya Pelayanan Adminsitrasi Umum Satpol.PP dan Damkar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 0.0.0 | 2.02 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | bulan | | | | | 12 | 6.282.207,785 | 4.672.432,966 | 12,00 | 4.243.413,80 | 100,00 | 67,55 | 90,82 | 12,00 | 4.243.414 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 0.0.0 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 1.423.768,283 | 1.226.201,654 | 12,00 | 1.078.643,15 | 100,00 | 75,76 | 87,97 | 12,00 | 1.078.643 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 0.0.0 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | terlaksananya penatausahaan pengujian verufikasi SKPD | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 168.220,000 | 147.710,000 | 12,00 | 144.810,00 | 100,00 | 86,08 | 98,04 | 12,00 | 144.810 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 5 | 0.0.0 | 2.02 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12 | 102.800,000 | 68.280,000 | 12,00 | 65.939,00 | 100,00 | 64,14 | 96,57 | 12,00 | 65.939 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 5 | 0.0.0 | 2.02 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1 | 4.923,000 | 4.921,000 | 1,00 | 4.921,00 | 100,00 | 99,96 | 100,00 | 1,00 | 4.921 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 5 | 0.0.0 | 2.02 | | **Administrasi Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah** | **Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN dan adanya Transparansi dan AKuntabilitas Satpol.PP dan Damkar Terpenuhinya Pelayanan Adminsitrasi Umum Satpol.PP dan Damkar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 0.0.0 | 2.02 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | bulan | | | | | 12 | 11.460,000 | 11.460,000 | 12,00 | 11.460,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 12,00 | 11.460 | 0,00 | 0,00 | |
| **5** | **0.0.0** | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0.0.0 | 1 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur penanggulangan bencana,Tersedianya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | orang | | | | | 5 | 22.990,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| **1** | **5** | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terpenuhinya Pelayanan Adminsitrasi Umum Satpol.PP dan Damkar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0.0.0 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen penerangan kantor | Paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 3.496,049 | 971,250 | 1,00 | 971,25 | 100,00 | 27,78 | 100,00 | 1,00 | 971 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 0.0.0 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu,Tersedianya Alat Tulis Kantor | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 58.242,750 | 31.137,650 | 12,00 | 31.137,65 | 100,00 | 53,46 | 100,00 | 12,00 | 31.138 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) Satpol.PP dan Damkar | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12 | 28.495,600 | 28.913,600 | 12,00 | 28.912,20 | 100,00 | 101,46 | 100,00 | 12,00 | 28.912 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Cetak dan Penggandaan Satpol.PP dan Damkar | Bulan | | | | | 12 | 9.498,730 | 9.525,010 | 12,00 | 9.524,81 | 100,00 | 100,27 | 100,00 | 12,00 | 9.525 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedainya makan minum tamu Satpol.PP dan Damkar | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12 | 3.386,000 | 3.317,100 | 12,00 | 3.317,10 | 100,00 | 97,97 | 100,00 | 12,00 | 3.317 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 0.0.0 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 180.866,000 | 64.573,000 | 12,00 | 64.155,45 | 100,00 | 35,47 | 99,35 | 12,00 | 64.155 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya koordinasi tingkat Provinsi dan Pusat | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12 | 77.900,000 | 43.540,000 | 12,00 | 43.540,00 | 100,00 | 55,89 | 100,00 | 12,00 | 43.540 | 0,00 | 0,00 | |
| **1** | **5** | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terpenuhinya Pelayanan Adminsitrasi Umum Satpol.PP dan Damkar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 1 | 5 | 1 | 02.07 | 7 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan | **unit** | 0,00 | | 0,00 | | **3** | 31.538,430 | 9.839,500 | 3,00 | 9.839,50 | 100,00 | 31,20 | 100,00 | 3,00 | 9.840 | 0,00 | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebeleur Satpol.PP dan Damkar Kursi dan Meja | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 7 | 11.979,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | .0.00 | 1 | 2.07 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya peralatan gedung kantor | unit | | | | | 3 | 27.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| **1** | **5** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya tagihan listrik dan telpon Satpol.PP dan Damkar | bulan | | | | | 12 | 47.613,600 | 43.457,760 | 12,00 | 41.308,18 | 100,00 | 86,76 | 95,05 | 12,00 | 41.308 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | .0.00 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | bulan | | | | | 12,00 | 32.688,000 | 32.328,000 | 12,00 | 25.096,51 | 100,00 | 76,78 | 77,63 | 12,00 | 25.097 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | .0.00 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya barang dan jasa kebersihan kantor | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 32.659,250 | 20.659,250 | 12,00 | 20.659,25 | 100,00 | 63,26 | 100,00 | 12,00 | 20.659 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Petugas Kebersihan dan alat kebersihan dan bahan pembersih serta Honoaraium PPTK dan Staf PPTK | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12 | 11.394,000 | 1.845,600 | 12,00 | 1.845,60 | 100,00 | 16,20 | 100,00 | 12,00 | 1.846 | 0,00 | 0,00 | |
| **1** | **5** | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpenuhinya Pelayanan Adminsitrasi Umum Satpol.PP dan Damkar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya dan terbayarnya perizinan Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | | | | | 1 | 10.000,000 | 7.500,000 | 1,00 | 7.500,00 | 100,00 | 75,00 | 100,00 | 1,00 | 7.500 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasinal dan terbayarnya STNK | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 12 | 64.250,000 | 295.310,000 | 12,00 | 295.304,50 | 100,00 | 459,62 | 100,00 | 12,00 | 295.305 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | .0.00 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas/operasional | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 13,00 | 97.080,000 | 49.930,000 | 13,00 | 49.433,50 | 100,00 | 50,92 | 99,01 | 13,00 | 49.434 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | .0.00 | 1 | 2.09 | 1 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 4.990,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | .0.00 | 1 | 2.09 | 1 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 10.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | .0.00 | 1 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 3.660,000 | 5.280,000 | 1,00 | 5.280,00 | 100,00 | 144,26 | 100,00 | 1,00 | 5.280 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Terpeliharanya Aset tetap Satpol.PP dan Damkar Printer,AC dan Komputer/Laptop | unit | | | | | 6 | 3.450,000 | 4.790,000 | 6,00 | 4.790,00 | 100,00 | 138,84 | 100,00 | 6,00 | 4.790 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **92,28** | **97,38** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| **1** | **5** | **0.0.0** | **0.00** | | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **5** | **0.0.0** | **2.01** | | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Terciptanya situasi yang aman dan tentram serta kondusif** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 0.0.0 | 2.01 | | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Terciptanya situasi yang kondusif atas gangguan ketertiban umum, terbayarnya Gaji Non PNS Anggota Satpol PP dan Honorarium PPTK dan Sataf PPTK | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 2.565.720,000 | 2.655.660,000 | 12,00 | 2.646.660,00 | 100,00 | 103,15 | 99,66 | 12,00 | 2.646.660 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 5 | 0.0.0 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Adanya singkronisasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui HUT Satpol PP tingkat Provinsi | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 53.920,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 5 | 0.0.0 | 2.01 | | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Adanya singkronisasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui HUT Satpol PP tingkat Provinsi | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 15.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| **1** | **5** | **0.0.** | **2.02** | | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | **Terciptanya masyarakat yang taat aturan kawasan tanpa rokok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 0.0. | 2.02 | | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten/Kota, Sosialisasi dan Operasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan makan minum Operasi Penegakan Perda Lainnya, Operasi Trantibum, dan Pengamanan Lainnya. | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 54.816,000 | 52.758,110 | 12,00 | 50.924,30 | 100,00 | 92,90 | 96,52 | 12,00 | 50.924 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 5 | 0.0. | 2.02 | | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten/Kota, Sosialisasi dan Operasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan makan minum Operasi Penegakan Perda Lainnya, Operasi Trantibum, dan Pengamanan Lainnya. | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 383.724,570 | 407.481,300 | 12,00 | 401.814,65 | 100,00 | 104,71 | 98,61 | 12,00 | 401.815 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **100,26** | **98,26** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| **5** | **.0.0** | **3** | **0.00** | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **Persentase jumlah aparatur yang mengikuti tanggap bencana (Fasilitasi Petugas Reviter dan Tsunami)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **.0.0** | **3** | **2.01** | | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | **Jumlah yang mengikuti pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | .0.0 | 3 | 2.01 | 2 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah Fasilitasi Petugas Reviter dan sunami | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 80.000,000 | 29.700,000 | 12,00 | 28.779,50 | 100,00 | 35,97 | 96,90 | 12,00 | 28.780 | 0,00 | 0,00 | |
| **5** | **.0.0** | **3** | **2.02** | | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **Rasio mitigasi dan pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan penanggulangan bencana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **5.0.** | **3** | **2.02** | **1** | Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota | fasilitasi petugas reviter dan sunami | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 427.500,000 | 283.160,000 | 9,00 | 282.987,00 | 75,00 | 66,20 | 99,94 | 9,00 | 282.987 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | .0.0 | 3 | 2.02 | 1 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Rasio mitigasi dan pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan penanggulangan bencana | ecamata | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 15.000,000 | 69.478,500 | 8,44 | 58.605,75 | 84,35 | 390,71 | 84,35 | 8,44 | 58.606 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | .0.0 | 3 | 2.02 | 3 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Rasio mitigasi dan pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan penanggulangan bencana | set | 0,00 | - | 0,00 | - | 8,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | .0.0 | 3 | 2.02 | 7 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Terlaksananya fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Terlaksananya identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana pasca bencana | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 327.321,288 | 14.031.144,000 | 12,00 | 14.027.920,07 | 100,00 | 4285,67 | 99,98 | 12,00 | 14.027.920 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | .0.0 | 3 | 2.02 | 8 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Terselenggaranya pelatihan tanggap darurat bencana bagi TRC dan Relawan Bencana | | | | | | | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| **5** | **.0.0** | **3** | **2.03** | | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **Rasio ketersediaan peralatan dan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | .0.0 | 3 | 2.03 | 2 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Tersedianya pos siaga dan tanggap darurat bencana | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 678.917,700 | 431.936,000 | 12,00 | 421.969,25 | 100,00 | 62,15 | 97,69 | 12,00 | 421.969 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | .0.0 | 3 | 2.03 | 4 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Terlaksananya mobilisasi/operasionalisasi logistik bencana | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 40.684,500 | 18.781,000 | 12,00 | 17.893,00 | 100,00 | 43,98 | 95,27 | 12,00 | 17.893 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **93,23** | **814,11** | **95,69** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| **1** | **5** | **0.0.** | **0.00** | | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **Tingkat waktu tanggap (response time rate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| **1** | **5** | **0.0.** | **2.01** | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Sarana dan Prasarana Penangulangan Kebakaran yang siap Pakai Terpenuhinya pelayanan pencegahan, pengendalian kebakaran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 0.0. | 2.01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaskanayan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota dan tersedianya makan minum Posko Damkar | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 698.610,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 5 | 1.0 | 2.01 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terakomodirnya penanganan kebakaran dalam daerah/kabupaten/kota serta terbayarnya Gaji Non PNS Petugas Pemadam Kebakaran dan Tersedianya Honor PPTK/Staf PPTK | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 2.893.320,000 | 3.213.660,000 | 12,00 | 3.209.160,00 | 100,00 | 110,92 | 99,86 | 12,00 | 3.209.160 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 5 | 0.0. | 2.01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Tersedianya Pengadaan Sarana dan prasarana pemadam kebakaran | buah | 0,00 | - | 0,00 | - | 20,00 | 45.870,000 | 45.670,000 | 17,50 | 39.030,00 | 87,50 | 85,09 | 85,46 | 17,50 | 39.030 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 5 | 0.0. | 2.01 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Tersedianya Pengadaan Sarana dan prasarana pemadam kebakaran | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 20.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| **1** | **5** | **0.0.** | **2.02** | **Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran** | **Sarana dan Prasarana Penangulangan Kebakaran yang siap Pakai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 0.0. | 2.02 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Tersedainya sarana dan prasarana Perawatan Kendaraan Dinas Operasional | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 225.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **93,75** | **98,00** | **92,66** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **17.343.744,54** | **28.064.174,25** | | **27.415.367,905** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)** | **96,74** | **276,16** | **96,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| **1** | **6** | **0.0.** | **0.00** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **6** | **0.0.** | **0.00** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **Persentase Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **6** | **0.0.** | **2.03** | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Potensi Pengetahuan dan Keterampilan sera Jumlah Kelembagaan Sosial yang mendapatkan bantuan UEP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 0.0. | 2.03 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pendamping SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) yang Mendapatkan Peningkatan Potensi dan Intensif | bulan | | | | | 12 | 277.846,000 | 154.779,900 | 12,00 | 154.779,55 | 100,00 | 55,71 | 100,00 | 12,00 | 154.780 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0. | 2.03 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mendapatkan peningkatan potensi | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 100 | 40.000,000 | 38.500,000 | 100,00 | 38.500,00 | 100,00 | 96,25 | 100,00 | 100,00 | 38.500 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0. | 2.03 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Karang Taruna yang Mendapatkan Bantuan UEPjumlah karang taruna yang mendapatkan peningkatan potensiJumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang Mendapatkan Bantuan UEP | orang | | | | | 130 | 45.069,000 | 50.664,800 | 129,95 | 50.645,80 | 99,96 | 112,37 | 99,96 | 129,95 | 50.646 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0. | 2.03 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Visit Home) | orang | | | | | 10 | 12.000,000 | 7.740,000 | 9,67 | 7.441,94 | 96,67 | 62,02 | 96,15 | 9,67 | 7.442 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **99,16** | **81,59** | **99,03** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **T** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| **1** | **6** | **0.0.0** | **0.00** | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **6** | **0.0.0** | **2.01** | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | **Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.01 | | Penyediaan Permakanan | Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Bantuan PermakananJumlah Gelandangan Pengemis Terlantar yang Mendapatkan Bantuan PermakananJumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Bantuan PermakananJumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Bantuan Permakanan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 60.000,000 | 270.116,100 | 12,00 | 269.433,10 | 100,00 | 449,06 | 99,75 | 12,00 | 269.433 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.01 | | Penyediaan Sandang | Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Bantuan Pakaian | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 55.290,900 | 8.512,400 | 77,84 | 6.625,80 | 77,84 | 11,98 | 77,84 | 77,84 | 6.626 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 4 | 2,01 | 3 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Laansia Terlantar yang Mendapatkan Bantuan Perbaikan rumahJumlah Lanjut Usia Produktif yang Mendapatkan Bantuan UEPJumlah Penyandang Disabilitas Produktif yang Mendapatkan Bantuan UEPJumlah penyandang disabilitas yang mendapat alat bantu (Kursi Roda Alat Bantu Dengar Tongkat dll) | orang | | | | | 130,00 | 75.000,000 | 198.283,900 | 129,97 | 198.121,40 | 99,98 | 264,16 | 99,92 | 129,97 | 198.121 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.01 | | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Pendamping Disabilitas Lansia Terlantar dan Anak Terlantar yang Mendapatkan Bimbingan | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 30.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.01 | | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Penyandang Disabilitas Lansia Terlantar dan Anak Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rujukan ke Fasilitas Rehabilitasi Sosial | bulan | | | | | 12 | 30.000,000 | 9.850,000 | 12,00 | 9.814,75 | 100,00 | 32,72 | 99,64 | 12,00 | 9.815 | 0,00 | 0,00 | |
| **1** | **6** | **0.0.0** | **2.02** | | **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | **Tersedianya bantuan alat bantu usaha berupa bantuan UEP dan KUBE bagi PMKS (fakir miskin, korban perdagangan perempuan dan ABH, dan eks penyandang penyakit sosial) bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.02 | | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Pekerja Migran yang Mendapatkan Bantuan UEPJumlah Wanita Rawan sosial yang Menerima Bantuan UEP | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 45.000,000 | 49.950,000 | 10,00 | 49.937,55 | 99,98 | 110,97 | 99,98 | 10,00 | 49.938 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.02 | | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Masyarakat anak berhadapan dengan hukum pelajar wanita rawan sosial ekonomi yang mendapatkan bimbingan fisik mental spritual dan sosial terakit penanggulangan napza | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 15,00 | 30.000,000 | 14.999,500 | 12,39 | 12.393,00 | 82,62 | 41,31 | 82,62 | 12,39 | 12.393 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.02 | | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Penyandang Disabilitas Lansia Terlantar dan Anak Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rujukan ke Fasilitas Rehabilitasi Sosial | bulan | | | | | 12 | 32.000,000 | 14.631,000 | 12,00 | 13.923,30 | 100,00 | 43,51 | 95,16 | 12,00 | 13.923 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **82,55** | **119,21** | **81,86** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| **1** | **6** | **0.0.0** | **0.00** | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **Persentase Peningkatan penanganan anak terlantar dan pembinaan panti asuhan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **6** | **0.0.0** | **2.01** | | **Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar** | **Jumlah layanan penjangkauan, rujukan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar yang tersedia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.01 | | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | Jumlah anak Terlantar yang Mendapatkan Penjangkauan dan Pemeliharaan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 15.000,000 | 15.000,000 | 12,00 | 14.947,60 | 100,00 | 99,65 | 99,65 | 12,00 | 14.948 | 0,00 | 0,00 | |
| **1** | **6** | **0.0.0** | **2.02** | | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Data PMKS yang Valid dan Jumlah Pemberian Bantuan Sosial yang diberikan pada PMKS/PPKS** | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pendamping dan Operator yang Memperoleh Biaya Operasional Pendataan dan Pengelolaan Data (validasi Data DTKSPMKSPBI BPJS Kesehatan) dan Pelabelan Penerimaan BantuanJumlah Pendamping dan Operator yang Mendapatkan Bimbingan Teknis | Paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 230.000,000 | 69.383,925 | 1,96 | 67.893,53 | 97,85 | 29,52 | 97,85 | 1,96 | 67.894 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 5 | 2,02 | 3 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Fakir Miskin yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) | Paket | | | | | 3,00 | 110.000,000 | 289.767,000 | 2,98 | 288.065,10 | 99,41 | 261,88 | 99,41 | 2,98 | 288.065 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 5 | 2,02 | 4 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Fakir Miskin yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) | paket | | | | | 50,00 | 50.000,000 | 1.073.960,000 | 49,63 | 1.066.023,77 | 99,26 | 2132,05 | 99,26 | 49,63 | 1.066.024 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **99,13** | **630,77** | **99,04** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| **1** | **6** | **0.0.0** | **0.00** | | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **Persentase Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (SPM)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **6** | **0.0.0** | **2.01** | | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | **Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.01 | | Penyediaan Makanan | Jumlah persediaan makanan tanggap darurat dan pasca bencana sosial Kab/Kota | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 30.000,000 | 30.000,000 | 12,00 | 29.729,50 | 100,00 | 99,10 | 99,10 | 12,00 | 29.730 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.01 | | Penyediaan Sandang | Jumlah penyediaan sandang tanggap darurat dan pasca bencana alam Kab/Kota | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| **1** | **6** | **0.0.0** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | **#REF!** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.02 | | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | #REF! | bulan | | | | | 12 | 620.307,000 | 342.620,000 | 12,00 | 325.122,70 | 100,00 | 52,41 | 94,89 | 12,00 | 325.123 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **75,76** | **97,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **S** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| **1** | **6** | **0.0.** | **0.00** | | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dipelihara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **6** | **0.0.** | **2.01** | | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | **Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara dan Terlaksananya Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan Kejuangan Keperintisan dan KSN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 0.0. | 2.01 | | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di Rehabilitasi | paket | 0,00 | | 0,00 | | 1,00 | 75.000,000 | 110.000,000 | 1,00 | 109.900,00 | 100,00 | 146,53 | 99,91 | 1,00 | 109.900 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0. | 2.01 | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan yang Dilakukan dalam Rangka Peningkatan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan Kejuangan Keperintisan dan KSNJumlah Taman Makam Pahlawan yang Mendapatkan Pemeliharaan | paket | 0,00 | | 0,00 | | 2,00 | 157.462,300 | 92.847,750 | 1,98 | 91.722,69 | 98,78 | 58,25 | 98,79 | 1,98 | 91.723 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **99,39** | **102,39** | **99,35** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| **1** | **6** | **0.0.** | **0.00** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Sosial)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **6** | **0.0.** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan (RKA, DPA Pokok dan Perubahan, RENJA, dan RENSTRA), Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, SAKIP, Laporan Tahunan, LKJ, LKPJ, LKPD yang tersedia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 0.0. | 2.01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 8,00 | 57.981,000 | 46.020,000 | 7,94 | 45.689,13 | 99,29 | 78,80 | 99,28 | 7,94 | 45.689 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0. | 2.01 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 20.701,000 | 15.601,000 | 2,00 | 15.586,00 | 99,90 | 75,29 | 99,90 | 2,00 | 15.586 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0. | 2.01 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan tahunan,LKJ , LKPJ, LPPD , dan lakip yang tersedia | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 27.683,000 | 23.101,000 | 5,00 | 23.091,60 | 99,96 | 83,41 | 99,96 | 5,00 | 23.092 | 0,00 | 0,00 | |
| **1** | **6** | **0.0.** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Laporan Capaian Kinerja Laporan Keuangan dan Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 0.0. | 2.02 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 23,00 | 2.532.126,558 | 1.951.905,118 | 21,90 | 1.858.750,49 | 95,23 | 73,41 | 95,23 | 21,90 | 1.858.750 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0. | 2.02 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 120.000,000 | 136.600,000 | 11,76 | 134.580,00 | 98,00 | 112,15 | 98,52 | 11,76 | 134.580 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0. | 2.02 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersedia | Bulan | | | | | 12 | 2.500,000 | 1.650,000 | 12,00 | 1.650,00 | 100,00 | 66,00 | 100,00 | 12,00 | 1.650 | 0,00 | 0,00 | |
| **1** | **6** | **0.0.** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan serta Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang diimplementasikan.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 0.0. | 2.05 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 50.000,000 | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0. | 2.05 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah peraturan perundang-Undangan yang diimplementasikan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 12.520,000 | 22.125,000 | 12,00 | 17.000,00 | 100,00 | 135,78 | 76,84 | 12,00 | 17.000 | 0,00 | 0,00 | |
| **1** | **6** | **0.0.** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Kompenen Alat Listrik dan Penerangan Kantor Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Alat Tulis Kantor Barang Cetakan dan Penggandaan Makan-Minum Rapat dan Biaya Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang Tersedia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 0.0. | 2.06 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 1.747,570 | 1.746,200 | 0,97 | 1.698,30 | 97,26 | 97,18 | 97,26 | 0,97 | 1.698 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0. | 2.06 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 17.000,000 | 35.460,480 | 2,99 | 35.300,00 | 99,55 | 207,65 | 99,55 | 2,99 | 35.300 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0. | 2.06 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang tersedia | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 1.000,000 | 1.000,000 | 1,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.06 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik ( Alat Tulis Kantor) yang tersedia | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 19.320,514 | 12.003,675 | 1,00 | 12.000,20 | 99,97 | 62,11 | 99,97 | 1,00 | 12.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.06 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah dokumen kantor yang digandakan | Bulan | | | | | 12 | 2.284,000 | 1.742,950 | 12,00 | 1.682,95 | 100,00 | 73,68 | 96,56 | 12,00 | 1.683 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.06 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah fasilitasi kunjungann tamu yang tersedia | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 4.027,000 | 4.021,300 | 14,40 | 4.020,30 | 120,00 | 99,83 | 99,98 | 14,40 | 4.020 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.06 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 126.787,000 | 94.224,000 | 12,00 | 94.222,59 | 100,00 | 74,32 | 100,00 | 12,00 | 94.223 | 0,00 | 0,00 | |
| **1** | **6** | **0.0.0** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Operasional Mebel Gedung Kantor serta Sarana dan Prasarana Kantor yang tersedia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.07 | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang tersedia | Unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.07 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas opersional atau lapangan yang tersedia | Unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang tersedia | Unit | | | | | 4,00 | 6.138,000 | 9.955,000 | 4,00 | 9.955,00 | 100,00 | 162,19 | 100,00 | 4,00 | 9.955 | 0,00 | | |
| | | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia | Unit | | | | | 1,00 | - | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Unit | | | | | 1,00 | - | - | | | | | | | | | | |
| **1** | **6** | **0.0.0** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Jasa Surat Menyurat Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Pelayanan Umum Kantor) Yang Tersedia** | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jasa surat menyurat | bulan | | | | | 12,00 | 10.800,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 59.169,300 | 53.689,800 | 12,00 | 37.820,83 | 100,00 | 63,92 | 70,44 | 12,00 | 37.821 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia | bulan | | | | | 12,00 | 12.000,000 | 12.000,000 | 12,00 | 12.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 12,00 | 12.000 | 0,00 | 0,00 | |
| **1** | **6** | **0.0.0** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Barang Milik Daerah (Kendaraan Gedung Peralatan dan Mesin) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.09 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 36.130,000 | 20.000,000 | 12,00 | 14.985,59 | 100,00 | 41,48 | 74,93 | 12,00 | 14.986 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.09 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Mesin Lainnya | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 2.030,000 | 2.640,000 | 12,00 | 2.514,00 | 100,00 | 123,84 | 95,23 | 12,00 | 2.514 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 6 | 0.0.0 | 2.09 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 3.582,000 | 19.580,000 | 9,00 | 19.480,00 | 75,00 | 543,83 | 99,49 | 9,00 | 19.480 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **99,21** | **118,74** | **95,16** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **5.145.502,14** | **5.306.671,80** | | **5.148.048,061** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)** | **96,57** | **188,08** | **95,24** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| **7** | **0,7** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **0.0.0** | **3** | **0.00** | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERIA** | **Persentase Jumlah Kasus Pengusaha Pekerja Pertahun** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **0.0.0** | **3** | **2.01** | | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | **Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0.0.0 | 3 | 2.01 | 1 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | Data Perencanaan Tenaga Kerja kabupaten | kegiatan | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 5.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| **7** | **0.0.0** | **3** | **2.02** | | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Data Perencanaan Tenaga Kerja kabupaten | kegiatan | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 5.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **SR** | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| **7** | **0.0.0** | **3** | **0.00** | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi di kabupaten Bulukumba,Persentase Peserta Pelatihan Yang Menjadi Wirausaha Baru** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| **7** | **0.0.0** | **3** | **2.01** | | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | **Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0.0.0 | 3 | 2.01 | 1 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Masyarakat | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 200.000,000 | 328.278,40 | 0,98 | 320.262,04 | 97,92 | 160,13 | 97,56 | 0,98 | 320.262 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 0.0.0 | 3 | 2.01 | 1 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Tersedianya Pelayanan peserta Pelatihan | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| **7** | **0.0.0** | **3** | **2.02** | | **Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta** | **Jumlah Pelatihan/sosialisasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0.0.0 | 3 | 2.02 | 1 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah pelatihan/sosialisasi yang terlaksana | kegiatan | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 12.500,000 | 12.500,00 | 0,92 | 11.444,85 | 92,00 | 91,56 | 91,56 | 0,92 | 11.445 | 0,00 | 0,00 | |
| **7** | **0.0.0** | **3** | **2.04** | | **Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil** | **terlaksananya kompetensi produktifitas tenaga kerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0.0.0 | 3 | 2.04 | 1 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | tercapainya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | bulan | | | | | 12,00 | 130.000,000 | 196.746,00 | 9,00 | 164.725,85 | 75,00 | 126,71 | 83,73 | 9,00 | 164.726 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **88,31** | **126,13** | **90,95** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| **7** | **0.0.0** | **4** | **0.00** | | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **Angka pengangguran terbuka** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **0.0.0** | **4** | **2.03** | | **Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota** | **terwujudnya informasi tentang pencari kerhaterwujudnya job fair/bursa kerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0.0.0 | 4 | 2.03 | 2 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Jumlah Sosialisasi para penyandang Disabilitas | kegiatan | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 15.902,521 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| **7** | **0.0.0** | **4** | **2.03** | | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | **terwujudnya informasi tentang pencari kerhaterwujudnya job fair/bursa kerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0.0.0 | 4 | 2.03 | 2 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | terlaksananya pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 36.900,000 | 13.797,00 | 12,00 | 13.751,30 | 100,00 | 37,27 | 99,67 | 12,00 | 13.751 | 0,00 | 0,00 | |
| **7** | **0.0.0** | **4** | **2.04** | | **Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota** | **terwujudnya informasi tentang pencari kerhaterwujudnya job fair/bursa kerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0.0.0 | 4 | 2.04 | 1 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah pelatihan/ Sosialisasi Penanggulangan pekerja migran di Indonesia | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 30.808,000 | 16.510,00 | 12,00 | 15.159,00 | 100,00 | 49,20 | 91,82 | 12,00 | 15.159 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **43,24** | **95,74** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| **7** | **0.0.0** | **5** | **0.00** | | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **0.0.0** | **5** | **2.01** | | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **terlaksananya pemahanan berbagai peraturan pelaksanaan ketenagkerjaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0.0.0 | 5 | 2.01 | 1 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana (Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan) | bulan | | | | | 12 | 25.000,000 | 13.278,30 | 9,00 | 11.358,80 | 75,00 | 45,44 | 85,54 | 9,00 | 11.359 | 0,00 | 0,00 | |
| **7** | **0.0.0** | **5** | **2.02** | | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksanannya pendataan dan pembinaan terhadap pengusaha dan pekerja dan terlaksananya sosialisasi bipartit dan tripartit pada bidang hubungan indutrial** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0.0.0 | 5 | 2.02 | 1 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana (Perselisihan Hubungan Industrial) | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 15.244,000 | 13.648,00 | 86,00 | 11.691,50 | 86,00 | 76,70 | 85,66 | 86,00 | 11.692 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 0.0.0 | 5 | 2.02 | 1 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 19.147,700 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **80,50** | **61,07** | **85,60** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **R** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | **495.502,22** | **594.757,70** | | **548.393,342** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)** | **67,20** | **57,61** | **68,07** | | | **0,00** | **0,00** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4) | | | S | R | S | | | SR | SR | |
| **2** | **08** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | **2** | **0.00** | | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **Jumlah Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan, Pelatihan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, serta Kelompok PK Remaja yang terbina dan terbentuk disekolah (SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | **2** | **2.01** | | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Kondisi perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, mendapat manfaat dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang sama dalam proses pembangunan serta Terciptanya anggaran yang responsif gender melalui PPRG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Jml dokumen kebijakan teknis pelaksanaan PUG yg disusun dan ditetapkan di Kab. Bulukumba | Kebijakan | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 10.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| **2** | **08** | 2 | 2.01 | 4 | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Focal Point OPD dan Perencana terlatih PPRG | Orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 40,00 | 30.000,000 | 29.999,60 | 37,84 | 28.004,60 | 94,59 | 93,35 | 93,35 | 37,84 | 28.005 | 0,00 | 0,00 | |
| **2** | **08** | **2** | **2.02** | | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Terciptanya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | 2 | 2.02 | 1 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi / acara (Hari Ibu dan Sosialisasi) | Orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 300,00 | 30.000,000 | 170.000,00 | 300,00 | 170.000,00 | 100,00 | 566,67 | 100,00 | 300,00 | 170.000 | 0,00 | 0,00 | |
| **2** | **08** | 2 | 2.02 | 2 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah perempuan yg diberikan pelatihan kewirausahaan ekonomi Jumlah perempuan yg mendapatkan peningktan kapasitas bidang politik | Orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 500,00 | 20.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| **2** | **08** | **2** | **2.02** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Terciptanya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | 2 | 2.02 | 2 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jml calon fasilitator yg terlatih dan ditetapkan menjadi fasilitator pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi/ politik/ hukum/sosial | Orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 30.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **97,30** | **330,01** | **96,67** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| **2** | **08** | **3** | **0.00** | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | **3** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** | **pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan, serta pendampingannya** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | 3 | 2.02 | 1 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan pengaduan secara komprehensif | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 80,00 | 52.000,000 | 48.000,00 | 80,00 | 45.600,00 | 100,00 | 87,69 | 95,00 | 80,00 | 45.600 | 0,00 | 0,00 | |
| **2** | **8** | **3** | **0** | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan secara komprehensif | % | | | | | 80,00 | 202.229,000 | 100.019,00 | 40,00 | 18.214,75 | 50,00 | 9,01 | 18,21 | | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | kegiatan | | | | | 1,00 | - | 40.000,00 | 0,55 | 35.100,00 | 55,00 | 0,00 | 87,75 | | | | | |
| **2** | **08** | **3** | **2.03** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Kelompok PATBM yang terbentuk, dan jejaring lainnya** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 08 | 3 | 2.03 | 2 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jml pengelola layanan UPT PPA/P2TP2A kab/kota yg terlatih pengelolaan layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan | Orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 25,00 | 26.265,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 08 | 3 | 2.03 | 4 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Jejaring Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 25.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **68,33** | **32,23** | **66,99** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **S** | **SR** | **S** | | | **SR** | **SR** | |
| **2** | **08** | **4** | **0.00** | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **Jumlah Reguasi terkait PUG dan Perindungan Anak dan Kelompok UPPKS yang terbentuk dan terbina di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | **4** | **2.01** | | **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu, gender dan kekerasan dalam rumah tangga serta peningkatan ketahanan keluarga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 4 | 2.01 | 2 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya sTerlaksananya sosialisasi guna peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu, gender dan kekerasan dalam rumah tanggaosialisasi guna peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu, gender dan kekerasan dalam rumah tangg | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 50,00 | 100.000,000 | 80.000,00 | 45,00 | 71.027,09 | 90,00 | 71,03 | 88,78 | 45,00 | 71.027 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 08 | 4 | 2.01 | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | tersedianya Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 4 | 2.01 | 3 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kader lembaga/ ormas yg difasilitasi edukasi pengasuhan berbasis hak anak dan berkesetaraan gender | orang | | | | | 30 | 30.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 08 | 4 | 2.01 | | **Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | tersedianya Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 4 | 2.01 | 1 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyedia layanan komprehensif bagi keluarga | lembaga | | | | | 1 | 100.000,000 | 72.000,00 | 1,00 | 71.709,38 | 100,00 | 71,71 | 99,60 | 1,00 | 71.709 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **95,00** | **71,37** | **94,19** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **S** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| **2** | **08** | **6** | **0.00** | | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **Persentase penambahan Jumlah Forum Anak yang terbentuk di Tingkat Kecamatan, dan Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Pelayanan terpadu P2TP2A** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | **6** | **2.01** | | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya pemenuhan hak anak** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 6 | 2.01 | 1 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah petugas pengelola sistem informasi gender dan anak daerah yang terlatih teknis Pengaplikasian SIGA daerah | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 68,00 | 50.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 08 | 6 | 2.01 | 2 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Profil Gender dan Anak Yang Tersusun | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 30.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **SR** | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| **2** | **08** | **6** | **0.00** | | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **Persentase penambahan Jumlah Forum Anak yang terbentuk di Tingkat Kecamatan, dan Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Pelayanan terpadu P2TP2A** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | **6** | **2.01** | | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya pemenuhan hak anak** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | 6 | 2.01 | 2 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan / Desa/Kelurahan Layak Anak, | ecamata | 0,00 | - | 0,00 | - | 10 | 30.000,000 | 120.000,00 | 10,00 | 118.563,38 | 100,00 | 395,21 | 98,80 | 10,00 | 118.563 | 0,00 | 0,00 | |
| **2** | **08** | **6** | **2.01** | | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya pemenuhan hak anak** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | 6 | 2.01 | 2 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan yang melaksanakan pelibatan anak dalam pembangunan, Jumlah Forum Anak di tingkat Desa/Kelurahan | ecamata | 0,00 | - | 0,00 | - | 10 | 200.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **395,21** | **98,80** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| **2** | **08** | **7** | **0.00** | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **"Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak serta Penyuluhan Penanggulangan Narkoba PMS terhadap HIV/AIDS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | **7** | **2.01** | | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya upaya perlindungan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | 7 | 2.01 | 1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Percontohan Desa/Kelurahan Pencegahan Kekerasan thd AMPK | desa/kel | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 30.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| **2** | **08** | 7 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah korban kekerasan terhadap Anak yang mendapatkan penanganan | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | - | 72.950,00 | 12,00 | 72.950,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 12,00 | 72.950 | 0,00 | 0,00 | |
| **2** | **8** | **7** | **0** | | **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **8** | **7** | **0** | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan n peningkatgan kualitas hidup anak | % | | | | | 100,00 | 211.689,000 | 161.979,00 | 41,18 | 66.468,75 | 41,18 | 31,40 | 41,04 | | | | | |
| **2** | **8** | **7** | **0** | 4 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Terbentuknya jejaring lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus | % | | | | | 100,00 | 25.000,000 | 50.000,00 | 100,00 | 49.723,75 | 100,00 | 198,90 | 99,45 | | | | | |
| **2** | **8** | **7** | **0** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **berkembangnya Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **8** | **7** | **0** | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan anak | % | | | | | 100,00 | 26.265,000 | 76.806,00 | 66,67 | 62.043,63 | 66,67 | 236,22 | 80,78 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **76,96** | **116,63** | **80,32** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **1.258.448,000** | **1.021.753,600** | **809.405,317** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)** | **62,51** | **135,06** | **62,42** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)** | **R** | **ST** | **R** | | | **SR** | **SR** | |
| **2** | **09** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | **2** | **0.00** | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN** | **Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Pangan dan Penanganan Pangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | **2** | **2.01** | | **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Tersedianya Lumpung Pangan dan sarana pendukungnya** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 2 | 2.01 | 1 | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat | unit | | | | | 1,00 | 175.000,000 | 3.015.358,00 | 1,00 | 3.008.492,50 | 100,00 | 1719,14 | 99,77 | 1,00 | 3.008.493 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 09 | 2 | 2.01 | 2 | Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur | Jumlah Lantai Jemur | unit | | | | | 1,00 | 50.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 09 | 2 | 2.01 | 3 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Jumlah Rumah Rice Milling Unit (RMU) dan Mesin RMU | unit | | | | | 1,00 | 300.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 09 | 2 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | Jumlah laporan | Bulan | | | | | 12,00 | 6.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 09 | 2 | 2.01 | 5 | Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | Jumlah dokumen rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan | Dokumen | | | | | 1,00 | 4.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **1719,14** | **99,77** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 09 | **3** | **0.00** | | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **% pningktn PDRB sktor pertanian umum ADHB, areal kmditi unggln pkbunn, rhbilitsi htan&lhan kritis, Pngmbngan kwsan rmh pngan lstari, Prmosi prcpatan pngankrgaman&knsumsi pngan, pmbinaan klp wnita tani, Lmba cipta menu tngkt kabupaten, prov.& nas., Scialis** | **Persen** | | | | | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | **3** | **2.01** | | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | **Tersedianya informasi harga dan kelembagaan tani** | **Persen** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 3 | 2.01 | 1 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Jumlah Dokumen | Dokumen | | | | | 1 | 10.000,000 | 46.950,00 | 1,00 | 34.950,00 | 100,00 | 349,50 | 74,44 | 1,00 | 34.950 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 09 | 3 | 2.01 | 4 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah laporan Pemantauan Stock dan Hasil Analisis Pasokan dan Harga Pangan Pokok | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 15.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 09 | 3 | 2.01 | 5 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Jumlah Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) yang dibina | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 9.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 09 | 3 | 2.01 | 6 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | Jumlah Toko Tani Indonesia (TTI) dan penguatan pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) yang dibina | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 10.000,000 | 20.945,00 | 12,00 | 17.945,00 | 100,00 | 179,45 | 85,68 | 12,00 | 17.945 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 09 | **3** | **2.02** | | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | **Tersedianya cadangan pangan** | **Bulan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 3 | 2.02 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 8.000,000 | 7.432,80 | 12,00 | 7.432,80 | 100,00 | 92,91 | 100,00 | 12,00 | 7.433 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 09 | 3 | 2.02 | 3 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) | kg | 0,00 | - | 0,00 | - | ###### | 225.000,000 | 24.000,00 | 15000,00 | 21.718,00 | 100,00 | 9,65 | 90,49 | ##### | 21.718 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 09 | 3 | 2.02 | 4 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan (Beras) Pemerintah yang terpelihara | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 25.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 09 | **3** | **2.04** | | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | **Terlaksananya Demplot , Pendampingan Pemanfaatan Lahan Pekarangan, pembinaan Desa Mandiri Pangan, serta Promosi Konsumsi pangan Beragam, Bergizi dan Aman (B2SA)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 3 | 2.04 | 1 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Jumlah Target Konsumsi Pangan Perkapita sesuai Angka Kecukupan Gizi Pola Pangan Harapan (PPH) | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 2.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 09 | 3 | 2.04 | 2 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Kelompok Wanita Tani yang bina | tani | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 350.000,000 | 684.434,90 | 5,00 | 677.797,00 | 100,00 | 193,66 | 99,03 | 5,00 | 677.797 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 09 | 3 | 2.04 | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Pertahun | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 6.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **165,03** | **89,93** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 09 | **4** | **0.00** | | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **Terkendalinya kondisi ketersediaan dan kerawanan pangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | **4** | **2.02** | | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | **Persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | **Persen** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 4 | 2.02 | 1 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Jumlah Dokumen Penyusunan dan sosialisasi FSVA | Dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 10.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 09 | **4** | **2.02** | | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Tersedianya cadangan pangan masyarakat** | **Persen** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 4 | 2.02 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan | Dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 5.000,000 | 14.322,00 | 1,00 | 11.425,00 | 100,00 | 228,50 | 79,77 | 1,00 | 11.425 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 09 | 4 | 2.02 | 2 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) | Kg | 0,00 | - | 0,00 | - | ###### | 250.000,000 | 125.376,00 | 30000,00 | 125.269,00 | 100,00 | 50,11 | 99,91 | ##### | 125.269 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 100,00 | 139,30 | 89,84 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | ST | ST | T | | | SR | SR | |
| 2 | 09 | **5** | **0.00** | | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman** | **100** | | | | | **Persen** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | **5** | **2.01** | | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Pengawasan Keamanan Pangan** | **100** | | | | | **Persen** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 5 | 2.01 | 1 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jaminan dan perlindungan masyarakat terhadap keamanan pangan segar asal tumbuhan | % | 10,00 | - | 0,00 | - | 100 | 15.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 09 | 5 | 2.01 | 2 | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jaminan produk pangan segar asal tumbuhan dari produsen | % | 10,00 | - | 0,00 | - | 100 | 5.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 09 | 5 | 2.01 | 3 | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jaminan mutu dan perlindungan konsumen terhadap keamanan pangan | % | 10,00 | - | 0,00 | - | 100 | 6.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 09 | 5 | 2.01 | 4 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Sertifikat Prima Sebagai Syarat Produk yang dihasilkan Aman Dikonsumsi | % | 10,00 | - | 0,00 | - | 100 | 6.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 09 | 5 | 2.01 | 5 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengawasan keamanan pangan dan pengujian pangan segar asal tumbuan | % | 10,00 | - | 0,00 | - | 90 | 25.000,000 | 44.446,00 | 80,00 | 37.793,80 | 88,89 | 151,18 | 85,03 | 80,00 | 37.794 | 800,01 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | **88,89** | **151,18** | **85,03** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | **T** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **1.517.000,00** | **3.983.264,70** | | **3.942.823,100** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4) | **77,78** | **434,93** | **72,92** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4) | **T** | **ST** | **S** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 10 | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | **4** | **0.00** | | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | **Persentase penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | **4** | **2.01** | | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 4 | 2.01 | 1 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan | konflik | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 50.000,000 | 45.739,86 | 5,00 | 39.266,50 | 100,00 | 78,53 | 85,85 | 5,00 | 39.267 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | **100,00** | **78,53** | **85,85** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | **ST** | **T** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 10 | **5** | **0.00** | | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | **5** | **2.01** | | **Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 5 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian Ganti Rugi dan santunan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah | persil | 0,00 | - | 0,00 | - | 32,00 | 50.000,000 | 4.957.690,37 | 25,60 | 3.538.660,70 | 80,00 | 7077,32 | 71,38 | 25,60 | 3.538.661 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | **80,00** | **7077** | **71,38** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | **T** | **ST** | **S** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 10 | **9** | **0.00** | | **PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH** | **Terlaksananya Pengelolaan Izin Membuka Tanah, Terwujudnya Pengelolaan Tanah Kosong, dan Terwujudnya Pengelolaan Izin Lokasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | **9** | **2.01** | | **Penerbitan Izin Membuka Tanah** | **Jumlah Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah (PEMDA) yang sudah Terbit dan Izin Lokasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 9 | 2.01 | 2 | Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | Terwujudnya Pemberian izin Lokasi Terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | persil | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 60.000,00 | 133.311,08 | 9,00 | 104.703,42 | 90,00 | 174,51 | 78,54 | 9,00 | 104.703 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | **90,00** | **174,51** | **78,54** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | **T** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **160.000,000** | **5.136.741,31** | | **3.682.630,620** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3) | **90,00** | **2443** | **78,59** | | | **0,00** | **0,00** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3) | | | T | ST | T | | | SR | SR | |
| 2 | 11 | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | **2** | **0.00** | | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | **2** | **2.01** | | **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** | **Dokumen RPPLH dan D2DTKH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 2 | 2.01 | 1 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen RPPLH dan Daya Dukung Daya Tampung LH | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 750.000,000 | 425.300,20 | 2,00 | 423.061,20 | 100,00 | 56,41 | 99,47 | 2,00 | 423.061 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **56,41** | **99,47** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **R** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 11 | **3** | **0.00** | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **"Persentase Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | **3** | **2.01** | | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **Persentase Pemenuhan Kampung Iklim dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 3 | 2.01 | 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah kampung yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 140.961,700 | 52.950,20 | 12,00 | 52.931,20 | 100,00 | 37,55 | 99,96 | 12,00 | 52.931 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | 3 | 2.01 | 3 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah pengujian liambah air dan udara di laboratorium,terlaksananya IHT bagi personil laboratorium,tersedianya bahan kimia,terpeliharanya alat laboratorium | lokasi | 0,00 | - | 0,00 | - | 11,00 | 165.394,716 | 165.394,63 | 10,89 | 161.144,20 | 99,00 | 97,43 | 97,43 | 10,89 | 161.144 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | **3** | **2.02** | | **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **Persentase Pemenuhan Kualitas Air Sungai dan Data Kulitas Air Limbah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 3 | 2.02 | 1 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Tersedianya data kualitas air sungai pada 6 sungai di Kabupaten Bulukumba serta tersedianya data kualitas air limbah pada 5 sumber pencemar | lokasi | 0,00 | - | 0,00 | - | 11,00 | 24.604,000 | 24.603,90 | 11,00 | 24.603,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 11,00 | 24.603 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | **3** | **2.03** | | **Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **Persen Peningkatan Pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 3 | 2.03 | 4 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Jumlah Penanaman Mangrove | Batang | 0,00 | - | 0,00 | - | ###### | 100.180,000 | 47.898,00 | 19998,00 | 47.853,00 | 99,99 | 47,77 | 99,91 | ##### | 47.853 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **99,75** | **70,69** | **99,32** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **S** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 11 | **4** | **0.00** | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati ( Flora Dan Fauna ) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | **4** | **2.01** | | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | **Persentase Jumlah RTH yang terehab dan terbangun dalam Kota,Pembangunan Rumah Bibit Pohon dan tanaman Hias, pengadaan pohon dan pemangkasan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 4 | 2.01 | 4 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah RTH yang terehab dan terbangun dalam Kota,Pembangunan Rumah Bibit Pohon dan tanaman Hias, pengadaan pohon dan pemangkasan | % | | | | | 20 | 1.414.184,216 | 475.796,00 | 18,40 | 419.139,23 | 92,00 | 29,64 | 88,09 | 18,40 | 419.139 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **92,00** | **29,64** | **88,09** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 11 | **5** | **0.00** | | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **"Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 11 | **5** | **2.01** | | **Penyimpanan Sementara Limbah B3** | **Jumlah verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara LB3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 5 | 2.01 | 2 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Jumlah verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara LB3 | lokasi | 0,00 | - | 0,00 | - | 48,00 | 47.994,800 | 51.005,50 | 48,00 | 51.005,50 | 100,00 | 106,27 | 100,00 | 48,00 | 51.006 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **106,27** | **100,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 11 | **6** | **0.00** | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **Persentase Perusahaan Yang Memiliki Izin K3, Presentase Penyelesaian Terhadap Pengaduan Lingkungan Hidup, Persentase Ketersediaan Data Potensi Kerusakan 10 Kecamatan Dan Peningkatan 10 Kecamatan Tentang Upaya Pengendalian Kerusakan Serta Status Lingkungan Hidup Daerah Setiap Tahun** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | **6** | **2.01** | | **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 6 | 2.01 | 3 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba | Kegiatan | 0,00 | - | 0,00 | - | 30,00 | 42.385,751 | 20.556,60 | 30,00 | 20.556,60 | 100,00 | 48,50 | 100,00 | 30,00 | 20.557 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **48,50** | **100,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | **"Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH** | **Jumlah Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH | **Jumlah Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup** | elompok | | | | | 1 | 70.000 | 33.714 | 25,00 | 31.414,30 | 10,00 | 2,34 | 10,84 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | DLHK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **10,00** | **2,34** | **10,84** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | | |
| 2 | 11 | **9** | **0.00** | | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Cakupan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | **9** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah pendampingan gerakan peduli Lingkungan Hidup di Sekolah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 9 | 2.01 | 1 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah pendampingan gerakan peduli Lingkungan Hidup di Sekolah | sekolah | 0,00 | - | 0,00 | - | 250,00 | 250.000,000 | 53.952,70 | 247,50 | 52.252,60 | 99,00 | 20,90 | 96,85 | 247,50 | 52.253 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **99,00** | **20,90** | **96,85** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 11 | **10** | **0.00** | | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **"Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/ kota."** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | **10** | **2.01** | | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** | **Jumlah Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 10 | 2.01 | 1 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | engadua | 0,00 | - | 0,00 | - | 20 | 28.848,600 | 14.730,60 | 20,00 | 14.730,60 | 100,00 | 51,06 | 100,00 | 20,00 | 14.731 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **51,06** | **100,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **R** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 11 | **11** | **0.00** | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Presentase Sampah Yang Terkelolah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **11** | **11** | **2.01** | | **Pengelolaan Sampah** | **Persentase Pengelolaan Persampahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Persampahan | paket | | | | | 1,00 | 100.000,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Pengadaan Lahan TPA 1 Ha , Biaya Operasioanl Operator Motor,Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operaional Persampahan honor Petugas Kebersihan Luar kantor | paket | | | | | 1,00 | 7.688.756,896 | 6.027.652,37 | 0,99 | 5.907.238,73 | 99,00 | 76,83 | 98,00 | 0,99 | 5.907.239 | | | |
| | | | | | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah peran serta masyarakat dalam pengurangan Sampah yang menunjang program Adipura | Lokasi | | | | | 10,00 | 179.264,600 | 61.243,00 | 9,90 | 53.743,00 | 99,00 | 29,98 | 87,75 | 9,90 | 53.743 | | | |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | Saran dan Prasarana Persampahan 1 Paket mesin Pencuci Mobil/Motor dan Mesin Chaisaw | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 145.143,800 | 3.270.652,90 | 0,94 | 2.894.472,40 | 94,25 | 1994,21 | 88,50 | 0,94 | 2.894.472 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 5 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 150.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **97,42** | **700,34** | **91,42** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 11 | **1** | **0.00** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Lingkungan Hidup dan Kehutanan)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kerja DLHK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 8,00 | 36.621 | 35.642,00 | 8,00 | 35.608,00 | 100,00 | 97,23 | 99,90 | 8,00 | 35.608 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | 1 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan evaluasiJumlah Laporan kinerja OPDJumlah Laporan Realisasi fisik dan keuangan | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 30,00 | 3.993,900 | 3.993,90 | 30,00 | 3.990,90 | 100,00 | 99,92 | 99,92 | 30,00 | 3.991 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Keuangan yang terlaksana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah gaji dan tunjangan yang terbayarkan | bulan | | | | | 12 | 5.572.515,139 | 4.563.369,14 | 12,00 | 3.904.258,26 | 100,00 | 70,06 | 85,56 | 12,00 | 3.904.258 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tercapainya jasa pelayanan administrasi keuangan, honor operator,arsipatoris,sopir dan tenaga kebersihan | bulan | | | | | 12 | 252.720,000 | 242.760,00 | 12,00 | 223.320,00 | 100,00 | 88,37 | 91,99 | 12,00 | 223.320 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 17.107,200 | 10.040,00 | 4,00 | 10.040,00 | 100,00 | 58,69 | 100,00 | 4,00 | 10.040 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | **1** | **2.06** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fugsinya** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.06 | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang mengikuti Latpim III | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 44.250,000 | 22.125,00 | 2,00 | 17.000,00 | 100,00 | 38,42 | 76,84 | 2,00 | 17.000 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 11 | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen Instalsi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 6.496,930 | 4.951,75 | 1,00 | 4.951,75 | 100,00 | 76,22 | 100,00 | 1,00 | 4.952 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor DLHK | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 7.259,770 | 3.973,10 | 1,00 | 3.973,10 | 100,00 | 54,73 | 100,00 | 1,00 | 3.973 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya alat tulis kantor dan makan minum rapat staf dan tamu | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 78.489,350 | 65.405,60 | 12,00 | 65.344,00 | 100,00 | 83,25 | 99,91 | 12,00 | 65.344 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah cetakan dan Penggandaan yang tersedia | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 5.425,000 | 4.964,20 | 12,00 | 4.964,00 | 100,00 | 91,50 | 100,00 | 12,00 | 4.964 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan pegawai kantor DLHK | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 2.220,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Biaya rapat koordinasi dan konsultasi | bulan | | | | | 12,00 | 208.783,000 | 185.677,00 | 12,00 | 185.630,28 | 100,00 | 88,91 | 99,97 | 12,00 | 185.630 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasinal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasioanal yang tersedia | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 550.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Mebel | Jumlah Kursi dan Meja Kerja | set | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 20.000,000 | 4.620,00 | 4,00 | 4.620,00 | 100,00 | 23,10 | 100,00 | 4,00 | 4.620 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 111.248,460 | 13.852,58 | 10,00 | 12.852,58 | 100,00 | 11,55 | 92,78 | 10,00 | 12.853 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Peyediaan Jasa Penunjang DLHK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terselenggaranya jasa surat menyurat dan materai 10000 | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 2.500,000 | 2.000,00 | 12,00 | 2.000,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 12,00 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah biaya tagihan listrik dan Wifi | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 254.599,383 | 132.193,49 | 12,00 | 107.834,93 | 100,00 | 42,35 | 81,57 | 12,00 | 107.835 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor DLHK | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 10.000,000 | 4.270,00 | 12,00 | 4.270,00 | 100,00 | 42,70 | 100,00 | 12,00 | 4.270 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkup DLHK Kab. Bulukumba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/operasional roda 4 ,Roda 3 dan roda 2 yang terbayarkan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 92.045,503 | 94.618,83 | 12,00 | 91.189,49 | 100,00 | 99,07 | 96,38 | 12,00 | 91.189 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah perbaikan peralatan kerja | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 10.790,000 | 6.490,00 | 0,99 | 5.516,40 | 99,00 | 51,13 | 85,00 | 0,99 | 5.516 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 11 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah sarana prasarana gedung kantor terpelihara | unit | | | | | 1 | 187.569,425 | 7.839,23 | 1,00 | 7.724,23 | 100,00 | 4,12 | 98,53 | 1,00 | 7.724 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **99,95** | **63,23** | **95,18** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **R** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **18.772.352,87** | **16.134.236,71** | | **14.849.233,560** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)** | **98,68** | **127,45** | **96,70** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 12 | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | **2** | **0.00** | | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **Cakupan penerbitan kartu keluarga (KK) dan KTP-el** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | **2** | **2.01** | | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **Tersedianya Dokumen Pengumpulan data Kependudukan dan Pemamfaatan serta penyajian data base kependudukan, Terwujudnya Pelayanan Pencatatan Sipil, Terwujudnya pelayanan Pendaftaran Penduduk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | **2** | **2.01** | 1 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Jumlah Peserta Rapat, Jumlah Kecamatan | persen | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 13.119,500 | 13.119,34 | 100,00 | 13.051,50 | 100,00 | 99,48 | 99,48 | 100,00 | 13.052 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **2** | **2.01** | 2 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 13.570,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **2** | **2.01** | 3 | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | Jumlah masalah pendaftaran penduduk yang diselesaikan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 7.500,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 12 | 2 | 2.01 | 4 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | persen dokumen kependudukan (KK, KTP, KIA) yang diterbitkan | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 535.800,000 | 531.087,00 | 12,00 | 508.083,00 | 100,00 | 94,83 | 95,67 | 12,00 | 508.083 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 2 | 2.01 | 5 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan dilaporkan | persen | | | | | 100,00 | 11.256,000 | 9.639,92 | 100,00 | 9.639,80 | 100,00 | 85,64 | 100,00 | 100,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 2 | 2.01 | 6 | Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah peristiwa kependudukan yang tercatat dan dilaporkan | persen | | | | | 100,00 | 8.600,000 | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 2 | 2.01 | 7 | Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah dokumen pelaporan peristiwa kependudukan yang diterbitkan | persen | | | | | 100,00 | 12.000,000 | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 2 | 2.01 | 8 | Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk | Dokumen Hasil analisis dan interpretasi yang diseminasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai umpan balik | persen | | | | | 100,00 | 6.770,000 | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 2 | 2.01 | | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 2 | 2.01 | 2 | Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Dokumen data pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk | persen | | | | | 100,00 | 8.199,790 | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 2 | 2.01 | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 2 | 2.01 | 1 | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | data pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan | persen | | | | | 100,00 | 9.999,900 | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 2 | 2.01 | 2 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Kecamatan yang dibina terkait pendaftaran penduduk | persen | | | | | 100,00 | 8.399,000 | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **93,32** | **98,38** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 12 | 3 | 0.00 | | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **Cakupan penerbitan akta kematian, Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk serta Rasio bayi berakta Kelahiran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 3 | 2.01 | | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **Tersedianya Dokumen Pengumpulan data Kependudukan dan Pemamfaatan serta penyajian data base kependudukan dan Pelayanan Pencatatan Sipil serta Tertatanya Administrasi Kependudukan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 3 | 2.01 | 2 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah penerbitan dokumen kependudukan Yang diterbitkan terkait dengan pencatatan sipil | Persen | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 181.800,000 | 188.143,80 | 100,00 | 188.143,50 | 100,00 | 103,49 | 100,00 | 100,00 | 188.144 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 3 | 2.01 | 3 | Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil | Dokumen Hasil analisis dan interpretasi yang diseminasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai umpan balik | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 5.190,000 | 3.977,00 | 12,00 | 3.954,00 | 100,00 | 76,18 | 99,42 | 12,00 | 3.954 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 3 | 2.01 | 5 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil yang tersedia | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 1.277.288,000 | 185.851,17 | 12,00 | 185.596,40 | 100,00 | 14,53 | 99,86 | 12,00 | 185.596 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 3 | 2.02 | | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **Terselenggaranya urusan administrasi kependudukan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 3 | 2.02 | 1 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi terkait dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam | bulan | | | | | 12 | 8.420,000 | 8.420,00 | 12,00 | 8.351,00 | 100,00 | 99,18 | 99,18 | 12,00 | 8.351 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 3 | 2.02 | 3 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi | Persen | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 6.999,500 | 6.966,00 | 100,00 | 6.817,00 | 100,00 | 97,39 | 97,86 | 100,00 | 6.817 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 3 | 2.03 | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **Terwujudnya Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 12 | 3 | 2.03 | 3 | Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil | Jumlah dokumen hasil supervisi bersama | Persen | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 9.999,700 | 165,00 | 100,00 | 165,00 | 100,00 | 1,65 | 100,00 | 100,00 | 165 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **65,40** | **99,39** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **R** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 12 | **4** | **0.00** | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Jumlah penduduk yang mengikuti sosialisasi kebijakan penduduk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | **4** | **2.01** | | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | **Tersedianya Dokumen Pengumpulan data Kependudukan dan Pemamfaatan serta penyajian data base kependudukan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | **4** | **2.01** | 1 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah dokumen pengolahan dan penyajian data kependudukan | persen | - | - | 0,00 | - | 100,00 | 2.312,900 | 3.630,00 | 100,00 | 3.480,00 | 100,00 | 150,46 | 95,87 | 100,00 | 3.480 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **4** | **2.01** | 2 | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah dokumen perjanjian kerja sama yang dihasilkan | persen | - | - | 0,00 | - | 100,00 | 4.999,800 | 4.383,00 | 100,00 | 4.349,00 | 100,00 | 86,98 | 99,22 | 100,00 | 4.349 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **4** | **2.01** | 3 | Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen yang tersedia | persen | - | - | 0,00 | - | 100,00 | 4.999,900 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **4** | **2.01** | | **Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | **4** | **2.01** | 1 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | "Jumlah kunjungan ke kecamatan dan OPD yang bekerjasama dengan Dukcapil, jumlah dokumen yang tersedia " | persen | - | - | 0,00 | - | 100,00 | 9.999,800 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **4** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **Terselenggaranya urusan administrasi kependudukan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | **4** | **2.03** | 3 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Kecamatan yang Difasilitasi, Jumlah Kecamatan yang dikunjungi | persen | - | - | 0,00 | - | 100,00 | 12.986,600 | 9.263,50 | 91,67 | 8.281,00 | 91,67 | 63,77 | 89,39 | 91,67 | 8.281 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **4** | **2.03** | 4 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah perjanjian kerjasama, jumlah kecamatan yang dikunjungi | persen | - | - | 0,00 | - | 100,00 | 9.999,990 | 1.098,90 | 100,00 | 1.098,90 | 100,00 | 10,99 | 100,00 | 100,00 | 1.099 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **4** | **2.03** | 5 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Peserta Sosialisasi | Persen | - | - | 0,00 | - | 100,00 | 119.150,000 | 17.656,80 | 91,67 | 15.918,00 | 91,67 | 13,36 | 90,15 | 91,67 | 15.918 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **4** | **2.03** | 6 | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | Jumlah dokumen kerjasama yang tersedia | Persen | - | - | 0,00 | - | 100,00 | 5.000,000 | 4.755,00 | 100,00 | 4.741,18 | 100,00 | 94,82 | 99,71 | 100,00 | 4.741 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **4** | **2.03** | 7 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Jumlah sosialisasi yang terlaksana | persen | - | - | 0,00 | - | 100,00 | 5.000,000 | 495,00 | 100,00 | 495,00 | 100,00 | 9,90 | 100,00 | 100,00 | 495 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **97,62** | **61,47** | **96,34** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **R** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 12 | **5** | **0.00** | | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **Jumlah buku argerat kependudukan yang terbitkan per tahun** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | **5** | **2.01** | | **Penyusunan Profil Kependudukan** | **Tersusunya Profil Kependudukan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | **5** | **2.01** | 1 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen data profil kependudukan skala kabupaten yang tersedia | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 1.500,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **5** | **2.01** | 2 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Jumlah dokumen data profil kependudukan skala kabupaten yang tersedia | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 4.999,750 | 3.465,00 | 12,00 | 3.465,00 | 100,00 | 69,30 | 100,00 | 12,00 | 3.465 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **69,30** | **100,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **S** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 12 | **1** | **0.00** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 12 | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Meningkatnya Penyusunan Dokumen Renstra, Renja dan Evaluasi Kinerja serta pelaksanaan Administrasi keuangan dan administrasi umum dan Gaji dan Tunjangan ASN, terlaksanaya pelayanan administrasi perkantoran, tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | **1** | **2.01** | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Renstra, Renja dan evaluasi kinerja serta pelaksanaan koordinasi dan singkronisasi perencanaan perangkat daerah | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 5.000,000 | 2.799,72 | 12,00 | 2.799,42 | 100,00 | 55,99 | 99,99 | 12,00 | 2.799 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **1** | **2.01** | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 5.000,000 | 1.650,00 | 12,00 | 1.650,00 | 100,00 | 33,00 | 100,00 | 12,00 | 1.650 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **1** | **2.01** | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | bulan | | | | | 12 | 5.000,000 | 4.999,77 | 12,00 | 4.999,71 | 100,00 | 99,99 | 100,00 | 12,00 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **1** | **2.01** | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya evaluasi kinerja Perangkat Daerah | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 5.000,000 | 1.942,19 | 12,00 | 1.872,19 | 100,00 | 37,44 | 96,40 | 12,00 | 1.872 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Dokumen Renstra, Renja dan Evaluasi Kinerja serta pelaksanaan Administrasi keuangan dan administrasi umum dan Gaji dan Tunjangan ASN, terlaksanaya pelayanan administrasi perkantoran, tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | **1** | **2.02** | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 3.472.582,399 | 2.865.523,82 | 12,00 | 2.521.449,22 | 100,00 | 72,61 | 87,99 | 12,00 | 2.521.449 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **1** | **2.02** | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas | persen | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 5.000,000 | 3.079,28 | 91,00 | 2.816,77 | 91,00 | 56,34 | 91,47 | 91,00 | 2.817 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **1** | **2.02** | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah laporan keuangan yang diverifikasi | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 5.000,000 | 4.999,95 | 12,00 | 499,50 | 100,00 | 9,99 | 9,99 | 12,00 | 500 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **1** | **2.02** | 4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 5.000,000 | - | 6,00 | - | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **1** | **2.02** | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan | persen | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 5.000,000 | 3.158,48 | 100,00 | 3.158,30 | 100,00 | 63,17 | 99,99 | 100,00 | 3.158 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **1** | **2.02** | 6 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan keuangan | persen | | | | | 100 | 5.000,000 | 4.999,83 | 100,00 | 4.967,40 | 100,00 | 99,35 | 99,35 | 100,00 | 4.967 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **1** | **2.02** | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | frekuensi koordinasi dan jumlah dokumen Laporan Administrasi Keuangan | persen | | | | | 100 | 5.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **1** | **2.02** | 8 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Laporan Administrasi Realisasi Keuangan | persen | | | | | 100 | 4.999,500 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **persentase aparatur yang mengikuti bimtek/ diklat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | **1** | **2.05** | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | persen | | | | | 100 | 22.125,000 | 22.125,00 | 83,33 | 17.000,00 | 83,33 | 76,84 | 76,84 | 83,33 | 17.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **1** | **2.05** | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | persen | | | | | 100 | 5.000,000 | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **1** | **2.05** | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah peserta dan Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan | bulan | | | | | 12 | 5.000,000 | | 3,00 | - | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | **1** | **2.06** | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pemenuhan kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 2.000,000 | 1.720,68 | 12,00 | 1.719,00 | 100,00 | 85,95 | 99,90 | 12,00 | 1.719 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **1** | **2.06** | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 10.000,000 | - | 3,00 | - | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | **1** | **2.06** | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia | persen | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 2.000,000 | 1.999,91 | 100,00 | 1.994,40 | 100,00 | 99,72 | 99,72 | 100,00 | 1.994 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan | Persen | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 104.829,491 | 332.797,26 | 91,67 | 295.043,25 | 91,67 | 281,45 | 88,66 | 91,67 | 295.043 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 5.000,000 | 3.657,50 | 12,00 | 3.655,00 | 100,00 | 73,10 | 99,93 | 12,00 | 3.655 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota | persen | | | | | 100 | 34.775,000 | 91.323,00 | 100,00 | 91.303,78 | 100,00 | 262,56 | 99,98 | 100,00 | 91.304 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 1 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.07 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 32.999,896 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang tersedia | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 20.000,000 | 28.534,83 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 125.000,000 | 221.850,46 | 100,00 | 183.423,00 | 100,00 | 146,74 | 82,68 | 100,00 | 183.423 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 1 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 140.000,000 | 139.953,00 | 12,00 | 115.080,96 | 100,00 | 82,20 | 82,23 | 12,00 | 115.081 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor yang ada | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 24.000,000 | 24.000,00 | 12,00 | 24.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 12,00 | 24.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 1 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Dinas perorangan Roda 2 dan roda 4 yang dipelihara dan yang dibayarkan pajaknya. | persen | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 40.000,000 | 39.994,25 | 91,67 | 35.916,32 | 91,67 | 89,79 | 89,80 | 91,67 | 35.916 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan roda 4 yang dipelihara dan yang dibayarkan pajaknya. | Bulan | | | | | 12 | 2.999,000 | 1.935,00 | 9,00 | 1.900,00 | 75,00 | 63,35 | 98,19 | 9,00 | 1.900 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | persen | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 20.998,700 | 13.000,00 | 100,00 | 12.990,00 | 100,00 | 61,86 | 99,92 | 100,00 | 12.990 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 12 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara | persen | | | | | 100 | 20.000,000 | 1.171,50 | 100,00 | 1.171,50 | 100,00 | 5,86 | 100,00 | 100,00 | 1.172 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **97,07** | **65,24** | **87,09** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **R** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **6.450.169,12** | **4.809.331,84** | | **4.295.038,999** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)** | **98,94** | **70,95** | **96,24** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)** | **ST** | **S** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| **2** | **13** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | **2** | **0.00** | | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | **2** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | **Persentae Penyelenggaraan Penataan Desa yang terlaksana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | **2** | **2.01** | **2** | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 25.750,000 | 79.830,00 | 12,00 | 79.654,04 | 100,00 | 309,34 | 99,78 | 12,00 | 79.654 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **309,34** | **99,78** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 13 | **3** | **0.00** | | **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA** | **Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | **3** | **2.01** | | **Fasilitasi Kerja sama antar Desa** | **Persentae Fasilitasi Kerja sama antar Desa yang terlaksana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | **3** | **2.01** | **3** | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi | Desa | 0,00 | - | 0,00 | - | 109,00 | 58.000,000 | 23.824,00 | 99,92 | 19.920,00 | 91,67 | 34,34 | 83,61 | 99,92 | 19.920 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **91,67** | **34,34** | **83,61** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 13 | **4** | **0.00** | | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Jumlah Desa yang memiliki administrasi Pemerintahan Desa yang Baik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | **4** | **2.01** | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **Persentae Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang terlaksana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 2 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah Pesrta yang Mampu Menyusun Produk Hukum Desa | Desa | 0,00 | - | 0,00 | - | 109,00 | 25.480,000 | 11.508,00 | 109,00 | 11.508,00 | 100,00 | 45,16 | 100,00 | 109,00 | 11.508 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 4 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Peserta yang mampu mengelola keuangan desa | Desa | 0,00 | - | 0,00 | - | 109,00 | 100.000,000 | 55.385,00 | 90,83 | 44.360,00 | 83,33 | 44,36 | 80,09 | 90,83 | 44.360 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 5 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah BUM desa dan Kelompok UEM Terfasilitasi | Desa | 0,00 | - | 0,00 | - | 109,00 | 125.563,000 | 100.000,00 | 109,00 | 95.125,00 | 100,00 | 75,76 | 95,13 | 109,00 | 95.125 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 8 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Jumlah Bumdes Berstatus Produktif terfasilitasi | Desa | 0,00 | - | 0,00 | - | 109,00 | 100.000,000 | 97.249,80 | 109,00 | 91.607,30 | 100,00 | 91,61 | 94,20 | 109,00 | 91.607 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 9 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa | Desa | 0,00 | - | 0,00 | - | 31,00 | 1.200.000,000 | 891.843,60 | 31,00 | 848.394,32 | 100,00 | 70,70 | 95,13 | 31,00 | 848.394 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Data Evaluasi Status Desa (Desa Sangat Tertinggal, Berkembang, Maju, Mandiri) Jumlah peserta mampu mnyusun Profil Desa dan Kelurahan | Desa | 0,00 | - | 0,00 | - | 109,00 | 40.038,000 | 18.075,00 | 109,00 | 17.914,00 | 100,00 | 44,74 | 99,11 | 109,00 | 17.914 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 14 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD meningkat kapasitasnya | Desa | 0,00 | - | 0,00 | - | 109,00 | 30.963,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 15 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah penetapan dan penegasan Batas Desa | Desa | 0,00 | - | 0,00 | - | 109,00 | 30.963,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumah Desa ikut Perlombaan | Desa | 0,00 | - | 0,00 | - | 109,00 | 50.834,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **97,22** | **62,06** | **93,94** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **R** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 13 | 5 | 0.00 | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **Persentase peningkatan status desa mandiri** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 5 | 2.01 | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentae 1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten yang terlaksana** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 5 | 2.01 | 2 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah data kelembagaan Masyarakat tersedia (LKD,LPM,LSM,PKK, Posyandu dst.) Jumlah Pengelola Kelembangaan Masyarakat Meningkat Kapasitasnya. | Desa | 0,00 | - | 0,00 | - | 109,00 | 100.000,000 | 23.470,00 | 99,92 | 19.734,00 | 91,67 | 19,73 | 84,08 | 99,92 | 19.734 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 5 | 2.01 | 5 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah BUM desa dan Kelompok UEM Terfasilitasi | Desa | 0,00 | - | 0,00 | - | 109,00 | 30.255,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 5 | 2.01 | 6 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Juara Lomba Inovasi TTG Perdesaan | Desa | 0,00 | - | 0,00 | - | 109,00 | 25.188,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 5 | 2.01 | 7 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Desa Ikut Partisipasi | Desa | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 25.570,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 5 | 2.01 | 9 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Kader yang mampu menyusun Perencanaan dan pembangunan partisipasi mayarakat, Jumlah kader memahami pengelolaan sumber pangan alternatif bagi keluarga. | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 200.000,000 | 250.000,00 | 100,00 | 246.010,00 | 100,00 | 123,01 | 98,40 | 100,00 | 246.010 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **95,84** | **28,55** | **91,24** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 13 | 1 | 0.00 | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas PMD)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 1 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentae Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 57.656,000 | 19.697,00 | 100,00 | 18.797,00 | 100,00 | 32,60 | 95,43 | 100,00 | 18.797 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 30,00 | 3.227,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 1 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentae Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | jumlah pegawai merima gaji dan tunjangan | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 3.061.159,326 | 2.719.647,43 | 100,00 | 2.670.504,45 | 100,00 | 87,24 | 98,19 | 100,00 | 2.670.504 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 70.211,200 | 33.962,00 | 100,00 | 33.361,00 | 100,00 | 47,52 | 98,23 | 100,00 | 33.361 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 1 | 2.02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD yang Disusun | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 5.759,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 1 | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentae Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 1 | 2.03 | 6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah di SKPD | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 10.387,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 1 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentae Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 5.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 1 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentae Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 6.000,000 | 232.976,90 | 100,00 | 229.028,35 | 100,00 | 3817,14 | 98,31 | 100,00 | 229.028 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor Yang Tersedia | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 9.677,000 | 2.427,63 | 100,00 | 2.427,29 | 100,00 | 25,08 | 99,99 | 100,00 | 2.427 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 100% ketersediaan logistik kantor | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 80.870,000 | 38.035,07 | 100,00 | 36.697,83 | 100,00 | 45,38 | 96,48 | 100,00 | 36.698 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 97.298,000 | 40.480,00 | 100,00 | 40.340,00 | 100,00 | 41,46 | 99,65 | 100,00 | 40.340 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 1 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentae Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana** | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 1 | 2.07 | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 1 | 2.07 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan yang disediakan | buah | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 18.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 1 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentae Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 46.110,079 | 56.718,00 | 12,00 | 56.518,16 | 100,00 | 122,57 | 99,65 | 12,00 | 56.518 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga Non-ASN Pada kantor Dinas | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 21.600,000 | 1.758.200,00 | 12,00 | 1.602.399,38 | 100,00 | 7418,52 | 91,14 | 12,00 | 1.602.399 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 1 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran dengan baik guna menunjang terlaksananya program dan kegiatan dengan baik dalam OPD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | terpeliharanya mobil jabatan dan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 47.410,400 | 15.838,56 | 91,67 | 13.986,52 | 91,67 | 29,50 | 88,31 | 91,67 | 13.987 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 13 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan kantor | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 9.060,000 | 6.820,00 | 100,00 | 6.820,00 | 100,00 | 75,28 | 100,00 | 100,00 | 6.820 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 90,97 | 903,25 | 88,78 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | T | ST | T | | | SR | SR | |
| | | | | | | | | | | | | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN | 5.718.029,01 | 6.475.987,99 | | 6.185.106,639 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5) | 95,14 | 267,51 | 91,47 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5) | ST | ST | ST | | | SR | SR | |
| **2** | **14** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | **2** | **0.00** | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | **2** | **2.01** | | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | **Meningkatnya pelaksanaan program KKBPK dan terbentuknya SSK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | **2** | **2.01** | 1 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) | terlaksananya Penyerasian Program KKBPK di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan | ecamata | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 40.000,400 | 14.680,73 | 8,00 | 12.274,50 | 80,00 | 30,69 | 83,61 | 8,00 | 12.275 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | **2** | **2.01** | 9 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal yang Terlaksana | sekolah | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 14.999,800 | 35.128,00 | 4,00 | 32.848,30 | 80,00 | 218,99 | 93,51 | 4,00 | 32.848 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | **2** | **2.02** | | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **Tersedianya data yang akurat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | **2** | **2.02** | 8 | Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain | Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang terbentuk dan terbina | ecamata | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 9.999,670 | 9.801,70 | 1,00 | 9.801,70 | 100,00 | 98,02 | 100,00 | 1,00 | 9.802 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | **2** | **2.02** | 11 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 19.999,440 | 11.970,00 | 12,00 | 11.970,00 | 100,00 | 59,85 | 100,00 | 12,00 | 11.970 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | **2** | **2.02** | 12 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga yang tersedia | bulan | | | | | 12,00 | 12.310,540 | 46.662,30 | 12,00 | 45.330,26 | 100,00 | 368,22 | 97,15 | 12,00 | 45.330 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | **2** | **2.02** | 13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang tersusun | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 19.949,900 | 108.000,00 | 12,00 | 74.693,26 | 100,00 | 374,40 | 69,16 | 12,00 | 74.693 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 93,33 | 191,70 | 90,57 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | ST | ST | T | | | SR | SR | |
| 2 | 14 | **3** | **0.00** | | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **Persentase Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi, Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif.dengan menggunakan MKJP, Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok atau Keluarga, Pelatihan Te** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | **3** | **2.01** | | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal** | **Meningkatnya pecapaian peserta KB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | **3** | **2.01** | 2 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | - | 4.411,00 | 12,00 | 4.411,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 12,00 | 4.411 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | **3** | **2.01** | 2 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal | Penyuluhan dan Pelayanan KIE yang Terlaksana | ecamata | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 19.999,520 | 25.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | **3** | **2.01** | 4 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang yang tersedia | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 60.316,000 | 70.604,00 | 0,66 | 46.380,00 | 66,00 | 76,90 | 65,69 | 0,66 | 46.380 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | **3** | **2.01** | 7 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Biaya Operasional bagi PPKBD dan SUB PPKBD yang tersedia | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 652.800,000 | 157.030,00 | 12,00 | 156.600,00 | 100,00 | 23,99 | 99,73 | 12,00 | 156.600 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | **3** | **2.01** | 7 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Terlaksananya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | - | 405.000,00 | 12,00 | 261.600,00 | 100,00 | 0,00 | 64,59 | 12,00 | 261.600 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 14 | 3 | 2.01 | 7 | Pengendalian Program KKBPK | | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | - | 39.060,00 | 12,00 | 34.860,00 | 100,00 | 0,00 | 89,25 | 12,00 | 34.860 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 3 | 2.02 | | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | **Meningkatnya pengetahuan tentang bahaya narkoba, PMS dan HIV/ AIDS di Sekolah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 3 | 2.02 | 3 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK yang Terlaksana | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 2.529.965,800 | 652.800,00 | 12,00 | 652.800,00 | 100,00 | 25,80 | 100,00 | 12,00 | 652.800 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 3 | 2.03 | | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | **Meningkatnya capaian peserta KB baru** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 3 | 2.03 | 1 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Cakupan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi ke faskes | paket | | | | | 1 | 49.915,800 | 9.765,00 | 0,80 | 8.850,00 | 80,00 | 17,73 | 90,63 | 0,80 | 8.850 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 3 | 2.03 | 3 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | - | 471.600,00 | 91,67 | 351.052,00 | 91,67 | 0,00 | 74,44 | 91,67 | 351.052 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 3 | 2.03 | 5 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | kebutuhan Alat Kontrasepsi berupa Side EfeK yang Tersedia | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 60.002,600 | 62.402,42 | 80,00 | 58.986,95 | 80,00 | 98,31 | 94,53 | 80,00 | 58.987 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 3 | 2.03 | 6 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Dukungan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB yang tersedia | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 7,00 | 860.026,000 | 831.824,91 | 6,86 | 825.374,63 | 98,00 | 95,97 | 99,22 | 6,86 | 825.375 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 3 | 2.03 | 7 | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | Terlaksananya Konseling KB bagi Calon Akseptor KB | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 19.999,240 | 19.999,10 | 83,33 | 16.996,10 | 83,33 | 84,98 | 84,98 | 83,33 | 16.996 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 3 | 2.03 | 8 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Terlaksananya Konseling KB bagi Calon Akseptor KB | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | - | 9.600,00 | 100,00 | 9.600,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 9.600 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 3 | 2.04 | | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | **Meningkatnya jumlah peserta KB baru dan aktif** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 3 | 2.04 | 1 | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Pelayanan KB Melalui Kegiatan TNI Manunggal KB-KES, Kegiatan Bulan Bhakti Bhayangkara, Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB - KES, kegiatan bulan bhakti KB-IBI dan Pelayanan KB Mobile yang Terlaksana | momen | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 132.022,590 | 134.422,60 | 2,50 | 127.314,10 | 50,00 | 96,43 | 94,71 | 2,50 | 127.314 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 3 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB yang Terlaksana | ecamata | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 102.209,400 | 379.500,00 | 10,00 | 329.175,00 | 100,00 | 322,06 | 86,74 | 10,00 | 329.175 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **83,27** | **56,14** | **82,97** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **R** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 14 | 4 | 0.00 | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **Terlaksananya orientasi PIK KRR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 4 | 2.01 | | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **Meningkatnya pecapaian peserta KB,Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengelolaan dan kader kelompok bina keluarga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 4 | 2.01 | 2 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | set | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 627.000,000 | 637.008,00 | 3,00 | 627.079,13 | 99,98 | 100,01 | 98,44 | 3,00 | 627.079 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 4 | 2.01 | 3 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Terlaksananya Pelatihan Kelompok UPPKS bagi Keluarga Miskin | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 34.999,700 | 34.999,50 | 3,00 | 33.639,65 | 60,00 | 96,11 | 96,11 | 3,00 | 33.640 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 4 | 2.01 | 4 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Terlakananya Pembentukan Pelatihan dan Pembinaan Kelompok (BKB, BKR dan BKL),Terlaksananya Hari Keluarga Nasional (Harganas) | Klp | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 38.345,300 | 31.443,30 | 3,00 | 28.689,85 | 60,00 | 74,82 | 91,24 | 3,00 | 28.690 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 14 | 4 | 2.01 | 6 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | - | 2.048.250,00 | 91,67 | 743.370,00 | 91,67 | 0,00 | 36,29 | 91,67 | 743.370 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 4 | 2.01 | 7 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Terlaksananya Advokasi dan KIE tetang kesehatan Reproduksi Remaja | Klp | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 42.499,500 | 42.499,30 | 3,00 | 38.542,55 | 60,00 | 90,69 | 90,69 | 3,00 | 38.543 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 4 | 2.01 | 8 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pendamping Bina Keluarga | Klp | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 34.871,800 | 67.960,90 | 2,00 | 39.804,15 | 40,00 | 114,14 | 58,57 | 2,00 | 39.804 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **68,61** | **79,30** | **78,56** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **S** | **T** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 14 | 1 | 0.00 | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 1 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Tersusunnya acuan dalam pelaksanaan kegiatan OPD,Tertibnya laporan LKIP, Laporan OPD dan Laporan Akhir Tahun** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun | dokumen | | | | | 1 | 41.479,590 | 6.769,90 | 1,00 | 6.674,00 | 100,00 | 16,09 | 98,58 | 1,00 | 6.674 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 31.083,050 | 32.439,50 | 2,00 | 32.369,50 | 100,00 | 104,14 | 99,78 | 2,00 | 32.370 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 4.200,000 | 4.717,80 | 12,00 | 4.398,00 | 100,00 | 104,71 | 93,22 | 12,00 | 4.398 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan | | | | | 3 | 3.699,850 | 1.810,60 | 3,00 | 1.810,60 | 100,00 | 48,94 | 100,00 | 3,00 | 1.811 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 30.500,000 | 500,00 | 1,00 | 500,00 | 100,00 | 1,64 | 100,00 | 1,00 | 500 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran,Tertibnya laporan LKIP, Laporan OPD dan Laporan Akhir Tahun** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pegawai menerima gaji dan tunjangan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 6.300.712,214 | 5.006.638,00 | 12,00 | 4.342.883,35 | 100,00 | 68,93 | 86,74 | 12,00 | 4.342.883 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana | bulan | | | | | 12 | 119.059,800 | 78.739,80 | 12,00 | 78.718,00 | 100,00 | 66,12 | 99,97 | 12,00 | 78.718 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Disusun | laporan | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 3.640,000 | 2.388,98 | 1,00 | 2.388,90 | 100,00 | 65,63 | 100,00 | 1,00 | 2.389 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.06 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 1 | 2.06 | 1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang dibuat | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 1.500,000 | 1.499,90 | 2,00 | 1.499,90 | 100,00 | 99,99 | 100,00 | 2,00 | 1.500 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.06 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 1 | 2.06 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang diikuti | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 33.690,876 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.06 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 11.211,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah peralatan listrik yang tersedia | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 2.662,175 | 2.650,04 | 1,00 | 2.650,04 | 100,00 | 99,54 | 100,00 | 1,00 | 2.650 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah bahan pembersih yang tersedia | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 24.560,505 | 2.801,70 | 1,00 | 2.801,70 | 100,00 | 11,41 | 100,00 | 1,00 | 2.802 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 14 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah ATK dan makan minum yang tersedia | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 76.569,700 | 43.984,73 | 12,00 | 43.947,59 | 100,00 | 57,40 | 99,92 | 12,00 | 43.948 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 11.500,000 | 3.979,91 | 1,00 | 3.979,90 | 100,00 | 34,61 | 100,00 | 1,00 | 3.980 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 8.241,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 157.080,592 | 55.677,00 | 12,00 | 55.623,00 | 100,00 | 35,41 | 99,90 | 12,00 | 55.623 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel | Tersedianya Pengadaan Sarana Kerja pada Kantor DPPKB | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 10.000,000 | 2.420,00 | 1,00 | 2.420,00 | 100,00 | 24,20 | 100,00 | 1,00 | 2.420 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 35.681,800 | 9.273,49 | 4,00 | 9.273,49 | 100,00 | 25,99 | 100,00 | 4,00 | 9.273 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung DPPKB yang tersedia | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 9.240,000 | 4.290,00 | 2,00 | 4.290,00 | 100,00 | 46,43 | 100,00 | 2,00 | 4.290 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase pemenuhan pembiayaan tagihan telepon, air dan listrik | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 77.812,800 | 73.812,80 | 12,00 | 43.172,46 | 100,00 | 55,48 | 58,49 | 12,00 | 43.172 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa tenaga Non PNS dan Tenaga Kebersihan | bulan | | | | | 12 | 64.800,000 | 57.600,00 | 12,00 | 57.600,00 | 100,00 | 88,89 | 100,00 | 12,00 | 57.600 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas Jabatan dan pajak kendaraan dinas jabatan roda 4 | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 30.000,000 | 20.000,00 | 0,50 | 979,89 | 50,00 | 3,27 | 4,90 | 0,50 | 980 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan dan Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4 | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 45.622,328 | 45.620,73 | 2,20 | 39.307,89 | 55,00 | 86,16 | 86,16 | 2,20 | 39.308 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 4.927,500 | 4.884,00 | 1,00 | 4.884,00 | 100,00 | 99,12 | 100,00 | 1,00 | 4.884 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | unit | | | | | 3 | 7.440,000 | 2.365,00 | 3,00 | 2.365,00 | 100,00 | 31,79 | 100,00 | 3,00 | 2.365 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 14 | 1 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | unit | | | | | 2 | 1.220,000 | 1.220,00 | 2,00 | 1.220,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2,00 | 1.220 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **96,04** | **57,33** | **92,82** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **R** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **12.530.367,78** | **11.827.506,63** | | **9.327.800,327** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **85,31** | **96,12** | **86,23** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **T** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| **2** | **15** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 2 | 0.00 | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **Persentase tersedianya fasilitas penyelengaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | **2** | **2.02** | | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 2 | 2.03 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah titik PJU yang dibangun | titik | | | | | 50,00 | 1.625.000,000 | 585.620,30 | 50,00 | 583.632,80 | 100,00 | 35,92 | 99,66 | | | | | |
| 2 | 15 | **2** | **2.03** | **5** | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Jumlah titik PJU yang dipelihara | titik | 0,00 | - | 0,00 | - | 150,00 | 156.704,712 | 102.950,00 | 150,00 | 102.050,00 | 100,00 | 65,12 | 99,13 | 150,00 | 102.050 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 15 | **2** | **2.05** | | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | **Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C di Kabupaten bulukumba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | **2** | **2.05** | **1** | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C | Jumlah Fasilitasi Jasa Petugas parkir, terminal dan di tepi jalan | bulan | | | | | 12 | 445.858,083 | 329.400,00 | 10,80 | 313.800,00 | 90,00 | 70,38 | 95,26 | | | | | |
| **2** | **15** | **2** | **2.05** | **5** | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **Persentase jumlah Kendaraan Bermotor yang di uji** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 15 | 2 | 2.05 | 7 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Pemeliharaan Trafic Light dan Warning Light | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 6,00 | 20.000,000 | 72.200,00 | 6,00 | 600,00 | 100,00 | 3,00 | 0,83 | 6,00 | 600 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 15 | 2 | 2.05 | 7 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Fasilitasi Jasa petugas Jasa Narasumber untuk kegiatan sosilisasi pengujian kendaraan masyarakat, pelaksaan kegiatan sosialisasi pengujian sosialisasi pengujian kendaraan masyarakat | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 7.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 15 | 2 | 2.09 | 1 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Fasilitasi Jasa Petugas Operator Pengujian Kendaraan Bermotor | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 20.000,000 | 415.660,90 | 12,00 | 411.031,00 | 100,00 | 2055,16 | 98,89 | 12,00 | 411.031 | 0,00 | 0,00 | |
| **2** | **15** | **2** | **2.09** | **2** | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **fasilitasi jasa pengendalian dan pengawasan lalu lintas,jumlah petugas pengendalian dan pengawasan lalu lintas** | | **0,00** | **-** | **0,00** | **-** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 2 | 2.09 | 2 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah terlaksananya jasa biaya operasional kendaraan bus sekolah dan bus pariwisata, terwujudnya fasilitasi jasa petugas bus sekolah dan bus pariwisata, terwujudnya jumlah petugas angkutan bus sekolah dan bus pariwisata | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 138.833,500 | 283.079,60 | 0,90 | 225.303,00 | 90,00 | 162,28 | 79,59 | 0,90 | 225.303 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 15 | 2 | 2.09 | 2 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitasi jasa pengendalian dan pengawasan lalulintas, jumlah petugas pengendalian dan pengawasan lalulintas | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 165.980,000 | 204.696,00 | 12,00 | 185.813,40 | 100,00 | 111,95 | 90,78 | 12,00 | 185.813 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **97,14** | **357,69** | **80,59** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 15 | 1 | 0.00 | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Perhubungan)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 1 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah ASN dan Honorer dalam Lingkup Dinas Perhubungan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Fasilitasi Petugas Reviter dan sunami | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 50.000,000 | 50.522,60 | 12,00 | 24.474,60 | 100,00 | 48,95 | 48,44 | 12,00 | 24.475 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 15 | 1 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah ASN dan Honorer dalam Lingkup Dinas Perhubungan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Peningkatan Kesejahteraan ASN | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 5.075.252,725 | 4.188.296,96 | 12,00 | 3.532.733,48 | 100,00 | 69,61 | 84,35 | 12,00 | 3.532.733 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 15 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Belanja Jasa Admnistrasi Keuangan | bulan | | | | | 12 | 21.129,900 | 32.380,70 | 12,00 | 29.380,60 | 100,00 | 139,05 | 90,73 | 12,00 | 29.381 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 15 | 1 | 2.02 | 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah penatausahaan keuangan SKPD | bulan | | | | | 12 | 10.000,000 | 53.950,00 | 12,00 | 53.950,00 | 100,00 | 539,50 | 100,00 | 12,00 | 53.950 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 15 | 1 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah ASN dan Honorer dalam Lingkup Dinas Perhubungan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pelaksana Latpim 3 | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 22.125,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 15 | 1 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah ASN dan Honorer dalam Lingkup Dinas Perhubungan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Pembayaran komunikasi, air,listrik, dan Internet, penerangan bangunan kantor | bulan | | | | | 12 | 3.500,000 | 3.500,00 | 12,00 | 3.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 12,00 | 3.500 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 15 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Pengadaan Pengadaan dan Peralatan Kantor Lingkup Sekda | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 2.500,000 | 2.357,50 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 15 | 1 | 2.06 | 9 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Penggandaan penyediaan belanja ATK dan penggandaan serta makan dan minum penyediaan makan dan minum tamu | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 68.525,600 | 94.293,08 | 12,00 | 84.358,28 | 100,00 | 123,10 | 89,46 | 12,00 | 84.358 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 15 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi singkronisasi dan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 60.000,000 | 59.999,80 | 12,00 | 59.987,26 | 100,00 | 99,98 | 99,98 | 12,00 | 59.987 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 15 | 1 | 2.06 | 9 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah ASN dan Honorer dalam Lingkup Dinas Perhubungan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 15 | 1 | 2.06 | 9 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan | 0 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 15 | 1 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah ASN dan Honorer dalam Lingkup Dinas Perhubungan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 12.550.000,000 | 12.963.816,29 | 12,00 | 12.637.306,51 | 100,00 | 100,70 | 97,48 | 12,00 | 12.637.307 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 15 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 30.000,000 | 4.580,00 | 89,00 | 4.060,00 | 89,00 | 13,53 | 88,65 | 89,00 | 4.060 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 15 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Fasilitasi pembayaran jasa kebersihan kantor (petugas Cining Service) penyedian perlatan jasa kebersihan kantor | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 25.000,000 | 26.034,90 | 12,00 | 26.033,65 | 100,00 | 104,13 | 100,00 | 12,00 | 26.034 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 15 | 1 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah ASN dan Honorer dalam Lingkup Dinas Perhubungan** | | | | | | | | | 0,00 | - | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan mobil Jalan | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | - | 11.860,63 | 0,90 | 10.360,63 | 90,00 | 0,00 | 87,35 | 0,90 | 10.361 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 15 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pembayaran jasa pemeliharaan jasa pemeliharaan, perizinan kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan kendaraan dinas operasional mobil dan motor | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | - | 25.917,88 | 12,00 | 25.260,85 | 100,00 | 0,00 | 97,46 | 12,00 | 25.261 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 15 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | bulan | | | | | 12 | - | 10.000,00 | 12,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 12,00 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **91,36** | **95,61** | **84,56** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **20.497.409,52** | **19.521.117,13** | | **18.323.636,051** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **94,25** | **226,65** | **82,58** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **ST** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 16 | 0 | 0.00 | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 2 | 0.00 | | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan data pemerintah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 2 | 2.01 | | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya pengelolaan informasi publik melalui media informasi publik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 2 | 2.01 | 2 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Jumlah Rumusan Kebijakan berupa Peraturan, Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk Teknis mengenai layanan infomasi (Perda/Perbub/SK Bupati) | buah | | | | | 2 | 23.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 2 | 2.01 | 3 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah pelaksanaan sosialisasi SP4N Lapor sebagai media pengaduan dan aspirasi masyarakat, laporan pengelolaan SP4N dan Lapor | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 112.800,000 | 27.910,00 | 2,00 | 27.178,75 | 100,00 | 24,09 | 97,38 | 2,00 | 27.179 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 2 | 2.01 | 5 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Pelaksanaan diskusi publik dengan pemangku kepentingan dengan media informasi menanggapi aduan dan isu publik | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 78.600,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 2 | 2.01 | 6 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah pembuatan dan pengelolaan konten dan materi Informasi dan Komunikasi Publik melalui Media Komunikasi | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 100.000,000 | 26.350,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 2 | 2.01 | 7 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Kegiatan pengelolaan Informasi Publik Melalui Radio SPL FM dan TV Lokal | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 1.265.100,000 | 298.160,00 | 12,00 | 292.498,61 | 100,00 | 23,12 | 98,10 | 12,00 | 292.499 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 2 | 2.01 | 1 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Forum Konsultasi Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Penguatan PPID | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 89.100,000 | 44.040,00 | 2,00 | 40.908,97 | 100,00 | 45,91 | 92,89 | 2,00 | 40.909 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 2 | 2.01 | 6 | Layanan Hubungan Media | Jumlah kerjasama media dengan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi penyebaran informasi pembangunan daerah | enis med | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 282.993,200 | 319.662,00 | 3,00 | 315.310,00 | 100,00 | 111,42 | 98,64 | 3,00 | 315.310 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 16 | 2 | 2.01 | 7 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Kegiatan talkshow dan rapat kerja dengan organisasi pemerintah dan organisasi masyarakat mengenai layanan informasi publik | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 50.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 2 | 2.01 | 1 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk | kelompol | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 107.035,850 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 2 | 2.01 | 11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Jumlah kegiatan pengelolaan administrasi komisi informasi sebagai lembaga informasi publik | bulan | | | | | 12,00 | 276.641,000 | 184.950,00 | 12,00 | 183.750,00 | 100,00 | 66,42 | 99,35 | 12,00 | 183.750 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **83,33** | **45,16** | **81,06** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **SR** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 16 | **3** | **0.00** | | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | **Persetase perangkat daerah yag terkoneksi dijaringan intra pemerintah atau menggunaan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | **3** | **2.01** | | **Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Terselenggaranya pengelolaan domain dan sub domain milik pemerintah daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | **3** | **2.01** | **2** | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | Nama Domain dan Sub Domain Terdaftar | Domain | | | | | 1 | 5.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | **3** | **2.01** | **3** | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pengawasan dan penataan domain dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah | Aplikasi | | | | | 4 | 130.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 3 | 2.02 | | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Layanan jaringan internet pemerintah bagi OPD | Bulan | | | | | 12 | 2.000.000,000 | 314.290,00 | 12,00 | 309.712,72 | 100,00 | 15,49 | 98,54 | 12,00 | 309.713 | 0,00 | 0,00 | |
| **2** | **16** | **3** | **2.02** | **1** | **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Terpenuhinya pengelolaan E-Government/SPBE baik Infrastruktur maupun sistem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | **3** | **2.02** | **3** | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE | bulan | | | | | 12 | 200.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | **3** | **2.02** | **3** | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Informasi Elektronik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. | bulan | | | | | 12 | 150.000,000 | 294.000,00 | 12,00 | 282.273,69 | 100,00 | 188,18 | 96,01 | 12,00 | 282.274 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | **3** | **2.02** | **3** | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Peralatan dan perangkat elektronik di pusat data dan command center dapat di maintenance dan dipelihara | bulan | | | | | 12 | 150.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | **3** | **2.02** | **3** | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | sistem komunikasi intra pemerintah daerah/radio komunikasi pemkab dapat dilaksanakan | bulan | | | | | 12 | 50.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | **3** | **2.02** | **3** | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | Kegiatan Kordinasi dan sinkronisasi sistem Keamanan informasi dengan instansi Pembina ditingkat Pemerintah pusat dan propinsi dapat terlaksana | bulan | | | | | 12 | 50.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 16 | 3 | 2.02 | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik dalam lingkup pemerintah daerah dapat terlaksana. | bulan | | | | | 12 | 100.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 3 | 2.02 | 3 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Proses Bisnis Pengembangan Aplikasi SPBE yang telah tersusun | bulan | | | | | 12 | 250.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 3 | 2.02 | 3 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Terselenggaranya sistem penghubung layanan pemerintah | bulan | | | | | 12 | 10.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 3 | 2.02 | 3 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas (Pembangunan War Room) | bulan | | | | | 12 | 1.500.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 3 | 2.02 | 3 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | bulan | | | | | 12 | 75.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 3 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Pengelolaan Government Chief Information Officer | bulan | | | | | 12 | 30.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **101,83** | **97,28** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 16 | 1 | 0.00 | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 1 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan | dokumen | | | | | 58,00 | 27.013,500 | 17.639,90 | 58,00 | 17.638,70 | 100,00 | 65,30 | 99,99 | 58,00 | 17.639 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 1 | 2.01 | 1 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan evaluasi yang telah disusun dan diserahkan ke OPD yang menangani | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 58,00 | 25.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 1 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 2.776.755,969 | 2.197.783,34 | 12,00 | 1.945.833,75 | 100,00 | 70,08 | 88,54 | 12,00 | 1.945.834 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah pengelolaan administrasi keuangan dan kesekretariatan yang dilaksanakan di Kominfo. | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 93.770,000 | 82.868,50 | 12,00 | 79.358,50 | 100,00 | 84,63 | 95,76 | 12,00 | 79.359 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD, Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran, Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran, Tersusunnya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Tersusunya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | bulan | | | | | 12,00 | 76.362,818 | 89.460,00 | 12,00 | 87.360,00 | 100,00 | 114,40 | 97,65 | 12,00 | 87.360 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 1 | 2.02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Koordinasi dan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang dibutuhkan. | Dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 11.419,500 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 1 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim III | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 22.125,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 1 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase pemenuhan administrasi umum** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang dibutuhkan | unit | | | | | 30 | 25.000,000 | 7.348,80 | 30,00 | 7.340,00 | 100,00 | 29,36 | 99,88 | 30,00 | 7.340 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan. | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 30.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan Rumah tangga yang dibutuhkan. | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 10.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 1 | 2.06 | 9 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor, Makanan dan Minuman yang disediakan. | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 100.000,000 | 89.755,50 | 12,00 | 89.705,48 | 100,00 | 89,71 | 99,94 | 12,00 | 89.705 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 55,00 | 179.943,000 | 94.098,00 | 55,00 | 94.098,00 | 100,00 | 52,29 | 100,00 | 55,00 | 94.098 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | 1 | 2.06 | 9 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kegiatan administrasi pengelolaan yang mendorong peningkatan pencapaian Nilai SPBE | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 10.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 16 | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | **1** | **2.07** | **5** | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibutuhkan. | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 250.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | **1** | **2.07** | **6** | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang akan dibutuhkan. | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 30.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Mesin dan Peralatan Lainnya yang akan dibutuhkan | paket | | | | | 1,00 | 25.043,996 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah aplikasi layanan dan atau jaringan yang akan dibuat | Aplikasi | | | | | 1,00 | 10.000,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun | gedung | | | | | 1,00 | 20.000,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibutuhkan. | unit | | | | | 2,00 | 10.000,000 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | | | | | | | | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | **1** | **2.08** | **2** | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | bulan | | | | | 12 | 85.000,000 | 83.995,32 | 12,00 | 76.845,66 | 100,00 | 90,41 | 91,49 | 12,00 | 76.846 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | **1** | **2.08** | **3** | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Layanan Jasa perbaikan Peralatan dan Perlengkapan kantor | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 80.000,000 | 67.945,00 | 12,00 | 67.811,00 | 100,00 | 84,76 | 99,80 | 12,00 | 67.811 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | **1** | **2.08** | **4** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Layanan Jasa Kebersihan Kantor Diskominfo | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 40.000,000 | 26.545,00 | 12,00 | 26.530,70 | 100,00 | 66,33 | 99,95 | 12,00 | 26.531 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah yang terpelihara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | **1** | **2.09** | **1** | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 20.000 | 15.343,50 | 1,00 | 15.219,60 | 100,00 | 76,10 | 99,19 | 1,00 | 15.220 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | **1** | **2.09** | **2** | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas atau Operasional yang dipelihara | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 13,00 | 40.000,000 | 43.458,00 | 12,96 | 43.341,50 | 99,73 | 108,35 | 99,73 | 12,96 | 43.342 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | **1** | **2.09** | **4** | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Diskominfo yang memiliki izin | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 14,00 | 5.765,755 | 4.900,00 | 14,00 | 3.879,64 | 100,00 | 67,29 | 79,18 | 14,00 | 3.880 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 16 | **1** | **2.09** | **9** | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 10.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah layanan aplikasi yang terpelihara | Aplikasi | | | | | 2 | 10.000,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara | paket | | | | | 1 | 10.000,000 | 5.269,00 | 1,00 | 5.250,00 | 100,00 | 52,50 | 99,64 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **92,84** | **70,44** | **89,34** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **S** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **11.118.469,59** | **4.335.771,86** | | **4.006.595,269** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **88,09** | **57,80** | **85,20** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **T** | **R** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| **2** | **17** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 2 | 0.00 | | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | **Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada** | **%** | | | | | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | **2** | **2.01** | | **Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase penrtbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam** | **%** | | | | | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | **2** | **2.01** | 1 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | jumlah Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 31.200,000 | 28.721,80 | 12,00 | 28.498,30 | 100,00 | 91,34 | 99,22 | 12,00 | 28.498 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **91,34** | **99,22** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 17 | **3** | **0.00** | | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **Meningkatnya Koperasi Yang Tertib Adminstrasi** | **%** | | | | | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | **3** | **2.01** | | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | **Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang terlaksana** | **%** | | | | | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | **3** | **2.01** | 1 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi Yang Diawasi Kekuatan, kesehatan, Kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota | koperasi | | | | | 290 | 72.500,000 | 24.883,00 | 219,99 | 18.817,00 | 75,86 | 25,95 | 75,62 | 219,99 | 18.817 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **75,86** | **25,95** | **75,62** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **S** | **SR** | **S** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 17 | **4** | **0.00** | | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **Persentase Koperasi Kategori Sehat** | **%** | | | | | **723,00** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | **4** | **2.01** | | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana** | **%** | | | | | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | **4** | **2.01** | 1 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya | Koperas | 0,00 | - | 0,00 | - | 145,00 | 36.250,000 | 13.067,76 | 145,00 | 11.825,40 | 100,00 | 32,62 | 90,49 | 145,00 | 11.825 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 17 | **4** | **2.01** | 2 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penghargaan Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota | Koperasi | | | | | 6 | 100.000,000 | 67.157,98 | 2,00 | 15.477,30 | 33,33 | 15,48 | 23,05 | 2,00 | 15.477 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **66,67** | **24,05** | **56,77** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **S** | **SR** | **R** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 17 | **5** | **0.00** | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Persentase Diklat Perkoperasian Yang Diadakan** | **%** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | **5** | **2.01** | | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana** | **%** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | **5** | **2.01** | 1 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah Anggota Koperasi Yang Mengikuti Diklat Perkoperasian | orang | | | | | 100 | 390.304,000 | 404.200,00 | 93,00 | 374.173,00 | 93,00 | 95,87 | 92,57 | 93,00 | 374.173 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **93,00** | **95,87** | **92,57** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 17 | **6** | **0.00** | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **Persentase Peningkatan Volume Usaha dan Modal Usaha Koperasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | **6** | **2.01** | | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | **6** | **2.01** | 1 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi Yang Diberikan Dukungan Pembiayaan, Pemasaran, Pendampingan dan Kemitraan | Koperas | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 415.000,000 | 37.422,00 | 3,00 | 27.575,94 | 100,00 | 6,64 | 73,69 | 3,00 | 27.576 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **6,64** | **73,69** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **S** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 17 | **7** | **0.00** | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **Persentase UMKM Yang Diberdayakan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | **7** | **2.01** | | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | **Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | **7** | **2.01** | 1 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro Yang Diinput Ke Dalam Sistem Data Online (ODS) | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 150.000,000 | 43.512,00 | 1,00 | 37.307,55 | 100,00 | 24,87 | 85,74 | 1,00 | 37.308 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 17 | 7 | 2.01 | 2 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro Yang Bermitra | usaha | 0,00 | - | 0,00 | - | 250,00 | 87.500,000 | 26.312,00 | 238,00 | 25.046,00 | 95,20 | 28,62 | 95,19 | 238,00 | 25.046 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 17 | 7 | 2.01 | 3 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Persentase Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro yang terlaksana | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 80,00 | 50.000,000 | 52.512,00 | 79,96 | 52.480,00 | 99,95 | 104,96 | 99,94 | 79,96 | 52.480 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 17 | 7 | 2.01 | 4 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro Yang Di Fasilitasi Pelatihan, Pemasaran dan Standarisasi Produk | usaha | 0,00 | - | 0,00 | - | 21,00 | 290.544,126 | 527.965,58 | 18,00 | 431.179,17 | 85,71 | 148,40 | 81,67 | 18,00 | 431.179 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 17 | 7 | 2.01 | 5 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro Yang Diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha | usaha | | | | | 31178 | 50.000,000 | 32.895,00 | 25285,36 | 26.678,40 | 81,10 | 53,36 | 81,10 | ##### | 26.678 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **92,39** | **72,04** | **88,73** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **S** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 17 | **8** | **0.00** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | **8** | **2.01** | | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | **8** | **2.01** | 1 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru | usaha | 0,00 | - | 0,00 | - | 40,00 | 1.730.000,000 | 1.264.055,00 | 36,00 | 1.126.682,50 | 90,00 | 65,13 | 89,13 | 36,00 | 1.126.683 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **90,00** | **65,13** | **89,13** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **R** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | | | | | | | **3.403.298,13** | **2.522.704,12** | | **2.175.740,563** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **88,27** | **54,43** | **82,25** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **T** | **R** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| **2** | **18** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | **2** | **0.00** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **Jumlah Nilai Investasi PMA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | **2** | **2.02** | | **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Yang terlaksana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | **2** | **2.02** | 1 | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah peraturan bupati tentang penanaman modal | buku | 0,00 | - | 0,00 | - | 150,00 | 24.300,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | **2** | **2.02** | | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** | **Persentase Penyajian informasi penanaman modal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | **2** | **2.02** | 1 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah buku mengenai data dan informasi mitra lokal bulukumba | buku | 0,00 | - | 0,00 | - | 150,00 | 30.464,600 | 8.120,60 | 150,00 | 8.094,60 | 100,00 | 26,57 | 99,68 | 150,00 | 8.095 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **26,57** | **99,68** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 18 | **3** | **0.00** | | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **Jumlah Nilai Investasi PMDN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | **3** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase koordinasi Perencanaan dan Promosi Potensi Unggulan Daerah Kab. Bulukumba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | **3** | **2.01** | 1 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Jumlah sarana dan prasarana promosi pameran yang disiapkan | kegiatan | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 13.262,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | **3** | **2.01** | 2 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Ikut sertanya Dalam Pameran Kab, Prop, dan Nasinal serta Rapat Koordinasi | kegiatan | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 66.568,000 | 15.197,00 | 2,00 | 15.179,00 | 100,00 | 22,80 | 99,88 | 2,00 | 15.179 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **22,80** | **99,88** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 18 | **4** | **0.00** | | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **Meningkatnya pelayanan perizinan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | **4** | **2.01** | | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | **Persentase administrasi pelayanan perizinan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 1 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Perizinan yang diterbitkan | jenis | 0,00 | - | 0,00 | - | 23,00 | 214.559,500 | 132.995,00 | 22,99 | 132.699,75 | 99,96 | 61,85 | 99,78 | 22,99 | 132.700 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 3 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Pengawasan dan Pengaduan Perizinan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 9.228,665 | 96.805,00 | 12,00 | 94.857,00 | 100,00 | 1027,85 | 97,99 | 12,00 | 94.857 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **99,98** | **544,85** | **98,88** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 18 | **5** | **0.00** | | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN dan PMA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | **5** | **2.01** | | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Yang terlaksana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | **5** | **2.01** | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah laporan LKPM | semester | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 64.843,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | **5** | **2.01** | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Sosialisasi tata cara pengisian LKPM yang terlaksana | ecamata | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 210.290,500 | 170.575,07 | 5,00 | 170.474,91 | 100,00 | 81,07 | 99,94 | 5,00 | 170.475 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | **5** | **2.01** | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah perusahaan yang diawasi | MA/PMD | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 99.512,000 | 165.994,93 | 100,00 | 165.994,93 | 100,00 | 166,81 | 100,00 | 100,00 | 165.995 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **123,94** | **99,97** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 18 | **5** | **0.00** | | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN dan PMA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | **5** | **2.01** | | **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | **5** | **2.01** | 1 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah buku Data Base Perizinan | semester | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 10.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **SR** | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 18 | **1** | **0.00** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,Terwujudnya pelayanan Administrasi Keuangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | **1** | **2.01** | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumah dokumen Renstra dan Renja | dokume | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 47.629,970 | 18.689,10 | 2,00 | 18.468,40 | 100,00 | 38,77 | 98,82 | 2,00 | 18.468 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | **1** | **2.01** | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumah dokumen RKA dan RKAP | dokume | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 23.160,000 | 13.506,93 | 2,00 | 13.442,50 | 100,00 | 58,04 | 99,52 | 2,00 | 13.443 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | **1** | **2.01** | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumah dokumen DPA dan DPAP | dokume | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 10.955,700 | 5.610,00 | 2,00 | 5.609,90 | 100,00 | 51,21 | 100,00 | 2,00 | 5.610 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | **1** | **2.01** | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumah dokumen Lakip | dokume | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 5.799,690 | 800,00 | 1,00 | 800,00 | 100,00 | 13,79 | 100,00 | 1,00 | 800 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | **1** | **2.01** | 6 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumah dokumen evaluasi | dokume | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 14.772,740 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor,Terwujudnya pelayanan Administrasi Keuangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | **1** | **2.02** | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Gaji dan Tunjangan ASN | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 6.389.663,097 | 5.183.803,77 | 12,00 | 4.393.337,82 | 100,00 | 68,76 | 84,75 | 12,00 | 4.393.338 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 18 | **1** | **2.02** | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | PersentasePelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 172.402,450 | 54.757,50 | 100,00 | 54.757,50 | 100,00 | 31,76 | 100,00 | 100,00 | 54.758 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | **1** | **2.02** | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | dokumen | | | | | 1,00 | 6.025,070 | 1.044,67 | 1,00 | 1.044,67 | 100,00 | 17,34 | 100,00 | 1,00 | 1.045 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | **1** | **2.06** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | **1** | **2.06** | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah yang aparat yang mengikuti Latpim , Bimtek, Sosialisasi dan Seminar | orang | | | | | 1,00 | 22.125,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | **1** | **2.06** | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah yang aparat yang mengikuti Latpim , Bimtek, Sosialisasi dan Seminar | orang | | | | | 1,00 | 1.950,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | **1** | **2.06** | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah ketersedian Alat Tulis Kantor | bulan | | | | | 12,00 | 1.242,500 | - | 3,00 | - | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | **1** | **2.06** | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah ketersedian Alat Tulis Kantor | bulan | | | | | 12,00 | 65.591,525 | 39.981,65 | 12,00 | 39.977,85 | 100,00 | 60,95 | 99,99 | 12,00 | 39.978 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | **1** | **2.06** | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 6.377,400 | 5.622,00 | 12,00 | 5.622,00 | 100,00 | 88,16 | 100,00 | 12,00 | 5.622 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | **1** | **2.06** | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah ketersediaan Makanan dan Minuman | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 12.178,000 | 4.826,90 | 12,00 | 4.824,07 | 100,00 | 39,61 | 99,94 | 12,00 | 4.824 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | **1** | **2.06** | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah keterlaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 176.766,917 | 35.481,32 | 12,00 | 35.469,02 | 100,00 | 20,07 | 99,97 | 12,00 | 35.469 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | **1** | **2.09** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | **1** | **2.09** | 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah pengadaan Mebeleur | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 10.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 20.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan peralatan | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 10.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan perlengkapan | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 10.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 115.313,556 | 104.224,06 | 12,00 | 98.390,85 | 100,00 | 85,32 | 94,40 | 12,00 | 98.391 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa tenaga pembersih ruang dan halaman kantor | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 89.136,000 | 57.540,00 | 5,00 | 57.539,00 | 100,00 | 64,55 | 100,00 | 5,00 | 57.539 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Adm. STNK Mobil dan Motor dan Pemeliharaan kend. Dinas roda 4 dan 2 | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 8,00 | 44.638,965 | 44.265,34 | 7,33 | 38.661,37 | 91,67 | 86,61 | 87,34 | 7,33 | 38.661 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah perbaikan peralatan kerja DPMPTSP | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 7.100,000 | 2.840,00 | 10,00 | 2.840,00 | 100,00 | 40,00 | 100,00 | 10,00 | 2.840 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah perbaikan perlengkapan kerja DPMPTSP | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 8,00 | 5.610,000 | 2.440,00 | 8,00 | 2.440,00 | 100,00 | 43,49 | 100,00 | 8,00 | 2.440 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **95,10** | **47,56** | **92,04** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | | | | | | | **8.011.466,85** | **6.165.120,84** | | **5.360.525,14** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **99,02** | **153,14** | **98,09** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| **2** | **19** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | **2** | **0.00** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **Jumlah Organisasi Olahraga dan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | **2** | **2.01** | | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | **Lancarnya pelaksanaan paskibraka,Meningkatnya prestasi pemuda** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | **2** | **2.01** | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Jumlah pemuda pelopor | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 35.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 19 | **2** | **2.01** | 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | Jumlah wirausaha muda yang dibina | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 50,00 | 27.500,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 19 | **2** | **2.01** | 3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah prestasi karya ilmiah remaja | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 148.430,000 | 180.801,00 | 5,00 | 180.800,70 | 100,00 | 121,81 | 100,00 | 5,00 | 180.801 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 19 | **2** | **2.01** | 8 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Jumlah okp yang diberi dana hibah | OKP | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 100.000,000 | 100.000,00 | 1,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 19 | **2** | **2.01** | 9 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | Jumlah pelajar yang lolos paskibra | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 72,00 | 431.030,300 | 431.274,70 | 72,00 | 430.782,80 | 100,00 | 99,94 | 99,89 | 72,00 | 430.783 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 19 | **2** | **2.01** | | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah okp yang diberi dana hibah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | **2** | **2.01** | 2 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Jumlah organisasi pemuda yang di bina | OKP | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 35.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **107,25** | **99,96** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 19 | **3** | **0.00** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | Jumlah Organisasi Olahraga, Jumlah sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 19 | **3** | **2.01** | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | **3** | **2.01** | 3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah sarana olahraga yang dibangun | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 7,00 | 5.502.850,000 | 911.295,00 | 6,29 | 818.421,80 | 89,81 | 14,87 | 89,81 | 6,29 | 818.422 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 19 | **3** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Meningkatnya prestasi olahraga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | **3** | **2.02** | 1 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Terlaksananya lomba lari 10K dan kejuaran piala menpora | event | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 62.127,312 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 19 | **3** | **2.02** | 2 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah cabang olahraga yang di bina | cabor | 0,00 | - | 0,00 | - | 28,00 | 2.360.619,811 | 2.133.232,18 | 28,00 | 2.133.200,00 | 100,00 | 90,37 | 100,00 | 28,00 | 2.133.200 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 19 | **3** | **2.02** | 3 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Jumlah atlet yang ikut kejuaraan-kejuaraan | atlet | 0,00 | - | 0,00 | - | 25,00 | 35.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 19 | **3** | **2.03** | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** | **Meningkatnya prestasi atlet usia dini** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | **3** | **2.03** | 1 | Seleksi Atlet Daerah | Jumlah atlet usia dini yang ikut kejuaraan | atlet | 0,00 | - | 0,00 | - | 30,00 | 104.127,750 | 58.408,25 | 30,00 | 56.638,25 | 100,00 | 54,39 | 96,97 | 30,00 | 56.638 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 19 | **3** | **2.03** | 3 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | Jumlah klub olahraga yang di bina | klub | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 78.622,000 | 80.244,00 | 1,89 | 73.722,00 | 94,44 | 93,77 | 91,87 | 1,89 | 73.722 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 19 | **3** | **2.03** | 3 | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah atlet dan pelatih yang mendapatkan penghargaan | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 25,00 | 37.925,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 19 | **3** | **2.05** | | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | **Meningkatnya minat masyarakat untuk berolahraga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | **3** | **2.05** | 3 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah pelatih dan wasit yang mendapatkan lisensi | Lokasi | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 48.940,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 19 | **3** | **2.05** | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** | **Meningkatnya minat masyarakat untuk berolahraga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | **3** | **2.05** | 3 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 59.850,000 | 48.300,00 | 2,00 | 48.300,00 | 100,00 | 80,70 | 100,00 | 2,00 | 48.300 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **96,85** | **66,82** | **95,73** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **S** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 19 | **4** | **0.00** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | **Meningkatnya kapasitas organisasi Kepramukaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | **4** | **2.01** | | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** | **Meningkatnya kegiatan kepramukaan di setiap kecamatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | **4** | **2.01** | 2 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah kwartir pramuka yang mendapatkan pembinaan | kwarcab | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 100.000,000 | 100.000,00 | 1,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **9.167.022,17** | **4.043.555,13** | | **3.941.865,552** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **98,95** | **91,36** | **98,56** | | | **#REF!** | **#REF!** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **#REF!** | **#REF!** | |
| **2** | **20** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | **2** | **0.00** | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | **2** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **Tersedianya Data Statistik Sektoral dengan Terlaksananya Pengumpulan Data dan Statistik Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | **2** | **2.01** | **1** | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Koordinasi dan Sinkronisasi serta Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 10.000,000 | 13.340,00 | 5,00 | 13.340,00 | 100,00 | 133,40 | 100,00 | 5,00 | 13.340 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 20 | **2** | **2.01** | **1** | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Koordinasi dan Sinkronisasi serta Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 15.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **133,40** | **100,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **25.000,000** | **13.340,00** | | **13.340,000** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **100,00** | **133,40** | **100,00** | | | **0,00** | **0,00** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3) | ST | ST | ST | | | SR | SR | |
| **2** | **21** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 21 | **2** | **0.00** | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 21 | **2** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Meningkatnya Tertib Administrasi Pesandian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 21 | **2** | **2.01** | **1** | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, Terlaksananya Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dapat dikelola | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 10.000,000 | 13.675,00 | 12,00 | 13.675,00 | 100,00 | 136,75 | 100,00 | 12,00 | 13.675 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 21 | **2** | **2.01** | **3** | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dapat tersedia | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 5.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 21 | **2** | **2.02** | | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Tersedianya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 21 | **2** | **2.02** | **1** | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terlaksana | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 5.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **136,75** | **100,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **20.000,000** | **13.675,00** | **13.675,000** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **100,00** | **136,75** | **100,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| **2** | **22** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | **2** | **0.00** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | **2** | **2.01** | | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Pemajuan Tradisi Budaya** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 2 | 2.01 | 2 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan iinvetarisasi | kegiatan | 1,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 1,00 | 50.000,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 1,00 | 50.000 | 100,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **50,00** | **100,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 22 | **2** | **0.00** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan pelatihan/pembinaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | **2** | **2.02** | | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Kesenian Tradisional** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 2 | 2.02 | 1 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Kesenian Tradisional | kegiatan | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 50.000,00 | 24.750,00 | 1,00 | 24.750,00 | 100,00 | 49,50 | 100,00 | 1,00 | 24.750 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **49,50** | **100,00** | | | **33,33** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 22 | **5** | **0.00** | | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **Jumlah Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | **5** | **2.01** | | **Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | **Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 5 | 2.01 | 2 | Penetapan Cagar Budaya | Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya | % | 100,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 200.000,00 | 373.856,00 | 8,82 | 32.940,00 | 8,82 | 16,47 | 8,81 | 8,82 | 32.940 | 8,82 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **8,82** | **16,47** | **8,81** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **SR** | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **350.000,000** | **448.606,000** | **107.690,000** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **69,61** | **38,66** | **69,60** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **S** | **SR** | **S** | | | **SR** | **SR** | |
| **2** | **23** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 23 | 2 | 0.00 | | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk, Presentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat, Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk, Persentase Jumlah KCKR daerah yang dihimpun** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Bulukumba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 1 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan E-Book | lembar | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 9.000,000 | 20.000,00 | 100,00 | 16.315,00 | 100,00 | 181,28 | 81,58 | 100,00 | 16.315 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 2 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengunjung perpustakaan | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 4345,00 | 8.368,650 | 22.342,70 | 4345,00 | 22.109,700 | 100,00 | 264,20 | 98,96 | 4345 | 22.110 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 3 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koleksi pengembangan kekhasan perpustakaan | judul | 0,00 | - | 0,00 | - | 20,00 | 4.540,374 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 4 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustkaan Sekolah yang dibina | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 8.359,200 | 2.305,00 | 12,00 | 2.305,000 | 100,00 | 27,57 | 100,00 | 12,00 | 2.305 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 5 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang di bina | Perpustakan Khusus | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 4.701,150 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 6 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan tenagaPerpustakaan dan Pustakawan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 34.646,760 | 20.380,10 | 12,00 | 20.258,100 | 100,00 | 58,47 | 99,40 | 12,00 | 20.258 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 7 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Koleksi dalam pengembangan layanan perpustakaan Rujukan | Eksampla | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 2.236,500 | 2.675,00 | 100,00 | 2.675,000 | 100,00 | 119,61 | 100,00 | 100,00 | 2.675 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 8 | Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Koleksi dalam pengembangan bahan pustaka | Eksampla | 0,00 | - | 0,00 | - | 1221,00 | 13.567,950 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 9 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Koleksi dalam pengembangan bahan pustaka | Eksampla | 0,00 | - | 0,00 | - | 1221,00 | 2.610,000 | 732,40 | 1221,00 | 482,400 | 100,00 | 18,48 | 65,87 | ##### | 482 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 1 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Pustakawan dan Jumlah Profil Perpustakaan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 8.992,692 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 2 | 2.02 | | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten Bulukumba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 2 | 2.02 | 1 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Peserta dalam sosialisasi budaya baca dan literasi ditingkat pendidikan | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 90,00 | 25.879,590 | 22.517,00 | 90,00 | 22.186,000 | 100,00 | 85,73 | 98,53 | 90,00 | 22.186 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 2 | 2.02 | 2 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perustakaan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 2.138,400 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 2 | 2.02 | 3 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah peserta Penerima Penghargaan gemar memebaca | orang | | | | | 27,00 | 810,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 2 | 2.02 | 4 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Peserta dalam pengembangan literasi berbasis inklusi sosial | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 90,00 | 41.191,650 | 29.722,90 | 90,00 | 29.722,900 | 100,00 | 72,16 | 100,00 | 90,00 | 29.723 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 2 | 2.02 | 5 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang dalam pemilihan Duta Baca tingkat daerah provinsi | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 70,00 | 6.628,500 | 5.535,00 | 70,00 | 5.535,00 | 100,00 | 83,50 | 100,00 | 70,00 | 5.535 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **101,22** | **93,81** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 23 | 3 | 0.00 | | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | **Persentase Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi/terdaftar yang ada diwilayahnya, Persentase Jumlah naskah kuno yang dialihaksara dan dialihbahasa, Persentase Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada diwilayahnya** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 3 | 2.01 | | **Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/ kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 23 | 3 | 2.01 | 1 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | terciptanya peran masyarkat dalam penyimpanan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 1.799,100 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 3 | 2.01 | 2 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Terlaksananya pengembangan dan pengalihmedian naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 882,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 3 | 2.02 | | **Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 3 | 2.02 | 1 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Tersedianya koleksi budaya etnis nusantara | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 922,500 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 3 | 2.02 | 2 | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Terkelolanya koleksi etnis budaya nusantara | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 495,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **SR** | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 23 | 1 | 0.00 | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Perpustakaan dan Kearsifan)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penyususnan perencanaan | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 7,00 | 36.498,285 | 14.034,00 | 7,00 | 12.855,940 | 100,00 | 35,22 | 91,61 | 7,00 | 12.856 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Penyususnan RKA | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 6.963,083 | 8.261,34 | 5,00 | 8.261,340 | 100,00 | 118,64 | 100,00 | 5,00 | 8.261 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Penyususnan DPA | dokumen | | | | | 2 | 6.396,083 | 8.762,98 | 2,00 | 7.586,960 | 100,00 | 118,62 | 86,58 | 2,00 | 7.587 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 2.262,600 | 2.700,00 | 9,72 | 2.700,000 | 81,00 | 119,33 | 100,00 | 9,72 | 2.700 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan kearsipan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang dibayarkan setiap bulannya selama satu tahun | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 2.918.219,395 | 2.282.224,49 | 9,72 | 1.606.292,443 | 81,00 | 55,04 | 70,38 | 9,72 | 1.606.292 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Laporan penatausahaan keuangan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 111.439,784 | 103.540,00 | 12,12 | 99.100,000 | 101,00 | 88,93 | 95,71 | 12,12 | 99.100 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan Keuangan akhir tahun | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 2.615,400 | 3.639,91 | 1,00 | 2.967,910 | 100,00 | 113,48 | 81,54 | 1,00 | 2.968 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah peserta dalam Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | 9.360,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terwudunya Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan Alat Listrik | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 774,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 724,050 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah tangga | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 719,145 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan logistik kantor | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 39.645,675 | 28.100,00 | 12,12 | 23.780,000 | 101,00 | 59,98 | 84,63 | 12,12 | 23.780 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Cetakan dan penggandaan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 6.939,000 | 1.999,47 | 15,00 | 1.999,470 | 125,00 | 29 | 100,00 | 15,00 | 1.999 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Peserta dalam penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 39,00 | 90.483,300 | 45.291,00 | 39,00 | 45.058,800 | 100,00 | 49,80 | 99,49 | 39,00 | 45.059 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di lingkup dinas Perpustakaan dan Kearsifan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 9.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.07 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan parasarana | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 40.000,000 | 13.470,99 | 4,00 | 12.100,000 | 100,00 | 30,25 | 89,82 | 4,00 | 12.100 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 2 | 23 | 1 | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jasa surat Menyurat | bulan | | | | | 12 | 270,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | bulan | | | | | 12 | 26.885,970 | 27.128,66 | 12,12 | 26.959,974 | 101,00 | 100,28 | 99,38 | 12,12 | 26.960 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa Pelayanan umum kantor | orang | | | | | 2 | 24.000,000 | 24.000,00 | 2,00 | 24.000,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2,00 | 24.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang di pelihara | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 9,00 | 36.000,000 | 13.600,00 | 7,71 | 12.004,779 | 85,71 | 33,35 | 88,27 | 7,71 | 12.005 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor Yang dipelihara | paket | | | | | 1 | 1.000,000 | 2.060.000,00 | 1,00 | 1.706.687,00 | 100,00 | ####### | 82,85 | 1,00 | 1.706.687 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **98,38** | **11448,03** | **91,35** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **3.547.965,79** | **4.762.962,93** | **3.713.943,716** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **99,19** | **5774,63** | **92,58** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| **2** | **24** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 24 | 2 | 0.00 | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **Pesentase Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 24 | 2 | 2.01 | | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten bulukumba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 24 | 2 | 2.01 | 1 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah OPD Yang diawasi | OPD | | | | | 36 | 23.150,790 | 18.569,920 | 36,00 | 18.563,640 | 100,00 | 80,19 | 99,97 | 36,00 | 18.564 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 24 | 2 | 2.01 | 2 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah penciptaan dan penggunaan Arsip | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 16.028,883 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 24 | 2 | 2.02 | | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten bulukumba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 24 | 2 | 2.02 | 2 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Jumlah Khasanah yang di hasilkan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 19.701,801 | 20.089,850 | 12,00 | 19.959,261 | 100,00 | 101,31 | 99,35 | 12,00 | 19.959 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **90,75** | **99,66** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **T** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 2 | 24 | 3 | 0.00 | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | **Presentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 24 | 3 | 2.04 | | **Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten Bulukumba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 24 | 3 | 2.04 | 1 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah lembar Arsip | bulan | | | | | 12 | 21.207,357 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 24 | 3 | 2.04 | 2 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah lembar Arsip | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 10.305,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **SR** | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **90.393,83** | **38.659,77** | **38.522,901** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **100,00** | **90,75** | **99,66** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **ST** | **T** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **25** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 3 | 0.00 | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **Peningkatan produksi perikanan tangkap** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 3 | 25 | 3 | 2.01 | | **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **Terlaksananya pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 3 | 2.01 | 1 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Dokumen | dokumen | | | | | 1 | 50.000,000 | 30.033,00 | 1,00 | 22.641,32 | 100,00 | 45,28 | 75,39 | 1,00 | 22.641 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | 3 | 2.01 | 2 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Prasarana | unit | | | | | 60 | 2.028.000,000 | 3.093.803,70 | 60,00 | 2.836.496,52 | 100,00 | 139,87 | 91,68 | 60,00 | 2.836.497 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | 3 | 2.01 | 3 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Terjaminnya Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 17,00 | 8.017.100,000 | 2.537.716,00 | 15,69 | 1.990.931,45 | 92,31 | 24,83 | 78,45 | 15,69 | 1.990.931 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | 3 | 2.02 | | **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai danau waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 satu daerah kabupaten kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 3 | 2.02 | 1 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Pelatihan/Sosialisasi | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 25.000,000 | 1.615.530,00 | 1,00 | 1.154.074,00 | 100,00 | 4616,30 | 71,44 | 1,00 | 1.154.074 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | 3 | 2.02 | 2 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang Terlaksana | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 25.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | 3 | 2.03 | | **Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)** | **Terkelolanya dan Terselenggaranya Tempat Pelelangan Ikan (TPI)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 3 | 2.03 | 1 | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah TPI yang terkelola dengan baik | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 7,00 | 13.199.508,612 | - | 7,00 | 152.304,00 | 100,00 | 1,15 | 0,00 | 7,00 | 152.304 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | 3 | 2.03 | 1 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah TPI yang terselenggara | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 7,00 | 35.000,000 | 254.260,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **82,05** | **804,57** | **52,83** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **ST** | **R** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 25 | 4 | 0.00 | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **Peningkatan produksi perikanan budidaya** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 4 | 2.02 | | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | **Terkelolanya dan Terselenggaranya Tempat Pelelangan Ikan (TPI)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 4 | 2.02 | 1 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Bibit Ikan | ekot | 0,00 | - | 0,00 | - | ###### | 20.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | 4 | 2.02 | 2 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang Terlaksana | kali | | | | | 1 | 30.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | 4 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang Terlaksana | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 58.000,000 | 70.221,55 | 1,00 | 63.034,05 | 100,00 | 108,68 | 89,76 | 1,00 | 63.034 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | 4 | 2.02 | 4 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang Terlaksana | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 125.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **Terkelolanya Pembudidaya Ikan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | 2 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana perikanan Budidaya | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 16,00 | 1.175.000,000 | 1.061.070,77 | 14,40 | 940.783,80 | 90,00 | 80,07 | 88,66 | 14,40 | 940.784 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana perikanan Budidaya | paket | | | | | 3,00 | 150.000,000 | 100.433,56 | 3,00 | 98.191,70 | 100,00 | 65,46 | 97,77 | 3,00 | 98.192 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | 4 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang Terlaksana | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 20.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | 5 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang Terlaksana | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 20.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **96,67** | **84,74** | **92,07** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **T** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 25 | 6 | 0.00 | | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **Terjaminnya keberlanjutan simberdaya pembudidadayaan ikan di darat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 6 | 2.03 | | **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **Tersedianya Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 3 | 25 | | | | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelatihan/Sosialisasi yang Terlaksana | kali | | | | | 1 | 28.867,604 | 59.374,60 | 1,00 | 46.254,50 | 100,00 | 160,23 | 77,90 | 1,00 | 46.255 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **160,23** | **77,90** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 25 | **1** | **0.00** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Perikanan)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Anggaran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | **1** | **2.01** | **1** | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya renstra dan renja perangkat daerah | dokumen | | | | | 2 | 27.749,662 | 6.719,15 | 2,00 | 6.469,00 | 100,00 | 23,31 | 96,28 | 2,00 | 6.469 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.01** | **2** | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 5.249,738 | 4.999,75 | 1,00 | 3.049,75 | 100,00 | 58,09 | 61,00 | 1,00 | 3.050 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.01** | **3** | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen | dokumen | 0,00 | | 0,00 | | 1,00 | 5.249,738 | 4.999,75 | 1,00 | 4.341,75 | 100,00 | 82,70 | 86,84 | 1,00 | 4.342 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.01** | **4** | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 5.249,738 | 4.999,75 | 1,00 | 3.049,75 | 100,00 | 58,09 | 61,00 | 1,00 | 3.050 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.01** | **5** | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen | dokumen | | | | | 1,00 | 5.249,738 | 4.999,75 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.01** | **6** | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 13.098,750 | 6.745,00 | 1,00 | 6.491,00 | 100,00 | 49,55 | 96,23 | 1,00 | 6.491 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.01** | **7** | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan | laporan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 26.110,350 | 14.967,00 | 12,00 | 14.200,75 | 100,00 | 54,39 | 94,88 | 12,00 | 14.201 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Ketepatan Waktu Laporan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | **1** | **2.02** | **1** | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan yang Terbayarkan | bulan | | | | | 12,00 | 4.661.668,384 | 3.964.236,17 | 12,00 | 3.757.246,07 | 100,00 | 80,60 | 94,78 | 12,00 | 3.757.246 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.02** | **3** | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Honorarium Pengelola Keuangan | bulan | | | | | 12,00 | 259.067,353 | 108.166,05 | 12,00 | 108.166,05 | 100,00 | 41,75 | 100,00 | 12,00 | 108.166 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.02** | **5** | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 5.391,750 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Pejabat yang Mengikuti Latpim** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | **1** | **2.05** | **11** | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek/Pelatihan | orang | | | | | 1,00 | 34.975,500 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | **1** | **2.06** | **1** | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Alat Listrik/Penerangan | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 25,00 | 3.280,613 | 2.982,38 | 25,00 | 2.982,38 | 100,00 | 90,91 | 100,00 | 25 | 2.982 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.06** | **4** | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 800,00 | 31.744,350 | 20.332,95 | 800,00 | 20.332,95 | 100,00 | 64,05 | 100,00 | 800 | 20.333 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.06** | **5** | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Bahan Cetakan dan Penggandaan | lembar | | | | | 2500,00 | 17.243,952 | 10.001,64 | 2500,00 | 9.754,14 | 100,00 | 56,57 | 97,53 | 2500 | 9.754 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.06** | **6** | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Koran | koran | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 3.178,000 | 1.980,00 | 3,00 | 630,00 | 100,00 | 19,82 | 31,82 | 3,00 | 630 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.06** | **8** | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Makan Minum Tamu dan Rapat | unit | | | | | 320,00 | 9.042,377 | 5.444,23 | 320,00 | 5.444,23 | 100,00 | 60,21 | 100,00 | 320,00 | 5.444 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.06** | **9** | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi Luar Daerah dan Dalam Daerah yang terlaksana | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 30,00 | 216.630,900 | 121.056,00 | 30,00 | 120.206,70 | 100,00 | 55,49 | 99,30 | 30,00 | 120.207 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Kantor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | **1** | **2.07** | **5** | Pengadaan Mebel | Tersedianya mebeleur | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 7.865,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.07** | **6** | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan peralatan gedung kant | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 30.000,000 | 14.040,24 | 3,00 | 8.870,24 | 100,00 | 29,57 | 63,18 | 3,00 | 8.870 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.07** | **1** | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor | unit | | | | | 1,00 | 5.687,000 | 5.170,00 | 1,00 | 5.170,00 | 100,00 | 90,91 | 100,00 | 1,00 | 5.170 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | **1** | **2.08** | **2** | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, air dan listrik yang terbayar | bulan | | | | | 12,00 | 194.937,000 | 115.814,26 | 9,60 | 82.765,21 | 80,00 | 42,46 | 71,46 | 9,60 | 82.765 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.08** | **4** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honorarium Jasa Umum Kantor dan Alat Kebersihan | bulan | | | | | 12,00 | 100.482,585 | 85.017,70 | 10,80 | 85.017,70 | 90,00 | 84,61 | 100,00 | 10,80 | 85.018 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase BMD yang terpelihara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 3 | 25 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 40,00 | 109.300,000 | 91.550,00 | 40,00 | 52.607,22 | 100,00 | 48,13 | 57,46 | 40,00 | 52.607 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 4.642,000 | 4.220,00 | 5,00 | 4.220,00 | 100,00 | 90,91 | 100,00 | 5,00 | 4.220 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang terpelihara | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 9.823,000 | 8.930,00 | 1,00 | 8.930,00 | 100,00 | 90,91 | 100,00 | 1,00 | 8.930 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 25 | 1 | 2.09 | 1 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 4.697,000 | 4.270,00 | 1,00 | 4.270,00 | 100,00 | 90,91 | 100,00 | 1,00 | 4.270 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **94,35** | **59,30** | **83,12** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **R** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **30.804.090,69** | **13.434.084,94** | | **11.618.926,219** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **93,27** | **277,21** | **76,48** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **ST** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| **3** | **26** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | **2** | **0.00** | | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)** | % | | | | | **80,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | **2** | **2.01** | | **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota** | **Persentase peningkatan pengelolaan daya tarik wisata** | % | | | | | **60,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | **2** | **2.01** | 7 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Obyek wisata yang dikelola, Jumlah tenaga kebersihan obyek wisata | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 440.807,857 | 378.120,00 | 100,00 | 377.079,85 | 100,00 | 85,54 | 99,72 | 100,00 | 377.080 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **2** | **2.03** | | **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **Persentase pengelolaan kawasan strategis** | **%** | | | | | **40,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | **2** | **2.03** | 3 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pengembangan Kawasan wisata | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 146.181,189 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **2** | **2.03** | | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | **Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pariwisata** | **%** | | | | | **40,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | **2** | **2.03** | 4 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Meningkatnya pengelolaan destinasi pariwisata | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 13,00 | 3.270.947,776 | 1.401.473,13 | 10,15 | 1.094.220,53 | 78,09 | 33,45 | 78,08 | 10,15 | 1.094.221 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **2** | **2.03** | | **Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase penetapan TDUP** | % | | | | | **5,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | **2** | **2.03** | 4 | Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | Jumlah media informasi yang di sediakan, Jumlah sosialisasi pengendalian yang dilaksanakan | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 164.896,600 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **89,05** | **59,50** | **88,90** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **R** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 26 | **3** | **0.00** | | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)** | **%** | | | | | **60,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | **3** | **2.01** | | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **Persentase peningkatan pemasaran pariwisata dalam negeri** | **%** | | | | | **60,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | **3** | **2.01** | 1 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah media promosi yang digunakan | media | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 179.185,600 | 119.376,00 | 2,44 | 97.086,00 | 81,35 | 54,18 | 81,33 | 2,44 | 97.086 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **3** | **2.01** | 2 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan | event | 0,00 | - | 0,00 | - | 9,00 | 754.200,600 | 903.115,00 | 7,71 | 649.403,35 | 85,71 | 86,10 | 71,91 | 7,71 | 649.403 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **83,53** | **70,14** | **76,62** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **S** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 26 | **5** | **0.00** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD** | **%** | | | | | **1,60** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | **5** | **2.01** | | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | **Persentase peningkatan SDM kepariwisataan** | **%** | | | | | **66** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | **5** | **2.01** | 1 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah pelatihan kepariwisataan yang dilaksanakan | pelatihan | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 545.384,800 | 364.883,00 | 3,00 | 357.327,01 | 100,00 | 65,52 | 97,93 | 3,00 | 357.327 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 3 | 26 | 5 | 2.01 | 2 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah ajang bakat yang dilaksanakan | ajang | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 200.495,137 | 730.495,00 | 1,33 | 465.450,00 | 66,67 | 232,15 | 63,72 | 1,33 | 465.450 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **83,34** | **148,83** | **80,82** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 26 | **1** | **0.00** | ## | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Tersedianya dokumen perencanaan, dokumen evaluasi pelaporan, serta dokumen pendukung lainnya** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | **1** | **2.01** | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 18,00 | 176.342,467 | 94.714,10 | 18,00 | 94.228,60 | 100,00 | 53,44 | 99,49 | 18,00 | 94.229 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **1** | **2.01** | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 17.710,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **1** | **2.01** | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 14.350,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **1** | **2.01** | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen LAKIP | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 18,00 | 6.966,000 | 5.183,90 | 24,00 | 5.176,70 | 133,33 | 74,31 | 99,86 | 24,00 | 5.177 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **1** | **2.01** | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Dispora | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 18,00 | 26.138,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, tersusunnya dokumen LK dan perjanjian kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | **1** | **2.02** | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang di Bayarkan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 6.870.674,946 | 5.273.758,19 | 10,80 | 4.503.900,70 | 90,00 | 65,55 | 85,40 | 10,80 | 4.503.901 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **1** | **2.02** | 3 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Operator Komputer Lingkup Keuangan | Orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 18.010,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **1** | **2.02** | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Pengelola Penatausahaan Keuangan dan Barang | Orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 8,00 | 223.702,100 | 132.510,00 | 8,00 | 132.460,00 | 100,00 | 59,21 | 99,96 | 8,00 | 132.460 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **1** | **2.02** | 3 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Pelaksanaan Akutansi Dispora | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 10.316,900 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **1** | **2.02** | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dispora | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 5.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **1** | **2.04** | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | **1** | **2.04** | 1 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | Pemantauan PAD | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 46.362,800 | 328.123,30 | 12,00 | 326.601,18 | 100,00 | 704,45 | 99,54 | 12,00 | 326.601 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **1** | **2.04** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase pelaksanaan Diklat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | **1** | **2.04** | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Peserta latpim | Orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 31.812,330 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terpenuhinya kebutuhan rutin administrasi perkantoran pemerintah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | **1** | **2.06** | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Listrik yang dibeli | buah | 0,00 | - | 0,00 | - | 64,00 | 3.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **1** | **2.06** | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah perlengkapan dan Perelatan Gedung Kantor yang Tersedia | jenis | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 3.207,750 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **1** | **2.06** | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya atk | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 244.306,204 | 116.622,99 | 11,76 | 116.622,74 | 98,00 | 47,74 | 100,00 | 11,76 | 116.623 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **1** | **2.06** | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barabg yang Cetak dan digandakan | jenis | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 5.678,640 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **1** | **2.06** | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah kunjungan tamu | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 16.155,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **1** | **2.06** | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah perjalanan Dinas | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 40,00 | 368.747,036 | 228.013,00 | 39,96 | 227.766,41 | 99,89 | 61,77 | 99,89 | 39,96 | 227.766 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terpenuhinya kebutuhan rutin administrasi perkantoran pemerintah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | **1** | **2.07** | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas yang adakan | Unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 143.906,200 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **1** | **2.07** | 7 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | tersedianya aset lainnya | Unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 11,00 | 193.718,096 | 10.687,99 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **1** | **2.07** | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan | Unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 9.504,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpenuhinya kebutuhan rutin administrasi perkantoran pemerintah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | **1** | **2.08** | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai yang diadakan | buah | 0,00 | - | 0,00 | - | 300,00 | 1.650,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 3 | 26 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jaringan telepon, listrik, dan air | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 234.541,644 | 130.575,00 | 100,00 | 121.185,13 | 100,00 | 51,67 | 92,81 | 100,00 | 121.185 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah alat dan bahan pembersih | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 462.536,000 | 340.450,00 | 100,00 | 333.400,00 | 100,00 | 72,08 | 97,93 | 100,00 | 333.400 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | 1 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpenuhinya kebutuhan rutin administrasi perkantoran pemerintah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan Pajak yang disediakan | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 7,00 | 61.648,134 | 48.388,15 | 6,22 | 41.672,77 | 88,89 | 67,60 | 86,12 | 6,22 | 41.673 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | 1 | 2.09 | 1 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Mesin yang dipelihara | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 6.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | 1 | 2.09 | 1 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 63.030,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 26 | 1 | 2.09 | 1 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 7.500,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **91,83** | **114,35** | **87,36** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **14.974.613,81** | **10.606.488,74** | | **8.943.580,959** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **86,93** | **98,21** | **83,43** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **T** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| **3** | **27** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 1 | 0.00 | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik(Dinas Ketahanan Pangan)** | **100** | | | | | **Persen** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 1 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah** | **100** | | | | | **Persen** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 65.177,000 | 15.930,00 | 1,00 | 15.930,00 | 100,00 | 24,44 | 100,00 | 1,00 | 15.930 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 1 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen | dokumen | | | | | 1,00 | 8.900,000 | 3.960,00 | 1,00 | 3.942,00 | 100,00 | 44,29 | 99,55 | 1,00 | 3.942 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 1 | 2.01 | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | "Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan" | dokumen | | | | | 1,00 | 3.400,000 | 4.092,00 | 1,00 | 3.960,00 | 100,00 | 116,47 | 96,77 | 1,00 | 3.960 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 1 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen | dokumen | | | | | 1,00 | 7.467,115 | 4.023,03 | 1,00 | 3.987,03 | 100,00 | 53,39 | 99,11 | 1,00 | 3.987 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 1 | 2.01 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | "Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan" | dokumen | | | | | 1,00 | 1.967,455 | 3.960,00 | 1,00 | 3.930,00 | 100,00 | 199,75 | 99,24 | 1,00 | 3.930 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen | kecamata | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 15.000,500 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | kecamata | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 65.421,080 | 12.891,00 | 10,00 | 11.951,00 | 100,00 | 18,27 | 92,71 | 10,00 | 11.951 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 1 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 22.452.215,130 | 17.809.346,56 | 12,00 | 16.146.290,27 | 100,00 | 71,91 | 90,66 | 12,00 | 16.146.290 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Admisnistrasi ASN Yang disediakan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 80.242,500 | - | 3,00 | - | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Honorarium pengelola keuangan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 269.712,900 | 188.370,00 | 12,00 | 180.120,00 | 100,00 | 66,78 | 95,62 | 12,00 | 180.120 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 1 | 2.02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 13.327,284 | 3.700,00 | 1,00 | 3.700,00 | 100,00 | 27,76 | 100,00 | 1,00 | 3.700 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 1 | 2.02 | 8 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah laporan | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 500,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 3 | 27 | **1** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Tercapainya monev dan pelaporan program/kegiatan pembangunan pertanian/ Pengamanan aset daerah** | **Persen** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | **1** | **2.03** | 1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD | laporan | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 3.577,640 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **1** | **2.03** | 2 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Terlaksananya monev dan pelaporan program/kegiatan pembangunan pertanian/ Pengamanan aset daerah | ecamata | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 3.077,640 | 2.988,00 | 10,00 | 2.747,00 | 100,00 | 89,26 | 91,93 | 10,00 | 2.747 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **1** | **2.03** | 5 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan barang pengguna semesteran | laporan | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 3.477,640 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kualitas disiplin dan SDM aparatur sipil negara semakin meningkat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | **1** | **2.05** | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Bimtek Sumberdaya Aparatur | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 72.125,000 | 22.125,00 | 1,00 | 17.000,00 | 100,00 | 23,57 | 76,84 | 1,00 | 17.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran berjalan dengan maksimal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | **1** | **2.06** | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen listrik | paket | | | | | 1,00 | 4.444,994 | 3.841,20 | 1,00 | 3.841,20 | 100,00 | 86,42 | 100,00 | 1,00 | 3.841 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **1** | **2.06** | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya ATK | paket | | | | | 1,00 | 9.217,557 | 8.221,42 | 1,00 | 8.221,42 | 100,00 | 89,19 | 100,00 | 1,00 | 8.221 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **1** | **2.06** | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah alat tulis kantor | Bulan | | | | | 12,00 | 249.390,441 | 161.310,42 | 12,00 | 161.140,00 | 100,00 | 64,61 | 99,89 | 12,00 | 161.140 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **1** | **2.06** | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah cetak dan penggandaan | Bulan | | | | | 12,00 | 53.599,233 | 68.362,20 | 9,60 | 63.749,70 | 80,00 | 118,94 | 93,25 | 9,60 | 63.750 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **1** | **2.06** | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan berlangganan koran | Bulan | | | | | 12,00 | 960,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **1** | **2.06** | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Makan Minum Tamu dan Rapat | Bulan | | | | | 12,00 | 25.351,700 | 19.967,40 | 9,24 | 15.467,40 | 77,00 | 61,01 | 77,46 | 9,24 | 15.467 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **1** | **2.06** | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi Luar Daerah dan Dalam Daerah yang terlaksana | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 588.445,765 | 186.243,00 | 12,60 | 186.243,00 | 105,00 | 31,65 | 100,00 | 12,60 | 186.243 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran berjalan dengan maksimal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | **1** | **2.07** | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional roda 2 dan roda 4 DTPHP Kab. Bulukumba | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 90.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **1** | **2.07** | 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebeluer | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 14.360,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **1** | **2.07** | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pelataran pendukung gedung kantor yang diadakan | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 125.000,000 | 61.244,21 | 1,00 | 53.634,70 | 100,00 | 42,91 | 87,58 | 1,00 | 53.635 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **1** | **2.07** | 7 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Tersedianya aplikasi untuk CP/CL tingkat Kabupaten DTPHP Kab. Bulukumba | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 5.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **1** | **2.07** | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 50.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran berjalan dengan maksimal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | **1** | **2.08** | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, air dan listrik yang terbayar | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 178.562,232 | 107.529,60 | 11,40 | 105.377,16 | 95,00 | 59,01 | 98,00 | 11,40 | 105.377 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **1** | **2.08** | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honorarium Jasa Umum Kantor dan Alat Kebersihan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 101.040,000 | 48.000,00 | 12,60 | 48.000,00 | 105,00 | 47,51 | 100,00 | 12,60 | 48.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran berjalan dengan maksimal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | **1** | **2.09** | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas roda 2 dan 4 | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 80,00 | 78.608,000 | 50.600,00 | 64,00 | 40.443,44 | 80,00 | 51,45 | 79,93 | 64,00 | 40.443 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **1** | **2.09** | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas operasional Yang Dipelihara dan Diperbaharui pajaknya | unit | | | | | 34,00 | 25.600,000 | - | 26,45 | - | 77,78 | 0,00 | 0,00 | 26,45 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **1** | **2.09** | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tepeliharanya peralatan gedung kantor, Tepeliharanya perlengkapan gedung kantor, Tepeliharanya kendaraan dinas,Tepeliharanya kendaraan dinas/mobil jabatan | unit | | | | | 3,00 | 64.682,466 | 27.000,00 | 1,35 | 20.058,46 | 45,00 | 31,01 | 74,29 | 1,35 | 20.058 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 3 | 27 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dilakukan rehab | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 126.010,754 | 11.320,00 | 1,00 | 9.602,00 | 100,00 | 7,62 | 84,82 | 1,00 | 9.602 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya gedung kantor | paket | | | | | 1,00 | 25.903,613 | 9.950,00 | 1,00 | 9.941,00 | 100,00 | 38,38 | 99,91 | 1,00 | 9.941 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 1 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/rehab | unit | | | | | 1,00 | 10.840,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **99,57** | **61,07** | **93,23** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **R** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 27 | **2** | **0.00** | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Persentase ketersediaan infrastruktur pertanian mendukung produksi dan produktivitas** | **4E+05** | | | | | **ton** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | **2** | **2.01** | | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | **Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Yang terlaksana** | **100** | | | | | **Persen** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | **2** | **2.01** | 1 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah kelompok tani yang terdampingi sesuai komoditas, teknologi dan spesifik lokasi | kelompok | | | | | 142,00 | 71.000,000 | 1.710.000,00 | 142,00 | 1.617.512,00 | 100,00 | 2278,19 | 94,59 | 142,00 | 1.617.512 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **2** | **2.01** | 2 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian | Paket | | | | | 1,00 | 3.705.202,206 | 1.644.232,00 | 1,00 | 1.567.494,00 | 100,00 | 42,31 | 95,33 | 1,00 | 1.567.494 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **2** | **2.02** | | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Tercapainya peningkatan produksi dan mutu pangan sektor pertanian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | **2** | **2.02** | 1 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | Meningkatnya produksi tanaman komoditi aneka kacang dan umbi | paket | | | | | 1,00 | 100.000,000 | 151.606,00 | 1,00 | 147.326,00 | 100,00 | 147,33 | 97,18 | 1,00 | 147.326 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **2** | **2.02** | 2 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah hewan yang ditingkatkan kualitasnya | Ekor | | | | | 5000,00 | 10.346.500,000 | 1.124.268,00 | 5000,00 | 979.331,01 | 100,00 | 9,47 | 87,11 | ##### | 979.331 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **2** | **2.02** | 3 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah ternak yang mendapatkan identitas | Ekor | | | | | ###### | 530.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **2** | **2.05** | | **Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | **2** | **2.05** | 5 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan dalam daerah | Persen | | | | | 85,00 | 50.000,000 | 176.699,00 | 85,00 | 136.167,00 | 100,00 | 272,33 | 77,06 | 85,00 | 136.167 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **2** | **2.06** | | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | **Terlaksananya Pemberian bibit HPT yang berkualiats, bantuan ternak kepada masyarakat, Pelaksanaan IB dan Pengkartuan Ternak** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | **2** | **2.06** | 1 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah benih/bibit ternak yang diadakan | ekor | 0,00 | - | 0,00 | - | 300,00 | 3.158.384,075 | 2.162.968,75 | 15,00 | 69.700,00 | 5,00 | 2,21 | 3,22 | 15,00 | 69.700 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **2** | **2.06** | 2 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Tersedianya Hijauan Pakan Ternak | ekor | 0,00 | - | 0,00 | - | ###### | 350.000,000 | 63.501,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **72,14** | **393,12** | **64,93** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **S** | **ST** | **R** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 27 | **3** | **0.00** | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **% ptumbhn PDRB ptnian umum ADHK, pbinaan Kp.tani,ppulsi trnak,areal kom.prkbunan,Ktrsdiaan Air u/Lhn ptnian Msy.,pnrpn tknolgi ptnian,Klhirn insem.buatn,kwsn pnydia pkan&air bg tnak,Adpsi tknlgi bid.ptrnkn,pmnfaatn biogs&ppuk orgnk dr lmbah ptnkan,pmnuhn** | **Persen** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | **3** | **2.01** | | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | **Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya** | **Persen** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | **3** | **2.02** | 1 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah Biogas asal ternak yang dibangun | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 180.000,000 | 2.721.692,00 | 11,85 | 2.672.210,60 | 98,75 | 1484,56 | 98,18 | 11,85 | 2.672.211 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | **3** | **2.02** | 2 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Tersedianya dokumen action plan pembangunan pertanian kabupaten Bulukumba (dokumen) | Dok | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 200.000,000 | 2.176.248,00 | 0,86 | 1.795.526,70 | 86,11 | 897,76 | 82,51 | 0,86 | 1.795.527 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 3 | 27 | 3 | 2.02 | 3 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | Tersusunnya peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (dokumen) | Dok | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 130.000,000 | 600.000,00 | 0,35 | 177.349,00 | 35,00 | 136,42 | 29,56 | 0,35 | 177.349 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 3 | 2.02 | 4 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Terbangunnya prasarana pertanian lainnya (unit) | paket | | | | | 1,00 | 300.000,000 | 405.000,00 | 1,00 | 389.452,00 | 100,00 | 129,82 | 96,16 | 1,00 | 389.452 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 3 | 2.01 | | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | **Persentase Yang terlaksana** | **Persen** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 3 | 2.02 | 2 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan embung | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 360.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 3 | 2.02 | 3 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jumlah pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 800.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 3 | 2.02 | 4 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Jumlah pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 360.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 3 | 2.02 | 8 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh Pertanian | unit | | | | | 1,00 | 219.500,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 3 | 2.02 | 9 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani/sumur bor/Irigasi Tersier | unit | | | | | 5,00 | 1.425.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **79,97** | **882,85** | **76,60** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 27 | 4 | 0.00 | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | Persen peningkatan penanganan penyakit ternak, penanganan hewan yang mengalami gangguan reproduksi, keamanan dan pengendalian penyakit hewan strategis, kualitas sarana dan prasarana RPH, serta pertumbuhan usaha-usaha dibidang peternakan, dan pengendalian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 4 | 2.01 | | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **tercapainya penyakit hewan zoonosis** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 4 | 2.01 | 1 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | terlaksananya penanggulangan penyakit hewan zoonoisi | ekor | 0,00 | - | 0,00 | - | 8000,00 | 400.000,000 | 76.074,38 | 8000 | 71.211,08 | 100,00 | 17,80 | 93,61 | 8000 | 71.211 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 4 | 2.02 | | **Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya peredaran ternak dan bahan asal hewan di perbatasan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 4 | 2.02 | 2 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Terkontrolnya Peredaran Ternak dan Bahan Asal Hewan di Perbatasan Kabupaten | ekor | 0,00 | - | 0,00 | - | 350,00 | 50.000,000 | 30.613,00 | 350,00 | 24.556,00 | 100,00 | 49,11 | 80,21 | 350,00 | 24.556 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 4 | 2.03 | | **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya jasa laboratorium dan jasa medik dan paramedik veteriner** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 4 | 2.03 | 1 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | Jumlah jasa laboraorium yang dsediakan | Orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 10.000,000 | 6.000,00 | 1,00 | 6.000,00 | 100,00 | 60,00 | 100,00 | 1,00 | 6.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 4 | 2.03 | 2 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah jasa medik dan paramedik veteriner yang disediakan | Orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 8,00 | 90.000,000 | 213.260,00 | 8,00 | 149.969,72 | 100,00 | 166,63 | 70,32 | 8,00 | 149.970 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 4 | 2.04 | | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** | **Persentase Pengawasan Peredaran Produk Hewan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 4 | 2.04 | 1 | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang dilakukan pendampingan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 210.000,000 | 65.800,00 | 12,00 | 53.200,00 | 100,00 | 25,33 | 80,85 | 12,00 | 53.200 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 4 | 2.04 | 2 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang dilakukan pendampingan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 50.000,000 | 55.259,00 | 12,00 | 55.219,00 | 100,00 | 110,44 | 99,93 | 12,00 | 55.219 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **71,55** | **87,49** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **S** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 27 | 5 | 0.00 | | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **Tersedianya pengendaliandan penanggulan bencana pertanian** | **4E+05** | | | | | **ton** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 5 | 2.01 | | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | **Berkurangnya jumlah petani yang mengalami kerugian akibat dampak perubahan iklim di Kab. Bulukumba** | **100** | | | | | **Persen** | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 3 | 27 | 5 | 2.01 | 1 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Menurunnya jumlah kasus serangan OPT pada tanaman pangan | kasus | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 200.000,000 | 317.108,50 | 3,00 | 273.793,50 | 100,00 | 136,90 | 86,34 | 3,00 | 273.794 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | | | 2 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah kegiatan Gerakan Pengendalian (Gerdal) Hama dan Penyakit | keg | 60,00 | | 0,00 | | 12,00 | 60.000,000 | 10.076,00 | 12,00 | 10.069,00 | 100,00 | 16,78 | 99,93 | 12,00 | 10.069 | 20,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 5 | 2.01 | 3 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah pelatihan mitigasi pencegahan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pertanian | pelatih | #### | | 0,00 | | 10 | 35.000,000 | 13.390,25 | 10,00 | 13.281,25 | 100,00 | 37,95 | 99,19 | 10,00 | 13.281 | 10,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **63,87** | **95,15** | | | **6,67** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **R** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 27 | 6 | 0.00 | | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | **Tertibnya Pemberian Izin Usaha dibidang peternakan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 6 | 2.01 | | **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Presentase Usaha Sekttor Peternakan Yang Berizin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 6 | 2.01 | 2 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Cakupan jumlah usaha sub sektor peternakan yang dilakukan penilaian kelayakan | Usaha | 0,00 | - | 0,00 | - | 30,00 | 30.000,000 | 7.976,00 | 23,00 | 5.166,00 | 76,67 | 17,22 | 64,77 | 23,00 | 5.166 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 6 | 2.01 | 3 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Cakupan jumlah unit usaha sub sektor peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan | Usaha | | | | | 120,00 | 70.000,000 | 24.313,00 | 120,00 | 16.904,00 | 100,00 | 24,15 | 69,53 | 120,00 | 16.904 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **88,34** | **20,68** | **67,15** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **SR** | **S** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 27 | 7 | 0.00 | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **Jumlah Produktivitas Pertanian** | **Ton/Ha** | | | | | **6,21** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 7 | 2.01 | | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **Persentase Yang terlaksana** | **Persen** | | | | | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 7 | 2.01 | 1 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah penyuluh pertanian yang mengiku | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 15,00 | 470.000,000 | 376.985,00 | 15,00 | 334.394,00 | 100,00 | 71,15 | 88,70 | 15,00 | 334.394 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 7 | 2.01 | 1 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah kelompok tani yang mengalami pe | Jumlah | 0,00 | - | 0,00 | - | 140,00 | 70.000,000 | 3.098,00 | 140,00 | 3.096,00 | 100,00 | 4,42 | 99,94 | 140,00 | 3.096 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 27 | 7 | 2.01 | 1 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Tersedianya sarana penyuluhan pertania | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 102.500,000 | 73.924,00 | 1,00 | 73.862,00 | 100,00 | 72,06 | 99,92 | 1,00 | 73.862 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **49,21** | **96,18** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **49.025.691,92** | **33.045.066,90** | | **27.762.066,632** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **91,43** | **220,34** | **82,96** | | | **#REF!** | **#REF!** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **ST** | **ST** | **T** | | | **#REF!** | **#REF!** | |
| **3** | **28** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 4 | 0.00 | | **PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA** | **Persentase Konservasi daya hayati dan ekosistem yang terlaksana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 4 | 2.01 | | **Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota** | **Persentase Pemenuhan Pengelolaan/Rehabilitasi TAHURA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28 | 4 | 2.01 | 1 | Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA | "Jumlah patroli bersama masyarakat mitra polhut secara berkala, papan informasi dan bahan penyuluhan dan Study Kerja ditaman Hutan Raya juanda Jawa Barat Tersedianya papan informasi" | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 25,00 | 723.249,699 | 16.167,50 | 25,00 | 16.166,90 | 100,00 | 2,24 | 100,00 | 25,00 | 16.167 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 28 | 4 | 2.01 | 5 | Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota | Jumlah database dan terehabilitasinya ekosistem TAHURA | Ha | 0,00 | - | 0,00 | - | 25,00 | 105.711,400 | 20.017,10 | 24,75 | 16.047,10 | 99,00 | 15,18 | 80,17 | 24,75 | 16.047 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 28 | 4 | 2.01 | 8 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota | "Jumlah Pelaksanaan Best prastice di Lokasi TAHURA model Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pengembangan masyarakat TAHURA,Terlaksananya studi banding di Lokasi TAHURA model Pelaksanaan Workshop pengembangan masyarakat TAHURA Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan TAHURA Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan TAHURA" | Kelompo | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 52.422,700 | 13.555,00 | 3,00 | 13.555,00 | 100,00 | 25,86 | 100,00 | 3,00 | 13.555 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **99,67** | **14,42** | **93,39** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | | | | | | | | | | | | | **881.383,80** | **49.739,60** | | **45.769,000** | | | | | | | | |
| **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **99,67** | **14,42** | **93,39** | | | **0,00** | **0,00** | |
| **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **ST** | **SR** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| **3** | **30** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | **3** | **0.00** | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal** | **%** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | **3** | **2.01** | | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | **Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bangun dan di Rehabilitasi** | **%** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | **3** | **2.01** | 1 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bangun dan di Rehabilitasi | pasar | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 83.096.800,000 | 79.783.727,65 | 0,50 | 3.991.690,78 | 5,00 | 4,80 | 5,00 | 0,50 | 3.991.691 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **3** | **2.02** | | **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | **Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bina dan di Kelola** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | **3** | **2.02** | 1 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bina dan di Kelola | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 1.635.088,980 | 1.688.830,55 | 10,80 | 1.685.207,70 | 90,00 | 103,07 | 99,79 | 10,80 | 1.685.208 | 0,00 | 0,00 | |
| **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **47,50** | **53,93** | **52,39** | | | **0,00** | **0,00** | |
| **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **SR** | **R** | **R** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 30 | **4** | **0.00** | | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **Presentase Peningkatan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok** | **%** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | **4** | **2.01** | | **Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | **Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting** | **%** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | **4** | **2.01** | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | bulan | | | | | 12,00 | 194.110,000 | 255.121,00 | 12,00 | 254.995,00 | 100,00 | 131,37 | 99,95 | 12,00 | 254.995 | 0,00 | 0,00 | |
| **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **100,00** | **131,37** | **99,95** | | | **0,00** | **0,00** | |
| **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 30 | **5** | **0.00** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **Presentase Peningkatan Aksesibilitas Terhadap Jaringan Perdagangan Domestik Dan Internasional** | **%** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | **5** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Presentase Peningkatan Aksesibilitas Terhadap Jaringan Perdagangan Domestik Dan Internasional** | **%** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | **5** | **2.01** | 2 | Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaksanaan Pameran | Kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 112.278,000 | 39.085,00 | 1,00 | 39.085,00 | 100,00 | 34,81 | 100,00 | 1,00 | 39.085 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **5** | **2.01** | 3 | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaksanaan Pameran | Kali | | | | | 1,00 | 69.400,000 | 19.400,00 | 1,00 | 19.396,00 | 100,00 | 27,95 | 99,98 | 1,00 | 19.396 | 0,00 | 0,00 | |
| **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **100,00** | **31,38** | **99,99** | | | **0,00** | **0,00** | |
| **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **ST** | **SR** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 30 | **6** | **0.00** | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **Persentase Peningkatan Jumlah Pasar Yang Direhabilitasi Dan Peningkatan Perdaganagan Barang Dan Jasa** | **%** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | **6** | **2.01** | | **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | **Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Meterologi Legal** | **%** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | **6** | **2.01** | 1 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat UTTP dan Perlengkapannya yang di Tera dan Tera Ulang | % | | | | | 30 | 184.195,950 | 141.514,50 | 10,50 | 47.269,90 | 35,00 | 25,66 | 33,40 | 10,50 | 47.270 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **6** | **2.01** | 2 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pengawasan dan Penyuluhan Alat UTTP dan BDKT | ecamata | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 152.921,000 | 45.973,00 | 10,00 | 45.318,00 | 100,00 | 29,63 | 98,58 | 10,00 | 45.318 | 0,00 | 0,00 | |
| **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **67,50** | **27,65** | **65,99** | | | **0,00** | **0,00** | |
| **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | **S** | **SR** | **R** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 30 | **1** | **0.00** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"** | **%** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 3 | 30 | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Tersedianya Dokumen Perencanaan sebagai Dasar pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Keuangan, Gaji dan Tunjangan ASN.** | **%** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | **1** | **2.01** | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | | | | | 2,00 | 75.069,550 | 31.741,60 | 2,00 | 31.570,70 | 100,00 | 42,06 | 99,46 | 2,00 | 31.571 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.01** | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 23.831,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.01** | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 16.760,800 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.01** | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 27.674,800 | 3.418,00 | 1,00 | 3.409,00 | 100,00 | 12,32 | 99,74 | 1,00 | 3.409 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.01** | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 32.894,190 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Gaji, Tunjangan dan Honorarium** | **%** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | **1** | **2.02** | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 5.490.037,196 | 4.742.543,60 | 12,00 | 4.122.267,14 | 100,00 | 75,09 | 86,92 | 12,00 | 4.122.267 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.02** | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 294.586,050 | 48.840,00 | 12,00 | 33.140,00 | 100,00 | 11,25 | 67,85 | 12,00 | 33.140 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.02** | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | laporan | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 202.650,000 | 113.580,00 | 1,00 | 113.580,00 | 100,00 | 56,05 | 100,00 | 1,00 | 113.580 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.02** | 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | laporan | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 10.442,168 | 3.534,00 | 1,00 | 3.526,00 | 99,78 | 33,77 | 99,77 | 1,00 | 3.526 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.02** | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan | laporan | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 32.355,493 | 3.025,90 | 1,00 | 2.954,90 | 100,00 | 9,13 | 97,65 | 1,00 | 2.955 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah Pegawai yang ikut Pelatihan** | **%** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | **1** | **2.05** | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan | OK | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 236.357,000 | 44.250,00 | 5,00 | 44.250,00 | 100,00 | 18,72 | 100,00 | 5,00 | 44.250 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.05** | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan | OK | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 80.926,000 | 10.030,00 | 2,82 | 9.193,00 | 94,00 | 11,36 | 91,66 | 2,82 | 9.193 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Administrasi Umum Kantor** | **%** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | **1** | **2.06** | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Peralatan Listrik/Penerangan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 42.197,637 | 1.685,00 | 12,00 | 1.685,00 | 100,00 | 3,99 | 100,00 | 12,00 | 1.685 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.06** | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jenis | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 215.121,800 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.06** | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Alat Rumah Tangga | peralatan | 0,00 | - | 0,00 | - | 50,00 | 41.166,956 | 3.431,35 | 50,00 | 3.431,35 | 100,00 | 8,34 | 100,00 | 50,00 | 3.431 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.06** | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor | bulan | | | | | 12,00 | 109.245,418 | 30.666,00 | 12,00 | 30.666,00 | 100,00 | 28,07 | 100,00 | 12,00 | 30.666 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.06** | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Bahan Cetak dan Penggadaan | lembar | 0,00 | - | 0,00 | - | 6000,00 | 51.212,688 | 13.654,50 | 6000,00 | 13.654,50 | 100,00 | 26,66 | 100,00 | ##### | 13.655 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.06** | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jenis | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 5.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.06** | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Provinsi | kali | 0,00 | | 0,00 | - | 24,00 | 305.017,338 | 75.987,00 | 24,00 | 75.918,97 | 100,00 | 24,89 | 99,91 | 24,00 | 75.919 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Kendaraan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **%** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | **1** | **2.07** | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas | kendaraan | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 128.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.07** | 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Mebel | buah | 0,00 | - | 0,00 | - | 18,00 | 146.054,227 | 4.400,00 | 18,00 | 4.400,00 | 100,00 | 3,01 | 100,00 | 18,00 | 4.400 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.07** | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 125.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.07** | 7 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 347.500,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.07** | 8 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 46.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Perlengkapan Kebutuhan Kantor** | **%** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | **1** | **2.08** | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai dalam Dokumen Persuratan | materai | 0,00 | - | 0,00 | - | 800,00 | 13.000,000 | 1.500,00 | 800,00 | 1.500,00 | 100,00 | 11,54 | 100,00 | 800 | 1.500 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | **1** | **2.08** | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Pembayaran Rekening Listrik, Telepon dan TV Kabel | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 103.779,824 | 108.225,60 | 12,00 | 102.072,92 | 100,00 | 98,36 | 94,31 | 12,00 | 102.073 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 3 | 30 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Perbaikan Peralatan dan Pelrlengkapan Kantor | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 20,00 | 29.820,000 | 7.390,00 | 20,00 | 7.390,00 | 100,00 | 24,78 | 100,00 | 20,00 | 7.390 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | bulan | | | | | 12,00 | 164.437,600 | 120.600,00 | 12,36 | 120.600,00 | 103,00 | 73,34 | 100,00 | 12,36 | 120.600 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | 1 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan BMD** | % | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara Perpanjangan STNK | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 34,00 | 100.000,000 | 75.000,00 | 34,00 | 74.975,18 | 100,00 | 74,98 | 99,97 | 34,00 | 74.975 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | 1 | 2.09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Rehabilitasi | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 7.500,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Rehabilitasi Pemeliharaan Gedung Kantor | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 80.450,132 | 40.000,00 | 1,00 | 39.950,00 | 100,00 | 49,66 | 99,88 | 1,00 | 39.950 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **95,31** | **31,70** | **92,60** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **94.028.881,80** | **87.457.154,25** | | **10.923.097,038** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **82,06** | **55,21** | **82,18** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **T** | **R** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| **3** | **31** | **0** | **0.00** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 2 | 0.00 | | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **Tercapainya peningkatan omset IKM** | % | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | **Tersedianya Dokumen Perencanaan sebagai Dasar pelaksanaan Kegiatan** | % | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | 3 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Temu Usaha | IKM | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 160.000,000 | 36.186,00 | 2,00 | 34.495,00 | 100,00 | 21,56 | 95,33 | 2,00 | 34.495 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | 4 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Tersedianya Sarana/Peralatan IKM | IKM | 0,00 | - | 0,00 | - | 40,00 | 637.340,710 | 414.039,20 | 38,40 | 396.063,53 | 96,00 | 62,14 | 95,66 | 38,40 | 396.064 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | 5 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Sertifikat Halal | IKM | | | | | 2 | 70.000,000 | 13.908,00 | 2,00 | 11.740,25 | 100,00 | 16,77 | 84,41 | 2,00 | 11.740 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **98,67** | **33,49** | **91,80** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 31 | 4 | 0.00 | | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Peningkatan Izin Usaha Industri Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 4 | 2.01 | | **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Jumlah IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang di Awasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 4 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang di Awasi | ecamata | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 50.000,000 | 17.206,70 | 9,00 | 14.734,50 | 90,00 | 29,47 | 85,63 | 9,00 | 14.735 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **90,00** | **29,47** | **85,63** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **SR** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 3 | 31 | 4 | 0.00 | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **Persentase Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Serta Publikasi Industri Daerah Melalui Sistem Informasi Industr** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 4 | 2.01 | | **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Jumlah Pelaksanaan Pameran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 4 | 2.01 | 2 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas | Jumlah Pelaksanaan Pameran | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 76.687,000 | 121.445,00 | 1,00 | 113.793,50 | 100,00 | 148,39 | 93,70 | 1,00 | 113.794 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **148,39** | **93,70** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **994.027,71** | **602.784,90** | | **570.826,784** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **99,33** | **90,94** | **92,75** | | | **0,00** | **0,00** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3) | | | | | ST | T | ST | | | SR | SR | |
| | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **1** | **0.00** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Sekretariat Daerah)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Tersedianya Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPAP, lingkup Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | **1** | **2.01** | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Pengendalian dan Pelaksanaan Keuangan Sekretariat Daerah | bulan | 60,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 105.000,000 | 61.141,54 | 12,00 | 60.580,20 | 100,00 | 57,70 | 99,08 | 12,00 | 60.580 | 20,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Penatausahaan Administrasi Gaji dan Tunjangan, Administrasi Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaporan SKPD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | **1** | **2.02** | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan | bulan | 60,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 12.765.683,896 | 10.025.941,75 | 12,00 | 9.885.853,24 | 100,00 | 77,44 | 98,60 | 12,00 | 9.885.853 | 20,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.02** | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Administrasi Perbendaharaan dan sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Lingkup Setda | bulan | 60,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 239.236,590 | 196.246,33 | 12,00 | 189.383,22 | 100,00 | 79,16 | 96,50 | 12,00 | 189.383 | 20,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.02** | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Terwujudnya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran, Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi Anggaran lingkup Setda, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Prognosis per 6 Bulan | Dokumen | | | | | 15 | 61.502,150 | 60.088,10 | 15,00 | 60.021,60 | 100,00 | 97,59 | 99,89 | 15,00 | 60.022 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Terpenuhinya Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada lingkup Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | **1** | **2.03** | 7 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terpenuhinya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 25.000,000 | 28.230,00 | 1,00 | 19.039,68 | 100,00 | 76,16 | 67,44 | 1,00 | 19.040 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Bimbingan Teknis Latihan Kepemimpinan bagi Pejabat Struktural dan Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | **1** | **2.05** | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Hari-hari tertentu beserta Atribut Kelengkapannya | pasang | 0,00 | - | 0,00 | - | 51,00 | 87.600,000 | 115.720,00 | 32,79 | 62.400,00 | 64,29 | 71,23 | 53,92 | 32,79 | 62.400 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.05** | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan ASN lingkup Setda | otang | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 52.386,000 | 52.386,00 | 2,00 | 39.945,00 | 100,00 | 76,25 | 76,25 | 2,00 | 39.945 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum lingkup Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | **1** | **2.06** | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya kebutuhan penerangan bangunan gedung Kantor Daerah, Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati | gedung | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 50.877,650 | 65.373,94 | 3,00 | 65.367,40 | 100,00 | 128,48 | 99,99 | 3,00 | 65.367 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.06** | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor lingkup Setda | jenis | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 51.011,950 | 83.352,50 | 4,00 | 66.562,50 | 100,00 | 130,48 | 79,86 | 4,00 | 66.563 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.06** | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Meningkatkan Pelayanan dan tugas kedinasan lingkup Setda, serta tersedianya Penatausahaan Kesekretariatan SKPD SetDa | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 447.552,740 | 148.865,50 | 12,00 | 148.651,20 | 100,00 | 33,21 | 99,86 | 12,00 | 148.651 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.06** | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Koran, Tabloid, Majalah serta Sarana Prasarana Komunikasi dan Terjalinnya Kerjasama Media Massa di Kab. Bulukumba | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 251.650,000 | 119.664,00 | 12,00 | 118.609,00 | 100,00 | 47,13 | 99,12 | 12,00 | 118.609 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.06** | 9 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya penerimaan kunjungan tamu Pejabat Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Terlaksananya dialog audiens dan tokoh masyarakat | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 617.000,000 | 529.020,05 | 12,00 | 507.271,85 | 100,00 | 82,22 | 95,89 | 12,00 | 507.272 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.06** | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 847.382,000 | 746.385,00 | 12,00 | 746.363,62 | 100,00 | 88,08 | 100,00 | 12,00 | 746.364 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 4 | 01 | **1** | **2.07** | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 263.683,349 | 39.673,48 | 1,00 | 35.750,00 | 100,00 | 13,56 | 90,11 | 1,00 | 35.750 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.07** | 5 | Pengadaan Mebel | Tersedianya Pengadaan Mebeleur | paket | | | | | 1 | 153.091,757 | 117.293,00 | 1,00 | 103.243,00 | 100,00 | 67,44 | 88,02 | 1,00 | 103.243 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.07** | 7 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Terpenuhinya Perlengkapan Rumah Jabatan dan Aset lainnya | jenis | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 38.458,750 | 53.641,54 | 5,00 | 52.610,19 | 100,00 | 136,80 | 98,08 | 5,00 | 52.610 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.07** | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jenis | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 174.374,695 | 315.347,56 | 5,00 | 301.144,00 | 100,00 | 172,70 | 95,50 | 5,00 | 301.144 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.07** | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | jenis | 0,00 | - | 0,00 | - | 6,00 | 106.727,500 | 201.120,15 | 6,00 | 195.443,88 | 100,00 | 183,12 | 97,18 | 6,00 | 195.444 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.08** | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 858.107,760 | 740.070,00 | 12,00 | 598.465,02 | 100,00 | 69,74 | 80,87 | 12,00 | 598.465 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.08** | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 7.450,000 | - | 3,00 | - | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.08** | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Bupati dan Rumah Jabatan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 1.360.213,540 | 1.171.813,54 | 12,00 | 1.098.000,00 | 100,00 | 80,72 | 93,70 | 12,00 | 1.098.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | **1** | **2.09** | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 9,00 | 109.340,000 | 253.874,00 | 9,00 | 231.795,57 | 100,00 | 212,00 | 91,30 | 9,00 | 231.796 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.09** | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 25,00 | 243.458,000 | 230.345,20 | 25,00 | 194.052,80 | 100,00 | 79,71 | 84,24 | 25,00 | 194.053 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.09** | 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan, Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan Bupati | paket | | | | | 4,00 | 910.690,000 | 2.946.770,00 | 2,70 | 1.936.443,30 | 67,50 | 212,63 | 65,71 | 2,70 | 1.936.443 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.09** | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rehabilitasi Gedung Kantor | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 74.659,678 | 84.996,58 | 0,90 | 65.098,02 | 90,00 | 87,19 | 76,59 | 0,90 | 65.098 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.11** | | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | **1** | **2.11** | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 174.125,420 | 178.478,75 | 12,00 | 168.726,20 | 100,00 | 96,90 | 94,54 | 12,00 | 168.726 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.11** | 4 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 600.000,000 | 600.000,00 | 12,00 | 600.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 12,00 | 600.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.12** | | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | **1** | **2.12** | 1 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 371.277,420 | 837.526,50 | 12,00 | 811.005,30 | 100,00 | 218,44 | 96,83 | 12,00 | 811.005 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.12** | 2 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 263.222,410 | 716.047,75 | 12,00 | 618.921,55 | 100,00 | 235,13 | 86,44 | 12,00 | 618.922 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.13** | | **Penataan Organisasi** | **Meningkatnya konsistensi kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan standar, Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh UPP, Terciptanya pemerintahan yang Bersih dari KKN, Akuntabel dan Berkinerja dalam rangka Reformasi Birokrasi serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah lingkup Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 4 | 01 | **1** | **2.13** | 1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan, Dokumen Evaluasi Jabatan, Dokumen Standar Kompetensi Manajerial PNS dan Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah serta tersusunnya Ranperda dan Ranperbub | Perangkat Daerah | 0,00 | - | 0,00 | - | 36,00 | 76.069,020 | 63.030,09 | 36,00 | 62.527,90 | 100,00 | 82,20 | 99,20 | 36,00 | 62.528 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.13** | 2 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Tersusunnya Standar Pelayanan Publik dan Penerapannya pada Unit Pelayanan Publik dan Tata Laksana | SKPD | 0,00 | - | 0,00 | - | 5,00 | 36.654,700 | 12.648,47 | 5,00 | 12.314,20 | 100,00 | 33,60 | 97,36 | 5,00 | 12.314 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.13** | 3 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Tersusunnya Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi dan Laporan Reformasi Birokrasi | Dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 6,00 | 36.999,690 | 16.052,36 | 6,00 | 15.829,75 | 100,00 | 42,78 | 98,61 | 6,00 | 15.830 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.13** | 4 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Tersusunnya Dokumen Standar Operasional Prosedur dan Dokumen Peta Proses Bisnis | Perangkat Daerah | 0,00 | - | 0,00 | - | 36,00 | 43.084,760 | 15.274,58 | 36,00 | 14.675,95 | 100,00 | 34,06 | 96,08 | 36,00 | 14.676 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.13** | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 54.990,890 | 32.908,98 | 1,00 | 31.392,49 | 100,00 | 57,09 | 95,39 | 1,00 | 31.392 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.14** | | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **Tercapainya kualitas pelayanan ketersediaan informasi publik melalui PPID** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | **1** | **2.14** | 1 | Fasilitasi Keprotokolan | Meningkatnya Pelaksanaan Fungsi Keprotokolan Pimpinan Daerah dan Tersedianya Sarana Penunjang Keprotokolan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 210.063,480 | 68.602,16 | 12,00 | 68.445,55 | 100,00 | 32,58 | 99,77 | 12,00 | 68.446 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.14** | 2 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Pelaksanaan Jumpa Pers dan Dialog Publik, Pembuatan Press Rilis Kegiatan Pimpinan dan Pembuatan Sambutan Bupati/Wakil Bupati | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 77.626,000 | 29.865,00 | 12,00 | 19.148,00 | 100,00 | 24,67 | 64,12 | 12,00 | 19.148 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.14** | 3 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Pimpinan, Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dokumentasi pimpinan berdasarkan program kerja yang ditetapkan, Meningkatkan kualitas pendokumentasian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 73.919,730 | 59.498,69 | 12,00 | 50.722,40 | 100,00 | 68,62 | 85,25 | 12,00 | 50.722 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **98,52** | **94,08** | **90,04** | | | **1,82** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 4 | 01 | **2** | **0.00** | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **Persentase lembaga keagamaan dan peneingkatan kesadaran toleransi beragama,Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi,Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | **2** | **2.01** | | **Administrasi Tata Pemerintahan** | **Terpenuhinya penyusunan dokumen LKPJ, LPPD, RLPPD serta memori serah terima jabatan dan terfasilitasinya pelaksanaan otonomi daerah serta tersedianya laporan pemerintahan yang baik di Kecamatan dan Kelurahan.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | **2** | **2.01** | 1 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Tersusunnya Dokumen LKPJ,LPPD, RLPPD,Memori Serah Terima Jabatan dan Terfasilitasinya Pengurusan Surat Keputusan Gubernur/Surat Izin Pejabat Negara | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 243.333,940 | 116.801,94 | 4,00 | 112.879,24 | 100,00 | 46,39 | 96,64 | 4,00 | 112.879 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **2** | **2.01** | 2 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 1. Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, 2.Rapat Koordinasi terkait Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi dan Pusat | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 49.599,790 | 36.654,62 | 12,00 | 36.615,29 | 100,00 | 73,82 | 99,89 | 12,00 | 36.615 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **2** | **2.01** | 3 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 1. Terlaksananya Penegasan Tapal Batas Daerah, 2. Tersusunnya Laporan Standar Pelayanan Minimal, 3. Tersusunnya Nama-Nama Rupa Bumi, 4. Tersusunnya Naskah Kerjasama Daerah | segmen | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 99.999,870 | 59.145,87 | 3,93 | 54.891,52 | 98,33 | 54,89 | 92,81 | 3,93 | 54.892 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 4 | 01 | **2** | **2.02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **Terlaksananya kegiatan pada program Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial serta Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Rakyat.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | **2** | **2.02** | 1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1. Jumlah Guru Kontrak TKA/TPA Penerima Honor/Gaji2. Jumlah Tahapan Pelaksanaan Kegiatan STQ/MTQ dan Lasqi3. Terlaksananya Pembinaan Mental Spiritual melalui Pengajian Rutin4.Terlaksananya Bantuan/Hibah Organisasi/Lembaga Keagamaan dan Sarana Peribadatan | ng, kali, B | 0,00 | - | 0,00 | - | 57,00 | 2.092.944,852 | 2.704.417,02 | 57,00 | 2.534.220,10 | 100,00 | 121,08 | 93,71 | 57,00 | 2.534.220 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **2** | **2.02** | 2 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | 1. Terlaksananya Bantuan/Hibah Organisasi/Lembaga Keagamaan dan Sarana Peribadatan2. Terlaksananya Koordinasi Penanganan di Bidang Kesehatan, Bidang Sosial dan Bidang Pendidikan | bulan, ka | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 65.000,000 | 30.910,00 | 10,20 | 28.635,13 | 85,00 | 44,05 | 92,64 | 10,20 | 28.635 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **2** | **2.02** | 3 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | 1. Jumlah Calon/Jamaah Haji yang mendapatkan Pelayanan2. Jumlah Kecamatan yang di kunjungi dalam Safari Ramadhan3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Seleksi Pimpinan BAZNAS | kali, bula | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 65.000,000 | 30.159,87 | 3,00 | 25.617,90 | 100,00 | 39,41 | 84,94 | 3,00 | 25.618 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **2** | **2.03** | | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **Meningkatnya pelayanan bantuan hukum dan penanganan kasus di Pemerintah Kabupaten, Terselesaikannya Draft Rancangan Peraturan Daerah.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | **2** | **2.03** | 1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 1. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah2. Tercapainya Pembangunan di Bidang Hukum melalui Koordinasi dan Kerjasama | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 126.762,240 | 63.125,34 | 100,00 | 62.968,90 | 100,00 | 49,67 | 99,75 | 100,00 | 62.969 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **2** | **2.03** | 2 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 1. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum2. Tercapainya Kabupaten Peduli HAM3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum dan terwujudnya generasi sadar hukum yang dapat menginformasikan hukum kepada masyarakat4. Terwujudnya pelayanan bantuan hukum, Penanganan kasus dan adanya pertimbangan hukum pada pemerintah daerah. | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 19,00 | 217.789,000 | 113.029,76 | 19,00 | 107.113,11 | 100,00 | 49,18 | 94,77 | 19,00 | 107.113 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **2** | **2.03** | 3 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang produk hukum2. Terpublikasinya produk hukum daerah3. Terwujudnya Penataan Perundang- undangan dan Peraturan Desa dalam bentuk dokumen dan terdistribusinya produk hukum daerah ke provinsi, SKPD dan masyarakat | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 227.994,820 | 135.062,94 | 3,00 | 124.669,15 | 100,00 | 54,68 | 92,30 | 3,00 | 124.669 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **98,15** | **59,24** | **94,16** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **R** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 4 | 01 | **3** | **0.00** | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **Peningkatan jumlah lembaga Ekonomi Kab/Kota yang berdaya saing., Persentase Jumlah Laporan DAK dan APBD dari OPD tepat waktu,Persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 4 | 01 | **3** | **2.01** | | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **Persentase ketersidiaan Informasi Produksi Daerah untuk Promosi dan Investasi, Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat wilayah terpencil, Tersedianya Data Potensi Panas Bumi, Meningkatnya kemampuan modal kelompok-kelompok usaha dimasyarakat dan Tersusunnya Laporan Tingkat Inflasi di Kab. Bulukumba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | **3** | **2.01** | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Terlaksananya Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 15.000,000 | 6.230,21 | 4,00 | 6.003,00 | 100,00 | 40,02 | 96,35 | 4,00 | 6.003 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **3** | **2.01** | 2 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Tersedianya laporan Inflasi dan terkoordinasikannya kegiatan pengendalian Inflasi daerah dengan Tim TPID Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Nasional | laporan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 32.914,390 | 71.284,66 | 12,00 | 68.033,34 | 100,00 | 206,70 | 95,44 | 12,00 | 68.033 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **3** | **2.01** | 3 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Tersedianya data Produksi, Promosi dan Informasi Potensi Daerah | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 20.000,000 | 8.530,25 | 1,00 | 7.805,70 | 100,00 | 39,03 | 91,51 | 1,00 | 7.806 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **3** | **2.02** | | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **Tercapainya pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dan Pengendalian Evaluasi Program Pembangunan serta Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | **3** | **2.02** | 1 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | 1. Terlaksananya Penyusunan Renja/ Renstra Sekretariat Daerah2. Tersedianya Data Laporan Hasil Monitoring Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 8,00 | 118.407,980 | 41.562,35 | 8,00 | 40.595,08 | 100,00 | 34,28 | 97,67 | 8,00 | 40.595 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **3** | **2.02** | 2 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Terwujudnya Penyajian Informasi Laporan TEPRA dan Laporan APBD secara berkala | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 36.890,420 | 22.310,16 | 12,00 | 21.775,95 | 100,00 | 59,03 | 97,61 | 12,00 | 21.776 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **3** | **2.02** | 3 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Dokumen Data Laporan dan Pengadaan Pemerintah secara berkala serta Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi, Tersedianya Dokumen Data Laporan Data Alokasi Khusus (DAK) Kab. Bulukumba | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 53.881,300 | 15.421,30 | 12,00 | 14.505,40 | 100,00 | 26,92 | 94,06 | 12,00 | 14.505 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **3** | **2.03** | | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **Terbentuknya Pelayanan Pengadaan secara Elektronik, Tersedianya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa serta Meningkatnya Kapasitas SDM, Asosiasi/Penyedia/Aparatur yang mengikuti pelatihan Aplikasi SPSE dan Aplikasi SIRUP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | **3** | **2.03** | 1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1. Terlaksananya Proses Barang dan Jasa2. Tersusunnya Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 49.999,710 | 17.307,71 | 10,68 | 16.494,20 | 89,00 | 32,99 | 95,30 | 10,68 | 16.494 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **3** | **2.03** | 2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Terwujudnya Pelayanan Pengadaan secara Elektronik kepada pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 150,00 | 371.892,100 | 352.521,90 | 150,00 | 351.465,35 | 100,00 | 94,51 | 99,70 | 150,00 | 351.465 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **3** | **2.03** | 3 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1. Terlaksananya Pelatihan Aplikasi SIRUP dan Aplikasi SPSE bagi ASN dan Asosiasi/Penyedia2. Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 54.046,200 | 33.120,08 | 13,56 | 32.384,73 | 113,00 | 59,92 | 97,78 | 13,56 | 32.385 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,22** | **65,93** | **96,16** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **R** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **25.861.628,14** | **24.874.889,06** | | **22.902.476,66** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **98,96** | **73,08** | **93,45** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **ST** | **S** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | **1** | **0.00** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | "Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Terlaksananya pelaporan keuangan Akhir Tahun, Tertibnya administrasi pembukuan keuangan Setda, Tersusunnya dokumen anggaran setda, administrasi perbendaharaan Setda, Meningkatnya wawasan aparatur tentang pengelolaan keuangan daerah dan Terlaksananya TPTGR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | **1** | **2.01** | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persen | | | | | 100,00 | 100.000,00 | 74.998,40 | 91,67 | 68.945,54 | 91,67 | 68,95 | 91,93 | 91,67 | 68.946 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.01** | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 5.000,00 | 4.391,00 | 0,99 | 1.929,00 | 99,00 | 38,58 | 43,93 | 0,99 | 1.929 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.01** | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | Bulan | | | | | 12,00 | 35.000,00 | 24.959,90 | 12,00 | 16.988,00 | 100,00 | 48,54 | 68,06 | 12,00 | 16.988 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Meningkatnya pelayanan admistrasi keuangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | **1** | **2.02** | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | % Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | Persen | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 4.073.762,41 | 3.259.964,58 | 100,00 | 3.153.000,42 | 100,00 | 77,40 | 96,72 | 100,00 | 3.153.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.02** | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 180.000,00 | 100.000,00 | 12,00 | 90.134,20 | 100,00 | 50,07 | 90,13 | 12,00 | 90.134 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.02** | 4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 60.944,50 | 34.736,00 | 12,00 | 28.499,44 | 100,00 | 46,76 | 82,05 | 12,00 | 28.499 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.02** | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 7.002,96 | 3.999,80 | 1,00 | 3.997,40 | 100,00 | 57,08 | 99,94 | 1,00 | 3.997 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.02** | 6 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Dokumen | | | | | 2,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,00 | 8.406,00 | 50,00 | 42,03 | 42,03 | 1,00 | 8.406 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Terpenuhinya pelayanan administrasi umum lingkup Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | **1** | **2.03** | 6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah SKPD | persen | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 9.174,00 | 5.592,45 | 91,67 | 5.412,60 | 91,67 | 59,00 | 96,78 | 91,67 | 5.413 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase penyediaan kebutuhan bahan rumah tangga,Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | **1** | **2.05** | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Khusus hari-hari Tertentu Pimpinan & Anggota DPRD dan Dinas Pimpinan & Anggota DPRD | Pasang | 0,00 | - | 0,00 | - | 80,00 | 200.000,00 | 176.000,00 | 80,00 | 176.000,00 | 100,00 | 88,00 | 100,00 | 80,00 | 176.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.05** | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | persen | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 500.000,00 | 2.503.200,00 | 99,00 | 2.081.410,60 | 99,00 | 416,28 | 83,15 | 99,00 | 2.081.411 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.05** | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 100.000,00 | 79.999,90 | 12,00 | 56.775,32 | 100,00 | 56,78 | 70,97 | 12,00 | 56.775 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyediaan kebutuhan bahan rumah tangga,Terpenuhinya pelayanan administrasi umum lingkup Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | **1** | **2.06** | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 15.800,64 | 4.998,55 | 15,00 | 4.998,55 | 125,00 | 31,64 | 100,00 | 15,00 | 4.999 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.06** | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah tangga | persen | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 10.429,53 | 53.620,88 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.06** | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik kantor | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 1.000.000,00 | 2.297.501,16 | 12,00 | 1.171.254,80 | 100,00 | 117,13 | 50,98 | 12,00 | 1.171.255 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.06** | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | persen | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 90.000,00 | 89.990,00 | 90,00 | 38.400,00 | 90,00 | 42,67 | 42,67 | 90,00 | 38.400 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.06** | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 300.000,00 | 248.858,30 | 12,00 | 247.681,82 | 100,00 | 82,56 | 99,53 | 12,00 | 247.682 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 4 | 01 | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terpenuhinya pelayanan administrasi umum lingkup Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.07** | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Yang disediakan | Unit | | | | | 1 | 300.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.07** | 5 | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel | persen | | | | | 100 | 27.000,00 | 191.537,50 | 80,00 | 2.530,00 | 80,00 | 9,37 | 1,32 | 80,00 | 2.530 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.07** | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | persen | | | | | 100 | 500.000,00 | 820.603,08 | 98,33 | 787.968,35 | 98,33 | 157,59 | 96,02 | 98,33 | 787.968 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.07** | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | persen | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 50.000,00 | 266.034,45 | 95,00 | 56.354,90 | 95,00 | 112,71 | 21,18 | 95,00 | 56.355 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.08** | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya layanan Surat Menyurat | Kecamata | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 1.956,00 | 1.956,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.08** | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Pelayanan Jasa internet, Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 522.428,75 | 384.593,01 | 12,00 | 280.390,24 | 100,00 | 53,67 | 72,91 | 12,00 | 280.390 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.08** | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Cenderamata/Plakat | Buah | 0,00 | - | 0,00 | - | 19,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 19,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 19,00 | 4.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.08** | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpeliharanya Kebersihan Kantor, Terbayarnya Gaji supporting staf Sekretariat DPRD | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 605.850,00 | 654.201,40 | 12,00 | 647.378,21 | 100,00 | 106,85 | 98,96 | 12,00 | 647.378 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpenuhinya pelayanan administrasi umum lingkup Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | **1** | **2.09** | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 150.000,00 | 48.634,00 | 3,70 | 27.444,54 | 92,50 | 18,30 | 56,43 | 3,70 | 27.445 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.09** | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Dua dan Empat dan Terpeliharanya Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat | Unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 16,00 | 144.775,00 | 100.000,00 | 15,60 | 94.922,00 | 97,50 | 65,57 | 94,92 | 15,60 | 94.922 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.09** | 5 | Pemeliharaan Mebel | Terpeliharanya Mebel | persen | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.09** | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 50.000,00 | 1.529.998,67 | 12,00 | 1.250.655,07 | 100,00 | 2501,31 | 81,74 | 12,00 | 1.250.655 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.09** | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 40.008,80 | 20.005,30 | 12,00 | 17.556,00 | 100,00 | 43,88 | 87,76 | 12,00 | 17.556 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.09** | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | persen | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 40.325,00 | 15.250,00 | 99,17 | 15.105,00 | 99,17 | 37,46 | 99,05 | 99,17 | 15.105 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.15** | | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **Terpeliharanya dan Terlaksananya Kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD, pengendalian anggaran kas lingkup sekertariat DPRD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | **1** | **2.15** | 1 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPR | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 19.260.168,44 | 19.136.600,00 | 12,36 | 18.545.030,13 | 103,00 | 96,29 | 96,91 | 12,36 | 18.545.030 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **1** | **2.15** | 3 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Terpeliharanya Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD | kali | | | | | 1,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,99 | 40.121,70 | 99,00 | 40,12 | 40,12 | 0,99 | 40.122 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | **1** | **2.16** | | **Layanan Administrasi DPRD** | **Meningkatnya Layanan Administrasi DPRD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | **1** | **2.16** | 3 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 150.879,59 | 99.933,30 | 12,00 | 98.175,00 | 100,00 | 65,07 | 98,24 | 12,00 | 98.175 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **88,21** | **143,38** | **69,83** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **ST** | **S** | | | **SR** | **SR** | |
| 4 | 02 | **2** | **0.00** | | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat, Pengelolaan Keuangan Daerah, Evaluasi Produk Hukum Daerah dan Koordinasi ke Tingkat Pusat dan Provinsi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | **2** | **2.01** | | **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | **Terciptanya Produk Hukum Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | **2** | **2.01** | 1 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Terciptanya Produk Hukuim Daerah | Ranperda | 0,00 | - | 0,00 | - | 19,00 | 698.206,742 | 377.830,70 | 17,42 | 306.786,10 | 91,67 | 43,94 | 81,20 | 17,42 | 306.786 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 4 | 02 | **2** | **2.01** | 2 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Terlaksananya Rapat - rapat paripurna | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 400.000,000 | 399.993,70 | 12,00 | 397.780,20 | 100,00 | 99,45 | 99,45 | 12,00 | 397.780 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **2** | **2.01** | 3 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Terlaksananya Sinkronisasi Produk Hukum DPRD | Kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 19,00 | 34.947,539 | 24.978,00 | 17,42 | 20.334,44 | 91,67 | 58,19 | 81,41 | 17,42 | 20.334 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **2** | **2.01** | 4 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Terciptanya Ranperda Inisiatif DPRD | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 150.000,000 | 100.000,00 | 12,00 | 99.900,00 | 100,00 | 66,60 | 99,90 | 12,00 | 99.900 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **2** | **2.04** | | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | **Terciptanya dan meningkatnya Produk Hukum Daerah jasa Kelompok pakar dan tim ahli Jasa tenaga ahli Fraksi Bimbingan Teknis DPRD untuk peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD publikasi dan informasi DPRD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | **2** | **2.04** | 2 | Pendalaman Tugas DPRD | Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | bulan | | | | | 12,00 | 1.753.403,168 | 999.999,90 | 12,00 | 784.501,28 | 100,00 | 44,74 | 78,45 | 12,00 | 784.501 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **2** | **2.04** | 3 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Terlaksananya Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi dewan, Tersebarnya informasi Pembangunan Daerah | bulan | | | | | 12,00 | 693.736,781 | 447.803,20 | 12,00 | 437.628,20 | 100,00 | 63,08 | 97,73 | 12,00 | 437.628 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **2** | **2.04** | 4 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli | bulan | | | | | 12,00 | 283.800,000 | 195.000,00 | 12,00 | 107.500,00 | 100,00 | 37,88 | 55,13 | 12,00 | 107.500 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **2** | **2.04** | 5 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi | bulan | | | | | 12,00 | 369.706,722 | 336.000,00 | 12,00 | 336.000,00 | 100,00 | 90,88 | 100,00 | 12,00 | 336.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **2** | **2.05** | | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **Terlaksananya dan tersusunnya Penyerapan aspirasi Masyrakat kunjungan kerja pimpinan dan anggota dewan Pokok - pokok Pikiran DPRD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | **2** | **2.05** | 1 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Terlaksananya Penyerapan Aspirasi dan Kunjungan Kerja Dalam daerah | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 20.000,000 | 19.994,30 | 12,00 | 1.418,00 | 100,00 | 7,09 | 7,09 | 12,00 | 1.418 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **2** | **2.05** | 2 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Terlaksananya Penerimaan Aspirasi Masyarakat dan Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD | Bulan | | | | | 12,00 | 70.000,000 | 54.979,50 | 12,00 | 48.743,50 | 100,00 | 69,63 | 88,66 | 12,00 | 48.744 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **2** | **2.05** | 3 | Pelaksanaan Reses | Terlaksananya Kegiatan Reses | Kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 1.282.050,869 | 1.823.199,20 | 1,99 | 1.796.120,50 | 99,50 | 140,10 | 98,51 | 1,99 | 1.796.121 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 02 | **2** | **2.08** | | **Fasilitasi Tugas DPRD** | **Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD** | | | | | | | | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4 | 02 | **2** | **2.08** | 1 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 4.905.073,702 | 3.322.837,40 | 12,00 | 3.303.909,05 | 100,00 | 67,36 | 99,43 | 12,00 | 3.303.909 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **98,57** | **65,74** | **82,25** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **R** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **39.318.431,13** | **40.460.773,52** | | **36.662.086,09** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **93,39** | **104,56** | **76,04** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **ST** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah** | **%** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Terwujudnya Perencanaan Pembangunan lingkup Bappeda** | *%* | | | | | *100,00* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dukumen perencanaan perangkat daerah | Dok | 0,00 | - | 0,00 | - | 7,00 | 110.730,000 | 110.337,73 | 7,00 | 109.323,58 | 100,00 | 98,73 | 99,08 | 7,00 | 109.324 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 1 | 1 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA dan RKAP yang tersusun | Dok | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 40.362,050 | 14.290,41 | 2,00 | 14.223,41 | 100,00 | 35,24 | 99,53 | 2,00 | 14.223 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 1 | 1 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA dan DPAP yang Tersusun | Dok | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 98.186,650 | 8.034,69 | 1,65 | 6.527,69 | 82,25 | 6,65 | 81,24 | 1,65 | 6.528 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 1 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Fisik/ Keuangan, Lakip dan LPPD yang Tersusun | Dok | 0,00 | - | 0,00 | - | 14,00 | 20.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD | Dok | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 10.000,000 | 29.413,46 | 1,00 | 29.395,31 | 100,00 | 293,95 | 99,94 | 1,00 | 29.395 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 1 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terwujudnya pelayanan Administrasi Keuangan serta administrasi perkantoran Lingkup Bappeda Kab.Bulukumba** | *%* | | | | | *100,00* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan dalam pelayanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 6.078.918,898 | 4.917.748,48 | 12,00 | 4.217.816,92 | 100,00 | 69,38 | 85,77 | 12,00 | 4.217.817 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan dalam pelayanan Jasa Administrasi Keuangan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 132.000,000 | 119.100,77 | 12,00 | 110.690,77 | 100,00 | 83,86 | 92,94 | 12,00 | 110.691 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 1 | 2.02 | 4 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Rekapitulasi hasil tanggapan inspektorat | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 78.750,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 5 | 01 | 1 | 2.02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Bappeda Kabupaten Bulukumba | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 11.300,000 | 7.071,58 | 1,00 | 7.065,58 | 100,00 | 62,53 | 99,92 | 1,00 | 7.066 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 1 | 2.02 | 6 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Rekapitulasi hasil tanggapan inspektorat | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 100,00 | 3.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 10.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 1 | 2.03 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Bappeda di bidang administrasi,teknis dan fungsional terutama pada sistem Perencanaan pembangunan** | *%* | | | | | *100,00* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 1 | 2.03 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai yang dilatih | orang | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 44.250,000 | 44.250,00 | 1,90 | 39.125,00 | 95,00 | 88,42 | 88,42 | 1,90 | 39.125 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 1 | 2.03 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | orang/Ka | 0,00 | - | 0,00 | - | 150,00 | 339.905,000 | 87.567,73 | 134,70 | 77.743,73 | 89,80 | 22,87 | 88,78 | 134,70 | 77.744 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 3 | 2.03 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran serta Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kerja Kantor Aparatur Bappeda Kab.Bulukumba** | *%* | | | | | *100,00* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 3 | 2.04 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | paket | | | | | 1,00 | 10.080,000 | 5.516,50 | 1,00 | 5.516,50 | 100,00 | 54,73 | 100,00 | 1,00 | 5.516 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 3 | 2.04 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 53.219,856 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 3 | 2.04 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 13.787,000 | 10.735,84 | 1,00 | 10.735,84 | 100,00 | 77,87 | 100,00 | 1,00 | 10.736 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 3 | 2.04 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor,Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 209.725,025 | 108.499,90 | 1,00 | 108.327,00 | 100,00 | 51,65 | 99,84 | 1,00 | 108.327 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 3 | 2.04 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 17.400,000 | 12.114,19 | 1,00 | 12.114,19 | 100,00 | 69,62 | 100,00 | 1,00 | 12.114 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 3 | 2.04 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah bulan dalam Fasilitasi Kunjungan Tamu | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 16.498,900 | 14.710,85 | 12,00 | 14.697,65 | 100,00 | 89,08 | 99,91 | 12,00 | 14.698 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 3 | 2.04 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah penyelenggaraan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 98,00 | 386.206,149 | 130.146,00 | 98,00 | 130.126,73 | 100,00 | 33,69 | 99,99 | 98,00 | 130.127 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 3 | 2.04 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Persen penerapan SPBE dalam Perencanaan, Pengendalian serta Evaluasi dan Pelaporan pembangunan daerah | % | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 125.363,895 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 3 | 2.05 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran serta Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kerja Kantor Aparatur Bappeda Kab.Bulukumba** | *%* | | | | | *100,00* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 1 | 2.05 | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Mobil Jabatan Eselon II | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 72.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Mobil Dinas Eselon III dan Motor Dinas Eselon IV | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 318.200,500 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 1 | 2.05 | 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebeleur | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 74.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 1 | 2.05 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah peralatan dan mesin yang diadakan | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 9.238,900 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 1 | 2.05 | 9 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung/bangunan yang dibangun | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 150.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 1 | 2.05 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 7.500,000 | 30.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 1 | 2.06 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran serta Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kerja Kantor Aparatur Bappeda Kab.Bulukumba** | *%* | | | | | *100,00* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 5 | 01 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan dalam penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 134.998,405 | 94.198,88 | 11,76 | 90.545,30 | 98,00 | 67,07 | 96,12 | 11,76 | 90.545 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan dalam penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor | bulan | | | | | 12 | 166.899,000 | 89.932,50 | 11,76 | 86.549,00 | 98,00 | 51,86 | 96,24 | 11,76 | 86.549 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 1 | 2.07 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran serta Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kerja Kantor Aparatur Bappeda Kab.Bulukumba** | *%* | | | | | *100,00* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 1 | 2.07 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional,Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 73.475,063 | 57.200,00 | 1,00 | 53.846,35 | 100,00 | 73,29 | 94,14 | 1,00 | 53.846 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 1 | 2.07 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | unit | | | | | 1,00 | 38.500,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 1 | 2.07 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | unit | | | | | 1,00 | 16.467,000 | 14.905,00 | 1,00 | 14.875,00 | 100,00 | 90,33 | 99,80 | 1,00 | 14.875 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 1 | 2.07 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor,Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 11.411,770 | 14.662,75 | 1,00 | 14.662,75 | 100,00 | 128,49 | 100,00 | 1,00 | 14.663 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 1 | 2.07 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran serta Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kerja Kantor Aparatur Bappeda Kab.Bulukumba | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 56.786,000 | 13.420,00 | 1,00 | 13.414,00 | 100,00 | 23,62 | 99,96 | 1,00 | 13.414 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **85,96** | **65,54** | **84,23** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **R** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 5 | 01 | 02 | | | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD** | **%** | | | | | **100,00** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **Terciptanya sinergi antara Dokumen Perencanaan Daerah dan Dokumen Perencanaan OPD** | *%* | | | | | *100,00* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 02 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah penyelenggaran rapat koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | kali | | | | | 20,00 | 210.000,000 | 73.466,96 | 20,00 | 69.429,13 | 100,00 | 33,06 | 94,50 | 20,00 | 69.429 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah pelaksanaan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD dan RKPD) | kali | | | | | 1,00 | 30.000,000 | 17.288,07 | 0,96 | 15.613,67 | 95,50 | 52,05 | 90,31 | 0,96 | 15.614 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Jumlah pelaksanaan forum gabungan OPD dalam penyusunan RPJPD, RENSTRA dan RENJA | kali | | | | | 1,00 | 150.000,000 | 28.400,18 | 1,00 | 27.687,46 | 100,00 | 18,46 | 97,49 | 1,00 | 27.687 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten (RPJPD, RPJMD dan RKPD). | kali | | | | | 1,00 | 75.000,000 | 18.000,13 | 1,00 | 14.766,13 | 100,00 | 19,69 | 82,03 | 1,00 | 14.766 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 06 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Jumlah bahan koordinasi Musrenbang yang disediakan | kecamatan | | | | | 10,00 | 227.910,120 | 44.512,23 | 7,30 | 32.445,23 | 73,00 | 14,24 | 72,89 | 7,30 | 32.445 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan | dokumen | | | | | 1,00 | 200.000,000 | 100.927,84 | 0,99 | 99.327,84 | 99,10 | 49,66 | 98,41 | 0,99 | 99.328 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 5 | 01 | 02 | 1.02 | | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Terwujudnya akurasi, efektifitas dan efisiensi perencanaan pembangunan dengan dukungan basis data yang akurat guna peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui percepatan dan optimalisasi pelaksanaan program-program Pembangunan Daerah** | % | | | | | *100,00* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 02 | 1.02 | 01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen hasil analisis terhadap data dan informasi dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) | dokumen | | | | | 1,00 | 416.468,910 | 102.336,92 | 0,94 | 95.279,44 | 94,02 | 22,88 | 93,10 | 0,94 | 95.279 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 1.02 | 02 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | Jumlah Matriks RPJMD, RENSTRA, RKPD, dan RKPD-P yang dihasilkan. | dokumen | | | | | 4,00 | 348.140,000 | 188.582,62 | 3,84 | 180.398,29 | 96,00 | 51,82 | 95,66 | 3,84 | 180.398 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 1.02 | 03 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Buku Profil Daerah yang dilengkapi dengan Video Explainer / Video Penjelasan lengkap tentang Kabupaten Bulukumba. | dokumen | | | | | 1,00 | 183.377,705 | 78.550,51 | 0,94 | 73.133,02 | 94,00 | 39,88 | 93,10 | 0,94 | 73.133 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 103 | | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaskanaan pembangunan di daerah** | % | | | | | *100,00* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 02 | 103 | 01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen hasil Evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPD | dokumen | | | | | 3,00 | 121.799,500 | 247.604,52 | 2,28 | 187.912,41 | 76,10 | 154,28 | 75,89 | 2,28 | 187.912 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 02 | 103 | 03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | dokumen | | | | | 4,00 | 120.000,000 | 106.289,95 | 3,60 | 94.730,40 | 90,00 | 78,94 | 89,12 | 3,60 | 94.730 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **92,52** | **48,63** | **89,32** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 5 | 01 | 03 | | | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **Terwujudnya perencanaan pembangunan bidang sosbud yang berkualitas** | **%** | | | | | **18,00** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 101 | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **Trwjdnya rapat,asistensi,sosialisasi,konsultasi, monev peny. dok kemiskinan(RPKD&LP2KD),terbentuknya tim koor pnnggulangan kmisknan&tim penye revisi RPJMDes perenc pnnggulngan kmisknan sub bid. pmrinthn kpndudukan capil&pemb desa,Koordinasi bid KESOS PPPA** | % | | | | | *100,00* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 101 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | paket | | | | | 18,00 | 130.000,000 | 117.931,11 | 17,64 | 114.642,45 | 98,00 | 88,19 | 97,21 | 17,64 | 114.642 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 101 | 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | dok | | | | | 4,00 | 60.000,000 | 61.427,73 | 3,84 | 58.916,33 | 96,00 | 98,19 | 95,91 | 3,84 | 58.916 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 101 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | kali | | | | | 4,00 | 50.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 101 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Perdesaan,Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pemerintahan | paket | | | | | 1,00 | 150.000,000 | 175.538,00 | 0,69 | 120.710,88 | 69,00 | 80,47 | 68,77 | 0,69 | 120.711 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 101 | 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | paket | | | | | 15,00 | 105.000,000 | 59.090,18 | 15,00 | 58.796,18 | 100,00 | 56,00 | 99,50 | 15,00 | 58.796 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 5 | 01 | 03 | 101 | 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | dok | | | | | 4,00 | 95.000,000 | 73.403,73 | 3,96 | 72.161,48 | 99,00 | 75,96 | 98,31 | 3,96 | 72.161 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 101 | 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | kali | | | | | 4,00 | 110.000,000 | 169.829,85 | 3,48 | 146.363,06 | 87,00 | 133,06 | 86,18 | 3,48 | 146.363 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 101 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | kali | | | | | 24,00 | 50.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 102 | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | **terlaksananya keg Koordinasi, rapat koordinasi, Asistensi, Monev Penyusunan dok Pere Pembangunan Bid pnnamn modal&tenaga ,perindustrian &perdagangan, pariwisata, koperasi, usaha kecil & menengah ,Pertanian, Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan terhadap OPD Tehnis terkait** | % | | | | | *100,00* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 102 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 29,00 | 133.000,000 | 86.922,07 | 18,85 | 55.780,04 | 65,00 | 41,94 | 64,17 | 18,85 | 55.780 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 102 | 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | dok | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 103.000,000 | 38.725,00 | 3,96 | 38.100,11 | 99,00 | 36,99 | 98,39 | 3,96 | 38.100 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 102 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | dok | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 80.000,000 | 110.777,68 | 1,96 | 53.228,22 | 49,00 | 66,54 | 48,05 | 1,96 | 53.228 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 102 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | dok | | | | | 24,00 | 50.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 102 | 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | kali | | | | | 19,00 | 100.000,000 | 78.198,24 | 15,58 | 63.362,17 | 82,00 | 63,36 | 81,03 | 15,58 | 63.362 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 102 | 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | dok | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 30.000,000 | 35.347,76 | 3,88 | 34.071,56 | 97,00 | 113,57 | 96,39 | 3,88 | 34.072 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 102 | 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | dok | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 29.000,000 | 44.292,00 | 3,96 | 43.735,38 | 99,08 | 150,81 | 98,74 | 3,96 | 43.735 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 102 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | "Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA" | kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 25.000,000 | - | 0,44 | - | 44,07 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 103 | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **Peningkatan kualitas,kuantitas bidang infrastruktur dan kewilayahan** | % | | | | | *100,00* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 103 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 27,00 | 125.000,000 | 285.754,93 | 26,73 | 282.121,66 | 99,00 | 225,70 | 98,73 | 26,73 | 282.122 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 103 | 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 75.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 103 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 50.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 5 | 01 | 03 | 103 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Sinkronisasi,Harmonisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang infrasrtuktur | Dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 23,00 | 100.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 103 | 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 27,00 | 125.000,000 | 274.460,52 | 25,12 | 255.209,36 | 93,04 | 204,17 | 92,99 | 25,12 | 255.209 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 103 | 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 75.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 103 | 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 4,00 | 50.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 03 | 103 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Kali | 0,00 | - | 0,00 | - | 31,00 | 100.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **58,01** | **65,22** | **55,65** | | | **58,01** | **65,22** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **R** | **R** | **R** | | | **R** | **R** | |
| | | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **13.021.856,30** | **8.551.515,99** | **7.455.244,156** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **78,83** | **59,80** | **76,40** | | | **0,00** | **8,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **T** | **R** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 5 | 02 | | | | **KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Meningkatnya Dokumen RENJA, RKA, RKAP, DPA, DPAP, Dokumen Laporan Realisasi Fisik Keuangan dan Daftar Gaji Bulanan, Gaji terusan, daftar Kekurangan Gaji, TPP,Administrasi Tugas ASN, LKIP, Penyusunan BKU, Buku Pajak, SPJ Fungsional, SPJ Adminitratif, dan R** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan | Dokumen | | | | | 2,00 | 43.808,450 | 37.339,74 | 2,00 | 35.670,10 | 100,00 | 81,42 | 95,53 | 2,00 | 35.670 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran | Dokumen | | | | | 1,00 | 9.483,580 | 8.534,94 | 1,00 | 8.510,90 | 100,00 | 89,74 | 99,72 | 1,00 | 8.511 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | | | | | 1,00 | 9.483,690 | 8.535,27 | 1,00 | 7.773,20 | 100,00 | 81,96 | 91,07 | 1,00 | 7.773 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen Pelaksana Anggaran | Dokumen | | | | | 1,00 | 8.438,580 | 7.594,44 | 1,00 | 6.078,40 | 100,00 | 72,03 | 80,04 | 1,00 | 6.078 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan | Dokumen | | | | | 1,00 | 8.438,580 | 8.535,27 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKIP) | Dokumen | | | | | 1,00 | 6.009,000 | 5.408,90 | 1,00 | 4.763,90 | 100,00 | 79,28 | 88,08 | 1,00 | 4.764 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen laporan Evaluasi Perangkat Daerah | Bulan | | | | | 12,00 | 158.427,310 | 139.838,59 | 12,00 | 127.109,55 | 100,00 | 80,23 | 90,90 | 12,00 | 127.110 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan Daerah | bulan | | | | | 12,00 | 10.994.494,727 | 8.869.974,58 | 12,00 | 7.833.567,86 | 100,00 | 71,25 | 88,32 | 12,00 | 7.833.568 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terlaksananya pembayaran Honorarium Pengelola keuangan BUD, kuasa BUD, PA, PPK, PPTK & staf ASN serta Upah Bagi Jasa Pihak Ketiga | bulan | | | | | 12,00 | 136.315,250 | 89.950,29 | 12,00 | 34.250,20 | 100,00 | 25,13 | 38,08 | 12,00 | 34.250 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Honorarium Pengelola keuangan BUD, kuasa BUD, PA, PPK, PPTK & staf ASN serta Upah Bagi Jasa Pihak Ketiga | dokumen | | | | | 1,00 | 421.500,790 | 266.395,90 | 1,00 | 233.955,80 | 100,00 | 55,51 | 87,82 | 1,00 | 233.956 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun | dokumen | | | | | 1,00 | 11.512,600 | 10.361,25 | 1,00 | 10.359,00 | 100,00 | 89,98 | 99,98 | 1,00 | 10.359 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun | semester | | | | | 1,00 | 3.000,030 | 1.799,90 | 1,00 | 1.799,40 | 100,00 | 59,98 | 99,97 | 1,00 | 1.799 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 8 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran | semester | | | | | 1,00 | 1.000,000 | 900,00 | 1,00 | 899,70 | 100,00 | 89,97 | 99,97 | 1,00 | 900 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Tersedianya dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran** | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Tersedianya data administrasi kepegawaian | bulan | | | | | 12,00 | 11.130,000 | 10.800,00 | 12,00 | 3.600,00 | 100,00 | 32,35 | 33,33 | 12,00 | 3.600 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Meningkatnya Kedisiplinan dan Peningkatan kualitas SDM bagi ASN yang mengikuti DIKLAT Kepemimpinan | orang | | | | | 1,00 | 52.125,000 | 44.250,00 | 1,00 | 44.250,00 | 100,00 | 84,89 | 100,00 | 1,00 | 44.250 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur bagi ASN yang mengikuti sosialisasi | orang | | | | | 6,00 | 8.797,520 | 6.770,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur bagi ASN yang mengikuti sosialisasi | orang | | | | | 6,00 | 31.590,000 | 15.416,10 | 6,00 | 13.967,00 | 100,00 | 44,21 | 90,60 | 6,00 | 13.967 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Pembayaran Jasa Rekening Air Listrik, Pajak STNK Kendaraan Roda Dua dan Empat, Honorarium Pengelola Keuangan, Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor, ATK, Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan, Pengadaan Mobil Jabatan, Kendaraan Dinas Roda Du** | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | Paket | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 18.798,700 | 9.200,13 | 1,00 | 5.085,00 | 100,00 | 27,05 | 55,27 | 1,00 | 5.085 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 27.020,000 | 16.950,00 | 12,00 | 16.950,00 | 100,00 | 62,73 | 100,00 | 12,00 | 16.950 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia | Paket | | | | | 1,00 | 10.292,700 | 7.403,55 | 1,00 | 6.955,00 | 100,00 | 67,57 | 93,94 | 1,00 | 6.955 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah alat tulis kantor BPKD yang tersedia | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 411.670,650 | 438.055,42 | 12,00 | 405.720,75 | 100,00 | 98,55 | 92,62 | 12,00 | 405.721 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah lembar Spanduk dan Penggandaan yang disiapkan | Bulan | | | | | 12,00 | 256.489,100 | 132.229,54 | 12,00 | 132.229,40 | 100,00 | 51,55 | 100,00 | 12,00 | 132.229 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah lembar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 3.330,000 | 1.927,50 | 12,00 | 1.080,00 | 100,00 | 32,43 | 56,03 | 12,00 | 1.080 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makan minum tamu dan rapat yang tersedia | Bulan | | | | | 12,00 | 46.873,040 | 37.004,97 | 12,00 | 37.003,00 | 100,00 | 78,94 | 99,99 | 12,00 | 37.003 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah | Bulan | | | | | 12,00 | 285.605,210 | 158.026,17 | 12,00 | 156.986,26 | 100,00 | 54,97 | 99,34 | 12,00 | 156.986 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.04 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terlaksananya Pembayaran Jasa Rekening Air Listrik, Pajak STNK Kendaraan Roda Dua dan Empat, Honorarium Pengelola Keuangan, Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor, ATK, Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan, Pengadaan Mobil Jabatan, Kendaraan Dinas Roda Du** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.04 | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Mobil Jabatan Eselon II | Unit | | | | | 1,00 | 924.030,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.04 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (dua) | Unit | | | | | 2,00 | 50.000,000 | 102.842,96 | 1,95 | 99.178,00 | 97,67 | 198,36 | 96,44 | 1,95 | 99.178 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.04 | 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebeleur seperti Meja/Kursi kerja BPKD | Buah | | | | | 25,00 | 169.445,000 | 46.970,00 | 25,00 | 40.030,00 | 100,00 | 23,62 | 85,22 | 25,00 | 40.030 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.04 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Gedung Kantor BPKD | Unit | | | | | 5,00 | 35.000,000 | 623.811,16 | 5,00 | 622.903,35 | 100,00 | 1779,72 | 99,85 | 5,00 | 622.903 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.04 | 9 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pagar, Pintu Gerbang, dan Papan Nama Kantor | Paket | | | | | 1,00 | 45.000,000 | 14.998,60 | 0,80 | 11.373,88 | 80,00 | 25,28 | 75,83 | 0,80 | 11.374 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.04 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah Jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia | Buah | | | | | 40,00 | 384.177,990 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.04 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung yang tersedia | Buah | | | | | 5,00 | 25.463,750 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Pembayaran Jasa Rekening Air Listrik, Pajak STNK Kendaraan Roda Dua dan Empat, Honorarium Pengelola Keuangan, Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor, ATK, Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan, Pengadaan Mobil Jabatan, Kendaraan Dinas Roda Du** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Pemenuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Diadakan | bulan | | | | | 12,00 | 258.440,724 | 302.011,34 | 9,96 | 241.706,36 | 83,00 | 93,52 | 80,03 | 9,96 | 241.706 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor BPKD | bulan | | | | | 12,00 | 354.780,547 | 277.988,00 | 12,00 | 231.085,00 | 100,00 | 65,13 | 83,13 | 12,00 | 231.085 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Pembayaran Jasa Rekening Air Listrik, Pajak STNK Kendaraan Roda Dua dan Empat, Honorarium Pengelola Keuangan, Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor, ATK, Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan, Pengadaan Mobil Jabatan, Kendaraan Dinas Roda Du** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah mobil jabatan Eselon II BPKD dan STNK yang dipelihara | Unit | | | | | 1,00 | 30.000,000 | 13.500,00 | 1,00 | 13.433,56 | 100,00 | 44,78 | 99,51 | 1,00 | 13.434 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional baik Roda Dua maupun Roda 4 yang dipelihara dan jumlah pajak | Unit | | | | | 23,00 | 107.050,000 | 91.900,00 | 15,92 | 61.021,01 | 69,23 | 57,00 | 66,40 | 15,92 | 61.021 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 5 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebeleur Kantor yang dipelihara | Buah | | | | | 5,00 | 2.000,000 | 1.981,50 | 5,00 | 1.299,00 | 100,00 | 64,95 | 65,56 | 5,00 | 1.299 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi | Bulan | | | | | 12,00 | 112.315,242 | 74.624,68 | 12,00 | 74.276,18 | 100,00 | 66,13 | 99,53 | 12,00 | 74.276 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | buah | | | | | 12,00 | 16.240,000 | 17.990,00 | 12,00 | 17.980,00 | 100,00 | 110,71 | 99,94 | 12,00 | 17.980 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **66,60** | **80,82** | **58,64** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **S** | **T** | **R** | | | **SR** | **SR** | |
| 5 | 02 | 02 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan daerah, evaluasi dokumen keuangan, serta pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan desa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **Tersedianya Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPAP, Perda APBD , Perda APBDP, Perbup Penjabaran APBD, Perbup Penjabaran Perubahan APBD, Perbup Pedoman Penyusunan Anggaran, Perbup Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan, Sisdur Pedoman Penyusunan APBD, Data Potensi Pendapa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 1 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah KUA dan Perubahan PPAS yang disusun | dokumen | | | | | 2 | 165.230,760 | 162.460,76 | 1,70 | 135.293,25 | 85,00 | 81,88 | 83,28 | 1,70 | 135.293 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun | dokumen | | | | | 2 | 145.169,760 | 70.800,00 | 2,00 | 69.825,90 | 100,00 | 48,10 | 98,62 | 2,00 | 69.826 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 3 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD terverifikasi | OPD | | | | | 46 | 208.066,000 | 133.985,86 | 43,81 | 126.122,80 | 95,24 | 60,62 | 94,13 | 43,81 | 126.123 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 4 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan rencana kerja dan anggaran SKPD terverifikasi | OPD | | | | | 46 | 158.755,000 | 56.894,72 | 32,66 | 37.149,00 | 71,00 | 23,40 | 65,29 | 32,66 | 37.149 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 5 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Bulukumba terverifikasi | OPD | | | | | 46 | 53.779,700 | 47.570,08 | 41,62 | 42.469,00 | 90,48 | 78,97 | 89,28 | 41,62 | 42.469 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 6 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kabupaten Bulukumba terverifikasi | OPD | | | | | 46 | 53.779,700 | 30.876,95 | 13,14 | 5.947,00 | 28,57 | 11,06 | 19,26 | 13,14 | 5.947 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Buku perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang tersusun | dokumen | | | | | 2 | 393.485,500 | 354.136,54 | 1,80 | 308.928,86 | 90,00 | 78,51 | 87,23 | 1,80 | 308.929 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 8 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun | dokumen | | | | | 2 | 424.203,500 | 332.075,23 | 1,70 | 276.229,60 | 85,00 | 65,12 | 83,18 | 1,70 | 276.230 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 9 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah buku peraturan bupati tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan jumlah buku sisdur keuangan tentang pedoman penyusunan APBD | dokumen | | | | | 2 | 89.325,000 | 53.134,81 | 1,20 | 28.736,72 | 60,00 | 32,17 | 54,08 | 1,20 | 28.737 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Jumlah laporan pendapatan daerah diseluruh OPD yang disusun | bulan | | | | | 12 | 30.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah perencanaan anggaran belanja yang dikoordinasikan | bulan | | | | | 12 | 442.741,000 | 330.203,00 | 12,00 | 292.566,66 | 100,00 | 66,08 | 88,60 | 12,00 | 292.567 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 12 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Jumlah Anggaran Pembiayaan Daerah yang dialokasikan | bulan | | | | | 12 | 85.150,000 | 85.149,99 | 12,00 | 84.548,80 | 100,00 | 99,29 | 99,29 | 12,00 | 84.549 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 13 | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah SKPD yang dibina dalam penganggaran daerah | bulan | | | | | 12 | 118.870,000 | 79.470,00 | 12,00 | 75.694,59 | 100,00 | 63,68 | 95,25 | 12,00 | 75.695 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **Tersedianya Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peny. Laporan Dana Transfer DAK Fisik, DAK Non Fisik, DID, DAU Tambahan Kelurahan, Dokumen Penerbitan SP2D, Daftar Penguji ke Bank Sulselbar, Data Administrasi Gaji PNS dan Data TPG, Data Rekonsiliasi Pemun** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 1 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah pelaporan pengelolaan kas OPD yang terkelola dengan baik | Bulan | | | | | 12 | 75.000,000 | 36.175,95 | 12,00 | 36.175,65 | 100,00 | 48,23 | 100,00 | 12,00 | 36.176 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 2 | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | Bulan | | | | | 12 | 30.000,000 | 13.499,91 | 12,00 | 13.499,91 | 100,00 | 45,00 | 100,00 | 12,00 | 13.500 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 3 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah surat penyedia dana (SPD) yang diterbitkan | OPD | | | | | 48 | 71.000,000 | 46.826,56 | 48,00 | 46.689,56 | 100,00 | 65,76 | 99,71 | 48,00 | 46.690 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 4 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah alokasi dana pembiayaan | Tahun | | | | | 1 | 20.000,000 | 13.500,00 | 1,00 | 12.925,15 | 100,00 | 64,63 | 95,74 | 1,00 | 12.925 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 5 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah laporan Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang dibuat | Dokumen | | | | | 4 | 205.000,000 | 193.182,07 | 3,80 | 176.811,63 | 95,00 | 86,25 | 91,53 | 3,80 | 176.812 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 6 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah OPD kerjasama pelaksanaan dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank | OPD | | | | | 48 | 20.000,000 | 13.499,87 | 48,00 | 13.497,87 | 100,00 | 67,49 | 99,99 | 48,00 | 13.498 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan laporan pajak (PFK) yang disusun | Laporan | | | | | 3 | 20.000,000 | 13.499,79 | 3,00 | 13.444,34 | 100,00 | 67,22 | 99,59 | 3,00 | 13.444 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Jumlah Laporan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas yang disusun | Laporan | | | | | 2 | 20.000,000 | 8.999,87 | 2,00 | 8.804,87 | 100,00 | 44,02 | 97,83 | 2,00 | 8.805 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 9 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah data Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait yang dibuat | Bulan | | | | | 12 | 213.251,950 | 130.691,45 | 12,00 | 130.672,65 | 100,00 | 61,28 | 99,99 | 12,00 | 130.673 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah buku petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan penegeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan yang tersusun | Pedoman | | | | | 1 | 20.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah OPD yang dibina pada pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten | OPD | | | | | 48 | 129.936,490 | 141.626,36 | 30,86 | 81.025,40 | 64,29 | 62,36 | 57,21 | 30,86 | 81.025 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **Tersedianya data Rekonsiliasi Pendapatan Penerimaan BUD, Non BUD, Penatausahaan Akuntansi, Rancangan Perda, dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD, Laporan Semester Pemda, Dokumen Tindak Lanjut LHP BPK atas LKPD, data rekonsiliasi pelaporan, Kebijakan Akunta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 1 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah yang disusun | Bulan | | | | | 12 | 132.899,000 | 132.544,06 | 12,00 | 131.683,40 | 100,00 | 99,09 | 99,35 | 12,00 | 131.683 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 2 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Jumlah dokumen laporan yang dievaluasi Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Dokumen | | | | | 2 | 86.169,520 | 34.383,00 | 2,00 | 34.213,00 | 100,00 | 39,70 | 99,51 | 2,00 | 34.213 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 3 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disusun | Dokumen | | | | | 3 | 53.999,990 | 30.514,46 | 3,00 | 30.433,76 | 100,00 | 56,36 | 99,74 | 3,00 | 30.434 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 4 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun | Dokumen | | | | | 2 | 69.438,020 | 55.616,74 | 2,00 | 55.428,32 | 100,00 | 79,82 | 99,66 | 2,00 | 55.428 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah buku rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi oleh Pemerintah provinsi | Buku | | | | | 55 | 112.851,020 | 67.712,46 | 55,00 | 67.663,09 | 100,00 | 59,96 | 99,93 | 55,00 | 67.663 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 6 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah dokumen laporan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dibuat | Dokumen | | | | | 1 | 21.863,620 | 15.299,80 | 1,00 | 14.636,65 | 100,00 | 66,95 | 95,67 | 1,00 | 14.637 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 7 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah dokumen Laporan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah TPTGR | Dokumen | | | | | 1 | 27.420,000 | 24.677,71 | 1,00 | 19.875,95 | 100,00 | 72,49 | 80,54 | 1,00 | 19.876 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 8 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Analisis Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun | Dokumen | | | | | 2 | 74.189,920 | 40.716,79 | 2,00 | 40.532,68 | 100,00 | 54,63 | 99,55 | 2,00 | 40.533 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 9 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah buku Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun | Dokumen | | | | | 1 | 62.753,000 | 38.475,68 | 1,00 | 35.623,35 | 100,00 | 56,77 | 92,59 | 1,00 | 35.623 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang disusun | Dokumen | | | | | 1 | 20.000,000 | 39.440,70 | 1,00 | 39.020,70 | 100,00 | 195,10 | 98,94 | 1,00 | 39.021 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah OPD yang dibina pelaksanaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten | OPD | | | | | 48 | 90.786,190 | 72.492,30 | 48,00 | 71.317,09 | 100,00 | 78,55 | 98,38 | 48,00 | 71.317 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 12 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Jumlah OPD yang dibina Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten | OPD | | | | | 1 | 44.550,000 | 28.215,67 | 0,86 | 23.775,15 | 86,00 | 53,37 | 84,26 | 0,86 | 23.775 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 13 | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Jumlah dokumen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah | Dokumen | | | | | 1 | 48.459,660 | 17.999,74 | 1,00 | 17.926,00 | 100,00 | 36,99 | 99,59 | 1,00 | 17.926 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **Tersedianya Alokasi Anggaran ADD, BDD, BTT, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah** | *%* | | | | | *95* | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah laporan Analisasi Perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah | Laporan | | | | | 1 | 20.000,000 | 156.749,70 | 1,00 | 152.662,60 | 100,00 | 763,31 | 97,39 | 1,00 | 152.663 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 8 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah desa yang mendapat Anggaran ADD dan BDD kepada Pemerintah Desa Se Kabupaten Bulukumba | Desa | | | | | 110 | 178.848.524,546 | 171.281.379,64 | 110,00 | 171.280.342,66 | 100,00 | 95,77 | 100,00 | 110,00 | 171.280.343 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 9 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah dana Belanja Tidak Terduga yang tersalur | Bulan | | | | | 12 | 12.862.301,207 | 10.631.393,29 | 12,00 | 658.045,60 | 100,00 | 5,12 | 6,19 | 12,00 | 658.046 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| | | | | 10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah desa yang mendapat Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Se Kabupaten Bulukumba | Desa | | | | | 110 | 6.464.907,880 | 8.957.831,55 | 90,00 | 6.834.570,85 | 81,82 | 105,72 | 76,30 | 90,00 | 6.834.571 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | **Terwujudnya penatausahaan akuntansi pelaporan keuangan daerah** | *%* | | | | | *95* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 2 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah terpelihara | Aplikasi | | | | | 4 | 99.923,000 | 118.410,79 | 3,70 | 107.510,00 | 92,50 | 107,59 | 90,79 | 3,70 | 107.510 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 3 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah OPD yang terbina pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten | OPD | | | | | 48 | 216.260,000 | 122.845,23 | 27,43 | 66.000,00 | 57,14 | 30,52 | 53,73 | 27,43 | 66.000 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **92,24** | **82,41** | **87,10** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **T** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 5 | 02 | 03 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah** | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **tersedianya standar harga, RKBMD, Pedoman Standar Kebutuhan BMD, Data BMD, Dokumen Pengguna BMD, Dokumen Penghapusan BMD, Dokumen Hibah BMD, Data Rekonsiliasi BMD, Laporan Akhir Tahun BMD, Materi Sosialisasi BMD.** | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 1 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah buku Standar Harga yang disusun | buku | | | | | 1 | 99.871,010 | 59.026,90 | 1,00 | 55.844,41 | 100,00 | 55,92 | 94,61 | 1,00 | 55.844 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 2 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen pedoman Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun | dokumen | | | | | 1 | 14.399,690 | 18.195,86 | 1,00 | 18.087,70 | 100,00 | 125,61 | 99,41 | 1,00 | 18.088 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 3 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun | dokumen | | | | | 2 | 117.798,150 | 88.518,52 | 1,80 | 76.205,44 | 90,00 | 64,69 | 86,09 | 1,80 | 76.205 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 4 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang tersusun | dokumen | | | | | 1 | 25.000,000 | 22.499,91 | 0,90 | 19.697,65 | 90,00 | 78,79 | 87,55 | 0,90 | 19.698 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 5 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | dokumen | | | | | 3 | 90.876,230 | 39.486,00 | 3,00 | 39.302,40 | 100,00 | 43,25 | 99,54 | 3,00 | 39.302 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 6 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen Barang Milik Daerah yang terinventarisasi | dokumen | | | | | 2 | 133.590,540 | 69.909,61 | 2,00 | 69.773,60 | 100,00 | 52,23 | 99,81 | 2,00 | 69.774 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 7 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah | dokumen | | | | | 1 | 38.710,730 | 24.718,20 | 1,00 | 22.328,05 | 100,00 | 57,68 | 90,33 | 1,00 | 22.328 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 9 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun | dokumen | | | | | 1 | 37.974,020 | 28.832,00 | 1,00 | 26.904,00 | 100,00 | 70,85 | 93,31 | 1,00 | 26.904 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen, pengawasan Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah se Kab. Bulukumba | dokumen | | | | | 1 | 151.496,000 | 99.814,70 | 1,00 | 91.501,84 | 100,00 | 60,40 | 91,67 | 1,00 | 91.502 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang tersusun | laporan | | | | | 1 | 17.488,440 | 15.739,55 | 1,00 | 15.547,40 | 100,00 | 88,90 | 98,78 | 1,00 | 15.547 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun | laporan | | | | | 1 | 66.320,460 | 50.795,00 | 1,00 | 50.273,50 | 100,00 | 75,80 | 98,97 | 1,00 | 50.274 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | peserta | | | | | 150 | 55.355,840 | 26.999,77 | 150,00 | 26.971,75 | 100,00 | 48,72 | 99,90 | 150,00 | 26.972 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **98,33** | **68,57** | **95,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **S** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 5 | 02 | 04 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Meningkatnya Pendapatan Daerah sebagai sumber Pembiayaan Pembangunan yang berkelanjutan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | | **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** | **Penerimaan PAD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 3 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Terlaksananya Perumusan standarisasi Kebijakan operasional dan penagihan pajak- pajak Daerah | bulan | | | | | 12 | 139.649,850 | 347.313,20 | 11,00 | 116.160,40 | 91,67 | 83,18 | 33,45 | 11,00 | 116.160 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 4 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah ( PBB) yang berbasis Teknologi Informasi | bulan | | | | | 12 | 400.000,000 | 400.000,00 | 12,00 | 377.755,29 | 100,00 | 94,44 | 94,44 | 12,00 | 377.755 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 5 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Terlaksananya pendataan wajib pajak dan Retribusi Daerah yang Optima | bulan | | | | | 12 | 375.219,000 | 795.142,00 | 12,00 | 250.766,10 | 100,00 | 66,83 | 31,54 | 12,00 | 250.766 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 6 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Tersedianya Basis Data Pajak Daerah Yang Up to Date | bulan | | | | | 12 | 438.917,000 | 334.623,80 | 12,00 | 324.360,30 | 100,00 | 73,90 | 96,93 | 12,00 | 324.360 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 8 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Terlaksananya Evaluasi Kebijakan tentang Sistem Administrasi Pelayanan dan Tersusunnya Surat Ketetapan | bulan | | | | | 12 | 126.605,800 | 109.530,90 | 12,00 | 66.352,90 | 100,00 | 52,41 | 60,58 | 12,00 | 66.353 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Terwujudnya Penatausahaan,pembukuan,pelaporan dan rekonsiliasi PAD Sesuai Standar Akuntansi | bulan | | | | | 12 | 165.275,000 | 84.647,00 | 12,00 | 58.383,90 | 100,00 | 35,33 | 68,97 | 12,00 | 58.384 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 11 | Penagihan Pajak Daerah | Terlaksananya Perumusan standarisasi Kebijakan operasional dan penagihan pajak- pajak Daerah | bulan | | | | | 12 | 1.669.933,148 | 3.031.425,10 | 12,00 | 1.540.438,76 | 100,00 | 92,25 | 50,82 | 12,00 | 1.540.439 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Terlaksananya Pemeriksaan, Pengawasan pajak dan Uji Petik | bulan | | | | | 12 | 243.582,850 | 372.649,90 | 12,00 | 304.213,40 | 100,00 | 124,89 | 81,64 | 12,00 | 304.213 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 14 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | jumlah laporan kegiatan retribusi daerah | bulan | | | | | 12 | 348.377,250 | - | 3,00 | - | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **90,74** | **69,25** | **64,79** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **S** | **R** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **222.796.060** | **212.136.648** | | **195.792.040** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **86,98** | **75,26** | **76,38** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **T** | **S** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| **5** | **03** | | | | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | | | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | **Presentase Pengadaan,pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Formasi dan Pelamar ASN dan PPPK | fornasi | | | | | 1 | 358.500,000 | 55.000,00 | 1,00 | 54.368,30 | 100,00 | 15,17 | 98,85 | 1,00 | 54.368 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN | kali | | | | | 1 | 50.000,000 | 53.179,90 | 0,99 | 43.127,00 | 99,00 | 86,25 | 81,10 | 0,99 | 43.127 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 10 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah kegiatan fasilitasi lembaga profesi ASN | kegiatan | | | | | 1 | 15.000,000 | - | 1,00 | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 12 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Laporan/data kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG | laporan | | | | | 1 | 44.000,000 | 114.260,00 | 1,00 | 103.749,00 | 100,00 | 235,79 | 90,80 | 1,00 | 103.749 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 12 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah data ASN yang diremajakan dengan sistem informasi kepegawaian(SAPK) | ASN | | | | | 1 | 180.000,000 | 28.999,81 | 1,00 | 28.979,85 | 100,00 | 16,10 | 99,93 | 1,00 | 28.980 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | | **Mutasi dan Promosi ASN** | **Presentase ASN yang menduduki jabatan dan ASN yang memenuhi kenaikan pangkat serta pensiun** | | | | | | *100* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah ASN yang menduduki jabatan admisnistarsi berdasarkan kompetensi | jabatan | | | | | 866 | 250.000,000 | 84.547,00 | 866,00 | 79.599,04 | 100,00 | 31,84 | 94,15 | 866,00 | 79.599 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah ASN yang memenuhi syarat kenaikan pangkat periode april dan oktober serta Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun | jabatan | | | | | 2 | 220.000,000 | 109.843,96 | 2,00 | 108.333,35 | 100,00 | 49,24 | 98,62 | 2,00 | 108.333 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | | **Pengembangan Kompetensi ASN** | **Presentase ASN yang mengikuti Pengembangan komptensi Aparatur** | *%* | | | | | *100* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 04 | Pengelolaan Assessment Center | Jumlah ASN yang mengikuti Assessment | paket | | | | | 1 | 100.000,000 | 223.780,00 | 0,92 | 202.419,46 | 92,00 | 202,42 | 90,45 | 0,92 | 202.419 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang diberikan Bantuan melanjutkan pendidikan S1,S2,S3 | paket | | | | | 1 | 180.000,000 | 101.000,00 | 0,92 | 87.000,00 | 91,67 | 48,33 | 86,14 | 0,92 | 87.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 04 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Jumlah ASN yang akan mengikuti diklat jabatan Fungsional | paket | | | | | 1 | 50.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 66.983 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | **Presentase penilaian,evaluasi dan terukurnya kinerja ASN kabupaten bulukumba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah ASN yang dinilai dengan berdasarkan prestasi kerja | ASN | | | | | 6031 | 60.000,000 | 21.940,00 | 6031,00 | 17.220,00 | 100,00 | 28,70 | 78,49 | ##### | 17.220 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan Penghargaan lainnya | ASN | | | | | 300 | 50.000,000 | 16.786,00 | 300,00 | 16.664,20 | 100,00 | 33,33 | 99,27 | 300,00 | 16.664 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin ASN | Kasus | | | | | 30 | 201.500,000 | 50.000,20 | 29,90 | 47.750,20 | 99,67 | 23,70 | 95,50 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **90,22** | **62,26** | **76,48** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **R** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BKPSDM)** | **%** | | | | | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan ,Penganggaran dan evaluasi kinerjayang dihasilkan** | *%* | | | | | *100* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah | dokumen | | | | | 3 | 19.811,800 | 10.395,36 | 3,00 | 10.395,20 | 100,00 | 52,47 | 100,00 | 3,00 | 10.395 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-RKAP BKPSDM | dokumen | | | | | 2 | 2.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-DPAP BKPSDM | dokumen | | | | | 2 | 2.500,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja skpd | laporan | | | | | 12 | 2.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah ASN yang mendapatkan gaji ,Tunjangan dan tersusunnya laporan keuangan akhir tahun** | *%* | | | | | *100* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah aparatur sipil negara BKPSDM yang menerima gaji dan tunjangan ASN | ASN | | | | | 43 | 3.863.447,735 | 3.322.426,55 | 43,00 | 3.057.891,22 | 100,00 | 79,15 | 92,04 | 43,00 | 3.057.891 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah ASN yang menerima Honorarium penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD | bulan | | | | | 12 | 72.000,000 | 34.127,50 | 12,00 | 33.867,50 | 100,00 | 47,04 | 99,24 | 12,00 | 33.868 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun | laporan | | | | | 1 | 5.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **presentase ASN yang mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan** | *%* | | | | | *100* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | kegiatan | | | | | 1 | 50.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK | ASN | | | | | 50 | 30.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Peralatan,Perlengkapan,bahan logistik,cetak,penggandaan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi.** | *%* | | | | | *100* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan | buah | | | | | 1 | 2.438,000 | 500,00 | 1,00 | 500,00 | 100,00 | 20,51 | 100,00 | 1,00 | 500 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan | unit | | | | | 7 | 15.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah alat Tulis kantor,makan minum rapat dan tamu BKPSDM | buah | | | | | 12 | 65.000,000 | 22.165,92 | 12,00 | 22.132,87 | 100,00 | 34,05 | 99,85 | 12,00 | 22.133 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang cetakan dan penggandaan | persen | | | | | 100 | 4.200,000 | 3.724,80 | 99,80 | 3.499,80 | 99,80 | 83,33 | 93,96 | 99,80 | 3.500 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah orang/kegiatan yang melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah | orang/kali | | | | | 1 | 220.000,000 | 50.000,00 | 1,00 | 49.997,80 | 100,00 | 22,73 | 100,00 | 1,00 | 49.998 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah barang milik daerah yang layak pakai** | *%* | | | | | *100* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya | unit | | | | | 10 | 65.000,000 | 18.722,00 | 10,00 | 18.722,00 | 100,00 | 28,80 | 100,00 | 10,00 | 18.722 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | *%* | | | | | *100* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa komunikasi,sumber daya dan listrik yang terbayar | bulan | | | | | 12 | 154.953,560 | 131.996,70 | 12,00 | 126.007,80 | 100,00 | 81,32 | 95,46 | 12,00 | 126.008 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa pelayanan umum kantor | orang | | | | | 2 | 24.000,000 | 129.600,00 | 2,00 | 129.200,00 | 100,00 | 538,33 | 99,69 | 2,00 | 129.200 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 5 | 03 | 02 | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik dan layak pakai** | *%* | | | | | *100* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | 02 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara | unit | | | | | 1 | 42493 | 7.500,00 | 1,00 | 7.300,22 | 100,00 | 17,18 | 97,34 | 1,00 | 7.300 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara | unit | | | | | 10 | 23.100,000 | 2.600,00 | 9,00 | 2.076,34 | 90,00 | 8,99 | 79,86 | 9,00 | 2.076 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | | | Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebeleur kantor yang terpelihara | unit | | | | | 24 | 2.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | unit | | | | | 30 | 5.269,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 03 | 02 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara | unit | | | | | 1 | 8.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **99,15** | **84,49** | **96,45** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **T** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **6.437.213,10** | **4.593.095,70** | | **4.250.801,146** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **94,69** | **73,38** | **86,47** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **ST** | **S** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| **5** | **04** | | | | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 04 | 02 | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya** | **orang** | | | | | **1513** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 04 | 02 | 2.01 | | **Pengembangan Kompetensi Teknis** | **Presentase ASN yang mengikuti diklat Pengembangan kompetensi teknis umum,inti,dan pilihan bagi jabatan admnistrasi penyelenggara urusan pemerintahan** | *%* | | | | | *100* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 04 | 02 | 2.01 | 04 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Laporan pelaksanaan diklat penegmbangan kompetensi teknis umum,inti dan pilihan bagi jabatan administrasi | paket | | | | | 1,00 | 60.000,000 | 17.180,00 | 1,00 | 17.096,00 | 100,00 | 28,49 | 99,51 | 1,00 | 17.096 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 04 | 02 | 2.02 | | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | **Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi manajerial, jabatan pimpinan tinggi,jabatan fungsional , pelatihan prajabatan(LATSAR) dan pelatihan teknis lainnya** | *%* | | | | | *100* | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 04 | 02 | 2.02 | 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengembangan Kompetensi bagi pimpinan daerah,jabatan funsional,kepemimpinan dan Calon ASN(LATSAR) | angkatan | | | | | 6,00 | 4.150.000,000 | 1.326.231,00 | 6,00 | 1.306.315,90 | 100,00 | 31,48 | 98,50 | 6,00 | 1.306.316 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **29,99** | **99,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **4.210.000,00** | **1.343.411,00** | | **1.323.411,901** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **100,00** | **58,91** | **99,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **ST** | **R** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 5 | 05 | | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 05 | 02 | 2.01 | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | Meningkatnya pengetahuan terhadap prospek pembangunan daerah pada masing-masing sektor | % | | | | | 12,00 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 05 | 02 | 2.01 | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan** | **Terwujudnya Kualitas Kehidupan dibidang aspek sosial** | dokumen | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 05 | 02 | 2.01 | 03 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Tersedianya Kajian dan Pengembangan Pariwisata | bulan | | | | | 12,00 | 60.000,000 | 152.720,00 | 12,00 | 47.347,00 | 100,00 | 78,91 | 31,00 | 12,00 | 47.347 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 5 | 05 | 02 | 2.01 | 05 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dan Tersedianya Dokumen pengembangan pertanian dan pangan | dokumen | | | | | 1,00 | 60.000,000 | 117.630,00 | 1,00 | 117.529,21 | 100,00 | 195,88 | 99,91 | 1,00 | 117.529 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 05 | 02 | 2.02 | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | **Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dan Tersedianya Dokumen pengembangan pertanian dan pangan** | dokumen | | | | | 4,00 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 05 | 02 | 2.02 | 04 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dan Tersedianya Dokumen pengembangan pertanian dan pangan | dokumen | | | | | 1,00 | 120.000,000 | 106.274,00 | 0,12 | 105.675,28 | 12,00 | 88,06 | 99,44 | 0,12 | 105.675 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 05 | 02 | 2.02 | 05 | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Tersedianya Kajian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | dokumen | | | | | 6,00 | - | 200.000,00 | 6,00 | 115.885,35 | 100,00 | 0,00 | 57,94 | 6,00 | 115.885 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 05 | 02 | 2.02 | | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | | dokumen | | | | | 4,00 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 05 | 02 | 2.02 | 04 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | dokumen | | | | | 1,00 | 15.000,000 | 126.378,51 | 0,74 | 92.880,51 | 74,00 | 619,20 | 73,49 | 0,74 | 92.881 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **77,20** | **196,41** | **72,36** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **ST** | **S** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **255.000,00** | **703.002,51** | | **479.317,35** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)** | **77,20** | **196,41** | **72,36** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)** | **T** | **ST** | **S** | | | **SR** | **SR** | |
| **6** | | | | | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | **2** | **0.00** | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **Jumlah Temuan BPK, Persentase Pelanggaran Pegawai** | **%** | | | | | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | **2** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal dalam hal persentase pengawasan Pemda** | *%* | | | | | *100* | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | **2** | **2.01** | 1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah | % | | | | | 100 | 349.518,400 | 227.344,00 | 100,00 | 159.300,00 | 100,00 | 45,58 | 70,07 | 100,00 | 159.300 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **2** | **2.01** | 2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Terlaksananya pemeriksaan dana BOS, pemeriksaan fisik dan keuangan OPD, audit operasional OPD serta penutupan kas dan stock opname | % | | | | | 100 | 1.248.000,000 | 1.220.460,00 | 100,00 | 1.141.860,00 | 100,00 | 91,50 | 93,56 | 100,00 | 1.141.860 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **2** | **2.01** | 3 | Reviu Laporan Kinerja | Terlaksananya reviu laporan kinerja Pemda | % | | | | | 100 | 108.900,000 | 137.100,00 | 100,00 | 97.000,00 | 100,00 | 89,07 | 70,75 | 100,00 | 97.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **2** | **2.01** | 4 | Reviu Laporan Keuangan | Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan | % | | | | | 100 | 287.364,000 | 325.460,00 | 100,00 | 217.954,00 | 100,00 | 75,85 | 66,97 | 100,00 | 217.954 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **2** | **2.01** | 5 | Pengawasan Desa | Terlaksananya pengawasan dana desa | % | | | | | 100 | 326.700,000 | 502.800,00 | 100,00 | 487.500,00 | 100,00 | 149,22 | 96,96 | 100,00 | 487.500 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **2** | **2.01** | 7 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Terlaksananya monev tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP serta pemutakhiran data tindak lanjut temuan | % | | | | | 100 | 233.806,100 | 407.149,00 | 95,00 | 385.742,87 | 95,00 | 164,98 | 94,74 | 95,00 | 385.743 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **2** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | **Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal dalam hal persentase pengawasan Pemda** | *%* | | | | | *100* | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | **2** | **2.02** | 2 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Terlaksananya audit dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat | dokumen | | | | | 15 | 540.000,000 | 445.800,00 | 9,00 | 240.570,00 | 60,00 | 44,55 | 53,96 | 9,00 | 240.570 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **93,57** | **94,39** | **78,14** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| 6 | 1 | **3** | **0.00** | | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **Persenatse Tindak Lanjut Temuan** | | | | | | **15** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | **3** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | **Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan** | | | | | | *12* | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | **3** | **2.01** | 2 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Terlaksananya fasilitasi manajemen risiko, SPIP dan Pendampingan FCP | % | | | | | 100 | 169.334,000 | 232.230,00 | 30,00 | 35.993,50 | 30,00 | 21,26 | 15,50 | 30,00 | 35.994 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **3** | **2.02** | | **Pendampingan dan Asistensi** | **Persentase cakupan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah** | *%* | | | | | *100* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 6 | 1 | 3 | 2.02 | 1 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pendampingan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) | % | | | | | 100 | 78.672,000 | 77.580,00 | 100,00 | 77.580,00 | 100,00 | 98,61 | 100,00 | 100,00 | 77.580 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Terlaksananya Pendampingan, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan tercapainya indeks PMPRB | % | | | | | 100 | 131.200,000 | 108.280,00 | 100,00 | 92.842,07 | 100,00 | 70,76 | 85,74 | 100,00 | 92.842 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Terlaksananya koordinasi, monitoring, dan evaluasi APIP, APH dan Tim Saber pungli atas pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan pungli serta terlaksananya pendampingan Monitoring Of Control Plan (MCP) | % | | | | | 100 | 683.848,000 | 714.648,00 | 100,00 | 636.579,62 | 100,00 | 93,09 | 89,08 | 100,00 | 636.580 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | 3 | 2.02 | 4 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Terlaksananya kegiatan survei penilaian integritas KPK dan Verifikasi LHKPN dan LHKASN | % | | | | | 100 | 200.824,800 | 43.500,00 | 100,00 | 29.400,00 | 100,00 | 14,64 | 67,59 | 100,00 | 29.400 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **86,00** | **59,67** | **71,58** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **R** | **S** | | | **SR** | **SR** | |
| 6 | 1 | **1** | **0.00** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Inspektorat Daerah)** | **%** | | | | | **100** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Tersedianya dokumen perencanaan perangkat Daerah** | *%* | | | | | *100* | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | **1** | **2.01** | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Penyusunan dokumen Perancanaan Perangkat Daerah | dokumen | | | | | 6 | 5.726,050 | 1.345,50 | 6,00 | 1.088,00 | 100,00 | 19,00 | 80,86 | 6,00 | 1.088 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **1** | **2.01** | 1 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | dokumen | | | | | 2 | 6.500,000 | | 2,00 | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Adminstrasi keuangan perangkat daerah terkait ketersediaan gaji dan tunjangan** | *%* | | | | | *100* | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | **1** | **2.02** | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | bulan | | | | | 12 | 4.688.619,474 | 3.595.340,00 | 12,00 | 3.473.882,39 | 100,00 | 74,09 | 96,62 | 12,00 | 3.473.882 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **1** | **2.02** | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan/verifikasi Keuangan SKPD | bulan | | | | | 12 | 93.621,000 | 85.110,00 | 12,00 | 85.020,00 | 100,00 | 90,81 | 99,89 | 12,00 | 85.020 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **1** | **2.02** | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Terlaksananya Penatausahaan/verifikasi Keuangan SKPD | laporan | | | | | 2 | 4.290,000 | 669,60 | 2,00 | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **1** | **2.02** | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan | laporan | | | | | 12 | 3.469,180 | 824,80 | 12,00 | 656,00 | 100,00 | 18,91 | 79,53 | 12,00 | 656 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur** | *orang* | | | | | *49* | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | **1** | **2.05** | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi | orang | | | | | 33 | 1.311.561,000 | 1.785.055,00 | 16,50 | 856.431,65 | 50,00 | 65,30 | 47,98 | 16,50 | 856.432 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dalam Hal Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor** | *%* | | | | | *100* | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | **1** | **2.06** | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | % | | | | | 100 | 2.729,237 | 2.481,13 | 100,00 | 986,00 | 100,00 | 36,13 | 39,74 | 100,00 | 986 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **1** | **2.06** | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya bahan logistik kantor | % | | | | | 100 | 115.581,752 | 104.076,39 | 100,00 | 99.135,30 | 100,00 | 85,77 | 95,25 | 100,00 | 99.135 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **1** | **2.06** | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | bulan | | | | | 12 | 45.454,596 | 46.626,33 | 11,16 | 46.626,05 | 93,00 | 102,58 | 100,00 | 11,16 | 46.626 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **1** | **2.06** | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | ng/kegiatan | | | | | 66 | 343.110,900 | 311.919,00 | 55,00 | 257.277,17 | 83,33 | 74,98 | 82,48 | 55,00 | 257.277 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Hal Ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** | *%* | | | | | *100* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *unit* | | | | | *2* | 466.400,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pengadaan Mebel | Terlaksananya Pengadaan meubel | *%* | | | | | *100* | 84.062,500 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | **1** | **2.07** | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya pengadaan sarana prasarana gedung kantor | % | | | | | 100 | 81.092,080 | 282.938,67 | 100,00 | 277.484,00 | 100,00 | 342,18 | 98,07 | 100,00 | 277.484 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 6 | 1 | **1** | **2.07** | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor | % | | | | | 100 | 70.529,875 | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase jasa penunjang dalam hal penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listri** | ***%*** | | | | | ***100*** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | **1** | **2.08** | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik | % | | | | | 100 | 48.999,390 | 43.824,60 | 100,00 | 37.484,03 | 100,00 | 76,50 | 85,53 | 100,00 | 37.484 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **1** | **2.08** | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor | % | | | | | 100 | 100.000,000 | 117.953,40 | 82,00 | 95.511,00 | 82,00 | 95,51 | 80,97 | 82,00 | 95.511 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase ketersediaan jasa anggaran pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan** | *%* | | | | | *100* | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | **1** | **2.09** | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | % | | | | | 100 | 38.630,000 | 18.859,38 | 25,00 | 4.399,12 | 25,00 | 11,39 | 23,33 | 25,00 | 4.399 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **1** | **2.09** | 6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | % | | | | | 100 | 158.369,750 | 81.578,13 | 62,00 | 49.354,37 | 62,00 | 31,16 | 60,50 | 62,00 | 49.354 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | % | | | | | 100 | 14.931,400 | 21.109,00 | 35,00 | 7.315,00 | 35,00 | 48,99 | 34,65 | 35,00 | 7.315 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 1 | **1** | **2.09** | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | paket | | | | | 1 | 1.615.014,406 | 111.185,00 | 1,00 | 110.829,90 | 100,00 | 6,86 | 99,68 | 1,00 | 110.830 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **89,40** | **32,80** | **70,26** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **SR** | **S** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **13.656.859,89** | **11.053.246,91** | | **9.005.802,020** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **89,66** | **62,29** | **73,33** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)** | **T** | **R** | **S** | | | **SR** | **SR** | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **1** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **1** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **1** | **1** | **1** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Peningkatan administrasi umum pada kecamatan dan kelurahan,terbayarnya honor pengelola keuangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan Akhir Tahun,Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan,Terlaksananya koordinasi dan konsultasi | bulan | | | | | 12,00 | 153.382,000 | 190.754,00 | 12,00 | 182.336,81 | 100,00 | 118,88 | 95,59 | 12,00 | 182.337 | 0,00 | 0,00 | |
| **7** | **1** | **1** | **2,02** | 0 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terbayarnya gaji ASN,terwujudnya kegiatan perkatoran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | bulan | | | | | 12,00 | 7.486.046,163 | 6.175.723,02 | 12,00 | 5.695.280,64 | 100,00 | 76,08 | 92,22 | 12,00 | 5.695.281 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | terbayarnya gaji dan tunjangan asn | bulan | | | | | 12,00 | 3.823.137,075 | 2.924.488,52 | 12,00 | 2.589.544,52 | 100,00 | 67,73 | 88,55 | 12,00 | 2.589.545 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | bulan | | | | | 12,00 | 2.519.312,991 | 2.024.043,47 | 12,00 | 1.871.586,63 | 100,00 | 74,29 | 92,47 | 12,00 | 1.871.587 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Tunjangan Penghasilan Pegawai | bulan | | | | | 12,00 | 3.940.902,463 | 3.156.252,53 | 12,00 | 2.926.771,66 | 100,00 | 74,27 | 92,73 | 12,00 | 2.926.772 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | bulan | | | | | 12,00 | 4.529.037,130 | 3.607.268,18 | 12,00 | 3.161.692,94 | 100,00 | 69,81 | 87,65 | 12,00 | 3.161.693 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Aparatur Kecamatan Kindang | % | | | | | 100,00 | 2.079.155,420 | 1.670.330,51 | 55,16 | 1.517.245,43 | 55,16 | 72,97 | 90,84 | 55,16 | 1.517.245 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianyan biaya gaji dan Tunjangan ASN | bulan | | | | | 12,00 | 2.374.972,119 | 1.970.220,52 | 12,00 | 1.775.305,69 | 100,00 | 74,75 | 90,11 | 12,00 | 1.775.306 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terwujudnya administrasi Pemerintahan yang tertib | bulan | | | | | 12,00 | 2.997.999,750 | 2.318.245,63 | 12,00 | 2.236.251,70 | 100,00 | 74,59 | 96,46 | 12,00 | 2.236.252 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ASN Kecamatan Bontobahari | bulan | | | | | 12,00 | 4.246.880,541 | 3.422.919,57 | 12,00 | 2.855.848,33 | 100,00 | 67,25 | 83,43 | 12,00 | 2.855.848 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | bulan | | | | | 12,00 | 3.607.609,616 | 2.877.103,17 | 12,00 | 2.624.202,50 | 100,00 | 72,74 | 91,21 | 12,00 | 2.624.203 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianyan pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja | bulan | | | | | 12,00 | 59.220,000 | 45.590,00 | 12,00 | 45.590,00 | 100,00 | 76,98 | 100,00 | 12,00 | 45.590 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya jasa administrasi keuangan | bulan | | | | | 12,00 | 421.600,000 | 299.370,00 | 12,00 | 299.370,00 | 100,00 | 71,01 | 100,00 | 12,00 | 299.370 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kemasyarakat | bulan | | | | | 12,00 | 89.180,000 | 82.150,00 | 12,00 | 82.150,00 | 100,00 | 92,12 | 100,00 | 12,00 | 82.150 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | terlaksananya penatausahaan pengujian keuangan SKPD | bulan | | | | | 12,00 | 90.410,000 | 59.760,00 | 12,00 | 59.760,00 | 100,00 | 66,10 | 100,00 | 12,00 | 59.760 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | lancarnya Administrasi Keuangan | bulan | | | | | 12,00 | 311.280,000 | 307.170,00 | 12,00 | 306.937,50 | 100,00 | 98,60 | 99,92 | 12,00 | 306.938 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya jasa administrasi keuangan | bulan | | | | | 12,00 | 192.320,000 | 96.520,00 | 12,00 | 96.520,00 | 100,00 | 50,19 | 100,00 | 12,00 | 96.520 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya jasa administrasi keuangan | bulan | | | | | 12,00 | 173.490,000 | 126.490,00 | 12,00 | 126.490,00 | 100,00 | 72,91 | 100,00 | 12,00 | 126.490 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya jasa administrasi keuangan | % | | | | | 100,00 | 4.644,000 | 63.870,00 | 0,00 | 56.133,00 | 0,00 | 1208,72 | 87,89 | 0,00 | 56.133 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan pembayaran honorarium kegiatan keuangan dan tersedianya dokumen LPJ Keuangan | bulan | | | | | 12,00 | 180.750,000 | 113.640,00 | 12,00 | 112.080,00 | 100,00 | 62,01 | 98,63 | 12,00 | 112.080 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan pembayaran honorarium kegiatan keuangan dan tersedianya dokumen LPJ Keuangan | bulan | | | | | 12,00 | 4.848,000 | 4.848,00 | 12,00 | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersusunnya Laporan Akhir Tahun | dokumen | | | | | 1,00 | 4.932,000 | 3.105,00 | 1,00 | 3.105,00 | 100,00 | 62,96 | 100,00 | 1,00 | 3.105 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersusunnya laporan akhit tahun | dokumen | | | | | 1,00 | 862,500 | 862,40 | 0,99 | 784,00 | 99,00 | 90,90 | 90,91 | 0,99 | 784 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | bulan | | | | | 12,00 | 4.748,000 | - | 3,00 | - | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,02 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | bulan | | | | | 12,00 | - | 42.355,00 | 12,00 | 42.355,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 12,00 | 42.355 | 0,00 | 0,00 | |
| **7** | **1** | **1** | **2,03** | 0 | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Peningkatan administrasi umum pada kecamatan dan kelurahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2,03 | 7 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | bulan | | | | | 12,00 | 15.511,900 | 13.688,04 | 12,00 | 13.347,45 | 100,00 | 86,05 | 97,51 | 12,00 | 13.347 | 0,00 | 0,00 | |
| **7** | **1** | **1** | **2,06** | 0 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **terwujudnya kegiatan perkatoran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pemenuhan Kebutuhan Komponen Listrik / Penerangan kantor | bulan | | | | | 12,00 | 6.064,500 | 4.176,90 | 12,00 | 4.176,90 | 100,00 | 68,87 | 100,00 | 12,00 | 4.177 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | unit | | | | | 8,00 | 30.166,174 | 12.600,00 | 8,00 | 12.600,00 | 100,00 | 41,77 | 100,00 | 8,00 | 12.600 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya sarana dan prasarana kerja kantor | jenis | | | | | 3,00 | 23.000,000 | 28.422,02 | 3,00 | 28.422,02 | 100,00 | 123,57 | 100,00 | 3,00 | 28.422 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Perlengkapan Kantor | unit | | | | | 8,00 | 8.730,693 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Perlengkapan Kantor | unit | | | | | 8,00 | 10.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Perlengkapan Kantor | unit | | | | | 8,00 | 7.350,000 | 4.057,40 | 8,00 | 4.036,35 | 100,00 | 54,92 | 99,48 | 8,00 | 4.036 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | bulan | | | | | 12,00 | 27.020,900 | 2.015,00 | 12,00 | 2.015,00 | 100,00 | 7,46 | 100,00 | 12,00 | 2.015 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga | bulan | | | | | 12,00 | 7.070,803 | 1.231,30 | 12,00 | 1.231,20 | 100,00 | 17,41 | 99,99 | 12,00 | 1.231 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Alat Tulis kantor | bulan | | | | | 12,00 | 27.377,025 | 21.902,35 | 12,00 | 19.910,88 | 100,00 | 72,73 | 90,91 | 12,00 | 19.911 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan alat tulis kantor | bulan | | | | | 12,00 | 21.491,384 | 15.894,73 | 12,00 | 15.799,15 | 100,00 | 73,51 | 99,40 | 12,00 | 15.799 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedanya Bahan Logistik Kantor Kecamatan Ujung Bulu | bulan | | | | | 12,00 | 88.161,350 | 69.185,75 | 12,00 | 69.168,75 | 100,00 | 78,46 | 99,98 | 12,00 | 69.169 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | bulan | | | | | 12,00 | 70.332,089 | 40.376,25 | 12,00 | 40.375,89 | 100,00 | 57,41 | 100,00 | 12,00 | 40.376 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Makanan Minuman | bulan | | | | | 12,00 | 170.120,801 | 105.973,88 | 12,00 | 105.704,88 | 100,00 | 62,14 | 99,75 | 12,00 | 105.705 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor Kec.Kindang | bulan | | | | | 12,00 | 70.000,000 | 46.302,85 | 10,56 | 46.189,97 | 88,00 | 65,99 | 99,76 | 10,56 | 46.190 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya belanja ATK | bulan | | | | | 12,00 | 117.654,914 | 44.356,08 | 12,00 | 40.978,25 | 100,00 | 34,83 | 92,38 | 12,00 | 40.978 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | bulan | | | | | 12,00 | 16.881,630 | 18.537,03 | 12,00 | 17.938,05 | 100,00 | 106,26 | 96,77 | 12,00 | 17.938 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 4 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Pengadaan PeralatanGedung Kantor | kegiatan | | | | | 1,00 | 10.000,000 | 9.790,45 | 1,00 | 9.790,45 | 100,00 | 97,90 | 100,00 | 1,00 | 9.790 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Pengadaan PeralatanGedung Kantor | kegiatan | | | | | 1,00 | 162.202,128 | 165.388,85 | 1,00 | 134.481,00 | 100,00 | 82,91 | 81,31 | 1,00 | 134.481 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | tersedianya alat tulis kantor | bulan | | | | | 12,00 | 35.000,000 | 29.370,20 | 12,00 | 29.370,20 | 100,00 | 83,91 | 100,00 | 12,00 | 29.370 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | tersedianya barang cetakan dan penggandaan | bulan | | | | | 12,00 | 5.442,041 | 3.362,10 | 12,00 | 3.362,10 | 100,00 | 61,78 | 100,00 | 12,00 | 3.362 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | bulan | | | | | 12,00 | 6.000,000 | 6.001,27 | 12,00 | 5.981,00 | 100,00 | 99,68 | 99,66 | 12,00 | 5.981 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | bulan | | | | | 12,00 | 3.729,000 | 2.406,60 | 12,00 | 2.235,00 | 100,00 | 59,94 | 92,87 | 12,00 | 2.235 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya belanja penggandaan | bulan | | | | | 12,00 | 4.751,890 | 3.002,70 | 12,00 | 3.002,70 | 100,00 | 63,19 | 100,00 | 12,00 | 3.003 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaaan | bulan | | | | | 12,00 | 8.150,000 | 2.541,00 | 6,00 | 2.510,00 | 50,00 | 30,80 | 98,78 | 6,00 | 2.510 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | bulan | | | | | 12,00 | 13.804,336 | 11.044,18 | 12,00 | 11.037,10 | 100,00 | 79,95 | 99,94 | 12,00 | 11.037 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | bulan | | | | | 12,00 | 5.070,000 | 5.047,02 | 12,00 | 5.046,76 | 100,00 | 99,54 | 99,99 | 12,00 | 5.047 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | tersedianya belanja cetak dan penggandaan | bulan | | | | | 12,00 | 18.449,200 | 18.446,40 | 12,00 | 18.446,35 | 100,00 | 99,98 | 100,00 | 12,00 | 18.446 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang penggandaan | bulan | | | | | 12,00 | 4.142,478 | 2.217,16 | 12,00 | 1.442,77 | 100,00 | 34,83 | 65,07 | 12,00 | 1.443 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | bulan | | | | | 12,00 | 2.721,300 | 2.739,90 | 12,00 | 2.739,90 | 100,00 | 100,68 | 100,00 | 12,00 | 2.740 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianyan makan minum kantor | bulan | | | | | 12,00 | 37.200,000 | 26.261,00 | 12,00 | 25.830,00 | 100,00 | 69,44 | 98,36 | 12,00 | 25.830 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya Makanan dan Minuman | bulan | | | | | 12,00 | 60.888,260 | 60.285,01 | 12,00 | 60.151,52 | 100,00 | 98,79 | 99,78 | 12,00 | 60.152 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | tersedianya makanan dan munuman | bulan | | | | | 12,00 | 123.438,000 | 64.080,00 | 12,00 | 64.080,00 | 100,00 | 51,91 | 100,00 | 12,00 | 64.080 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya Makanan dan minuman | bulan | | | | | 12,00 | 54.538,000 | 31.374,00 | 12,00 | 30.534,00 | 100,00 | 55,99 | 97,32 | 12,00 | 30.534 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya Makanan dan Minuman | bulan | | | | | 12,00 | 51.019,000 | 25.032,00 | 12,00 | 25.032,00 | 100,00 | 49,06 | 100,00 | 12,00 | 25.032 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | tersedianya makanan dan minuman | bulan | | | | | 12,00 | 50.000,000 | 63.210,00 | 12,00 | 63.210,00 | 100,00 | 126,42 | 100,00 | 12,00 | 63.210 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | bulan | | | | | 12,00 | 96.704,000 | 99.794,00 | 12,00 | 99.394,40 | 100,00 | 102,78 | 99,60 | 12,00 | 99.394 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi | kali | | | | | 26,00 | 33.600,000 | 15.345,00 | 26,00 | 15.287,00 | 100,00 | 45,50 | 99,62 | 26,00 | 15.287 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan dan kelurahan | paket | | | | | 20,00 | 82.785,702 | 25.370,00 | 11,09 | 21.190,00 | 55,44 | 25,60 | 83,52 | 11,09 | 21.190 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | bulan | | | | | 12,00 | 90.469,000 | 70.883,00 | 12,00 | 67.960,58 | 100,00 | 75,12 | 95,88 | 12,00 | 67.961 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi | kali | | | | | 339,00 | 112.600,000 | 66.335,00 | 334,76 | 58.724,00 | 98,75 | 52,15 | 88,53 | 334,76 | 58.724 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | bulan | | | | | 12,00 | 124.445,000 | 121.962,00 | 12,00 | 106.412,31 | 100,00 | 85,51 | 87,25 | 12,00 | 106.412 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi | bulan | | | | | 12,00 | 100.478,000 | 63.765,00 | 12,00 | 55.481,81 | 100,00 | 55,22 | 87,01 | 12,00 | 55.482 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Teralaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan | bulan | | | | | 12,00 | 86.276,000 | 19.712,00 | 12,00 | 19.697,80 | 100,00 | 22,83 | 99,93 | 12,00 | 19.698 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | bulan | | | | | 12,00 | 181.383,000 | 142.287,00 | 12,00 | 142.287,00 | 100,00 | 78,45 | 100,00 | 12,00 | 142.287 | 0,00 | 0,00 | |
| **7** | **1** | **1** | **2,05** | 0 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2,05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | bulan | | | | | 12,00 | 25.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | bulan | | | | | 12,00 | - | - | 3,00 | - | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | bulan | | | | | 12,00 | 1.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Tersedianya Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | bulan | | | | | 12,00 | 22.125,000 | 22.125,00 | 12,00 | 17.000,00 | 100,00 | 0,00 | 76,84 | 12,00 | 17.000 | 0,00 | 0,00 | |
| **7** | **1** | **1** | **2,07** | 0 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **terwujudnya kegiatan perkatoran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya fasilitas kantor | unit | | | | | 1,00 | 42.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya fasilitas kantor | unit | | | | | 1,00 | 35.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya fasilitas kantor | unit | | | | | 1,00 | 25.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya fasilitas kantor | unit | | | | | 1,00 | 25.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya fasilitas kantor | unit | | | | | 1,00 | 1.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 5 | Pengadaan Mebel | Terlaksananya Pengadaan Mebeleur | kegiatan | | | | | 1,00 | 15.000,000 | 3.080,00 | 1,00 | 3.080,00 | 100,00 | 12,32 | 100,00 | 1,00 | 3.080 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 5 | Pengadaan Mebel | Peningkatan kinerja pimpinan | jenis | | | | | 8,00 | 10.000,000 | 2.200,00 | 8,00 | 2.200,00 | 100,00 | 22,00 | 100,00 | 8,00 | 2.200 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 5 | Pengadaan Mebel | Tersedianya mebeleur | unit | | | | | 9,00 | 28.316,999 | 440,00 | 9,00 | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 5 | Pengadaan Mebel | Tersedianya pengadaan mebel | bulan | | | | | 12,00 | 16.765,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 5 | Pengadaan Mebel | Tersedianya pengadaan mebel | bulan | | | | | 12,00 | 9.273,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 5 | Pengadaan Mebel | Terciptanya kenyamanan kerja | buah | | | | | 4,00 | 23.329,500 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 5 | Pengadaan Mebel | Terciptanya kenyamanan kerja | buah | | | | | 4,00 | 10.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 5 | Pengadaan Mebel | tersedianya peralatan kantor | bulan | | | | | 12 | 25.000,000 | 68.370,00 | 12,00 | 56.670,00 | 100,00 | 80,96 | 82,89 | 12,00 | 56.670 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya peralatan kantor | Unit | | | | | 10 | 70.000,000 | 27.481,55 | 10,00 | 27.481,55 | 100,00 | 34,79 | 100,00 | 10,00 | 27.482 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya peralatan kantor | unit | | | | | 4,00 | 26.799,081 | 11.446,99 | 4,00 | 11.446,99 | 100,00 | 42,71 | 100,00 | 4,00 | 11.447 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | bulan | | | | | 12,00 | 64.225,136 | 181.322,80 | 12,00 | 180.885,85 | 100,00 | 281,64 | 99,76 | 12,00 | 180.886 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terciptanya kenyamanan kerja | unit | | | | | 13,00 | 40.000,000 | 8.094,74 | 13,00 | 8.094,74 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 13,00 | 8.095 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | unit | | | | | 5,00 | 48.000,000 | 46.815,01 | 3,45 | 33.214,20 | 68,95 | 69,20 | 70,95 | 3,45 | 33.214 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | unit | | | | | 5,00 | 10.500,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | unit | | | | | 5,00 | 3.080,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | unit | | | | | 5,00 | 25.244,790 | 16.045,26 | 5,00 | 15.280,93 | 100,00 | 60,53 | 95,24 | 5,00 | 15.281 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | terlaksananya saran dan prasarana gedung kantor lainnya | bulan | | | | | 12,00 | 20.000,000 | 11.446,99 | 12,00 | 10.000,00 | 100,00 | 50,00 | 87,36 | 12,00 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya peralatan rumah tangga | bulan | | | | | 12,00 | 25.000,000 | 16.189,47 | 12,00 | 16.150,00 | 100,00 | 0,00 | 99,76 | 12,00 | 16.150 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya peralatan kantor | Unit | | | | | 10 | 79.000,000 | 40.850,00 | 10,00 | 40.850,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 10,00 | 40.850 | 0,00 | 0,00 | |
| **7** | **1** | **1** | **2,08** | 0 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **terwujudnya kegiatan perkatoran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran | bulan | | | | | 12,00 | 6.000,000 | 3.580,00 | 12,00 | 3.580,00 | 100,00 | 59,67 | 100,00 | 12,00 | 3.580 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | bulan | | | | | 12,00 | 97.308,379 | 95.022,80 | 12,00 | 92.115,69 | 100,00 | 94,66 | 96,94 | 12,00 | 92.116 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianyan jasa komunikasi, sumbaer daya air dan listrik | bulan | | | | | 12,00 | 22.346,872 | 22.306,87 | 12,00 | 19.417,01 | 100,00 | 86,89 | 87,04 | 12,00 | 19.417 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | bulan | | | | | 12,00 | 35.058,864 | 36.431,48 | 12,00 | 28.590,95 | 100,00 | 81,55 | 78,48 | 12,00 | 28.591 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianyan jasa komunikasi, sumbaer daya air dan listrik | bulan | | | | | 12,00 | 10.330,200 | 9.477,18 | 12,00 | 7.923,26 | 100,00 | 9,17 | 83,60 | 12,00 | 7.923 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja | unit | | | | | 4,00 | 3.820,000 | 2.720,00 | 4,00 | 2.720,00 | 100,00 | 71,20 | 100,00 | 4,00 | 2.720 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianyan jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata | bulan | | | | | 12,00 | 86.400,000 | 64.500,00 | 12,00 | 64.500,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 12,00 | 64.500 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa kebersihan | bulan | | | | | 12,00 | 179.800,000 | 130.800,00 | 12,00 | 118.800,00 | 100,00 | 66,07 | 90,83 | 12,00 | 118.800 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianyan jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata | bulan | | | | | 12,00 | 5.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianyan jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata | bulan | | | | | 12,00 | 113.340,000 | 102.000,00 | 12,00 | 102.000,00 | 100,00 | 89,99 | 100,00 | 12,00 | 102.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | bulan | | | | | 12,00 | 482.400,000 | 244.800,00 | 12,00 | 244.500,00 | 100,00 | 50,68 | 99,88 | 12,00 | 244.500 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia | unit | | | | | 8,00 | 23.459,541 | 3.850,00 | 8,00 | 3.850,00 | 100,00 | 16,41 | 100,00 | 8,00 | 3.850 | 0,00 | 0,00 | |
| **7** | **1** | **1** | **2,08** | 0 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Peningkatan administrasi umum pada kecamatan dan kelurahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | bulan | | | | | 12,00 | 33.613,620 | 13.749,84 | 12,00 | 13.484,21 | 100,00 | 40,12 | 98,07 | 12,00 | 13.484 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | bulan | | | | | 12,00 | 14.338,584 | 14.337,96 | 12,00 | 10.890,44 | 100,00 | 75,95 | 75,96 | 12,00 | 10.890 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | bulan | | | | | 12,00 | 6.241,728 | 5.745,00 | 12,00 | 4.625,80 | 100,00 | 74,11 | 80,52 | 12,00 | 4.626 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Struk/Bukti Pembayaran Rekening Listrik | kali | | | | | 12,00 | 35.482,284 | 35.182,28 | 12,00 | 30.661,16 | 100,00 | 23,99 | 87,15 | 12,00 | 30.661 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | bulan | | | | | 12,00 | 20.313,396 | 17.245,66 | 12,00 | 16.510,56 | 100,00 | 81,28 | 95,74 | 12,00 | 16.511 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | bulan | | | | | 12 | 18.000,000 | 15.063,29 | 12,00 | 4.253,26 | 100,00 | 11,81 | 28,24 | 12,00 | 4.253 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Lancarnya tugas pelayanan masyarakat | bulan | | | | | 12,00 | 2.250,000 | 2.250,00 | 12,00 | 2.250,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 12,00 | 2.250 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlaksananya Jasa kebersihan | kali | | | | | 12,00 | 127.800,000 | 150.000,00 | 12,00 | 150.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 12,00 | 150.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | tersedianya jasa kebersihan kantor | bulan | | | | | 12 | 36.000,000 | 36.000,00 | 12,00 | 36.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 12,00 | 36.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa kebersihan | bulan | | | | | 12,00 | 139.200,000 | 91.200,00 | 12,00 | 91.200,00 | 100,00 | 65,52 | 100,00 | 12,00 | 91.200 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa kebersihan | bulan | | | | | 12,00 | 74.196,000 | 47.400,00 | 12,00 | 47.400,00 | 100,00 | 63,88 | 100,00 | 12,00 | 47.400 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa Kebersihan kantor | bulan | | | | | 12,00 | 30.000,000 | 22.500,00 | 12,00 | 22.500,00 | 100,00 | 75,00 | 100,00 | 12,00 | 22.500 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | bulan | | | | | 12,00 | 24.420,000 | 18.000,00 | 12,00 | 18.000,00 | 100,00 | 73,71 | 100,00 | 12,00 | 18.000 | 0,00 | 0,00 | |
| **7** | **1** | **1** | **2,09** | 0 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **terwujudnya kegiatan perkatoran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | lancarnya kegiatan operasional | bulan | | | | | 12,00 | 28.998,760 | 15.745,80 | 12,00 | 13.856,57 | 100,00 | 47,78 | 88,00 | 12,00 | 13.857 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanyan kendaraan dinas mobil jabatan | unit | | | | | 1,00 | 20.256,033 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanyan kendaraan dinas mobil jabatan | unit | | | | | 1,00 | 10.500,000 | 7.678,60 | 0,99 | 5.951,63 | 99,00 | 56,68 | 77,51 | 0,99 | 5.952 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional,Terawatnya kendaraan dinas kecamatan dan kelengkapan STNK | unit | | | | | 4,00 | 6.600,000 | 600,00 | 3,90 | 489,87 | 97,50 | 7,42 | 81,65 | 3,90 | 490 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | unit | | | | | 2,00 | 1.500,000 | 1.250,00 | 2,00 | 1.104,45 | 100,00 | 73,63 | 88,36 | 2,00 | 1.104 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya perizinan dan terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasinal,Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | paket | | | | | 1,00 | 12.189,860 | 12.181,76 | 1,00 | 10.752,69 | 100,00 | 88,21 | 88,27 | 1,00 | 10.753 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Perizinan dan terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional | unit | | | | | 2,00 | 15.365,760 | 6.854,34 | 1,99 | 6.143,54 | 99,50 | 39,98 | 89,63 | 1,99 | 6.144 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Perizinan dan terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional,Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | paket | | | | | 1,00 | 20.000,000 | 9.334,17 | 0,58 | 9.125,39 | 57,71 | 45,63 | 97,76 | 0,58 | 9.125 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional,Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional | unit | | | | | 8,00 | - | 6.268,52 | 8,00 | 5.411,27 | 100,00 | 0,00 | 86,32 | 8,00 | 5.411 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Perizinan dan terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional,Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | unit | | | | | 7,00 | 23.445,760 | 11.858,26 | 6,99 | 11.760,55 | 99,86 | 50,16 | 99,18 | 6,99 | 11.761 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Bukti pembayaran pajak STNK Mobil, Motor dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan | kali | | | | | 1,00 | 12.287,000 | 5.100,00 | 0,90 | 4.301,32 | 90,00 | 35,01 | 84,34 | 0,90 | 4.301 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional,Tersedianya perizinan dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | paket | | | | | 1 | 30.000,000 | 25.261,60 | 1,00 | 25.261,60 | 100,00 | 84,21 | 100,00 | 1,00 | 25.262 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang tersedia Sesuai Kebutuhan | Unit | | | | | 32,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang tersedia Sesuai Kebutuhan | Unit | | | | | 32,00 | 40.450,000 | - | 3,00 | - | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor | bulan | | | | | 12 | 11.372,000 | 1.555,05 | 12,00 | 1.555,05 | 100,00 | 13,67 | 100,00 | 12,00 | 1.555 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | tersedianya pemeliharaan rutin peralatan kantor | bulan | | | | | 12 | 10.000,000 | 8.160,00 | 12,00 | 8.160,00 | 100,00 | 81,60 | 100,00 | 12,00 | 8.160 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja | unit | | | | | 15,00 | 4.990,000 | 2.840,00 | 15,00 | 2.840,00 | 100,00 | 56,91 | 100,00 | 15,00 | 2.840 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor | jenis | | | | | 10,00 | 3.760,000 | 2.030,00 | 10,00 | 2.030,00 | 100,00 | 53,99 | 100,00 | 10,00 | 2.030 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya jasa pihak ketiga | bulan | | | | | 12,00 | 35.259,000 | 15.340,00 | 12,00 | 15.340,00 | 100,00 | 43,51 | 100,00 | 12,00 | 15.340 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor | unit | | | | | 4,00 | 6.780,000 | 4.060,00 | 3,74 | 3.800,00 | 93,60 | 56,05 | 93,60 | 3,74 | 3.800 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor | bulan | | | | | 12 | 20.393,385 | 133.802,35 | 12,00 | 133.577,00 | 100,00 | 655,00 | 99,83 | 12,00 | 133.577 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | tersedianya pemeliharaan Ged. Kantor | bulan | | | | | 12 | 20.000,000 | 15.750,00 | 12,00 | 12.450,00 | 100,00 | 62,25 | 79,05 | 12,00 | 12.450 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | unit | | | | | 1,00 | 12.092,000 | 6.667,00 | 1,00 | 6.667,00 | 100,00 | 55,14 | 100,00 | 1,00 | 6.667 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya sarana perkantoran | kali | | | | | 1,00 | 14.000,000 | 1.615,00 | 1,00 | 1.615,00 | 100,00 | 11,54 | 100,00 | 1,00 | 1.615 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor lainnya | bulan | | | | | 12,00 | 30.000,000 | - | 3,00 | - | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor lainnya | bulan | | | | | 12,00 | 8.100,000 | 8.040,00 | 13,80 | 8.040,00 | 115,00 | 99,26 | 100,00 | 13,80 | 8.040 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | unit | | | | | 4,00 | 15.080,375 | 10.150,00 | 4,00 | 10.150,00 | 100,00 | 67,31 | 100,00 | 4,00 | 10.150 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | unit | | | | | 8,00 | 6.240,000 | 1.380,00 | 8,00 | 1.380,00 | 100,00 | 22,12 | 100,00 | 8,00 | 1.380 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 1 | 2,09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | bulan | | | | | 12,00 | 16.577,000 | 459.052,00 | 12,00 | 456.841,76 | 100,00 | 2755,88 | 99,52 | 12,00 | 456.842 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **98,85** | **95,08** | **93,78** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| **7** | **1** | **3** | **0** | 0 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **1** | **3** | **2,02** | 0 | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **persentase ketersediaan sarana dan prasarana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2,02 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan | bulan | | | | | 12,00 | 45.000,000 | 15.994,18 | 19,80 | 15.994,18 | 165,00 | 35,54 | 100,00 | 19,80 | 15.994 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 3 | 2,02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terlaksananya pembangunan saran dan prasarana lingkungan pemukiman , transportasi, kesehatan dan pendidikan | bulan | | | | | 12,00 | 569.621,000 | 569.621,00 | 12,00 | 202.088,00 | 100,00 | 35,48 | 35,48 | 12,00 | 202.088 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 3 | 2,02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Tersedianya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman | bulan | | | | | 12,00 | 6.228.871,380 | 4.640.181,00 | 12,00 | 4.640.174,90 | 100,00 | 74,49 | 100,00 | 12,00 | 4.640.175 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 3 | 2,02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasaranan Kelurahan | paket | | | | | 18,00 | 1.681.566,600 | 1.681.538,92 | 18,00 | 1.681.538,92 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 18,00 | 1.681.539 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 3 | 2,02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | bertambahnya bangunan sarana dan prasarana kelurahan | paket | | | | | 6,00 | 542.746,000 | 467.746,00 | 5,97 | 465.121,00 | 99,44 | 85,70 | 99,44 | 5,97 | 465.121 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 3 | 2,02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Bertambahnya bangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | paket | | | | | 16,00 | 1.879.570,500 | 1.774.916,90 | 15,47 | 1.671.069,83 | 96,67 | 88,91 | 94,15 | 15,47 | 1.671.070 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 3 | 2,02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Bertambahnya bangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | paket | | | | | 6,00 | 642.746,000 | 576.480,00 | 4,20 | 576.480,00 | 70,00 | 89,69 | 100,00 | 4,20 | 576.480 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 3 | 2,02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana transportasi, pemukiman dan pelayanan kesehatan di Kelurahan | bulan | | | | | 12,00 | 1.286.492,000 | 1.286.468,00 | 12,00 | 1.286.468,00 | 100,00 | 408,40 | 100,00 | 12,00 | 1.286.468 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 3 | 2,02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | % | | | | | 100,00 | 512.746,000 | 452.746,00 | 100,00 | 452.746,00 | 100,00 | 157,20 | 100,00 | 100,00 | 452.746 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 3 | 2,02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana lingkungan pemukiman , Transportasi, Kesehatan dan Pendidikan Kebudyaan | paket | | | | | 12,00 | 2.583.984,000 | 2.191.020,00 | 11,25 | 1.975.200,00 | 93,75 | 319,10 | 90,15 | 11,25 | 1.975.200 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 3 | 2,02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | bertambahnya bangunan sarana dan prasarana | paket | | | | | 4,00 | 1.326.995,161 | 1.175.127,25 | 4,00 | 1.175.127,25 | 100,00 | 2350,25 | 100,00 | 4,00 | 1.175.127 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 3 | 2,02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | terlaksananya pemberdayaan masyarakat | paket | | | | | 5,00 | 50.000,000 | 50.000,00 | 5,00 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 5,00 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 3 | 2,02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan, Pelatihan pendidkkan, Kesehatan, kelembagaan, pengelolaan kegiatan Masyarakat di Kelurahan | paket | | | | | 12,00 | 619.000,000 | 857.480,00 | 11,00 | 769.480,00 | 91,67 | 0,00 | 89,74 | 11,00 | 769.480 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 3 | 2,02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | paket | | | | | 1,00 | 288.000,000 | 348.000,00 | 1,00 | 348.000,00 | 100,00 | 120,83 | 100,00 | 1,00 | 348.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 3 | 2,02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kemasyarakat | bulan | | | | | 12,00 | 315.000,000 | 315.000,00 | 12,00 | 309.500,00 | 100,00 | 0,00 | 98,25 | 12,00 | 309.500 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 3 | 2,02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | bulan | | | | | 12,00 | 150.000,000 | 224.265,43 | 9,00 | 119.326,75 | 75,00 | 0,00 | 53,21 | 9,00 | 119.327 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 3 | 2,02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Bertambahnya bangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | bulan | | | | | 12,00 | 522.667,500 | 627.321,10 | 12,00 | 618.366,10 | 100,00 | 118,31 | 98,57 | 12,00 | 618.366 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 3 | 2,02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan | paket | | | | | 6,00 | 258.000,000 | 333.000,00 | 5,15 | 285.750,00 | 85,81 | 110,76 | 85,81 | 5,15 | 285.750 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 3 | 2,02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan | paket | | | | | 19,00 | 720.671,400 | 720.684,50 | 19,00 | 720.653,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 19,00 | 720.654 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | RKPD Rp (000) | APBD Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 7 | 1 | 3 | 2,02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terlaksananya kegiatan pelayanan keehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan dan terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah | bulan | | | | | 12,00 | 231.125,000 | 231.173,44 | 9,36 | 173.196,39 | 78,00 | 74,94 | 74,92 | 9,36 | 173.196 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 1 | 3 | 2,02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Tersedianya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman | bulan | | | | | 12,00 | 2.129.148,000 | 2.620.033,00 | 12,00 | 2.619.283,00 | 100,00 | 123,02 | 99,97 | 12,00 | 2.619.283 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **97,87** | **209,17** | **91,41** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 8 | 01 | **2** | **0.00** | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | kali | | | | | 5,00 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | **2** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Penanganan Covid 19** | bulan | | | | | 12,00 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | 2 | 2.01 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Tercapainya koordinasi desa ke kecamatan | kali | | | | | 2,00 | 21.500,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 2 | 2.01 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Tercapainya koordinasi desa ke kecamatan | kali | | | | | 2,00 | 1.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 2 | 2.01 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Tercapainya koordinasi desa ke kecamatan | kali | | | | | 2,00 | 8.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **SR** | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **66.982.405,71** | **56.740.293,21** | | **52.646.249,012** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)** | **98,36** | **152,13** | **92,60** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| **8** | **0.0.0** | **0** | **0.00** | | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | **2** | **0.00** | | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **Persentase Kegiatan Penyuluhan, Seminar Dan Sosialisasi** | kali | | | | | 5,00 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | **2** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan** | bulan | | | | | 12,00 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | 2 | 2.01 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 100.000,000 | 34.195,00 | 12,00 | 32.439,00 | 100,00 | 32,44 | 94,86 | 12,00 | 32.439 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **32,44** | **94,86** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 8 | 01 | **3** | **0.00** | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | **3** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | 3 | 2.01 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | laporan | | | | | 12,00 | 250.000,000 | 89.598,00 | 12,00 | 14.598,00 | 100,00 | 5,84 | 16,29 | 12,00 | 14.598 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **5,84** | **16,29** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| 8 | 01 | **3** | **0.00** | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat dan jumlah Desk Pemilu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 8 | 01 | **3** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** | **Meningkatnya Pengetahuan tentang Peraturan Perundang-undangan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terpenuhinya syarat administrasi pengajuan bantuan keuangan ke** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | 3 | 2.01 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Meningkatnya Pengetahuan tentang Peraturan Perundang-undangan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terpenuhinya syarat administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik, | bulan | | | | | 12,00 | 1.030.000,000 | 989.278,84 | 12,00 | 989.278,84 | 100,00 | 96,05 | 100,00 | 12,00 | 989.279 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **96,05** | **100,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **ST** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 8 | 01 | **5** | **0.00** | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **Indeks Kerukunan Umat Beragama Dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi** | % | 0,00 | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | **5** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah** | bulan | 0,00 | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | 5 | 2.01 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Penyusunan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 270.000,000 | 133.463,50 | 12,00 | 133.215,50 | 100,00 | 49,34 | 99,81 | 12,00 | 133.216 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **100,00** | **49,34** | **99,81** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **ST** | **SR** | **ST** | | | **SR** | **SR** | |
| 8 | 01 | **6** | **0.00** | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah** | **%** | | | | | **66.36** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | **6** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | **Terlaksananya Koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah** | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | 6 | 2.01 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 185.000,000 | - | 3,00 | - | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | - | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 8 | 01 | 6 | 2.01 | 5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 15.000,000 | 136.276,00 | 12,00 | 129.818,00 | 100,00 | 865,45 | 95,26 | 12,00 | 129.818 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **62,50** | **432,73** | **47,63** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **R** | **ST** | **SR** | | | **SR** | **SR** | |
| 8 | 01 | **1** | **0.00** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Kesbangpol)** | **%** | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 30.000,000 | 9.528,11 | 2,00 | 9.464,11 | 100,00 | 157,74 | 99,33 | 2,00 | 9.464 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | dokumen | | | | | 1,00 | 6.000,000 | 2.617,00 | 1,00 | 2.617,00 | 100,00 | 43,62 | 100,00 | 1,00 | 2.617 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.01 | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 6.000,000 | 2.333,87 | 1,00 | 2.333,87 | 100,00 | 38,90 | 100,00 | 1,00 | 2.334 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 6.000,000 | 2.311,21 | 1,00 | 2.311,21 | 100,00 | 38,52 | 100,00 | 1,00 | 2.311 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 6.000,000 | 2.333,87 | 1,00 | 2.333,87 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1,00 | 2.334 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 6.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.01 | 5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun | dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 6.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Jasa Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, laporan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran SKPD** | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | laporan | 0,00 | - | 0,00 | - | 14,00 | 1.319.011,318 | 1.763.711,86 | 14,00 | 1.364.321,28 | 100,00 | 103,44 | 77,36 | 14,00 | 1.364.321 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana | bulan | | | | | 12,00 | 47.000,000 | 46.380,00 | 12,00 | 46.380,00 | 100,00 | 98,68 | 100,00 | 12,00 | 46.380 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | laporan | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 15.000,000 | 6.704,00 | 0,99 | 6.622,00 | 99,00 | 44,15 | 98,78 | 0,99 | 6.622 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | laporan | | | | | 18,00 | 25.000,000 | 5.247,00 | 18,00 | 4.906,00 | 100,00 | 19,62 | 93,50 | 18,00 | 4.906 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | **1** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Tersedianya Jasa Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD** | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | 1 | 2.03 | 6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 12.500,000 | 8.823,00 | 12,12 | 8.823,00 | 101,00 | 70,58 | 100,00 | 12,12 | 8.823 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Tersedianya Jasa serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Administrasi Umum** | bulan | | | | | 12,00 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jenis | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 2.500,000 | 1.760,00 | 1,00 | 1.760,00 | 100,00 | 70,40 | 100,00 | 1,00 | 1.760 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan | jenis | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 2.500,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga | jenis | | | | | 12,00 | 2.500,000 | 2.496,23 | 12,00 | 2.496,23 | 100,00 | 99,85 | 100,00 | 12,00 | 2.496 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor | jenis | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 36.951,580 | 26.978,11 | 12,00 | 26.978,11 | 100,00 | 73,01 | 100,00 | 12,00 | 26.978 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.06 | 8 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan | jenis | | | | | 12,00 | 9.677,030 | 9.671,53 | 12,00 | 9.671,53 | 100,00 | 99,94 | 100,00 | 12,00 | 9.672 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.06 | 9 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu | jenis | | | | | 12,00 | 15.700,000 | 13.226,90 | 12,00 | 13.196,90 | 100,00 | 84,06 | 99,77 | 12,00 | 13.197 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%) | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | K | RKPD | APBD | | | K | RKPD | APBD | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | | Rp (000) | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | |
| 8 | 01 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Perjalanan Dinas | kali | | | | | 12,00 | 247.088,000 | 98.158,00 | 11,88 | 98.004,25 | 99,00 | 39,66 | 99,84 | 11,88 | 98.004 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **%** | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | 1 | 2.07 | 2 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 50.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 6,00 | 5.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.07 | 1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 2,00 | 15.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.07 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 15.000,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | % | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | bulan | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 23.290,250 | 23.289,52 | 9,60 | 16.352,69 | 80,00 | 70,21 | 70,21 | 9,60 | 16.353 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Dokumen Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor | Dokumen | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 73.260,000 | 67.800,00 | 12,00 | 67.800,00 | 100,00 | 92,55 | 100,00 | 12,00 | 67.800 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | % | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Roda 2 Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Roda 4 | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 1.500,000 | 19.105,63 | 3,00 | 18.707,34 | 100,00 | 1247,16 | 97,92 | 3,00 | 18.707 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.09 | 6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Ketersediaan Kendaraan Jabatan/dinas Dalam Kondisi Baik | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 3,00 | 30.500,000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin yang baik | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 10,00 | 7.500,000 | 5.890,00 | 10,00 | 5.890,00 | 100,00 | 78,53 | 100,00 | 10,00 | 5.890 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Ketersediaan Gedung Kantor/asrama Dalam Kondisi Baik | unit | 0,00 | - | 0,00 | - | 1,00 | 10.000,000 | 4.940,00 | 1,00 | 4.890,00 | 100,00 | 48,90 | 98,99 | 1,00 | 4.890 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | **83,16** | **104,78** | **81,43** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | **T** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN** | **3.882.478,18** | **3.506.117,17** | | **3.015.208,714** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)** | **90,94** | **120,20** | **73,34** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)** | **T** | **ST** | **S** | | | **SR** | **SR** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM SEMUA URUSAN** | **1.820.914.652** | **1.581.030.806** | | **1.344.166.003** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 162)** | **89,51** | **326,746** | **83,85** | | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 162)** | **T** | **ST** | **T** | | | **SR** | **SR** | |

## 2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah

### 2.5.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan daerah muncul dari adanya celah/gap antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan. Celah tersebut juga dapat muncul antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum termanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi baik yang dipengaruhi lingkungan internal maupun lingkungan eksternal pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba.

Masih terdapat sejumlah permasalahan pembangunan mendasar yang dihadapi Kabupaten Bulukumba sampai saat ini, yaitu sebagai berikut:

1. Melambatnya Pertumbuhan ekonomi
2. Belum optimalnya Sistem kesehatan daerah
3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
4. Masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat
5. Belum optimalnya SDM berkualitas dan berdaya saing
6. Masih rendahnya nilai tambah komoditas unggulan
7. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi

Untuk itu, identifikasi permasalahan pembangunan daerah kabupaten Bulukumba dibagi dalam 2 cakupan permasalahan, yaitu identifikasi permasalahan pembangunan yang berdampak pada sasaran pembangunan daerah untuk penentuan prioritas daerah dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaran urusan pemerintah daerah untuk penentuan prioritas masing-masing urusan.

### 2.5.2 Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah)

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunanyang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiapPerangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadimasalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yangditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah haruskonsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkatdaerah pada Renja Perangkat Daerah.

#### 2.5.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

**1. Pendidikan**

a. Belum Optimalnya Penduduk Usia 6 – 15 tahun yang termasuk dalam usia penduduk yang berpartisifasi dalam Pendidikan ( SPM )
b. Belum optimalnya pencapaian peningkatan angka melek huruf
c. Belum Optimalnya Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sekolah Jenjang PAUD /Kesteraan dan Pendidikan Dasar
d. Belum Optimalnya Pemenuhan kuantitas dan kualitas Tenaga Pendidik

**2. Kesehatan**

a. Masih tingginya presenatse balita gizi buruk .
b. Masih tingginya prevalensi angka stunting.
c. Masih rendahnya rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.
d. Masih rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
e. Masih rendahnya Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh.

f. Masih rendahnya cakupan penanganan prevalensi HIV AIDS

**3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

a. Masih rendahnya proporsi jaringan jalan dengan kondisi baik (PUTR)
b. Masih rendahnya persentase jalan yang memiliki talud/drainase saluran pembuangan air (PUTR)
c. Belum tersedianya data base talud/drainase (PUTR)
d. Masih rendahnya progres revisi RTRW Kabupaten Bulukumba serta masih terbatasnya rencana rinci tata ruang dengan rencana pembangunan daerah (PUTR)
e. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan jaringan irigasi dilaksakan setelah masa panen (PSDA)
f. Peningkatan maupun penurunan persentase irigasi dalam kondisi baik sangant dipengaruhi oleh tingkta kerusakan yang biasanya akibat longsor/bencana alam dan tingginya curah hujan (PSDA)
g. Persentase irigasi dalam kondisi baik juga dapat meningkat karena pengerjaan pembenahan jaringan irigasi maupun kegiatan peningkatan jaringan irigasi (PSDA)
h. Pelaksaaan kegiatan dalam rangka penigkatan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sangat ditunjang oleh ketersediaan anggaran (PSDA)

**4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

a. Masih rendahnya kawasan kumuh dan permukiman kumuh yang tertata
b. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat miskin dan keterbatasan akses pembiayaan.
c. Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman
d. Belum terpenuhinya air minum dan sanitasi layak.

**5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

a. Cakupan petugas perlindaungan masyarakat masih kurang
b. Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum
c. Cakupan pelayanan bencana kebakaran terkait sarana prasarana masih belum memadai
d. Perlu penambahan armada mobil pemadam kebakaran untuk memaksimalkan pelayanan waktu tanggap (response time rate)
e. Masih minimnya petugas penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan fasilitas pendukiung lainnya.

**6. Sosial**

a. Masih rendahnya sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang dikelolah pemerintah Daerah
b. Masih rendahnya program mitigasi bencana bagi masyarakat
c. Minimnya PMKS yang menerima program pemberdayaan Sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
d. Jumlah jenis PMKS yang tidak didukung dengan data yang valid dan akurat serta masih terbatasnya jumlah pekerja sosial professional dalam penanganan disabilitas dan lansia.

#### 2.5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

**1. Tenaga Kerja**

a. Lapangan pekerjaan semakin terbatas
b. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka
c. Rendahnya tingkat pendidikan
d. Terbatasnya alokasi anggaran program dan kegiatan
e. Rendahnya kompetensi pencari kerja
f. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur

**2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

a. Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih rendah.
b. Masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

c. masih rendahnya cakupan layanan kesehatan korban kekerasan anak dan perempuan.
d. Kurangnya tenaga psikiater yang menangani trauma korban kekerasan anak dan perempuan.
e. Tidak adanya kontribusi yang diberikan perempuan dalam pekerjaan non pertanian.

**3. Pangan**

a. Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat / Kelompok Tani dan pemenuhan kebutuhan dari budidaya pangan lokal.
b. Kelembagaan usaha pangan masyarakat tidak berjalan dengan maksimal
c. Rendahnya peran serta masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
d. Kurangnya ketersediaan dan cadangan pangan serta infrastruktur pendukung kemandirian pangaan

**4. Pertanahan**

a. Masih minimnya penyelesaian kasus negara
b. Belum optimalnya proses pengadaan tanah karena masih rendahnya dukungan perencanaan pembangunan infastruktur yang membutuhkan pengadaan lahan

**5. Lingkungan Hidup**

a. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah ,Sarana -Prasarana PPLHD dan PPNS belnm ada dikabupaten/Kota sehingga Pelaksanaan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan ,izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan tidak terlaksana dengan baik
b. Kurangnya Tenaga Polisi kehutanan untuk pengamana Tahura Bontobahari sehingga Lokasi Tahura Bonto Bahari banyak diklain oleh Masyarakat Bonto Bahari.
c. Permasalahan dal am mengurangi dan menangani persampahan :
- SDM Pengelola belum memenuhi Standar
- Armada Pengangkutan Persampahan sudah banyak yang tidak layak pakai
- Prilaku dan Paitisipasi Masyarakat Masih rendah

d. Dimensi Cell landfill TPA Bulukumba seluas 16.208 M2 dengan kapasitas 577.512 M3 atau 190.579 ton dan diperkirakan dapat melayani kota Bulukumba sampai dengan jangka waku _+ 6 Tahun. Dimana saat ini TPA Bulukumba sudah beroperasi selama 6 tahun lebih dan total volume sampah yang masuk ke TPA sudah mencapai 109.540 ton. Sehingga luas cell landfill hanya dapat menampung sekitar 81.039 ton lagi. (kota Bulukumba sudah darurat sampah)
e. Tidak adanya alat berat (Buldozer) untuk memadatkan sampah pada cell landfill
f. Lahan untuk penempatan TPS/container yang tidak ada sehingga selama ini hanya memakai lahan kosong/milik masyarakat
g. Tidak ada container yang tetap di TPST untuk dipakai setelah memilah sampah
h. Kurangnya alat dan prasarana alah pengolahan sampah di TPST
i. Kurangnya sarana dan prasarana Laboratorium yang mendukung kineija dal am rangka pemantauan kualitas air sungai dan air limbah di Kabupaten Bulukumba. Sarana dan prasarana utama yang seharusnya tersedia adalah Atomic Absorbtion Spektrofotometer (AAS), Ultra-Violet Visible (UV-Vis), peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), peralatan sampling, termasuk peralatan kualitas udara ambien dan emisi
j. Belum tersedianya sarana Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)
k. Instalasi ruang asam tidak berfungsi dengan baik
l. Masih kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) personil UPT Laboratorium

**6. Administrasi Kependudukan dan PencatatanSipil**

a. Kualitas jaringan perekaman biometrik KTP-el yang tidak stabil
b. Ketersediaan blangko KTP-el juga tidak memadai
c. Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk mengurus KTP-el masih rendah.
d. Belum seluruhnya masyarakat memiliki adminduk

**7. Pemberdayaan Masyarakat danDesa**

a. Masih rendahnya cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa.

b. Belum optimalnya lembaga pemberdayaan masyarakat guna menunjang program pemerintah desa.
c. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa.

**8. Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana**

a. Rendahnya keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
b. Masih rendahnya SDM kader dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
c. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan tribina di tingkat desa.
d. Belum maksimalnya pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi penguatan ketahanan keluarga balita, remaja, lansia dan peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga.

**9. Perhubungan**

a. Alat kir sudah tidak beroperasi karena mengalami kerusakan dan diberlakukannya KIR electronik
b. Menurunnya arus penumpang karena banyaknya kendaraan umum yang rusak
c. Masih kurangnya rambu-rambu di kabupaten Bulukumba
d. Masih kurangnya pengawasan sehingga izin trayek semakin berkurang dari tahun ketahun

**10. Komunikasi dan Informatika**

a. Perjanjian kerja sama penyelesaian permasalahan pelayanan publik di kabupaten Bulukumba
b. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral
c. Perlunya peningkatan optimalisasi peran keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi
d. Perlunya peningkatan upaya mewujudkan single data penguatan pengelolaan data statistik sektoral
e. Rendahnya kesadaran dan sistem keamanan informasi berdasarka hasil assessment.

**11. Koperasi danUKM**

a. Para pengelola Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) belum profesional dan akuntabel dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha;
b. Kemampuan dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran masih sangat rendah
c. Fungsi kelembagaan dan infrastruktur Koperasi dan UMKM belum optimal terutama pembiayaan dan pemasaran;
d. Para pengelola KUKM baik laki-laki dan perempuan belum mampu untuk berinovasi dalam pengembangan produk

**12. Penanaman Modal**

a. Potensi penanaman Modal di Kabupaten Bulukumba masih rendah.

**13. Kepemudaan danOlahraga**

a. Belum optimalnya pembinaan sumber daya kepemudaan.
b. Masih rendahnya peningkatan pelatihan kewirausahan Muda untuk menunjang pembangunan Daerah
c. Belum optimalnya prestasi atlet termasuk atlet usia Dini dan pelajar
d. Kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang sesuai standar yang ditetapkan

**14. Statistik**

a. Belum adanya data sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah daerah
b. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral.
c. Perlunya pengelolaan data secara optimal menuju program satu data

**15. Persandian**

a. Masih rendahnya SDM dan sistem persandian modern yang masih menggunakan sarana dan prasarana manual.
b. Masih rendahnya tingkat keamanan informasi berdasarkan hasil assesment.

**16. Kebudayaan**

a. Belum Optimalnya Pembinaan pelaku budaya dan kesenian pada satuan pendidikan dan daerah

b. Belum Optimalnya Pelestarian cagar budaya dan adat istiadat
c. Belum Optimalnya Pembinaan dan pelestarian seni budaya daerah

**17. Perpustakaan**

a. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat
b. Belum optimlanya jumlah buku dan pengadaan buku setiap tahunnya pada perpustakaan
c. Menurunnya minat baca dan minat pemanfaatan perpustakaan
d. Masih kurangnya jumlah perpustakaan yang ada di Desa dan Kecamatan
e. Belum optimalnya sarana dan prasarana SDM umtuk mendukung gerakan literasi masyarakat

**18. Kearsipan**

a. Belum mencukupinya arsip arsip didaerah
b. sarana dan prasarana arsip belum memadai
c. belum adanya landasan hukum untuk arsip Jadwal retensi arsip (JRA)
d. Terbatasnya anggaran sarana dan prasarana serta SDM pengelola arsip digital dalam mendukung reformasi birokrasi.
e. Belum optimalnya Penerapan Sistem Kearsipan Daerah Terintegrasi" untuk mendukung Proyek Prioritas Nasional yaitu Penerapan e-arsip terintegrasi.

#### 2.5.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

**1. Kelautan dan Perikanan**

a. Menjangkitnya penyakit udang dan rumput laut
b. Pencapaian peningkatan produksi terganggu karena kewenangan kelautan diambil alih provinsi sehingga program perlidungan dan pengawasan ekosistem kelautan tidak bisa dilaksanakan
c. Banyaknya negara pesaing yang juga merupakan penghasil udang dan rumput laut.
d. Kurangnya penerapan teknik budidaya yg sesuai dengan standar budidaya oleh masyarakat
e. Metode penangkapan ikan yang masih cenderung tradisional
f. Terjadinya fluktuasi harga produk-produk perikanan
g. Usaha dibidang kelautan dan perikanan belum *Bankable* sehingga pihak perbankan sulit untuk menyalurkan kredit.
h. Adanya pencemaran tambak intensif secara masif sehingga menganggu budidaya rumput laut
i. Lemahnya kelembagaan nelayan,pembudidaya dan pelaku usaha perikanan lainnya.
j. Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang belum memenuhi persyaratan mutu
k. Nelayan masih tergolong miskin

**2. Pariwisata**

a. Kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata
b. Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pariwisata
c. Rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur
d. Rendahnya peran aktif dan sadar wisata dari pelaku pariwisata

**3. Pertanian**

a. Masih rendahnya produktivitas lahan pertanian
b. Masih rendahnya daya saing produk pertanian
c. Masih rendahnya kualitas SDM penyuluh
d. Belum optimalnya pelayanan pengelolaan keuangan,aset,kepegawaian, perencanaan dan pelaporan
e. Masih rendahnya pemahaman para pelaku utama pembangunan pertanian melakukan registrasi produk sebagai syarat mendapatkan sertifikat Prima
f. Pertumbuhan populasi ternak rendah (Kesehatan Hewan)
g. Sarana prasarana peternakan dan daya saing produk hewan yang belum optimal (Kesehatan Hewan)
h. Skala usaha peternakan, kelembagaan kelompok dan Jejaring pemasaran produk hewan belum optimal (Kesehatan Hewan)
i. Keterlibatan keluarga miskin dalam kegiatan usaha peternakan masih kurang

(Kesehatan Hewan)

j. Keterbatasan pengetahuan dan ketampilan petani peternak serta akses untuk memperoleh informasi, teknologi dan sarana Prasarana (Kesehatan Hewan)
k. Ancaman Penyakit Hewan menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ), gangguan reproduksi ternak dan Pemotongan ternak ruminansia betina produktif belum terkendali (Kesehatan Hewan)
l. Belum optimalnya produksi ternak (Kesehatan Hewan)

**4. Kehutanan**

a. Perlunya dibuatkan rekonstruksi palbatas karena sejak Tahun 1991 sampai sekarang belum pernah dilaksanakan rekonstrruksi palbatas,seharusnya sekali dalam 5 tahun dilaksanakan Rekonstruksi.
b. Perlunya penambahan tenaga polisi kehutanan karna luas kawasan TAHURA 3.475 Ha tidak sebanding dengan polisi kehutanan yang hanya berjumlah 2 orang saat ini, perbandingan untuk 1 tenaga polisi kehutanan dengan luasan sekitar 50 – 75 Ha /orang polisi hutan, sehingga untuk luas TAHURA 3.475 Ha membutuhkan 47 orang polisi hutan.
c. Perlunya pengganti tanaman penghijauan pada turus jalan yang sudah tua yang sering roboh pada saat hujan dan angin kencang yang dapat membahayakan masyarakat dan memperbanyak Ruang-ruang terbuka Hijau , untuk taman kota tidak adanya lahan pemerintah untuk dijadikan penambahan lahan luasan RTH pembangunan taman, penataan dan pemeliharaan taman , yang sampai saat ini seluas 13,88 % sesuai perda nomor 22 tahun 2012 harus mencapai 20 % , sesuai perbup untuk pemenuhan porsi RTH dikota kab Bulukumba maka pemerintah harus menyiapkan lahan RTH. Karena tanaman pelindung sudah mengkawatirkan sudah mengganggu ketenteraman pengguna jalan yang berbatasan perlunya dipikirkan penambahan lokasi pekuburan umum

**5. Perdagangan**

a. Rendahnya daya saing pasar tradisional dibandingkan dengan retail moderen karena belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
b. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal karena rendahnya anggaran pelaksanaan kegiatan serta terbatasnya jumlah sdm kemetrologian (Penera, Pengamat dan PPNS).
c. Terbatasnya sarana metrologi legal.

**6. Perindustrian**

a. Belum optimalnya pemenuhan standarisasi kualitas produk industri kecil dan menengah.
b. Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang.
c. Terbatasnya pemberdayaan industri kecil dan menengah khususnya melalui upaya penguatan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh, konsultan dan penyediaan pusat promosi

**2.5.2.4 Urusan Penunjang Pemerintahan**

**1. Perencanaan**

a. Belum optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan.
b. Ketersediaan data terkini yang belum akurat
c. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal
d. Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah belum optimal
e. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

**2. Keuangan**

a. Belum tersosialisasinya dengan baik tentang pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan pelaku usaha Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah.

**3. Kepegawaian dan Diklat**

a. Belum optimalnya sinergitas antara kebutuhan pengembangan kompetensi PNS

dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan formal dalam rangka peningkatan kapasitas PNS;

b. Belum optimalnya pemetaan kompetensi PNS sebagai dasar pengembangan kompetensi dan karier;

**4. Penelitian danPengembangan**

a. Pemanfaaatan hasil litbang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan;
b. Belum optimalnya upaya fasiitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah

**5. Pengawasan**

a. belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasi pemeriksaan baik internal maupun eksternal.
b. Masih perlunya peningkatan internal para ASN dalam pelaksanaan kegiatan di OPD untuk mengurangi potensi pelanggaran.
c. Opini atas laporan Keuangan BPK-RI menjadi sebagai salah satu indikator dalam penatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan secara baik harus tetap dipertahankan guna mewujudkan tata kelola keuangan secara akuntabel.

**6. Sekretariat DPRD**

a. Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi(IT).

**7. Sekretariat Daerah**

a. Peranan Forum kerukunan umat beragama belum berfungsi secara optimal.
b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dan pendukung pengembangan SDM syiar Al Quran.
c. Kurangnya data akurat terkait pembinaan dan pengembangan SDM keagamaan.
d. Tingkat dukungan pemerintah akan pengembangan keagamaan masih rendah.

## 2.6 Isu Strategis

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;

5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas Pembangunan pemerintah pusat.

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis. Maka yang menjadi isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan pada setiap urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2021-2026.

### 2.6.1 Isu Strategis Global

#### 2.6.1.1 Pemenuhan Ekonomi Global

Sebagaimana diketahui, terdapat lima isu strategis global yang dihadapi oleh otoritas pengambil kebijakan di dunia saat ini yaitu: (1) bagaimana mengatasi isu kesehatan akibat pandemi covid dan ketahanan pangan yang disebabkan gangguan pasokan; (2) bagaimana mengintegrasikan berbagai kebijakan makroekonomi menjadi bauran kebijakan yang efektif; (3) bagaimana menerapkan bauran kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memperkuat pemulihan ekonomi; (4) bagaimana CBDC dapat dirancang sehingga dapat memfasilitasi konektivitas pembayaran lintas negara namun tetap menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan serta bagaimana meramu mitigasi dampak negatif dari asset kripto terhadap stabilitas sistem keuangan melalui kerangka pengaturan dan pengawasan yang efektif; dan (5) bagaimana sinergi antara upaya transisi, termasuk dukungan keuangan berkelanjutan menuju *net zero carbon emissions*.

Kelima isu tersebut dilatarbelakangi kerentanan perekonomian global dengan tingkat inflasi yang tinggi dengan pemulihan yang lebih lemah. Perang yang tengah berlangsung di Ukraina, disertai dengan tindakan kebijakan dalam merespon perang dan kebangkitan COVID-19 di beberapa negara, telah memperpanjang gangguan rantai pasokan. Kondisi tersebut, seiring dengan meluasnya kebijakan *inward looking,* khususnya komoditas pangan di sejumlah negara, telah mendorong kenaikan harga komoditas internasional secara signifikan sehingga meningkatkan tekanan inflasi global. Sebagai tanggapan, beberapa negara telah memulai pengetatan kebijakan moneter yang berpotensi menghambat pemulihan ekonomi global dan meningkatkan risiko stagflasi. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara ekonomi utama juga diperkirakan akan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Secara berkepanjangan, hal ini meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global sekaligus menahan aliran modal asing dan memperburuk tekanan mata uang di negara berkembang. Selanjutnya, dalam gala seminar yang berlangsung, dielaborasi respon terhadap kelima isu global dimaksud.

Pemulihan ekonomi global melalui jalur keuangan menjadi lebih kuat dengan merespons 5 (lima) isu strategis global sebagaimana dikemukakan dalam Gala Seminar "Monetary and Financial Sector Policy to Support Stability and Recovery", sebagai side event yang yang menutup seluruh rangkaian side event G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Nusa Dua, Bali (17/7/2022).

Kelima Respon dari Isu strategis tersebut yaitu 1) Pembentukan sistem kolaborasi dan kerjasama global untuk mengatasi tantangan kerawanan pangan (*food insecurity*) 2) menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan ekonomi melalui bauran kebijakan 3) penguatan kebijakan moneter serta makroprudensial yang didukung koordinasi melalui reformasi struktural 4) rancangan Central Bank Digital Currency (CBDC) untuk interoperabilitas dan pembayaran lintas-batas, serta 5) mengembangkan kerangka untuk pembiayaan transisi menuju *net zero emission*.

Respon pertama terkait *food insecurity* dan health dibahas pembentukan sistem kolaborasi dan kerjasama global (*Global Collaboration and Cooperation*) untuk mengatasi

tantangan kerawanan pangan (*food insecurity*) yang terus meningkat. Kolaborasi dan kerjasama global tersebut akan memiliki fokus pada upaya mendukung ketahanan pangan dengan memastikan keterjangkauan (*affordability*) dan kemudahan perolehan (*accessibility*) pangan, serta meningkatkan ketersediaan data untuk pupuk. Di samping itu, disepakati pembentukan Dana Perantara Keuangan (*Financial Intermediary Fund*) untuk membantu memastikan pembiayaan yang memadai, berkelanjutan, dan terkoordinasi untuk tindakan pencegahan (*prevention*), kesiapsiagaan (*preparedness*), dan penanggulangan (*response*) terhadap pandemi di masa depan. Dana tersebut dikelola oleh World Bank dengan komitmen awal sebesar US$1,1 miliar.

Respon kedua mengulas bauran kebijakan makroekonomi, membahas upaya untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan ekonomi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dengan kebijakan yaitu: (1) fundamental makroekonomi yang kuat yang dapat dicapai melalui kebijakan fiskal, moneter, serta stabilitas keuangan yang terencana, terukur, dan terkomunikasi dengan baik; (2) kebijakan moneter yang *pre-emptive, front-loading, dan ahead the curve*. Hal ini dicapai tidak hanya melalui suku bunga, melainkan juga instrumen lainnya antara lain stabilisasi nilai tukar, pengelolaan aliran modal, serta koordinasi dengan Pemerintah; dan (3) memperkuat sisi suplai melalui kebijakan sektor riil dan reformasi struktural.

Respon ketiga bertajuk kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk stabilitas dan pemulihan yang terdiri atas : (1) kebijakan moneter perlu kembali menitikberatkan pada stabilitas harga secara *pre-emptive* dan *forward-looking* untuk mengendalikan ekspektasi inflasi disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Kebijakan suku bunga tetap menjadi instrumen utama, dilengkapi dengan intervensi nilai tukar dan manajemen arus modal, terutama di negara berkembang dengan pasar keuangan yang belum dalam; (2) pentingnya pendekatan yang semakin granular dan mikro untuk menjaga kestabilan keuangan, terutama sektor korporasi dan rumah tangga. Di samping kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial juga perlu diterapkan dalam rangka memitigasi risiko-risiko terhadap stabilitas keuangan; (3) mengingat persoalan stabilitas harga saat ini bersumber pada sisi penawaran, maka koordinasi antara bank sentral dan pemerintah semakin diperlukan. Koordinasi tersebut tidak terbatas pada sinergi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, namun juga terkait reformasi struktural. G20 berhasil menggabungkan *Integrated Policy Framework* (IPF) dari IMF dengan *Macro Financial Stability Framework* (MFSF) dari BIS untuk mengakselerasi terwujudnya stabilitas harga global.

Respon keempat menghadirkan Central Bank Digital Currency (CBDC) dan asset kripto, disambut baik berbagai inisiatif rancangan CBDC, khususnya dalam penggunaan untuk interoperabilitas dan pembayaran lintas-batas (*cross-border payments*). Di samping itu, rancangan CBDC juga perlu menjamin stabilitas moneter dan keuangan internasional. Diskusi juga membahas pentingnya kerangka regulasi dan pengawasan yang kokoh dari asset kripto, termasuk yang disebut stablecoin, dengan menerapkan prinsip '*same activity, same risk, same regulation*'. Tujuan yang ingin dicapai adalah memitigasi risiko dari penggunaan asset kripto dan memastikan level playing field, dengan tanpa menghambat inovasi dan inklusi. Membangun kesadaran public akan risiko penggunaan asset kripto merupakan hal penting.

Respon kelima terkait ekonomi dan keuangan hijau membahas berbagai rekomendasi dalam rangka mengembangkan kerangka untuk pembiayaan transisi menuju net zero emission, meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan menuju tujuan tersebut,

dan meningkatkan inovasi pada instrument dan pasar keuangan berkelanjutan. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya pertukaran pengalaman dalam rangka mendorong pembiayaan dan investasi yang mendukung transisi menuju *net zero emission*.

Presidensi G20 Indonesia memberikan referensi untuk melakukan exit strategy dari kebijakan luar biasa di masa pandemi untuk mendukung pemulihan, serta mengatasi efek luka memar (*scaring effect*) untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang tinggi. Selain itu, Presidensi G20 Indonesia berhasil mengajak semua anggota untuk berkomitmen mempertahankan stabilitas keuangan global, termasuk dengan terus berkoordinasi dalam langkah-langkah kebijakan dan penerapan standar internasional. Presidensi G20 Indonesia berhasil meyakinkan anggota untuk memperkuat komitmen mendukung transisi yang berjalan mulus (*orderly*), adil (j*ust*), dan terjangkau

#### 2.6.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's)

Konsep SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca tahun 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumberdaya alam. Kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi. Serta pembangunan yang lebih berpihak kepada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator, Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ditahun 2016-2030 antara lain:

1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana mana;
2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua;
4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6) Memastikan ketersediaan daan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua;
8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Inklusif dan ekonomi berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9) Membangun infrastuktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan. Dan mendorong inovasi;
10) Mengurangi kesenjangan didalam dan antar negara;
11) Membuat kota kota dan pemukiman manusia inklusif. Aman. Tangguh dan berkelanjutan;
12) Pastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, menggantikan dan mengembalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan; dan

17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Rekomendasi Muatan KLHS yang telah disesuaikan dengan Analisis tujuan pembangunan berkelanjutan dimana Kabupaten Bulukumba melaksanakan 17 TPB yang terbagi atas 202 indikator yang menjadi kewenangan. Adapun Rekomendasi Muatan KLHS yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 diantaranya sebagai berikut:

1) Untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian maka disarankan untuk menerapkan pendekatan intensifikasi pertanian dikarenakan kemampuan lahan untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Bulukumba terbatas.
2) Pangan merupakan kebutuhan primer untuk kebutuhan hidup manusia, tetapi perlu diperhatikan bahwa perubahan tata guna lahan untuk kawasan pertanian dapat menghilangkan potensi pertanian. Sehingga, perencanaan pusat kegiatan dapat diletakkan pada daerah yang memiliki jasa ekosistem penyedia pangan sedang.
3) Air merupakan sumber kehidupan manusia, namun perlu diperhatikan bahwa pada area yang memiliki nilai jasa ekosistem penyediaan tinggi perlu tetap perlu dipertahankan eksistensinya sehingga ketersediaan air tetap *sustain*.
4) Apabila nilai jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir tinggi maka pada area tersebut mengindikasikan mempunyai daya tampung yang baik, sehingga rencana pembangunan dapat diarah ke daerah tersebut untuk menghindari terendamnya permukiman dari bencana banjir.
5) Apabila nilai jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam dengan nilai tinggi maka pada area tersebut mengindikasikan mempunyai daya tampung yang baik. Sehingga rencana kegiatan pembangunan harus menghindari area jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencanaalam dari sangat rendah hingga rendah.
6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah pada daerah-daerah yang memiliki kerentanan sangat tinggi.
7) Sebagai upaya menghadapi resiko bencana maka perlu dilakukan :
   - Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
   - Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
   - Peningkatan kapasitas pemulihan bencana

#### 2.6.1.3 Perubahan Iklim

Secara umum perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, dimana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia.

Iklim berubah secara terus menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan pengunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Faktor yang menyebabkan perubahan iklim diantaranya:

a. Efek gas rumah kaca
b. Pemanasan Global
c. Kerusakan lapisan ozon
d. Kerusakan fungsi hutan
e. Penggunaan Cloro Flour Carbon (CFC) yang tidak terkontrol
f. Gas buang industri

Dampak yang ditimbulkan akibat perubahan iklim yang terjadi secara terus menerus mempengaruhi kondisi alam antara lain:

a. Curah hujan tinggi
b. Musim kemarau yang berkepanjangan
c. Peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub
d. Terjadinya bencana alam angina putting beliung

Melalui Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan BangsaBangsaMengenai Perubahan Iklim), Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution) menyatakan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kacapada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam komitmen Pemerintah, dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunanrencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada aspek adaptasi dilakukan penguatan kapasitas masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalammenghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah daerah yang rentan.

Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukansemata oleh pemerintah provinsi oleh karena itu diperlukan pelibatan secaraaktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitrapembangunan dan pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing -masing

#### 2.6.1.4 Revolusi Industri 4.0

Secara ringkas, terdapat 6 fase dalam sejarah revolusi industri, yaitu Revolusi Industri 1.0 yang berkisar pada tahun 1780 dan fokus pada mechanisation; Revolusi Industri 2.0 pada 1870 fokus pada electrification; Revolusi Industri 3.0 pada tahun 1970 untuk automation; Revolusi Industri 3.5 pada 1980 tentang globalisation; Revolusi Industri 4.0 yang sedang terjadi sekarang yaitu digitalisation; serta Revolusi Industri 5.0 di masa depan yang akan fokus pada personalisation.

Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya, sehingga memiliki efek disruption industri disetiap negara pada keseluruhan sistem serta meluas mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, kesehatan, pendidikan dan hubungan sosial kemasyarakatan. Pada bidang ekonomi ditandai dengan munculnya bidang pekerjaan baru (data miner. Analis big data. Ilmuwan kecerdasan buatan) dan hilangnya beberapa pekerjaan lama; pekerjaan yang dilakukan oleh manusia digantikan dengan mesin atau robot yang mengakibatkan hilangnya sumber penghidupan manusia pada bidang pekerjaan tersebut. Bidang organisasi dan institusi publik yang menghendaki pengambilan keputusan dilakukan secara cepat. Sehingga perlu memiliki integrasi data, kemampuan analisis big data dan kecerdasan buatan, sedangkan pada bidang sosial kemasyarakatan, revolusi industri 4,0 memunculkan beberapa fenomena baru yang perlu diantisipasi agar tidak membawa efek negatif pada perubahan perilaku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar, privasi, kepemilikan, konsumsi, gaya hidup, dan lain sebagainya. Bila disikapi dengan positif. Era revolusi industri 4.0 membawa peluang secara ekonomi makro berupa proses otomatisasi dan digitalisasi berpeluang untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitas akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, dunia akan segera memasuki Era Industri 5.0. Revolusi Industri 5.0 yang disebut Revolusi Personalisation menjadi fokus utama terhadap pengalaman konsumen yang hendak dicapai. Kustomisasi yang tinggi menjadi salah satu karakteristiknya. Selain itu, Era 5.0 menuntut untuk pasokan yang responsif dan terdistribusi, pengalaman interaktif produk, serta kembalinya sistem ke tenaga kerja.

Untuk bisa menghadapi Era 5.0, seorang individu setidaknya harus memiliki 4 kompetensi dasar yaitu:

1. Technical competency, yaitu berhubungan dengan hard skills yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan baru, contohnya kemampuan coding, information security, dan kemampuan memahami manusia serta budaya.
2. Critical competency, sebuah metode pendekatan untuk menyelesaikan problematika dan tugas, contohnya kreativitas, entrepreneurship, dan analisis.
3. Personal competency, yaitu kemampuan diri untuk menghadapi tantangan secara efektif, contohnya kegesitan, kemauan untuk terus belajar, dan daya tahan mental yang kuat.
4. Social competency, yaitu tentang cara kita menjadi lebih terbuka dan peka untuk bekerja bersama, contohnya kecerdasan emosional, teamwork and cooperation, serta kemampuan interkultural.

Agar bisa memiliki semua kemampuan, ada beberapa hal yang saling berkaitan dan membawa efek domino kepada satu sama lain. Misalnya, kebijakan pendidikan yang dipengaruhi oleh infrastruktur. Sementara pembangunan infrastruktur terkadang tidak merata karena adanya ketimpangan sosial ekonomi. Hal tersebut kemudian akan berhubungan dengan otonomi daerah yang juga berimbas pada kebijakan industri.

### 2.6.2 Isu Straegis Nasional

#### 2.6.2.1 Transformasi Ekonomi

Dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045 yaitu menjadi negara maju dan salah satu 5 kekuatan ekonomi dunia dengan kualitas manusia yang unggul serta menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan yang kuat dan berwibawa, maka perlu disusun strategi-strategi nasional.

Transformasi ekonomi harus kita lakukan. Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat 6 (enam) Strategi besar Transformasi Ekonomi sebagai "Game Changer" dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045 adalah:

*Strategi 1 Sumber Daya Manusia yang berdaya saing*, dengan memperhatikan: (1) Sistem Kesehatan; (2) Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter; (3) Perlindungan Sosial; (4) Riset dan Inovasi.

*Strategi 2 Produktivitas Sektor Ekonomi*, dengan memperhatikan: (1) Produktivitas Tenaga Kerja; (2) Modernisasi Pertanian; (3) Industrialisasi; (4) Promosi UMKM; (5) Modernisasi Sektor Jasa.

*Strategi 3 Ekonomi Hijau*, dengan memperhatikan: (1) Bauran Kebijakan Energi; (2) Transfortasi Bersih; (3) Pengelolaan Sampah; (4) Blue Economy; (5) Transisi Energi.

Strategi 4 Transformasi Digital, dengan memperhatikan: (1) Sumber Daya Manusia; (2) Infrastruktur Digital; (3) Digitalisasi; (4) Pemanfaatan Digital.

*Strategi 5 Integrasi Ekonomi Domestik*, dengan memperhatikan: (1) Infrastruktur Konektivitas (superhubungan, Hubungan Laut, Hubungan Udara); (2) Koridor Ekonomi/Wilayah Pembangunan; (3) Domestic Value Chain.

*Strategi 6 Pemindahan Ibukota Negara (IKN)*, dengan memperhatikan: (1) Sumber Pertumbuhan Baru; (2) Menyeimbangkan ekonomi antar wilayah.

Keenam strategi di atas juga disertai perbaikan enabling environment yaitu reformasi birokrasi, reformasi fiskal, dan reformasi sektor keuangan.

#### 2.6.2.2 Pengembangan Wilayah

Dalam mencapai sasaran Prioritas Nasional 2 di tahun 2024, terdapat beberapa isu strategis dalam pengembangan wilayah yaitu:

1. Pengembangan Kawasan Strategis (Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)) dengan meningkatkan peran badan pengelola kawasan dalam memanfaatkan peluang investasi dan promosi, serta peningkatan kualitas dan daya saing SDM Kawasan.
2. Mewujudkan komoditas unggulan sebagai pengungkit ekonomi wilayah dan kawasan dengan risiko kerentanan pada kondisi eksternal seperti bencana alam dan kondisi iklim.
3. Penguatan pengaturan kawasan perotaan yang lebih holistik dan trans – sektor.
4. Penyelesaian Rencana Tata Ruang untuk mendukung kepastian investasi dan pelaksanaan perizinan berbasis elektronik, peningkatan kepastian hukum hak atas tanah, serta peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital.
5. Pengembangan kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, perdesaan, dan perbatasan negara melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan aksesibilitas, dan peningkatan kapasitas SDM sebagai upaya pengurangan ketimpangan antar wilayah.
6. Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan dan keuangan daerah yang lebih efektif dan efesien untuk penyediaan pelayanan dasar.

#### 2.6.2.3 Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
6. Sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap

indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II.

#### 2.6.2.4 Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun keatas) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan. Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah. Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba yang berusia 15- 65 tahun sebesar 94,12 persen. Pemerintah Kabupaten Bulukumba harus menangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

### 2.6.3 Isu Strategis Daerah

#### 2.6.3.1 Isu Strategis Sulawesi Selatan

1. Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available*) serta bersifat berkesinambungan (*sustanable*). Artinya semua jenis pelayanankesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya di masyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (*accessible*) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkanpelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting. Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia,belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena merekatidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya,faktor jarak dan transportasi.

Rumah sakit regional telah dibangun pada masa RPJMD 2018-2023 agar dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberipelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya masih dibutuhkan operasional dan pengembangan rumahsakit regional tersebut dengan dukungan SDM yang memadai, dan layanan yangramah anak, lansia, perempuan dan penyandang disabilitas.

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian dapat terus bertumbuh positif. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung

Kawasan Timur Indonesia menjadi kekuatan yang tidakdimiliki daerah lain. Namun hal tersebut tidaklah cukup, kemudahan dalamberinvestasi, pengurusan perijinan, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi pra syarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya.

Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Selain kondisi ekonomi, hal lain yang juga mempengaruhi adalah faktorpendidikan dan kesehatan. Demikian juga hak atas rasa aman (perlindungan)bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sesuai posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menjadi rujukan wilayah lainnya di Indonesia khususnya Kawasan Timur Indonesia. Jika faktor-faktor tersebut dapat diciptakan, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.

3. Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian.

Sulawesi Selatan memiliki luas kurang lebih 45.500 km persegi dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkonektivitas antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang baik. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 109 Pelabuhan Laut dan 11 Pelabuhan Strategis. Namun karena kualitas yang kurang baik dikabupaten/kota lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi provinsi yang rawan terdampak bencana banjir.Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimanaIndeks layanan infrastruktur tahun 2021 sebesar 79,44 jaringan jalan dalam mantap pada tahun 2021 baru mencapai 70,01% dari panjang jalan 2.009,35km. Hal ini disebabkan karena ada peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak berat yang berakibat capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi.

Di Sulawesi Selatan persentase jalan provinsi dalam kondisi baik adalah 38,98% dikarenakan masih banyaknya jalan provinsi dalam kondisi rusak berat. Dengan demikian diperlukan adanya penanganan terhadap jalan yang rusak berat agardapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan dan menunjang arus perekonomian antar daerah/wilayah.

4. Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan.

Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapita maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah. Pendapatan per kapita masyarakat Sulawesi Selatan pada tahun 2021adalah 59,66 juta rupiah meningkat dari tahun 2020 yang mencapai 55,68 juta per tahunnya, tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Sulawesi Selatan karena tingkat rasio ketimpangan masih berada pada angka 0,377. Selain itu, jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 8,53 % pada tahun 2021.

5. Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SulawesiSelatan seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada padausia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2018, jumlah penduduk yangberada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,78 Juta, atau 49%dari total warga Sulawesi Selatan, sementara untuk tahun 2021 terjadi peningkatan angka usia produktif menjadi 6,2 juta jiwa atau 52% dari total penduduk. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia,

jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun demikian dari segi kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan IPM,Sulawesi Selatan pada tahun 2021 berada di angka 72,24 atau masih berada diperingkat 11 nasional. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah diSulawesi Selatan tahun 2021 adalah 8,46 tahun yang berarti rata-rata lama sekolah hanya sampai kelas VIII atau kelas 2 SMP.

6. Revitalisasi Paradigma Pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)

Sumberdaya alam yang terkandung di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumberdaya alam sebagian besar dikirim/ekspor dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yangdapat memberikan nilai tambah (*added value*) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan dayadukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumberdayaalam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan menjamin akses,partisipasi, kontrol, dan manfaat sumberdaya alam bagi semua lapisan masyarakat, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, wilayah, dankebutuhan yang berbeda.

Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalampertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian peningkatan nilai tambah industri lokal untuk mendongkrak daya saing ekonomi seharusnya menjadi salah satu fokus untuk lebih ditingkatkan. Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama, yaitu:

1. Hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri.
2. Mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalamnegeri.
3. Mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur.
4. Percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (debottlenecking).
5. Meningkatkan integrasi pasar domestik.

Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi,meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar.Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat strukturindustri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektorpertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan,perkebunan dan kehutanan. Dengan hilirisasi ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi Selatan pada sektor produksi, industri pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil, baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

6. Sulawesi Selatan sebagai Poros Maritim

Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan laut memiliki garis pantai sepanjang 1.973,7 km serta luas wilayah laut dan pesisir kurang lebih 60.000 km2 diyakini memiliki kekayaan maritim yang besar.Potensi ekonomi yang terkandung di dalam laut dan sepanjang pesisir Sulawesi Selatan bila dikelola secara bijak akan mendatangkan devisa daerah. Sulawesi Selatan memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar dari Pangkep hingga Selayar dan sepanjang Teluk Bone yang merupakan destinasi wisata bahariyang tak kalah dengan destinasi pulau yang lain. Pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung seperti *shortsea shipping* untuk mempercepat konektivitas antar pulau di Sulawesi Selatan.

Untuk dapat menjadi poros utama pertumbuhan maritim di nusantara,Sulawesi Selatan harus membangun dan meningkatkan daya dukung sistempelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang terbengkalai diSelayar hingga Palopo, perbaikan tata kelola kepelabuhanan danmemodernisasinya sesuai standar internasional, perbaikan pelayanan dan aksesdi seluruh pelabuhan yang ada. Dengan memaksimalkan hal tersebut, akanmenguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai poros maritim dan pusatkonektivitas kawasan timur Indonesia.Aspek sosial dan budaya bagi masyarakat maritim sangat diperlukan dalam mempercepat pembangunan kemaritiman secara komprehensif dan terpadu. Tantangannya adalah mengubah kebiasaan masyarakat maritim yang tertutup, berpikir sempit dan tidak berkembang menjadi masyarakat maritim yang dinamis, kreatif dan produktif sehingga taraf hidup masyarakat lebih baik tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat maritim dan nilai-nilaipositif yang selama ini telah ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan memprioritaskan proses pada sektor sosial dan budaya dalam membangun kemaritiman.

Disamping itu jasa kelautan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan devisa negara melalui beberapakegiatan yang menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan sebagai upaya membangun jasa kelautan yang efektif dan efisien di Sulawesi Selatan. Kawasan pesisir Sulawesi Selatan memiliki potensi pengembangan yangsangat tinggi dan merupakan usaha padat karya. Tercatat lebih kurang 33.576 pengelola rumput laut atau 102.873 anggota rumah tangga di Sulawesi Selatan atau 39% dari seluruh anggota rumah tangga di Indonesia yang mengusahakan rumput laut. Potensi ini perlu didukung pemerintah dengan memperpanjang rantai nilai rumput laut untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak.

#### 2.6.3.2 Isu Strategis Kabupaten Bulukumba

Isu strategis Kabupaten Bulukumba merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi berdasarkan dinamika isu-isu strategis internasional, nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Isu Strategis Kabupaten Bulukumba dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sumber daya lokal

   Dalam rangka pemerataan pendapatan bagi masyarakat Bulukumba khususnya peningkatan nilai tukar petani dan menurunnya angka kesenjangan (Indeks Gini) serta penurunan rasio ketergantungan.
2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif

   Peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah. Pemantapan kesejahteraan masyarakat ini merupakan lanjutan dari peningkatanpembangunan sumberdaya manusia, yang diharapkan akan meningkat baik padapendidikan, kesehatan serta pendapatan masyarakat Kabupaten Bulukumba.Pembangunan pada penggalan terakhir ini diharapkan dapat menyempurnakan tingkatkesejahteraan masyarakat menuju Bulukumba yang bermarwah, maju dan sejahtera
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

   Pemantapkan kualitas sumberdaya manusia. Infrastruktur dan perekonomian masyarakat menuju Bulukumba yang majudan sejahtera. Pemantapan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur inimerupakan lanjutan dari peningkatan pembangunan sebelumnya yang diharapkan telah membentuk struktur perekonomian daerah yang kuat baik perekonomian yang mendukung industri maupun perekonomian berbasis masyarakat. Kualitas sumber daya yang memiliki daya saing yang baik serta infrastrukut konektifitas yang telah lancara ntar kawasan.

4. Mendorong kontribusi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan

   Peningkatan penciptaan kawasan-kawasan ekonomi lokal yang telah direncanakan pada pembangunan berbasis spasial Kabupaten Bulukumba. Penguatan lokus pembangunan ini dilakukan secara terintegrasi dan mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan nasional serta provinsi.Pembangunan yang terarah dan terintegrasi pada lokus-lokus ini dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian masyarakat serta mendorong peningkatan produktifitas danjiwa wirausaha (*enterprenuership*) generasi muda yang berbasis pada UMKM (*Start Up*) sehingga sub sektor perekonomian semakin maju.
5. Peningkatan kualitas, kapasitas dan penataan infrastruktur wilayah

   Pemulihan ekonomi dan kondisi masyarakat sudah mulai membaik kembali akibat dari pandemi Covid-19. Difokuskan pada peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan sebagai penopang utama terhadap pengembangan perekonomian masyarakat berbasis potensi unggulan daerah dengan mengedepankan penggunaan dan penerapan teknologi.
6. Meningkatnya aspek Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah.
7. Sinergitas kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan stakeholder lainnya.

## 2.7 Inovasi Daerah

Seiring dengan dinamika pembangunan di Kabupaten Bulukumba, terdapat beberapa inovasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan rencana akan dilakukan pada tahun 2023. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II-275**
**Daftar Inovasi Kabupaten Bulukumba**

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| 1 | GELIAT (Gerakan Literasi Berbasis Digital) | Kurangnya Minat Baca Siswa | Gerakan literasi berbasis digital diharapkan Agar siswa memiliki minat baca. | Gerakan Minat Baca Siswa | litersi digital | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Nur Asni, SPd, MPd & M. Arwin Basra, S.Pd, M.Pd |
| 2 | Passapu (Pengelohan Sampah Terpadu) | Banyaknya sampah plastik | Pemanfaatan sampah Peastik dalam pembuatan Batako bertujuan untuk mengurangi penggunaan semen | Pengelohan sampah plastik | Batako dari limbah plastik | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Nur Asni, SPd, MPd & M. Arwin Basra, S.Pd, M.Pd |
| 3 | Salassae Ri MangEi (Sarana Pengelolaan Sampah Organik Non Kimia untuk merawat Ekosistem) | Kurangnya pengelolaan sampah organik | Pengelolaan sampah dengan bekerjasama dengan masyarakat khususnya **KSPS** (*Komunitas Swabina Petani Salassae*) untuk mengelolah sampah organic dengan menggunakan zat pengurai **non kimia**. | mengelolah sampah organic dengan menggunakan zat pengurai non kimia. | Pengelah Sampah Organik | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Dr. Kasmawati Zainuddin, S.Pd.,M.Pd & A.Nurfajriana S.Pd |
| 4 | 5 G-Gerakan Sabtu Menyapa (GSM) - Gerakan Guru Berbagi (GGB)- Gerakan Selasa Digital (GSD) - Gerakan Selasa Digital (GSD)- Gerakan Pagi Mengaji (GPM)- Gerakan Da'i Muda (GDM) | Kurangnya kapasitas Jaringan | **5 G** merupakan generasi kelima dari teknologi nirkabel, menawarkan kecepatan unggah dan unduh yang lebih tinggi, koneksi yang lebih konsisten, dan peningkatan kapasitas dari jaringan sebelumnya.Brand 5 G dengan harapan dan tujuan agar SMPN 17 Bulukumba mencetak generasi yang mumpuni dalam teknologi. | Peningkatan Kapasitas jaringan | 5 G Nirkabel | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Dr. Kasmawati Zainuddin, S.Pd.,M.Pd & A.Nurfajriana S.Pd |
| 5 | STROBERI (Sistem Tanaman Hidroponik Berbasis Limbah) | Kurangnya pemilahan Sampah | Sistem Tanaman Hidroponik Berbasis Limbah. Warga sekolah memilah sampah/ barang bekas untuk keperluan | Warga sekolah memilah sampah | Sistem Hidroponik | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Zainuddin, S. Pd., M. Pd. |
| 6 | (SIMANIS8)Sekolah Inovasi Mandiri Wirausaha SMPN 8 | Belum termanfaatkan produksi lokal | Berinisiatif untuk membantu masyarakat sekolah dan masyarakat umum bagaimana | memanfatkan hasil bumi | Pemanfatan hasil bumi | | | | SK Bupati Bulukumba, | Andi Nurwinah Pangki S.Pd.,M.Pd. |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | cara memanfaatkan hasil bumi seperti ubi jalar membuat makanan. | | | | | | No.188.45-216 Tahun 2023 | |
| 7 | Tabarat Literasi Milenia ( Tabungan Akhirat Literasi Minggu Libur Ceria) | Belum adanya literasi berinfaq | Mewujudkan sekolah yang agamis ,beriman dan bertaqwa.Program Tabarat Literasi Milenia yaitu mengajak kepada segenap warga sekolah serta masyarakat untuk belajar berinfaq. | Literasi Melenia | Sekolah berinfaq | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Andi Nurwinah Pangki S.Pd.,M.Pd. |
| 8 | AKSIPA (Akses Informasi Terpadu) | Kurangnya informasi anak ke orang tua | Media yang digunakan orang tua peserta didik, untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan proses pembelajaran di sekolah. Penyampaian informasi kepada orang tua peserta didik. | informasi ke orang tua siswa | Media Informasi Orang tua siswa | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Sahrul, S.Pd.,M.Pd & Andi Murdhana Baeda, S.Pd. Gr |
| 9 | SIKAPAL (Sikolana Ana Pa,Rumpu Laue) | Kurangnya kehadiran disekolah | Siswa yang orang tuanya adalah nelayan atau petani rumput laut yang seringkali kehadirannya sangat kurang karena membantu orang tuanya bekerja atau bertani rumput laut. | memfasilitasi siswa yang membantu orang tuanya sebagai nelayan | Mengatasi ketidak hadiran diisekola | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Ichtiar Akmal, S.Pd. & Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. |
| 10 | SIKOLA GAE (Sarana Informasi Komunikasi Orang Tua Lewat Layanan Guru | Kurangnya kehadiran disekolah | SIKOLA GAE dalam dialek konjo berarti Sekolah Pagae artinya sekolah bagi anak nelayan. SIKOLA GAE menjadi Sarana | sekolah nelayan | anak bersekolah | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Umar Tawakkal, S. Ag.,M.Pd.I & Hasriani, S. Pd |
| 11 | DASI 18 (Daur Ulang Sampah Plastik SMP 18) | Sampah plastik | Mengumpulkan sampah plastik dari lingkungan sekitar sekolah untuk di daur ulang sehingga lingkungan sekitar bebas sampah plastik. Bank sampah. | pengolahan sampah plastik | Daur Ulang Sampah Plastik | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Amir Alif,S.Pd& Andi Nurhayati Hafid, S.Si., Gr |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| 12 | SALAM SOBAT (Sekolah Alam Solusi Tuntaskan Wajib Belajar) | kurangnya layanan belajar | Sekolah berbasis alam semesta anak belajar dan menerima materi di tempat yang dikelilingi alam. | Sekolah alam | Belajar diluar kelas | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Syuaib, S. Pd. I. M. Si & Herlinah, S.Pd., Gr. |
| 13 | LAKMUS (Lempar Ke Jaring dan Kumpulkan Sampahmu) | kurangnya pengelohan sampah | Sarana yang digunakan oleh peserta didik dalam memungut dan membuang sampah, sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih dan sehat. | kebersihan lingkungan sekolah | Menciptakan lingkungan bersih | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Ansar, S. Pd., M. Si. & Sry Wahyuni, S. Pd. I |
| 14 | PERAK DI TAS (Peningkatan Karakter Peserta Didik dengan Pendekatan Masjid) | Adanya siswa yang melakukan pelanggaran | Kunjungan rumah terhadap peserta didik yang seringmembuat pelanggaran dan berkonsultasi dengan orang tua peserta didik mengenai perilaku anaknya. sertapersetujuan bahwa anaknya siap untuk diikutkan dalamkegiatan pendekatan Masjid. | Kunjungan Rumah | Mengatasi pelanggaran siswa | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Ansar, S. Pd., M. Si. & Sry Wahyuni, S. Pd. I |
| 15 | PUTSAL (Pungut Sampah, Kelola) | Banyaknya sampah plastik | PUTSAL (Pungut,Sampah, Kelola) merupakan kegiatan daur ulang seperti kerajinan tangan dan pupuk komposdan ini akan menjadi salah satu penggerak ekonomi. | daur ulang sampah | Daur Ulang Sampah Plastik | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Asniar, S.Pd., M.M & Gusnadi, S.Pd., M.Pd |
| 16 | SAPIHI (Satu Apotik Hidup) tiap Kelas | Belum adanya apotik hidup di setiap kelas | Satu Apotik Hidup) tiap kelas merupakan kegiatan layanan masyarakat sekolah yang bersifat edukatif, akan obat-obatan herbal. | Apotik Hidup | Edukasi apotik hidup | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Asniar, S.Pd., M.M & Gusnadi, S.Pd., M.Pd |
| 17 | Penerapan Supervisi Berbasis Coaching | kurangnya supervisi | Penerapan Supervisi Berbasis Coaching | supervisi | supervisi | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Aminuddin, S.Pd.,M.Si |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| 18 | PUSAKA (Pungut Sampah, Kantongi) | kurangnyapengolaan limbah | Kegiatan penanggulangan sampah di lingkungan sekolah dengan menggunakan kantong dari limbah tekstil. | penanggulanagn sampah | penanggulaagn sampah dari limbah | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Dra. A. Ratnawati,M.Pd & Abdul Rahman, S.Pd |
| 19 | ASSIKOLAKI (Akses Kondisi Sekolah Terkini) | Kurannya informasi orang tua | Akses informasi untuk seluruh Warga Sekolah dan Orang Tua/wali Peserta didik untuk mengetahuiperkembangan peserta didik. | informasi perkembangan anak | akses informasi | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | ST. Haena, S.Pd.,M.Pd & Amiruddin, S.Pd. |
| 20 | SIPETTAKI (Idaman Peduli Tatakrama dan Tata Lingkungan yang Inovatif) | Kurang peduli lingkungan sekolah | Idaman Peduli Tatakrama dan Tata Lingkungan yang Inovatif. | tatakrama | tata lingkunga sekolah | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Asri Ali,S.Pd.,M.Pd |
| 21 | FA DEWAN (Fasilitasi Desa Swasembada Air Minum ) | | Kolaborasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Perusda dan Lembaga Masyarakat Desa dalam penyediaan air minum layak konsumsi. | Kolaborasi Prusda | Penyediaan Air Minum layak Konsumsi | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | H. ANDI AGUS SALIM ISHAK, SOS, M.Si |
| 22 | Kembang Desa (Kerjasama Antar Desa Membangun Desa Cerdas) | program yang tidak berkelanjutan | Program Desa yang berkesinambungan, sebagai tindak lanjut dari program Kementrian Desa. | Program Berkelanjutan | Tindak Lanjut Program Kemendes | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | H. ANDI AGUS SALIM ISHAK, SOS, M.Si |
| 23 | SAPA (Sahabat Pegawai Bulukumba) | Pegawai yang tidak mempertahankan Rumah tangga | Edukasi dan fasilitas mediasi kepada pasangan pegawai agar tetap mempertahankan rumah tangga. | pembinaan pasangan Rumah tangga Pegawai | Pembinaan Rumah tangga Pegawai | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | Andi Dewi Ratu, S.STP,MAP |
| 24 | KADO PERNIKAHAN DUKCAPIL | Optimalisi layanan KTP-e | Kado yang diberikan oleh pihak Dukcapil berupa Kartu Keluarga,KTP-el sepasang pengantin dengan perubahan status. | KTP-e bagi pengantin dengan perubahan status | KTP-e | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | ENDANG MULIANI,S.Sos |
| 25 | LOKET MU (Layanan Oline Kependudukan Terpadu Masyarakat Umum) | Layanan online jasa kependudukan | Inovasi Loket-MU Layanan Online Kependudukan dan jasa antar dokumen kependudukan | Layanan antar Dokumen Kependudukan | Jasa Antar Dokumen Kependudukan | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45- | ENDANG MULIANI,S.Sos |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | | | | | | | 462Tahun 2022 | |
| 26 | PINISI DUKCAPIL ( Pusat Informasi Iovasi DUKCAPIL) | Tidaknya Wadah berhimpun Inovasi Dukcapil | PINISI DUKCAPIL adalah pusat informasi Inovasi Dukcapil yang merupakan sebuah wadah untuk menghimpun semua Inovasi Dukcapil. | Wadah berhimpun Inovasi | Kumpulan Inovasi Dukcapil | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | ENDANG MULIANI,S.Sos |
| 27 | SEKOLAH SADAR ADMINDUK | belum tersosialisasinya tertib administrasi kependudukan | Pelayanan dan sosialisasi disekolah terkait tertib administrasi kependudukan. | Layanan tertib administrasi kependudukan | Tertib administrasi Kependudukan | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | ENDANG MULIANI,S.Sos |
| 28 | GAMMARA ( Gerakan Masyarakat Menuju Sadar ADMINDUK) | belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan | Pelayan yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah meningkatan kepemilikan Dokumen Kependudukan | optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan | Dokumen Kependudukan | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | ENDANG MULIANI,S.Sos |
| 29 | LORONG JELITA ( Layanan Jemput Bola Identitas Anak dari Lorong Ke Lorong) | belum dilakukan jemput KIA | Layanan jemput bola kepemilikan Kartu Identitas Anak "KIA" dari lorong ke lorong. | Jemput KIA | Masyarakat Memiliki KIA | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | ENDANG MULIANI,S.Sos |
| 30 | MY KTP-EL, MY DREAM | wajib KTP-e | Pelayanan jemput bola yang diberikan kepada anak usia 17 tahun yang wajib KTP-EL. | KTP-e | Masyarakat Memiliki KTP-e | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | ENDANG MULIANI,S.Sos |
| 31 | FOTOKU ONLINE ( Formulir Persyaratan Dokumen Kependudukan) Online | Foto online Barcode | Fotoku online adalah pelayanan persyaratan dan formulir melalui link pelayanan dan barcode. | Pengisian formulir link layanan barcode | Barcode layanan Link | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | NURAFIAH,S.KOM |
| 32 | Go Panrita (Pelayanan Kartu Identitas Anak) | Melibatkan forum anak KIA | Layanan berupa ajakan/edukasi Forum Anak dalam kepemilikan KIA. | Edukasi forum Anak kepemilikan KIA | Anak Memiliki Kepemilikan KIA | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | ENDANG MULIANI,S.Sos |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| 33 | MAWAR (Ramah Warga) | layanan Rumah | Memberikan pelayanan yang Ramah dari petugas Dukcapil. | layanan Rumah | mempermudah layanan dokumen | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | ENDANG MULIANI,S.Sos |
| 34 | LANIKAJI (Layanan Penelitian Dan Pengkajian) | Optimalisasi Kelitbangan | layanan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Kelitbangan) bagi SKPD/OPD di Kabupaten Bulukumba. | Layanan Kelitbangan | Kelitbangan | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | Dr.Drs.Baharuddin Patangngai,SE.,Msi |
| 35 | NILAN ( Klinik Laboratorium Inovasi ) | belum optimalnya layanan inovator dalam rancang bangun inovasi | Melayani Inovator OPD dalam rancang bangun Inovasi Daerah | rancang bangun Inovasi Daerah | Inovator terlayani membuat rancang bangun Inovasi daerah | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | A.Wahyudin. K, SE |
| 36 | E-MONEV SIPAKATAU | Belum optimalnya perencanaan pengimputan dokumen RPJMD | Proses awal adalah penginputan dokumen RPJMD pada aplikasi e-Planning di menu e-RPJMD pada halaman ini berisi informasi mengenai executive summary pencapaian program dan kegiatan selama 5 tahun (periode RPJMD) dsb. | e-Planning RPJMD | e-Planning RPJMD | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | AHRIYANI HAKIM, ST, MT |
| 37 | KOMPETISI INOVASI | Belum dilakukan kompetisi | Kompetisi inovasi untuk mengukur tingkat kualitas dan keterjangkauan layanan pemerintah kepada masyarakat melalui inovasi daerah Dan pemberian penghargaan bagi inovator | Mmengukur tingkat kematangan Inovasi daerah | Komepetisi Inovasi daerah Sinopan | | | V | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | BASO S, S.Pd, M.Kes |
| 38 | WORKSHOP CHAMPION INOVASI | belum optimal pembekalan terhadap inovator daerah | Pembekalan dan penataan pengelolaan inovasi daerah bagi inovator OPD dan Badan untuk menghadapi lomba tingkat regional maupun nasional di bidang inovasi | Pembekalan Inovator Daerah | Optimalisasi Inovator Daerah | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | Rakhmat Riswan, SKM,M.Kes |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| 39 | ONE BASE, ONE MAP, ONE POLICY (Satu Data, Satu Peta, Satu Regulasi) | Belum optimalnya tata kelola data | Peraturan Presiden No 39 tentang " Mengatur Penyelenggaraan Tata Kelola Data yang di hasilkan oleh instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan" | Tata kelola data bahan perencanaan | Tata kelola data | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | Ir. A. PUTRI A. RUMPANG, MSC |
| 40 | LEGO LEGO SI CANTIK | Belum optimalnya kualitas data | Menerapkan standar data yang telah ditetapkan untuk menghasilkan data yang berkualitasMelalui regulasi Lego Lego si CANTIK's. | Data Yang berkualitas dalam Perencanaan | Data Perencanaan Yang Berkualitas | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | Ir. A. PUTRI A. RUMPANG, MSC |
| 41 | Peduli Bijangta (Peduli Keluarga) | Belum optimal dokumen ODGJ | Mengunjungi pasien ODGJ, membantu pengobatan dan mengurus dokumen kependudukan. Pasien yang telah sembuh diberikan pembinaan dan keterampilan. | Kunjungan Pasien ODGJ | Layanan ODGJ | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | Hj. Jawadwipa & Drs. A. MAPPIWALI |
| 42 | Gadis Manis (Gerakan Validasi Pemutahiran Data Penerima Layanan Sosial) | Belum akuratnya data | Gerakan validasi data yang akurat bagi penerima layanan sosial dengan cara mendatangi rumah (door to door). | Data akurat | Data Akurat layanan sosial | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | Drs. A. MAPPIWALI |
| 43 | Sistem Aspirasi Online | Optimalisasi layanan aspirasi | Aplikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi dari seluruh masyarakat dan dapat langsung direspon. | penyampaian aspirasi DPRD | Aplikasi Layanan Aspirasi | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | Kamarudin |
| 44 | Go Asesment { Goment} | Belum adanya layanan cepat bagi layanan pendidikan | Go Asesment mengarahkan para siswa lebih aktif dan kreatif Hari ini selesai jangan tunggu sampai besok: perlunya pelayanan yang prima dalam pendidikan. | asessment siswa dengan cepat | Layanan Cepat | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | A.Syahrul Alam, SE |
| 45 | Lisua Massikola (Gerakan Kembali Bersekolah) | Belum meningkatnya | Meningkatkan semangat belajar anak serta | Semangat belajar siswa | meningkatkan semangat belajar | | | | SK Bupati Bulukumba, | A.Syahrul Alam, SE |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | semangat belajar siswa | meminimalisir angka putus sekolah di Kab.Bulukumba. | | | | | | No.188.45-462Tahun 2022 | |
| 46 | MERAPAT (Media Pelaporan Cepat) | Belum adanya sistem pelaporan | Suatu sistem pelaporan kasus yang dibuat secara online, dapat di akses melalui media sosial DPPPA. | pelaporan Online | Media Sosial DPPPA | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | Andi Farah Fekicia, S.Psi |
| 47 | GERAKAN 1000 AKSEPTOR | Belum adanya ruangan layanan akseptor | Menyediakan ruangan layanan bagi akseptor/masyarakat yang ingin ber KB. | Penyediaan ruangan akseptor | Layanan Akseptor | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | LISMAYANTI,S.Sos,M.AP |
| 48 | GALERI UPPKS | Belum adanya Konsep Galeri UPPKA | Galeri UPPKA adalah bangunan dengan konsep mini market sebagai pusat penjualan bagi hasil produksi usaha kelompok-kelompok UPPKA. | Konsep UPPKA | Galeri UPPKA | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | LISMAYANTI,S.Sos,M.AP |
| 49 | DAHSAT (Dapur Sehat) | Belum optimalnya edukasi perbaikan gizi | Sosialisasi dan edukasi perbaikan gizi bagi ibu hamil, balita dan ibu menyusui. | edukasi Perbaikan Gizi | Perbaikan Gizi Anak | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | LISMAYANTI,S.Sos,M.AP |
| 50 | PLUIT AKU (Pelayanan Langsung Izin Trayek Angkutan Umum) | Belum optimalnya garai layanan izin trayek | Gerai layanan pengurusan izin trayek di dalam kawasan terminal induk untuk memudahkan pegusaha/sopir angkutan umum. | Optimalnya garai Izin trayek | Izin Trayek | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | Drs.MUHAMMAD AMRY |
| 51 | TERONG PUSTAKA (Teras Dongeng Perpustakaan) | rendahnya minat baca | Sarana pelayanan untuk membangkikan minat baca masyarakat khususnya bagi anak usia dini atau usia Taman Kanak-kanak. | meningkatkan minat baca | Minat baca bagi anak usia dini | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | Armawati S.Sos |
| 52 | Pena (Perpustakaan Untuk Anak) | belum adanya literasi pustaka | literasi dan mensosialisasikan perpustakaan pada anak yang dalam perawatan di Rumah Sakit / klinik maupun pada | Literasi Pustaka bagi perawatan rumah sakit | Literasi Pustaka di Rumah sakit dan klinik | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45- | ANDI ELIZ INDAYANI,SE |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | kegiatan lainnya seperti kelas balita. | | | | | | 462Tahun 2022 | |
| 53 | WISATA PUSTAKA | belum Optimalisasi pengenalan Perpustakaan | Kegiatan memperkenalkan perpustakaan kepada anak, agar mereka dapat mengetahui perpustakaan sejak dini. | Pengenalan Perpustakaan sejak dini | sosialisasi Perpustakaan sejak dini | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | Armawati S.Sos & Rismayani,S.Sos.MM |
| 54 | Tasbih Pustaka (Disabilitas Bisa Perpustakaan Peduli) | belum optimalnya perpuustakaan inklusif | Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dengan mengundang para penyandang disabilitas ke perpustakaan untuk berkegiatan. | Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dengan mengundang para penyandang disabilitas ke perpustakaan untuk berkegiatan | layanan perpustakaan inklusif | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | Rismayani,S.Sos.MM |
| 55 | Smart Laperjadin Smart Laporan Perjalan Dinas) | Bellum optimalnya laporan Pengelolaan keuangan | Laporan pengelolaan keuangan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel | Pengelolaan keuangan yang profesional | Pengelolaan keuangan | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | Ubayd Mantsur, A.Md |
| 56 | SIAP (Sistem Aplikasi Perizinan) | Belum menggunakan sistem layanan cepat | Sisten layanan yang cepat, mudah, murah, transparan,pasti, dan terjangkau oleh pelayanan terpadu satu pintu. | layanan yang cepat, mudah, murah, transparan,pasti, dan terjangkau oleh pelayanan terpadu satu pintu. | Pelayanan cepat | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | SUFIRMAN,SE, IBU MALA, MAULANA |
| 57 | GARDU KENCAN SI PTM ( Gerakan Terpadu Kenali, Cegah dan Atasi Penyakit Tidak Menular) | belum dilakukan pengendalian deteksi dini | Mengendalikan penyakit tidak menular dimasyarakat dengan kegiatan deteksi dini. | Pengendalian Penyakit | Deteksi penyakit tidak menular di masyarakt | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | WIDYASTUTI, S.Kep.,Ns |
| 58 | SISKA CANTIK (Sistem Informasi dan Edukasi Cara Siswa Memantau Jentik) | belum adanya edukasi anak | Edukasi anak-anak sekolah melalui UKS Sekolah mencegah penularan DBD. | edukasi anak mencegah DBD | Pencegahan DBD | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45- | MUH. YUSRAN YUNUS, SKM |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | | | | | | | 462Tahun 2022 | |
| 59 | Edukasi anak-anak sekolah melalui UKS Sekolah mencegah penularan DBD. | kurangnya pelayanan penyuluhan | Informasi dan penyuluhan di ruang pelayanan puskesmas. | Pelayanan Penyuluhan di Puskesmas | Penyuluhan | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | YUNITA SRILAWATI KARTIKA DEWI, SKM |
| 60 | Digital Kobotoolbox (Efisiensi Pengumpulan Data Digital Kobotoolbox) | Belum tersedia pusat penyedia | Pusat penyedia, pemrosesan & analisis dari tally sheet/kuisioner dan sebagai penyimpanan utama data. | Tersedia pusat penyedia pemorosesan dan analisis dari tally sheet | Tally Sheet | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | AHMAD ARFAN, S.IP, MT |
| 61 | KAMPUNG SAPI(Kawasan Pengembangan Bibit Unggul Sapi Potong | belum optimalnya pembibitan sapi unggul | Kawasan ini akan menghasilkan bibit unggul hasil persilangan antara sapi Bali dan sapi Wagyu. | kawasan pemabibitan sapi | Sapi Unggul | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | Ir. Suriya Darma, S.Pt, M.Si, IPM |
| 62 | RETRIBUSI PASAR NON TUNAI | masih sulitnya penarikan retribusi dan realisasi PAD | Memudahkan dalam penarikan retribusi dan laporan realisasi serta mampu meningkatkan PAD. | Mempermuda Penarikan Retribusi PAD | Meningkatkan PAD | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | Munthasir Nawir, S.STP,M,Si. |
| 63 | ALASAN LIHAI (Aplikasi Layanan Pengawasan Lingkungan Hidup Akurat dan Terintegrasi) | sulitnya pengelolaan LH | Sistem yang dibangun untuk memudahkan pelaporan pengelolaan dan pemantauan LH bagi pelaku usaha dan kegiatan. | memudahkan pelaporan pengelolaan dan pemantauan LH | Pengelolaan LH | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | MUHAMMAD ARDI NUR S.Kel.,M.Si |
| 64 | PANDU BERSOLEK (Pengarsipan Dokumen Berbasis Elektronik) | sulitnya tools administrasi kepagawaian | Aplikasi pelayanan ini menjadi tools mempermudah administrasi kepegawaian | pelayanan mempermudah administrasi Kepegawaian | akses informasi | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | MUHAMMAD ARDI NUR S.Kel.,M.Si |
| 65 | SI PAPA LH(Sistem Informasi Pelayanan Persampahan dan Lingkungan Hidup) | belum adanya layanan LH | layanan Bidang LH mengenai berbagai layanan persampahan. | adanya layanan LH | Layanan LH | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | MUHAMMAD ARDI NUR S.Kel.,M.Si |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| 66 | SIMPEDA (SIMPATIK PENEGAKAN PERDA) | Belum optimalnya Penegakan perda | Sistem Penanganan Penegakan Perda dan Perbup di Wilayah Kabupaten Bulukumba | Optimalnya pengekan Perda dan Perbub | Penegakan Perda dan Perbub | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | HJ. AHRYANTI, SP |
| 67 | SIMDA (SIAP MEMBANTU DAMKAR) | belum terbentuknya relawan SIMDA di desa | Relawan SIMDA di beberapa desa mengurangi tingkat kerugian masyarakat yang berada disektar kebakaran. | terbentuknya Relawan SIMDA di desa | SIMDA di Desa | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | ABD. RAHMAN, S.AP |
| 68 | ASAP PAK (AKSI CEPAT, TEPAT PEMADAM KEBAKARAN) | Belum optimalnya sistem pelaporan bahaya kebakaran | Sistem pelaporan terjadinya bahaya kebakaran lewat aplikasi android. | Optimalnya pelaporan bahaya kebakaran | pelaporan aplikasi Android | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | ABD. RAHMAN, S.AP |
| 69 | PELAYANAN DASAR KORBAN KEBAKARAN | Belum optimalnya sistem pelaporan bahaya kebakaran | Sistem pelaporan terjadinya bahaya kebakaran lewat aplikasi android. | Optimalnya pelaporan bahaya kebakaran | pelaporan aplikasi Android | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462Tahun 2022 | ABD. RAHMAN, S.AP |
| 70 | POJOK BACA DIGITAL | Belum dilakukan kegiatan Pojok baca Digital | Dengan mengusung judul kegiatan yaitu "POJOK BACA DIGITAL" untuk memudahkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, mendapatkan suasana baru serta meningkatnya ilmu pengetahuan guna mendukung dan membantu upaya pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat bulukumpa. | Dilaksanakan kegiaan Pojok Baca Digital | Dilaksanakan kegiaan Pojok Baca Digital | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | A. RIDWAN M, S.Sos |
| 71 | MARIKI' TERTIB | Belum dilaksananakan pelayanan secara cepat dan mudah | MARIKI' TERTIB di inspirasi atas kondisi yang terjadi pada kantor kecamatan Bontobahari dimana seluruh proses | telah dilaksanakan pelayanan secara cepat dan mudah | telah dilaksanakan pelayanan secara cepat dan mudah | | | (√) | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | EKA ARGIAN SAMPARADJA |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | pelayanan masyarakat selama ini dilaksanakan secara cepat dan mudah di ruangan pelayanan, namun proses layanan tersebut mengabaikan tupoksi dari masing-masing seksi dan pengarsipan hasil dokumen layanan. | | | | | | | |
| 72 | Ruangan Pelayanan Yang Nyaman Dan Wifi Gratis | Belum Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat | Dengan inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bontotiro dengan mekanisme pembenahan dan penataan ruangan pelayanan yang telah tersedia berupa pengecetan tembok, pengadaan kursi tunggu dan pengadaan AC, kemudian pemanfaatan wifi yang telah tersedia bagi masyarakat terutama siswa/siswi yang akan megerjakan tugas dan keperluan lainnya. | telah dilaksanakan pelayanan secara cepat dan mudah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bontotiro dengan mekanisme pembenahan dan penataan ruangan pelayanan yang telah tersedia berupa pengecetan tembok, pengadaan kursi tunggu dan pengadaan AC, | telah dilaksanakan pelayanan secara cepat dan mudah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bontotiro dengan mekanisme pembenahan dan penataan ruangan pelayanan yang telah tersedia berupa pengecetan tembok, pengadaan kursi tunggu dan pengadaan AC, | | | √ | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | H.ANDI RAHMAT SYAERI P.S.IP.,M.Adm.,KP |
| 73 | Sistem Administrasi Pelayanan Kecamatan berbasis Online | Belum Akurat aplikasi pengurusan terkait kependudukan | Aplikasi ini dibuat untuk membantu memudahkan masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan pengurusan terkait kependudukan, seperti surat-surat, kartu kuning atau berkas izin lainnya. Website Profile dimaksudkan sebagai sarana publikasi untuk memberikan Informasi dan gambaran | Terlaksananya Aplikasi permohonan pengurusan terkait kependudukan, seperti surat-surat, kartu kuning atau berkas izin lainnya. | Terlaksananya Aplikasi permohonan pengurusan terkait kependudukan, seperti surat-surat, kartu kuning atau berkas izin lainnya. | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | ANDI MUH. ARFAH AP, S.STP.,M.AP |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | tentang potensi Kecamatan Kindang, seperti menampilkan info wisata, usaha, data statistik Penduduk, Kesehatan, Pendidikan dan Statistik lainnya secara online. | | | | | | | |
| 74 | Datata Tepat, Mudah dan Aman (Datata TEMAN) | Belum Akurat data terkait pelayanan dan perizinan | Data-data terkait pelayanan dan perizinan masih sangat susah untuk diakses dikecamatan hal ini dibuktikan dengan dibutuhkannya waktu yang lama untuk memperoleh segelintir data dimaksud, hal ini mungkin disebabkan karena pengimputan data yang masih secara manual menggunakan buku register sehingga membutuhkan waktu dalam hal perekapan ataupun besar kemungkinan terjadi kehilangan data. | Terlaksananya Data-data terkait pelayanan dan perizinan | Terlaksananya Data-data terkait pelayanan dan perizinan | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | ANDI ASHADI, SE,MM |
| 75 | SI BANDUL (Sistem Informasi Bank Data Ujung Loe) | Belum akurat pelayanan Data | Pelayanan data kantor Kecamatan Ujung Loe | Hasil Akurat Pelayanan Data | Hasil Akurat Pelayanan Data | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | AKHMAD IHWAN NOOR, S.Pd, M. Adm. Pemb. |
| 76 | TERAS PELAYANAN (Terpusat, Ramah, dan Puas Pelayanan Kantor Kecamatan Rilau Ale) | Belum akurat pelayanan administrasi dan konsultasi | Membuat tempat Pelayanan Administrasi dan konsultasi di Halaman Kantor Kecamatan Rilau Ale. | Hasil Akurat Pelayanan Administrasi dan konsultasi | Hasil Akurat Pelayanan Administrasi dan konsultasi | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | A.Asdar Alif, S.Sos.,M.A.P |
| 77 | PETIR ( Penyelenggaraan Pemerintahan terintegrasi) | Belum terlaksana pembinaan dan pengawasan | Pembinaan dan pengawasan dari kecamatan, untuk meningkatkan SDM yang ada di kelurahan maupun di desa. | Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan dari kecamatan | Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan dari kecamatan | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | ISWANDY BADDU, S.SOS |
| 78 | POLWAN ( POS LAYANAN MALAM WARGA HERLANG) | Belum meningkatkan kualitas layanan | Meningkatkan kualitas layanan warga Kecamatan Herlang yang efektif dan efesien | Meningkatnya kualitas layanan warga Kecamatan | Meningkatnya kualitas layanan warga Kecamatan | √ | | | SK Bupati Bulukumba, | ASRAENI, SH |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | melalui POLWAN (Pos Layanan Malam Warga Herlang). | Herlang yang efektif dan efesien | Herlang yang efektif dan efesien | | | | No.188.45-462 Tahun 2022 | |
| 79 | PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) | Belum Akurat Administrasi | Pelayanan administrasi di kecamatan terbitnya dokumen dilakukan dalam satu loket atau meja pelayanan. | Hasil Akurat Administrasi Di kecamatan terbitnya dokumen | Hasil Akurat Administrasi Di kecamatan terbitnya dokumen | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | HARIS. H, SE |
| 80 | BANG JAKA BER TUDANG SIPULUNG (Bangkitkan Jalinan Komunikasi Bersama Tudang Sipulung) | Belum Tercapai mengenai informasi perkembangan proses pembelajaran | Sarana orang tua peserta didik mengenai informasi mengenai perkembangan proses pembelajaran di sekolah. | Tercapainya peserta didik mengenai informasi pembelajaran | Tercapainya peserta didik mengenai informasi pembelajaran | | | √ | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | Misrah, S.Pd., M.Pd. & Ulfiyah, S.Pd., M.Pd. |
| 81 | OUDY BER JAS (Outdoor Study dengan Ber Jelajah Alam Sekitar) | Belum adanya media pembelajaran bagi peserta didik | Media pembelajaran bagi peserta didik, seperti hutan sekolah, green house, dapur hidup, apotik hidup dan taman-taman sekolah. | Adanya Media pembelajaran bagi peserta didik, seperti hutan sekolah, green house | Adanya Media pembelajaran bagi peserta didik, seperti hutan sekolah, green house | | | √ | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | Misrah, S.Pd., M.Pd. & Ulfiyah, S.Pd., M.Pd. |
| 82 | HARUS PINTAR (Hafal Rumus melalui Pintu dan Tangga Rumus) | Belum Adanya media pembelajaran | Media pembelajaran berupa tangga dan pintu kelas yang dapat digunakan peserta didik mengingat rumus-rumus Matematika dan IPA. | Adanya Media pembelajaran berupa tangga dan pintu kelas yang dapat digunakan peserta didik | Adanya Media pembelajaran berupa tangga dan pintu kelas yang dapat digunakan peserta didik | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | Misrah, S.Pd., M.Pd. & Ulfiyah, S.Pd., M.Pd. |
| 83 | PUISI KELAS (Penggunaan Kartu Siswa Izin Keluar Kelas) | Belum terlaksana penggunaan kartu siswa izin keluar kelas | Penggunaan kartu siswa Izin keluar kelas, meminimalisir keluar kelas tanpa tujuan yang jelas. | Terlaksananya penggunaan kartu siswa izin keluar kelas | Terlaksananya penggunaan kartu siswa izin keluar kelas | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | MUHAMMAD ASDAR, S.Pd, M.Pd |
| 84 | Ratu dan Raja BaCA GaungKan LiTERASi ( ATUR ACAK TERAS) | Belum dilaksanakan seleksi tertulis,wawancara dan penyuluhan literasi | • Diawali dengan seleksi tertulis, wawancara, dan penyuluhan literasi di apel pagi,penghitungan tingkat intensitas kunjung ke perpustakaan<br>• Melibatkan pegawai perpustakaan sebagai tim seleksi/juri pada ATUR ACAK | terlaksasananya seleksi tertulis,wawancara da penyuluhan literasi | terlaksasananya seleksi tertulis,wawancara da penyuluhan literasi | | | √ | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | MUHAMMAD ASDAR, S.Pd, M.Pd |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | TERAS<br>• Figur dalam membaca dan tindak lanjutnya berupa pojok-pojok baca, lorong-lorong baca, taman baca, donator buku. | | | | | | | |
| 85 | SAKOSAGU (Satu Komik Satu Guru) | Belum akurat guru membuat media pembelajaran berbasis IT | Guru membuat media pembelajaran berbasis IT dalam bentuk komik. | Hasil Akurat Guru membuat pembelajaran berbasis IT | Hasil Akurat Guru membuat pembelajaran berbasis IT | | | √ | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | Kaharuddin Sultan, S.Pd |
| 86 | SALAM BERKAH (Program Siswa Belajar Sambil Bersedekah) | Belum terlaksana menyisihkan sebagian uang jajan | Menyisihkan sebagian uang jajannya untuk disimpan pada celengan hemat dan gemar menabung. | Terlaksananya menyisihkan sebagian uang jajannya untuk disimpan pada celengan | Terlaksananya menyisihkan sebagian uang jajannya untuk disimpan pada celengan | | | √ | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | Kaharuddin Sultan, S.Pd |
| 87 | SAGU (Satu Buku Satu Minggu) | Belum meningkatnya minat baca peserta didik | Meningkatkan minat baca peserta didik, menamatkan buku tersebut selama kurung waktu 1 minggu. | Meningkatnya minat baca peserta didik | Meningkatnya minat baca peserta didik | | | √ | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | Kaharuddin Sultan, Hajraeni, & Andi Rahmiati |
| 88 | CARADDE ( Cara Cepat , Ramah Dan Terdepan ) | Belum Akurat Aplikasi untuk guru | Aplikasi yang dibuat untuk guru dalam menginput nilai dan identitas siswa. | Hasil Akurat Apliksi guru dalam menginput nilai dan identitas siswa | Hasil Akurat Apliksi guru dalam menginput nilai dan identitas siswa | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | SUWARDI,S.Pd.,M.Si |
| 89 | LEGO-LEGO LAMACCA | Belum tersedia ruang khusus dan layanan belajar | Tersedianya Ruang Khusus dan layanan Belajar luar kelas (Lego-Lego Lamacca) tempat Belajar secara terbuka. | hasil tersedianya Ruang Khusus dan layanan Belajar luar kelas | hasil tersedianya Ruang Khusus dan layanan Belajar luar kelas | | | √ | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | MULIATI NUR,S.Pd.,M.Si |
| 90 | GETAR BELUT (Gerakan Tabur Benih Dilaut) | Belum terlaksananyakegiatan gerakan tabur benih di laut | Getar Belut adalah gerakan tabur benih di laut sebagai upaya memulihkan ekosistem laut. | Terlaksananya kegiatan gerakan tabur benih dilaut | Terlaksananya kegiatan gerakan tabur benih dilaut | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | YUSLI SANDI S.Kel,M.Si |
| 91 | PROMINA (Proposal Masyarakat Interaktif untuk Nelayan) | Belum adanya media interaktif secara online | Media interaktif secara online bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sektor perikanan. | Adanya Media interaktif secara online bagi masyarakat | Adanya Media interaktif secara online bagi masyarakat | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | YUSLI SANDI S.Kel,M.Si |
| 92 | Well Come Snack dan Drink | Belum tersedia pangan dan | Pangan dan Minuman Lokal Khas Bulukumba. | Tersedianya Pangan dan | Tersedianya Pangan dan | √ | | | SK Bupati Bulukumba, | HANDARIAH.S.Sos |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | " SEDAPKEPUNCAK " ( Selamat Datang Di Bulukumba Kusapa Engkau Dengan Kue Dan MinumanKu) | minuman lokal khas bulukumba | | minuman lokas khas bulukumba | minuman lokas khas bulukumba | | | | No.188.45-462 Tahun 2022 | |
| 93 | E-OFFICE TERMINI (TERTIB ADMINISTRASI) | Belum meningkatkan kualitas layanan administrasi | Peningkatan kualitas layanan administrasi dengan cepat. | Hasil pmeningkatnya kualitas layanan administrasi dengan cepat | Hasil pmeningkatnya kualitas layanan administrasi dengan cepat | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | A.NIRWANA, S.Sos |
| 94 | SINTA CALA (Sistem Informasi dan Data Kecamatan-Kelurahan) | Belum akurat data kecamatan-kelurahan | Layanan informasi dan data Kecamatan-Kelurahan terintegrasi serta terkini yang ada di Kab.Bulukumba | Hasil Akurat data informasi kecamatan-kelurahan | Hasil Akurat data informasi kecamatan-kelurahan | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | A. TENRI OLLE |
| 95 | MEDIASI ( Media Daring Informasi dan Konsultasi) | Belum akurat layanan aparatur sipil negara | Layanan Aparatur Sipil Negara pelayanan informasi, konsultasi, pendampingan hukum, dan atau permohonan mediasi secara daring. | Hasil akurat layanan aparatur sipil negara pelayanan informasi konsultasi | Hasil akurat layanan aparatur sipil negara pelayanan informasi konsultasi | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | MUHAMMAD RESKI ISMAIL, SH. |
| 96 | GO TAHFIDZ (Penyediaan layanan Karantina Tahfidz) | Belum adanya pembinaan dan pelatihan belajar seni baca tulis | Pusat pembinaan dan pelatihan bagi qari-qariah dan hafidz-hafidzah belajar seni baca tulis Al Qur'annya. | Adanya pembinaan dan pelatihan bagi hafidz hafidzah bejajar seni baca alquran | Adanya pembinaan dan pelatihan bagi hafidz hafidzah bejajar seni baca alquran | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | SALMAH, SE., MM |
| 97 | KLINIK PEPES YANLIK (Klinik Pelayanan Pendampingan Supervisi Pelayanan Publik Perangkat Daerah) | Belum adanya layanan prima bagi masyarakat penerima manfaat | Membantu OPD untuk dapat memberikan layanan prima bagi masyarakat penerima manfaat. | terlaksananya layanan prima bagi masyarakat penerima manfaat | terlaksananya layanan prima bagi masyarakat penerima manfaat | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | TENRI SARI MM |
| 98 | SILA JATI (Sistem Layanan Jadwal Tentative) | Belum akurat layanan aplikasipermohon an kehadiran | Tersedianya layanan aplikasi permohonan kehadiran / undangan kepada pimpinan sesuai jadwal, waktu dan tempat rencana kegiatan. | Hasil akurat layanan aplikasi permohonan kehadiran | Hasil akurat layanan aplikasi permohonan kehadiran | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | DANI SUSANTO, S,Pi |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| 99 | DIKERJA (APLIKASI PELAPORAN KINERJA DAN ABSENSI BERBASIS ANDROID) | Belum akurat data absensi berbasis android | Absensi berbasis Android dengan menggunakan sistem GPS dan Sensor Wajah. | Hasil akurat data absensi android dengan menggunaka sistem gps dan sensor wajah | Hasil akurat data absensi android dengan menggunaka sistem gps dan sensor wajah | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | SYAFARUDDIN, S.Sos, M.Adm.Pemb |
| 100 | POT SIANA ( Pembentukan Posko Terpadu Siaga Bencana) | Belum tersedia ruang atau tempat layanan oline | Tersedianya ruang atau tempat dan layanan Online sebagai tempat pengaduan dan laporan pada saat tanggap darurat bencana. | Tersedianya ruanng atau tempat layanan online | Tersedianya ruanng atau tempat layanan online | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | SYAMSUDDIN, S.AP |
| 101 | APPTI (Aplikasi Pemantauan dan Pemeriksaan Tindaklanjut) | Belum akurat notifikasi melalui perangkat android | Menyediakan fitur notifikasi melalui perangkat android mengenai penugasan, permintaan dokumen maupun informasi. | Hasil akurat notifikasi melalui perangkat android | Hasil akurat notifikasi melalui perangkat android | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | ARFIANTI ADHIYATI SAIRA |
| 102 | PUSAT DATA DAN INFORMASI (PASTImi) | Belum akurat pusat data dan informasi | PUSAT DATA DAN INFORMASI (PASTImi) adalah Sistem Pengelolaan Pusat Data yang terintegrasi dan Pengelolaan Informasi Satu Pintu yang merupakan node (simpul) strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba. | Hasil akurat Pusat data dan Informasi Sistem Pengelolaan Pusat Data yang terintegrasi dan Pengelolaan Informasi Satu Pintu | Hasil akurat Pusat data dan Informasi Sistem Pengelolaan Pusat Data yang terintegrasi dan Pengelolaan Informasi Satu Pintu | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | RUDY RAMLAN, SSTP |
| 103 | SI KASPER (Sistem Informasi Kawasan Permukiman) | Belum akurat data tentang kawasan pemukiman berbasis GIS | Menyediakan data tentang Kawasan permukiman yang berbasis GIS untuk pengembangan Kawasan Permukiman di Kab.Bulukumba. | Hasil akurat data tentang kawasan pemukiman berbasis GIS | Hasil akurat data tentang kawasan pemukiman berbasis GIS | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | MUNASIB, ST & HENDRI PRASETYAWAN, ST |
| 104 | RINDU JAKI-PR (Ruang Informasi, Pengaduan dan | Belum tersedia layanan ruang informasi | Inovasi Penyediaan layanan Ruang Informasi Pengaduan dan pembinaan disesuai dengan Kebutuhan yang | Tersedianya layanan Ruang Informasi Pengaduan dan | Tersedianya layanan Ruang Informasi Pengaduan dan | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | MUH.ASDAR,ST.,MT./ A. ROMY, SH. |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | Pembinaan Jasa Konstruksi) | pengaduan dan pembinaan | merupakan Ruang khusus dan layanan secara online yang disediakan untuk informasi bagi pelaku jasa konstruksi, pelaku pemanfaatan ruang dan masyarakat secara umum di kab.Bulukumba | pembinaan disesuai dengan Kebutuhan yang merupakan Ruang khusus dan layanan secara online | pembinaan disesuai dengan Kebutuhan yang merupakan Ruang khusus dan layanan secara online | | | | | |
| 105 | SIMPADA (Sistem Informasi Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah) | Belum tersedianya informasi bagi pelaku jasa kontruksi | Informasi bagi pelaku jasa konstruksi, pelaku pemanfaatan ruang dan masyarakat umum. | Tersedianya informasi bagi pelaku jasa kontruksi | Tersedianya informasi bagi pelaku jasa kontruksi | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | ANDI NURHIDAYAT, SE.,MM |
| 106 | SIGAP BIRA (Siap Tanggap Bira) | Belum ada posko kesehatan bagi wisata | Posko Kesehatan di Klinik Kaawasan bira dan berbagi Tugas untuk memantau dibeberapa titik tempat wisata di kawasan Bira | Ketersidaan Posko kesehatan | Layanan Kesehatan wisata di Bira | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | dr. H. Muhammad Amrullah, S.Ked.M.Kes |
| 107 | Gardu Kencang si PTM Poli | Belum ada posko kesehatan bagi wisata | Posko Kesehatan di Klinik Kaawasan bira dan berbagi Tugas untuk memantau dibeberapa titik tempat wisata di kawasan Bira | Ketersidaan Posko kesehatan | layanan kesehatan | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | dr. H. Muhammad Amrullah, S.Ked.M.Kes |
| 108 | Poli Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak | Belum ada posko kesehatan bagi wisata | Posko Kesehatan di Klinik Kaawasan bira dan berbagi Tugas untuk memantau dibeberapa titik tempat wisata di kawasan Bira | Ketersidaan Posko kesehatan | layanan kesehatan | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | dr. H. Muhammad Amrullah, S.Ked.M.Kes |
| 109 | Pasta GigiMu (Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan Gigi dan mulut melalui media Vidio dan leaflet | Belum ada posko kesehatan bagi wisata | Posko Kesehatan di Klinik Kaawasan bira dan berbagi Tugas untuk memantau dibeberapa titik tempat wisata di kawasan Bira | Ketersidaan Posko kesehatan | layanan kesehatan | √ | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-462 Tahun 2022 | dr. H. Muhammad Amrullah, S.Ked.M.Kes |
| 110 | SESI SADUL SAKAN (Setiap Siswa Wajib Membaca Satu Judul Buku Dalam Satu Pekan) | Pertemuan Orang Tua dan siswa | Mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik dan komite sekolah untuk membahas rencana | Pertemuan dengan orang tua siswa | Layanan Pendidikan | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Rosmini, S.Pd / Sulfiana, S. Pd |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | danpelaksanaan program termasuk meminta sumbangan buku bekas dari orang tua peserta didik ataumasyarakat. | | | | | | | |
| 111 | POLISI SAMPAH (Pungut Olah Jual Hasil Limbah Sampah) | Kerjasama kebersihan sekolah | Mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik dan komite sekolah untuk membahas rencanadan pelaksanaan program POLISI SAMPAH | Kebersihan sekolah | Kebersihan sekolah | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Amrullah, S.Pd / A. Harmawati, S. Pd |
| 112 | PELAJU MACCA (Petik Olah Jual Merica) | Belum adanya pengolahan merica | Kecamatan Rilau Ale dan Bulukumpa adalah daerah penghasil merica terbesar di KabupatenBulukumba, bahkan merica yang berasal dari 2 kecamatan ini mencapai 70% (hasil sensus) | pengolahan merica | pengolahan | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Idaharyani, S. Pd, M. Pd / Yulianti,S.Pd |
| 113 | SESI SAPON (Setiap Siswa Menanam Minimal Satu Pohon Produktif) | kerja sama | Mengajak orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar sekolah untuk membahas rencana aksi | Kerja Sama | Kerja sama | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Firmansyah, S. Pd / A.Asrayani AS, S. Pd |
| 114 | VICON OIL 42 (Virgin Coconut Oil SMPN 42 Bulukumba | Belum produksi Vicon Oil | Mengajak orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar sekolah untuk ikut serta mengolahVicon Oil 42 | Produksi Vicon Oil | Vicon Oil | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Diana Rista, S. Pd /Ernawati, S. Pd |
| 115 | GSB (Giat Shalat Berjamaah) | Penjadwalan | Pada jam pelajaran dibuat jadwal pelaksanaan shalat berjamaah dari pukul 11,50 – 12,30. Kemudian diisi dengan litersi keagamaan berupa membaca Al.quran.kultum dan kegiatan ibadah lainnya Akan dibuat group link dengan orang tua peserta didik tentang informasi pelaksaanaan shalat berjammah pserta didik dirumah. | Sholat berjamaah | Informasi | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Nurhalim, S.Pd, /Arman,S.Pd |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| 116 | LAMPU (Pengolahan Sampah Terpadu) | Belum adanya pengolahan sampah | Inovasi Lampu (Pengolahan Sampah Terpadu) sampah daun merupakan langka dalam menanggulangi sampah yang ada dilingkungan sekolah danmegolahnya menjadi pupuk kompos yang sangat berguna bagi tanaman tentunya bagi warga sekitar sekolah termasuk juga untuk tanaman dalam lingkungan sekolah tersebut. Pengolahan sampah menjadi pupuk kompos diharapkan menjadi langkah awal dalam upaya pelestarian lingkungan khususnya dalam lingkungan sekolah, sehingga generasi selanjutnya tetap dapat menikmati keindahan alam. | pengolahan sampah plastik | Pelestarian lingkungan | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Drs. H. SYARIFUDDIN, M.S |
| 117 | PESOHOR 25 (Pemanfaatan Lahan Kosong Menjadi Holtikultura | Beelum adanya pengolahan komoditas | Salah satunya dengan menyiapkan pangan segar yang bisa dinikmati dari perkebunan SMP Negeri 25 Bulukumba, kegiatan PESOHOR 25 kedepannya diharapkan mampu memberikan hasil berupa komoditas-komoditas harian yang sifatnya segar. Dalam artian tanaman yang ditanam dilahan kosong 25 di konsumsi secara langsung setelah di panen langsung. | Pengolahan komoditas | Pengolahan produk | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Drs. Muhammad Jusman dan Nurasma Hasni, S.Pd.I |
| 118 | BCA (Bell Cinta Al-Qur'an | Belum adanya bell baca Quran | **Inovasi Bell Cinta Alquran (BCA)** adalah Inovasi yang dilator belakangi oleh kondisi , | Belll Baca Quran | Tanda Bell | | | | SK Bupati Bulukumba, | Danial,S.Pd,M.M dan Muhammad Yamin,S.Pd |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | Masih kurangnya komunikasi atau perhatian orang tua dengan pihak sekolah dalam memantau | | | | | | No.188.45-216 Tahun 2023 | |
| 119 | INOVASI TTG (Teknologi Tepat Guna) VCO | Belum ada penerapan tepat guna | Inovasi TTG (Teknologi Tepat Guna) UPT SPF SMPN 13 Bulukumba merupakan suatu Langkah nyata yangdilakukan oleh pihak sekolah dan masyarakat dalam rangka penerapan Ilmu Pengetahuan yang tepat guna | Penerapan tepat guna | TTG | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | ACI,S.Pd, M.Pd. /FACHMY KHARTADYNATA, S.Pd |
| 120 | PATRIOT MAS 28 (Pusat Informasi Terpadu & Layanan Komunikasi Orang Tua,Masyarakat Dan Warga Sekolah 28) | Belum adanya Website | Inovasi PATRIOT 28 ini berupa website layanan terpadu yang dapat diakses langsung oleh orang tua dan masyarakat. Layanan ini berisi berbagai informasi terkait perkembangan sekolah, informasi perkembangan peserta didik, | adanya Website | Jaringan Website | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Sudirman, S.Pd., & Sella Arzyta AS, S.Pd |
| 121 | KONEKSITAS DACIL (Koneksitas Data Dapodik Dan Capil) | Kerja sama | Koneksitas DACIL ( Koneksitas Data DAPODIK dan DUKCAPIL) merupakan layanan yang di gunakan untuk mengkoneksikan data DAPODIK dan DUKCAPIL | Kerjasama | Replikasi | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | MUHAMMAD ASDAR, S.Pd.,M.Pd |
| 122 | MELATIKU (Menyulap Lahan Tidur Menjadi Kebun | Belum menafaatkan lahan | Melatiku Singkatan Dari Menyulap Lahan Tidur Menjadi Kebun Sekolah Inovasi Ini | Pemafaatan lahan | Pemanfaatan lahan | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Hj.SUARNI AZIS |
| 123 | PANAIK (Pengolahan Ikan Menjadi Abon Ikan) | Belum ada pengolahan Ikan | Ikan merupakan salah satu hasil laut yang dikonsumsi masyarakat karena merupakan sumber protein yang mudah dicerna dan kadar lemak relatif | adanya pengolahan ikan | Pengolahan | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | H. Syahrir, S.Pd, M.Si. dan Nurfalah Sari, S.Pd. |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | rendah yang sangat bermanfaat bagi kesehatan | | | | | | | |
| 124 | MA'SIFA (Mengolah Sardine Produktif) | Belum ada pengolahan sardine | Inovasi Mengolah Sardine Produktif (MA'SIFA) adalah ide/gagasan baru | adanya pengolaha sardine | Pengolahan | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | MUHAMMAD YUSUF |
| 125 | WALASUJI (Mengawal Perilaku Siswa Terpuji) | Perilaku siswa | Walasuji (Mengawal Perilaku Siswa Terpuji) dimaksudkan untuk mengantisipasi perilaku negative danperundungan melalui penerapan disipilin positif | berperilaku | Berperilaku baik | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Abdul Azis, S.Pd., M.Pd. / Amri, S.Ag., MM |
| 126 | SI KOIN EMAS (Sistem Komunikasi, Informasi Edukasi Masyarakat) | Belum ada sistem Komunikasi | **Si Koin Emas** (Sistem Komunikasi, Informasi, Edukasi Masyarakat) merupakan Sistem Informasi ManajemenSekolah yang berbasis Teknologi. Melalui media ini orang tua dan masyarakat mendapatkan informasi seputarpendidikan secara umum serta satuan pendidikan secara khusus | Sistem Komunikasi | Sistem Informasi | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Abdul Azis, S.Pd., M.Pd. / Amri, S.Ag., MM |
| 127 | BATU AMBAR (Membuat Penatausahaan Administrasi Menggunakan Barcode) | Belum ada barcode | **Batu Ambar** (Membuat Penaatausahaan Administrasi menggunakan *Barcode*) | Barcode | Penatausahaan | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Abdul Azis, S.Pd., M.Pd. / Amri, S.Ag., MM |
| 128 | MANTAPKI (Pemanfaatan Tanaman Penduduk di sekitar Sekolah) | Tanaman diekitar sekolah | MANTAPKI (Pemanfaatan Tanaman Penduduk Sekitar Sekolah) merupakan inovasi yang dilatarbelakangi perhatian yang mendalam akan berkurangnya | pemanfaatan tanaman | pemanfaatan lingkungan sekolah | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Marasiah, S.Pd dan Ristawadi, S.S. |
| 129 | PEMUDA BERKARYA (Pengembangan Pemasaran Usaha Kue Khas Daerah) | Belum adanya sistem pengembangan | Pemuda Berkarya (pengembangan pemasaran usaha kue khas Daerah) adalah inovasi yang dilatarbelakangi | ada sistem pemasaran | Pemasaran kue tradional | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | HJ. ANDI ARIDAH MALIK, S.Pd.M.M dan ANDI RAHMAT, SE |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | pemasaran kue khas | oleh belum Adanya sistem pengembangan pemasaran usaha kue khas Bontobahari, masihRendahnya kuaitas Kue Khas | | | | | | | |
| 130 | BAJABU TA'(Pengembangan | Pengolahan hasil bumi | BAJABUTA' merupakan inovasi yangilatarbelakangi perhatian yang mendalam akan kurangnya pemanfaatan dan pengolahan hasil bumi yang sangat melimpah di daerah sekitar SMP Negeri 35 Bulukumba, yaitu Buah Kelapa | Pengolahan | Pengolhan | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Hj. Juhaedah |
| 131 | PALLABA (Pallapi Babua) Pelapis Perut' | Mengatasi tidak sarapan | Meminimalisir peserta didik yang sakit akibat tidak sarapan,sehingga pembelajaran dapat berjalan | Saapan | dapat mengikuti kegiatan disekolah | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Hj. Rosmayani, S. Pd .,M.Pi. &Nurlaela,S.Pd |
| 132 | SATU REGU (Hari Sabtu Refleksi Guru) | Belum diprogramkan | rogram rutin kepala sekolah yang dilaksanakan setiap hari sabtu. Kegiatan ini dikemas dalam rapat rutin sekola | diprogramkan | Tindak Lanjut Program Kemendes | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Muhammad Arfin, S.Pd., M.Pd. |
| 133 | TARSIH (Duta Kebersihan Sekolah) | Belum ada model informasi | eserta didik yang menjadi model atau contoh menyampaikan informasi tentang kebersihan sekolah. | ada model informasi | informasi | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Hj Sitti Nurbaya,S.Pd |
| 134 | KAMEKAMEHA (Kami Mengaji, Kami Menghafal Al-Qur'an Juz Amma) | | Meningkatkan literasi al-Qur'an di sekolah. Agar murid-murid terbiasa membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Diharapkan dapat membentuk karakter murid yang religius. | | | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Hj Sitti Nurbaya,S.Pd |
| 135 | SI KOCAK Sikola Cakka (Sekolah Bersih) | Belum menajaga kebersihan kelas | Sosialisasi pembiasaanpeserta didik di setiap kelas, menjaga kebersihan dari sampah. | Kebersihan kelas | Kebersihan sekolah | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Eka Fausiah Azsahrah,S.Pd |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| 136 | RUMAH KACA (Rutinitas Jumat Harus Membacakan Cerita) | Belaum lancar membaca | Guru memilih secara acak siswa setiap hari jumat untuk membacakan sebuah cerita | lancar membaca | Membaca | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Hj.Hasmiati,S.Pd.,MM &Pratiwi Risnaeni, S.Pd |
| 137 | S2R (Sehat Segar ala Risma) | Mengatasi Lingkungan | Mengatasi masalah lingkungan dimana wabah virus mudah menyerang bagi yang memiliki imun tubuh rendah. | Lingkungan | Kekebalan tubuh | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Jusnaely, S.Pd |
| 138 | QuKi (Quizizz | Belum metode quiss | Pembelajaranberbasis permainan aplikasi Quizizz | Metode | Metode | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Jusnaely, S.Pd |
| 139 | Program “Sami Sar”(Satu Minggu Satu Karya) | Belum minat baca | Program yang dapat membangkitkanminat baca peserta didik serta menghasilkan | membangkitkan minat baca | Minat baca | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Jusnaely, S.Pd |
| 140 | Nilaru (Klinik layanan Guru | | Inovasi Pembelajaran Berbasis Permainan dengan menggunakan metode Treasure Hunt(mencari topik pembelajaran) | | | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Jusnaely, S.Pd |
| 141 | Trans GB (Treasure Hunt yang di aplikasikan dengan Gaya Belajar ) | | Inovasi Penyediaan layanan untuk para guru menyampaikan masalah dan kebutuhan serta tempat pelatihan untuk para guru mengikuti | | | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Jusnaely, S.Pd |
| 142 | SABU PAKET (Satu Bulan Satu Kegiatan) | | empat pelatihan untuk para guru mengikutipelatihan/bimbingan | | | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Jusnaely, S.Pd |
| 143 | CURI DAGU (Cukup Sehari Dalam Seminggu | Ketarutan berbelanja | Cukup belanja sehari dalam seminggu dengan membiasakan murid membawa bekal sehat yang dibawa dari rumah dengan menggunakan wadah yang | Berbelanja | Jajanan | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Hj. Andi Suyatmy, S.Pd.SD, Muh. Arfah, S.Pd,Ramlah Asmadi, S.Pd & Ariyanti, S.PdI |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | tidak menghasilkan sampah di sekolah. | | | | | | | |
| 144 | MACCA (Mari Membaca) | Belum da pembimbingan | Bimbingan secara khusus dan bergilir setiap kelasnya di perpustakaan untuk membaca. | ada pembimbingan | pembimbingan | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Ratih Yulvitasari, S. Pd |
| 145 | JUBAH (Jumat Ibadah) | | Siswa melakukan shalat duha setiap hari jumat. | | | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Hj Nahdiah Malik,S.Pd & Dirmawati, S.Pd |
| 146 | KURAMPAS (Kurangi Sampah Plastik) | Belum ada kesadaran siswa | meningkatkan kesadaran warga sekolah mengurangi sampah plastik | meningkatkan kesadaran siswa | Perilakusiswa | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Hj.Roslinah, S.Pd.SD.,M.M |
| 147 | PLASTIK (Pojok Baca Kelas Estetik) | Belum minat baca | Upaya terwujudnya peningkatan minat baca murid melalui daya dukung pojok baca atau sudut baca di setiap kelas. | Minat bca | minat baca | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Irman, S.Pd |
| 148 | SUKU (Sudut Baca Sahabatku) | Belum minat baca | Untuk meningkatkan minat baca siswa, dilakukan inovasi dengan menyiapkan sudut baca di setiap kelas yang dilengkapi dengan buku bacaan. | Minat bca | minat baca | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Jusniar, S.Pd |
| 149 | SEBAREN (Sekolah Berbasis Pesantren) | Belum minat baca | Model Pendidikan yang mengintegrasikan sistem Pendidikan formal dan pembelajaran pesantren. | Minat bca | minat baca | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Jusman.M,S.Pd,MM |
| 150 | GARASI SEKOLAH (Gerakan Literasi Sebelum Bel Masuk) | Belum minat baca | Meningkatkan minat baca murid setelah sampai di sekolah pada pagi hari sebelum Bel Tanda masuk Berbunyi. | Minat bca | minat baca | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | Hasrita Anwar, S.Pd |
| 151 | Mewujudkan Minat Baca (BELAJAR ) Peserta Didik | Belum ada layanan online | Layanan secara online yang disediakan untuk Pengaduan dan Kosultasi terhadap | layaan online | online | | | | SK Bupati Bulukumba, No.188.45-216 Tahun 2023 | H. Muhammad Bahri S. Pd |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | kurangnya minat baca belajar pada Anak peserta didik. | | | | | | | |
| 152 | Menjadikan Desa Batukaropa sebagai Desa Wisata Jambu Air | Belum terlaksananya Desa Wisata Buah Jambu Air | Inovasi Menjadikan Desa Batukaropa menjadi Desa Wisata Buah Jambu Air dengan memberikan Pengetahuan terhadap Petani Jambu melalui Pelatihan-pelatihan dan memberikan Sarana tempat menjual yang Layak,sehinggah dapat membantu mengembangkan usaha warga. | Hasil terlaksananya Desa Wisata Buah Jambu Air | Hasil terlaksananya Desa Wisata Buah Jambu Air | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Taufik Laenre, S.Sos |
| 153 | Merefitalisasi Lapangan Sepak Bola Menjadi Sarana Multi Fungsi | Belum tersedianya sarana multifungsi dengan merefitalisasi lapangan sepak bola | Inovasi Penyediaan sarana multi fungsi dengan merefitalisasi lapangan sepak bola selain sebagai sarana olahraga juga dapat difungsikan sebagai sarana wisata kuliner, dan pendidikan, dengan harapan dapat melahirkan generasi – genearsi berprestasi dibidang olahraga, pendidikan dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui usaha kuliner. | Tersedianya sarana multifungsi dengan merefitalisasi lapangan sepak bola | Tersedianya sarana multifungsi dengan merefitalisasi lapangan sepak bola | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Ridwan |
| 154 | (Degit) Desa Digital | Belum akurat aplikasi diplaystore | Warga mendownload aplikasi diplaystore lalu membuat akun login menggunakan NIK, lalu menunggu verifikasi yang dikirim melalui SMS. Setelah mendapat akun warga bisa masuk diaplikasi dan bisa menggunakan sesuai kebutuhannya. (Kami hanya melayani warga desa Kambuno) yakni bisa | Hasil Akurat Aplikasi diplaystore lalu membuat akun login menggunakan NIK, lalu menunggu verifikasi yang dikirim melalui SMS. | Hasil Akurat Aplikasi diplaystore lalu membuat akun login menggunakan NIK, lalu menunggu verifikasi yang dikirim melalui SMS. | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Akmal Yuhniani.M |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | mengimput data sendiri dan mencetaknya dimana saja | | | | | | | |
| 155 | Penggunaan Sistem Informasi dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital | Belum akurat penggunaan sistem informasi | Layanan Penggunaan Sistem Informasi dalam Pelayanan administrasi Masyarakat merupakan Layanan administrasi kepada masyarakat menggunakan sistem informasi yang mana sebelumnya dilakukan secara manual yang mana data masyarakat pemohon layanan masih diketik secara manual, dengan adanya penggunaan sistem informasi yang digunakan bisa menekan waktu pengerjaan karena data-data pemohon bisa diambil dari basis data kependudukan tanpa diinput secara manual. Selain itu masyarakat yang ada di tempat lain dan di luar daerah yang merupakan anggota masyarakat desa yang bersangkutan dapat mengurus persuratan dan permohonan lainnya tanpa harus mendatangi kantor desa. | Hasil akurat penggunaan sistem informasi | Hasil akurat penggunaan sistem informasi | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Jamaluddin |
| 156 | PAKDE DAMAIKAN HATI (Pemerintah Desa Datang Menyerahkan Akte Kematian) dalam rangka pemutakhiran data kependudukan khususnya warga yang meninggaldi Desa Bulo- | Belum tercapainya pemerintah desa datang menyerahkan akte kematian | Inovasi PAKDE DAMAIKAN HATI (Pemerintah Desa Datang Menyerahkan Akte Kematian) ini dilakukan penyerahan pada saat Takziah terakhir bagi yang meninggal dengan melibatkan Kepala Dusun dan Imam Dusun dan Bekerjasama dengan | Tercapainya Pemerintah Desa datang menyerahkan Akte Kematian | Tercapainya Pemerintah Desa datang menyerahkan Akte Kematian | | | √ | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Mappilawa,SE |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | Bulo Kecamatan Bulukumpa | | Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam penerbitan akte kematian masyarakat desa Bulo-Bulo, Inovasi ini merupakan replikasi/ pengembangan dari Inovasi PAKU PANRITA yang dicanangkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. | | | | | | | |
| 157 | Purwarupa Duwila ( Posyandu Wisata Lamanda ) | Menghambat capaian imunisasi di wilayah kerja | Dari Kegiatan ini kami dari tim fasilitator Puskesmas Bontotiro sangat bersyukur karena kami bisa terlibat dan menjadi salah satu garda terdepan dalam membentuk Purwarupa di Posyandu yang mana semua ide yang kita dapat hasil dari apa yang kita pelajari dari Worshop HCD ( Human Centered Design ). Dari Kegiatan ini kami dapat memberikan pengantar terkait metode HCD untuk menyelesaikan permasalahan yang menghambat capaian imunisasi di wilayah kerja UPT Puskesmas Bontotiro yang di implementasikan di Posyandu . Cakupan imunisasi dasar lengkap Puskesmas Bontotiro meningkat setelah adanya Program HCD | Meningkatnya capaian imunisasi di wilayah kerja | Meningkatnya capaian imunisasi di wilayah kerja | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Agusman,SKM,M.Kes |
| 158 | GaPuRa BuTTaKu ( Gerakan Sepuluh Rumah | Kurangnya upaya dalam memutus mata rantai | GaPuRa BuTTaKu adalah salah satu upaya yang ditempuh oleh Inovator dan Tim dalam | Mencegah penularan penyakit | Mencegah penularan penyakit | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. | Ahmad, SKM |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | untuk Bulukumba Tanpa Tuberkulosis dan Kusta) | penularan penyakit tuberculosis,kusta dan frambusia | rangka memutus mata rantai penularan penyakit Tuberculosis, Kusta dan Frambusia melalui kegiatan deteksi dini dalam lingkup kecil yaitu dalam lingkup per 10 (Sepuluh) rumah. Dengan lingkup kecil ini akan lebih efektif, efisien dalam penemuan terduga dan kasus baru serta mempermudah dalam Pengawasan Minum Obat ( PMO). | tuberculosis,kusta dan frambusia | tuberculosis,kusta dan frambusia | | | | 188.45-216 Tahun 2023 | |
| 159 | Bulukumba Integrasi Kesehatan Jiwa Terpadu (BIJANTA) | Kurangnya peningkatan cakupan pelayanan ODGJ | Inovasi BIJANTA berdampak signifikan pada peningkatan cakupan pelayanan ODGJ, di mana pada tahun 2020 kasus ODGJ yang ditemukan di lokus Kecamatan Ujung Bulu sebanyak 22 orang, pada tahun 2021 mengalami peningkatan cakupan sebanyak 60 orang, dan pada tahun 2022 menjadi 84 orang. Kualitas Layanan ODGJ menjadi lebih efektif dan efisien serta berkurangnya kasus ODGJ yang terpasung, meningkatnya peran keluarga dalam merawat dan memantau minum obat | Peningkatan cakupan pelayanan ODGJ | Peningkatan cakupan pelayanan ODGJ | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Arhan, S.Kep.,Ns., M.Kep |
| 160 | Aksi Masyarakat Deteksi dan Intervensi Kesehatan Jiwa (ASMARA DI JIWA) | Kurangnya pencatatan pelaporan dan pemantauan | Pencatatan pelaporan dan pemantauan dan evaluasi<br>- Pentatatan dan pelaoran<br>- Kordinasi stake holder Kordinasi berkala | Meningkatkan Pencatatan pelaporan dan pemantauan dan evaluasi | Meningkatkan Pencatatan pelaporan dan pemantauan dan evaluasi | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Arhan, S.Kep.,Ns., M.Kep |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| 161 | Bidan Peduli Dan Lindungi Ibu Hamil (BIDAN PELANGI) | Kurangnya pencegahan angka kematian ibu dan angka kematian bayi | Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) masih kerap terjadi untuk itu kegiatan inovasi bidan Puskesmas Caile adalah BIDAN PELANGI dalam artiannya bidan peduli dan lindungi ibu hamil, sebagai bentuk sayang pada ibu hamil merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. | Meningkatkan pencegahan angka kematian ibu dan angka kematian bayi | Meningkatkan pencegahan angka kematian ibu dan angka kematian bayi | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Susdiana, Amd.Keb |
| 162 | Pantau Langsung Minum Obat Kecacingan (PALANG MUKA) | Kurangnya pencegahan anak menderita kecacingan | Inovasi pantau langsung minum obat kecacingan (PALANG MUKA). Penyakit kecacingan merupakan salah satu penyakit terabaikan terkadang belum dianggap penting bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan. Namun dampak yang ditimbulkan oleh kondisi dimana anak sekolah yang sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan dapat terhambat apabila anak menderita kecacingan | Meningkatkan pencegahan anak penderita kecacingan | Meningkatkan pencegahan anak penderita kecacingan | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Hj. Masnah, S.Kep, Ns |
| 163 | Konseling ASI dan Perawatan Payudara (KASI PEPAYA) | Kurangnya motivasi peningkatan cakupan ASI eksklusif | Angka persalinan relatif banyak di Puskesmas Caile sehingga memotivasi dan mengedukasi ibu-ibu baru dalam rangka meningkatkan cakupan ASI eksklusif diwilayah Puskesmas. Kegiatan diawali dengan ibu hamil | Meningkatkan Motivasi ibu-ibu baru dalam meningkatkan cakupan ASI eksklusif diwilayah Puskesmas | Meningkatkan Motivasi ibu-ibu baru dalam meningkatkan cakupan ASI eksklusif diwilayah Puskesmas | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Marlina, SKM |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | mendaftarkan diri melalui hotline WA Puskesmas Caile kemudian petugas memberikan jadwal tersedia. Ibu hamil datang ke Puskesmas sesuai jadwal pemeriksaan kehamilan terlebih dahulu setelahnya akan mendapatkan konseling ASI dan perawatan perawatan dari petugas gizi. | | | | | | | |
| 164 | DIOPER LAB (Digitalisasi Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium) | Kurangnya digitalisasi pelaporan hasil pemeriksaan | Dengan inovasi digitalisasi pelaporan hasil pemeriksaan akan lebih memudahkan mencari data, mengolah data, merakapitulasi data yang secara berkala dibutuhkan oleh puskesmas, dengan begitu data tersebut tidak lagi ditulis secara manual pada buku | Meningkatkan digitalisasi pelaporan hasil pemeriksaan | Meningkatkan digitalisasi pelaporan hasil pemeriksaan | | | √ | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Regina Andini Maulidya, S.Tr.Kes |
| 165 | KASITAU (Keluarga Siap Pantau) | Kurangnya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan status gizi | Merupakan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan status gizi pendek dan sangat pendek serta pemanfaatan aplikasi primaku dan pojok skrining untuk mendeteksi status gizi pendek dan sangat pendek | Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan status gizi | Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan status gizi | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | dr. NURUL HIDAYAH. R |
| 166 | MASSEDI (Mari Cegah Stunting Sejak Dini) | Kurangnya menggunakan metode door to door untuk pencapaian posyandu | Merupakan inovasi dengan melibatkan kader-kader kesehatan di desa serta petugas puskesmas melakukan sweeping ibu hamil, bayi dan balita secara rutin menggunakan metode door to door dimana kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pencapaian | Meningkatkan metode door to door untuk pencapaian sasaran kegiatan posyandu dimana tidak semua warga secara rutin datang membawa anak | Meningkatkan metode door to door untuk pencapaian sasaran kegiatan posyandu dimana tidak semua warga secara rutin datang membawa anak | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | ANDI MUHAMMAD HAERUL, SKM |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | sasaran kegiatan posyandu dimana tidak semua warga secara rutin datang membawa anak bayi/balita mereka ke posyandu, sehingga petugas dapat melakukan pelacakan secara keseluruhan terhadap seluruh kelompok umur bayi-balita serta ibu hamil dalan pencegahan dan penanggulangan stunting | bayi/balita mereka ke posyandu, | bayi/balita mereka ke posyandu, | | | | | |
| 167 | KADAR MANIS (Peningkatan Kesadaran Kesehatan Gigi dan Mulut pada Ibu Hamil di Puskesmas) | Kurangnya alur pelayanan poli gigi untuk ibu hamil | 1. Membuat alur pelayanan poli gigi untuk ibu hamil<br>2. Menyiapkan register dan kartu kontrol kesehatan gigi dan mulut untuk ibu hamil<br>3. Membuat leaflet tentang "Pentingnya ibu hamil menjaga kesehatan gigi dan mulut"<br>4. Melakukan pemeriksaan gigi dan mulut pada ibu hamil<br>5. Melakukan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil | Meningkatkan Alur pelayanan poli gigi untuk ibu hamil | Meningkatkan Alur pelayanan poli gigi untuk ibu hamil | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Jindasari Said, S.ST dan dr. ANDI FIRJATULLAH EL FIRMAN |
| 168 | PILAR BERSEPAKAT (Penggunaan Media Sosial Instagram dan Facebook sebagai Media Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat) | Kurangnya mempublikasikan informasi ke media sosial | 1. Membuat alur pengiriman dokumentasi media sosial Puskesmas<br>2. Membuat SK penanggungjawab masing-masing program<br>3. Menyiapkan link Google Drive<br>4. Mempublikasikan Informasi Ke Media sosial | Meningkatkan publikasi informasi ke media sosial | Meningkatkan publikasi informasi ke media sosial | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Jindasari Said, S.ST dan Saripa,S.K.M |
| 169 | PIKNIK SANTAI (Pojok Konseling Klinik Sanitasi) | Kurangnya alur pelayanan klinik sanitasi | 1. Membuat Alur Pelayanan Klinik Sanitasi<br>2. Membuat Perencanaan | Meningkatkan alur pelayanan klinik sanitasi | Meningkatkan alur pelayanan klinik sanitasi | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. | Jindasari Said, S.ST dan Intan Rahmawati, SKM |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | Klinik Sanitasi<br>3. Melakukan Sosialisasi Alur Pelayanan Klinik Sanitasi<br>4. Melakukan Pelayanan Klinik Sanitasi<br>5. Melakukan Evaluasi Pelayanan Klinik Sanitasi | | | | | | 188.45-216 Tahun 2023 | |
| 170 | PESAN GANAS (Penyuluhan dan pemeriksaan gigi geligi anak usia sekolah di wilayah UPT Puskesmas Ujung Loe) | Kurangnya koordinasi dengan pihak sekolah terkait penyuluhan kesehatan gigi | 1. Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait kegiatan yang akan dilakukan<br>2. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi<br>3. Melakukan pemeriksaan keadaan gigi geligi anak usia sekolah untuk mengetahui kondisi keadaan gigi dan mulut<br>4. Melakukan rujukan kepada siswa yang memiliki masalah kesehatan gigi | Meningkatkan Koordinasi dengan pihak sekolah terkait penyuluhan kesehatan gigi | Meningkatkan Koordinasi dengan pihak sekolah terkait penyuluhan kesehatan gigi | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Jindasari Said, S.ST dan Ika Rista Mutmainna, A.Md.Kes |
| 171 | PERI SURVEILANS (Optimalisasi Pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Melalui Pembentukan Jaringan Surveilans Diwilayah UPT Puskesmas Ujung Loe) | Kurangnya sosialisasi dengan petugas poskesdes dan pustu | P2 UPDATE (Melakukan sosialisasi dengan petugas Poskesdes dan Pustu)<br>2. Surveillance Squad (Melakukan pembetukan jaringan surveilans)<br>3. Weekly Report (Perekapan dan pelaporan mingguan)<br>4. Monev SKDR (Evaluasi kegiatan Pelaporan KDR) | Meningkatkan P2 update sosialisasi dengan petugas poskesdes dan pustu | Meningkatkan P2 update sosialisasi dengan petugas poskesdes dan pustu | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Jindasari Said, S.ST dan Rahmi, SKM |
| 172 | PERI GIGI UTAMA (Pentingnya upaya preventif pada perawatan gigi anak di wilayah puskesmas Ujungloe) | Kurangnya edukasi kepada orangtua pasien anak mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi anak | 1. Melakukan edukasi kepada orangtua pasien anak mengenai pentingnya menjaga Kesehatan gigi anak.<br>2. Melakukan penyuluhan tentang masa tanggal dan erupsi gigi<br>3. Mengenalkan keanak alat | Meningkatkan edukasi kepada orangtua pasien anak mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi anak | Meningkatkan edukasi kepada orangtua pasien anak mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi anak | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Jindasari Said, S.ST dan drg. Fitria Sultan |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | alat pemeriksaan gigi agar menghilangkan rasa takut.<br>4. Melakukan pemeriksaan keadaan gigi geligi anak untuk mengetahui kondisi keadaan gigi dan mulut. | | | | | | | |
| 173 | EPIN DPT (Edukasi Pemberian Vaksin Dpt) | Kurangnya edukasi pemberian vaksin DPT pada bayi umur 9 bulan | Inovasi berupa edukasi pemberian vaksin DPT (EPIN DPT) pada bayi umur 9 bulan dengan menggunakan perangkat berupa poster, flyer dan vidio agar menarik minat ibu balita yang diharapkan dapat menjadi pengetahuan di masyarakat khususnya di wilayah puskesmas lembanna | Meningkatkan edukasi pemberian vaksin DPT (EPIN DPT) pada bayi umur 9 bulan dengan menggunakan perangkat berupa poster, flyer dan vidio | Meningkatkan edukasi pemberian vaksin DPT (EPIN DPT) pada bayi umur 9 bulan dengan menggunakan perangkat berupa poster, flyer dan vidio | | | √ | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Sudirman SKM,S.Kep,Ns,M.Kes |
| 174 | OPTIMIS (OPTImalisasi penyaMpaian Informasi tentang penderita hipertenSi) | Kurangnya pengoptimalisasian penyampaian informasi tentang Hipertensi pada masyarakat | Gagasan kreatif untuk penyelesaian isu di atas kaitkan dengan penerapan manjemen program di puskesmas dimana perlunya pengoptimalisasian penyampaian informasi tentang Hipertensi pada masyarakat dalam membantu mengatasi masalah-masalah yang muncul, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut maka perlu memberikan gagasan pemecahan dengan " OPTIMIS (Optimalisasi penyampaian informasi tentang Hipertensi pada pasien di ruang tunggu pasien Puskesmas Kajang)" | Meningkatkan pengoptimalisasian penyampaian informasi tentang Hipertensi pada masyarakat | Meningkatkan pengoptimalisasian penyampaian informasi tentang Hipertensi pada masyarakat | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | SIRAJUDDIN, SKM, M.Kes |
| 175 | TAMAN BUSA UNTUK ELSA (Taman Buah Dan | Kurangnya penyiapan bibit, | Kegiatan inovasi ini diawali dengan penyiapan bibit, | Meningkatkan penyiapan bibit, | Meningkatkan penyiapan bibit, | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. | PUTRINI, SKM |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | Sayur Untuk Keluarga Sehat) | pembuatan media tanam dan menyiapkan berbagai jenis tanaman sayur dan buah yang akan ditanam serta membuat pupuk kandang untuk menyuburkan tanaman. | pembuatan media tanam dan menyiapkan berbagai jenis tanaman sayur dan buah yang akan ditanam serta membuat pupuk kandang untuk menyuburkan tanaman. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat diterapkannya GERMAS dan salah satu indicator PHBS (Makan buah dan sayur setiap hari), serta mengurangi pengeluaran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. | pembuatan media tanam dan menyiapkan berbagai jenis tanaman sayur dan buah yang akan ditanam serta membuat pupuk kandang untuk menyuburkan tanaman. | pembuatan media tanam dan menyiapkan berbagai jenis tanaman sayur dan buah yang akan ditanam serta membuat pupuk kandang untuk menyuburkan tanaman. | | | | 188.45-216 Tahun 2023 | |
| 176 | Publikasi Informasi Kesehatan Menggunakan Display Screen Ruang Tunggu Puskesmas | Kurangnya display screen yang ada di Ruang Tunggu Puskesmas ini | Informasi Kesehatan disajikan dalam bentuk video dan diputar secara terus menerus di display screen ruang tunggu Puskesmas. Video akan diupdate secara continue sehingga informasi yang diberikan sesuai dengan current issue kesehatan. Dengan pemanfaatan display screen yang ada di Ruang Tunggu Puskesmas ini maka secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku sehat. | Meningkatkan display screen yang ada di Ruang Tunggu Puskesmas ini maka secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku sehat. | Meningkatkan display screen yang ada di Ruang Tunggu Puskesmas ini maka secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku sehat. | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | ANDI ISMAINAR BAHTIAR, S.Kep., Ns |
| 177 | SEHARI USIL (Sehat Dan Ceria Di Usia Lanjut) | kurangnya minat ke Puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya dan masih kurangnya | Inovasi Sehat Dan Ceria Di Usia Lanjut (SEHARI USIL) sesuai dengan kebutuhan Lansia yang dimana Usila masih merasa malas ke Puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya | Meningkatkan kebutuhan Lansia yang dimana Usila masih merasa malas ke Puskesmas untuk | Meningkatkan kebutuhan Lansia yang dimana Usila masih merasa malas ke Puskesmas untuk | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Dr. BENAWA |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | pengetahuan tentang penyakit | dan masih kurangnya pengetahuan tentang penyakit degenaratif dimana usila menginginkan konsultasi pskikologis secara langsung dengan dokter. | memeriksakan kesehatannya dan masih kurangnya pengetahuan tentang penyakit | memeriksakan kesehatannya dan masih kurangnya pengetahuan tentang penyakit | | | | | |
| 178 | GEMA SEGAR (Gerakan Masyarakat Sehat Bugar) | Kurangnya hasil jumlah kunjungan penyakit hipertensi dan diabetes | Inovasi masyarakat wajib olah raga, dicetuskan berdasar hasil jumlah kunjungan penyakit hipertensi dan Diabetes melitus sangat tinggi sehingga terasa wajib untuk dilakukan edukasi tentang pentingnya berolahraga dengan melibatkan lintas sektor pemerintahan (Kecamatan, koramil, Polsek, Kel/Desa ) dalam hal ini berbentuk edaran masyarakat wajib sehat dengan berolah raga. | Meningkatkan jumlah kunjungan penyakit hipertensi dan Diabetes melitus sangat tinggi sehingga terasa wajib untuk dilakukan edukasi tentang pentingnya berolahraga | Meningkatkan jumlah kunjungan penyakit hipertensi dan Diabetes melitus sangat tinggi sehingga terasa wajib untuk dilakukan edukasi tentang pentingnya berolahraga | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | ASGOW SYAM |
| 179 | EPEK PASAR" Eliminasi PEnyakit Kecacingan PAda uSia Anak pelajaR (SD) | Kurangnya Eliminasi PEnyakit Kecacingan PAda uSia Anak pelajaR (SD) | Inovasi "EPEK PASAR" (Eliminasi PEnyakit Kecacingan PAda uSia Anak pelajaR (SD) merupakan inovasi yang perlu diterapkan dan diberlakukan di masyarakat khususnya pada usia anak sekolah dasar, karena 9 dari 20 siswa masi terinfeksi penyakit kecacingan, sehingga perlu perhatian khusus untuk membantu mengobati dan menhindarkan siswa dari penyakit kecacingan | Meningkatkan Eliminasi PEnyakit Kecacingan PAda uSia Anak pelajaR (SD) | Meningkatkan Eliminasi PEnyakit Kecacingan PAda uSia Anak pelajaR (SD) | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | ASMAL ARDIANTO, S.S.T |
| 180 | FIARA (Festival Imunisasi Anak Rilau Ale) | Kurang melibatkan peran petugas kesehatan | FIARA ini dilaksanakan dengan melibatkan peran petugas kesehatan , pemerintah | Meningkatkan peran petugas kesehatan , | Meningkatkan peran petugas kesehatan , | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. | YUNITA SRILAWATI KARTIKA DEWI, SKM |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | kecamatan/desa, dan kader kesehatan dalam pelaksanaan kegiatannya. Bentuk pelaksanaan kegiatan antara lain pemberian reward, penyuluhan tentang imunisasi,dan lomba bertema imunisasi bagi kader dan balita yang disertai dengan pemberian hadiah bagi peserta lomba. | pemerintah kecamatan/desa, dan kader kesehatan dalam pelaksanaan kegiatannya. | pemerintah kecamatan/desa, dan kader kesehatan dalam pelaksanaan kegiatannya. | | | | 188.45-216 Tahun 2023 | |
| 181 | TABE' MA (Tadarus sebelum Belajar di Hari Jumat) | Kurangnya murid menghafal surah surah pendek | Murid-murid menghafal surah surah pendek dan tadarus sebelum belajar setiap jumat agar literasi baca tulis memiliki ruang di pagi hari. | Meningkatkan murid-murid menghafal surah pendek | Meningkatkan murid-murid menghafal surah pendek | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Abbas,S.Pd |
| 182 | LENTERA (Kaleng Literasi) | Kurangnya minat Baca | Mengajak murid yang tidak mahir membaca untuk memilih kartu yang berisi gambar dan tulisan dalam kaleng kemudian mengamati dan memperhatikan gambar serta tulisan di belakang gambar. | Meningkatkan murid yang tidak mahir membaca untuk memilih kartu yang berisi gambar | Meningkatkan murid yang tidak mahir membaca untuk memilih kartu yang berisi gambar | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Abbas,S.Pd |
| 183 | CATUR (Baca Tulis Cerita Gambar) | Kurangnya Upaya sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid | Upaya sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar bisa meningkatkan literasi melalui ”CATUR”. | Meningkatkan Upaya sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar bisa meningkatkan literasi melalui ”CATUR”. | Meningkatkan Upaya sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar bisa meningkatkan literasi melalui ”CATUR”. | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Abbas,S.Pd |
| 184 | CARITA (Baca Tulis Cerita) | Kurangnya kebutuhan murid terutama dalam hal literasi agar murid bisa berpikir kritis . | Memenuhi kebutuhan murid terutama dalam hal literasi agar murid bisa berpikir kritis . | Meningkatkan kebutuhan murid terutama dalam hal literasi agar murid bisa berpikir kritis . | Meningkatkan kebutuhan murid terutama dalam hal literasi agar murid bisa berpikir kritis . | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Abbas,S.Pd |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| 185 | GEDHUFAN (Gemar Salat \Dhuha dan Hafalan) | Kurangnya minat baca | Sarana dan prasana meningkatkan minat baca, proses ketepatan waktu pada saat salat serta meningkatkan minat hafalan murid. | meningkatkan minat baca, proses ketepatan waktu pada saat salat serta meningkatkan minat hafalan murid. | meningkatkan minat baca, proses ketepatan waktu pada saat salat serta meningkatkan minat hafalan murid. | | | √ | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Hasni,S.Pd |
| 186 | SIDAK (Validasi Data Dapodik) | Kurangnya data siswa yang terkoneksi dengan dukcapil | Inovasi data siswa yang terkoneksi dengan Dukcapil adalah upaya yang dilakukan mengurangi data siswa Dapodik yang tidak singkron. | Meningkatkan data siswa yang terkoneksi dengan dukcapil | Meningkatkan data siswa yang terkoneksi dengan dukcapil | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Halija, S.Pd.MM & Ramlia, S.Pd |
| 187 | POCAKTIK (Pojok Baca Kelas Estetik) | Kurangnya minat baca | Memilih satu buku fiksi kemudian masing-masing peserta didik Menamatkan buku tersebut selama kurung waktu 1 minggu. | Meningkatkan membaca buku fiksi | Meningkatkan membaca buku fiksi | | | √ | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Hj.Rosmala,S.Pd.SD |
| 188 | TERIK (Literasi Asyik) | Kurangnya kegiatan yang dilakukan murid sebelum/setelah melakukan pembelajaran | Terik (Literasi Asyik) adalah kegiatan yang dilakukan murid sebelum / setelah melakukan pembelajaran melakukan berbagai bentuk literasi. | Meningkatkan kegiatan yang dilakukan murid sebelum/setelah melakukan pembelajaran | Meningkatkan kegiatan yang dilakukan murid sebelum/setelah melakukan pembelajaran | | | √ | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Syarifuddin,S.Pd.,M.Si |
| 189 | TASPEN DATA (Tasbih Peluntur Noda Hitam) | Kurangnya karakter murid dalam hal Keimanan dan Ketaqwaan | Menumbuhkan karakter murid dalam hal Keimanan dan Ketaqwaan, kegiatan ini dilakukan dengan menuliskan hal baik atau hal buruk yang dilakukan hari ini lalu memasukkan ke dalam toples. | Meningkatkan karakter murid dalam hal Keimanan dan Ketaqwaan | Meningkatkan karakter murid dalam hal Keimanan dan Ketaqwaan | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Syarifuddin,S.Pd.,M.Si |
| 190 | SAKA EMBA (Satu Kata Empat Bahasa) | Kurangnya murid menguasai kosa kata dalam bahasa indonesia | Setiap murid menuliskan kosa kata dalam bahasa Indonesia, kemudian mencari bahasa bugis/Makassar, Inggris dan | Meningkatkan murid menguasai kosa kata dalam bahasa indonesia | Meningkatkan murid menguasai kosa kata dalam bahasa indonesia | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Syarifuddin,S.Pd.,M.Si |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | Arab atau bahasa asing untuk kata tersebut. | | | | | | | |
| 191 | SISE'BU (Siap Selalu Dengan Buku). | Kurang berkunjung keperpustakaan sekolah untuk memilih satu buku yang tepat atau yang menarik | Berkunjung keperpustakaan sekolah untuk memilih satu buku yang tepat atau yang menarik untuk dibacanya sampai batas waktu yang ditentukan. setelah itu dianjurkan untuk selalu membawa buku untuk dibaca. | meningkatkan berkunjung keperpustakaan sekolah untuk memilih satu buku yang tepat atau yang menarik untuk dibacanya sampai batas waktu yang ditentukan. | meningkatkan berkunjung keperpustakaan sekolah untuk memilih satu buku yang tepat atau yang menarik untuk dibacanya sampai batas waktu yang ditentukan. | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Bahrir |
| 192 | BIASBAKU (Membiasakan Baca Buku) | Kurangnya minat baca peserta didik disekolah | Inovasi BIAS BAKU (Membiasakan baca buku) adalah upaya untuk menumbuhkan minat bacapeserta didik di sekolah, | Meningkatkan minat baca peserta didik disekolah | Meningkatkan minat baca peserta didik disekolah | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Sitti Isramiah, S. Pd |
| 193 | PAMESIN ASAM PEKSPA (Pemanfaatan Media Spiritual Kit Dan Aplikasi Sinc Dalam Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Pasien) | Kurangnya konsep desain media edukasi (poster dinding yang berisikan doa kesembuhan, tata cara tayammum, dan tata cara sholat baring/duduk), | Kegiatan inovasi ini diawali dengan membuat konsep desain media edukasi (poster dinding yang berisikan doa kesembuhan, tata cara tayammum, dan tata cara sholat baring/duduk), kemudian dilakukan edukasi dan sosialisasi penggunaan spiritual kit tersebut serta aplikasi SINC (Spiritual Islamic Nursing Care) dalam memberikan asuhan keperawatan spiritual kepada perawat yang bertugas di Ruang Rawat Inap Puskesmas Herlang. | Meningkatkan konsep desain media edukasi (poster dinding yang berisikan doa kesembuhan, tata cara tayammum, dan tata cara sholat baring/duduk), | Meningkatkan konsep desain media edukasi (poster dinding yang berisikan doa kesembuhan, tata cara tayammum, dan tata cara sholat baring/duduk), | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | A. ALIMIN NOSTIB, S.Kep, Ns, M.Kes |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| 194 | KELABAKAN MAS (Kelas Bapak-Bapak Andalan Puskesmas) | Kurangnya berkoordinasi dengan kepala desa untuk menyampaikan permasalahan yang ada | Inovasi Kelas Bapak-Bapak Andalan Puskesmas, dimulai dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk menyampaikan permasalahan yang ada beserta dengan latar belakangnya dan kemudian menyampaikan ide atau inovasi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. | Meningkatkan koordinasi dengan kepala desa untuk menyampaikan permasalahan yang ada | Meningkatkan koordinasi dengan kepala desa untuk menyampaikan permasalahan yang ada | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | ANDI NUR SRIMULYA WIDI, S.Tr.Kes |
| 195 | RINDU BUMIL (alaRm kalender pengINgat jaDwal kUnjungan iBU haMIL) | Kurangnya layanan alarm kalender ibu hamil | Inovasi Penyediaan layanan alarm kalender dimulai dengan melakukan pendataan terhadap semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja puskesmas. Kemudian mengolah data hamil tersebut dengan mengelompokkan ibu hamil berdasarkan usia kehamilan dan kunjungan keberapa selama masa kehamilannya. | Meningkatkan layanan alarm kalender dimulai dengan melakukan pendataan terhadap semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja puskesmas. | Meningkatkan layanan alarm kalender dimulai dengan melakukan pendataan terhadap semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja puskesmas. | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | dr. DONNA MARISSA & Khaerunnisa', SKM |
| 196 | BANK Data GOLDA dan Pendonor Desa | Kurangnya pelayanan kegiatan penyiapan pendonor bagi ibu hamil | Inovasi Bank Data Golda dan Pendonor desa merupakan inovasi UPT Puskesmas salassae berupah peningkatan pelayanan dari kegiatan penyiapan pendonor bagi Ibu hamil sebanyak 4 orang, dengan melakukan pemeriksaan golongan darah secara masif ke desa-desa sehingga setiap masyarakat desa dapat mengetahui golongan darahnya kemudian untuk orang-orang yang | Meningkatkan pelayanan kegiatan penyiapan pendonor bagi ibu hamil | Meningkatkan pelayanan kegiatan penyiapan pendonor bagi ibu hamil | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | A.M SURIYADI,M.A S.KM. |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | memenuhi syarat untuk melakukan donor darah akan disiapkan sebagai calon pendonor bagi orang yang membutuhkan baik Ibu hamil maupun lainnya dengan dilakukan screening pemeriksaan kesehatan mulai dari Berat badan, tekanan darah , penyakit menular dan cek golongan darah setelah memenuhi syarat dilakukan penandatanganan form persetujuan kesediaan mendonor jika diminta kemudian datanya disimpan dalam bentuk Drive yang dapat diakses oleh pihak puskesmas dan UTD RSUD Dg.Raja Ketika Dibutuhkan | | | | | | | |
| 197 | DASTING (Dapur Stunting) | Kurangnya pencegahan angka stunting | Inovasi DASTING (Dapur Stunting) merupakan inovasi untuk menurunkan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Balibo. | Meningkatkan pencegahan untuk menurunkan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Balibo. | Meningkatkan pencegahan untuk menurunkan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Balibo. | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | MEGAWATI, SKM |
| 198 | KONTER PKM (Konsultasi Terpadu Penyakit Tidak Menular) | Kurangnya konsultasi terpadu penyakit tidak menular | Inovasi Konsultasi Terpadu Penyakit Tidak Menular merupakan tempat khusus dalam penyediaan layanan Konsultasi, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan Sesuai Indikasi penyakit bagi sasaran usia > 15 tahun, Tim posbindu PTM turun kemasyarakat dengan pelayanan prima yang terdiri | Meningkatkan konsultasi terpadu penyakit tidak menular | Meningkatkan konsultasi terpadu penyakit tidak menular | | | √ | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | HISBAIR S.KEP, NS, M.KES & SARWENDI SAIN, S.KEP, NS |

| No | Nama Inovasi | Latarbelakang | Deskripsi Penyusunan | Outcome | Output | Kategori Inovasi | | | Regulasi | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Baru | Modif | Replik | | |
| | | | dari multi disiplin profesi yang turun langsung ke masyarakat. | | | | | | | |
| 199 | MY GOLDA (Cek dan deteksi golongan darah melalui direct check system dan aplikasi My Golda) | kurangnya tim inovasi membuat pos cek golda | Tim Inovasi akan membuat Pos Cek Golda yang tersebar di Desa/Kelurahan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang sifatnya gratis. Setiap masyarakat yang sudah cek Golda akan mendapat kartu (card detection). Card Detection adalah kartu yang memudahkan Tim inovasi untuk mendeteksi Status Golda karena sudah dilengkapi barcode dan tercacat di sistem dan di input di aplikasi My golda | Meningkatkan Tim Inovasi akan membuat Pos Cek Golda yang tersebar di Desa/Kelurahan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang sifatnya gratis. | Meningkatkan Tim Inovasi akan membuat Pos Cek Golda yang tersebar di Desa/Kelurahan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang sifatnya gratis. | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | BAHARUDDIN, SKM.,M.kes & Nurilma, A.Md.keb |
| 200 | POSE DADAR (Program Sejuta Pendonor Darah) | Kurangnya Program Sejuta Pendonor Darah | POSE DADAR (Program Sejuta Pendonor Darah)<br>Program Sejuta Pendonor Darah merupakan program inovasi di UPT Pusksamas Manyampa yang bertujuan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan darah melalui calon pendonor yang telah diperiksa golongan darahnya | Meningkatkan Program Sejuta Pendonor Darah | Meningkatkan Program Sejuta Pendonor Darah | √ | | | SK Bupati Bulukumba No. 188.45-216 Tahun 2023 | Sukiah Syam,S.Kep.Ns & Muhammad Syahrul Ramadhan, SKM |

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

## 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mendorong pencapaian program prioritas dalam rangka mewujudkan target-target pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2024 disusun dengan mengacu pada kebijakan ekonomi yang termuat dalam dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025.

Kerangka ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2024 yang didalamnya juga memuat kerangka pendanaan tahun yang sama, merupakan gambaran tentang perkiraan keadaan ekonomi Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, perkiraan tersebut didasari pada perekonomian global, nasional dan regional.

Dalam rangka memenuhi target kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, gambaran tentang kondisi perekonomian tahun bersangkutan menjadi bagian penting untuk merumuskan kerangka pendanaan yang selanjutnya akan dituangkan pada KUA dan PPAS Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024. Kerangka pendanaan tersebut menjadi basis dalam pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien.

Selain itu, kebijakan ekonomi Kabupaten Bulukumba diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama dengan mewujudkan tujuan bersama dari kebijakan pembangunan dengan berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar penduduk serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan dari arah kebijakan ekonomi makro Kabupaten Bulukumba tahun 2024 maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap semua program yang telah dan sedang dilaksanakan untuk kemudian dilakukan penajaman terhadap prioritas pembangunan daerah.
2. Menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN.
3. Mengupayakan melahirkan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan dengan tetap menyelaraskan dengan isu dan permasalahan yang muncul pada setiap bidang.
4. Terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta menumbuhkan iklim investasi dengan menjamin adanya kepastian hukum bagi investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Bulukumba serta mendorong *high-cost economy*.

### 3.1.1 Prospek Dan Tantangan Perekonomian Daerah

#### 3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Bulukumba pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Penerapan adaptasi Kebiasaan Baru disertai dengan upaya pemerintah dalam menggerakkan kembali roda perekonomian diperkirakan akan

meningkatkan perbaikan konsumsi rumah tangga serta investasi yang mulai terakselerasi mendorong tren pemulihan ekonomi.

Letak Bulukumba yang strategis dengan beberapa kelebihan yang dimiliki secara struktural dimana Bulukumba merupakan episentrum perekonomian Sulampua, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Bulukumba rekatif stabil dibandingkan dengan perekonomian sulampua. Dalam kaitan itu Bulukumba dapat mengambil langkah langkah strategis untuk menjadi basis perekonomian utama di Kawasan Provinsi Sulawesi Selatan.

Selaras dengan tema pembangunan Tahun 2024, Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuktumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri,pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Ada tiga rasionalitas dalam upaya mewujudkan hilirisasi SDA. Dalam jangka pendek, hilirisasi SDA bertujuan memperbaiki neraca perdagangan. Selama ini, neraca perdagangan memang kedodoran. Meskipun kaya SDA, namun industri domestik masih sangat ekstraktif. Produk SDA langsung diekspor sebagai komoditas nilai-nilai tambah- membuat tak mampu mendongkrak nilai ekspor. Ironisnya, pengolahan bahan mentah dari SDA kemudian diimpor dalam bentuk barang jadi. Dampak lanjutannya menghasilkan devisa minimalis. Konsekuensinya, Bulukumba terus mengalami defisit transaksi berjalan.

Dalam jangka menengah. Hilirisasi sangat penting untuk mewujudkan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menciptakan berbagai industri pengolahan bahan baku yang melimpah. Selain akan menciptakan nilai tambah produk,multiplier effect-nya akan menciptakan berbagai peluang usaha lainnya.Mendatangkan investasi, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan meningkatkan pendapatan. Pada akhirnya hilirisasi bisa menjadi pintu masuk terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai kawasan di Sulawesi selatan.

Dalam jangka panjang, hilirisasi SDA akan membawa Bulukumba menjadi Kawasan industri, menjadi daerah eksportir- produsen dengan produk akhir bernilai tinggi, dan berkembang menjadi daerah industry maju di bidang pertanian, demikian pula dengan perikanan, perkebunan, pertambangan dan industry berbasis SDA lainnya.

Inovasi dan hilirisasi bidamg pertanian sangat diperlukan mengingat pandemicmenjadi momentum meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk lokal. Hilirisasi pertanian bersifat renewable lebih muda untuk dapat *sustainable* dan *environmental friendly* serta dapat mendukung kampanye *global green economy*.

#### 3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Global

Perang menghadapi pandemi virus belum usai. Hampir seluruh negara,termasuk di Asia dan Asia Tenggara, harus menghadapi tantangan yang sama, di waktu yang bersamaan pula. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Boleh jadi, peperangan melawan pandemi virus belum akan tuntas dalam waktu cepat. Kalaupun, mudah-mudahan, bisa secepatnya tertangani lantaran keberadaan vaksin semakin nyata, setiap negara masih harus menghadapi tantangan pemulihan ekonomi yang rontok sebagai konsekuensi penanganan pandemi.

Setelah berbulan-bulan diberlakukan pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi,banyak negara mulai melakukan upaya menyeimbangkan kebijakan antara dua persoalan yang sesungguhnya bukan pilihan. Banyak negara kini mulai berupaya menghindari keruntuhan total perekonomian sekaligus mencegah meluasnya atau munculnya gelombang barupandemi, plus distribusi vaksin. Keseimbangan pilihan tersebut

jelas bukan perkara mudah. Tetapi, setidaknya, celah-celah pemulihan ekonomi ditengarai mulai terlihat.

Prospek perekonomian global 2023 diramalkan bergerak ke arah stagflasi, yakni perekonomian yang stagnan dibarengi inflasi tinggi. Invasi militer Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 telah mengganggu rantai pasokan global yang mendorong kenaikan harga di sektor energi dan pangan secara ekstrim. Itulah yang menjadi faktor utama lonjakan inflasi global yang mendorong bank-bank sentral serempak menaikkan suku bunga acuan secara agresif untuk meredamnya. Tak heran jika sentimen negatif terhadap prospek ekonomi global terus mengemuka, yang membuat para pengambil kebijakan dan pucuk pimpinan dunia usaha di muka bumi terus gelisah.

Mereka melihat konflik geopolitik dan inflasi sebagai ancaman ekonomi utama yang paling mendesak selama setahun ke depan, bahkan ke tahun depannya lagi.

Di Eropa, risiko dari harga energi yang fluktuatif telah nyata, menyusul risiko inflasi dan ketidakstabilan geopolitik. Krisis energi telah mendorong inflasi melonjak hingga tembus 10% yang memaksa Bank Sentral Eropa (ECB) menaikkan suku bunga acuan (kini di level 2,5%), diikuti bank sentral Inggris (kini di level 3,5%), untuk segera melandaikan inflasi. ECB diperkirakan akan mengerek suku bunga ke level puncak sebesar 3% pada Mei 2023.

Bayang-bayang resesi ekonomi di Eropa tercermin dari memburuknya perekonomian Jerman dan Inggris. Kenaikan luar biasa harga gas sebagai sumber energi utama telah memiskinkan banyak warga Jerman dan Inggris sehingga menggerus tingkat konsumsi. Pada gilirannya, hal ini menekan pertumbuhan ekonomi. Di Jerman, produk domestik bruto (PDB) 2023 bakal menyusut menjadi sebesar 1%.

Dengan kenaikan suku bunga acuan yang agresif, inflasi memang melandai. Namun, langkah ini dilematis, karena daya dorong ke pertumbuhan ekonomi pupus seiring erosi daya beli masyarakat pada 2023 dan 2024. Tapi, itulah pilihan kebijakan yang ada di tengah berkecamuknya perang di Ukraina. Di AS, pertumbuhan ekonomi sudah melambat sebagai akibat dari pengetatan kebijakan The Fed, yang pada akhirnya diperkirakan akan memicu "resesi ulangan" mulai kuartal II-2023. Pada saat itu PDB diramalkan minus 1,1% dengan tingkat pengangguran 5,5% pada kuartal I-2024.

Sebagai catatan, AS sempat mengalami resesi pada semester I-2022, kemudian tumbuh positif pada kuartal III-2022. Namun, agresivitas bank sentral AS menaikkan suku bunga acuan (Fed fund rate/FFR) membuat resesi terulang lagi pada kuartal II-2023, sebagai upaya mengarahkan inflasi ke target 2% pada 2025. Sebuah *long journey of recovery* yang harus ditempuh dengan yakin dan teguh. Di Asia-Pasifik, risiko kenaikan suku bunga acuan lebih dikhawatirkan karena efeknya menekan potensi pertumbuhan ekonomi secara nyata. Di kawasan ini, Tiongkok tetap menjadi outlier, sebagai satu-satunya negara yang memandang pandemi Covid-19 sebagai risiko dominan.

Perbaikan ekonomi Tiongkok akan menjadi salah satu kunci utama pemulihan ekonomi global tahun 2023. Namun, perlu dicermati adanya perubahan arah kebijakan ekonomi negara ini yang cukup ekstrim. Model pertumbuhan Tiongkok bergerak dari sebelumnya yang sangat bergantung pada sektor properti, realestat dan infrastruktur, ke model pertumbuhan berbasis ekonomi digital dan hijau yang memainkan peran lebih besar.

Paralel dengan itu, melemahnya permintaan global karena efek perang di Ukraina yang menyebabkan perlambatan ekspor secara cepat juga mengubah orientasi pasar Tiongkok ke pasar domestik untuk menjaga momentum pertumbuhan. Dengan pelonggaran penguncian, konsumsi domestik akan berperan signifikan untuk pemulihan ekonomi Tiongkok secara berkelanjutan mulai 2023 nanti, di mana penjualan ritel diperkirakan tumbuh 6,8% dengan PDB nasional tumbuh 4,8%. Bahkan jika pengendalian Covid-19 bisa cepat tuntas, ekonomi Tiongkok punya potensi tumbuh 5,2%.

#### 3.1.1.3 Tantangan Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga bulan pertama 2023 menjadi penopang utama kinerja pasar modal. Dampaknya, kinerja reksadana berbasis saham dan obligasi berpeluang positif dan saat ini menjadi momen terbaik untuk mulai membeli reksadana saham dan indeks.

Menurut analisis Bareksa, inflasi yang cukup terjaga pada bulan Desember 2022 sebesar 5,51% secara tahunan membuat Indonesia masih atraktif dari segi fundamental. Inflasi Indonesia diproyeksikan berada pada rentang 4-5% pada tahun ini.

Namun, pada semester pertama 2023, inflasi diperkirakan tetap tinggi di kisaran 5-5,5%. Sebab, ada faktor low base effect, yakni pada semester pertama 2022 tingkat inflasi hanya tercatat naik 2-3%, sehingga ketika dibandingkan secara tahunan akan terjadi lonjakan. Sebaliknya, pada semester kedua 2023, akan ada faktor high base effect sehingga perbandingan secara tahunan akan mengecil.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan dapat menyentuh level 5,1-5,3% untuk tahun 2022. Hal ini seiring optimisme dari Kementerian Keuangan yang menilai tren pemulihan konsumsi masyarakat akan terus berlanjut hingga tahun ini. Di samping itu, masyarakat melihat kenaikan suku bunga acuan tidak merasa khawatir dalam mengambil kredit karena kondisi ekonomi yang cukup baik di dalam negeri.

Untuk mencapai target tersebut di tahun 2024 yang merupakan tahun ketiga, Prioritas Nasional tersebut, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi Pelayanan Publik.

Dengan mempertimbangkan kondisi global tersebut dan sesuai tema RKP 2024 yaitu ***"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"*** dengan target ekonomi makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2024, antara lain: (1). Pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen; (2). Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,27 %; (3). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,0-5,7 persen; (4). Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5 persen, (5). Gini Ratio sebesar 0,374-0,377 nilai; dan (6). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,99-74,02 Tahun.

#### 3.1.1.4 Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol Kesehatandiharapkan dapat mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Pemanfaatanbantuan pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 secara optimaldiharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan daya belimasyarakat. Selain itu Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan dicapai melaluikolaborasi dan gotong royong antar daerah dalam mengembangkan ekonomiregional. Dibutuhkan effort dari masing-masing Pemda dalam memaksimalkan Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Ekonomi (SDE) karena Pemdasebagai interpreneur yang harus terlibat aktif dan inovatif untuk mendorong aktifitas dan kreatifitas bisnis di daerah.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhanekonomi Sulawesi Selatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami tren penurunan. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mencapai 7,04 persen, laju pertumbuhan ekonomi terus menurun hingga tahun 2020 yaitu sebesar -0,71 persen. Angka pertumbuhan tersebut merupakany ang terendah bagi Sulawesi Selatan. Pandemi Covid-19 yang melanda sejakakhir 2019 menjadi pemicu utama melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Perekonomian Sulawesi Selatan tumbuhsebesar 4,64 persen pada tahun 2021, mencapai target yang ditetapan sebesar4,10-5,5 persen. Hal ini menunjukkan mulai terjadinya pemulihan ekonomi secara signifikan dalam masa pandemic *covid-19*. Ekonomi Sulawesi Selatan Kumulatif selama tahun 2022 terhadap tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,09 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,64 persen. Pertumbuhan Positif terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 22,33 persen diikuti Penyediaan Akomodasi Makan Minum sebesar 17,74 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 14,69 persen; Jasa Perusahaan sebesar 14,16 persen. Dibandingkan dengan ekonomi Indonesia tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan lebih baik sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen.

**Tabel III-1**
**Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022**

| Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sulawesi Selatan | % | 7,04 | 6,91 | -0,71 | 4,64 | 5,09 |
| Nasional | % | 5,17 | 5,02 | -2,07 | 3,7 | 5,31 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023*

2. Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus, nainya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang sehingga infalsi dapat juga diartikans ebagai menurunnya nilai uang terhadap nilai barang dan jasa tertentu. Lajuinflasi nasional sejak tahun 2018 hingga 2020 terus mengalami penurunan,namun laju inflasi mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga 2022. PadaDesember 2022, gabungan 5 kota IHK di Sulawesi Selatan mengalami inflasiyear on year sebesar 5,77 persen dengan Indeks Harga konsumen (IHK)sebesar 114,14 dari 5 kota IHK tercatat seluruh kota (Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare dan Palopo) mengalami inflasi *year on year*. Inflasi *year on year* tertinggi terjadi di Kota Parepare sebesar 6,66 persen sedangkan inflasi *year on year* terendah terjadi di Bulukumba sebesar 4,12 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 10 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,95 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,24 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,21 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,83 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,04 persen; kelompok transportasi sebesar 16,72 persen; kelompok rekreasi, budaya dan olahragasebesar 2,86 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,46 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,49 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,60 persen. Komoditasutama penyumbang inflasi yoy pada Desember 2022, antara lain bensin,angkutan udara, telur ayam ras, beras, rokok kretek filter, kontrak rumah,bawang merah, kue kering berminyak, tomat, dan sabun detergen bubuk/cair. Gambaran perkembangan Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional disajikan pada tabel berikut.

**Tabel III-2**
**Perbandingan Laju Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022**

| Laju Inflasi | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sulawesi Selatan | % | 3,50 | 2,35 | 2,04 | 2,40 | 5,77 |
| Nasional | % | 3,13 | 2,72 | 1,68 | 1,87 | 5,51 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023*

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Naik turunnya TPT dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakansebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Dalam tigatahun terakhir, TPT periode Agustus Sulawesi Selatan terus menurun. Tercatat angka TPT Sulsel ditahun 2020 sebesar 6,31 persen, turun ditahun 2021menjadi 5,72 persen kemudian kembali mengalami penurunan sebesar 1,21 persen poin mencapai 4,51 persen pada tahun 2022. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. TPT hasilSakernas Agustus 2022 sebesar 4,51 persen merupakan pencapaian pertumbuhan negatif tertinggi selama periode 2018 hingga 2022 yaitu sebesar-21,15 persen. Data perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan dan Nasional disajikan pada tabel berikut.

**Tabel III-3**
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022**

| Wilayah | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sulawesi Selatan | % | 4,94 | 4,62 | 6,31 | 5,72 | 4,51 |
| Nasional | % | 5,3 | 5,23 | 7,07 | 6,49 | 5,86 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023*

4. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 8,66 persen,mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan meningkat 0,13 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 782,32 ribu orang, bertambah sebanyak4,9 ribu orang terhadap Maret 2021 dan bertambah sebanyak 16,86 ribu orang terhadap September 2021. Tingkat kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan tren penurunan, namun berbeda dengan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan yang berfluktuasi pada periode September2018 hingga 2022, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Secara umum,pada periode September 2018 hingga September 2019, tingkat kemiskinan diSulawesi Selatan mengalami penurunan sebesar -3,49 poin, namun pada tahun2020 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan yangdisebabkan oleh adanya pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia. Tahun2021 tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan kembali mengalami penurunansebesar -5,12 poin seiring dengan pemulihan ekonomi, namun pada tahun 2022 tingkat kemiskinan kembali mengalami peningkatan sebesar 1,52 poin daritahun 2021. Data selengkapnya disajikan pada tabel dan grafik berikut.

**Tabel III-4**
**Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022**

| Wilayah | Persentase Penduduk Miskin (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sulawesi Selatan | 8,87 | 8,56 | 8,99 | 8,53 | 8,66 |
| Nasional | 9,66 | 9,22 | 10,19 | 9,71 | 9,57 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2019-2023*

5. Gini Ratio

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk diukur dengan Indeks Gini.Sejak September 2019, Indeks Gini Sulawesi Selatan terus mengalami penurunan hingga September 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa selamaperiode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran rumah tangga di Sulawesi Selatan. Indeks Gini pada periode September 2022 sebesar 0,365menurun sebesar 0,412 poin dibanding Indeks Gini September 2021 sertamengalami persentase penurunan tertinggi selama periode 2019 hingga 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sulawesi Selatan serta penurunan sejak tahun 2019 hingga 2022 capaian Indeks Gini Sulawesi Selatan lebih baik daripada Indeks Gini Nasional. Dataselengkapnya disajikan pada grafik berikut

**Tabel III-5**
**Perkembangan Indeks Gini Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022**

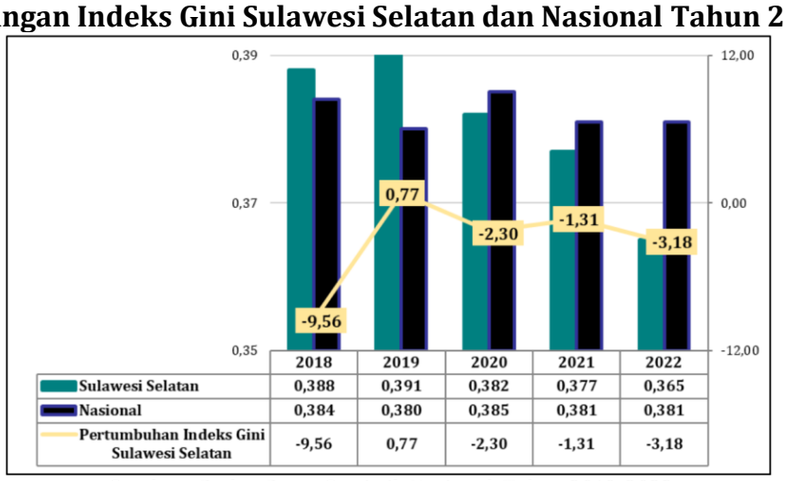


| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sulawesi Selatan | 0,388 | 0,391 | 0,382 | 0,377 | 0,365 |
| Nasional | 0,384 | 0,380 | 0,385 | 0,381 | 0,381 |
| Pertumbuhan Indeks Gini Sulawesi Selatan | -9,56 | 0,77 | -2,30 | -1,31 | -3,18 |

*Sumber : Badan Pusar Statistik Nasional, Tahun 2019-2023*

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Sulawesi Selatan selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalammenjalankan aktivitas usahanya di Sulawesi Selatan. Hal ini dimaksudkan agarmasing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makroekonomi Sulawesi Selatan 2024 dan pencapaian target Nasional, mulaipertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat tajam, persentase penduduk miskin yang menurun, serta tingkatpengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah.Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangatdiperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebihpenting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya di Sulawesi Selatan.

Dengan melihat kondisi perekonomian global dan nasional tersebut dan sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024, maka RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 mengusung tema ***"Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Inklusif"***, dengan target ekonomi makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2024, antara lain: (1). Pertumbuhan ekonomi 5,5-5,9 persen, (2). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,59-4,30 persen; (3). Tingkat Kemiskinan 6,7-7,7 persen, (4). Gini Ratio sebesar 0,361-0,363; dan (5). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,02 (6). Pendapatan Perkapita Rp. 70,7 Juta,-

Untuk mencapai target tersebut di tahun 2023 maka ditetapkanlah 5 Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, yaitu:

1. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Inovatif
2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata
3. Peningkatan Produktivitas Dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah
4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkualitas Dan Merata
5. Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

6. Pembentukan Karakter Dan Akhlaq Sdm Yang Berintegritas, Religious Dan Loyal Serta Profesional

#### 3.1.1.5 Tantangan Perekonomian Daerah

Sementara itu, perekonomian Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) Kabupaten Bulukumba tahun 2022 sebesar 3,81 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 4,76 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diproyeksi (*Tren Analisys*) akan mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 4,83 – 5,00 persen. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba tahun 2022 sebanyak 31.290 jiwa (7,39 persen), dan jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan penduduk miskin tahun 2021 yaitu 31.310 jiwa (7,43 persen), atau mengalami penurunan sebesar -0,54 persen. Pada tahun 2023 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba diproyeksi (*Tren Analisys*) akan mengalami penurunan menjadi 6,10 persen. Posisi relatif persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba tahun 2022 masih lebih rendah yaitu 7,39 persen jika dibandingkan dengan persentase tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 8,63 persen dan persentase tingkat kemiskinan Indonesia (Nasional) yaitu 9,57 persen. Selanjutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba tahun 2022 yaitu 1,26 persen, jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan TPT tahun 2021 yaitu 3,14 persen. Pada tahun 2023 TPT Kabupaten Bulukumba diproyeksi akan mengalami peningkatan menjadi 3,23 persen.

Dengan melihat kondisi perekonomian global, nasional, dan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dan sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, maka RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 mengusung **"Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Melalui Perwujudan Kawasan Mandiri"**, dengan target ekonomi makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2024, antara lain: (1). Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,83-5,00 persen; (2). Inflasi berkisar antara 2,48 persen; (3). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,23 persen; (4). Tingkat Kemiskinan sebesar 6,10 persen (5). Gini Ratio sebesar 0,342 dan (6). Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,17 tahun.

Untuk mencapai target tersebut di tahun 2024, maka ditetapkanlah 10 Prioritas Prioritas Pembangunan di Kabupaten Bulukumba. 10 Prioritas Pembangunan tersebut, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan
3. Pemantapan reformasi birokrasi
4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan
5. Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan
6. Pelestarian lingkungan hidup
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
9. Peningkatan kemandirian desa
10. Peningkatan produktifitas generasi muda

Selain dari pada itu untuk mendorong peningkatan daya saing daerah yang merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 di tegaskan bahwa setiap daerah harus mengembangkan inovasi daerah melalui potensi lokal dan melakukan koordinasi dan pelaporan hingga ke pemerintah pusat.

#### 3.1.1.5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan disertai pula dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan di suatu wilayah. Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Penggunaan harga konstan ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga. Saat ini, tahun dasar PDRB harga konstan ialah tahun 2010. PDRB atas dasar harga konstan 2010 dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba selama lima tahun terakhir. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Bulukumba mengalami tren pertumbuhan yang berfluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2018-2022) sebesar 3,91 persen.

Dengan melihat kondisi Kabupaten Bulukumba yang saat ini masih bergelut dengan wabah covid-19 dalam hal ini sudah memasuki masa endemi, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masih mengalami perkembangan yang fluktuasi, maka ditahun 2023 Kabupaten Bulukumba memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,19-6,01 persen, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5,04-6,52 dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04-6,52 persen. Sementara untuk ditahun 2024 pertumbuhan ekonomi Bulukumba ditargetkan sebesar 5,15 persen

**Grafik III-1**
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2022, Asumsi 2023 dan Target 2024**

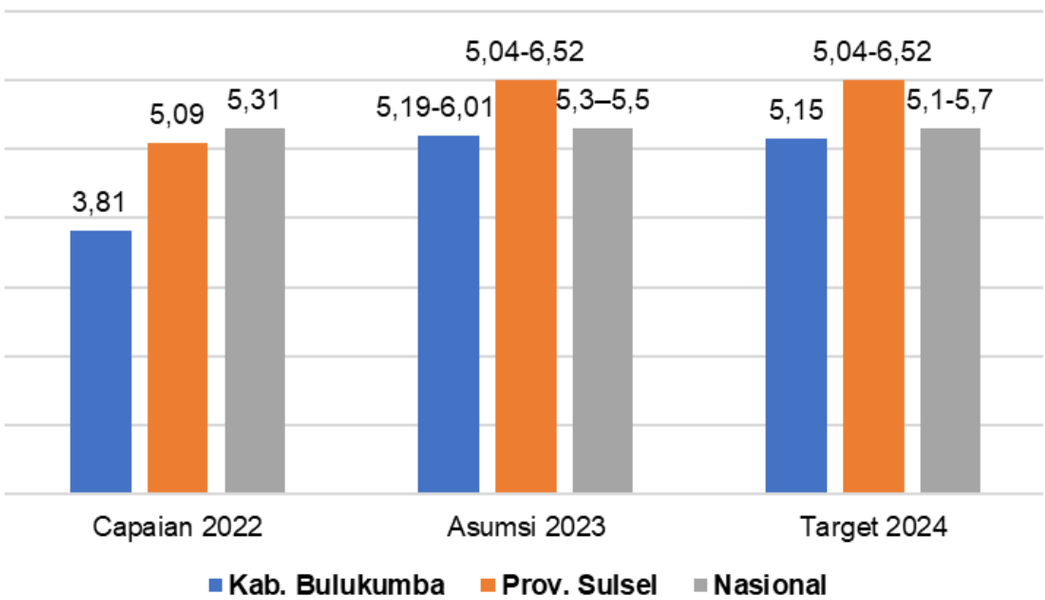


*Sumber : RKP 2024 dan RKPD 2024 Pro. Sulsel Diolah oleh Bappelitbangda Bulukumba, 2023*

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dimulai sejak tahun 2017 dipengaruhi oleh gejala elnino yang menyebabkan kekeringan panjang dan berpengaruh pada produktifitas sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Hal ini menyebabkan defisit neraca perdanganan antar daerah yang berpengaruh pada terjadinya kontraksi komponen pengeluaran net ekspor antar daerah dari 0,76 trilyun rupiah pada 2017 menjadi (197,33) trilyun rupiah pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 terjadi perlambatan yang sangat drastis hingga mencapai angka 0,43 persen. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh sangat besar pada aktivifitas ekonomi di tingkat global, nasional, dan di tingkat regional.

**Tabel III-6**
**Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Kabupaten Bulukumba Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022 (persen)**

| Lapangan Usaha | | Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan | | | Strutur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021* | 2022** | 2020 | 2021* | 2022* |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | -1,12 | 3,65 | 0,61 | 36,86 | 37,38 | 37,10 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 2,09 | 3,06 | -2,31 | 2,75 | 2,64 | 2,45 |
| C | Industri Pengolahan | -3,59 | 5,72 | 8,41 | 6,52 | 6,48 | 6,68 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 3,76 | 8,90 | 12,68 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 5,11 | 0,01 | 9,71 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| F | Konstruksi | 5,11 | 5,12 | 7,12 | 10,6 | 10,65 | 11,03 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | -1,25 | 6,51 | 5,37 | 16,92 | 16,92 | 16,96 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | -14,41 | 5,95 | 10,17 | 2,07 | 2,13 | 2,31 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | -1,99 | 5,88 | 19,98 | 0,73 | 0,72 | 0,80 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 11,92 | 4,42 | 6,79 | 3,54 | 3,47 | 3,46 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 9,00 | 7,54 | 7,80 | 3,76 | 3,82 | 4,05 |
| L | Real Estate | 1,03 | 3,28 | 6,19 | 4,3 | 4,09 | 4,05 |
| M,N | Jasa Perusahaan | -4,44 | 6,98 | -3,26 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -0,43 | 4,36 | -0,41 | 6,31 | 6,11 | 5,64 |
| P | Jasa Pendidikan | 9,27 | 4,12 | -0,19 | 3,27 | 3,19 | 2,95 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,31 | 6,39 | 10,07 | 1,4 | 1,41 | 1,44 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | -1,20 | 8,81 | 17,63 | 0,79 | 0,82 | 0,91 |
| | **Produk Domestik Regional Bruto** | **0,43** | **4,76** | **3,81** | **100** | **100** | **100** |

*Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023*

Sedangkan untuk PDRB perkapita Kabupaten Bulukumba menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Bulukumba rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan capaian PDRB Perkapita (ADHB) Bulukumba pada tahun 2022 sebesar Rp. 38,55 juta.Dan pada tahun 2023, ditargetkan capaian PDRB perkapita sebesar Rp. 40,92 juta, kemudian untuk tahun 2024 ditargetkan akan mencapai sebesar Rp. 42,83 Juta.

**Grafik III-2**
**PDRB Perkapita Kabupaten Bulukumba,**
**Capaian 2022, Asumsi 2023 dan Target 2024**

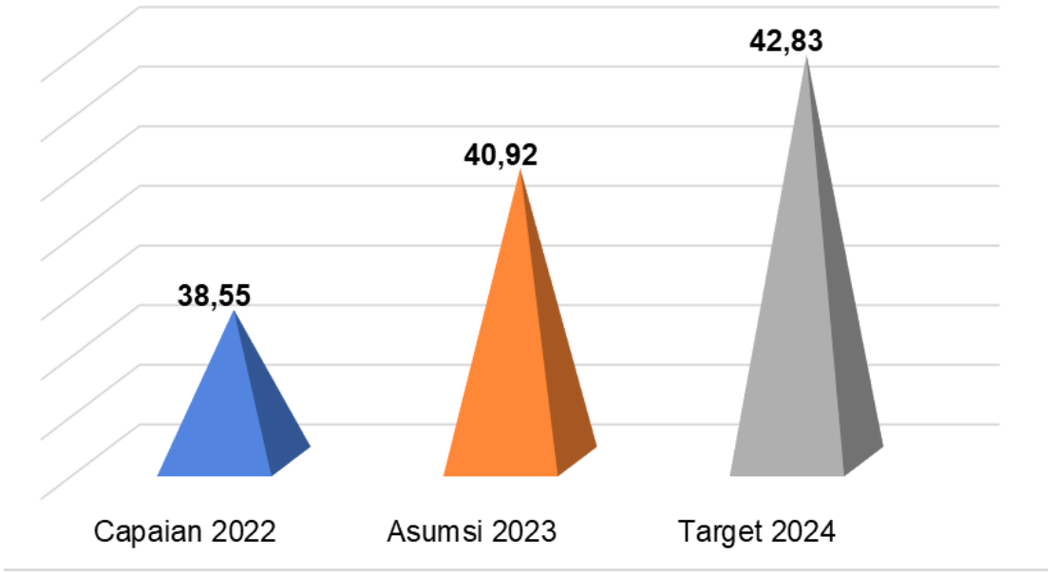


*Sumber : BPS, RPJMD 2021-2026 Kab. Bulukumba, diolah*

### 3.1.1.5.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 9,57 persen. Sementara di Sulawesi Selatan tingkat kemiskinan berada pada tingkat 8,63 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 7,39 persen.

Beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba menurun dari tahun sebelumnya pada tahun 2022 berada pada angka 7,39 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel III-7**
**Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan**
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2018- 2022**

| Tahun | Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) | Jumlah Penduduk Miskin (ribu) | Persentase penduduk Miskin (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 310.753 | 31.25 | 7,48 |
| 2019 | 330.161 | 30.49 | 7,26 |
| 2020 | 351.180 | 30.00 | 7,10 |
| 2021 | 369.022 | 31,31 | 7,43 |
| 2022 | 390.040 | 31,29 | 7,39 |

*Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023*

Penduduk miskin di Bulukumba pada tahun 2023 diprediksi akan mencapai 5,99 persen. Namun pada tahun 2024, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial masyarakat memasuki dampak dari masa resesi, maka pemerintah Bulukumba menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin sebesar 6,7 persen, Sulawesi Selatan sebesar 8,31 dan target Nasional yaitu 6,5-7,5 persen.

**Grafik III-3**
**Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2022, Asumsi 2023 dan Target 2024**

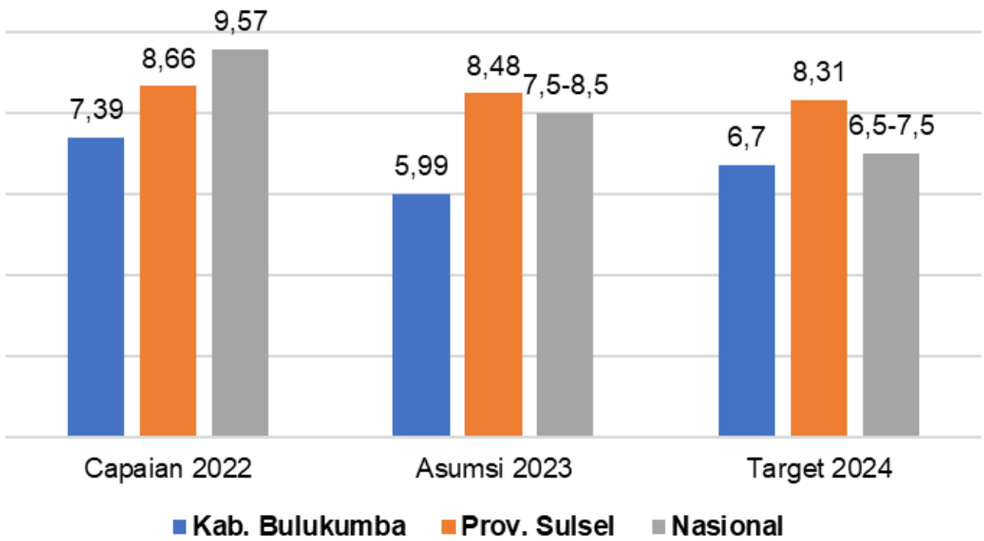


*Sumber : RKP 2024 dan RKPD 2024 Pro. Sulsel Diolah oleh Bappelitbangda Bulukumba, 2023*

### 3.1.1.5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah angkatan Kerja di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 sebanyak 213.478 jiwa, dimana 210.780 jiwa diantaranya bekerja pada seminggu terakhir. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bulukumba tahun 2022 adalah sebesar 1,26. Dapat dikatakan bahwa sekitar 1-2 dari 100 angkatan kerja yang ada di Bulukumba menganggur.

Melihat dari kondisi saat ini, Pemerintah Bulukumba pada tahun 2023 masih memprediksikan capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,91 persen walaupun capaian sebelumnya masih rendah dari capaian tahun 2022 yang mencapai 1,26 persen dan jika dibandingkan dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 yang mencapai 4,51 persen dan capaian Nasional sebesar 5,86 persen. Sementara untuk tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di target oleh Kabupaten Bulukumba sebesar 2,5 persen, pemerintah sulawesi selatan sebesar 4,24 persen atau target Nasional yaitu 5,0-5,7 persen.

**Grafik III-4**
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024**

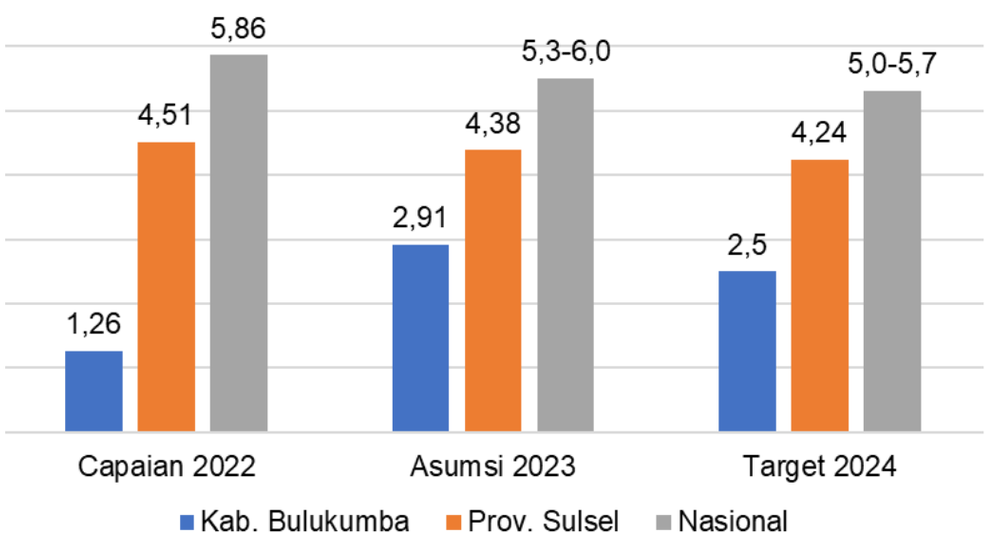


*Sumber : RKP 2024 dan RKPD 2024 Pro. Sulsel Diolah oleh Bappelitbangda Bulukumba, 2023*

#### 3.1.1.5.4 Gini Ratio

Koefisien Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dari suatu perekonomian. Koefisien Gini dihitung dengan mengukur jarak antara Garis Lorentz yang menunjukkan distribusi pendapatan dengan garis lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh.

Gini Ratio Periode September tahun 2022 Kabupaten Bulukumba mencapai 0,361 persen, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mencapai sebesar 0,365, atau berada dibawah capaian angka Nasional yaitu 0,381. Untuk tahun 2023, Gini Ratio di Kabupaten Bulukumba diprediksi mencapai 0,355, Sulawesi Selatan di prediksi akan mencapai angka 0,363, dan di tahun yang sama Nasional memprediksi angka Gini Rasio Indonesia sebesar 0,375-0,378. Sementara pada tahun 2024, angka Gini Rasio Bulukumba ditargetkan 0,350, Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar 0,361 sedangkan target Nasional sebesar 0,374-0,377.

**Grafik III-5**
**Gini Rasio Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024**

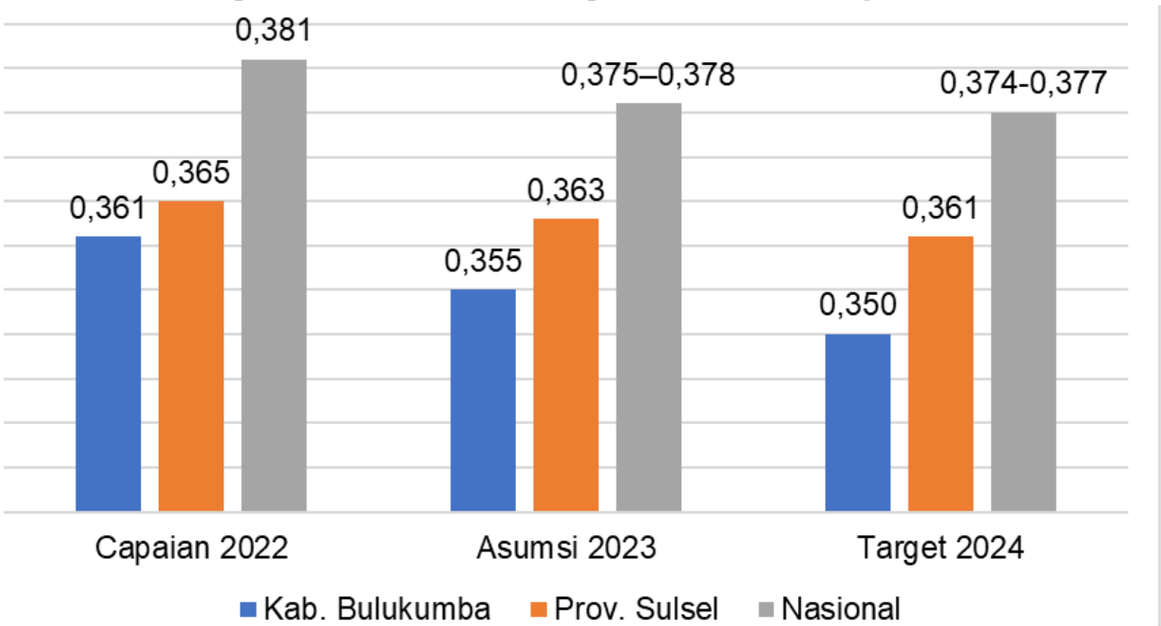


*Sumber : RKP 2024 dan RKPD 2024 Pro. Sulsel diolah oleh Bappelitbangda Bulukumba, 2023*

#### 3.1.1.5.5 Inflasi

Desember 2022 di Bulukumba terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 4,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,51. Dari 5 kota IHKdi Sulawesi Selatan, inflasi yoy tertinggi terjadi di Parepare sebesar 6,66 persendengan IHK sebesar 115,98 sedangkan untuk inflasi yoy terendah terjadi diBulukumba sebesar 4,12 persen dengan IHK sebesar 113,51. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 9 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,59 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,89 persen; kelompok perumahan, air, listrik, danbahan bakar rumah tangga sebesar 2,03 persen; kelompok perlengkapan, peralatan,dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,37 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,17 persen; kelompok transportasi sebesar 12,70 persen; kelompok rekreasi, budaya, dan olahraga sebesar 1,28 persen; kelompok penyediaan makanandan minuman/restoran sebesar 1,31 persen; dan kelompok perawatan pribadi danjasa lainnya sebesar 3,44 persen. Adapun kelompok informasi, komunikasi, danjasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,02 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi y-on-y pada Desember 2022, antara

lainbensin, minyak goreng, telur ayam ras, beras, bawang merah, rokok kretek filter,angkutan dalam kota, bahan bakar rumah tangga, angkutan antar kota, dan emasperhiasan. Tingkat inflasi month to month (mtm) Desember 2022 tercatat inflasi sebesar 0,49 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) (Desember 2022 terhadap Desember 2021) sebesar 4,12 persen.

**Grafik III-6**
**Inflasi Kabupaten Bulukumba, 2018-2022**

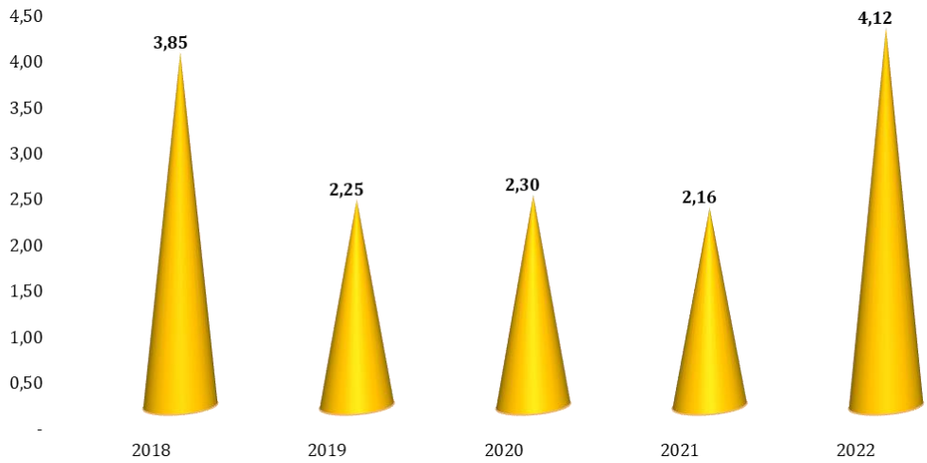


*Sumber: Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2022, diolah*

## 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis sebelumnya diuraikan sebagai berikut.

Kapasitasfiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan fiskal daerah dapat diukur melalui penerimaan pendapatan daerah, meliputi (1).pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (2).Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak; (3).Lain-lain pendapatan yang sah.

### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan konstruksi awal kemampuan fiskal daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang didalamnya memuat kebijakan penganggaran serta kerangka pendanaannya. Untuk mengukur dan menjaga konsistensi proses perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan maka arah kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan melalui dokumen RKPD harus saling berkaitan sebagai satu rangkaian proses perencanaan tahunan yang merupakan dasar dari penyusunan APBD.

Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut, maka kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba diarahkan pada “penguatan kapasitas kelembagaan pengelola potensi serta penguatan regulasi dan strategi pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam kerangka optimalisasi sumber-sumber pendapatan”.Secara umum Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 difokuskan pada:

1. mengoptimalkan Pendapatan Daerah dalam upaya pencapaian khususnya Pendapatan Asli Daerah.
2. Peningkatan pendapatan daerah guna meningkatkan ruang fiskal daerah dan Meningkatkan kemandirian Fisikal untuk Kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah

3. upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi, pengelolaan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi akan didorong untuk lebih akuntabel sekaligus mendekatkan jangkauan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.
4. selain PAD, peningkatan pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat dan provinsi menjadi perhatian
5. Struktur Pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

**3.2.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba**

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya berupa bagi hasil pajak, dan Bantuan Keuangan. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat serta Pendapatan lainnya.

Kebijakan Pendapatan Daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan daerah sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Pendapatan Taransfer/Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Kebijakan Pendapatan Daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern.

Berkaitan dengan pencapaian target penerimaan daerah dari komponen Pendapatan Daerah , maka beberapa upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah antara lain :

a. Melakukan pembenahan manajemen pemungutan, dengan menggunakan sistem informasi yang kredibel dan akuntabel, sehingga ketersediaan data obyek pajak dan retribusi terintegrasi secara menyeluruh dan dapat diketahui masyarakat.
b. Menurunkan tingkatkebocoran pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan dan sistem pengawasan.
c. Melakukan penyesuaian tarif baru sesuai ketentuan yang berlaku, yang didahului dengan sosialisasi
d. Memperbaiki pelayanan kepada masyarakatdalam hal pemungutan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Adapun realiasi, asumsi dan target Pendapatan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel III-8**
**Realisasi, Asumsi dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2024**

| Kode | Uraian | Realisasi 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **4** | **PENDAPATAN** | **1.375.869.878.068** | **1.530.079.311.810** | **1.555.095.998.416,00** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **169.419.982.131** | **239.750.000.000,00** | **205.011.753.056,00** |
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 38.584.791.931 | 74.320.354.000,00 | 74.320.354.000,00 |
| 4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 17.634.455.280 | 29.229.646.000,00 | 29.229.646.000,00 |
| 4.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 3.732.616.722 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 |
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 109.468.118.198 | 131.200.000.000,00 | 96.461.753.056,00 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.183.153.841.810,00** | **1.272.162.151.543,00** | **1.330.634.245.360,00** |
| 4.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan | 1.109.782.847.000,00 | 1.165.945.802.500,00 | 1.237.263.250.550,00 |
| 4.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya | 113.765.625.000,00 | 113.765.625.000,00 | 93.370.994.810,00 |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | **0,00** | **600.000.000,00** | **19.450.000.000,00** |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 |
| 4.1.3.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 18.850.000.000,00 |

*Sumber : BPKPD Kab. Bulukumba, 2023*

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja

Belanja daerah merupakan bentuk kuantitatif dari semua bentuk pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan fungsi otonomi daerah, belanja daerah tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Penganggaran belanja daerah harus terstruktur dan mengarah pada pencapaian target dari tiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan secara berjenjang. Berdasarkan kelompok belanja, maka belanja daerah diurai menjadi 4 (empat) kelompok belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer berdasarkan tujuan pembelanjaannya.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

#### 3.2.2.1. Belanja Operasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

**1) Belanja Pegawai**

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

**2) Belanja barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

**3) Belanja Bunga**

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**4) Belanja Subsidi**

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3.2.2.2. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuh idefinisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

**3.2.2.3. Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

**3.2.2.4. Belanja Transfer**

**1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota**

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2023, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2022 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

**2) Belanja Bantuan Keuangan**

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;

c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;
d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Berdasarkan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bulukumba yang di fokuskan pada pembangunan dan penguatan ekonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bulukumba tahun 2005-2025 periode ke 4 (Empat) maka kebijakan belanja daerah Kabupaten Bulukumba secara makro diarahkan pada“pembelanjaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan penerapan prinsip-prinsip pembelanjaan yang transparan dan akuntabel serta efisien, efektif dan proporsional”.Kebijakan belanja tersebut merupakan bagian dari strategi penganggaran pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2023, arah kebijakan makro belanja tersebut adalah bentuk upaya pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menjamin keberlangsungan proses pembangunan di Kabupaten Bulukumba. Arah kebijakan belanja tersebut juga merupakan bentuk sinergitas perencanaan kegiatan satu tahunan pemerintah Kabupaten Bulukumba terhadap prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun tersebut.

**Tabel III-9**
**Realisasi, Asumsi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2024**

| Kode | Uraian | Realisasi 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **5** | **BELANJA** | **1.344.292.311.324,50** | **1.574.476.303.296,00** | **1.555.095.998.416,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **911.207.258.499,88** | **1.056.825.399.504,00** | 1.057.929.130.567,00 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 590.003.633.511,00 | 663.130.464.185,00 | 656.851.649.309,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 302.352.451.730,00 | 375.503.928.906,00 | 355.636.435.966,00 |
| 5.1.3 | Belanja Bunga | 0,00 | 2.200.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 15.176.910.936,00 | 15.112.015.638,00 | 44.828.703.964,00 |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 3.674.262.320,00 | 878.990.775,00 | 612.341.328,00 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **255.053.250.411,62** | **338.110.970.014,00** | **317.435.393.474,00** |
| 5.2.1 | Belanja Tanah | 3.557.175.720,00 | 3.645.900.000,00 | 402.978.850,00 |
| 5.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 30.855.480.239,00 | 46.245.431.004,00 | 42.332.123.266,00 |
| 5.2.3 | Belanja Bangunan dan Gedung | 66.510.041.402,80 | 156.509.116.684,00 | 113.916.971.935,00 |
| 5.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 148.633.846.899,00 | 125.545.058.043,00 | 155.429.037.567,00 |
| 5.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 3.615.382.400,00 | 4.563.813.400,00 | 5.137.281.856,00 |
| 5.2.6 | Belanja Aset Lainnya | 0,00 | 1.601.650.883,00 | 217.000.000,00 |
| **5.3** | **BELANJA TAK TERDUGA** | **1.798.855.700,00** | **3.069.234.832,00** | **1.439.629.972,00** |
| 5.3.1 | Belanja Tak Terduga | 1.798.855.700,00 | 3.069.234.832,00 | 1.439.629.972,00 |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **178.031.802.413,00** | **176.470.698.946,00** | **178.291.844.403,00** |
| 5.4.1 | Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA | 6.834.570.852,00 | 8.312.174.942,00 | 8.312.174.942,00 |
| 5.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 171.197.231.561,00 | 168.158.524.004,00 | 169.979.669.461,00 |

*Sumber : BPKPD Kab. Bulukumba, 2023*

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayan Daerah

Pembiayaan daerah adalah pengeluaran pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari jumlah penerimaan daerah sehingga terjadi defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah.

Pada tahun 2024 kebijakan pembiayaan makro Kabupaten Bulukumba diarahkan pada "*efisiensi dan efektifitas pembiayaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat*". Melihat keterbatasan APBD Kabupaten Bulukumba, maka untuk mensiasati kondisi tersebut maka penganggaran pembangunan yang bersifat ekspansif akan diupayakan dianggarkan secara kemitraan baik dengan melibatkan kerja sama pihak swasta, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah Pusat.

Selain itu, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Covid-19* diberbagai aspek kehidupan, baik di aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Kebijakan new normal menuntut untuk dilakukan pembatasan kontak fisik namun unsur pemerintah daerah dituntut untuk tetap produktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat umum.

**Tabel III-10**
**Realisasi, Asumsi dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2024**

| Kode | Uraian | Realisasi 2022 | Target 2023 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **6** | **PEMBIAYAAN** | | | |
| 6.1 | **PENERIMAAN DAERAH** | **59.392.217.227,39** | **58.146.991.485** | **0,00** |
| 6.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | | 3.146.991.485 | 0,00 |
| | Penerimaan Pinjaman Daerah | | 55.000.000.000 | 0,00 |
| **6.2** | **PENGELUARAN DAERAH** | | **13.749.999.999** | **0,00** |
| 6.2.1 | Pembayaran Pokok Utang | | 13.749.999.999 | 0,00 |

*Sumber : BPKPD Kab. Bulukumba,2023*

## 3.3 Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dengan terbatasnya sumber–sumber penerimaan dan besarnyakebutuhan dana untuk pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan mendorongPemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencari alternatifpendanaan dalam membangun. Sumber- sumber pendanaan pembangunan nonAPBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan antara lain: 1)APBN; 2) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan BinaLingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 3)Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); 4) Pembiayaan UtangDaerah (Pinjaman Daerah, Obilgasi Daerah, Sukuk Daerah). Adapun penjelasan alternatif pendanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

### 3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Penyelesaian pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kabupaten Bulukumba selain bersumber dari APBD Kabupaten Bulukumba dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di kabupaten/kota maupun perangkat daerah provinsi. Adapun alokasi pendanaan yang melalui dana dekonsestrasi dan tugas pembantuan Tahun Anggaran 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III-11**
**Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 – 2022**

| No | Kementerian / SKPD | Pagu (Rp) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | **Kementerian Pertanian :** Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan | 12.369.103.000 | 4.336.389.000 | - | 4.358.413.000 | 2.220.436.000 |
| 2 | **Kementerian Perdagangan** Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 6.000.000.000 | 4.000.000.000 | - | - | - |
| 3 | **Kementerian PU** Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan | 3.955.000.000 | - | 2.085.000.000 | - | - |
| **Jumlah Total** | | **22.324.103.000** | **8.336.389.000** | **2.085.000.000** | **4.358.413.000** | **2.220.436.000** |

*Sumber: Bappelitbangda Kab. Bulukumba, 2023*

### 3.3.2 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) didasari atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintahdengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untukmelakukan kerjasama dengan badan usaha.Kondisi yang berkembang saat ini menyebabkan banyak pemerintahdaerah menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam

mendorongpembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu,teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publiksehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapatberkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dankerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk "menciptakan pangsa pasar". Salah satu persoalanyang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidangbidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yangjuga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunaninfrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan KerjasamaPemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

### 3.3.3 Pembiayaan Utang Daerah

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan utang daerah tersebut terdiriatas : **(1) Pinjaman Daerah** yaitu Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yangmengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yangbernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajibanuntuk membayar kembali, **(2) Obligasi Daerah** yaitu surat berharga berupapengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, **(3) Sukuk Daerah** yaitu surat berharga berdasarkan prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan asset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.Usulan pembiayaan utang daerah tersebut harus termuat dalam dokumenRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana KerjaPemerintah Daerah dengan lebih dulu menetapkan nilai bersih maksimalpembiayaan utang daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD.

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025, visi,misi, dan program kepala daerah terpilih, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021, prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032, khususnya yang mengedepankan fokus pengembangan wilayah dan sektor unggulan di setiap kabupaten/kota. Rumusan tersebut merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Bab ini berisi prioritas dan sasaran pembangunan daerah Bulukumba Tahun 2024 yang dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Bupati yangtermuat dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, capaian target pelaksanaan RPJMD tahun sebelumnya, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

## 4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**“Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”**

Visi 2021-2026 merefleksikan arah Pembangunan Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dilaksanakan dengan fokus prioritas yang lebih jelas, strategis dan berdaya ungkit tinggi. Selain itu, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba periode kedua (2018-2022) yang berbunyi: “Mengembangkan berbagai bidang pembangunan sebagai modal dasar pembangunan khususnya kualitas sumberdaya manusia yang handal”, maka visi pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD periode ini juga bermaksud untuk mewujudkan pembangunan yang maju dari sisi profesionalisme penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan akses dasar masyarakat, pengembangan kualitas manusia yang unggul dan ekonomi daerah serta kelestarian lingkungan hidup yang mendukung kemandirian daerah sehingga ketiganya dapat menjadi modal dasar dalam mewujudkan kualitas sumber daya

manusia yang handal. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penjelasan Visi Kabupaten Bulukumba 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV-1**
**Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026**

| VISI | | PENJELASAN VISI |
|---|---|---|
| "MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF, YANG BERKARAKTER KEARIFAN LOKAL MENUJU BULUKUMBA MAJU DAN SEJAHTERA" | PRODUKTIF | Mendorong seluruh sektor pembangunan. Meliputi ekonomi. SDM. Infrastruktur. Sosial kemasyarakatan. Lingkungan dan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera. |
| | BERKARAKTER | Identitas diri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama untuk beperikehidupan dan kemasyarakatan. |
| | KEARIFAN LOKAL | Potensi adat. Budaya dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Bulukumba sebagai modal dasar pembangunan. |
| | MAJU | Pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada upaya strategis untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara konkret dan terukur di segala aspek kehidupan masyarakat Bulukumba. Pencapaian kondisi "maju" yang diharapkan dari visi daerah ini adalah upaya untuk mencapai peningkatan ekonomi masyarakat melalui meningkatnya kinerja dan profesionalisme pemerintahan dan meningkatnya kualitas infrastruktur untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. |
| | SEJAHTERA | Hasil pembangunan dapat terwujud secara nyata serta dimiliki, dirasakan, dan dinikmati oleh masyarakat / penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sehingga dapat tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain: kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosialpolitik baik bagi perempuan maupun laki-laki |

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel Tabel IV.2

**Tabel IV-2**
**Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026**

| NO | MISI | PENJELASAN MISI |
|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam Masyarakat | Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukuba yang rukun dan berperilaku sesuai dengan norma agama dan budaya, menjadi syarat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera. |
| 2 | Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik | Sebagai wilayah administrasi, pembangunan harus ditopang dengan pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang prima. Transparan. Akuntabel. Efektif. Dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang prima dapat diwujudkan apabila Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki Aparatur Sipil Negara dengan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia yang sesuai dengan kebutuhan serta sarana prasarana penunjang yang memadai menjadi dasar dalam peningkatkan tata Kelola pemerintah dan layanag publik yang lebih baik. |
| 3 | Mewujudkan tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan Ekspor | Untuk menjadi Kabupaten yang mandiri maka perlu untuk mengembangkan potensi perekonomian Bulukumba. Agar Kabupaten Bulukumba dapat menjadi daerah yang mandiri maka diperlukan peningkatan produktivitas komoditas unggulan dibidang pertanian, pengembangan perdagangan dan industri serta pembangunan pasar. Kabupaten Bulukumba tidak akan bisa menjadi daerah yang mandiri apabila sektor perekonomian tidak berkembang. |
| 4 | Meningkatkan produktifitas sumber daya Kelautan dan | Untuk menjadi Kabupaten yang mandiri maka perlu untuk mengembangkan potensi perekonomian Bulukumba. Agar Kabupaten |

| NO | MISI | PENJELASAN MISI |
|---|---|---|
| | Perikanan untuk memenuhi kebutuhan Daerah. Nasional dan Internasional | Bulukumba dapat menjadi daerah yang mandiri maka diperlukan peningkatan produktivitas komoditas unggulan dibidang Kelautan dan Perikanan, pengembangan perdagangan dan industri serta pengembangan /pembangunan pasar. Bulukumba tidak akan bisa menjadi daerah yang mandiri apabila sektor perekonomian tidak berkembang. |
| 5 | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal | Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukumba yang berpendidikan, rukun, dan berperilaku sesuai dengan norma agama dan budaya. Hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera. |
| 6 | Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat | Memastikan terwujudnya masyarakat Bulukumba yang sehat untuk mewujudkan manusia Bulukumba yang maju dan sejahtera. Hal ini juga merupakan lanjutan program pembangunan periode sebelumnya pada misi yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia. Berbagai program dari misi-misi tersebut telah mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bulukumba namun masih akan terus ditingkatkan. |
| 7 | Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara | Kabupaten Bulukumba memiliki kondisi alam yang indah, dan asri. Kondisi alam ini memiliki keterkaitan erat dengan kultur dan budaya masyarakat yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya, sehingga potensi Bulukumba dapat dijadikan sasaran objek wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat |
| 8 | Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat | Pembangunan daerah pada hakikatnya mengedepankan pentingnya kebutuhan infrastruktur fisik. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur fisik merupakan alasan utama mengapa Kabupaten Bulukumba terus mendorong penyediaan infrastruktur fisik yang lebih memadai. Sarana infrastruktur fisik yang memadai seperti jalan, jembatan, pasar, perumahan, sanitasi, listrik dan telekomunikasi menjadi prasyarat untuk mewujudkan kemajuan wilayah Kabupaten Bulukumba. |
| 9 | Pembangunan dan Meningkatan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah | Untuk menjadi daerah yang maju dan sejahtera maka diperlukan pengembangan ekonomi terutama peningkatan produktivitas serta pengembangan industri untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah dalam bidang perdagangan dan perindustrian. |
| 10 | Membina Generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi Sportivitas dan Profesionalisme | Meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh dan profesional melalui pembinaan generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi sportivitas dan Profesionalisme. |
| 11 | Membangun Desa Mandiri untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | Untuk menjadi desa yang maju dan sejahtera maka perlu untuk mengedepankan pentingnya peran pemerintah desa di Kabupaten Bulukumba untuk secara aktif mengembangkan potensi perekonomian desa sehingga dapat menjadi desa yang lebih maju dan mandiri. Untuk itu Desa perlu meningkatkan potensi dan produktivitas unggulan agar lebih cepat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran desa. |
| 12 | Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan | Mendorong ketercapaian tujuan pembangunan yang tentunya tidak terlepas dari meningkatnya kondisi lingkungan yang nyaman dan tertib sehingga dapat menurunkan konflik-konflik yang akan terjadi di masa yang akan datang yang salah satunya dapat dilihat dari menurunnya tingkat kriminalitas lingkungan. |

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah kabupaten Bulukumba dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerahmenjadi landasan

perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telahditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isuisu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima)tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Target dari tujuan dan sasaran tahun 2023 menjadi landasan RKPD Tahun 2024, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel IV. 3.

**Tabel IV-3**
**Tujuan dan sasaran serta target Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

| VISI : Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Misi / Tujuan / Sasaran** | **Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran** | **Satuan** | **Capaian 2022** | **Asumsi 2023** | **Target 2024** |
| **Misi 1 Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat** | | | | | |
| **Tujuan 1 Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama** | **1 Indeks Kerukunan Umat Beragama** | Angka | 70 | 71 | 71 |
| Sasaran 1 Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama | 2 Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani | % | 100 | 100 | 100 |
| **Misi 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik** | | | | | |
| **Tujuan 2 Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel** | **3 Indeks Reformasi Birokrasi** | Angka | CC (59,46) | CC | B |
| Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 4 Skor LPPD/Kategori | Skor | n/a | 3,526 | 3,5415 |
| Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi | 5 Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 3,25 | 3,26-4,00 | 3,26-4,00 |
| **Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor** | | | | | |
| **Tujuan 3 Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi** | **6 Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB** | % | 24,42 | 22,28 | 22,04 |
| Sasaran 4 Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian | 7 Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian | % | 3,81 | 4,37 | 8,14 |
| **Misi 4 Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional** | | | | | |
| **Tujuan 4 Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi** | **8 Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB** | % | 12,57 | 13,21 | 13,55 |
| Sasaran 5 Meningkatnya Produksi hasil Perikanan | 9 Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan | % | -0,31 | 6,75 | 7,66 |

| VISI : Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Misi / Tujuan / Sasaran** | **Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran** | **Satuan** | **Capaian 2022** | **Asumsi 2023** | **Target 2024** |
| **Misi 5 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal** | | | | | |
| **Tujuan 5 Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal** | **10 Indeks Pembangunan Manusia** | Angka | 70,34 | 71,09 | 71,69 |
| Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Pendidikan | 11 Indeks Pendidikan | Angka | 63,98 | 65,13 | 66,21 |
| **Misi 6 Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat** | | | | | |
| **Tujuan 6 Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat** | **12 Indeks Kesehatan** | Angka | 74,63 | 75,62 | 76,36 |
| Sasaran 7 Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 13 Usia Harapan Hidup | Tahun | 68,51 | 69,15 | 69,63 |
| **Misi 7 Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara** | | | | | |
| **Tujuan 7 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah** | **14 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD** | % | 4,47 | 3,05 | 3,26 |
| Sasaran 8 Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara | 15 Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata | % | 22,48 | 6,11 | 6,76 |
| **Misi 8 Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat** | | | | | |
| **Tujuan 8 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas** | **16 Gini Ratio** | Angka | 0,361 | 0,349 | 0,350 |
| Sasaran 9 Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah | 17 Indeks Daya saing infrastruktur | Angka | 80 | 90 | 92 |
| **Misi 9 Pembangunan Dan Peningkatan Perdagangan Dan Perindustrian Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi Dan Bantuan Pemerintah** | | | | | |
| **Tujuan 9 Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi** | **18 Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB** | % | 24,12 | 24,91 | 25,36 |
| Sasaran 10 Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi | 19 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri | % | 6,68 | 10,84 | 10,63 |
| **Misi 10 Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme** | | | | | |
| **Tujuan 10 Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi** | **20 Indeks Pembangunan Pemuda** | Angka | 68,86 | 58,38 | 59,94 |
| Sasaran 11 Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda | 21 Persentase Peningkatan Pemuda yang berprestasi | % | 18 | 27 | 27 |
| **Misi 11 Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | |

| VISI : Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Misi / Tujuan / Sasaran** | **Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran** | **Satuan** | **Capaian 2022** | **Asumsi 2023** | **Target 2024** |
| **Tujuan 11 Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor** | **22 Indeks Desa Membangun** | Angka | 0,72 | 0,76 | 0,78 |
| Sasaran 12 Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan | 23 Persentase Desa Mandiri | % | 1,83 | 2,75 | 4,59 |
| **Tujuan 12 Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat** | **24 Indeks Rasa Aman** | Angka | 14 | 15 | 15 |
| Sasaran 13 Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman | 25 Peresentase Penurunan Angka Kriminalitas | % | 58,46 | 89,11 | 89,66 |

Berdasarkan Tabel IV – 3 di atas, menunjukkan tujuan dan sasaran serta indikator yang akan mendukung pencapaian Misi Kabupaten Bulukumba yang terdiri atas 12 tujuan, 13 sasaran dengan rumusan indikator sebanyak 12 indikator tujuan dan 13 indikator sasaran, sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Misi Kabupaten Bulukumba sebanyak 25 indikator. Tujuan dan sasaran yang terdapat pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Bulukumba 2021 – 2026 diarahkan pula untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada RPJPD 2005–2025 serta Sasaran RPJMN 2020-2024. Berdasarkan analisis yang dilakukan keterkaitan RKPD Kab. Bulukumba Tahun 2024 antara sasaran RPJPD Kab. Bulukumba Tahun 2005-2025 dengan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026, RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV-4**
**Keterkaitan RKPD Kab. Bulukumba Tahun 2023 antara sasaran RPJPD Kab. Bulukumba Tahun 2005-2025 dengan sasaran RPD Prov. Sulawesi Selatan 2024-2026 dan RPJMN 2020-2024**

| Sasaran RKPD Kab. Bulukumba 2024 | Sasaran RPJPD Kab. Bulukumba 2005-2025 | Sasaran RPD Prov. Sulawesi Selatan 2024-2026 | Sasaran RPJMN 2020-2024 |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya Pelayanan Prima Yang Responsif, Profesional, Transparan Dan Akuntabel | Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan melalui kegiatan industri yang berbasis pada potensi unggulan daerah berupa pertanian (agroindustri), jasa (agribisnis), dan pariwisata (agrowisata); | Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan,evaluasi dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas; | Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang- Undang. Pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM); |
| Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan merata | Meningkatnya penyuluhan kepada para petani dalam peningkatan kapasitas petani dan kelembagaannya, meningkatkan kreativitas petani, serta peningkatan adopsi teknologi bidang pertanian.; | Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan; | |
| Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian dan Perikanan Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya diversifikasi dan integrasi usaha secara berkelanjutan melalui sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan; | Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif; | |
| | Meningkatnya nilai guna lahan melalui peningkatan pola usaha tani. | Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, termasuk penyandang disabilitas diberbagai bidang pembangunan serta Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja; | |
| Meningkatnya SDM Yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal | Meningkatnya kemandirian masyarakat Kabupaten Bulukumba dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan YangMaha Esa, berakhlak mulia, sehat, dan berpendidikan, serta menguasai ilmu pengertahuan dan teknologi; | Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat termasuk pendidikan inklusi; | Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global; |

| Sasaran RKPD Kab. Bulukumba 2024 | Sasaran RPJPD Kab. Bulukumba 2005-2025 | Sasaran RPD Prov. Sulawesi Selatan 2024-2026 | Sasaran RPJMN 2020-2024 |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang seimbang serta berdaya saing dengan tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat Kabupaten Bulukumba yang memegang prinsip mali siparappe tallang sipahua. Secara umum, peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditandai dengan meningkatnya IPM | Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat; | |
| Meningkatnya Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat | Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan dalam pembangunansehingga terdapat kesetaraan dengan kaum laki-laki sesuai kaidah pengarusutamaan gender | Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak; | |
| | | Meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial; | |
| Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah yang bersih, berakhlak mulia, jujur dan adil, sejahtera, profesional, dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat yang dilayani; | Meningkatkan akses data, informasi dan inovasi serta Kualitas Pelayanaan Publik; | Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangankerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah | Meningkatnya kapasitas kelembagaan legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat yang dinamis, mengikuti tuntutan kebutuhan dan perubahan internal maupun eksternal; | Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan,evaluasi dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas; | |
| | Meningkatnya kesadaran hukum dan budaya tertib masyarakat sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum | | |
| | Terwujudnya stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi | | |
| Meningkatnya Pelestarian lingkungan hidup | Meningkatnya fungsi penataan ruang dan pertanahan melalui konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan; | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan | Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai |

| Sasaran RKPD Kab. Bulukumba 2024 | Sasaran RPJPD Kab. Bulukumba 2005-2025 | Sasaran RPD Prov. Sulawesi Selatan 2024-2026 | Sasaran RPJMN 2020-2024 |
|---|---|---|---|
| | | mitigasi terhadap perubahan iklim. | tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia |
| | Meningkatnya aksesibilitas, pemeliharaan prasarana dan sarana perhubungan; | | |
| | Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan; | | |
| | Terwujudnya keindahan daerah melalui budaya bersih, budaya malu dan penghijauan desa serta penghijauan skala rumah tangga; | | |
| | Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas umum dan fasilitas sosial termasuk kepada perlindungan masyarakat dari bencana serta meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan; | | |
| | Berkurangnya daerah-daerah terisolir dan terpencil dengan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka otonomi desa dan penguatan kegiatan ekonomi dengan daerah yang lebih strategis dan cepat tumbuh | | |
| Meningkatkan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan | Terjalinnya kerjasama pengembangan dibidang agroindustri dengan daerah kabupaten terdekat; | Meningkatnya Produktivitas kualitas dan daya saing produk unggulan dan sarana/ prasarana produksi dan nilai tambah produk serta pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin | Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untukmenghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; |
| | Meningkatnya perdagangan dengan kabupaten, provinsi terdekat yang ditandai dengan meningkatnya arus barang dan jasa melalui perbaikan kualitas sarana prasarana jalan, jembatan dan penyeberangan; | Meningkatkan iklim investasi dan usaha; | |
| | Terciptanya iklim investasi yang sehat dengan kepastian usaha, layanan efisien untuk memperkuat daya saing pada zona pasar terbuka; | | |
| | Meningkatnya promosi Kabupaten Bulukumba sebagai tujuan wisata sejarah, seni dengan manajemen pengelolaan yang profesional. | | |

## 4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 untuk Periode *RPJMD Tahap Ketiga Tahun 2021-2026* maka Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba berlandaskan pada pembangunan tahap sebelumnya yang telah dilaksanakan dandicapai Kabupaten Bulukumba pada RPJMD Tahap Pertama, RPJMD Tahap Kedua,RPJMD Tahap Ketiga, RPJMD Tahap Keempat diarahkan untuk melanjutkan danmenyempurnakan pembangunan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya padaberbagai bidang pembangunan. RPJMD Tahap Keempat ditujukan untuk mewujudkanmasyarakat Bulukumba yang sejahtera dan mandiri melalui pengembangan agroindustrimelalui percepatan pembangunan di segala bidang.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tingginyatingkat pendapatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Paritas Daya Beli pada IPM Bulukumba, sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien danefektifnya manajemen pelayanan pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan statusgizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh dengan dayasaing perekonomianyang kompetitif dan bergerak dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasadengan tetap berbasis pada pertanian tanpa mengabaikan keterpaduan antar sektor.Lembaga perekonomian berfungsi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin semakin berkurang.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing antara lain dengan dititikberatkan pada upaya pencapaian sumberdaya manusia yang berkarakter cerdas, tangguh,kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan nilai-nilai religius yang dicirikandengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat indonesia yang beragama, beriman,dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, dinamis, dan berorientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan ciri khasnya sebagai orang bugis.

Pembangunan aspek pemerintahan telah mencapai hal yang diinginkan yakni telahmemahami dan menerapkan 10 (sepuluh) prinsip tata pemerintahan yang baik (goodgovernance) yakni partisipasi; penegakan hukum; transparansi; kesetaraan; daya tanggap;wawasan ke depan; akuntabilitas; pengawasan; efisiensi dan efektivitas; danprofesionalisme, peningkatan kondisi keamanan yang telah dicapai, peningkatankemampuan dan kapasitas aparatur, serta aspek keuangan daerah sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

### 4.2.1 Sinergitas Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 menjadi acuan penyusunan prioritas pada rencana kerja tahunan selama 5 tahun. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka RKP 2024 merupakan penjabaran dari prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2024 untuk menjaga keserasian rencana pembangunan.

Sinergitas proses perencanaan pembangunan merupakan suatu keharusan dalam proses pembangunan, perumusan proses perencanaan harus dilakukan secara berjenjang demi mewujudkan konsistensi arah dan tujuan pembangunan sehingga terwujud pembangunan yang padu dan berkelanjutan.

#### 4.2.1.1 Tema Pembangunan Nasional

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, kebijakan pembangunan tahun 2024, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2024 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2024, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Tranformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”

**Gambar IV-1**
**Tema RKP Tahun 2024 dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024**

Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian targettarget pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

#### 4.2.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional

Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional adapun sasaran pembangunan tahun 2024 adalah: (1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi,(b) tingkat pengangguran terbuka, (c) Gini Ratio, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2023 juga menitik beratkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran danindikator pembangunan tahun 2024 ditunjukkan oleh tabel berikut.

**Gambar IV-2**
**Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024**

### 4.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024,ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar IV-3**
**Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024**

### 4.2.1.4 Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam merumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bulukumba tetap memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi agar pembangunan tahunan Kabupaten Bulukumba dapat menunjang pembangunan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan pusat.Untuk Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Pemerintah mengusung tema pembangunan "***Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Inklusif"*** dengan 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan pada tahun 2024, lebih lanjut tujuh PN RKP Tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel:

**Tabel IV-5**
**Prioritas Nasional dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

| Prioritas Nasional Tahun 2024 | Prioritas Kabupaten Tahun 2024 |
|---|---|
| 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan | 4.Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan |
| 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan | 2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan |
| 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan berdaya saing | 1. Pembangunan sumber daya manusia |
| 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | 10.Peningkatan Produktifitas generasi muda |
| 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 5.Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan |
| 6. Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim | 6.Pelestarian lingkungan hidup |
| | 7.Kesiap siagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana |
| 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 3.Pemantapan reformasi birokrasi |
| | 8.Peningkatan kemitraan antar institusi |
| | 9.Peningkatan kemandiran desa |

### 4.2.2 Sinergitas Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba

Prioritas Pemerintah pusat tersebut kemudian menjadi cerminan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi dalam merencanakan pembangunan daerah tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005-2025 dan mempertimbangkan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, serta memperhatikan RKP Tahun 2024. Untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusung tema pembangunan **"*Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Inklusif*"**, dengan 6 prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2024,yaitu:

1. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Inovatif
2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata
3. Peningkatan Produktivitas Dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah
4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkualitas Dan Merata
5. Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
6. Pembentukan Karakter Dan Akhlaq Sdm Yang Berintegritas, Religious Dan Loyal Serta Profesional.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka keterkaitan pembangunan daerah RKPD Prov. Sulawesi Selatan 2024, RKPD Kab. Bulukumba 2024 difokuskan pada sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel IV-6**
**Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

| Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 | Prioritas Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 |
|---|---|
| 1.Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Inovatif | 3. Pemantapan reformasi birokrasi, |
| | 8. Peningkatan Kemitraan antar institusi |
| | 9. Peningkatan kemandirian desa |
| 2.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata | 2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan, |

| Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 | Prioritas Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 |
|---|---|
| | 7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana |
| 3.Peningkatan Produktivitas Dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah | 4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan, |
| | 10. Peningkatan produktifitas generasi muda |
| 4.Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkualitas Dan Merata | 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, |
| | 5. Peningkatan kualitas sistem Pelayanan kesehatan |
| 5.Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan | 6. Pelestarian lingkungan hidup. |
| 6.Pembentukan Karakter Dan Akhlaq SDM Yang Berintegritas, Religious Dan Loyal Serta Profesional | 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, |

### 4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Prioritas tahun 2024 banyak dipengaruhi dengan adanya pandemi *Covid-19* yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Kabupaten Bulukumba juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2024.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2024 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu guna menyonsong era baru pasca pandemi *Covid-19*.

Melihat tema dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, maka untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, mengusung tema pembangunan **"Optimalisasi Potensi Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif",** dengan 10 prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2024.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia,
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan,
3. Pemantapan reformasi birokrasi,
4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan,
5. Peningkatan kualitas sistem Pelayanan kesehatan
6. Pelestarian lingkungan hidup.
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
9. Peningkatan kemandirian desa
10. Peningkatan produktifitas generasi muda

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 difokuskan pada indikator Tujuan dan sasaran namun terdapat 2 indikator yakni IPM dan Gini Ratio mengalami penyesuaian untuk pencapaian prioritas Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan serta berdasarkan evaluasi pada capaian tahun sebelumnya sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel IV-7**
**Sasaran Pembangunan Tahun 2024**

| No | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | Satuan | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RPJMD Periode 2024 | RKPD Tahun 2024 |
| 1 | Pembangunan sumber daya manusia | Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Angka | 71 | 71 |
| | | Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama | Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani | % | 100 | 100 |
| | | Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 71,81 | 71,69 |
| | | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Indeks Pendidikan | Angka | 66,21 | 66,21 |
| 2 | Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan | Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas | Gini Ratio | Angka | 0,366 | 0,350 |
| | | Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah | Indeks Daya saing infrastruktur | Angka | 92 | 92 |
| 3 | Pemantapan reformasi birokrasi | Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | B | B |
| | | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan | Skor LPPD/Kategori | Skor | 3,5415 | 3,5415 |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 3,26-4,00 | 3,26-4,00 |
| 4 | Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan | Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi | Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB | % | 22,04 | 22,04 |
| | | Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian | Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian | % | 8,14 | 8,14 |
| | | Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi | Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB | % | 13,55 | 13,55 |
| | | Meningkatnya Produksi hasil Perikanan | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan | % | 7,66 | 7,66 |
| | | Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD | % | 3,26 | 3,26 |

| No | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | Satuan | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RPJMD Periode 2024 | RKPD Tahun 2024 |
| | | Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara | Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata | % | 6,76 | 6,76 |
| | | Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi | Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB | % | 25,36 | 25,36 |
| | | Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi | Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri | % | 10,63 | 10,63 |
| 5 | Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan | Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | Angka | 76,36 | 76,36 |
| | | Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 69,63 | 69,63 |
| 6 | Pelestarian lingkungan hidup | Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas | Gini Ratio | Angka | 0,366 | 0,350 |
| 7 | Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana | Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah | Indeks Daya saing infrastruktur | Angka | 92 | 92 |
| 8 | Peningkatan Kemitraan antar institusi | Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat | Indeks Rasa Aman | Angka | 15 | 15 |
| | | Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman | Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani | % | 89,66 | 89,66 |
| 9 | Peningkatan kemandirian desa | Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor | Indeks Desa Membangun | Angka | 0,78 | 0,78 |
| | | Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan | Persentase Desa Mandiri | % | 4,59 | 4,59 |
| 10 | Peningkatan produktifitas generasi muda | Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi | Indeks Pembangunan Pemuda | Angka | 59,94 | 59,94 |
| | | Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda | Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi | % | 27 | 27 |

Prioritas Pembangunan Tahun 2023 tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Tahun sebelumnya dan isu strategis daerah. Sinkronisasi permasalahan dan isu strategis terhadap prioritas pembangunan Tahun 2023, sebagai mana tabel sebagai berikut:

**Tabel IV-8**
**Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2024**

| No | Permasalahan Pembangunan | Isu Strategis | | | Kabupaten Bulukumba | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | Indikator Kinerja Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Global | Nasional | Provinsi Sul-Sel | | | | |
| 1 | Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal | Transformasi Digital | | Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas. | Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif | Pemantapan reformasi birokrasi (3) | Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi |
| | | | | | Sinergitas kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan stakeholder lainnya | | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan | Skor LPPD/Kategori |
| | | | | | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi | Indeks Kepuasan Masyarakat |
| | | | | | | Peningkatan Kemitraan antar institusi (8) | Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat | Indeks Rasa Aman |
| | | | | | | | Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman | Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani |
| | | | | | | Peningkatan kemandirian desa (9) | Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor | Indeks Desa Membangun |
| | | | | | | | Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan | Persentase Desa Mandiri |
| 2 | Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDG's) | Standar Pelaynan Minimal (SPM) | Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian. Sulawesi Selatan sebagi poros maritim | Mendorong kontribusi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan | Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan (2) | Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas | Gini Ratio/ Indeks Gini |
| | | | | | | | Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah | Indeks Daya saing infrastruktur |

| No | Permasalahan Pembangunan | Isu Strategis | | | Kabupaten Bulukumba | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | Indikator Kinerja Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Global | Nasional | Provinsi Sul-Sel | | | | |
| 3 | Masih Tingginya Tingkat Angka Kemiskinan | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDG's) | Standar Pelaynan Minimal (SPM) | Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. | Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sumber daya lokal | Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan (4) | Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi | Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB |
| 4 | Masih Tingginya Tingkat Pengangguran | | | | Peningkatnya aspek Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah | Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana (7) | Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian | Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian |
| | | | | | | | Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi | Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB |
| | | | | | | | Meningkatnya Produksi hasil Perikanan | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan |
| | | | | | | | Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD |
| | | | | | | | Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara | Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata |
| | | | | | | | Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi | Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB |
| | | | | | | | Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi | Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri |

| No | Permasalahan Pembangunan | Isu Strategis | | | Kabupaten Bulukumba | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | Indikator Kinerja Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Global | Nasional | Provinsi Sul-Sel | | | | |
| 5 | Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Masih Tinggi | Pandemi Covid-19 | | Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan. | Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) | Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan (5) | Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan |
| | | | | | | | Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat | Angka Harapan Hidup (AHH) |
| 6 | Masi Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's) | Standar Pelaynan Minimal (SPM) | Pelayanan Kesehatan bagi seluruh masyarakat | Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Pembangunan sumber daya manusia (1) | Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragama |
| | | | | Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas. | | | Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama | Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani |
| | | | | | | | Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal | Indeks Pembangunan Manusia |
| | | | | | | | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Indeks Pendidikan |
| 7 | Adanya Kontraksi Pertumbuhan Ekonomi | Pandemi Covid-19 | Pertumbuhan Ekonomi Mengalami Kontraksi | Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual) | Pengelolaan dan produktifitas sumber daya alam | Peningkatan produktifitas generasi muda (10) | Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi | Indeks Pembangunan Pemuda |
| | | | | | | | Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda | Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi |
| 8 | Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan | Perubahan Iklim | | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam. | Peningkatan kualitas, kapasitas dan penataan infrastruktur wilayah | Pelestarian lingkungan hidup (6) | Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas | Gini Ratio/ Indeks Gini |
| | | | | | | | Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah | Indeks Daya saing infrastruktur |

Prioritas Pembangunan 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi/Misi dan arah kebijakan RPJMD 2021-2026 sebagai mana pada tabel yang menggambarkan arah kebijakan RPJMD terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

**Tabel IV-9**
**Keterkaitan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah untuk Tahun 2024**

| No | Misi RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Kesadaran Toleransi Dan Beragama Dalam Masyarakat | Pembangunan sumber daya manusia | Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragama |
| | | | Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama | Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani |
| 2 | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Layanan Publik | Pemantapan reformasi birokrasi | Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi |
| | | | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan | Skor LPPD/Kategori |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi | Indeks Kepuasan Masyarakat |
| 3 | Mewujudkan Tata Kelola Pertanian Yang Berkualitas Berdaya Saing Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah Dan Ekspor | Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan | Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi | Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB |
| | | | Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian | Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian |
| 4 | Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional Dan Internasional | Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan | Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi | Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB |
| | | | Meningkatnya Produksi hasil Perikanan | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan |
| 5 | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal | Pembangunan sumber daya manusia | Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal | Indeks Pembangunan Manusia |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Indeks Pendidikan |
| 6 | Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat | Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan | Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas | Gini Ratio |
| | | | Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah | Indeks Daya saing infrastruktur |
| | | | Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan |
| | | | Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat | Angka Harapan Hidup (AHH) |

| No | Misi RPJMD | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Mengembangkan Destinasi Wisata Untuk Menarik Wisatawan Domestik Dan Mancanegara | Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan | Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD |
| | | | Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara | Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata |
| 8 | Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat | Pelestarian lingkungan hidup | Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat | Indeks Rasa Aman |
| | | Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana | Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman | Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani |
| | | | Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah | Indeks Daya saing infrastruktur |
| 9 | Pembangunan Dan Peningkatan Perdagangan Dan Perindustrian Untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi Dan Bantuan Pemerintah | Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan | Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi | Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB |
| | | | Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi | Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri |
| 10 | Membina Generasi Muda Yang Berkarakter Dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas Dan Profesionalisme | Peningkatan produktifitas generasi muda | Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi | Indeks Pembangunan Pemuda |
| | | | Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda | Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi |
| 11 | Membangun Desa Mandiri Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | Peningkatan kemandirian desa | Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor | Indeks Desa Membangun |
| | | | Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan | Persentase Desa Mandiri |
| 12 | Penegakan Supremasi Hukum Dan Pertahanan Dan Keamanan | Peningkatan Kemitraan antar institusi | Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas | Gini Ratio |
| | | | Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah | Indeks Daya saing infrastruktur |

#### 4.2.3.1 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bulukumba Tahun 2023, dirumuskan program prioritas pembangunan yang merupakan pelaksanaan dari program RPJMD Kabupaten Bulukum sebagaimana pada tabel berikut:

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bulukumba Tahun 2023, dirumuskan program prioritas pembangunan yang merupakan pelaksanaan dari program RPJMD Kabupaten Bulukum sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel IV-10**
**Program Prioritas Pembangunan Tahun 2024**

| No | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Sasaran Pembangunan | Program dan Proyek Prioritas | Indikator Kinerja (*Outcome*) | Perangkat Daerah Penanggung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan sumber daya manusia | Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu | Sekretariat Daerah |
| | | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 -15 Thun yng brprtisipsi dlm pndidikn dsr (SPM), Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 –18 Thun yng blum mnylsikn pndidikn dsr dn tu mnngh yng prprtisipsi dlm pndidikn kstrn (SPM) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV, Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan | Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrg ngr yng mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program Kawasan Permukiman | Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM) | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Program Pengembangan Permukiman | prsentase pengembagan permukiman, Persentase Pemukiman Yang Tertata | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| No | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Sasaran Pembangunan | Program dan Proyek Prioritas | Indikator Kinerja (*Outcome*) | Perangkat Daerah Penanggung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Program Penataan Bangunan Gedung | Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program Pengelolaan Persampahan | Presentase Sampah Yang Terkelolah | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( Kehati ) | Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati ( Flora Dan Fauna ) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 3 | Pemantapan reformasi birokrasi | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu | Sekretariat Daerah |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa, Penetapan APBD (Tepat Waktu), Persentase SILPA terhadap APBD, Persentase Belanja Pendidikan (20%), Persentase Belanja Kesehatan (10%), Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | BPKPD |
| | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase PAD terhadap pendapatan | BPKPD |
| | | | Program Kepegawaian Daerah | Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba | BKPSDM |
| | | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya | BKPSDM |
| | | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Jumlah Temuan BPK dan Persentase Pelanggaran Pegawai | Inspektorat Daerah |
| | | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Persenatse Tindak Lanjut Temuan | Inspektorat Daerah |
| | | | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Dinas Sosial |

| No | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Sasaran Pembangunan | Program dan Proyek Prioritas | Indikator Kinerja (*Outcome*) | Perangkat Daerah Penanggung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (SPM)Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM) | |
| | | | Program Pendaftaran Penduduk | Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Program Pencatatan Sipil | Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Program Informasi Dan Komunikasi Publik | Persentase perangkat daerah yang menggunkan layanan data pemerintah | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| | | | Program Aplikasi Informatika | Persentase perangkat daerah yag terkoneksi dijaringan intra pemerintah atau menggunaan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| | | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Peresentase Peningkatan Pelayanan Perizinan | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| | | | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 4 | Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan | Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian | Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Meningkatnya Produksi hasil Perikanan | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Jumlah Produksi Pertanian | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase Kelompok Tani yang dibina | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| No | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Sasaran Pembangunan | Program dan Proyek Prioritas | Indikator Kinerja (*Outcome*) | Perangkat Daerah Penanggung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Kontribusi PDRB sektor perikanan, Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan, Persentase Produksi Perikanan Tangkap | Dinas Perikanan |
| | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya, Cakupan Bina Kelompok Perikanan | Dinas Perikanan |
| | | | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Persentase Tingkat Konsumsi Ikan | Dinas Perikanan |
| | | | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%) | Dinas Pariwisata, Pemuda danOlahraga |
| | | | Program Pemasaran Pariwisata | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%) | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Hubungan Industrial | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| | | | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Program Pemberdayaan UMKM | Persentase UMKM Yang Diberdayakan | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Program Pengembangan UMKM | Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen | Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 5 | Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan | Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan Ketersediaan sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan | Dinas Kesehatan |

| No | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Sasaran Pembangunan | Program dan Proyek Prioritas | Indikator Kinerja (*Outcome*) | Perangkat Daerah Penanggung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar, Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Keluarga Ber PHBS | Dinas Kesehatan |
| 6 | Pelestarian lingkungan hidup | Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 7 | Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana | | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrg ngr yng mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program Kawasan Permukiman | Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM) | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Program Pengembangan Permukiman | prsentase pengembagan permukiman, Persentase Pemukiman Yang Tertata | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program Penataan Bangunan Gedung | Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program Pengelolaan Persampahan | Presentase Sampah Yang Terkelolah | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( Kehati ) | Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati ( Flora Dan Fauna ) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| No | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Sasaran Pembangunan | Program dan Proyek Prioritas | Indikator Kinerja (*Outcome*) | Perangkat Daerah Penanggung |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Peningkatan Kemitraan antar institusi | Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman | Program Penanggulangan Bencana | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananpencegahan dankesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM) | BPBD |
| | | | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Penegakan Perda, Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM) | Satpol PP, Damkar, Penyelamatan |
| | | | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat ( MHA) Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH | Presentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | Program Perlindungan Perempuan | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 9 | Peningkatan kemandirian desa | Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan | Program Penataan Desa | Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Program Peningkatan Kerjasama Desa | Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Jumlah Desa yang memiliki administrasi Pemerintahan Desa yang Baik | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase peningkatan status desa mandiri | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| No | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Sasaran Pembangunan | Program dan Proyek Prioritas | Indikator Kinerja (*Outcome*) | Perangkat Daerah Penanggung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Peningkatan produktifitas generasi muda | Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase Jumlah Pemuda Inovator | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

#### 4.2.3.2 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2024 dengan Sasaran RPJMD

RKPD sebagai perencanaan Tahunan tetap menjaga konsistensi dengan RPJMD yang tergambarkan melalui sasaran prioritas pembangunan, dapat dilihat pada Tabel berikut;

**Tabel IV-11**
**Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2024 dengan Sasaran RPJMD untuk Tahun 2024**

| No | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | Satuan | Target RKPD Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan sumber daya manusia | Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Angka | 71 |
| | | Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama | Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani | % | 100 |
| | | Terwujudnya SDM yang Unggul, dan Berkarakter Kearifan Lokal | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 71,69 |
| | | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Indeks Pendidikan | Angka | 66,21 |
| 2 | Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan | Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas | Gini Ratio/ Indeks Gini | Angka | 0,350 |
| | | Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah | Indeks Daya saing infrastruktur | Angka | 92 |
| 3 | Pemantapan reformasi birokrasi | Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | B |
| | | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan | Skor LPPD/Kategori | Skor | 3,5415 |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 3,26-4,00 |
| 4 | Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan | Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi | Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB | % | 22,04 |
| | | Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian | Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian | % | 8,14 |
| | | Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi | Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB | % | 13,55 |
| | | Meningkatnya Produksi hasil Perikanan | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan | % | 7,66 |

| No | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan | Satuan | Target RKPD Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD | % | 3,26 |
| | | Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara | Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata | % | 6,76 |
| | | Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi | Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB | % | 25,36 |
| | | Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi | Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri | % | 10,63 |
| 5 | Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan | Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | Angka | 76,36 |
| | | Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 69,63 |
| 6 | Pelestarian lingkungan hidup | Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas | Gini Ratio/ Indeks Gini | Angka | 0,350 |
| 7 | Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana | Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah | Indeks Daya saing infrastruktur | Angka | 92 |
| 8 | Peningkatan Kemitraan antar institusi | Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat | Indeks Rasa Aman | Angka | 15 |
| | | Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman | Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani | % | 89,66 |
| 9 | Peningkatan kemandirian desa | Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor | Indeks Desa Membangun | Angka | 0,78 |
| | | Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan | Persentase Desa Mandiri | % | 4,59 |
| 10 | Peningkatan produktifitas generasi muda | Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Yang Berkarakter dan Berprestasi | Indeks Pembangunan Pemuda | Angka | 59,94 |
| | | Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda | Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi | % | 27 |

### 4.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

#### 4.2.4.1 Strategi Pembangunan Tahun 2024

Pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bulukumba, didasarkan pada strategi yang dirumuskan dengan melakukan analisis berdasarkan kekuatandan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Strategi Salah satu upaya mencapai sasaran pembangunan daerah Bulukumba, sebagaimana ditetapkan dalam kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bulukumba adalah memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulukumba guna menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal.

Strategi pembangunan daerah Bulukumba tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Bulukumba Tahun 2024. Strategi pembangunan daerah Bulukumba meliputi:

1. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sumber daya lokal dalam rangka pemerataan pendapatan bagi masyarakat Bulukumba khususnya peningkatan nilai tukar petani dan menurunnya Angka Kesenjangan/Indeks Gini serta penurunan rasio ketergantungan.
2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif khususunya dalam peningkatan kualitas layanan pemerintah.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
4. Mendorong kontribusi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan dalam membangkitkan perekonomian daerah.
5. Peningkatan kualitas, kapasitas dan penataan infrastruktur wilayah secara merata serta Pengendalian kualitas lingkungan hidup.
6. Meningkatnya aspek Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah.
7. Sinergitas kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan stakeholder lainnya.

#### 4.2.4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Penyusunan arah kebijakan pembangunan Tahun 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPJMD. Adapun Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan RPJMD terhadap prioritas pembangunan Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel IV-12**
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2024**

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 | Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2024 |
|---|---|---|
| 1. | Pembangunan sumber daya manusia | Peningkatan Insentif Imam Masjid |
| | | Peningkatan moralitas dan karakter peserta didik dan tenagakependidikan dasar dengan merancang dan menerapkan integrasi nilai-nilai moral dan karakter dalam proses belajar mengajar |
| | | Penyediaan akses air minum dan sanitasi kawasan permukiman |
| 2. | Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan | Pemenuhan kebutuhan energi listrik dan energi terbarukan |

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 | Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2024 |
|---|---|---|
| | | Peningkatan kualitas dankemantapan jalan provinsi serta pembangunan infrastuktur wilayah terisolir<br>Penyediaan akses air minum dan sanitasi kawasan permukiman |
| 3. | Pemantapan reformasi birokrasi | Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan publik |
| 4. | Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan | Penguatan SDM pelaku usahadan dukungan sarana prasarana, teknologi, di bidang pertanian |
| | | Peningkatan produktivitas melalui industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan |
| | | peningkatan promosi investasi sektor perikanan |
| | | Pengembangan dan Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)<br>Peningkatan akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dalam skema perhutanan sosial |
| 5. | Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan | Akselerasi pembangunan rumah sakit<br>Pengembangan daya saing keolahragaan melalui dukungan sarana dan prasarana olahraga |
| 6 | Pelestarian lingkungan hidup | Penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan danantar tingkatan pemerintahan dalam penegakan hukum terhadap pemanfaatan jasa lingkungan dan ketaatan pelaksanaan pembangunan rendah karbon<br>Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar daerah aliran sungai (DAS) |
| 7 | Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana | Pemenuhan kebutuhan energi listrik dan energi terbarukan<br>Peningkatan kualitas dankemantapan jalan provinsi serta pembangunan infrastuktur wilayah terisolir<br>Penyediaan akses air minum dan sanitasi kawasan permukiman |
| 8 | Peningkatan Kemitraan antar institusi | peningkatan koordinasi antar instansi terkait |
| | | Terwujudnya kesadaran saling melindungi dalam masyarakat |
| 9 | Peningkatan kemandirian desa | Peningkatan produktivitasmelalui industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian,perikanan, dan peternakan |
| 10 | Peningkatan produktifitas generasi muda | Peningkatan peran pemuda dalam pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan |

## 4.3 Dukungan Terhadap Prioritas Provinsi dan Nasional

### 4.3.1 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba dan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Sebagai dukungan terhadap kegiatan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, maka Kabupaten Bulukumba menetapkan program pembangunan daerah yang menjadi pendukung kegiatan tersebut sebagai mana pada Tabel  sebagai berikut

**Tabel IV-13**
**Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Terhadap Prioritas Provinsi Tahun 2024**

| No. | Provinsi Sulawesi Selatan | | | Kabupaten Bulukumba | | Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Impact/ Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | Indikator Kinerja Ssaaran | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | |
| 1 | Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif | Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi | Pemantapan reformasi birokrasi (3) | Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah | Nilai SAKIP Provinsi | | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan |
| | | | | | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD |
| | | | | | | | Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa |
| | | | | | | | Penetapan APBD (Tepat Waktu) |
| | | | | | | | Persentase SILPA terhadap APBD |
| | | | | | | | Persentase Belanja Pendidikan (20%) |
| | | | | | | | Persentase Belanja Kesehatan (10%) |
| | | | | | | | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan |
| | | | | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase PAD terhadap pendapatan |
| | | | | | | Program Kepegawaian Daerah | Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba |
| | | | | | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Jumlah Temuan BPK |
| | | | | | | | Persentase Pelanggaran Pegawai |
| | | | | | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Persenatse Tindak Lanjut Temuan |
| | | Optimalnya Kualitas pelayanan publik | Indeks Pelayanan Publik | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM) |
| | | | | | | | Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM) |
| | | | | | | | Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) |
| | | | | | | | Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM) |

| No. | Provinsi Sulawesi Selatan | | | Kabupaten Bulukumba | | Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Impact/ Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | Indikator Kinerja Ssaaran | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Program Pendaftaran Penduduk | Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk |
| | | | | | | Program Pencatatan Sipil | Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran. |
| | | | | | | Program Informasi Dan Komunikasi Publik | Persentase perangkat daerah yang menggunkan layanan data pemerintah |
| | | | | | | Program Aplikasi Informatika | Persentase perangkat daerah yag terkoneksi dijaringan intra pemerintah atau menggunaan akses internet yang diamankan |
| | | | | | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Peresentase Peningkatan Pelayanan Perizinan |
| | | | | | | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu |
| | | | | Peningkatan Kemitraan antar institusi (8) | Meningkatkan Kenyamanan Dan Ketertiban Masyarakat | Program Penanggulangan Bencana | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM) |
| | | | | Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana (7) | Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman | | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananpencegahan dankesiapsiagaan terhadap bencana (SPM) |
| | | | | | | | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM) |
| | | | | | | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan |
| | | | | | | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan |
| | | | | | | | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibt dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM) |
| | | | | | | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat |
| | | | | | | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat ( MHA) Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH | Presentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH |
| | | | | | | Program Perlindungan Perempuan | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu |
| | | | | | | Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten |
| | | | | | | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi |

| No. | Provinsi Sulawesi Selatan | | | Kabupaten Bulukumba | | Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Impact/ Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | Indikator Kinerja Ssaaran | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | |
| | | | | Peningkatan kemandirian desa (9) | Meningkatkan Pembangunan Desa di Segala Sektor | Program Penataan Desa | Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik |
| | | | | | Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan | Program Peningkatan Kerjasama Desa | Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik |
| | | | | | | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Jumlah Desa yang memiliki administrasi Pemerintahan Desa yang Baik |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase peningkatan status desa mandiri |
| 2 | Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata | Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan merata | Indeks Williamson | Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan (2) | Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentasepanjang talud/ drainase yang baik |
| | | Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah | Indeks Layanan Infrastruktur | | Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah | | Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M) |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan |
| | | | | | | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi |
| | | | | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase rumah tangga pengguna air bersih |
| | | | | | | | Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM) |
| | | | | | | Program Kawasan Permukiman | Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau |
| | | | | | | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) |
| | | | | | | | Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM) |
| | | | | | | Program Pengembangan Permukiman | prsentase pengembagan permukiman |
| | | | | | | | Persentase Pemukiman Yang Tertata |
| | | | | | | Program Penataan Bangunan Gedung | Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan |
| | | | | | | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan |
| | | | | | | Program Pengelolaan Persampahan | Presentase Sampah Yang Terkelolah |
| | | | | | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( Kehati ) | Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya, Fungsi Kawasan Hutan, Keanekaragaman Hayati |

| No. | Provinsi Sulawesi Selatan | | | Kabupaten Bulukumba | | Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Impact/ Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | Indikator Kinerja Ssaaran | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | |
| | | | | | | | (Flora dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari |
| 3 | Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah | Meningkatnya produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah | Produktifitas Total Daerah | Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan (4) | Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Pertanian untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi | Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Persentase Jumlah Desa Mandiri Pangan Yang Dibina |
| | | | | | Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Jumlah Produksi Pertanian |
| | | | | | | | Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Komoditi Unggulan |
| | | | | | | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia |
| | | | | | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman |
| | | | | | | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh |
| | | | | | | | Persentase Kelompok Tani yang dibina |
| | | | | | | Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin |
| | | Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas | Pertumbuhan Ekonomi | | Meningkatkan Potensi Dan Daya Saing Daerah Bidang Perikanan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Kontribusi PDRB sektor perikanan |
| | | | | | Meningkatnya Produksi hasil Perikanan | | Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan |
| | | | | | | | Produksi Perikanan Tangkap |
| | | | | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Produksi Perikanan Budidaya |
| | | | | | | | Cakupan Bina Kelompok Perikanan |
| | | | | | | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Persentase Tingkat Konsumsi Ikan |
| | | | | | Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Keuangan Daerah | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan |
| | | | | | Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara | Program Pemasaran Pariwisata | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota |
| | | | | | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD |
| | | | | | Meningkatkan Kualitas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi | Program Hubungan Industrial | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). |

| No. | Provinsi Sulawesi Selatan | | | Kabupaten Bulukumba | | Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Impact/ Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | Indikator Kinerja Ssaaran | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada |
| | | | | | | Program Pemberdayaan UMKM | Persentase UMKM Yang Diberdayakan |
| | | | | | | Program Pengembangan UMKM | Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha |
| | | | | | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal |
| | | | | | | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi |
| | | | | | | Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen | Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku |
| 4 | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata | Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja | Tingkat Pengangguran terbuka | Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan (5) | Terwujudnya Derajat Kesehatan masyarakat | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar (SPM) |
| | | Menurunya angka kemiskinan | Tingkat Kemiskinan | | Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat | | Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) (SPM) |
| | | | | | | | Persentas bayi baru lahir umur 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) |
| | | | | | | | Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) |
| | | | | | | | Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) |
| | | | | | | | Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) |
| | | | | | | | Persentase orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) |
| | | | | | | | Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) |
| | | | | | | | Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) |
| | | | | | | | Persentas orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) |
| | | Meningkatnya Kualitas SDM yang | IPM | | | | Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC)yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) |

| No. | Provinsi Sulawesi Selatan | | | Kabupaten Bulukumba | | Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Impact/ Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | Indikator Kinerja Ssaaran | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | |
| | | Kompetitif dan Inklusif | | | | | |
| | | | | | | | Persentase orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) |
| | | | | | | | Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan |
| | | | | | | | Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| | | | | | | | Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk |
| | | | | | | | Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk |
| | | | | | | | Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk |
| | | Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar |
| | | | | | | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar |
| | | | | | | | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar |
| | | | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Keluarga Ber PHBS |
| | | | | | | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | Indeks Kerukunan Umat Beragama Dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi |
| | | | | | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah |
| | | | | | | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama. |
| | | | | | | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) |
| | | | | | | | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belummenyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan (SPM) |
| | | | | | | | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) |
| | | | | | | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah |
| | | | | | | | Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV |
| | | | | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase Jumlah Pemuda Inovator |
| | | | | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional |

| No. | Provinsi Sulawesi Selatan | | | Kabupaten Bulukumba | | Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Impact/ Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | Indikator Kinerja Ssaaran | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | | |
| | | | | | | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum |
| 5 | Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan | IKLH | Pelestarian lingkungan hidup (6) | Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah yang berkualitas | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentasepanjang talud/ drainase yang baik |
| | | Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq) | | Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah | | Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M) |
| | | | | | | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan |
| | | | | | | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi |
| | | | | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase rumah tangga pengguna air bersih |
| | | | | | | | Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM) |
| | | | | | | Program Kawasan Permukiman | Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau |
| | | | | | | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) |
| | | | | | | | Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM) |
| | | | | | | Program Pengembangan Permukiman | prsentase pengembagan permukiman |
| | | | | | | | Persentase Pemukiman Yang Tertata |
| | | | | | | Program Penataan Bangunan Gedung | Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan |
| | | | | | | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan |
| | | | | | | Program Pengelolaan Persampahan | Presentase Sampah Yang Terkelolah |
| | | | | | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( Kehati ) | Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya, Fungsi Kawasan Hutan, Keanekaragaman Hayati (Flora dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari |

### 4.3.2 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Sebagai dukungan terhadap kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2023, maka Kabupaten Bulukumba menetapkan program pembangunan daerah yang menjadi pendukung kegiatan tersebut sebagai mana pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel IV-14**
**Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2024**

| No. | Kode | Program Prioritas Nasional | Indikator | Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (PN) | Indikator Kinerja Program (outcome) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PN1** | **Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan** | | **Pangan** | |
| | | | | **Pertanian** | |
| | | | | **Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah** | |
| | | | | **Perdagangan** | |
| | | | | **Perikanan** | |
| | | | | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | |
| | PP | Pemenuhan Kebutuhan Energi Dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (Ebt) | Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen) | | |
| | | | Indeks Ketahanan Energi (Indeks) | | |
| | PP | Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi | Produktivitas air (water productivity) (US$/$m^3$) | Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi |
| | PP | Peningkatan Ketersediaan, Akses Dan Kualitas Konsumsi Pangan | Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c)) | Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman (persen) |
| | | | Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari) | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita (Kkal) |
| | | | Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari) | | Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita (Gram) |
| | | | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under- nourishment/PoU) | Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (persen) |
| | | | Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES) | | Persentase Peningkatan Produktifitas Ternak (persen) |
| | | | | Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (persen) |
| | | | | | Persentase Prasarana Sektor Peternakan Yang Tersedia (persen) |
| | PP | Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan Dan Kelautan | Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha) | | |
| | | | Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen) | Pengelolaan Perikanan Tangkap | Kontribusi PRDB sektor perikanan (persen) |
| | | | | | Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan (persen) |
| | | | | | Produksi Perikanan Tangkap (persen) |
| | | | | Pengelolaan Perikanan Budidaya | Produksi Perikanan Budidaya (persen) |
| | | | | | Cakupan Bina Kelompok Perikanan (persen) |
| | PP | Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (Umkm), Dan Koperasi | Rasio kewirausahaan nasional (Persen) | Pemberdayaan UMKM | Persentase UMKM Yang Diberdayakan (persen) |
| | | | Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen ) | Pengembangan UMKM | Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha (persen) |
| | | | Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen ) | | |
| | PP | Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi | Pertumbuhan PDB pertanian (Persen) | Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (persen) |

| No. | Kode | Program Prioritas Nasional | Indikator | Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (PN) | Indikator Kinerja Program (outcome) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kontribusi PDB kemaritiman (Persen) | Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen | Persentase Peningkatan Jumlah Pasar Yang Direhabilitasi Dan Peningkatan Perdaganagan Barang Dan Jasa (persen) |
| | | | Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen) | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (persen) |
| | | | Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen) | Pemasaran Pariwisata | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (persen) |
| | | | Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun) | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (persen) |
| | | | Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen) | | |
| | | | Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang) | Penempatan Tenaga Kerja | Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan (persen) |
| | | | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen) | Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (persen) |
| | | | Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen) | | |
| | | | Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang) | | |
| | | | Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang) | | |
| | | | Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang) | | |
| | PP | Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (Tkdn) | Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen) | Pengembangan Ekspor | Presentase Peningkatan Aksesibilitas Terhadap Jaringan Perdagangan Domestik Dan Internasional (Persen) |
| | | | Neraca perdagangan barang (USD miliar) | | |
| | | | Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar) | | |
| **2** | **PN2** | **Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan** | | **Perikanan** | |
| | | | | **Pangan** | |
| | | | | **Kesehatan** | |
| | | | | **Pertanian** | |
| | | | | **Pendidikan** | |
| | PP | Pembangunan Wilayah Sulawesi | Laju pertumbuhan PDRB Sulawesi (persen/tahun) | Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Persentase Tingkat Konsumsi Ikan (persen) |
| | | | Share PDRB Wilayah Sulawesi (persen) | Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Persentase Jumlah Desa Mandiri Pangan Yang Dibina (persen) |
| | | | IPM Wilayah Sulawesi | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar (SPM) (persen) |
| | | | Persentase penduduk miskin wilayah Sulawesi (persen) | | Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) (SPM) (persen) |
| | | | | | Persentas bayi baru lahir umur 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen) |
| | | | | | Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) (persen) |
| | | | | | Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen) |

| No. | Kode | Program Prioritas Nasional | Indikator | Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (PN) | Indikator Kinerja Program (outcome) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen) |
| | | | | | Persentas orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen) |
| | | | | | Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen) |
| | | | | | Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen) |
| | | | | | Persentas orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen) |
| | | | | | Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC)yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen) |
| | | | | | Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (persen) |
| | | | | | Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (persen) |
| | | | | | Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) (persen) |
| | | | | | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belummenyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan (SPM) (persen) |
| | | | | | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) (persen) |
| | | | | Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah |
| | | | | | Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (persen) |
| | | | | Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (persen) |
| | | | | | Persentase Peningkatan Produktifitas Ternak (persen) |
| | | | | Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (persen) |
| | | | | | Persentase Prasarana Sektor Peternakan Yang Tersedia (persen) |
| **3** | **PN3** | **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing** | | **Kesehatan** | |
| | | | | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | |
| | | | | **Sosial** | |

| No. | Kode | Program Prioritas Nasional | Indikator | Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (PN) | Indikator Kinerja Program (outcome) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Tenaga Kerja** | |
| | | | | **Pendidikan** | |
| | | | | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | |
| | | | | **Kepemudaan dan Olahraga** | |
| | | | | **Penanaman Modal** | |
| | PP | Perlindungan Sosial Dan Tata Kelola Kependudukan | Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%) | Rehabilitasi Sosial | Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM) (persen) |
| | | | | | Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM) (persen) |
| | | | | | Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (persen) |
| | | | | | Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM) (persen) |
| | | | Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR) | Pengendalian Penduduk | Persentase Pembinaan Kebijakan Dan Strategi Pengendalian Penduduk (Penyusunan Grand Design , Penyusunan Profil Kependudukan/Paremeter Dan Proyeksi Penduduk) (persen) |
| | | | Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%) | Rehabilitasi Sosial | Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM) (persen) |
| | PP | Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial | Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial | | Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM) (persen) |
| | | | Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah | | Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (persen) |
| | | | | | Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM) (persen) |
| | | | | Pengendalian Penduduk | Persentase Pembinaan Kebijakan Dan Strategi Pengendalian Penduduk (Penyusunan Grand Design , Penyusunan Profil Kependudukan/Paremeter Dan Proyeksi Penduduk) (persen) |
| | PP | Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan | Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar (SPM) (persen) |
| | | | Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup) | | Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) (SPM) (persen) |
| | | | Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup) | | Persentas bayi baru lahir umur 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen) |
| | | | Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) | | Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) (persen) |

| No. | Kode | Program Prioritas Nasional | Indikator | Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (PN) | Indikator Kinerja Program (outcome) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | | Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen) |
| | | | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan) | | Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen) |
| | | | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen) | | Persentas orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen) |
| | | | Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen) | | Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen) |
| | | | Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) | | Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen) |
| | | | Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | | Persentas orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen) |
| | | | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria | | Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC)yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (SPM) (persen) |
| | | | Insidensi hepatitis B (persen) | | Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (persen) |
| | | | Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun | | Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (persen) |
| | | | Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen) | | Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk |
| | | | Persentase tekanan darah tinggi | | |
| | | | Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi | | |
| | | | Persentase rumah sakit terakreditasi | | |
| | PP | Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas | Nilai rata-rata hasil PISA:<br>a. Membaca<br>b. Matematika<br>c. Sains | Pengelolaan Pendidikan | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) (persen) |
| | | | Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen):<br>a. Membaca<br>b. Matematika<br>c. Sains | | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belummenyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan (SPM) (persen) |
| | | | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun) | | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) (persen) |
| | | | Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun) | Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah |

| No. | Kode | Program Prioritas Nasional | Indikator | Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (PN) | Indikator Kinerja Program (outcome) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (persen) |
| | PP | Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Perlindungan Perempuan | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (persen) |
| | | | Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) | Perlindungan Khusus Anak | Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (persen) |
| | | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase ARG pada Belanja Daerah APBD (persen) |
| | | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase Jumlah Layanan Pembinaan Keluarga (persen) |
| | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan | Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Sistem Data Gender / Data Terpilah (persen) |
| | | | Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir | Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Nilai Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak |
| | | | Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase Jumlah Pemuda Inovator (persen) |
| | | | | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional (persen) |
| | PP | Pengentasan Kemiskinan | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan) | Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada (persen) |
| | | | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha | Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Diklat Perkoperasian Yang Diadakan (persen) |
| | | | | Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | Persentase Peningkatan Volume Usaha dan Modal Usaha Koperasi(persen) |
| | | | | Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (persen) |
| | | | | Promosi Penanaman Modal | Persentase Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (persen) |
| | | | | | *PMA (investor)* |
| | | | | | *PMDN (investor)* |
| | | | | Pelayanan Penanaman Modal | Peresentase Peningkatan Pelayanan Perizinan (persen) |
| | | | | | |
| | | | Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha) | Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya | Persentase Konservasi daya hayati dan ekosistem yang terlaksana(persen) |
| | | | Bidang tanah yang diredistribusi | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi |
| | | | Bidang tanah yang dilegalisasi | Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum |
| | | | | Pengelolaan Izin Membuka Tanah | Persentase izin membuka tanah (persen) |
| | PP | Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing | Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas | Penempatan Tenaga Kerja | Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan (persen) |
| | | | Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University | Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (persen) |

| No. | Kode | Program Prioritas Nasional | Indikator | Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (PN) | Indikator Kinerja Program (outcome) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | a. Top 200 | | |
| | | | b. Top 300 | | |
| | | | c. Top 500 | | |
| | | | Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%) | Hubungan Industrial | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). (persen) |
| **4** | **PN4** | **Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan** | | **Kesatuan Bangsa dan Politik** | |
| | | | | **Komunikasi dan Informatika** | |
| | | | | **Sekretariat Daerah** | |
| | | | | **Pendidikan** | |
| | | | | **Kebudayaan** | |
| | PP | Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter | | Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | Indeks Kerukunan Umat Beragama Dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi (persen) |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM) (persen) |
| | | | | | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belummenyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan (SPM) (persen) |
| | | | | | Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM) (persen) |
| | | | | Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah |
| | | | | | Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (persen) |
| | PP | Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia | | Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah (persen) |
| | | | | Pengembangan Kebudayaan | Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (persen) |
| | | | | Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan pelatihan/pembinaan (persen) |
| | PP | Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat (persen) |
| | | | | Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama. (persen) |
| | PP | Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter | | Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat (persen) |

| No. | Kode | Program Prioritas Nasional | Indikator | Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (PN) | Indikator Kinerja Program (outcome) |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **PN5** | **Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar** | | **Perumahan dan Permukiman** | |
| | | | | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | |
| | | | | **Pertanian** | |
| | | | | **Perhubungan** | |
| | | | | **Komunikasi dan Informatika** | |
| | PP | Infrastruktur Pelayanan Dasar | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%) | Kawasan Permukiman | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (persen) |
| | | | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%) | | |
| | | | Persentase rumah tangga yangmemiliki sertifikat hak atas tanahuntuk perumahan (%) | Pengelolaan Izin Membuka Tanah | Persentase izin membuka tanah (persen) |
| | | | Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%) | | |
| | | | Persentase rumah tangga yangmenempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman(%) | Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase rumah tangga pengguna air bersih (persen) |
| | | | Persentase rumah tangga yang masihmempraktikkan buang air besarsembarangan (%) | | Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM) (persen) |
| | | | Persentase rumah tangga yangmenempati hunian dengan aksessampah yang terkelola dengan baik(%) | Pengembangan Perumahan | Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (persen) |
| | | | Persentase rumah tangga yangmenempati hunian dengan akses airminum layak (%) | | Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (persen) |
| | | | Persentase rumah tangga yangmenempati hunian dengan akses airminum aman (%) | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (persen) |
| | | | Volume tampungan air per kapita (m3/kapita) | Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (persen) |
| | | | Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi | Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi |
| | | | Luas lahan pertanian padi dan non- padi yang beririgasi meningkat (Hektare) | | |
| | | | Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana | | |
| | | | Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik) | | |
| | | | Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen) | | |
| | PP | Infrastruktur Ekonomi | Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km) | Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase panjang talud/ drainase yang baik (persen) |
| | | | Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan) | Penyelenggaraan Jalan | Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan (persen) |
| | | | Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%) | | |

| No. | Kode | Program Prioritas Nasional | Indikator | Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (PN) | Indikator Kinerja Program (outcome) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's) | | |
| | PP | Infrastruktur Perkotaan | Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota) | Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (persen) |
| | | | | | Persentase Prasarana Sektor Peternakan Yang Tersedia (persen) |
| | | | | Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Persentase tersedianya fasilitas penyelengaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C (persen) |
| | PP | Energi Dan Ketenagalistrikan | Rasio elektrifikasi (%) | | |
| | | | Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh) | | |
| | | | Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton) | | |
| | PP | Transformasi Digital | Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata) | | |
| | | | Persentase pengguna internet (Persentase) | Aplikasi Informatika | Persetase perangkat daerah yag terkoneksi dijaringan intra pemerintah atau menggunaan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo (persen) |
| | | | Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59% | Informasi Dan Komunikasi Publik | Persentase perangkat daerah yang menggunkan layanan data pemerintah (persen) |
| | | | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase) | | |
| **6** | **PN6** | **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim** | | **Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** | |
| | | | | **Lingkungan Hidup** | |
| | PP | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Udara (IKU) | Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (persen) |
| | | | Indeks Kualitas Air (IKA) | Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di kabupaten/kota (persen) |
| | | | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( Kehati ) | Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati ( Flora Dan Fauna ) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari (persen) |
| | | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL) | Pengelolaan Persampahan | Presentase Sampah Yang Terkelolah (persen) |
| | PP | Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim | Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen) | Penanggulangan Bencana | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM) (persen) |
| | | | Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen) | | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananpencegahan dankesiapsiagaan terhadap bencana (SPM) (persen) |
| | | | Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit) | | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM) (persen) |
| | PP | Pembangunan Rendah Karbon | Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen) | Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (persen) |

| No. | Kode | Program Prioritas Nasional | Indikator | Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (PN) | Indikator Kinerja Program (outcome) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen) | Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di kabupaten/kota (persen) |
| | | | Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen) | | |
| | | | Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen) | | |
| | | | Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen) | | |
| **7** | **PN7** | **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik** | | **Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** | |
| | | | | **Sekretariat Daerah** | |
| | | | | **Perencanaan** | |
| | | | | **Kepegawaian** | |
| | | | | **Keuangan** | |
| | | | | **Inspektorat Daerah** | |
| | | | | **Pendidikan dan Pelatihan** | |
| | | | | **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | |
| | PP | Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri | Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional | Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (persen) |
| | PP | Penegakan Hukum Nasional | Indeks Pembangunan Hukum | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (persen) |
| | PP | Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional | Global Fire Power Index | | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibt dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM) (persen) |
| | | | Global Terorism Index | | |
| | | | Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian | | |
| | | | Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional | | |
| | PP | Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola | Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas* | | |
| | | | PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas* | | |
| | | | Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas* | Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu (persen) |
| | | | | Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan (persen) |
| | | | | Pengelolaan Keuangan Daerah | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (persen) |
| | | | | | Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa (persen) |
| | | | | | Penetapan APBD (Tepat Waktu) (persen) |
| | | | | | Persentase SILPA terhadap APBD (persen) |
| | | | | | Persentase Belanja Pendidikan (20persen) (persen) |

| No. | Kode | Program Prioritas Nasional | Indikator | Program Daerah Yang Mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (PN) | Indikator Kinerja Program (outcome) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Persentase Belanja Kesehatan (10persen) (persen) |
| | | | | | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan () |
| | | | | Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase PAD terhadap pendapatan (persen) |
| | | | | Kepegawaian Daerah | Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba (persen) |
| | | | | Pengembangan Sumber Daya Manusia | Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya (persen) |
| | | | | Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Jumlah Temuan BPK (persen) |
| | | | | | Persentase Pelanggaran Pegawai (persen) |
| | | | | Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Persenatse Tindak Lanjut Temuan (persen) |
| | | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (persen) |
| | | | | Pendaftaran Penduduk | Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (persen) |
| | | | | Pencatatan Sipil | Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran. (persen) |

Adapun target Indikator Kinerja Makro Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV-15**
**Indikator Kinerja Makro Nasional,**
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

| No. | Indikator Kinerja Makro | Satuan | Bulukumba | Prov. Sulawesi Selatan | Nasional |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka/ Nilai | 71,69 | 73,99 | 73,31–73,49 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 6,70 | 8,31 | 7,5–8,5 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 2,50 | 4,24 | 5,3–6,0 |
| 4 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,15 | 5,04-6,52 | 5,1-5,7 |
| 5 | Gini Ratio | Angka | 0,350 | 0,361 | 0,375–0,378 |

## 4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bulukumba

Ada beberapa gagasan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai berikut:

### 4.4.1 Bidang Pemerintahan

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah menjadi konsensus nasional diharapkan mampu mempercepat upaya peningkatkan kemakmuran daerah. Dalam perkembangannya, Daerah Kabupaten Bulukumba dengan segenap potensinya diharapkan mampu mengelola berbagai potensi tersebut dengan konsep *Good Governance*. Prinsip transparansi, akuntabilitas dan Profesionalitas harus mampu ditunjukkan secara nyata dalam pembangunan daerah dalam rangka merealisasikan konsep good governance tersebut.

Menempatkan desa sebagai pertumbuhan juga sangat penting mengingat desa mempunyai modal pembangunan cukup besar dan kontinyu. Pemerintah Kabupaten Bulukumba tentu saja membutuhkan kajian-kajian baru yang kemudian di implementasikan dengan berbagai kebijakan daerah untuk mengatur beberapa kewenangan-kewenangan yang terbagi menjadi kewenangan pemerintah Kecamatan, dan pemerintah desa.

Penataan SDM dalam pemerintahan, baik Pemerintah daerah dan DPRD secara kelembagaan menjadi penting. Terlebih banyak anggota DPRD yang baru dan menjadi bagian dari mitra kerja pemerintah daerah. Terlebih menyikapi UU pemerintah daerah yang baru, UU pemerintah desa, dan beberapa perubahan UU lainnya membutuhkan banyak peningkatan kapasitas dan pengetahuan DPRD maupun pemerintah daerah.

### 4.4.2 Bidang Ekonomi dan Keuangan

Urusan bidang ekonomi dan keuangan mempunyai beberapa sub bidang yang terkait dengan program–program peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan aset daerah. Bidang–bidang dibawah ekonomi disajikan sebagai berikut :

*A. Urusan Pariwisata*

Visi Pariwisata Kabupaten Bulukumba yang ingin menjadikan Kabupaten Bulukumba sebagai tujuan wisata terkemuka di Sulawesi Selatan tentu saja menjadi tujuan yang tidak mudah diperoleh dengan usaha-usaha yang normatif saja. Kabupaten Bulukumba dengan potensi khas budaya memang telah menjadi fenomena pariwisata nasional yang membedakan dengan daerah lainnya.

Namun dengan segala potensi yang dimiliki Kabupaten Bulukumba, apabila tidak dikelola dengan baik maka bukan tidak mungkin akan ketinggalan dengan daerah yang lain. Sejalan dengan perkembangan industri pariwisata yang semakin kompetitif dan trend pasar yang terus meningkat maka pembangunan pada bidang ini harus di dorong lebih kuat dan di arahkan secara tepat untuk meningkatkan daya saing dalam peta kepariwisataan nasional dan regional.

Beberapa usulan permasalahan yang menjadi usulan prioritas yaitu:

1. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
2. Pengembangan Promosi Pariwisata, Pembinaan Event Budaya dan Pariwisata
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Keolahragaan

*B. Urusan Perikanan dan Kelautan*

Beberapa usulan permasalahan yang menjadi usulan prioritas perikanan dankelautan adalah:

1. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap
2. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya

*C. Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan*

Seperti kita ketahui sektor pertanian saat ini masih menjadi tumpuan hidup masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Bulukumba pada khususnya. Sektor pertanian sebagai penghasil dari kebutuhan pangan masyarakat menjadi vital untuk mendapatkan perhatian dan prioritas.

Sektor pertanian menyimpan masalah yang serius di masa depan apabila tidak mendapatkan respon yang memadai. Fenomena klasik yang sering mengemuka seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk adalah semakin meningkatnya kebutuhan permukiman. Hal ini menyimpan problem sosial yang sangat dilematis, dimana lahan-lahan pertanian yang sebelumnya Hijau dan subur menjadi kawasan permukiman yang pada akhirnya menghilangkan fungsi awal sebagai lahan produktif.

Dalam menyikapi kebutuhan pangan di Kabupaten Bulukumba yang semakin besar pada tahun-tahun mendatang ditandai dengan laju pertambahan penduduk dan industri perhotelan yang pesat menjadikan komoditas-komoditas primer dan unggulan di Kabupaten Bulukumba untuk ditingkatkan. Produksi hasil pertanian perlu dijaga dan mendapat perhatian yang cukup sehingga diharapkan di Kabupaten Bulukumba memiliki ketahanan pangan yang baik.

Hal ini penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Bulukumba ini. Usulan permasalahan yang menjadi usulan prioritas bidang pertanian dan ketahanan pangan adalah:

1. Pengembangan Sarana Pertanian/Peternakan
2. Pengembangan Prasarana Pertanian/Peternakan
3. Pengembangan Keamanan Pangan
4. Peningkatan pengawasan jejaring keamanan pangan

*D. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah*

Peran koperasi sebagai soko guru perekonomian dan usaha kecil menengah sebagai denyut nadi perekonomian di Kabupaten Bulukumba selayaknya mendapatkan perhatian yang kuat dan luas.

Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang bersifat berkesinambungan agar koperasi dapat kembali tumbuh subur di Kabupaten Bulukumba ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu pendampingan pra koperasi, koperasi pemula dan koperasi mantap dengan sistem manajemen yang berbeda sehingga mereka bisa naik tingkatan sesuai kemampuannya.

Melalui dominasi UKM tersebut maka perekonomian di daerah kabupaten Bulukumba memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik di mata nasional. Oleh karena itu, pembinaan usaha kecil dan menengah di kabupaten Bulukumba mutlak diperlukan sehingga usaha kecil menengah dapat terus berjalan dan mampu meningkatkan diri.

*E. Urusan Penanaman Modal*

Kabupaten Bulukumba memiliki potensi harus dikembangkan dengan kerjasama dari segala pihak. Momentum seperti ini mampu memberikan penjelasan dan jaminan kepada investor asing untuk melirik Daerah kabupaten Bulukumba sebagai tempat menanamkan modal, hendaknya mampu dijadikan catatan bahwa Kabupaten Bulukumba memiliki suatu magnet dan potensi yang besar bagi datangnya penanaman modal.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu keseriusan dan energi yang lebih untuk mempersiapkan hal ini, untuk mengakselerasi perekonomian daerah sekaligus mengurangi pengangguran secara signifikan di Bulukumba. Pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dengan membawa lebih besar lagi sumber daya sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Kabupaten Bulukumba.

Dalam hal ini upaya peningkatan penanaman modal merupakan cermin dari keterbukaan daerah didalam bermitra dan bekerjasama dengan para investor dalam rangka mengakselerasi kemajuan dan pembangunan daerah.

### 4.4.3 Bidang Pembangunan

Urusan pekerjaan Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD adalah membangun infra struktur public dengan tersedianya infrastruktur jalan yang baik maka hal ini merupakan modal utama untuk mendorong akselerasi kegiatan ekonomi masyarakat dengan kondisi jalan yang yang baik dan mulus maka transportasi public untuk angkutan manusia maupun barang menjadi lancar, akselerasi perekonomian menjadi lebih cepat disamping itu kemudahan untuk menjangkau daerah-daerah tujuan wisata menjadi lebih meningkat sehingga visi untuk menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara bisa terwujud.

Disamping jalan-jalan yang berstatus jalan propinsi tidak kalah urgensinya adalah jalan dan jembatan pedesaan dengan kondisi jalan dan jembatan pedesaan yang memadai maka akan membuka akses ke daerah-daerah yang terisolir, disamping semakin lancarnya transportasi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian bagi warga desa. Perumahan pedesaan yang dihuni oleh keluarga-keluarga miskin pada umumnya merupakan rumah tinggal yang sebenarnya tidak layak huni baik ditinjau dari segi kesehatan maupun keselamatan terhadap terjadinya bencana, oleh sebab itu subsidi atau bantuan untuk mewujudkan rumah tinggal yang layak bagi keluarga miskin harus dilakukan.

Tata kelola air sesuai dengan fungsinya baik air untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun air untuk keperluan usaha pertanian ( irigasi ) haruslah direncanakan secara komprehenship, ketersediaan air bersih bagi daerah-daerah yang sering terjadi bencana kekeringan harus bisa ditingkatkan dengan program-program pembangunan embung-embung, telaga-telaga maupun dengan pembangunan sumur-sumur bor, disamping pemeliharaan sempadan sungai untuk menanggulangi bencana banjir, dengan membangun tanggul-tanggul maupun crosdam dan sebagainya.

Adapun usulan permasalahan yang menjadi usulan prioritas diantarnya sebagai berikut:

1. Peningkatan Pembangunan Drainase Perkotaan
2. Peningkatan Jalan
3. Optimalisasi jaringan irigasi (PSDA)
4. Peningkatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai
5. Peningkatan sarana dan Prasarana Air Bersih/ Air Minum
6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan
7. Pengembangan dan Penataan Taman Milik Daerah
8. Penataan Tata Kawasan Perkotaan
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
10. Penataan Tata Kawasan Perumahan Tidak Layak Huni
11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan dan Pengaman Jalan

### 4.4.4 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Orientasi urusan sosial harus mewadahi segenap persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Penyandang masalah kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan diharapkan menjadi arah kebijakan yang dibangun pada tahun berjalan. Hal ini penting karena persoalan tersebut merupakan persoalan yang terus ada tiap tahun dan selayaknya ada political will yang lebih jelas, sehingga keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat lebih nyata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.

Urusan kesejahteraan rakyat merupakan gabungan dari beberapa bidang gerak pembangunan. Fungsi dari bidang komisi ini lebih fokus pada kesejahteraan rakyat secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Beberapa usulan permasalahan yang menjadi usulan prioritas dalam bidang komisi ini Adalah :

*A. Urusan Pendidikan :*

Berikut usulan permasalahan yang menjadi usulan prioritas pendidikan yaitu Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan

B. *Urusan Kesehatan, Perempuan dan Anak*

Beberapa usulan permasalahan yang menjadi usulan prioritas terkait kesehatan, perempuan dan anak, diantaranya :

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan
2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan

C. *Urusan Budaya*

Beberapa prioritas program budaya, yaitu Permasalahan Terkait Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

D. *Urusan Agama*

Terealisasinya landasan kehidupan beragama sebagai nafas kehidupan masyarakat diharapkan mampu menurunkan segenap persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Persoalan sosial yang dimaksud diantaranya adalah persoalan yang mencakup menurunnya pengamalan nilai-nilai ajaran agama sehingga menimbulkan beraneka perilaku masyarakat yang cenderung negatif dan persoalan kerukunan antar umat beragama yang saat ini perlu ditingkatkan lagi sehingga toleransi dan kedamaian dalam beragama dapat dirasakan di seluruh penjuru atau pelosok desa di daerah kabupaten Bulukumba.

Dalam kondisi yang mengedepankan sikap Budaya Sipaka Tau menekankan adanya sikap gotong royong dan saling bahu membahu di dalam mengisi pembangunan walaupun dalam keyakinan agama yang berbeda. Toleransi yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Kabupaten Bulukumba harus tetap lestari dan berkembang maju sehingga mampu menjadi salah satu ciri khas Bulukumba.

Adapun beberapa prioritas program urusan agama yaitu :

1. Fasilitasi peningkatan kualitas umat beragama
2. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa
3. Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
4. Peningkatan upaya-upaya pencegahan penyimpangan ajaran agama.
5. Peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dan kegiatan ibadah
6. Peningkatan Kerukunan antar umat beragama
7. Penguatan organisasi keagamaan dalam membangun keberagaman dan toleransi dalam kebhinekaan sebagai ciri khas Kabupaten Bulukumba.

Secara khusus DPRD sebagai refresentasi masyarakat lembaga kontrol dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah menyampaikan beberapa hal yang penting untuk menjadi atensi khusus pemerintah daerah sebagaimana yang banyak menjadi fokus perhatian masyarakat dewasa ini yakni

1. Perlunya pemerintah daerah untuk secara serius melalukan rekruitmen, seleksi dan penempatan pejabat atau mutas dalam konteks untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang lebih optimal sehingga kompetensi menjadi pertimbangan utama selain disiplin dan loyalitas, tentu dengan tetap mengacu kepada aturan dan ketentuan yang ada.
2. Perlunya memperhatikan hal-hal penting terutama pada proses rekruitmen pada lembaga-lembaga pelayanan publik yang tentu sangat bersentuhan dengan ranah masyarakat. Dalam konteks ini kami ingin mengambil contoh pelayanan rumah sakit yang masih banyak disorot berbagai kalangan, baik Ormas, OKP maupun lembaga Kontrol di bidang pelayanan publik.

## 4.5 Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Suistainable Development Goals (SDGs)* dengan RKPD Tahun 2024

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah barudalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahandunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yangtertuang dalam dokumen *berjudul Transforming Our World: the 2030*

*Agenda for Sustainable Development* berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030.

Indonesia bertekad untuk mencapai tujuan pembangunanberkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Pasalnya,Indonesia adalah salah satu negara yang turut membidani kelahiran SDGs.Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 menunjukkan komitmen negaradan seluruh elemen bangsa melaksanakan SDGs. "Sesuai peraturan itu,presiden sebagai kepala negara juga memimpin sendiri pelaksanaan SDGssecara inklusif,".

SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkandimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) *People* (manusia), 2)*Planet* (bumi), 3) *Prosperity* (kemakmuran), 4) *Peace* (perdamaian), dan 5) *Partnership* (kerjasama). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang tidak dapat dipisahkan,saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupanmanusia yang lebih baik.

Tujuh belas tujuan SDG's tersebut adalah tanpa kemiskinan; tanpakelaparan; hidup sehat dan kesejahteraan; kualitas pendidikan; kesetaraangender; air bersih dan sanitasi layak; pekerjaan layak dan pertumbuhanekonomi; industri, inovasi, dan infrastruktur; berkurangnya kesenjangan;kota dan pemukiman yang berkelanjutan; konsumsi dan produksi yangbertanggung jawab; penanganan perubahan ikim; ekosistem laut; ekosistem darat; perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan,kemitraan untuk mencapai tujuan.

Sejak SDGs disahkan tahun 2015, Pemerintah Daerah (Pemda)Kota/Kabupaten diyakini akan memainkan peran sentral dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Dekat dengan warga, memiliki kewenangan dan dana, dapat melakukan beragam inovasi dan ujung tombak penyedia layanan publik serta kebijakan dan program pemerintah, menjadipertimbangan pentingnya peran Pemda. Beragam keunggulan Pemda tersebut harus dapat digunakan sebaik mungkin dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Kegagalan MDGs yang tidak mampu mengoptimalkan peran Pemda tidak boleh terulang.

Seluruh Tujuan dan Target SDGs secara langsung maupun tidak,sangat terkait dengan kerja-kerja Pemda Kota dan Kabupaten.Meningkatkan pengetahuan Pemda dan kemudian mengajak untuk melaksanakan SDGs menjadi sebuah tantangan tersendiri. Terlebih untuknegara seperti Indonesia yang memiliki lebih kurang 500 Kota dan Kabupaten, yang masing-masing memiliki situasi yang berbeda baik secarapolitik, ekonomi dan sosial.

Terdapat beberapa faktor yang akan membuat pelaksanaan SDGs didaerah bisa berjalan dengan baik, yaitu pertama adanya komitmen politikyang kuat di tingkat lokal, kedua adanya birokrasi di tingkat lokal yangmampu menterjemahkan dan mengoperasionalkan SDGs dan ketiga adanyakelompok masyarakat sipil kuat di tingkat lokal.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Suistainable DevelopmentGoals (SDGs)* merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu,TPB menjadi salah satu acuan dalam pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba. RKPD Bulukumba Tahun 2023 telah mengarusutamakan pencapaian TPB dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan dan indikator yang terukur. Integrasi TPB dalam Program Prioritas RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, sebagaimana pada Tabel IV – 5 berikut:

**Tabel IV-16**
**Matriks Integrasi TPB/SDGs Terhadap Program Prioritas RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

| No | Pembangunan Daerah<br>Program/Kegiatan | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| | **TUJUAN 1 : Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun** | |
| | **INDIKATOR TUJUAN 1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur** | |
| 1 | Program 1 : Program Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial |
| 2 | Program 2 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 3 | Program 3 : Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Dikbud |
| 4 | Program 4 : Program Perekonomian Dan Pembangunan | Bagian Ekonomi Pembangunan, Setda |
| 5 | Program 5 : Program Pengembangan Perumahan | DPPP |
| 6 | Program 6 : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | DPMD |
| 7 | Program 7 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Dinas Pertanian dan Ketapan |
| 8 | Program 8 : Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Dinas Pertanian dan Ketapan |
| 9 | Program 9 : Program Perlindungan Perempuan | Dinas DPPKBP3A |
| 10 | Program 10: Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Dinas Pariwisata |
| 11 | Program 11: ProgramPemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM |
| 12 | Program 12 : Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | DPK |
| 13 | Program 13 : ProgramPenyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | DPK |
| 14 | Program 14 : Program Perizinan Usaha Pertanian | DPK |
| 15 | Program 15 : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas Perikanan |
| 16 | Program 16 : Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas PUTR |
| 17 | Program 17 : Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM |
| | Indikator SDGs: 1.3.1.(A) Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan. | Dinas Kesehatan |
| 18 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | Indikator SDGs: 1.3.1(B) Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | |
| 19 | Program 1 : Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja |
| | Indikator SDGs: 1.3.1.(C) Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin Dan Rentan Yang Terpenuhi Hak Dasarnya Dan Inklusivitas. | Dinas Sosial, Dinas Kesehatan |
| 20 | Program 1 : Program Pemberdayaan Sosial | Dinas Sosial |
| | Indikator SDGs: 1.3.1.(D) Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan. | Dinas Sosial |
| 21 | Program 1 : Program Pemberdayaan Sosial | Dinas Sosial |
| | Indikator SDGs: 1.4.1.(B) Persentase Anak Umur 12-23 Bulan Yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap | Dinas Kesehatan |
| 22 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |

| No | Pembangunan Daerah<br>Program/Kegiatan | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| | Indikator Sdgs: 1.4.1.(C) Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (Cpr) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (Pus) Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin. | DPPKBP3A |
| 23 | Program 1 : Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) | DPPKBP3A |
| | Indikator SDGs: 1.4.1.(D) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan. | DPPP |
| 24 | Program 1 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | DPPP |
| 25 | Program 1 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | DPPP |
| | Indikator SDGs: 1.4.1.(E) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Dan Berkelanjutan. | DPPP |
| 26 | Program 1 : Program Pengembangan Permukiman | DPPP |
| | Indikator SDGs: 1.4.1.(F) Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan | DPPP |
| 27 | Program 1 : Program Pengembangan Permukiman | DPPP |
| | Indikator SDGs: 1.4.1.(I) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI – SMP/MTs Sederajat. | Dinas Dikbud |
| 28 | Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Dikbud |
| | Indikator SDGs: 1.4.1.(J) Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran. | Disdukcapil |
| 29 | Program 1 : Program Pendaftaran Penduduk | Disdukcapil |
| 30 | Program 2 : Program Pencatatan Sipil | Disdukcapil |
| | Indikator SDGs: 1.5.1* Jumlah Korban Meninggal, dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang. | BPBD |
| 31 | Program 1 : Program Penanggulangan Bencana | BPBD |
| | Indikator SDGs: 1.5.1.(A) Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah | BPBD |
| 32 | Program 1 : Program Penanggulangan Bencana | BPBD |
| | Indikator SDGs: 1.5.1.(B) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial | BPBD, Dinas Sosial |
| 33 | Program 1 : Program Rehabilitasi Sosial | BPBD, Dinas Sosial |
| | Indikator SDGs: 1.5.1.(C) Pendampingan Psikososial Korban Bencana Sosial | Dinas Sosial |
| 34 | Program 1 : Program Pemberdayaan Sosial | Dinas Sosial |
| | Indikator SDGs: 1.5.1.(E) Indeks Risiko Bencana pada Pusat-Pusat Pertumbuhan yang Berisiko Tinggi. | BPBD |
| 35 | Program 1 : Program Penanggulangan Bencana | BPBD |
| | Indikator SDGs: 1.5.2.(A) Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana. | BPBD |
| 36 | Program 1 : Program Penanggulangan Bencana | BPBD |
| | Indikator SDGs: 1.5.3* Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah. | BPBD |
| 37 | Program 1 : Program Penanggulangan Bencana | BPBD |
| | Indikator SDGs: 1.A.1* Proporsi Sumber Daya yang Dialokasikan oleh Pemerintah Secara Langsung Untuk Program Pemberantasan Kemiskinan. | Bappelitbangda, BPKPD |
| 38 | Program 1 : Program Penyuluhan Pertanian | Dinas Pertanian dan Ketapan |
| 39 | Program 1 : Program Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial |
| 40 | Program 1 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Dinas Pertanian dan Ketapan |
| | | |
| | **TUJUAN 2 : Tanpa Kelaparan : Mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan** | |
| | **INDIKATOR TUJUAN 2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).** | |

| No | Pembangunan Daerah<br>Program/Kegiatan | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| | Indikator SDGs: 2.1.1.(A) Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita | Dinkes, Dinas Dikbud, Dinas Pertanian dan Ketapan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Kanwil Agama, BPOM |
| 41 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 42 | Program 2 : Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Dikbud |
| 43 | Program 3 : Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Bappelitbangda |
| 44 | Program 4 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Dinas Pertanian dan Ketapan |
| | Indikator SDGs: 2.1.2* Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. | Dinas Pertanian dan Ketapan |
| 45 | Program 1 : Program Penanganan Kerawanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketapan |
| | Indikator SDGs: 2.1.2.(A) Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari. | Dinas Pertanian dan Ketapan |
| 46 | Program 1 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Dinas Pertanian dan Ketapan |
| | Indikator SDGs: 2.2.1 Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita. | Dinas Pertanian dan Ketapan |
| 47 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 48 | Program 2 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Dinas Pertanian dan Ketapan |
| | Indikator SDGs: 2.2.1.(A) Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) pada Anak Di Bawah Dua Tahun/Baduta. | Dinkes, Dinas Dikbud, Dinas Ketapan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Dinas Perkimtan, Bagian Kesra, Kanwil Agama, BPOM, Bappelitbangda |
| 49 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 50 | Program 2 : Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Dikbud |
| 51 | Program 3 : Program Penanganan Kerawanan Pangan | Dinas Pertanian dan Ketapan |
| 52 | Program 4 : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Dinas Pertanian dan Ketapan |
| | Indikator SDGs: 2.2.2.* Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak pada Usia Kurang dari 5 Tahun, Berdasarkan Tipe. | Dinas Kesehatan, Dinas Dikbud, Dinas Ketapan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Dinas Perkimtan, Bagian Kesra, Kanwil Agama, BPOM, Bappelitbangda |
| 53 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 54 | Program 2 : Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Dinas Kesehatan |
| | Indikator SDGs: 2.2.2.(A) Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil. | Dinas Kesehatan, Dinas Dikbud, Dinas Pertanian dan Ketapan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Dinas Perkimtan, Biro |

| No | Pembangunan Daerah<br>Program/Kegiatan | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| | | Kesra, Kanwil Agama, BPOM, Bappelitbangda |
| 55 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | Indikator SDGs: 2.2.2.(B) Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif. | Dinas Kesehatan |
| 56 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | **TUJUAN 3 : Kehidupan Sehat Dan Sejahtera : Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Di Semua Usia** | |
| | **INDIKATOR TUJUAN 3 : Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih** | |
| | *3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).* | |
| | *3.1.2.(A) Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Di Fasilitas Kesehatan* | |
| | *3.2.1* Angka Kematian Balita (Akba) Per 1000 Kelahiran Hidup.* | Dinas Kesehatan |
| | *3.2.2*Angka Kematian Neonatal (AKN) Per 1000 Kelahiran Hidup.* | Dinas Kesehatan |
| | *3.2.2.(A) Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup.* | Dinas Kesehatan |
| | *3.2.2.(B) Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi.* | Dinas Kesehatan |
| 57 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | Indikator SDGs: 3.3.3* Kejadian Malaria Per 1000 Orang | Dinas Kesehatan, Bagian Kesra |
| | *3.3.1.(A) Prevalensi Hiv Pada Populasi Dewasa.* | |
| | *3.3.2.(A) Insiden Tuberkulosis (Itb) Per 100.000 Penduduk.* | |
| | *3.3.3.(A) Jumlah Kabupaten/Kota Yang Mencapai Eliminasi Malaria* | |
| | *3.3.4.(A) Persentase Kabupaten/Kota Yang Melakukan Deteksi Dini Untuk Infeksi Hepatitis B.* | |
| | *3.3.5* Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filariasis Dan Kusta).* | |
| | *3.3.5.(A) Jumlah Kab/ Kota Dengan Eliminasi Kusta* | |
| | *3.3.5.(B) Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Eliminasi Filariasis (Berhasil Lolos Dalam Survei Penilaian Transmisi Tahap I).* | |
| 58 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | Indikator SDGs: 3.4.1.(A) Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≤18 Tahun. | Dinas Kesehatan |
| 59 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 60 | Program 2 : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | Indikator SDGs: 3.4.1.(B) Prevalensi Tekanan Darah Tinggi. | Dinas Kesehatan |
| 61 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 62 | Program 2 : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | Indikator SDGs: 3.4.1.(C) Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Umur ≥18 Tahun | Dinas Kesehatan |
| 63 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 64 | Program 2 : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | Indikator SDGs: 3.4.2* Angka Kematian (Insidens Rate) Akibat Bunuh Diri | Dinas Kesehatan |
| 65 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |

| No | Pembangunan Daerah<br>Program/Kegiatan | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| | Indikator SDGs: 3.4.2.(A) Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa | Dinas Kesehatan |
| 66 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | Indikator SDGs: 3.5.1.(E) Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba | Dinas Kesehatan & Biro Kesra |
| | *3.5.2* Konsumsi Alkohol (Liter Per Kapita) Oleh Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Dalam Satu Tahun Terakhir.* | Dinas Kesehatan, Biro Kesra |
| 67 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | *3.7.1.(A) Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin.* | Dinas Kesehatan, DPPKBP3A |
| | *3.7.1.(B) Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern.* | |
| | *3.7.2* Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)* | |
| | *3.7.2.(A) Total Fertility Rate (TFR)* | |
| 68 | Program 1 : Program Keluarga Berencana | |
| | Indikator SDGs: 3.8.2* Jumlah Penduduk Yang Dicakup Asuransi Kesehatan atau Sistem Kesehatan Masyarakat Per 1000 Penduduk | Dinas Kesehatan, Disdukcapil |
| 69 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, |
| | Indikator SDGs: 3.8.2.(A) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn). | Dinas Kesehatan |
| 70 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, |
| | Indikator SDGs: 3.A.1* Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥15 Tahun | Dinas Kesehatan |
| 71 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, |
| 72 | Program 2 : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan, |
| | Indikator SDGs: 3.B.1.(A) Persentase Ketersediaan Obat Dan Vaksin Di Puskesmas | Dinas Kesehatan |
| 73 | Program 1 : Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Dinas Kesehatan, |
| | Indikator SDGs: 3.C.1* Rasio Tenaga Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| 74 | Program 1 : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dinas Kesehatan, |
| | **TUJUAN 4 : Pendidikan Berkualitas : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua;** | |
| | **INDIKATOR TUJUAN 4. Persentase SD/MI-SMP/MTs Berakreditasi Minimal B** | |
| 75 | Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Dikbud |
| | Indikator SDGs: 4.1.1.(d/e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI – SMP/MTs Sederajat | Dinas Dikbud |
| | Indikator SDGs: 4.1.1.(G) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥15 Tahun. | |
| | Indikator SDGs: 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Di (1) Sd/Mi/Sederajat; (2) Smp/Mts/Sederajat; (3) Sma/Smk/Ma/Sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki Di (4) Perguruan Tinggi. | |
| 76 | Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Dikbud |
| | Indikator SDGs: 4.6.1.(A) Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥15 Tahun | Dinas Dikbud |
| | Indikator SDGs: 4.6.1.(B) Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-24 Tahun dan Umur 15-59 Tahun | Dinas Dikbud |
| 77 | Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Dikbud |

| No | Pembangunan Daerah<br>Program/Kegiatan | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| | Indikator SDGs: 4.A.1* Proporsi Sekolah Dengan Akses Ke: (A) Listrik (B) Internet Untuk Tujuan Pengajaran, (C) Komputer Untuk Tujuan Pengajaran, (D) Infrastruktur Dan Materi Memadai Bagi Siswa Disabilitas, (E) Air Minum Layak, (F) Fasilitas Sanitasi Dasar Per Jenis Kelamin, (G) Fasilitas Cuci Tangan (Terdiri Air, Sanitasi, Dan Higienis Bagi Semua (Wash). | Dinas Dikbud |
| 78 | Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Dikbud, Dinas Kesehatan |
| 79 | Program 2 : Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Dikbud,DPPKBP3A |
| 80 | Program 3 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | DPPP |
| 81 | Program 4 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | Indikator SDGs: 4.C.1* Persentase Guru TK, SS, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang Bersertifikat Pendidik | Dinas Dikbud |
| 82 | Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Dikbud |
| | **TUJUAN 5 : Kesetaraan Gender : Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan;** | |
| | **INDIKATOR TUJUAN 5 Jumlah Kebijakan Yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan** | |
| 83 | Program 1 : Program Perlindungan Perempuan | Dinas DPPKBP3A |
| 84 | Program 2 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Dinas DPPKBP3A |
| | Indikator SDGs: 5.2.1* Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Atau Emosional) oleh Pasangan atau Mantan Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir | Dinas DPPKBP3A |
| 85 | Program 1 : Program Perlindungan Perempuan | Dinas DPPKBP3A |
| 86 | Program 2 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Dinas DPPKBP3A |
| | **Indikator SdDGs: 5.2.1.(A) Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan** | Dinas DPPKBP3A |
| 87 | Program 1 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Dinas DPPKBP3A |
| | Indikator SDGs: 5.2.2.(A) Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif | Dinas DPPKBP3A |
| 88 | Program 1 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Dinas DPPKBP3A |
| | Indikator SDGs: 5.2.2* Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual Oleh Orang Lain Selain Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir | Dinas DPPKBP3A |
| 89 | Program 1 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Dinas DPPKBP3A |
| | Indikator SDGs: 5.3.1* Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun Dan Sebelum Umur 18 Tahun | Dinas DPPKBP3A |
| 90 | Program 1 : Program Perlindungan Perempuan | Dinas DPPKBP3A |
| 91 | Program 2 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Dinas DPPKBP3A |
| | Indikator SDGs: 5.3.1.(C) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI-SMP/MTs Sederajat | Dinas Dikbud |
| 92 | Program 1 : Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Dikbud |
| | Indikator SDGs: 5.5.1* Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah Dan Pemerintah Daerah | Dinas DPPKBP3A |
| 93 | Program 1 : Program Perlindungan Perempuan | Dinas DPPKBP3A |
| | Indikator SDGs: 5.5.2* Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi Managerial | Dinas DPPKBP3A |
| 94 | Program 1 : Program Perlindungan Perempuan | Dinas DPPKBP3A |
| | Indikator SDGs: 5.6.1.(A) Unmet Need Kb (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak Terpenuhi). | DPPKBP3A |
| 95 | Program 1 : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | DPPKBP3A |

| No | Pembangunan Daerah<br>Program/Kegiatan | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| | Indikator SDGs: 5.6.1.(B) Pengetahuan Dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (Pus) Tentang Metode Kontrasepsi Modern | Disdukcapil, DPPKBP3A |
| 96 | Program 1 : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Dinas DPPKBP3A |
| | Indikator SDGs: 5.B.1* Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam. | Diskominfo, Persandian |
| 97 | Program 1 : Program Informasi Dan Komunikasi Publik | Diskominfo, Persandian |
| | **TUJUAN 6 : Air Bersih Dan Sanitasi Layak : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua** | |
| | **INDIKATOR TUJUAN 6. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak** | |
| 98 | Program 1 : Program Pengembangan Perumahan | DPPP |
| 99 | Program 2 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | DPPP |
| 100 | Program 3 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | DPPP |
| | Indikator SDGs: 6.1.1.(B) Kapasitas Prasarana Air Baku Untuk Melayani Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri, Serta Penyediaan Air Baku untuk Pulau-Pulau. | DPPP, Dinas PUTR, Dinkes |
| 101 | Program 1 : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Dinas PUTR |
| 102 | Program 2 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | DPPP, Dinkes |
| 103 | Program 3 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | |
| | Indikator SDGs: 6.1.1.(C) Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum AmandDan Berkelanjutan | DPPP, Dinkes |
| 104 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | DPPP, Dinkes |
| 105 | Program 2 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | DPPP, Dinkes |
| 106 | Program 3 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | |
| | Indikator SDGs: 6.2.1.(A) Proporsi Populasi Yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan Dengan Sabun dan Air | DPPP, Dinkes |
| 107 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | DPPP, Dinkes |
| | Indikator SDGs: 6.2.1.(C) Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | DPPP, Dinkes |
| 108 | Program 1 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | DPPP, Dinkes |
| | Indikator SDGs: 6.2.1.(D) Jumlah Desa/Kelurahan Yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | DPPP, Dinkes |
| 109 | Program 1 : ProgramPemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | DPPP, Dinkes |
| | **Indikator SdDGs: 6.3.2.(B) Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku** | DLHK |
| 110 | Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | DLHK |
| | Indikator SDGs: 6.5.1.(C) Jumlah Jaringan Informasi Sumber Daya Air Yang Dibentuk. | DLHK, Dinas PUTR |
| 111 | Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | DLHK, Dinas PUTR |
| 112 | Program 2 : Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Dinas PUTR |
| 113 | Program 3 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | DLHK |
| | Indikator Sdgs: 6.5.1.(G) Kegiatan Penataan Kelembagaan Sumber Daya Air. | Dinas PUTR |
| 114 | Program 1 : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Dinas PUTR |
| | Indikator Sdgs: 6.6.1.(D) Luas Lahan Kritis Dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Yang Direhabilitasi. | DLHK |
| 115 | Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | DLHK |

| No | Pembangunan Daerah<br>Program/Kegiatan | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| | **TUJUAN 8 : Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua** | |
| | **INDIKATOR TUJUAN 8 : Pertumbuhan PDRB** | Bagian Ekonomi pembangunan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Disnaker dan BPS |
| | **INDIKATOR TUJUAN 8. PDRB Per Kapita** | |
| 116 | Program 1 : Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM |
| | Indikator Sdgs: 8.3.1* Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-Pertanian, Berdasarkan Jenis Kelamin. | Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja |
| | Indikator Sdgs: 8.3.1.(A) Persentase Tenaga Kerja Formal. | Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja |
| | Indikator Sdgs: 8.3.1.(B) Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian. | Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja |
| 117 | Program 1 : Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja |
| | Indikator Sdgs: 8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur | Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja |
| | Indikator Sdgs: 8.5.2.(A) Persentase Setengah Pengangguran | Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja |
| 118 | Program 1 : Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja |
| | Indikator Sdgs: 8.9.1* Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap Pdrb | Dinas Pariwisata |
| 119 | Program 1 : Program Pemasaran Pariwisata | Dinas Pariwisata |
| | **TUJUAN 9 : Industri, Inovasi Dan Infrastruktur : Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Kreatif Dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi;** | |
| | **INDIKATOR TUJUAN 9. Panjang Pembangunan Jalan Tol** | |
| | Indikator Sdgs: 9.1.1.(C) Panjang Jalur Kereta Api | Dishub |
| 120 | Program 1 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Dishub |
| | Indikator Sdgs: 9.1.2.(B) Jumlah Dermaga Penyeberangan | Dishub |
| 121 | Program 1 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Dishub |
| | Indikator SDGs: 9.1.2.(C) Jumlah Pelabuhan Strategis | Dishub |
| 122 | Program 1 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Dishub |
| | Indikator SDGs: 9.2.1* Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap Pdb Dan Per Kapita | Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM |
| | Indikator Sdgs: 9.4.1* Rasio Emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca Dengan Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur | DLHK |
| | Indikator Sdgs: 9.4.1(A) Persentase Perubahan Emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca | DLHK |
| 123 | Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | DLHK |
| | Indikator Sdgs: 9.5.1* Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Terhadap PDB | DLHK |
| | **INDIKATOR TUJUAN 9 : Industri, Inovasi Dan Infrastruktur** | |
| 124 | Program 1 : Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Bappelitbangda |
| | Indikator Sdgs: 9.C.1.(A) Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam | Diskominfo, Persandian |
| 125 | Program 1 : Program Informasi Dan Komunikasi Publik | Diskominfo, Persandian |

| No | Pembangunan Daerah<br>Program/Kegiatan | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| | Indikator Sdgs: 9.C.1.(B) Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet | Diskominfo, Persandian |
| 126 | Program 1 : Program Aplikasi Informatika | Diskominfo, Persandian |
| | **TUJUAN 10 : Berkurangnya Kesenjangan : Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antar Negara;** | |
| | **INDIKATOR TUJUAN 10. Indeks Gini** | |
| | Indikator Sdgs: 10.1.1.(B) Jumlah Daerah Tertinggal Yang Terentaskan. | DPMD |
| 127 | Program 1 : Program Administrasi Pemerintahan Desa | DPMD |
| 128 | Program 2 : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | DPMD |
| 129 | Program 3 : Program Pengembangan Perumahan | DPPP |
| 130 | Program 4 : Program Pengembangan Permukiman | DPPP |
| 131 | Program 5 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | DPPP |
| 132 | Program 6 : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | DPPP |
| 133 | Program 7 : Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Dikbud |
| 134 | Program 8: Program Pemberdayaan Sosial | Dinas Sosial |
| | Indikator SDGs: 10.4.1.(B) Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja |
| 135 | Program 1 : Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja |
| | **TUJUAN 11 : Kota Dan Pemukiman Yang Berkelanjutan** | |
| | **INDIKATOR TUJUAN 11. Jumlah Kawasan Perkotaan Metropolitan Yang Terpenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).** | |
| | Indikator SDGs: 11.2(A) Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum Di Perkotaan. | Dishub |
| 136 | Program 1 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Dishub |
| | Indikator SDGs: 11.3.2.(B) Jumlah Lembaga Pembiayaan Infrastruktur. | Dinas PUTR, DPPP |
| 137 | Program 1 : Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas PUTR |
| | Indikator Sdgs: 11.4.1.(A) Jumlah Kota Pusaka Di Kawasan Perkotaan Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang Dan Kota Kecil. | Dinas Pariwisata |
| 138 | Program 1 : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Dinas PUTR |
| | Indikator Sdgs: 11.5.1* Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang. | BPBD |
| 139 | Program 1 : Program Penanggulangan Bencana | BPBD |
| 140 | Program 2 : Program Penanggulangan Bencana | BPBD |
| | Indikator Sdgs: 11.5.1.(A) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | BPBD |
| 141 | Program 1 : Program Penanggulangan Bencana | BPBD |
| 142 | Program 2 : Program Penanggulangan Bencana | BPBD |
| | Indikator SDGs: 11.5.1.(C) Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca Dan Iklim Serta Kebencanaan. | BPBD |
| 143 | Program 1 : Program Penanggulangan Bencana | BPBD |
| | Indikator SDGs: 11.5.2.(A) Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana | BPBD |
| 144 | Program 1 : Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | |
| | Indikator SDGs: 11.B.2* Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (Prb) Tingkat Daerah. | BPBD |
| 145 | Program 1 : Program Penanggulangan Bencana | BPBD |
| | Indikator SDGs: 11.6.1.(A) Persentase Sampah Perkotaan Yang Tertangani. | DLHK, DPPP |

| No | Pembangunan Daerah<br>Program/Kegiatan | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| 146 | Program 1 : Program Pengelolaan Persampahan | DLHK, DPPP |
| | Indikator SDGs: 11.6.1.(B) Jumlah Kota Hijau Yang Mengembangkan Dan Menerapkan Green Waste Di Kawasan Perkotaan Metropolitan. | DLHK |
| 147 | Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | DLHK |
| | Indikator SDGs: 11.7.1.(A) Jumlah Kota Hijau Yang Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Metropolitan Dan Kota Sedang | DLHK |
| 148 | Program 1 : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | DLHK |
| | **TUJUAN 12 : Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab** | |
| | **INDIKATOR TUJUAN 12. Umlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (Sektor Industri)** | |
| 149 | Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | DLHK |
| | Indikator SDGs: 12.6.1.(A) Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001 | DLHK, Dinas Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM |
| 150 | Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | DLHK |
| | Indikator SDGs: 12.7.1.(A) Jumlah Produk Ramah Lingkungan Yang Teregister | DLHK |
| 151 | Program 1 : ProgramPengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | DLHK |
| | **TUJUAN 13 :Penanganan Perubahan Iklim :Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya** | |
| | **INDIKATOR TUJUAN 13. Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (Prb) Tingkat Nasional Dan Daerah.** | |
| 152 | Program 1 : Program Penanggulangan Bencana | BPBD |
| | Indikator SDGs: 13.1.2* Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang. | BPBD |
| 153 | Program 1 : Program Penanggulangan Bencana | BPBD |
| | Indikator SDGs: 13.2.1.(A) Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). | Bappelitbangda (KLHS) |
| 154 | Program 1 : ProgramPengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | DLHK |
| 155 | Program 2 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | DLHK |
| | **TUJUAN 14 : Ekosistem Lautan : Melestarikan Dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan Dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan** | |
| | **INDIKATOR TUJUAN 14. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha** | |
| 156 | Program 1 : ProgramPengelolaan Perikanan Budidaya | Dinas Perikanan |
| 157 | Program 2 : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas Perikanan |
| | Indikator SDGs: 14.B.1* Ketersediaan Kerangka Hukum/ Regulasi/ Kebijakan/ Kelembagaan Yang Mengakui Dan Melindungi Hak Akses Untuk Perikanan Skala Kecil | Dinas Perikanan |
| 158 | Program 1 : Program pengembangan perikanan tangkap | Dinas Perikanan |
| 159 | Program 2 : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas Perikanan |
| | Indikator SDGs: 14.B.1.(A) Jumlah Kab/ Kota Dengan Peningkatan Akses Pendanaan Usaha Nelayan | Dinas Perikanan |
| 160 | Program 1 : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas Perikanan |
| 161 | Program 2 : Program pengembangan budidaya perikanan | Dinas Perikanan |
| | Indikator SDGs: 14.B.1.(B) Jumlah Nelayan Yang Terlindungi. | Dinas Perikanan |
| 162 | Program 1 : Program pengembangan perikanan tangkap | Dinas Perikanan |

| No | Pembangunan Daerah<br>Program/Kegiatan | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| 163 | Program 2 : ProgramPengelolaan Perikanan Budidaya | Dinas Perikanan |
| | **TUJUAN 15 : Ekosistem Daratan : Melindungi, Merestorasi, Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggunaan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaraman Hayati** | |
| | **INDIKATOR TUJUAN 15. Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan.** | |
| | Indikator SDGs: 15.1.1.(A) Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan. | DLHK |
| 164 | Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | DLHK |
| | Indikator SDGs: 15.2.1.(A) Luas Kawasan Konservasi Terdegradasi Yang Dipulihkan Kondisi Ekosistemnya | DLHK |
| 165 | Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | DLHK |
| | Indikator SDGs: 15.2.1.(B) Luas Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem | |
| 166 | Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | DLHK |
| | Indikator SDGs: 15.2.1.(D) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan. | DLHK |
| 167 | Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | DLHK |
| | Indikator SDGs: 15.3.1.(A) Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan | DLHK |
| 168 | Program 1 : Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | DLHK |
| | Indikator SDGs: 15.6.1* Tersedianya Kerangka Legislasi, Administrasi Dan Kebijakan Untuk Memastikan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Merata | DLHK |
| 169 | Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | DLHK |
| | Indikator SDGs: 15.9.1.(A) Dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati | DLHK |
| 170 | Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | DLHK |
| | **TUJUAN 16 : Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembangaan Yang Tangguh : Menguatkan Masyarakat Yang Inkluif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel Dan Inklusif Di Semua Tingkat** | |
| | **INDIKATOR TUJUAN 16. Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya** | |
| | Indikator SDGs: 16.2.1.(A) Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun Yang Mengalami Hukuman Fisik Dan/Atau Agresi Psikologis Dari Pengasuh Dalam Setahun Terakhir. | DP3A |
| | Indikator SDGs: 16.2.1.(B) Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan. | DP3A |
| 171 | Program 1 : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | DP3A |
| | Indikator SDGs: 16.6.1.(B) Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sakip) Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Bappelitbangda, Bagian Ortala Setda |
| 172 | Program 2 : Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Biro Organisasi Dan Tata Laksana |
| 173 | Program 3 : Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Bappelitbangda |
| | Indikator SDGs: 16.6.1.(D) Persentase Instansi Pemerintah Yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Bagian Ortala, Setda |
| 174 | Program 1 : Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Bagian Ortala, Setda |

| No | Pembangunan Daerah<br>Program/Kegiatan | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| | Indikator SDGs: 16.10.2.(C) Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Untuk Mengukur Kualitas Ppid Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan. | Diskominfo, Persandian |
| 175 | Program 1 : Program Informasi Dan Komunikasi Publik | Diskominfo, Persandian |
| | **TUJUAN 17 : Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan : Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan** | |
| | **INDIKATOR TUJUAN 17. Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi Terhadap Pdb Menurut Sumbernya.** | |
| | Indikator SDGs: 17.8.1* Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet. | Diskominfo, Persandian |
| 176 | Program 1 : Program Aplikasi Informatika | Diskominfo, Persandian |
| | Indikator SDGs: 17.8.1.(A) Persentase Kabupaten 3t Yang Terjangkau Layanan Akses Telekomunikasi Universal Dan Internet. | Diskominfo, Persandian |
| 177 | Program 1 : Program Aplikasi Informatika | Diskominfo, Persandian |
| | Indikator Sdgs: 17.18.1.(A) Persentase Konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) Yang Merasa Puas Dengan Kualitas Data Statistik. | BPS |
| | Indikator Sdgs: 17.18.1.(B) Persentase Konsumen Yang Menjadikan Data Dan Informasi Statistik BPS Sebagai Rujukan Utama. | BPS |
| 178 | Program 1 : Program Pengembangan Data Dan Informasi Statistik Sektoral | BPS |
| | Indikator Sdgs: 17.18.1.(C) Jumlah Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral, Dan Khusus Yang Terdapat Dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa). | BPS |
| 179 | Program 1 : Program Pengembangan Data Dan Informasi Statistik Sektoral | BPS |
| 180 | Program 2 : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Diskominfo, Persandian |
| | Indikator Sdgs: 17.18.1.(D) Persentase Indikator SDGs Terpilah Yang Relevan Dengan Target. | Bappelitbangda / BPS |
| 181 | Program 1 : Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Bappelitbangda / BPS |
| | Indikator SDGs: 17.19.2.(C) Jumlah Pengunjung Eksternal Yang Mengakses Data Dan Informasi Statistik Melalui Website. | Diskominfo, Persandian |
| 182 | Program 1 : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Diskominfo, Persandian |

# BAB V
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

## 5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2024

Sebagaimana tertuang dalam Bab III tentang Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah, pendapatan daerah tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp.1.555.095.998.416,00** yang bersumber dari PAD sebesar **Rp. 205.011.753.056** dan pendapatan transfer sebesar **Rp. 1.330.634.245.360,** serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp. 19.450.000.000.** Berdasarkan target Pendapatan Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2024, dengan jumlah belanja **Rp. 1.555.095.998.416**.

Belanja daerah tahun 2024 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow* program priority, memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2024, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah tahun 2024 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2024.

**Tabel V-1**
**Rincian Rencana Pendanaan Tahun 2024**

| Kode | Uraian | Belanja 2024 |
|---|---|---|
| **5** | **BELANJA** | **1.555.095.998.416,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **1.057.929.130.567,00** |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 656.851.649.309,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang | 355.636.435.966,00 |
| 5.1.3 | Belanja Bunga | 0,00 |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | 44.828.703.964,00 |
| 5.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 612.341.328,00 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **317.435.393.474,00** |
| 5.2.1 | Belanja Tanah | 402.978.850,00 |
| 5.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 42.332.123.266,00 |
| 5.2.3 | Belanja Bangunan dan Gedung | 113.916.971.935,00 |
| 5.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 155.429.037.567,00 |
| 5.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 5.137.281.856,00 |
| 5.2.6 | Belanja Aset Lainnya | 217.000.000,00 |
| **5.3** | **BELANJA TAK TERDUGA** | **1.439.629.972,00** |
| 5.3.1 | Belanja Tak Terduga | 1.439.629.972,00 |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **178.291.844.403,00** |
| 5.4.1 | Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA | 8.312.174.942,00 |
| 5.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 169.979.669.461,00 |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2023*

## 5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan, ditetapkan dan menjadi dasar acuan

dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2024, Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari 10 (Sepuluh) prioritas pembangunan.

**Tabel V-2**
**Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

| No. | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Sasaran Pembangunan | Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (*Outcome*) | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | Pembangunan sumber daya manusia | Meningkatnya Hubungan Masyarakat yang Harmonis Berlandaskan nilai Agama | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi | 75 % | 101.050.000 | 75 % | 145.149.869 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah | 15 % | 163.590.500 | 15 % | 124.025.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu | 100 % | 2.380.853.150 | 100% | 2.709.783.015 | Sekretariat Daerah |
| | | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan | Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 -15 Thun yng brprtisipsi dlm pndidikn dsr (SPM), Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 –18 Thun yng blum mnylsikn pndidikn dsr dn tu mnngh yng prprtisipsi dlm pndidikn kstrn (SPM) | 100 % | 105.326.470.418 | 100 % | 145.538.992.590 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV, Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah | 100 % | 39.452.000 | 100 % | 85.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk | Meningkatnya Pemenuhan pembangunan | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan | 100 % | 4.159.856.190 | 100 % | 3.300.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan |

| No. | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Sasaran Pembangunan | Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (*Outcome*) | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | |
| | akselerasi pertumbuhan | Infrastruktur Wilayah | | Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M) | | | | | Penataan Ruang |
| | | | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan | 100 % | 99.877.312.378 | 100 % | 131.038.228.303 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | 82.61 % | 32.956.291.549 | 84.43 % | 87.038.565.547 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrg ngr yng mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM) | 93 % | 1.747.216.875 | 94 % | 27.996.320.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program Kawasan Permukiman | Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau | 92% | 14.698.438.100 | 94,66% | 18.170.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM) | 85 % | 257.450.150 | 100 % | 3.699.299.750 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Program Penataan Bangunan Gedung | Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan | 84 % | 5.441.680.220 | 88 % | 13.002.805.310 | Dinas Pekerjaan Umum dan |

| No. | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Sasaran Pembangunan | Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (*Outcome*) | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | |
| | | | | | | | | | Penataan Ruang |
| | | | Program Pengelolaan Persampahan | Presentase Sampah Yang Terkelolah | 100 % | 11.443.269.526 | 100 % | 15.740.704.992 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( Kehati ) | Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati ( Flora Dan Fauna ) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari | 90 % | 210.480.000 | 100 % | 3.040.700.116 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 3 | Pemantapan reformasi birokrasi | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu | 100 % | 2.380.853.150 | 100% | 2.709.783.015 | Sekretariat Daerah |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan | 100 % | 912.274.950 | 100 % | 2.231.564.718 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa, Penetapan APBD (Tepat Waktu), Persentase SILPA terhadap APBD, | 95 % | 181.834.768.175 | 95 % | 203.876.170.456 | BPKPD |

| No. | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Sasaran Pembangunan | Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (*Outcome*) | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | |
| | | | | Persentase Belanja Pendidikan (20%), Persentase Belanja Kesehatan (10%), Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | | | | | |
| | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase PAD terhadap pendapatan | 100 % | 1.658.199.650 | 100 % | 2.516.227.383 | BPKPD |
| | | | Program Kepegawaian Daerah | Presentase Meningkatnya Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara diatas 90 Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba | 55 % | 874.962.350 | 60 % | 2.167.000.000 | BKPSDM |
| | | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Presentase Peningkatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional ,pendidikan dan pelatihan prajabatan (LATSAR), serta pendidikan dan pelatihan teknis lainnya | 72 % | 91.485.000 | 80 % | 3.497.021.000 | BKPSDM |
| | | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Jumlah Temuan BPK dan Persentase Pelanggaran Pegawai | 57 % | 3.168.823.000 | 55 % | 3.910.105.079 | Inspektorat Daerah |
| | | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Persenatse Tindak Lanjut Temuan | 60 % | 1.951.424.000 | 65 % | 1.690.202.083 | Inspektorat Daerah |
| | | | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100 % | 219.090.175 | 100 % | 448.261.000 | Dinas Sosial |

| No. | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Sasaran Pembangunan | Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (*Outcome*) | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | |
| | | | | (SPM)Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM) | | | | | |
| | | | Program Pendaftaran Penduduk | Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk | 100 % | 495.873.500 | 100 % | 100 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Program Pencatatan Sipil | Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran. | 90 % | 200.307.000 | 95 % | 90 % | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Program Informasi Dan Komunikasi Publik | Persentase perangkat daerah yang menggunkan layanan data pemerintah | 100 % | 482.200.000 | 100 % | 1.321.704.516 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| | | | Program Aplikasi Informatika | Persentase perangkat daerah yag terkoneksi dijaringan intra pemerintah atau menggunaan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo | 100 % | 321.260.000 | 100 % | 3.300.000.000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| | | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Peresentase Peningkatan Pelayanan Perizinan | 76 Investor | 80.351.750 | 76 Investor | 87.813.000 | Dinas Penanaman Modal, PTSP |

| No. | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Sasaran Pembangunan | Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (*Outcome*) | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | |
| | | | | | | | | | dan Tenaga Kerja |
| | | | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu | 100 % | 269.602.650 | 100 % | 356.166.982 | Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja |
| 4 | Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan | Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pertanian | Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | | 100 % | 7.266.000 | 100 % | 66.000.000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Meningkatnya Produksi hasil Perikanan | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Jumlah Produksi Pertanian | 76 % | 8.728.842.000 | 80 % | 15.878.507.369 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia | 90 % | 19.235.445.000 | 90 % | 6.843.900.000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Meningkatnya perekonomian daerah melalui perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan IKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman | 45 % | 22.950.000 | 45 % | 50.000.000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase Kelompok Tani yang dibina | 59 % | 391.817.090 | 61 % | 679.250.000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin | 100 % | 7.343.250 | 100 % | 16.155.150 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Kontribusi PDRB sektor perikanan, Persentase Produksi perikanan | 60 Persen 54247 Ton | 26.890.383.200 | 60 Persen 55337,50 To | 25.484.360.000 | Dinas Perikanan |

| No. | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Sasaran Pembangunan | Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (*Outcome*) | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | |
| | | | | kelompok nelayan, Persentase Produksi Perikanan Tangkap | | | | | |
| | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya, Cakupan Bina Kelompok Perikanan | 188.903 Ton | 3.298.815.078 | 192.700 Ton<br>100 % | 5.650.568.000 | Dinas Perikanan |
| | | | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Persentase Tingkat Konsumsi Ikan | 94 % | 636.725.500 | 91% | 618.750.000 | Dinas Perikanan |
| | | | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%) | 7 Objek<br>90 % | 3.101.829.400 | 7 Objek<br>100 % | 5.978.500.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda danOlahraga |
| | | | Program Pemasaran Pariwisata | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%) | 11 event<br>90 % | 819.400.000 | 13 event<br>100 % | 3.070.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | 10 kali<br>1,66 % | 555.322.000 | 1,70 %<br>12 kali | 1.100.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Hubungan Industrial | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | 100 % | 44.624.150 | 100 % | 65.330.870 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| | | | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada | 100 % | 7.343.250 | 100 % | 16.155.150 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM |
| | | | Program Pemberdayaan UMKM | Persentase UMKM Yang Diberdayakan | 75,1 % | 4.629.000 | 76,8 %<br>76,8 % | 22.000.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM |
| | | | Program Pengembangan UMKM | Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha | 76,3 % | 24.859.200 | 80,3 % | 34.648.295 | Dinas Perdagangan, |

| No. | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Sasaran Pembangunan | Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (*Outcome*) | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | |
| | | | | | | | | | Perindustrian, Koperasi, UKM |
| | | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | 50 % | 46.677.898.350 | 50 % | 10.583.255.114 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM |
| | | | Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen | Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku | 40 % | 151.572.400 | 50 % | 246.655.640 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM |
| 5 | Peningkatankualitas sistem pelayanan kesehatan | Meningkatnya Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan Ketersediaan sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan | 100 Persen | 100.879.421.946 | 100 Persen | 120.098.591.458 | Dinas Kesehatan |
| | | Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata Domestik Dan Mancanegara | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar | 85 Persen | 7.205.059.900 | 95 Persen | 8.125.506.932 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar, Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar | 85 Persen | 340.849.250 | 95 Persen | 303.735.855 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Keluarga Ber PHBS | 71 Persen | 250.349.900 | 82 Persen | 284.142.998 | Dinas Kesehatan |
| 6 | Pelestarian lingkungan hidup | Meningkatnya Pemenuhan pembangunan Infrastruktur Wilayah | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M) | 93 % | 1.747.216.875 | 94 % | 27.996.320.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan | 100 % | 99.877.312.378 | 100 % | 131.038.228.303 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| No. | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Sasaran Pembangunan | Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (*Outcome*) | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | |
| | | | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rasio luas daerah irigasi kewenanga kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | 82.61 % | 32.956.291.549 | 84.43 % | 87.038.565.547 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrg ngr yng mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM) | 93 % | 1.747.216.875 | 94 % | 27.996.320.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program Kawasan Permukiman | Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau | 92% | 14.698.438.100 | 94,66% | 18.170.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM), Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM) | 85 % | 257.450.150 | 100 % | 3.699.299.750 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Program Penataan Bangunan Gedung | Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan | 84 % | 5.441.680.220 | 88 % | 13.002.805.310 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Program Pengelolaan Persampahan | Presentase Sampah Yang Terkelolah | 100 % | 11.443.269.526 | 100 % | 15.740.704.992 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( Kehati ) | Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman | 90 % | 210.480.000 | 100 % | 3.040.700.116 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| No. | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Sasaran Pembangunan | Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (*Outcome*) | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | |
| | | | | Hayati ( Flora Dan Fauna ) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari | | | | | |
| 7 | Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana | Terwujudnya tatananan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman | Program Penanggulangan Bencana | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananpencegahan dankesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM) | 100 % | 840.581.700 | 100 % | 1.488.685.041 | BPBD |
| 8 | Peningkatan Kemitraan antar institusi | | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Penegakan Perda, Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM) | 100 % | 2.955.796.550 | 100 % | 3.449.290.900 | Satpol PP, Damkar, Penyelamatan |
| | | | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat | 75 % | 32.103.061.546 | 75 % | 34.842.698.847 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Program Perlindungan Perempuan | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | 100 % | 116.680.350 | 100 % | 131.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan |

| No. | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Sasaran Pembangunan | Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (*Outcome*) | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | |
| | | | | | | | | | Perlindungan Anak |
| | | | Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | 80 % | 50.000.000 | 90 % | 55.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | 100 % | 95.468.000 | 100 % | 50.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 9 | Peningkatan kemandirian desa | Meningkatnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan Daerah melalui pengembangan Kawasan Perdesaan | Program Penataan Desa | Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik | 60 % | 58.709.850 | 80 % | 66.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Program Peningkatan Kerjasama Desa | Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik | 100 % | 99.999.800 | 100 % | 165.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Jumlah Desa yang memiliki administrasi Pemerintahan Desa yang Baik | 100 % | 1.365.393.200 | 100 % | 984.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase peningkatan status desa mandiri | 100 % | 629.397.300 | 100 % | 522.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 10 | Peningkatan produktifitas generasi muda | Meningkatnya Produktivitas Generasi Muda | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase Jumlah Pemuda Inovator | 5 orang<br>100 % | 375.582.000 | 100 %<br>5 orang | 720.500.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |

| No. | Prioritas Kabupaten Bulukumba | Sasaran Pembangunan | Program Perangkat Daerah | Indikator Kinerja (*Outcome*) | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | |
| | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional | 2 orang<br>100 % | 1.880.775.150 | 2 orang<br>100 % | 5.300.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| | | | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | 100 % | 287.060.000 | 100 % | 3.718.940.001 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

## 5.3. Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Untuk matriks rencana kerja dan pendanaan daerah program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel V-3**
**Rekap pagu Matriks Rencana Kerja dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 Kabupaten Bulukumba**

| No | OPD | Pagu RKPD Tahun 2024 (Rp.) |
|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 468.232.122.318 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 155.434.879.194 |
| 3 | Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja | 126.363.379.297 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 156.548.420.550 |
| 5 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 19.993.474.762 |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2.395.925.062 |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 11.055.927.704 |
| 8 | Dinas Sosial | 3.633.815.091 |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 18.402.275.775 |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.612.640.241 |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 5.563.086.912 |
| 12 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 12.410.842.623 |
| 13 | Dinas Perhubungan | 19.742.246.030 |
| 14 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 3.423.320.813 |
| 15 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 6.486.966.564 |
| 16 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah | 2.381.884.511 |
| 17 | Dinas Perikanan | 35.684.106.731 |
| 18 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 14.459.942.966 |
| 19 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 49.128.047.366 |
| 20 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 65.541.847.740 |
| 21 | Sekretariat Daerah | 22.658.107.508 |
| 22 | Sekretariat DPRD | 40.722.607.786 |
| 23 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 9.602.860.157 |
| 24 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 201.885.312.379 |
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 5.330.592.955 |
| 26 | Inspektorat Daerah | 12.171.473.210 |
| 27 | KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU | 11.604.419.570 |
| 28 | KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE | 3.052.770.954 |
| 29 | KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA | 5.037.565.920 |
| 30 | KANTOR KECAMATAN RILAU ALE | 3.644.655.392 |
| 31 | KANTOR KECAMATAN GANTARANG | 5.371.691.752 |
| 32 | KANTOR KECAMATAN KINDANG | 2.293.812.300 |
| 33 | KANTOR KECAMATAN HERLANG | 2.946.396.506 |
| 34 | KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO | 2.943.666.764 |
| 35 | KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI | 5.616.814.800 |
| 36 | KANTOR KECAMATAN KAJANG | 3.820.582.743 |
| 37 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 34.897.515.470 |
| | **Total Anggaran** | **1.555.095.998.416** |

Perumusan Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 untuk RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024. Musrenbang menjadi salah satu media untuk membahas rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak

akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat. Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 yang merupakan tahun ke tiga periode Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, dan keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2024 dan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di daerah. Perincian pagu pendanaan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, yang dijabarkan kedalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan perangkat daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2024 yang disertai dengan indikator dan terget kinerja tahun 2024, serta target tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah.

**Tabel V-4**
**Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. BULUKUMBA** | | | | **468.139.029.209** | | | | | **554.789.436.516** | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **467.925.561.409** | | | | | **552.924.436.516** | |
| **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | **467.925.561.409** | | | | | **552.924.436.516** | |
| **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)*** | | **100 %** | **362.464.624.991** | | | | **100 %** | **406.670.443.926** | |
| 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Keterpenuhan Dok Perencanaan dan Evaluasi* | | 100 % | 198.572.000 | | | | 100 % | 250.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 16 Dokumen | 198.572.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 16 Dokumen | 100.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 2 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Laporan | 50.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 5 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 5 Laporan | 100.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi keuangan* | | 100 % | 360.912.773.801 | | | | 100 % | 402.905.053.664 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2839 Orang/ bulan | 359.657.323.801 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD | | 2839 Orang/ bulan | 401.402.353.664 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | 1.213.440.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 1.452.700.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 25.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | 42.010.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 25.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | | - | - | | | | 100 % | 25.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 2 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Laporan | 15.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 2 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Laporan | 10.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Pelayanan Peningkatan Kapasitas SDM* | | 100 % | 51.000.000 | | | | 100 % | 525.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 75.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Ujung Bulu, Caile | 3 Orang | 51.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 3 Orang | 75.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | Ujung Bulu, Caile | 30 Orang | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 30 Orang | 300.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | Ujung Bulu, Caile | 359 Orang | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 359 Orang | 75.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran* | | 100 % | 292.012.600 | | | | 100 % | 905.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 4 Paket | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 4 Paket | 45.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 10 Paket | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 10 Paket | 170.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Paket | 3.964.750 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 50.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 180 Paket | 129.983.350 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 180 Paket | 120.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 40 Paket | 54.395.500 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 40 Paket | 85.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | Ujung Bulu, Caile | 800 Laporan | 28.800.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 800 Laporan | 35.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 30 Laporan | 74.869.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 30 Laporan | 250.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 2 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Dokumen | 150.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Cakupan Barang Milik Daerah yang diadakan* | | 100 % | 397.502.765 | | | | 100 % | 795.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 215.129.300 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 500.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 20.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 300 Unit | 43.700.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 300 Unit | 150.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | 138.673.465 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 125.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah jasa penunjang yang disiapkan* | | 1 Tahun | 431.432.420 | | | | 1 Tahun | 444.390.262 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Laporan | 139.182.420 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Laporan | 144.390.262 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Laporan | 292.250.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Laporan | 300.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *persentase barang milik yang disiapkan dan terpelihara dalam kondisi baik* | | 60 % | 181.331.405 | | | | 70 % | 821.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Ujung Bulu, Caile | 2 Unit | 32.541.405 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Unit | 80.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Caile | 85 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 85 Unit | 25.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | Ujung Bulu, Caile | 50 Unit | 12.790.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 50 Unit | 16.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Caile | 2 Unit | 24.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Unit | 500.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Caile | 2 Unit | 112.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Unit | 200.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | ***Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 -15 Thun yng brprtisipsi dlm pndidikn dsr (SPM), Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 –18 Thun yng blum mnylsikn pndidikn dsr dn tu mnngh yng prprtisipsi dlm pndidikn kstrn (SPM)*** | | **100 %** | **105.326.470.418** | | | | **100 %** | **145.538.992.590** | |
| 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase bangunan kondisi baik* | | 60 % | 58.262.815.750 | | | | 80 % | 74.214.895.840 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | Ujung Bulu, Caile | 5 Ruang | 800.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 11 Ruang | 3.000.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | Ujung Bulu, Caile | 8 Ruang | 531.608.500 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 23 Ruang | 2.126.435.840 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | Ujung Bulu, Caile | 3 Ruang | 620.007.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 11 Ruang | 2.066.690.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | Ujung Bulu, Caile | 10 Unit | 1.340.020.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 42 Unit | 3.350.050.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | Ujung Bulu, Caile | 10 Ruang | 1.920.030.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 10 Ruang | 2.560.040.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | Ujung Bulu, Caile | 15 Ruang | 702.015.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 15 Ruang | 936.020.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | Ujung Bulu, Caile | 8 Ruang | 1.833.015.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 8 Ruang | 2.444.020.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia* | Ujung Bulu, Caile | 8 Paket | 1.000.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 8 Paket | 2.500.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* | Ujung Bulu, Caile | 10 Paket | 200.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 10 Paket | 200.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0022 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia* | Ujung Bulu, Caile | 8 Paket | 1.250.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 55 Paket | 2.000.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | Ujung Bulu, Caile | 180 Peserta Didik | 94.936.750 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 150 Peserta Didik | 375.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | Ujung Bulu, Caile | 5 Orang | 38.651.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 5 Orang | 50.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah* | Ujung Bulu, Caile | 350 Satuan Pendidikan | 40.991.380.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 350 Satuan Pendidikan | 40.991.380.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | Ujung Bulu, Caile | 350 Satuan Pendidikan | 38.561.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 50 Satuan Pendidikan | 75.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar* | Ujung Bulu, Caile | 350 Orang | 46.813.500 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 350 Orang | 100.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun* | Ujung Bulu, Caile | 10 Ruang | 2.233.360.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 10 Ruang | 4.466.720.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokumen | 10.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokumen | 10.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Kegiatan | 9.600.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Kegiatan | 15.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Ruang | 1.200.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 11 Ruang | 1.500.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | Ujung Bulu, Caile | 20 Unit | 2.206.800.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 20 Unit | 2.758.500.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | Ujung Bulu, Caile | 15 Ruang | 1.206.018.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 2 Ruang | 2.680.040.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Persentase warga negara usia 13-15 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* | | 95 % | 34.421.771.150 | | | | 98 % | 56.177.487.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | Ujung Bulu, Caile | 8 Ruang | 2.400.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 8 Ruang | 3.000.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | Ujung Bulu, Caile | 8 Ruang | 2.143.369.200 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 5 Ruang | 2.679.211.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | Ujung Bulu, Caile | 8 Ruang | 2.400.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 5 Ruang | 3.000.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun* | Ujung Bulu, Caile | 8 Ruang | 2.299.723.200 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 5 Ruang | 5.749.308.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0010 | Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun* | Ujung Bulu, Caile | 8 Unit | 200.446.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 8 Unit | 2.004.460.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | Ujung Bulu, Caile | 8 Unit | 200.446.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 10 Unit | 2.004.460.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | Ujung Bulu, Caile | 8 Ruang | 1.500.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 12 Ruang | 6.000.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | Ujung Bulu, Caile | 8 Ruang | 187.488.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 4 Ruang | 468.720.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | Ujung Bulu, Caile | 8 Ruang | 488.804.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 7 Ruang | 1.222.010.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | Ujung Bulu, Caile | 4 Ruang | 1.080.240.750 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 14 Ruang | 5.401.204.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | Ujung Bulu, Caile | 8 Unit | 200.446.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 19 Unit | 1.103.400.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* | Ujung Bulu, Caile | 4 Paket | 108.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 1 Paket | 270.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0027 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* | Ujung Bulu, Caile | 4 Paket | 108.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 4 Paket | 100.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0035 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia* | Ujung Bulu, Caile | 4 Paket | 400.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 14 Paket | 1.000.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | Ujung Bulu, Caile | 1632 Peserta Didik | 205.840.500 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Peserta Didik | 650.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | Ujung Bulu, Caile | 10 Orang | 38.280.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 7 Orang | 100.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan* | Ujung Bulu, Caile | 69 Satuan Pendidikan | 15.864.760.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 70 Satuan Pendidikan | 15.864.760.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | Ujung Bulu, Caile | 69 Satuan Pendidikan | 26.685.250 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 70 Satuan Pendidikan | 75.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama* | Ujung Bulu, Caile | 69 Orang | 28.912.250 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Orang | 75.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | Ujung Bulu, Caile | 1 Ruang | 1.194.954.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 1 Ruang | 1.194.954.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokumen | 10.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokumen | 10.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Kegiatan | 5.376.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Kegiatan | 20.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | Ujung Bulu, Caile | 5 Ruang | 2.800.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 5 Ruang | 3.500.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | Ujung Bulu, Caile | 8 Ruang | 540.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 8 Ruang | 675.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | *Persentase warga negara usia 5 – 6 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* | | 80 % | 8.512.253.350 | | | | 90 % | 10.698.713.250 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun* | Ujung Bulu, Caile | 3 Unit | 485.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 1 Unit | 825.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.03.0003 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | Ujung Bulu, Caile | 3 Unit | 326.942.350 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 1 Unit | 659.668.250 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.03.0004 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | Ujung Bulu, Caile | 3 Unit | 352.707.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 15 Unit | 587.845.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.03.0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia* | Ujung Bulu, Caile | 5 Paket | 100.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 5 Paket | 100.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.03.0012 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia* | Ujung Bulu, Caile | 2 Paket | 60.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 1 Paket | 150.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | Ujung Bulu, Caile | 5 Orang | 36.925.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Orang | 50.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | Ujung Bulu, Caile | 429 Satuan Pendidikan | 6.724.800.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 368 Satuan Pendidikan | 6.481.200.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP* | Ujung Bulu, Caile | 429 Satuan Pendidikan | 75.879.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Satuan Pendidikan | 85.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokumen | 10.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | Ujung Bulu, Caile | 3 Ruang | 350.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK, DAU | | 3 Ruang | 1.750.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | | 87 % | 4.129.630.168 | | | | 95 % | 4.447.896.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.04.0001 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | 240.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 1 Unit | 240.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.04.0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | Ujung Bulu, Caile | 5 Orang | 24.644.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 5 Orang | 150.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | Ujung Bulu, Caile | 32 Satuan Pendidikan | 3.551.000.918 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 32 Satuan Pendidikan | 3.647.896.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP* | Ujung Bulu, Caile | 32 Satuan Pendidikan | 42.611.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 32 Satuan Pendidikan | 75.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan* | Ujung Bulu, Caile | 32 Orang | 26.050.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 32 Orang | 75.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.04.0036 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | Ujung Bulu, Caile | 3 Paket | 60.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 3 Paket | 60.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.04.0039 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | Ujung Bulu, Caile | 1 Ruang | 150.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 1 Ruang | 150.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | Ujung Bulu, Caile | 2000 Peserta Didik | 35.324.250 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2000 Peserta Didik | 50.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **-** | | **-** | **-** | | | | **-** | **440.000.000** | |
| 1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | *Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar* | | - | - | | | | - | 20.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.01.03.2.01.0006 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokumen | 20.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.03.2.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | *Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal* | | - | - | | | | - | 420.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.03.2.02.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 100.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.03.2.02.0005 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokumen | 20.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.03.2.02.0006 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 300.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | ***Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV, Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah*** | | **100 %** | **39.452.000** | | | | **100 %** | **85.000.000** | |
| 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Jumlah PTK yang ditingkatkan kompetensinya untuk memenuhi standar kompetensi* | | 30 PTK | 39.452.000 | | | | 30 PTK | 85.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | 39.452.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 85.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| **1.01.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | ***Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan*** | | **75 %** | **95.014.000** | | | | **90 %** | **190.000.000** | |
| 1.01.05.2.01 | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | *Persentase Satuan Pendidikan Dasar Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah* | | 100 % | 19.660.000 | | | | 100 % | 50.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.05.2.01.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | 19.660.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 50.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.05.2.02 | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | *Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD dan Nonformal* | | 100 % | 75.354.000 | | | | 100 % | 140.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.05.2.02.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | 50.852.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 90.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 1.01.05.2.02.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | 24.502.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 50.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **213.467.800** | | | | | **1.865.000.000** | |
| **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | **213.467.800** | | | | | **1.865.000.000** | |
| **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | ***Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi*** | | **70 %** | **97.820.000** | | | | **75 %** | **825.000.000** | |
| 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah* | | 1 Kegiatan | - | | | | 1 Kegiatan | 200.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan* | Ujung Bulu, Caile | 3 Objek | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 3 Objek | 200.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2.22.02.2.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | 1 Kegiatan | 77.820.000 | | | | 1 Kegiatan | 525.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan* | Ujung Bulu, Caile | 4 Objek | 30.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 4 Objek | 250.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2.22.02.2.02.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional* | Ujung Bulu, Caile | 2 Laporan | 42.830.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Laporan | 250.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2.22.02.2.02.0003 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Sertifikat | 4.990.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Sertifikat | 25.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.22.02.2.03 | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Lembaga Adat yang mendapatkan pembinaan* | | 100 % | 20.000.000 | | | | 100 % | 100.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2.22.02.2.03.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina* | Ujung Bulu, Caile | 1 Orang | 20.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Orang | 100.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | ***Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan pelatihan/pembinaan*** | | **50 %** | **42.779.800** | | | | **60 %** | **200.000.000** | |
| 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesenian* | | 1 Kegiatan | 42.779.800 | | | | 1 Kegiatan | 200.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)* | Ujung Bulu, Caile | 30 Orang | 42.779.800 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 30 Orang | 200.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | **-** | | **-** | **-** | | | | **-** | **100.000.000** | |
| 2.22.04.2.01 | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | - | - | | | | - | 100.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2.22.04.2.01.0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Orang | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Orang | 100.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | ***Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan*** | | **50 %** | **72.868.000** | | | | **65 %** | **740.000.000** | |
| 2.22.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | *Persentase Cagar Budaya yang di Tetapkan* | | 100 % | 22.868.000 | | | | 100 % | 240.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan* | Ujung Bulu, Caile | 5 Objek | 22.868.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 5 Objek | 240.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2.22.05.2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | *Peresentase Cagar Budaya yang dikelola Secara Terpadu* | | 100 % | 50.000.000 | | | | 100 % | 500.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 2.22.05.2.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Objek | 50.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Objek | 500.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | **SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)** | | | | **93.093.109** | | | | | **141.500.000** | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **76.293.250** | | | | | **106.500.000** | |
| **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | **76.293.250** | | | | | **106.500.000** | |
| **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)*** | | **100 %** | **76.293.250** | | | | **100 %** | **106.500.000** | |
| 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi keuangan* | | 100 % | - | | | | 100 % | 50.000.000 | Sanggar Kegiatan Belajar (Skb) |
| 1.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 50.000.000 | Sanggar Kegiatan Belajar (Skb) |
| 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran* | | 100 % | 31.688.500 | | | | 100 % | 32.000.000 | Sanggar Kegiatan Belajar (Skb) |
| 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Paket | 3.868.500 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 5.000.000 | Sanggar Kegiatan Belajar (Skb) |
| 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Paket | 1.690.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 2.000.000 | Sanggar Kegiatan Belajar (Skb) |
| 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Laporan | 26.130.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Laporan | 25.000.000 | Sanggar Kegiatan Belajar (Skb) |
| 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah jasa penunjang yang disiapkan* | | 1 Tahun | 36.000.000 | | | | 1 Tahun | 12.000.000 | Sanggar Kegiatan Belajar (Skb) |
| 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Laporan | 36.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Laporan | 12.000.000 | Sanggar Kegiatan Belajar (Skb) |
| 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *persentase barang milik yang disiapkan dan terpelihara dalam kondisi baik* | | 60 % | 8.604.750 | | | | 70 % | 12.500.000 | Sanggar Kegiatan Belajar (Skb) |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 2.500.000 | Sanggar Kegiatan Belajar (Skb) |
| 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | 8.604.750 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 10.000.000 | Sanggar Kegiatan Belajar (Skb) |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **16.799.859** | | | | | **35.000.000** | |
| **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | **16.799.859** | | | | | **35.000.000** | |
| 2.22.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah jasa penunjang yang disiapkan* | | 1 Tahun | 16.799.859 | | | | 1 Tahun | 35.000.000 | Sanggar Kegiatan Belajar (Skb) |
| 2.22.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Laporan | 16.799.859 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Laporan | 35.000.000 | Sanggar Kegiatan Belajar (Skb) |
| | **DINAS KESEHATAN KAB. BULUKUMBA** | | | | **155.434.879.194** | | | | | **200.438.763.904** | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **155.434.879.194** | | | | | **200.438.763.904** | |
| **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | **154.591.747.644** | | | | | **186.324.427.068** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan )*** | | **100 %** | **65.606.573.198** | | | | **100 %** | **75.957.262.707** | |
| 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu* | | 100 % | 150.075.250 | | | | 100 % | 147.390.193 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 4 Dokumen | 50.280.700 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 3 Dokumen | 41.030.933 | Dinas Kesehatan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 4 Dokumen | 53.058.850 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 4 Dokumen | 52.155.950 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 2 Laporan | 9.515.450 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Laporan | 9.841.343 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 37.220.250 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Laporan | 44.361.967 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik (dinas kesehatan)* | | 100 % | 60.850.990.696 | | | | 100 % | 66.626.736.226 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Ujung Bulu, Loka | 14000 Orang/ bulan | 59.814.922.996 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 14000 Orang/ bulan | 65.535.132.842 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | Ujung Bulu, Loka | 12 Dokumen | 711.890.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Dokumen | 743.737.887 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 12 Dokumen | 82.800.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Dokumen | 113.042.081 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 6 Laporan | 114.370.250 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 6 Laporan | 88.507.729 | Dinas Kesehatan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.02.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | Ujung Bulu, Loka | 4 Dokumen | 75.079.200 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 4 Dokumen | 81.283.575 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 18 Laporan | 22.440.650 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 18 Laporan | 35.409.678 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | Ujung Bulu, Loka | 12 Dokumen | 29.487.600 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Dokumen | 29.622.434 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | *terlaksananya pengelolaan administrasi retribusi yankes di puskesmas dan jaringannya* | | 100 % | 355.673.450 | | | | 100 % | 494.150.542 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 2 Dokumen | 355.673.450 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Dokumen | 494.150.542 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai standar* | | 100 % | 29.774.450 | | | | 100 % | 32.357.117 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | Ujung Bulu, Loka | 4 Dokumen | 8.849.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 4 Dokumen | 8.190.932 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | Ujung Bulu, Loka | 21 Dokumen | 11.476.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 21 Dokumen | 12.266.889 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | Ujung Bulu, Loka | 112 Orang | 9.448.950 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 112 Orang | 11.899.296 | Dinas Kesehatan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya pelayanan administrasi umum di instansi kesehatan, puskesmas dan jaringannya* | | 100 % | 1.062.514.900 | | | | 100 % | 1.094.681.187 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 31.564.670 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Paket | 32.154.783 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Paket | 473.256.930 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 10 Paket | 528.772.368 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Paket | 58.810.750 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Paket | 32.291.543 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Paket | 75.772.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Paket | 80.545.430 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Paket | 59.154.150 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Paket | 59.612.223 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | 28.634.900 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 19.071.586 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Laporan | 335.321.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Laporan | 342.233.254 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *terlaksananya pengadaan kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas operasiobal dan pusk keliling serta ambulans* | | 100 % | 336.000.000 | | | | 100 % | 3.116.419.707 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Bulukumpa, Tanete Ujung Bulu, Loka | 2 Unit | 336.000.000 | Bulukumpa, Tanete Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Unit | 3.116.419.707 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *tersedianya jasa penunjang pelayanan urusan pemerintahan bidang kesehatan* | | 100 % | 2.377.462.192 | | | | 100 % | 3.983.219.776 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan | 935.712.192 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Laporan | 1.675.600.000 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | 19.750.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 20.076.547 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan | 1.422.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Laporan | 2.287.543.229 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan bidang kesehatan* | | 100 % | 292.336.510 | | | | 100 % | 302.974.769 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 14.468.760 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 15.978.322 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35 Unit | 277.867.750 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 35 Unit | 286.996.447 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Terlaksananya pengelolaan keuangan secara langsung dan mandiri oleh RS utk mendukung peningkatan mutu layanan Rumah Sakit dan Puskesmas* | | 100 % | 151.745.750 | | | | 100 % | 159.333.190 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20 Unit Kerja | 151.745.750 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 20 Unit Kerja | 159.333.190 | Dinas Kesehatan |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | ***%ib hmil y dpt ply ksht str, %ib hmil y dpt fslts ply ksht,%byi br lhr umr 0-28 hri y dpt ply ksht str,%Blit y brmr 0–59 bln y dpt ply ksht, %nk usi pndidkn dsr y dpt ply ksht str,%org brusi lbh dr 60 th y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit Hiprtnsi y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit DM y dpt ply ksht str,%ODG brt y dpt ply ksht str,%org trdg TBCy dpt ply ksht str,%prslin difslts ply ksht,%Blit y dpt ply ksht ssi str,Rso pksms trhdp jml pddk%org brusi 15-59 th y dpt ply ksht str, Rasio pksmas trhdp jml pddk*** | | **100 Persen** | **81.188.915.396** | | | | **100 Persen** | **101.653.778.576** | |
| 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Cakupan ketersediaan Sarana, Prasarana dan AlkesUKP dan UKM Rujukan* | | 100 % | 10.241.597.375 | | | | 100 % | 13.622.730.397 | Dinas Kesehatan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Unit | 635.568.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 328.754.322 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Unit | 211.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Unit | 1.555.307.014 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.01.0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Unit | 1.750.304.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Unit | 4.509.256.278 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit | 953.440.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 10 Unit | 1.750.604.000 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.01.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 211.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 600.604.000 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 230.367.400 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 241.885.744 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Paket | 6.183.990.875 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 1 Paket | 4.563.799.999 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Paket | 65.926.600 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Paket | 72.519.040 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentasi capaian indikator Standar pelayanan minimal bidang kesehatan* | | 100 % | 70.429.305.671 | | | | 100 % | 87.652.276.475 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5738 Orang | 54.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 5738 Orang | 56.701.288 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5470 Orang | 79.999.900 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 6790 Orang | 157.111.416 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5210 Orang | 52.800.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 6000 Orang | 33.665.267 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25899 Orang | 54.728.400 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 33670 Orang | 36.965.017 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4639 Orang | 21.428.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 5535 Orang | 22.489.689 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1000 Orang | 34.711.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1200 Orang | 36.464.689 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1000 Orang | 47.266.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1200 Orang | 23.664.777 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19034 Orang | 99.999.450 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 21000 Orang | 140.070.917 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7820 Orang | 33.287.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 8020 Orang | 34.972.558 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 818 Orang | 31.463.850 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 950 Orang | 33.036.718 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7036 Orang | 46.294.550 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 7600 Orang | 48.620.128 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9094 Orang | 46.316.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 9400 Orang | 48.620.250 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | 26.716.200 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 2 Dokumen | 28.052.170 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7 Dokumen | 31.630.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 31.250.000 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 333.945.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK | | 4 Dokumen | 481.678.440 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 28.940.350 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 12 Dokumen | 30.387.377 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Dokumen | 224.771.800 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 12 Dokumen | 257.351.675 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Dokumen | 109.974.200 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 12 Dokumen | 115.472.911 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 385.701.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 79.830.707 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Dokumen | 39.185.950 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Dokumen | 41.157.187 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 818 Orang | 32.618.950 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1600 Orang | 34.294.879 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1025 Orang | 85.664.200 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2000 Orang | 89.947.645 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Dokumen | 20.369.700 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 21 Dokumen | 22.000.000 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13 Dokumen | 405.168.100 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 21 Dokumen | 425.426.665 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 55.220.596.405 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 22 Dokumen | 63.316.735.400 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 104028 Orang | 40.516.250 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 300000 Orang | 42.542.111 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Paket | 22.087.100 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 96 Paket | 23.191.592 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 260.465.700 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 273.489.210 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21 Dokumen | 11.219.857.425 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 252 Dokumen | 20.287.543.229 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21 Dokumen | 27.000.050 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 21 Dokumen | 28.000.000 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20 Unit | 750.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 21 Unit | 822.268.110 | Dinas Kesehatan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan | 115.369.925 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 4 Laporan | 81.000.000 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Dokumen | 40.516.350 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 10 Dokumen | 42.542.354 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 405.916.866 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 426.213.097 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | *Persentasi instansi/sarana kesehatan yg menerapkan sistem informasi berbasis teknologi (web)* | | 100 % | 86.731.350 | | | | 100 % | 95.873.869 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 86.731.350 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 95.873.869 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu layanan kesehatan* | | 68 % | 431.281.000 | | | | 71 % | 282.897.835 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Unit | 72.049.100 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Unit | 24.254.193 | Dinas Kesehatan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.02.02.2.04.0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Unit | 21.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Unit | 11.125.000 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21 Unit | 35.732.050 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 22 Unit | 37.518.642 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.04.0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22 Dokumen | 302.499.850 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 24 Dokumen | 210.000.000 | Dinas Kesehatan |
| **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | ***Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar*** | | **85 Persen** | **7.205.059.900** | | | | **95 Persen** | **8.125.506.932** | |
| 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | *Persentasi praktek tenaga kesehatan yg dibina dan diawasi* | | 80 % | 34.499.100 | | | | 100 % | 25.150.000 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.03.2.01.0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Dokumen | 11.499.250 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 8 Dokumen | 12.000.000 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.03.2.01.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | 22.999.850 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Dokumen | 13.150.000 | Dinas Kesehatan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | *Persentasi pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar* | | 91 % | 4.553.813.600 | | | | 100 % | 4.739.506.225 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.03.2.02.0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 12.972.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Dokumen | 13.622.908 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1000 Orang | 4.514.486.800 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 5000 Orang | 4.698.211.223 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | 26.354.300 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Dokumen | 27.672.094 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentasi tenaga kesehatan yg telah ditingkatkan kompetensinya* | | 85 % | 2.616.747.200 | | | | 95 % | 3.360.850.707 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300 Orang | 2.616.747.200 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 500 Orang | 3.360.850.707 | Dinas Kesehatan |
| **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | ***Persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar,Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar*** | | **85 Persen** | **340.849.250** | | | | **95 Persen** | **303.735.855** | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | *Pesentasi apotek, toko obat, toko alkes, optikal dan Umot yg memiliki izin* | | 85 % | 46.823.900 | | | | 100 % | 24.855.401 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 77 Dokumen | 46.823.900 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Dokumen | 24.855.401 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.04.2.02 | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | *Persentasi PKRT yg duawasi dan bersertifikat laik* | | 60 % | 27.134.450 | | | | 70 % | 28.491.430 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.04.2.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 27.134.450 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Dokumen | 28.491.430 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | *Persentasi produksi pangan industri Rumah tangga yg duawasi dan bersertifikat laik* | | 60 % | 135.121.225 | | | | 70 % | 141.877.451 | Dinas Kesehatan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 135.121.225 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 4 Dokumen | 141.877.451 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | *Persentasi TPM dan DAM yg diawasi dan bersertifikat laik* | | 96 % | 27.359.800 | | | | 98 % | 18.232.387 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.04.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 27.359.800 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Dokumen | 18.232.387 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.04.2.05 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | *Persentasi pembinaan pd sentra nakanan jajanan dan pemberian stiker* | | 56 % | 18.430.000 | | | | 88 % | - | Dinas Kesehatan |
| 1.02.04.2.05.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 18.430.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Dokumen | - | Dinas Kesehatan |
| 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | *Persentasi pengawasan post market pd produksi dan produk makanan minunan IRT* | | 60 % | 85.979.875 | | | | 65 % | 90.279.186 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30 Unit | 85.979.875 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 65 Unit | 90.279.186 | Dinas Kesehatan |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | ***Persentase Keluarga Ber PHBS*** | | **71 Persen** | **250.349.900** | | | | **82 Persen** | **284.142.998** | |
| 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *persentasi kelompok masyarakat di desa/kelurahan yg berpartisipasi dlm pembangunan kesehatan* | | 23 % | 70.000.000 | | | | 25 % | 88.299.654 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | 70.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 4 Dokumen | 88.299.654 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *persentasi masyarakat ditempat kerja dan tempat umum yg ber PHBS* | | 44 % | 94.999.950 | | | | 53 % | 110.093.344 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 94.999.950 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 110.093.344 | Dinas Kesehatan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentasi UKBM yg purnama atau mandiri* | | 30 % | 85.349.950 | | | | 40 % | 85.750.000 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Dokumen | 85.349.950 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 40 Dokumen | 85.750.000 | Dinas Kesehatan |
| **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | **843.131.550** | | | | | **14.114.336.836** | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | ***%ib hmil y dpt ply ksht str, %ib hmil y dpt fslts ply ksht,%byi br lhr umr 0-28 hri y dpt ply ksht str,%Blit y brmr 0–59 bln y dpt ply ksht, %nk usi pndidkn dsr y dpt ply ksht str,%org brusi lbh dr 60 th y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit Hiprtnsi y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit DM y dpt ply ksht str,%ODG brt y dpt ply ksht str,%org trdg TBCy dpt ply ksht str,%prslin difslts ply ksht,%Blit y dpt ply ksht ssi str,Rso pksms trhdp jml pddk%org brusi 15-59 th y dpt ply ksht str, Rasio pksmas trhdp jml pddk*** | | **100 Persen** | **843.131.550** | | | | **100 Persen** | **14.114.336.836** | |
| 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Cakupan ketersediaan Sarana, Prasarana dan AlkesUKP dan UKM Rujukan* | | 100 % | 843.131.550 | | | | 100 % | 14.114.336.836 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 1.434.856.850 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 0 Unit | 1.150.000.000 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit | 843.131.550 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 10 Unit | 11.529.479.986 | Dinas Kesehatan |
| | **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.A.SULTAN DG RAJA KAB. BULUKUMBA** | | | | **126.363.379.297** | | | | | **148.825.823.328** | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **126.363.379.297** | | | | | **148.825.823.328** | |
| **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | **126.363.379.297** | | | | | **148.825.823.328** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan )*** | | **100 %** | **107.516.004.297** | | | | **100 %** | **124.030.484.102** | |
| 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik (dinas kesehatan)* | | 100 % | 23.654.251.241 | | | | 100 % | 27.430.484.102 | Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja |
| 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Ujung Bulu, Caile | 362 Orang/ bulan | 23.654.251.241 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 14000 Orang/ bulan | 27.430.484.102 | Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja |
| 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *Terlaksananya pengelolaan keuangan secara langsung dan mandiri oleh RS utk mendukung peningkatan mutu layanan Rumah Sakit dan Puskesmas* | | 100 % | 83.861.753.056 | | | | 100 % | 96.600.000.000 | Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit Kerja | 83.861.753.056 | Ujung Bulu, Caile | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | 20 Unit Kerja | 96.600.000.000 | Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | ***%ib hmil y dpt ply ksht str, %ib hmil y dpt fslts ply ksht,%byi br lhr umr 0-28 hri y dpt ply ksht str,%Blit y brmr 0–59 bln y dpt ply ksht, %nk usi pndidkn dsr y dpt ply ksht str,%org brusi lbh dr 60 th y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit Hiprtnsi y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit DM y dpt ply ksht str,%ODG brt y dpt ply ksht str,%org trdg TBCy dpt ply ksht str,%prslin difslts ply ksht,%Blit y dpt ply ksht ssi str,Rso pksms trhdp jml pddk%org brusi 15-59 th y dpt ply ksht str, Rasio pksmas trhdp jml pddk*** | | **100 Persen** | **18.847.375.000** | | | | **100 Persen** | **24.795.339.226** | |
| 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Cakupan ketersediaan Sarana, Prasarana dan AlkesUKP dan UKM Rujukan* | | 100 % | 18.847.375.000 | | | | 100 % | 24.795.339.226 | Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja |
| 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Unit | 18.847.375.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 10 Unit | 24.795.339.226 | Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja |
| 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit* | Ujung Bulu, Caile | 0 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 3 Unit | - | Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja |
| | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. BULUKUMBA** | | | | **156.548.420.550** | | | | | **278.084.957.834** | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **156.548.420.550** | | | | | **278.084.957.834** | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | **156.548.420.550** | | | | | **278.084.957.834** | |
| **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)*** | | **100 %** | **11.046.409.154** | | | | **100 %** | **12.403.626.674** | |
| 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dihasilkan dan dievaluasi* | | 63 Dokumen | 182.160.800 | | | | 66 Dokumen | 190.629.560 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39 Dokumen | 182.160.800 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 50 Dokumen | 190.629.560 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah* | | 100 % | 7.894.686.254 | | | | 100 % | 8.578.127.814 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Orang/ bulan | 7.647.986.254 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 98 Orang/ bulan | 8.315.513.814 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 246.700.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 262.614.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah* | | 100 % | 64.780.000 | | | | 100 % | 71.212.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Orang | 40.460.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 5 Orang | 44.460.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | Ujung Bulu, Caile | 15 Orang | 24.320.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 10 Orang | 26.752.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah* | | 100 % | 143.222.700 | | | | 100 % | 156.629.220 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 34 Paket | 1.756.700 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 34 Paket | 1.016.620 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 500 Paket | 9.907.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 400 Paket | 10.897.700 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150 Laporan | 131.559.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 120 Laporan | 144.714.900 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Barang barang milik daerah yang diadakan* | | 27 Unit | 146.705.400 | | | | 27 Unit | 637.500.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 460.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit | 24.500.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 10 Unit | 27.500.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7 Unit | 122.205.400 | Ujung Bulu, Caile Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 7 Unit | 150.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terbayarnya jasa penunjang urusan kantor* | | 24 Orang / Bulan | 2.345.274.000 | | | | 24 Orang / Bulan | 2.464.740.080 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 152.574.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 187.119.900 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 2.192.700.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 2.277.620.180 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah aset dinas PUTR yang dipelihara* | | 104 Unit | 269.580.000 | | | | 104 Unit | 304.788.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | 35.630.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 39.193.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Caile | 4 Unit | 78.250.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 4 Unit | 86.075.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | 142.500.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 165.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Caile | 20 Unit | 13.200.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 20 Unit | 14.520.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | ***Persentase luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi*** | | **82.61 %** | **32.956.291.549** | | | | **84.43 %** | **87.038.565.547** | |
| 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatnya penanganan bangunan SDA pengendali banjir, Embung/Bangunan Penampung ari lainnya, serta normalisasi saluran sungai* | | 350 Satuan | 1.903.169.150 | | | | 100 Persen | 3.553.503.360 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.02.2.01.0077 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 31.839.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 28 Dokumen | 252.659.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.02.2.01.0081 | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir | | | | | | | | | | |
| | | *Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 KM | 34.100.250 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 49 KM | 1.007.705.600 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | | | | | | | | |
| | | *Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50 KM | 150.840.900 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 17 KM | 330.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.02.2.01.0125 | Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21 Unit | 125.274.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 21 Unit | 313.138.760 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.02.2.01.0128 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun* | Kindang, Kahayya | 1 Dokumen | 1.561.115.000 | Kindang, Kahayya | DAU | | 1 Dokumen | 1.650.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase jaringan irigasi kondisi baik* | | 83 % | 31.053.122.399 | | | | 100 % | 83.485.062.187 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.02.2.02.0002 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | |
| | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 KM | 1.068.430 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 0 KM | 34.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | |
| | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15 KM | 13.187.829.568 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK, DAU | | 41 KM | 23.874.235.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | |
| | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45 KM | 17.672.635.401 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 29 KM | 25.471.646.200 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | |
| | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20 KM | 191.589.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 85 KM | 139.180.987 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | ***Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrg ngr yng mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM)*** | | **93 %** | **1.747.216.875** | | | | **94 %** | **27.996.320.000** | |
| 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah SPAM/Perpipaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum* | | 245 Unit | 1.747.216.875 | | | | 180 Unit | 27.996.320.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | |
| | | *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Liter/ Detik | 997.165.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 75 Liter/ Detik | 27.971.020.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.03.03.2.01.0027 | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Desa | 750.051.875 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK, DAU | | 10 Desa | 25.300.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | ***Persentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik (SPM)*** | | **100 %** | **816.576.684** | | | | **100 %** | **1.991.000.000** | |
| 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Rumah Tangga Bersanitasi dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | 100 % | 816.576.684 | | | | 100 % | 1.991.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.05.2.01.0024 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1000 Unit | 10.106.684 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1000 Unit | 11.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.05.2.01.0025 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | | | | | | | | | | |
| | | *Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 $M^3$/ Hari | 806.470.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 100 $M^3$/ Hari | 1.980.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | ***Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)*** | | **100 %** | **4.159.856.190** | | | | **100 %** | **3.300.000.000** | |
| 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Panjang Talud/drainase yang baik* | | 32.02 Km | 4.159.856.190 | | | | 32.02 Km | 3.300.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.06.2.01.0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500 Sistem Drainase Perkotaan | 1.904.628.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 60 Sistem Drainase Perkotaan | 2.200.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.707 Sistem Drainase Perkotaan | 2.255.228.190 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 60 Sistem Drainase Perkotaan | 1.100.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | ***Persentase Bangunan Gedung pemerintah yang dibangun dan rekomendasi IMB yang terbit*** | | **84 %** | **5.441.680.220** | | | | **88 %** | **13.002.805.310** | |
| 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | *Jumlah Bangunan Gedung yang terbangun dan jumlah rekomendasi IMB yang terbit* | | 416 Unit | 5.441.680.220 | | | | 419 Unit | 13.002.805.310 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Dokumen | 5.230.148.120 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 19 Dokumen | 12.760.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG* | Ujung Bulu, Caile | 400 Dokumen | 211.532.100 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 400 Dokumen | 242.805.310 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | ***Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan*** | | **100 %** | **99.877.312.378** | | | | **100 %** | **131.038.228.303** | |
| 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | *Panjang jalan dalam kondisi baik* | | 101 km | 99.877.312.378 | | | | 190 km | 131.038.228.303 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan | | | | | | | | | | |
| | | *Panjang Jalan yang Dibangun* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.250 KM | 1.051.407.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 36 KM | 3.300.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan | | | | | | | | | | |
| | | *Panjang Jalan yang Direkonstruksi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.606 KM | 43.467.437.141 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | INSENTIF FISKAL, DAK, DAU | | 26 KM | 26.582.646.200 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan | | | | | | | | | | |
| | | *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.100 KM | 48.789.178.537 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 25 KM | 36.735.228.303 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Jembatan yang Dibangun* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Jembatan | 3.706.960.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 20 Jembatan | 53.145.353.800 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | | | | | | | | |
| | | *Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 KM | 229.135.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 KM | 275.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | |
| | | *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.670 KM | 2.633.193.700 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 50 KM | 11.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | ***Persentase tenaga kerja trampil yang bersertifikat*** | | **100 %** | **70.232.500** | | | | **100 %** | **216.700.000** | |
| 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | *Jumlah tenaga kerja trampil yang dilatih* | | 100 orang | 49.255.500 | | | | 100 orang | 165.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih* | Ujung Bulu, Caile | 100 Orang | 49.255.500 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 100 Orang | 165.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah peralatan laboratorium dan dokumen yang diuji* | | 7 Unit | 20.977.000 | | | | 7 Unit | 51.700.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.11.2.02.0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7 Dokumen | 20.977.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 7 Dokumen | 51.700.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | ***Persentase Jumlah dokumen penataan ruang yang hasilkan*** | | **100 %** | **432.845.000** | | | | **100 %** | **1.097.712.000** | |
| 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen penataan ruang yang hasilkan* | | 3 Dokumen | 432.845.000 | | | | 3 Dokumen | 1.051.556.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.12.2.01.0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Caile | 3 Dokumen | 422.082.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 3 Dokumen | 990.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.12.2.01.0007 | Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah publikasi informasi penataan ruang* | Ujung Bulu, Caile | 3 Publikasi | 10.763.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Publikasi | 61.556.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Frekuensi pengawasan dan koordinasi yang dilakukan* | | 24 Kali | - | | | | 24 Kali | 46.156.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang* | Ujung Bulu, Caile | 3 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Dokumen | 46.156.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| | **DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. BULUKUMBA** | | | | **19.993.474.762** | | | | | **31.956.837.845** | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **19.317.217.912** | | | | | **27.537.897.844** | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | **19.317.217.912** | | | | | **27.537.897.844** | |
| **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"*** | | **100 %** | **4.227.679.862** | | | | **100 %** | **4.903.801.094** | |
| 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"* | | 34 Dokumen | 41.139.000 | | | | 34 Dokumen | 123.348.684 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 30 Dokumen | 23.699.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 30 Dokumen | 58.439.284 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 4 Dokumen | 17.440.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 4 Dokumen | 64.909.400 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum,Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun* | | 12 Bulan | 2.585.229.689 | | | | 12 Bulan | 2.798.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Ujung Bulu, Caile | 30 Orang/ bulan | 2.461.829.689 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 30 Orang/ bulan | 2.575.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | 15.960.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 175.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | 97.440.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 23.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Laporan | 10.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Laporan | 25.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah ASN yang Mengikuti Diklatpim dan Bimbingan Teknis* | | 2 Orang | 58.275.000 | | | | 2 Orang | 67.386.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Ujung Bulu, Caile | 2 Orang | 26.025.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Orang | 52.386.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | Ujung Bulu, Caile | 3 Orang | 32.250.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 3 Orang | 15.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum* | | 12 Bulan | 462.135.603 | | | | 12 Bulan | 493.317.260 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Paket | 5.952.900 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Paket | 5.968.850 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Paket | 95.944.063 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Paket | 150.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Paket | 14.997.090 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Paket | 26.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Paket | 75.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 100.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Paket | 11.750.550 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 11.348.410 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 258.491.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 200.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | 15 Unit | 22.350.000 | | | | 15 Unit | 330.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | 100.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 30.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 15 Unit | 22.250.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 15 Unit | 300.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum* | | 12 Bulan | 590.760.570 | | | | 12 Bulan | 721.700.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 60.000.570 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Laporan | 71.700.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 530.760.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 650.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum* | | 12 Bulan | 467.790.000 | | | | 12 Bulan | 370.049.150 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Caile | 12 Unit | 92.860.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Unit | 70.049.150 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Caile | 20 Unit | 374.930.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 20 Unit | 300.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | ***Persentase rumah layak Huni dan kawasan kumuh*** | | **85 %** | **257.450.150** | | | | **100 %** | **3.699.299.750** | |
| 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | *"Jumlah Dokumen/Database Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota"* | | 1 Dokumen | 5.349.000 | | | | 1 Dokumen | 99.299.750 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.02.2.01.0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | 5.349.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 99.299.750 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | *Jumlah Rumah Layak Huni bagi masyarakat Korban bencana atau Relokasi Program Pemerintah* | | 1 Paket | 252.101.150 | | | | 1 Paket | 3.600.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi* | Ujung Bulu, Caile | 20 Unit Rumah | 251.896.150 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 20 Unit Rumah | 1.500.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.02.2.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun* | Ujung Bulu, Caile | 15 Unit Rumah | 105.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 15 Unit Rumah | 1.500.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.02.2.03.0009 | Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit Rumah | 100.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit Rumah | 600.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | ***Terlaksananya Program Permukiman dan Permukiman Kumuh Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau*** | | 92% | **14.698.438.100** | | | | 94,66% | **18.170.000.000** | |
| 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | *Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Pencegahan Timbulnya Kawasan Kumuh Baru* | | 1 Dokumen | 155.130.000 | | | | 1 Dokumen | 500.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.03.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | 154.999.800 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 250.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman* | Ujung Bulu, Caile | 1 Laporan | 130.200 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Laporan | 250.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | *Jumlah Dokumen dan database Penetapan lokasi permukiman kumuh* | | 1 Dokumen | 50.949.750 | | | | 1 Dokumen | 170.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.03.2.02.0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | 19.949.950 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 50.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.03.2.02.0012 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina* | Ujung Bulu, Caile | 12 Kelompok Masyarakat | 30.999.800 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Kelompok Masyarakat | 20.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.04.03.2.02.0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 100.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | *Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani* | | 80 % | 14.492.358.350 | | | | 92 % | 17.500.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki* | Ujung Bulu, Caile | 40 Unit Rumah | 141.599.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 40 Unit Rumah | 2.500.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.03.2.03.0013 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | |
| | | *Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar* | Ujung Bulu, Caile | 10 Ha | 14.350.759.350 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 10 Ha | 15.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | ***Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum*** | | **100 %** | **133.649.800** | | | | **100 %** | **764.797.000** | |
| 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | *Persentase Perencanaan dan Ketersediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum Perumahan* | | 100 % | 133.649.800 | | | | 100 % | 764.797.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian* | Ujung Bulu, Caile | 7 Lokasi | 133.649.800 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 100 Lokasi | 764.797.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **676.256.850** | | | | | **4.418.940.001** | |
| **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | **676.256.850** | | | | | **4.418.940.001** | |
| **2.10.04** | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | ***Persentase penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah*** | | **100 %** | **95.468.000** | | | | **100 %** | **50.000.000** | |
| 2.10.04.2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah* | | 100 % | 95.468.000 | | | | 100 % | 50.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 2.10.04.2.01.0001 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Caile | 8 Dokumen | 95.468.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 15 Dokumen | 50.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| **2.10.05** | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | ***Tersedianya lokasi pembangunan untuk kepentingan umum*** | | **100 %** | **287.060.000** | | | | **100 %** | **3.718.940.001** | |
| 2.10.05.2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Tersedianya lokasi pembangunan untuk kepentingan umum* | | 15 Persil | 287.060.000 | | | | 15 Persil | 3.718.940.001 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 2.10.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Caile | 14 Dokumen | 287.060.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 14 Dokumen | 3.718.940.001 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| **2.10.09** | **PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH** | ***Terlaksananya Pengelolaan Izin Membuka Tanah, Terwujudnya Pengelolaan Tanah Kosong, dan Terwujudnya Pengelolaan Izin Lokasi*** | | **95 %** | **293.728.850** | | | | **100 %** | **650.000.000** | |
| 2.10.09.2.01 | Penerbitan Izin Membuka Tanah | *"Jumlah Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah (PEMDA) yang sudah Terbit dan Izin Lokasi"* | | 100 % | 293.728.850 | | | | 100 % | 650.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 2.10.09.2.01.0002 | Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara* | Ujung Bulu, Caile | 200 Dokumen | 293.728.850 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 40 Dokumen | 650.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BULUKUMBA** | | | | **2.395.925.062** | | | | | **3.742.002.103** | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **2.395.925.062** | | | | | **3.742.002.103** | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | **2.395.925.062** | | | | | **3.742.002.103** | |
| **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BPBD)*** | | **100 %** | **1.555.343.362** | | | | 100% | **2.253.317.063** | |
| 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase peningkatan kualitas administrasi keuangan* | | 100 % | 1.255.885.842 | | | | 100 % | 1.716.987.107 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Ujung Bulu, Loka | 12 Orang/ bulan | 1.101.612.092 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Orang/ bulan | 1.515.726.510 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 12 Dokumen | 154.273.750 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Dokumen | 201.260.597 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | 12 Bulan | 8.160.000 | | | | 12 Bulan | 55.437.083 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Orang | 8.160.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Orang | 55.437.083 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Penyediaan Administrasi Umum* | | 100 % | 125.233.520 | | | | 100 % | 213.712.648 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Paket | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Paket | 5.117.798 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Paket | 30.280.270 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Paket | 73.476.139 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 94.953.250 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 135.118.710 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | 100 % | 44.417.700 | | | | 100 % | 77.554.595 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Unit | 44.417.700 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Unit | 77.554.595 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | 100 % | 47.151.900 | | | | 100 % | 79.469.772 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 26.090.400 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 36.279.642 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 21.061.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 43.190.129 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | 100 % | 74.494.400 | | | | 100 % | 110.155.859 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Loka | 12 Unit | 70.434.400 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Unit | 102.850.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Loka | 12 Unit | 4.060.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Unit | 7.305.859 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | ***Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananpencegahan dankesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)*** | | **100 %** | **840.581.700** | | | | **100 %** | **1.488.685.041** | |
| 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | *Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota* | | 100 % | 71.532.400 | | | | 100 % | 121.000.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.03.2.01.0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun* | Ujung Bulu, Loka | 10 Orang | 71.532.400 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 10 Orang | 121.000.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | *Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana* | | 100% % | 121.081.000 | | | | 100 % | 244.970.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.03.2.02.0008 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya* | Ujung Bulu, Loka | 100 Orang | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Orang | 88.000.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.03.2.02.0009 | Penyusunan Rencana Kontijensi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 70.000.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 770.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.03.2.02.0014 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 95.700.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya* | Ujung Bulu, Loka | 10 Unit | 51.081.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 10 Unit | 60.500.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | *Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | | 100 % | 548.564.900 | | | | 100 % | 813.444.248 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat* | Ujung Bulu, Loka | 12 Dokumen | 548.564.900 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Dokumen | 736.164.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 12 Orang | - | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Orang | 77.280.248 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | *Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana* | | 100 % | 99.403.400 | | | | 100 % | 309.270.793 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.03.2.04.0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 33.000.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Kegiatan | 99.403.400 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Kegiatan | 276.270.793 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. BULUKUMBA** | | | | **11.055.927.704** | | | | | **15.589.538.459** | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **11.055.927.704** | | | | | **15.589.538.459** | |
| **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | **11.055.927.704** | | | | | **15.589.538.459** | |
| **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Satpol, Damkar dan Penyelamatan)*** | | **100 %** | **5.059.431.154** | | | | 100% | **7.902.442.559** | |
| 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satpol.PP dan Damkar* | | 100 % | 63.566.000 | | | | 100 % | 55.825.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 6 Dokumen | 63.566.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 29.700.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 3.025.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 3.025.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 3.025.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 3.025.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 2 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Laporan | 3.025.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 4 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 4 Laporan | 11.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan Satpol PP dan Damkar* | | 100 % | 4.615.554.064 | | | | 100 % | 6.428.740.659 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Ujung Bulu, Caile | 14 Orang/ bulan | 4.565.082.764 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Orang/ bulan | 6.348.990.659 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 12 Dokumen | 33.810.000 | Ujung Bulu, Caile | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAU | | 12 Dokumen | 63.800.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Laporan | 4.921.300 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Laporan | 5.775.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Laporan | 11.740.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 4.675.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 5.500.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Terpenuhinya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah* | | 100 % | 11.930.000 | | | | 100 % | 14.850.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 2 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 3.025.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 8.800.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 2 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Laporan | 1.925.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 11.930.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Laporan | 1.100.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | 100 % | 31.643.000 | | | | 100 % | 355.025.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | Ujung Bulu, Caile | 382 Paket | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 536 Paket | 294.800.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | Ujung Bulu, Caile | 12 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 2.200.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Ujung Bulu, Caile | 5 Orang | 31.643.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 7 Orang | 18.975.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Orang | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 20 Orang | 20.075.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Orang | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 7 Orang | 18.975.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terpenuhinya Pengadministrasian Umum Satpol.PP dan Damkar* | | 100 % | 61.670.990 | | | | 100 % | 238.425.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Paket | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 5.775.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Paket | - | Ujung Bulu, Caile | DAU, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 1 Paket | 7.975.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Paket | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 11.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Paket | 23.684.400 | Ujung Bulu, Caile | DAU, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 1 Paket | 30.250.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Paket | 4.859.350 | Ujung Bulu, Caile | DAU, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 1 Paket | 8.525.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 2.200.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Paket | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 1.100.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 3.411.240 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 4 Laporan | 5.500.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 29.716.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 165.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 12 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 1.100.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terpenuhinya Pengadaan Barang Kantor Satpol.PP dan Damkar* | | 100 % | 34.287.100 | | | | 100 % | 618.176.900 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 368.500.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 1 Unit | 185.900.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 3 Unit | 8.759.400 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 9 Unit | 13.176.900 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 2 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 4 Unit | 12.100.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.05.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 2 Unit | 25.527.700 | Ujung Bulu, Caile | DAU, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 4 Unit | 22.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAU | | 1 Unit | 5.500.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 11.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpenuhinya jasa Penunjang Pelayanan Kantor Satpol.PP dan Damkar* | | 100 % | 46.740.000 | | | | 100 % | 74.250.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 2.200.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 46.740.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 51.700.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 1.100.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 19.250.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpeliharanya Barang Milik Daerah Kantor Satpol.PP dan Damkar* | | 100 % | 194.040.000 | | | | 100 % | 117.150.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | 7.500.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 13.750.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Caile | 28 Unit | 166.430.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 18 Unit | 79.200.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | Ujung Bulu, Caile | 7 Unit | 7.430.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 8 Unit | 3.300.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | Ujung Bulu, Caile | 7 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 15 Unit | 4.400.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | 12.680.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 15.400.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 1.100.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | ***Persentase Penegakan Perda, Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)*** | | **100 %** | **2.955.796.550** | | | | **100 %** | **3.449.290.900** | |
| 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Terciptanya Situasi yang aman dan tentram serta kondusif dalam wilayah Kabupaten Bulukumba* | | 100 % | 2.467.920.000 | | | | 100 % | 3.050.100.900 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | 27.650.000 | Ujung Bulu, Caile | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAU | | 1 Dokumen | 30.800.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 5.500.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.02.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Orang | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Orang | 5.500.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 4.400.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan* | Ujung Bulu, Caile | 60 laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 laporan | 18.150.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan* | Ujung Bulu, Caile | 60 Laporan | 2.440.270.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 2.956.600.900 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.02.2.01.0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 6.050.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.02.2.01.0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 23.100.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | *Terciptanya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba* | | 100 % | 487.876.550 | | | | 100 % | 371.690.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Laporan | 29.385.750 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAU | | 2 Laporan | 10.890.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 313.154.700 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 12 Laporan | 348.700.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 145.336.100 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 2 Laporan | 12.100.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | *Terciptanya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota* | | 100 % | - | | | | 100 % | 27.500.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 12 Laporan | 27.500.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | ***Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (SPM), Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)*** | | **100 %** | **3.040.700.000** | | | | **100 %** | **4.237.805.000** | |
| 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Terciptanya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Bulukumba* | | 100 % | 3.040.700.000 | | | | 100 % | 4.021.380.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 765.908.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 3.005.852.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 3.173.060.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 5.500.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.04.2.01.0004 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 10.912.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.05.04.2.01.0005 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 11.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.04.2.01.0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Orang | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Orang | 5.500.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait* | Ujung Bulu, Caile | 10 Unit | 34.848.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Unit | 49.500.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.04.2.02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | *Terpenuhinya Peralatan pencegahan kebakaran* | | 100 % | - | | | | 100 % | 182.404.024 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.04.2.02.0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran* | Ujung Bulu, Caile | 2 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Dokumen | 16.500.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.04.2.02.0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 14 Dokumen | 165.904.024 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.05.04.2.03 | Investigasi Kejadian Kebakaran | *Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran* | | 100 % | - | | | | 100 % | 3.300.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.04.2.03.0001 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 3.300.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | *Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran* | | 100 % | - | | | | 100 % | 18.700.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Orang | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Orang | 6.600.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.04.2.04.0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Desa/ Kelur ahan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Desa/ Kelur ahan | 6.600.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.04.2.04.0003 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokumen | 5.500.000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 1.05.04.2.05 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | *Terlakssananya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia* | | 100 % | - | | | | 100 % | 12.020.976 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.05.04.2.05.0001 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 12.020.976 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| | **DINAS SOSIAL KAB. BULUKUMBA** | | | | **3.633.815.091** | | | | | **7.536.115.125** | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **3.633.815.091** | | | | | **7.536.115.125** | |
| **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | **3.633.815.091** | | | | | **7.536.115.125** | |
| **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Sosial )*** | | **100 %** | **2.321.845.916** | | | | **100 %** | **4.391.614.095** | |
| 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Meningkatnya Sistem Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | 100 % | 58.965.000 | | | | 100 % | 141.432.888 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 4 Dokumen | 30.749.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 8 Dokumen | 63.779.100 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 2 Laporan | 12.085.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 6 Laporan | 32.553.788 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 5 Laporan | 16.131.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 45.100.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Meningkatnya Capaian Kinerja Kesejahteraan ASN, dan Peningkatan sistem dan capaian Laporan Keuangan* | | 100 % | 2.001.876.972 | | | | 100 % | 3.137.131.981 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Ujung Bulu, Caile | 22 Orang/ bulan | 1.912.126.972 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 22 Orang/ bulan | 2.977.631.981 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 12 Dokumen | 88.100.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 410 Dokumen | 148.500.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Laporan | 1.650.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Laporan | 11.000.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Meningkatnya Kinerja, Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai/ASN* | | 100 % | 17.000.000 | | | | 100 % | 72.952.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Ujung Bulu, Caile | 2 Orang | 17.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 4 Orang | 47.300.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | Ujung Bulu, Caile | 5 Orang | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 18 Orang | 25.652.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | 100 % | 110.969.700 | | | | 100 % | 235.042.096 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Paket | 1.102.700 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 1.922.327 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 6 Paket | 22.387.600 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 8 Paket | 45.373.969 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Paket | 681.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 1.100.000 | Dinas Sosial |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 7 Paket | 14.750.700 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 22.000.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Paket | 1.565.800 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 2.512.400 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | Ujung Bulu, Caile | 6 Laporan | 7.380.900 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 4 Laporan | 4.429.700 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 40 Laporan | 63.101.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 53 Laporan | 157.703.700 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah berupa kendaraan roda dua dan meubeleur kantor* | | 100 % | - | | | | 100 % | 601.652.700 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | - Unit | 535.652.700 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 2 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | - Unit | 55.000.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 3 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 10 Unit | 11.000.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Meninkatnya Jasa dan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | 100 % | 83.054.244 | | | | 100 % | 78.286.230 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 40.214.244 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Laporan | 65.086.230 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 42.840.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Laporan | 13.200.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintah daerah* | | 100 % | 49.980.000 | | | | 100 % | 125.116.200 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Caile | 13 Unit | 46.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 13 Unit | 94.743.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | Ujung Bulu, Caile | 15 Unit | 3.980.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 18 Unit | 2.233.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 28.140.200 | Dinas Sosial |
| **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | ***Persentase Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan*** | | **96 %** | **332.214.000** | | | | 100% | **453.546.500** | |
| 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Kemampuan, Keahlian,Keterampilan, Kesejahteraan serta Potensi Sumber Daya Pekerja Sosial dan Kelembagaan Sosial* | | 100 % | 332.214.000 | | | | 100 % | 453.546.500 | Dinas Sosial |
| 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Caile | 53 Orang | 277.249.650 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 53 Orang | 357.770.600 | Dinas Sosial |
| 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Orang | 36.719.750 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 10 Orang | 44.000.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7 Lembaga | 12.685.600 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 17 Lembaga | 38.575.900 | Dinas Sosial |
| 1.06.02.2.03.0005 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6 Sertifikat | 5.559.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 8 Sertifikat | 13.200.000 | Dinas Sosial |
| **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | ***Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)*** | | **100 %** | **219.090.175** | | | | **100 %** | **448.261.000** | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | *Meningkatnya Layanan Perlindungan Rehabilitasi Sosial dan Kesejahteraan PMKS (Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) diluar Panti Sosial.* | | 97 % | 178.200.725 | | | | 100 % | 321.506.900 | Dinas Sosial |
| 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70 Orang | 94.898.325 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 100 Orang | 110.780.010 | Dinas Sosial |
| 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50 Orang | 19.413.450 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 220 Orang | 44.319.990 | Dinas Sosial |
| 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20 Orang | 55.089.450 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 50 Orang | 110.000.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Orang | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 50 Orang | 33.000.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30 Orang | 8.799.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 8 Orang | 23.406.900 | Dinas Sosial |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | *Meningkatnya Layanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, dan Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial* | | 97 % | 40.889.450 | | | | 100 % | 126.754.100 | Dinas Sosial |
| 1.06.04.2.02.0005 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15 Orang | 22.649.850 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 65 Orang | 72.270.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.04.2.02.0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20 Orang | 7.499.050 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 25 Orang | 37.984.100 | Dinas Sosial |
| 1.06.04.2.02.0013 | Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Orang | 10.740.550 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 15 Orang | 16.500.000 | Dinas Sosial |
| **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | ***Persentase Jumlah PMKS yang Tervalidasi dalam data terpadu DTKS dan SIKS-NGPersentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial*** | | **97 %** | **240.082.750** | | | | **100 %** | **1.292.500.000** | |
| 1.06.05.2.01 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | *Meningkatnya Layanan Penjangkauan, Rujukan dan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar* | | 100 % | 9.999.600 | | | | 100 % | 27.500.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.05.2.01.0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Orang | 9.999.600 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 7 Orang | 27.500.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan data Fakir Miskin dan PMKS, serta Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi dan Kesejahteraan Ekonomi dan Keluarga fakir Miskin dan PMKS* | | 96 % | 230.083.150 | | | | 100 % | 1.265.000.000 | Dinas Sosial |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50 Keluarga | 24.623.650 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 30 Keluarga | 165.000.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47 Keluarga | 167.926.850 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 50 Keluarga | 352.000.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40 Orang | 37.532.650 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 70 Orang | 748.000.000 | Dinas Sosial |
| **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | ***Persentase Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (SPM)*** | | **100 %** | **472.170.750** | | | | **100 %** | **732.985.000** | |
| 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Bantuan Logistik Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial* | | 100 % | 15.800.700 | | | | 100 % | 49.720.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40 Orang | 15.800.700 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 60 Orang | 49.500.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40 Orang | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 60 Orang | 220.000 | Dinas Sosial |
| 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Kemamuan Keterampilan Petugas dan Penanggulangan Bencana dalam Penanganan Bencana Alam dan Sosial* | | 100 % | 456.370.050 | | | | 100 % | 683.265.000 | Dinas Sosial |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Caile | 70 Orang | 456.370.050 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 100 Orang | 683.265.000 | Dinas Sosial |
| **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | ***Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dipelihara*** | | **100 %** | **48.411.500** | | | | **100 %** | **217.208.530** | |
| 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | *Menengkatnya Pelestarian Taman Makam Pahlawan, Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kejuangan, Keperintisan dan KSN* | | 3 Buah | 48.411.500 | | | | 4 Buah | 217.208.530 | Dinas Sosial |
| 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota* | Gantorang, Semua Kel/Desa | 3 Makam | 48.411.500 | Gantorang, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Makam | 217.208.530 | Dinas Sosial |
| | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KAB. BULUKUMBA** | | | | **18.402.275.775** | | | | | **32.638.738.285** | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **18.402.275.775** | | | | | **31.380.355.975** | |
| **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | **18.402.275.775** | | | | | **31.380.355.975** | |
| **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan )*** | | **100 %** | **4.999.030.462** | | | | **100 %** | **9.575.350.150** | |
| 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*<br>*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah* | | 38 Dokumen<br>38 Dokumen | 20.642.000 | | | | 38 Dokumen | 53.861.677 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28 Dokumen | 20.642.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 8 Dokumen | 48.565.109 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 30 Laporan | 5.296.568 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | 100 %<br>100 % | 4.642.529.630 | | | | 100 % | 7.747.906.423 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 54 Orang/ bulan | 4.298.011.380 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Orang/ bulan | 7.390.071.196 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 335.250.000 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 335.148.267 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 5 Laporan | 9.268.250 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 5 Laporan | 22.686.960 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah ASN yang mengikuti Latpim III Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah* | | 0 Orang<br>0 % | - | | | | 0 % | 82.500.000 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 4 Orang | - | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 0 Orang | 82.500.000 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan administrasi umum Pemenuhan Administrasi Umum* | | 100 %<br>100 % | 99.641.000 | | | | 100 % | 409.352.537 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 1 Paket | - | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Paket | 8.615.998 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 1 Paket | - | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Paket | 9.627.649 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 1 Paket | 60.550.000 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Paket | 104.089.781 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 1 Paket | 5.000.000 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Paket | 7.194.442 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 240 Dokumen | - | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 24 Dokumen | 2.944.085 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 45 Laporan | 34.091.000 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 276.880.582 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan kebutahan barang milik daerah* | | 100 % 100 % | - | | | | 100 % | 779.057.035 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 0 Unit | 605.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Unit | 26.523.288 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 7 Unit | - | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 10 Unit | 147.533.747 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah* | | 100 % | 131.957.832 | | | | 100 % | 354.217.694 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 2.220.000 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 3.315.411 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 129.737.832 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 337.640.639 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | - | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 13.261.644 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah* | | 100 % 12 Bulan | 104.260.000 | | | | 100 % | 148.454.784 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 40 Unit | 104.260.000 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 9 Unit | 122.067.470 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 22 Unit | - | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 14.309.314 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 2 Unit | - | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 12.078.000 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | ***Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan*** | | **90 %** | **304.651.787** | | | | **100 %** | **420.407.665** | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen RPPLH dan Daya Dukung Daya Tampung LH* | | 2 Dokumen | - | | | | 2 Dokumen | 86.346.700 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.02.2.01.0003 | Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokuman | 86.346.700 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)* | | 2 Dokumen | 304.651.787 | | | | 0 Dokumen | 334.060.965 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.02.2.02.0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | 304.651.787 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 0 Dokumen | 334.060.965 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | ***Persentase Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di kabupaten/kota*** | | **23,51 %** | **1.444.844.000** | | | | **22,16 %** | **2.121.491.471** | |
| 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Jumlah Kampung Iklim yang dibentuk untuk menjaga Kerusakan Lingkungan Akibat Perubahan Iklim* | | 23 Lokasi | 1.444.844.000 | | | | 23 Lokasi | 1.956.007.372 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Dokumen | 1.408.844.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK, DAU | | 12 Dokumen | 1.549.728.400 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 6 Dokumen | 186.938.388 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 36.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 11 Dokumen | 219.340.584 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Presentase Data Kualitas Air Sungai di Kabupaten Bulukumba* | | 6 Air sungai dan 5 air limbah sumber pencemar | - | | | | 6 Air sungai dan 5 air limbah sumber pencemar | 32.628.949 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 11 Laporan | 32.628.949 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.03.2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Presentase Terahibilitasinya kawasan Pantai Lahan Kritis* | | 20000 Batang | - | | | | 20000 Batan g | 132.855.150 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.03.2.03.0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | | | | | | | | | | |
| | | *jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Kegiatan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Kegiatan | 132.855.150 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | ***Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati ( Flora Dan Fauna ) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan Bt,Bahari*** | | **90 %** | **210.480.000** | | | | **100 %** | **3.040.700.116** | |
| 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | *% Pemenuhan Taman Kehati dan TAHURA yang dikelolah dengan baik* | | 90 % | 210.480.000 | | | | 100 % | 3.040.700.116 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | | | | | |
| | | *Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 384,70 Ha | 210.480.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 25 Ha | 3.040.700.116 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | ***Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani*** | | **100 %** | **-** | | | | **100 %** | **63.648.995** | |
| 2.11.05.2.01 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | *persentase limbah B3 yang dkendalikan dengan baik* | | 48 Pasyankes dan Perbeng kelan | - | | | | 48 Pasyank es dan Perbe ngkelan | 63.648.995 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.05.2.01.0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 48 Laporan | 63.648.995 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | ***Persentase Perusahaan Yang Memiliki Izin K3Presentase Penyelesaian Terhadap Pengaduan Lingkungan HidupPersentase Ketersediaan Data Potensi Kerusakan 10 Kecamatan Dan Peningkatan 10 Kecamatan Tentang Upaya Pengendalian Kerusakan Serta Status Lingkungan Hidup Daerah Setiap Tahun*** | | **90 %** | **-** | | | | **100 %** | 88.838.420 | |
| 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Presentase Pembinaan dan Pengawasan usaha dan atau kegiatan yang izin LH dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota* | | 90 % | - | | | | 100 % | 88.838.420 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 88.838.420 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **2.11.07** | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | ***Presentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH*** | | **100 %** | **-** | | | | **100 %** | **92.831.519** | |
| 2.11.07.2.02 | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | *Presentase Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal,Pengetahuan Tradisional dan HAK MHA terkait Perlindungan dan Pengelolaan LH* | | 100 % | - | | | | 100 % | 92.831.519 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.07.2.02.0001 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 92.831.519 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | ***Cakupan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat*** | | **100 %** | **-** | | | | **100 %** | **198.924.660** | |
| 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Presentase pengetahuan masyarakat di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup* | | 30 Sekolah | - | | | | 30 Sekolah | 198.924.660 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 30 Dokumen | 198.924.660 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | ***Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti*** | | **100 %** | **-** | | | | **100 %** | **38.257.987** | |
| 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | *Presetase Tindak lanjut Pengaduan* | | 20 Pengaduan | - | | | | 20 Pengadu an | 38.257.987 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25 Pengaduan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 20 Pengaduan | 38.257.987 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | ***Presentase Sampah Yang Terkelolah*** | | **100 %** | **11.443.269.526** | | | | **100 %** | **15.740.704.992** | |
| 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | *% Pemenuhan Sampah yang terkelolah* | | 100 % | 11.443.269.526 | | | | 100 % | 15.740.704.992 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160 Kelompok | 25.663.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 10 Kelompok | 237.723.331 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.11.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | - | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 335.484.541 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.11.2.01.0013 | Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Ton | 1.603.320.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK, DAU | | 47.756,60 Ton | 1.763.652.000 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.304 Ton | 9.814.286.526 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK, DAU | | 47.756,60 Ton | 13.403.845.120 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | **-** | | | | | **1.258.382.310** | |
| **3.28** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | | **-** | | | | | **1.258.382.310** | |
| **3.28.04** | **PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA** | ***Persentase Konservasi daya hayati dan ekosistem yang terlaksana*** | | **100 %** | **-** | | | | **100 %** | **1.258.382.310** | |
| 3.28.04.2.01 | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota | *% Pemenuhan Terjaganya Kelestarian Sumber daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati ( Flora dan Fauna ) serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan TAHURA dikecamatan Bt.Bahari* | | 100 % | - | | | | 100 % | 1.258.382.310 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 3.28.04.2.01.0005 | Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3475 Ha | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 3475 Ha | 1.188.861.191 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| 3.28.04.2.01.0008 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Desa | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Desa | 69.521.119 | Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan |
| | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BULUKUMBA** | | | | **4.612.640.241** | | | | | **7.844.685.625** | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **4.612.640.241** | | | | | **7.844.685.625** | |
| **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | **4.612.640.241** | | | | | **7.844.685.625** | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)*** | | **100 %** | **3.877.704.791** | | | | **100 %** | **6.706.985.625** | |
| 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya Renstra, renja, SOP, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RKT, Sirup, dan IKU.Tersusunnya RKATersusunnya RKA-PTersusunnya DPATersusunnya DPA-PTersusunnya Laporan KinerjaTersusunnya laporan bulanan, triwulan dan semester serta laporan evaluasi renja, LPPD dan Sensus BMD* | | 100 % | 18.459.500 | | | | 100 % | 23.199.255 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 10 Dokumen | 6.300.050 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 10 Dokumen | 7.944.255 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | 1.765.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Dokumen | 305.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | 1.743.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 2.500.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Laporan | 7.517.400 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Laporan | 10.500.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 1 Laporan | 1.114.850 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 20 Laporan | 1.950.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASNLancarnya administrasi pelaksanaan Tugas ASNLancarnya penatausahaan keuangan SKPDLancarnya penyusunan akuntansi SKPDTersusunnya laporan akhir tahunTersedianya bahan tanggapan pemeriksaan.Tersusunnya laporan keuangan secara berjenjangTersusunnya laporan akhir tahun* | | 100 % | 2.800.655.833 | | | | 100 % | 3.887.231.157 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Ujung Bulu, Caile | 29 Orang/ bulan | 2.744.670.383 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 33 Orang/ bulan | 3.783.281.157 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 12 Dokumen | 53.130.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Dokumen | 93.500.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Laporan | 2.090.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Laporan | 5.500.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | 765.450 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 4.950.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Meningkatnya sapras kedispilinan pegawai, Tersedianya pakaian dinas, Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi pegawai, Terlaksananya sistem informasi kepegawaian, Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tupoksi, terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan, Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan* | | 100 % | 72.616.000 | | | | 100 % | 82.500.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Ujung Bulu, Caile | 3 Orang | 72.616.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 3 Orang | 82.500.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor, Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga kantor, Tersedianya bahan logistik kantor., tersedianya barang cetak dan penggandaan, Tersedianya bahan bacaan, Tersedianya makanan dan minuman tamu kantor, Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis, Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik* | | 100 % | 377.030.768 | | | | 100 % | 664.455.213 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Paket | 5.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 17.700.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Paket | 1.623.050 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 7.700.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Paket | 217.830.218 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 465.055.213 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Paket | 3.847.500 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 7.000.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | Ujung Bulu, Caile | 1 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Laporan | 15.000.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 148.730.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 152.000.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *"Tersedianya Kendaraan dinas operasional/ lapangan, Tersedianya Mebel, Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, Tersedianya aset tetap lainnya, Tersedianya Gedung Kantor atau bangunan lainnya, Tersedianya Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya"* | | 100 % | 364.229.250 | | | | 100 % | 1.644.500.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 49.500.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 45.000.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 10 Unit | 364.229.250 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 10 Unit | 550.000.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.12.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 1.000.000.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *"Tersedianya Jasa Surat menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa pelayanan umum kantor"* | | 100 % | 181.663.440 | | | | 100 % | 230.000.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 126.463.440 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 165.000.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 55.200.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 65.000.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan beserta pembayaran pajaknya, Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional beserta pembayaran pajaknya, Terpeliharanya mebel kantor., Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, Tersedianya pemeliharaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya, Tersedianya pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, Tersedianya pemeliharaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya* | | 100 % | 63.050.000 | | | | 100 % | 175.100.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | 29.100.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 47.000.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Caile | 9 Unit | 10.810.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 9 Unit | 46.500.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | Ujung Bulu, Caile | 20 Unit | 23.140.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 20 Unit | 33.000.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 34.000.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 14.600.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | ***Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk*** | | **100 %** | **495.873.500** | | | | **100 %** | **581.200.000** | |
| 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | *Kecamatan yg mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk* | | 100 % | 495.873.500 | | | | 100 % | 570.200.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.02.2.01.0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Dokumen | 13.956.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Dokumen | 59.700.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.02.2.01.0003 | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk* | Ujung Bulu, Caile | 150 Orang | - | Ujung Bulu, Caile | - | | 150 Orang | 5.500.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 481.917.500 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 505.000.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.02.2.04 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | *terbinanya dan diawasinya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk* | | 12 Bulan | - | | | | 12 Bulan | 11.000.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.02.2.04.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | - | | 12 Laporan | 11.000.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | ***Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran.*** | | **90 %** | **200.307.000** | | | | **95 %** | **350.000.000** | |
| 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | *Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan, analisis dokumen kependudukan* | | 100 % | 200.307.000 | | | | 100 % | 311.500.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Layanan | 193.740.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Layanan | 275.000.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.03.2.01.0003 | Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil* | Ujung Bulu, Caile | 12 Dokumen | 6.567.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Dokumen | 36.500.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | *Terlaksananya koordinasi dengan instansi vertikal terkait, koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil.* | | 100 % | - | | | | 100 % | 27.500.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.12.03.2.02.0001 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam* | Ujung Bulu, Caile | 2 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Laporan | 11.000.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.03.2.02.0003 | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil* | Ujung Bulu, Caile | 10 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 10 Laporan | 16.500.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.03.2.03 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | *Terlaksananya supervisi bersama dengan instansi vertikal.* | | 100 % | - | | | | 100 % | 11.000.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.03.2.03.0003 | Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan* | Ujung Bulu, Caile | 2 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Laporan | 11.000.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | ***Jumlah saluran sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil*** | | **3 Buah** | **38.754.950** | | | | **4 Buah** | **187.800.000** | |
| 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | *terlaksananya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan* | | 100 % | 25.623.400 | | | | 100 % | 61.500.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan* | Ujung Bulu, Caile | 10 Dokumen | 12.396.400 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 10 Dokumen | 26.500.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | 13.227.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 35.000.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | *terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.* | | 100 % | 13.131.550 | | | | 100 % | 126.300.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 16.500.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.04.2.03.0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Dokumen | 35.000.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.04.2.03.0005 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | Ujung Bulu, Caile | 4 Laporan | 8.381.850 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 4 Laporan | 62.500.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.04.2.03.0006 | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi* | Ujung Bulu, Caile | 12 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Dokumen | 6.500.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.04.2.03.0007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 4.749.700 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 5.800.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | ***Pesentase buku agregat kependudukan yang diterbitkan per tahun*** | | **100 %** | **-** | | | | **100 %** | **18.700.000** | |
| 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | *tersusunnya dokumen Profil Kependudukan* | | 100 % | - | | | | 100 % | 18.700.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 18.700.000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BULUKUMBA** | | | | **5.563.086.912** | | | | | **5.881.742.824** | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **5.563.086.912** | | | | | **5.881.742.824** | |
| **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | **5.563.086.912** | | | | | **5.881.742.824** | |
| **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa )*** | | **100 %** | **3.409.586.762** | | | | **100 %** | **4.143.742.824** | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.13.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Terlaksanananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | | 100 % | 49.731.250 | | | | 100 % | 66.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 9 Dokumen | 45.081.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 9 Dokumen | 55.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 4.649.750 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 5.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Laporan | 5.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu* | | 100 % | 2.868.077.611 | | | | 100 % | 3.123.492.824 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 33 Orang/ bulan | 2.792.912.111 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 33 Orang/ bulan | 3.025.045.406 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 12 Dokumen | 70.669.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Dokumen | 88.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 6 Laporan | 4.496.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 6 Laporan | 4.950.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 18 Laporan | 5.497.418 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah* | | 100 % | 9.914.000 | | | | 100 % | 16.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 2 Laporan | 9.914.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Laporan | 16.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | 100 % | 20.230.000 | | | | 100 % | 74.250.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | Ujung Bulu, Loka | 35 Paket | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 35 Paket | 19.250.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Ujung Bulu, Loka | 2 Orang | 20.230.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Orang | 55.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | 100 % | 168.764.680 | | | | 100 % | 319.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 25 Paket | - | Ujung Bulu, Loka | DAK | | 25 Paket | 27.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 3 Paket | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 3 Paket | 16.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 3.108.280 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Paket | 5.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 5 Paket | 65.844.400 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 5 Paket | 71.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 2 Paket | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Paket | 11.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 2 Laporan | - | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Laporan | 22.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 99.812.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 110.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 55.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | 100 % | 107.158.328 | | | | 100 % | 236.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Unit | 23.543.300 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | 33.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 18 Unit | 17.700.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 18 Unit | 33.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 16 Unit | 65.915.028 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 16 Unit | 170.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | 100 % | 145.337.856 | | | | 100 % | 165.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 64.717.920 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 77.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 80.619.936 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 88.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan* | | 100 % | 40.373.037 | | | | 100 % | 143.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 9.255.281 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 11.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Loka | 6 Unit | 9.268.956 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 6 Unit | 27.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | Ujung Bulu, Loka | 68 Unit | 16.080.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 68 Unit | 16.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Loka | 1 Unit | 5.768.800 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | 77.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Loka | 2 Unit | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Unit | 11.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| **2.13.02** | **PROGRAM PENATAAN DESA** | ***Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik*** | | **60 %** | **58.709.850** | | | | **80 %** | 84.000.000 | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | *Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik* | | 60 % | 58.709.850 | | | | 80 % | 66.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.02.2.01.0002 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya* | Ujung Bulu, Loka | 90 Desa | 58.709.850 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 90 Desa | 55.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.02.2.01.0005 | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | - | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 11.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| **2.13.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | ***Adanya kerjasama antar desa dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di desa*** | | **100 %** | **99.999.800** | | | | **100 %** | **165.000.000** | |
| 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | *Jumlah Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi* | | 109 Desa | 99.999.800 | | | | 109 Desa | 165.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.03.2.01.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Loka | 12 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Dokumen | 55.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.03.2.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan* | Ujung Bulu, Loka | 54 Dokumen | 99.999.800 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 54 Dokumen | 110.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | ***Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa*** | | **100 %** | **1.365.393.200** | | | | **100 %** | **984.500.000** | |
| 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | *Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa* | | 100 % | 1.365.393.200 | | | | 100 % | 984.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.04.2.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa* | Ujung Bulu, Loka | 109 Dokumen | 60.985.600 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 109 Dokumen | 55.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.04.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 109 Dokumen | - | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 109 Dokumen | 55.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa* | Ujung Bulu, Loka | 12 Dokumen | 958.350.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 109 Dokumen | 495.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.04.2.01.0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas* | Ujung Bulu, Loka | 109 Orang | 29.041.300 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 109 Orang | 55.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80 Dokumen | 149.996.700 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 80 Dokumen | 110.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.04.2.01.0009 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 34.972.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 38.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.04.2.01.0010 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | - | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 5.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun* | Ujung Bulu, Loka | 109 Dokumen | 49.020.650 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 109 Dokumen | 55.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.04.2.01.0014 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas* | Ujung Bulu, Loka | 109 Orang | 18.145.300 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 109 Orang | 55.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.04.2.01.0015 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 25 Desa | - | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 25 Desa | 5.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan* | Ujung Bulu, Loka | 109 Dokumen | 64.881.150 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 109 Dokumen | 55.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | ***Terlaksananya lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah dan provinsi*** | | **100 %** | **629.397.300** | | | | **100 %** | **522.500.000** | |
| 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | 100 % | 629.397.300 | | | | 100 % | 522.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.05.2.01.0001 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat* | Ujung Bulu, Loka | 109 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 109 Dokumen | 27.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat* | Ujung Bulu, Loka | 50 Dokumen | 25.687.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 50 Dokumen | 27.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | Ujung Bulu, Loka | 654 Lembaga | 67.649.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 654 Lembaga | 110.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.05.2.01.0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 10 Unit | - | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 10 Unit | 27.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa* | Ujung Bulu, Loka | 12 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Dokumen | 55.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna* | Ujung Bulu, Loka | 109 Laporan | 99.999.900 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 109 Laporan | 137.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat* | Ujung Bulu, Loka | 30 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 30 Laporan | 27.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga* | Ujung Bulu, Loka | 10 Dokumen | 436.060.900 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 10 Dokumen | 55.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 2.13.05.2.01.0011 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 109 Keluarga | - | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 109 Keluarga | 55.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| | **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BULUKUMBA** | | | | **12.410.842.623** | | | | | **14.039.376.159** | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **12.410.842.623** | | | | | **14.039.376.159** | |
| **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | **779.490.385** | | | | | **896.000.000** | |
| **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | ***Persentase ARG pada Belanja Daerah APBD*** | | **55 %** | **62.793.275** | | | | **65 %**<br>**65 %** | **75.000.000** | |
| 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | *Persentase ARG pada Belanja Daerah* | | 60 % | 32.793.500 | | | | 65 % | 40.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.02.2.01.0004 | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Loka | 27 Perangkat Daerah | 32.793.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 30 Perangkat Daerah | 40.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial* | | 60 % | 29.999.775 | | | | 65 % | 35.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.02.2.02.0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Loka | 5 Dokumen | 29.999.775 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 5 Dokumen | 35.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | ***Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu*** | | **100 %** | **116.680.350** | | | | **100 %** | **131.000.000** | |
| 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu* | | 45 % | 57.139.000 | | | | - | 65.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Loka | 5 Dokumen | 57.139.000 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 5 Dokumen | 65.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | *Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komrehensif* | | 50 % | 49.542.000 | | | | - | 55.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.03.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Loka | 16 Layanan | 49.542.000 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 16 Layanan | 55.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.03.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi* | | 50 % | 9.999.350 | | | | - | 11.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas* | Ujung Bulu, Loka | 6 Orang | 9.999.350 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 6 Orang | 11.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | ***Persentase Jumlah Layanan Pembinaan Keluarga*** | | **30 %** | **217.836.860** | | | | 40% | **250.000.000** | |
| 2.08.04.2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase layanan pembelajaran keluarga yang terstandarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga*<br>*Persentase layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasiembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga* | | 35 %<br>40 % | 199.996.700 | | | | 40 % | 220.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.08.04.2.01.0002 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | Ujung Bulu, Loka | 6 Dokumen | 199.996.700 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 12 Dokumen | 220.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.04.2.03 | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota*<br>*jumlah layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak* | | 35 %<br>6 layanan | 17.840.160 | | | | 40 %<br>10 layanan | 30.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.04.2.03.0001 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20 Layanan | 17.840.160 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | | 25 Layanan | 30.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | ***Nilai Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak*** | | **700 Nilai** | **332.179.900** | | | | **800 Nilai** | **385.000.000** | |
| 2.08.06.2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | *Persentase pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, media dan dunia usaha*<br>*Persentase pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, media dan dunia usaha* | | 700 Nilai<br>40 % | 249.999.900 | | | | 60 %<br>800 Nilai | 275.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.06.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha* | Ujung Bulu, Loka | 2 Organisasi | 199.999.900 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 14 Organisasi | 220.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.06.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Loka | 2 Dokumen | 50.000.000 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 2 Dokumen | 55.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak* | | 10 lembaga | 82.180.000 | | | | 14 lembaga | 110.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.06.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Loka | 20 Layanan | 42.950.000 | Ujung Bulu, Loka | DAK | | 20 Dokumen | 55.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.06.2.02.0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Loka | 3 Dokumen | 39.230.000 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 8 Dokumen | 55.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | ***Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten*** | | **80 %** | **50.000.000** | | | | **90 %** | **55.000.000** | |
| 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase pengembangan model pencegahan kekerasan terhadap anak* | | 80 % | 50.000.000 | | | | - | 55.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA* | Ujung Bulu, Loka | 75 Orang | 50.000.000 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 75 Orang | 55.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | **11.273.752.238** | | | | | **12.750.016.159** | |
| **2.14.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas PPKB, PPPA)*** | | **100 %** | **5.435.314.388** | | | | **100 %** | **6.509.490.681** | |
| 2.14.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase penyusunan dokumen perencanaan, peganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu* | | 100 % | 169.712.850 | | | | 100 % | 306.824.999 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 4 Dokumen | 102.068.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 4 Dokumen | 121.825.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 3 Laporan | 9.999.850 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 3 Laporan | 109.999.999 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 2 Laporan | 57.645.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Laporan | 75.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu* | | 100 % | 4.572.893.223 | | | | 100 % | 4.972.782.932 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Orang/ bulan | 4.462.893.223 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Orang/ bulan | 4.856.782.932 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 100.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 105.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | 10.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 11.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.14.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang tersusun* | | 3 Laporan | 14.999.600 | | | | 3 Laporan | 16.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 7.499.800 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 8.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 2 Laporan | 7.499.800 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Laporan | 8.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | - | - | | | | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Orang | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | | 2 Orang | - | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor* | | 100 % | 154.670.125 | | | | 100 % | 298.188.670 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.14.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 7.801.825 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Paket | 15.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 7.358.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Paket | 20.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 73.275.150 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Paket | 123.188.670 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 5.617.650 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Paket | 15.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 24 Laporan | 60.617.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 24 Laporan | 125.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.14.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah* | | 100 % | 70.123.700 | | | | 100 % | 210.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Unit | 80.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115 Unit | 20.628.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 115 Unit | 55.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7 Unit | 49.495.200 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 7 Unit | 75.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | 100 % | 365.794.890 | | | | 100 % | 386.194.080 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 73.794.890 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 81.194.080 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 292.000.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 305.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara/ direhabilitasi* | | 100 % | 87.120.000 | | | | 100 % | 319.500.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Ujung Bulu, Loka | 1 Unit | 16.500.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | 27.500.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Loka | 5 Unit | 50.000.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 5 Unit | 77.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 160.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.14.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Loka | 20 Unit | 20.620.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 20 Unit | 55.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | ***Persentase Pembinaan Kebijakan Dan Strategi Pengendalian Penduduk (Penyusunan Grand Design , Penyusunan Profil Kependudukan/Paremeter Dan Proyeksi Penduduk)*** | | **100 %** | **531.890.650** | | | | **100 %** | **586.086.380** | |
| 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | *Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk sinkronisasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantias penduduk* | | 10 Kecamatan 10 kecamatan | 315.358.350 | | | | 10 Kecamat an 10 kecamata n | 347.900.080 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.02.2.01.0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Satuan Pendidikan | 49.085.550 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 5 Satuan Pendidikan | 55.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.02.2.01.0020 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) )* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 106.272.800 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | | 10 Dokumen | 116.900.080 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.02.2.01.0023 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan | 160.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | | 10 Kegiatan | 176.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Bahan-bahan dan Data untuk pengambilan kebijakan pemetaan pengendalian penduduk yang tersedia Bahan-bahan dan data untuk pengambilan kebijakan pemetaan pengendalian penduduk yang tersedia* | | 12 Bulan 12 bulan | 216.532.300 | | | | 12 Bulan 12 bulan | 238.186.300 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.02.2.02.0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 11.970.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | | 12 Dokumen | 13.167.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 46.662.150 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | | 12 Laporan | 51.328.530 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 107.999.750 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | | 12 Dokumen | 118.800.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.02.2.02.0015 | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 49.900.400 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 10 Unit | 54.890.770 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | ***Persentase Program Keluarga Berencana, Pelayanan Kontrasepsi Dan Kelembagaan Jaringan KB*** | | **100 %** | **2.600.967.800** | | | | **100 %** | **2.855.491.807** | |
| 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | *Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal yang terlaksana Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang Didayagunakan* | | 10 Kecamatan 10 Kecamatan | 936.499.700 | | | | 10 Kecamat an 10 Kecamat an | 1.030.150.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Laporan | 481.500.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | | 10 Laporan | 529.650.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Laporan | 130.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | | 10 Laporan | 143.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | 149.999.950 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | | 2 Dokumen | 165.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | 25.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | | 10 Dokumen | 27.500.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Organisasi | 149.999.750 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | | 10 Organisasi | 165.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Faskes yang teregister yang mendapat ketersediaan alat kontrasepsi MKJP* | | 21 Faskes | 1.120.975.800 | | | | 21 Faskes | 1.195.049.926 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21 Laporan | 18.900.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | | 21 Laporan | 20.790.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 Orang | 697.840.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | | 21 Orang | 767.624.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.03.2.03.0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Unit | 390.235.800 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR | | 7 Unit | 391.235.926 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11 Laporan | 14.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | | 900 Laporan | 15.400.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | *Jumlah pelayanan KB dan KR bergerak/bakti sosial diwilayah dan sasaran khusus* | | 10 kecamatan | 543.492.300 | | | | 10 kecamata n | 630.291.881 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.03.2.04.0001 | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Organisasi | 193.492.300 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | | 5 Organisasi | 212.841.881 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20 Kampung | 350.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | | 20 Kampung | 417.450.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | ***Persentase Jumlah Kecamatan terkait Keluarga Yang Mandiri, Tentram Dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)*** | | **100 %** | **2.705.579.400** | | | | **100 %** | **2.798.947.291** | |
| 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | *Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlaksana Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terlaksana* | | 10 kecamatan 10 Kecamatan | 2.682.376.450 | | | | 10 kecamata n 10 Kecamat an | 2.743.947.291 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19 Unit | 365.704.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | | 19 Unit | 402.275.060 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.04.2.01.0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20 Orang | 153.572.200 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK | | 20 Orang | 158.572.281 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.04.2.01.0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Laporan | 39.999.800 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 5 Laporan | 55.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20 Orang | 2.123.099.950 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | | 20 Orang | 2.128.099.950 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | *Persentase Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | | 4 organisasi | 23.202.950 | | | | 4 organisasi | 55.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.04.2.02.0001 | Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Organisasi | 23.202.950 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Organisasi | 55.000.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | **357.600.000** | | | | | **393.360.000** | |
| **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | ***Persentase Program Keluarga Berencana, Pelayanan Kontrasepsi Dan Kelembagaan Jaringan KB*** | | **100 %** | **357.600.000** | | | | **100 %** | **393.360.000** | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | *Jumlah Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus* | | 10 Kecamatan | 357.600.000 | | | | 10 Kecamat an | 393.360.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)* | Ujung Bulu, Loka | 68 Orang | 357.600.000 | Ujung Bulu, Loka | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | | 12 Orang | 393.360.000 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
| | **DINAS PERHUBUNGAN KAB. BULUKUMBA** | | | | **19.742.246.030** | | | | | **21.868.075.574** | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **6.723.800** | | | | | **16.500.000** | |
| **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | **6.723.800** | | | | | **16.500.000** | |
| **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | ***Persentase jumlah aparatur yang mengikuti tanggap bencana (Fasilitasi Petugas Reviter dan Tsunami)*** | | **90 %** | **6.723.800** | | | | **100 %** | **16.500.000** | |
| 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | *Jumlah Pelayanaan pencegahan dan kesiap-siagaan bencana* | | 12 Bulan | 6.723.800 | | | | 100 % | 16.500.000 | Dinas Perhubungan |
| 1.05.03.2.02.0014 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 6.723.800 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 16.500.000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **19.735.522.230** | | | | | **21.851.575.574** | |
| **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | **19.735.522.230** | | | | | **21.851.575.574** | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik ((Dinas Perhubungan )*** | | **100 %** | **16.978.875.830** | | | | **100 %** | **19.337.055.968** | |
| 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersedianya Dokumen Program SKPD dan Renstra, Lakip.Iku, RKA, DPA, RA, Perjanjian Kinerja SPIP, tersedianya monitoring, evaluasi program kegiatan SKPD terlaksanya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber PAD melalui Uji Petik.* | | 5 Dok | 15.667.000 | | | | 100 % | 55.000.000 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 5 Dokumen | 15.667.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 5 Dokumen | 55.000.000 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Pelaksanaan pelayanan administrasi umum, peningkatan pelayanan administrasi keuangan* | | 12 Bulan | 3.855.503.062 | | | | 100 % | 4.592.109.968 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Ujung Bulu, Caile | 51 Orang/ bulan | 3.777.730.362 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 51 Orang/ bulan | 4.482.777.998 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | Ujung Bulu, Caile | 12 Dokumen | 31.127.700 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Dokumen | 34.240.470 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 12 Dokumen | 46.645.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Dokumen | 75.091.500 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Tersedianya Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur* | | 1 Orang | 14.643.000 | | | | 100 % | 61.259.000 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Ujung Bulu, Caile | 3 Orang | 14.643.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Orang | 61.259.000 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Pelayanan Administrasi Umum* | | 12 Bulan | 207.668.150 | | | | 100 % | 235.092.523 | Dinas Perhubungan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 70 Paket | 3.871.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 70 Paket | 3.850.000 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 4 Paket | 108.653.050 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Paket | 18.671.400 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Paket | 40.133.100 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Paket | 47.049.723 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 34 Laporan | 55.011.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 34 Laporan | 165.521.400 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah* | | 100 % | 29.192.240 | | | | 100 % | 990.000.000 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 3 Unit | 29.192.240 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 990.000.000 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Jumlah Peningkatan pelayanan administrasi Umum* | | 12 Bulan | 12.728.232.378 | | | | 100 % | 13.176.211.805 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 12.590.044.728 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 12.307.885.390 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 6 Laporan | 4.060.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 4.466.000 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 134.127.650 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 863.860.415 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah pelayanan adminitrasi umum* | | 12 Bulan | 127.970.000 | | | | 100 % | 227.382.672 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | 20.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 16.500.000 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Caile | 0 Unit | 97.380.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Unit | 172.382.672 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Caile | 2 Unit | 10.590.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Unit | 38.500.000 | Dinas Perhubungan |
| **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | ***Persentase tersedianya fasilitas penyelengaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C Persentase tersedianya fasilitas penyelengaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C*** | | **85 %<br>100 %** | **2.756.646.400** | | | | **95 %<br>100 %** | **2.514.519.606** | |
| 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah perlengkapan jalan di kabupaten/Kota yang tersedia* | | 12 Bulan | 654.833.100 | | | | 100 % | 1.773.477.924 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 40 Unit | 38.223.700 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 50 Unit | 40.656.000 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | Ujung Bulu, Caile | 120 Unit | 450.389.400 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 150 Unit | 1.550.804.924 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | Ujung Bulu, Caile | 16 Unit | 166.220.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Unit | 182.017.000 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | *Persentase Peningkatan pelayanan dan keberfungsian terminal Tipe C* | | 100 % | 334.230.000 | | | | 100 % | 110.000.000 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.02.2.03.0010 | Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.* | Ujung Bulu, Caile | 83 Orang | 334.230.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Orang | 110.000.000 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | *Jumlah Terlaksanya pengujian kendaraan bermotor Uji kear* | | 12 Bulan | 138.770.650 | | | | 100 % | 220.034.767 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 2 Unit | 111.628.000 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 6 Unit | 109.442.967 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.02.2.05.0005 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | Ujung Bulu, Caile | 4 Laporan | 5.803.250 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 4 Laporan | 33.000.000 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara* | Ujung Bulu, Caile | 7 Unit | 21.339.400 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Unit | 77.591.800 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Tersedianya angkutan umum bagi masyarakat, terwujudnya pengawasan dan penerbitan angkutan umum dan pengaturan lalu lintas jalan*<br>*Jumlah tersedianya angkutan umum bagi masyarakat, terwujudnya pengawasan dan penerbitan angkutan umum dan pengaturan lalu lintas jalan* | | 100 %<br>12 Bulan | 1.628.812.650 | | | | 100 % | 411.006.915 | Dinas Perhubungan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.15.02.2.09.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 287.600.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 252.340.000 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia* | Ujung Bulu, Caile | 12 Unit | 1.341.212.650 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Unit | 158.666.915 | Dinas Perhubungan |
| | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BULUKUMBA** | | | | **3.423.320.813** | | | | | **8.878.032.515** | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **3.423.320.813** | | | | | **8.878.032.515** | |
| **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | **3.391.460.813** | | | | | **8.797.471.266** | |
| **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)*** | | **100 %** | **2.588.000.813** | | | | **100 %** | **4.175.766.750** | |
| 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja* | | 64 Dokumen | 2.050.000 | | | | 64 Dokumen | 63.079.372 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8 Dokumen | 2.050.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 32.760.622 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 30.318.750 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah* | | 100 % | 2.201.698.193 | | | | 100 % | 3.232.057.025 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Orang/ bulan | 2.087.201.893 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Orang/ bulan | 3.036.203.577 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 110.750.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 28.757.941 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 3.746.300 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 153.246.508 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 13.848.999 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah* | | 100 % | - | | | | 100 % | 30.723.328 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Orang | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Orang | 30.723.328 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan administrasi umum* | | 100 % | 196.549.050 | | | | 100 % | 454.781.250 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Paket | 1.963.950 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Paket | 30.318.750 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Paket | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Paket | 36.382.500 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Paket | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Paket | 12.127.500 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Paket | 70.153.100 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Paket | 121.275.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 124.432.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 242.550.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 12.127.500 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah* | | 100 % | - | | | | 100 % | 30.372.106 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Unit | 30.372.106 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah* | | 100 % | 137.823.570 | | | | 100 % | 248.613.750 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 77.995.320 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 103.083.750 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 15.340.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 97.020.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 44.488.250 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 48.510.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah yang terpelihara* | | 100 % | 49.880.000 | | | | 100 % | 116.139.919 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 23.080.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Unit | 24.255.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9 Unit | 25.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Unit | 48.510.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.16.01.2.09.0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit | 1.800.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Unit | 6.992.419 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Unit | 12.127.500 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Unit | 12.127.500 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 0 Unit | 12.127.500 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | ***Persentase perangkat daerah yang menggunkan layanan data pemerintah*** | | **100 %** | **482.200.000** | | | | **100 %** | **1.321.704.516** | |
| 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya pengelolaan informasi publik melalui media informasi publik Terlaksananya pengelolaan informasi publik dan terkelolanya opini dan informasi publik melulai media informasi* | | 100 % 100 % | 482.200.000 | | | | 100 % | 1.321.704.516 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.02.2.01.0002 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik* | Ujung Bulu, Caile | 12 Dokumen | 12.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Dokumen | 136.798.200 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.02.2.01.0003 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 95.322.150 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.02.2.01.0004 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 66.150.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.02.2.01.0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 96.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 184.503.900 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.02.2.01.0006 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 108.056.025 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.02.2.01.0007 | Layanan Hubungan Media | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Layanan Hubungan Media* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Layanan | 233.800.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Layanan | 227.966.857 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.02.2.01.0008 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 60.636.500 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.02.2.01.0010 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Orang | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Orang | 106.774.511 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.02.2.01.0011 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 140.400.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 335.496.373 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | ***Persentase perangkat daerah yag terkoneksi dijaringan intra pemerintah atau menggunaan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo*** | | **100 %** | **321.260.000** | | | | **100 %** | **3.300.000.000** | |
| 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Tersenggaranya sistem dan aplikasi dalam kerangka SPBE Terselenggaranya pengelolaan domain dan sub domain milik pemerintah daerah* | | 100 % 36 Domain | 321.260.000 | | | | 100 % | 2.348.500.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.03.2.01.0001 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Domain | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Domain | 5.500.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.03.2.01.0002 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 5 Dokumen | 143.000.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.03.2.01.0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Unit | 321.260.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Unit | 2.200.000.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Terpenuhinya pengelolaan E-Government/SPBE baik Infrastruktur maupun sistem* | | 100 % | - | | | | 100 % | 951.500.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.03.2.02.0001 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 110.000.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.03.2.02.0002 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 110.000.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.03.2.02.0003 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Unit | 165.000.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 55.000.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.03.2.02.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 5 Dokumen | 55.000.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.03.2.02.0006 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20 Perangkat Daerah | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 20 Perangkat Daerah | 110.000.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.03.2.02.0007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 110.000.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.16.03.2.02.0008 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Layanan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Layanan | 11.000.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.03.2.02.0009 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 110.000.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.03.2.02.0010 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | | 12 Dokumen | 82.500.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.16.03.2.02.0011 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 22.000.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | **21.060.000** | | | | | 56.306.249 | |
| **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | ***Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah*** | | **100 %** | **21.060.000** | | | | **100 %** | 56.306.249 | |
| 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Tersedianya Data Statistik Sektoral dengan terlaksananya pengumpulan data dan statistik daerah Tersedianya data statistik sektoral dengan terselengaranya pengumpulan data dan statistik daerah* | | 100 %<br>100 % | 21.060.000 | | | | 100 % | 56.306.249 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.20.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 21.060.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 28.114.000 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.20.02.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150 Orang | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Orang | 18.191.250 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | **10.800.000** | | | | | 24.255.000 | |
| **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | ***Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah*** | | **100 % 36 OPD** | **10.800.000** | | | | **36 OPD 100 %** | **24.255.000** | |
| 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Tertib Administrasi Pesandian Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi* | | 100 % 100 % | 10.800.000 | | | | 100 % | 18.191.250 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.21.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 10.800.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 12.127.500 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 6.063.750 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.21.02.2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | *Tersedianya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota* | | 100 % | - | | | | - | 6.063.750 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| 2.21.02.2.02.0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Perangkat Daerah | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Perangkat Daerah | 6.063.750 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian |
| | **DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KAB. BULUKUMBA** | | | | **6.486.966.564** | | | | | **10.397.499.447** | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **6.486.966.564** | | | | | **10.397.499.447** | |
| **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | **322.588.700** | | | | | **990.552.443** | |
| **2.07.02** | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | ***Persentase Jumlah Kasus Pengusaha Pekerja Pertahun, Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Persentase Jumlah Kasus Pengusaha Pekerja Pertahun*** | | **50.00 % 100 Persen** | **-** | | | | **50.00 % 100 Persen 50.00 %** | **11.000.000** | |
| 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | *Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro* | | 100 % | - | | | | 100 % | 11.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.07.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 5.500.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.07.02.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro* | Ujung Bulu, Loka | 1 Orang | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Orang | 5.500.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | ***Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi*** | | **0,83 %** | **219.115.150** | | | | **0,87 %<br>0,87 %** | **822.250.000** | |
| 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | *Jumlah pencari kerja / tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi* | | 12 Bulan | 189.115.400 | | | | 12 Bulan | 220.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n* | Ujung Bulu, Loka | 120 Orang | 189.115.400 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Orang | 220.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | *Jumlah Pelatihan/sosialisasi* | | 1 Kegiatan | 9.999.850 | | | | 1 Kegiatan | 13.750.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina* | Ujung Bulu, Loka | 1 Lembaga | 9.999.850 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Lembaga | 13.750.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.07.03.2.04 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | *Jumlah kelompok Usaha yang mendapatkan bantuan* | | Kelompok | 19.999.900 | | | | Kelompok | 588.500.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.07.03.2.04.0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas* | Ujung Bulu, Loka | 12 Perusahaan | 19.999.900 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Perusahaan | 588.500.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | ***Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan*** | | **2,24 %** | **58.849.400** | | | | **2,47 %<br>2,47 %** | **91.971.573** | |
| 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Sosialisasi para penyandang Disabilitas* | | 1 Kegiatan | 14.999.900 | | | | 1 kegiatan | 17.492.773 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.07.04.2.01.0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD* | Ujung Bulu, Loka | 16 Orang | 14.999.900 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 5 Orang | 17.492.773 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | *Jumlah Data dan informasi pasar kerja online* | | 12 Bulan | - | | | | 12 Bulan | 40.590.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.07.04.2.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)* | Ujung Bulu, Loka | 30 Orang | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Orang | 40.590.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah pelatihan/ Sosialisasi Penanggulangan pekerja migran di Indonesia* | | 12 Bulan | 43.849.500 | | | | 12 Bulan | 33.868.800 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.07.04.2.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya* | Ujung Bulu, Loka | 16 Orang | 43.849.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Orang | 33.868.800 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | ***Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).*** | | **100 %** | **44.624.150** | | | | **100 %** | 44.240.870 | |
| 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana (Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan)* | | 12 Bulan | - | | | | 1 Bulan | 27.500.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online* | Ujung Bulu, Loka | 1 Perusahaan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 5 Perusahaan | 27.500.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | *Presentase perselisihan hubungan industrial di perusahaan yang dapat diselesaikan* | | 1 Kegiatan | 44.624.150 | | | | 1 Kegiatan | | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Perselisihan yang Dicegah* | Ujung Bulu, Loka | 1 Perkara | 44.624.150 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Perkara | 16.768.400 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.07.05.2.02.0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi* | Ujung Bulu, Loka | 1 Asosiasi dan Serikat Pekerja | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 21.062.470 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | **6.164.377.864** | | | | | **9.406.947.004** | |
| **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja)*** | | **100 %** | **5.399.177.914** | | | | **100 %** | **8.488.759.112** | |
| 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | 100 % | 98.798.750 | | | | 100 % | 104.395.100 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 2 Dokumen | 65.691.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Dokumen | 47.629.970 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 2 Dokumen | 16.579.450 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Dokumen | 29.156.690 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 2 Dokumen | 15.728.300 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Dokumen | 26.728.440 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | 800.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Laporan | 880.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | 100 % | 4.822.944.095 | | | | 100 % | 7.698.692.911 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Ujung Bulu, Loka | 12 Orang/ bulan | 4.733.934.545 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Orang/ bulan | 7.498.094.062 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 12 Dokumen | 79.049.550 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Dokumen | 189.642.695 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | 9.960.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 3 Laporan | 10.956.154 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *meningkatnya sumber daya manusia dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja* | | 100 % | 22.125.000 | | | | 100 % | 48.675.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Orang | 22.125.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Orang | 48.675.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang tersedia* | | 100 % | 166.170.100 | | | | 100 % | 283.017.727 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 5.240.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Paket | 1.366.750 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 0 Paket | 60.656.800 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 0 Paket | 72.150.678 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 10.274.800 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Paket | 1.660.890 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | 10.000.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Laporan | 13.395.800 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 79.998.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 194.443.609 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Meningkatkan Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Jumlah Sarana dan Pra saran Yang tersedia* | | 100 %<br>100 % | - | | | | 100 % | 55.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | 11.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 2 Unit | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Unit | 22.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Unit | 22.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang tersedia* | | 100 % | 223.650.200 | | | | 100 % | 224.894.512 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 115.315.200 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 126.844.912 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 108.335.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 98.049.600 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang mendapat Pemeliharaan* | | 100 % | 65.489.769 | | | | 100 % | 74.083.862 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.18.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Loka | 12 Unit | 44.869.769 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Unit | 49.102.862 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Loka | 1 Unit | 6.000.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | 11.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Loka | 5 Unit | 14.620.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 5 Unit | 6.171.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Loka | 10 Unit | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 10 Unit | 7.810.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | ***Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota*** | | **20 %** | **18.633.900** | | | | **20 %** | **60.241.060** | |
| 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Penerapan Kebijakan Invertaris Penanaman Modal* | | 1 peraturan | 1.089.900 | | | | 1 peraturan | 26.730.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 1.089.900 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 26.730.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | *Penyajian informasi penanaman Modal* | | 125 Buku | 17.544.000 | | | | 125 Buku | 33.511.060 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.02.2.02.0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 17.544.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 25 Dokumen | 33.511.060 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | - | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | ***Persentase Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)*** | | **76 Investor** | **80.351.750** | | | | **76 Investor** | **87.813.000** | |
| 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Perencanaan dan Terlaksananya Promosi Pontensi Unggulan Daerah Kab.Bulukumba* | | 76 Investor | 80.351.750 | | | | 76 Investor | 87.813.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 66.641.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 73.224.800 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.03.2.01.0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 13.710.750 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 14.588.200 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | ***Peresentase Peningkatan Pelayanan Perizinan*** | | **100 %** | **269.602.650** | | | | **100 %** | **356.166.982** | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | *Persentase administrasi Pelayanan Perizinan* | | 12 Bulan | 269.602.650 | | | | 12 Bulan | 356.166.982 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.04.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | - | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | Ujung Bulu, Loka | 23 Pelaku Usaha | 257.558.950 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 23 Pelaku Usaha | 346.015.450 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | Ujung Bulu, Loka | 1 Pelaku Usaha | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Pelaku Usaha | - | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha* | Ujung Bulu, Loka | 5 Kegiatan Usaha | 12.043.700 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 5 Kegiatan Usaha | 10.151.532 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | ***Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)*** | | 500/ 500000 Rp (M)/ Dollar | **391.611.650** | | | | 500/ 500000 Rp (M)/ Dollar | **402.966.850** | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Tertib administrasi pelayanan Invertasi* | | 76 Investor | 391.611.650 | | | | 76 Investor | 402.966.850 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya* | Ujung Bulu, Loka | 2 Kegiatan Usaha. | 9.086.800 | Ujung Bulu, Loka | DAK | | 2 Kegiatan Usaha. | 71.327.300 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* | Ujung Bulu, Loka | 0 Pelaku Usaha | 188.162.050 | Ujung Bulu, Loka | DAK | | 0 Pelaku Usaha | 231.319.550 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha* | Ujung Bulu, Loka | 100 Kegiatan Usaha | 194.362.800 | Ujung Bulu, Loka | DAK | | 100 Kegiatan Usaha | 100.320.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | ***Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu*** | | **100 %** | **5.000.000** | | | | **100 %** | **11.000.000** | |
| 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *penyajian Informasi data base Perizinan* | | 1 Buku | 5.000.000 | | | | 1 Buku | 11.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 5.000.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 11.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
| | **DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KAB. BULUKUMBA** | | | | **2.381.884.511** | | | | | **2.873.370.513** | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **2.381.884.511** | | | | | **2.873.370.513** | |
| **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | **2.321.884.361** | | | | | **2.755.239.313** | |
| **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan)*** | | **100 %** | **2.261.884.511** | | | | **100 %** | **2.638.655.373** | |
| 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Keterpaduan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan kinerja tepat waktu* | | 100 % | 41.644.000 | | | | 100 % | 64.661.905 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 3 Dokumen | 25.348.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 3 Dokumen | 38.326.200 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 2 Dokumen | 6.380.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Dokumen | 10.087.000 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 2 Dokumen | 6.380.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Dokumen | 10.087.000 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 3.536.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 6.161.705 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terpenuhinya Administrasi keuangan pada PD* | | 100 Persen | 1.886.974.115 | | | | 100 % | 2.091.716.127 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Ujung Bulu, Loka | 12 Orang/ bulan | 1.822.659.115 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Orang/ bulan | 2.004.925.027 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 12 Dokumen | 62.857.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Dokumen | 84.994.800 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | 1.458.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Laporan | 1.796.300 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terpenuhinya dokumen administrasi umum* | | 100 Persen | 60.740.950 | | | | 100 % | 153.937.410 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 6.029.200 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Paket | 4.994.770 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 3 Paket | 22.391.900 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 4 Paket | 40.909.990 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 1.998.850 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Paket | 4.646.950 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 11 Laporan | 30.321.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 43 Laporan | 103.385.700 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.23.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *persentase pemenuhan sarana dan prasarana pengadaan barang milik daerah* | | 100 Persen | 22.430.750 | | | | 100 % | 33.251.075 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 5 Unit | 5.330.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 6 Unit | 16.029.200 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 7 Unit | 17.100.750 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 8 Unit | 17.221.875 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah* | | 100 Persen | 231.869.696 | | | | 100 % | 251.294.666 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 57.189.696 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 58.156.666 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 168 Laporan | 174.680.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 14 Laporan | 193.138.000 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpenuhinya sarana dan prasarana pemeliharaan barang miliki daerah* | | 100 Persen | 18.225.000 | | | | 100 % | 43.794.190 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Loka | 7 Unit | 16.100.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 9 Unit | 28.820.000 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Loka | 1 Unit | 2.125.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | 14.974.190 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | ***Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk, Presentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk, Persentase Jumlah KCKR daerah yang dihimpun*** | | **98 %** | **54.812.150** | | | | **98 %** | **105.621.615** | |
| 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah pengelolaan perpustakaan* | | 98 % | 19.618.750 | | | | 98 % | 39.619.085 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.02.2.01.0002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30 Perpustakaan | 5.662.900 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 30 Perpustakaan | 5.500.000 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Perpustakaan | 3.665.850 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 38 Perpustakaan | 6.672.710 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.02.2.01.0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30 Orang | 5.750.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 365 Orang | 18.645.550 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.02.2.01.0008 | Pengembangan Bahan Pustaka | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan* | Ujung Bulu, Loka | 58 Eksemplar | 2.617.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1448 Eksemplar | 3.284.325 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.02.2.01.0010 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15 Dokumen | 1.922.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 100 Dokumen | 5.516.500 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *jumlah pembudayaan gemar membaca* | | 98 % | 35.193.400 | | | | 100 % | 66.002.530 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.02.2.02.0001 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Lokus | 28.228.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 450 Lokus | 55.002.585 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.02.2.02.0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Perpustakaan | 6.964.900 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 90 Perpustakaan | 10.999.945 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| **2.23.03** | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | ***Persentase Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi/terdaftar yang ada diwilayahnyaPersentase Jumlah naskah kuno yang dialihaksara dan dialihbahasaPersentase Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada diwilayahnya*** | | **100 %** | **5.187.700** | | | | **100 %** | **10.962.325** | |
| 2.23.03.2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | *Pengembangan naskah kunomilik daearah kabupaten/kota* | | 100 % | 2.289.700 | | | | 100 % | 5.499.725 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.03.2.01.0001 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Orang | 2.289.700 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Orang | 5.499.725 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.03.2.02 | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *jumlah pengembangan kolesksi budaya etnis nusantara* | | 100 % | 2.898.000 | | | | 100 % | 5.462.600 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.23.03.2.02.0001 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan* | Ujung Bulu, Loka | 15 Eksemplar | 2.898.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 5 Eksemplar | 5.462.600 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | **60.000.150** | | | | | **118.131.200** | |
| **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | ***Terlaksananya Pengumpulan data arsip yang mempunyai nilai informasi, pengolahan dan penyimpanan data base arsip*** | | **100 %** | **46.124.550** | | | | **100 %** | 77.241.800 | |
| 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | *Cakupan pengelolaan arsip dinamis* | | 100 % | 46.124.550 | | | | 100 % | 77.241.800 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.24.02.2.01.0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37 Berkas | 25.625.950 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Berkas | 44.092.400 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.24.02.2.01.0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37 Berkas | 20.498.600 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Berkas | 33.149.400 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| **2.24.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | ***Presentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan*** | | **100 %** | **13.875.600** | | | | **100 %** | 88.869.488 | |
| 2.24.03.2.04 | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | *Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip alih media yang di kelola* | | 100 % | 13.875.600 | | | | 100 % | 40.869.400 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| 2.24.03.2.04.0002 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Arsip | 13.875.600 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Arsip | 40.869.400 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah |
| | **DINAS PERIKANAN KAB. BULUKUMBA** | | | | **35.684.106.731** | | | | | **37.494.252.968** | |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | **35.684.106.731** | | | | | **37.494.252.968** | |
| **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | **35.684.106.731** | | | | | **37.494.252.968** | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Perikanan)*** | | **100 %** | **4.858.182.953** | | | | **100 %** | **5.740.574.968** | |
| 3.25.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen* | | 19 Dokumen 19 Dokumen | 72.810.000 | | | | 19 Dokumen | 84.150.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 18.743.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokumen | 8.250.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 6.500.250 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 6.600.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 6.500.250 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 6.600.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 7.000.250 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 6.600.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 7.000.250 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 6.600.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | 13.179.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 16.500.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 13.886.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 33.000.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Gaji Tunjangan yang terbayarkan Jumlah Gaji Tunjangan yang dibayarkan* | | 12 Bulan 12 Bulan | 4.308.199.235 | | | | 12 Bulan | 4.674.642.632 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52 Orang/ bulan | 4.197.239.235 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Orang/ bulan | 4.542.642.632 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 110.960.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 126.500.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 5.500.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek/Pelatihan* | | 1 Orang | 6.810.000 | | | | 1 Orang | 82.500.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Orang | 6.810.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Orang | 82.500.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya pemenuhan administrasi umum* | | 12 Bulan | 189.251.240 | | | | 12 Bulan | 311.571.492 | Dinas Perikanan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 3.25.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Paket | 3.498.690 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Paket | 3.850.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Paket | 35.003.650 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Paket | 38.500.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Paket | 25.017.550 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Paket | 27.500.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24 Dokumen | 2.280.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Dokumen | 4.400.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 6.226.350 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 16.500.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 117.225.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 220.821.492 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Pengadaan BMD* | | 12 Unit | - | | | | 8 Unit | 81.950.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 10.450.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 55.000.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 16.500.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Jasa Penunang Urusan Pemerintahan Daerah* | | 12 Bulan | 197.892.478 | | | | 12 Bulan | 308.530.844 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 81.174.478 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 198.000.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 116.718.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 110.530.844 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah BMD yang terpelihara* | | 53 Unit | 83.220.000 | | | | 53 Unit | 197.230.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40 Unit | 65.800.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 40 Unit | 120.230.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit | 4.220.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 5 Unit | 5.500.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 8.930.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 66.000.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Unit | 4.270.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 5.500.000 | Dinas Perikanan |
| **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | ***Cakupan Bina Kelompok Produksi Perikanan Tangkap*** | | **60 Persen 54247 Ton** | **26.890.383.200** | | | | **60 Persen 55337,50 To** | **25.484.360.000** | |
| 3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | *Jumlah Dokumen Data Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang diberikanan* | | 1 dok 37 Unit | 21.528.826.700 | | | | 2 dok 56167.56 to n | 7.856.860.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.03.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 16.194.200 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 55.000.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.03.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9 Unit | 17.659.592.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 55 Unit | 4.308.700.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.03.2.01.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 292 Unit | 3.853.040.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 250 Unit | 3.493.160.000 | Dinas Perikanan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Nelayan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan* | | 3 Paket | 5.343.439.000 | | | | 3 Paket | 6.336.000.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250 Orang | 5.343.439.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 20 Orang | 6.281.000.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.03.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40 Kelompok | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Kelompok | 55.000.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.03.2.03 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | *Persentase TPI yang operasional (%) Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap* | | 100 % 100 % | - | | | | 100 % | 11.258.500.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.03.2.03.0001 | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 7 Dokumen | 38.500.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.03.2.03.0002 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Layanan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 7 Layanan | 11.220.000.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.03.2.04 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan* | | 2 Rekomendasi | 18.117.500 | | | | 120 Rekomendasi | 11.000.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.03.2.04.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 18.117.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 120 Dokumen | 5.500.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.03.2.04.0002 | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Rekomendasi | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 120 Rekomendasi | 5.500.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.03.2.05 | Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | *Jumlah Izin Pengadaan Kapal* | | 2 Rekomendasi | - | | | | 2 Rekomendasi | 11.000.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.03.2.05.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokumen | 5.500.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.03.2.05.0002 | Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Rekomendasi | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Rekomendasi | 5.500.000 | Dinas Perikanan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 3.25.03.2.06 | Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Kapal yang terdaftar* | | 2 Rekomendasi | - | | | | 120 Rekomendasi | 11.000.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.03.2.06.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 120 Dokumen | 5.500.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.03.2.06.0002 | Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Rekomendasi | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 120 Rekomendasi | 5.500.000 | Dinas Perikanan |
| **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | ***Peningkatan produksi perikanan budidaya*** | | **188.903 Ton** | **3.298.815.078** | | | | **192.700 Ton 100 %** | **5.650.568.000** | |
| 3.25.04.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan* | | 2 Rekomendasi | - | | | | 2 Rekomendasi | 11.000.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.04.2.01.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Rekomendasi | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Rekomendasi | 5.500.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.04.2.01.0002 | Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Rekomendasi | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Rekomendasi | 5.500.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | *Jumlah Pembudidaya yang memperoleh kegiatan pemberdayaan*<br>*Jumlah Saprodi Budidaya* | | 120 Orang<br>1 Paket | 27.728.500 | | | | 100 Orang<br>1 Paket | 165.000.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Kelompok | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Kelompok | 27.500.000 | Dinas Perikanan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Kelompok | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Kelompok | 27.500.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Kelompok | 27.728.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Kelompok | 110.000.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.04.2.03 | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)* | | 2 Rekomendasi | - | | | | 2 Rekomendasi | 11.000.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.04.2.03.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Rekomendasi | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Rekomendasi | 5.500.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.04.2.03.0002 | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Rekomendasi | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Rekomendasi | 5.500.000 | Dinas Perikanan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | *Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya* | | 60 Orang 29 Paket | 3.271.086.578 | | | | 3 kali 6 Kelompok | 5.463.568.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17 Unit | 554.067.578 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK, DAU | | 3 Unit | 3.509.000.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.04.2.04.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Unit | 2.696.905.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 3 Unit | 1.833.568.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.04.2.04.0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 10.849.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 33.000.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.04.2.04.0005 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30 Orang | 9.265.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 60 Orang | 33.000.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.04.2.04.0006 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | | | | | |
| | | *Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Ha | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Ha | 55.000.000 | Dinas Perikanan |
| **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | ***Persentase Tingkat Konsumsi Ikan*** | | **94 %** | **636.725.500** | | | | 91% | **618.750.000** | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 3.25.06.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | *Pembinaan Usaha Mikro* | | 1 kali | 9.929.000 | | | | 1 kali | 66.000.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.06.2.02.0001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Unit Usaha | 9.929.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit Usaha | 66.000.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | *Jumah Promosi Hasil Perikanan*<br>*Jumlah Pembinaan Usaha Pengolahan yang dilaksanakan* | | 1 kali<br>1 kali | 626.796.500 | | | | 1 kali<br>1 kali | 552.750.000 | Dinas Perikanan |
| 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Pelaku Usaha | 626.796.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 1 Pelaku Usaha | 552.750.000 | Dinas Perikanan |
| | **DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB. BULUKUMBA** | | | | **14.459.942.966** | | | | | **26.135.144.894** | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **2.356.357.150** | | | | | **6.130.500.000** | |
| **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | **2.356.357.150** | | | | | **6.130.500.000** | |
| **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | ***Jumlah Pemuda Inovator Persentase***<br>***Jumlah Pemuda Inovator*** | | **5 orang**<br>**100 %** | **375.582.000** | | | | **100 %**<br>**5 orang** | **720.500.000** | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | *Jumlah presentase pemuda yang aktif di organisasi kepemudaan* | | 82,5 % | 375.582.000 | | | | 87,5 % | 720.500.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 2.19.02.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya* | Ujung Bulu, Caile | 5 Orang | 30.046.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Orang | 110.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 2.19.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya* | Ujung Bulu, Caile | 5 Orang | 245.617.300 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 5 Orang | 308.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 2.19.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Caile | 2 Dokumen | 49.918.700 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 5 Dokumen | 82.500.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 2.19.02.2.01.0008 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan* | Ujung Bulu, Caile | 3 Orang | 50.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Orang | 220.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | ***Jumlah Pemuda inovator Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional*** | | **2 orang 100 %** | **1.880.775.150** | | | | **2 orang 100 %** | **5.300.000.000** | |
| 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terbangun* | | 5 pkt | 475.440.400 | | | | 5 pkt | 1.650.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 2.19.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan* | Ujung Bulu, Caile | 2 Unit | 475.440.400 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 1.650.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *jumlah kejuaraan yang pertandingkan* | | 5 event | 630.000.000 | | | | 5 event | 2.550.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 2.19.03.2.02.0001 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Caile | 5 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 330.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 2.19.03.2.02.0002 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Caile | 2 Dokumen | 630.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 20 Dokumen | 2.220.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | *jumlah atlet berprestase yang mendapat pembinaan* | | 25 atlet | 225.334.750 | | | | 25 atlet | 550.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 2.19.03.2.03.0001 | Seleksi Atlet Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi* | Ujung Bulu, Caile | 5 Orang | 100.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 50 Orang | 165.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 2.19.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan* | Ujung Bulu, Caile | 2 Orang | 125.334.750 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Orang | 275.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 2.19.03.2.03.0004 | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan* | Ujung Bulu, Caile | 20 Orang | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 25 Orang | 110.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | *jumlah olahraga rekreasi yang dibina* | | 2 Cabor | 550.000.000 | | | | 2 Cabor | 550.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 2.19.03.2.05.0001 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi* | Ujung Bulu, Caile | 5 Dokumen | 550.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 0 Dokumen | 550.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | ***Jumlah gusus pramuka yang berprestasi tingkat Nasional Persentase Jumlah gugus pramuka yang berprestasi di tingkat nasional*** | | **2 Orang 100 %** | **100.000.000** | | | | **2 Orang 100 %** | **110.000.000** | |
| 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | *jumlah gugus pramuka yang berprestasi tingkat nasional* | | 2 Gudep | 100.000.000 | | | | 2 Gudep | 110.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya* | Ujung Bulu, Caile | 1 Organisasi | 100.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Organisasi | 110.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | **12.103.585.816** | | | | | **20.004.644.894** | |
| **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | **12.103.585.816** | | | | | **20.004.644.894** | |
| **3.26.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase Realisasi Kegiatan*** | | **100 %** | **7.627.034.416** | | | | **100 %** | **9.856.144.894** | |
| 3.26.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *jumlah dokumen perencenaan yang disusun* | | 20 dok | 333.868.450 | | | | 20 dok | 337.500.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 20 Dokumen | 208.560.800 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 10 Dokumen | 265.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Laporan | 51.092.500 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Laporan | 17.500.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 6 Laporan | 74.215.150 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 20 Laporan | 55.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *persentase realisasi keuangan* | | 100 % | 4.932.659.524 | | | | 100 % | 5.232.144.894 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Orang/ bulan | 4.810.879.524 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 32 Orang/ bulan | 5.039.644.894 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 100 Dokumen | 121.780.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 8 Dokumen | 192.500.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | *persentase pencapaian PAD* | | 100 % | 526.645.000 | | | | 100 % | 1.100.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 100 Dokumen | 526.645.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 100 Dokumen | 1.100.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *persentase pemenuhan administrasi kepegawaian* | | 100 % | 62.585.000 | | | | 100 % | 121.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Ujung Bulu, Caile | 4 Orang | 62.585.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 0 Orang | 121.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *persentase pemenuhan administasi umum* | | 100 % | 400.979.750 | | | | 100 % | 800.500.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 50 Paket | 148.094.450 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 44 Paket | 150.500.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 100 Laporan | 252.885.300 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 40 Laporan | 650.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *jumaah pengadaan barang milik daerah* | | 5 unit | 412.303.850 | | | | 5 unit | 175.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 2 Unit | 174.635.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 5 Unit | - | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | 237.668.850 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 175.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *persentase penyediaan jasa penunjang* | | 100 % | 638.598.800 | | | | 100 % | 770.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 100 Laporan | 172.168.800 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 100 Laporan | 275.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 100 Laporan | 466.430.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 100 Laporan | 495.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *jumlah BMD yang dipelihara* | | 18 unit | 319.394.042 | | | | 20 unit | 1.320.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Caile | 20 Unit | 118.549.042 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 7 Unit | 110.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Caile | 2 Unit | 200.845.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 0 Unit | 1.210.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | ***Jumlah objek wisita yang dikelolah Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)*** | | **7 Objek 90 %** | **3.101.829.400** | | | | **7 Objek 100 %** | **5.978.500.000** | |
| 3.26.02.2.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen pengambangan kawasan wisata* | | 3 Dok | 1.050.000.000 | | | | 3 Dok | 3.850.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.02.2.02.0002 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Caile | 4 Dokumen | 1.050.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 4 Dokumen | 3.850.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | *Jumlah Sarana dan prasarana dibangun/dipelihara* | | 15 Pkt | 2.051.829.400 | | | | 17 Pkt | 2.128.500.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.02.2.03.0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)* | Ujung Bulu, Caile | 5 Lokasi | 549.999.700 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 5 Lokasi | 1.402.500.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara* | Bonto Bahari, Semua Kel/Desa | 12 Unit | 1.241.830.850 | Bonto Bahari, Semua Kel/Desa | DAK | | 12 Unit | 456.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.02.2.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Caile | 2 Laporan | 259.998.850 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 2 Laporan | 270.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | ***jumlah event pariwisata yang diselenggarakan Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)*** | | **11 event 90 %** | **819.400.000** | | | | **13 event 100 %** | **3.070.000.000** | |
| 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | *Jumlah Event pariwisata yang diselenggarakan* | | 10 Event | 819.400.000 | | | | 10 Event | 3.070.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri* | Ujung Bulu, Caile | 2 Kegiatan | 609.400.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 10 Kegiatan | 2.420.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri* | Ujung Bulu, Caile | 3 Promosi | 210.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 4 Promosi | 650.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | ***Jumlah peletihan kewirausahaan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD*** | | **10 kali 1,66 %** | **555.322.000** | | | | **1,70 % 12 kali** | **1.100.000.000** | |
| 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | *Jumlah Pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan* | | 7 Pkt | 555.322.000 | | | | 7 Pkt | 1.100.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| 3.26.05.2.01.0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata* | Ujung Bulu, Caile | 5 Orang | 555.322.000 | Ujung Bulu, Caile | DAK | | 2 Orang | 1.100.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga |
| | **DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BULUKUMBA** | | | | **49.128.047.366** | | | | | **44.997.160.590** | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **579.953.500** | | | | | **1.364.600.000** | |
| **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | **579.953.500** | | | | | **1.364.600.000** | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **2.09.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | ***Persentase Jumlah Desa Mandiri Pangan Yang Dibina*** | | **100 %** | **7.266.000** | | | | **100 %** | **66.000.000** | |
| 2.09.02.2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah* | | 2 Paket | 7.266.000 | | | | 2 Paket | 66.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.02.2.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 55.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.02.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | 7.266.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 11.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | ***Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita, Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita*** | | 4.291,72/ 102 ,70 Kkal/ Gra m/ Kap/ Hr | **409.907.500** | | | | 4.465,11/ 106 ,85 Kkal/ Gr am/ Kap/ Hr | **959.300.000** | |
| 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | *Tersedianya informasi harga pangan dan NBM serta meningkatnya kinerja kelembagaan usaha pangan dan jaringan distribusi pangan* | | 12 Laporan | 82.870.500 | | | | 12 Laporan | 52.800.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | 43.387.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 4.400.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.03.2.01.0006 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 11.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.03.2.01.0010 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Unit | 9.900.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.03.2.01.0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | 4.600.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 11.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.03.2.01.0015 | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan | | | | | | | | | | |
| | | *Informasi Harga dan Pasokan Pangan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 34.883.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 16.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | *Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi serta pengadaan dan pemeliharaan cadangan pangan kabupaten* | | 100 % | 177.811.000 | | | | 15.000 Kg | 286.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.03.2.02.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | | | | | | | | | | |
| | | *Rencana Kebutuhan Pangan Lokal* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 0 Dokumen | 2.200.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15 Ton | 120.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 15000 Ton | 247.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.03.2.02.0004 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Ton | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | | 12 Ton | 27.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.03.2.02.0006 | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Ton | 57.811.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Ton | 8.800.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | *Tercapainya target skor PPH pemanfaatan lahan pekarangan dan penanekaragaman konsumsi pangan, berragam, bergizi, seimbang dan aman* | | 100 % | 149.226.000 | | | | 12 Bulan | 620.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | | | | | | | | |
| | | *Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 6.200.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 10.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Laporan | 143.026.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 15 Laporan | 605.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.03.2.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 5 Laporan | 5.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | ***Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)*** | | **100 %** | **139.830.000** | | | | **100 %** | **289.300.000** | |
| 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | *Tersedianya dokumen peta rawan pangan* | | 100 % | 8.992.000 | | | | 1 Dokumen | 9.900.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | | | | | | | | | | |
| | | *Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 8.992.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 9.900.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Terlaksananya penanganan kerawanan pangan daerah* | | 100 % | 130.838.000 | | | | 1 Laporan | 279.400.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 130.838.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 30000 Dokumen | 275.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 4.400.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | ***Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman*** | | **45 %** | **22.950.000** | | | | **45 %** | **50.000.000** | |
| 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar pada daerah kabupaten* | | 100 % | 22.950.000 | | | | 100 % | 50.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 100 Dokumen | 6.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 22.950.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 90 Dokumen | 27.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.05.2.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokuman | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 100 Dokuman | 16.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | **48.548.093.866** | | | | | **43.632.560.590** | |
| **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | **48.548.093.866** | | | | | **43.632.560.590** | |
| **3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)*** | | **100 %** | **19.243.532.626** | | | | 100% | **19.288.406.841** | |
| 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | | 100 % | 76.624.850 | | | | 24 Dokumen | 119.928.578 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Dokumen | 21.785.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 2 Dokumen | 23.898.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Dokumen | 4.450.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 1 Dokumen | 4.895.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Dokumen | 3.599.850 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 1 Dokumen | 3.960.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Dokumen | 6.200.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 1 Dokumen | 8.415.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Dokumen | 3.575.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 1 Dokumen | 3.960.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Laporan | - | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 6 Laporan | 17.325.578 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Laporan | 37.015.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 12 Laporan | 57.475.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terlaksananya administrasi kegiatan perangkat daerah* | | 100 % | 17.306.594.916 | | | | 12 bulan | 16.836.384.332 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Ujung Bulu, Bintarore | 191 Orang/ bulan | 17.107.755.116 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 12 Orang/ bulan | 16.626.284.332 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Ujung Bulu, Bintarore | 12 Dokumen | 194.840.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 12 Dokumen | 205.600.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Laporan | 3.999.800 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 1 Laporan | 4.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Terlaksananya pengadministrasian barang milik daerah pada perangkat daerah* | | 100 % | 9.231.600 | | | | 3 Laporan | 10.480.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 3.27.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Dokumen | 2.399.900 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 1 Dokumen | 3.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Dokumen | 3.232.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 12 Dokumen | 3.520.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Laporan | 3.599.700 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 2 Laporan | 3.960.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksananya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah* | | 100 % | 68.720.000 | | | | 2 bulan | 62.700.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Ujung Bulu, Bintarore | 5 Orang | 68.720.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 1 Orang | 56.650.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | Ujung Bulu, Bintarore | 3 Orang | - | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 1 Orang | 6.050.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya penadministrasian umum perangkat daerah* | | 100 % | 686.370.940 | | | | 12 Bulan | 842.196.207 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Paket | 8.194.290 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 1 Paket | 12.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Paket | 10.014.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 40 Paket | 11.577.500 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Paket | 152.909.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 1 Paket | 280.012.708 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Paket | 46.637.450 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 1 Paket | 57.285.999 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Dokumen | 145.469.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 1.320.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Laporan | 9.549.200 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 12 Laporan | 30.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Bintarore | 2 Laporan | 313.598.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 12 Laporan | 450.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Meningkatnya kualitas pelayanan kantor OPD* | | 100 % | 124.390.800 | | | | 43 Unit | 722.980.179 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Bintarore | 20 Unit | - | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 10 Unit | 267.308.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Ujung Bulu, Bintarore | 5 Unit | - | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 5 Unit | 38.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Bintarore | 20 Unit | 107.500.800 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 1 Unit | 88.480.675 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 1 Unit | 27.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Bintarore | 11 Unit | - | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 5 Unit | 36.670.137 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 3.27.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Unit | 16.890.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 0 Unit | 264.521.367 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Meningkatnya pelayanan administrasi umum OPD* | | 100 % | 231.904.520 | | | | 12 Bulan | 300.912.440 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Bintarore | 12 Laporan | 172.744.520 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 12 Laporan | 188.136.920 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Bintarore | 12 Laporan | 59.160.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 5 Laporan | 112.775.520 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Meningkatnya kualitas seluruh aset dan pengamanan aset OPD* | | 100 % | 739.695.000 | | | | 375 Unit | 392.825.105 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Ujung Bulu, Bintarore | 5 Unit | 26.500.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 351 Unit | 65.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Bintarore | 265 Unit | 66.100.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 265 Unit | 60.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya* | Ujung Bulu, Bintarore | 10 Unit | - | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 10 Unit | 100.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | Ujung Bulu, Bintarore | 25 Unit | 47.500.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 10 Unit | 75.350.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Unit | 570.000.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 1 Unit | 50.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 2 Unit | 2.456.300 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Unit | 29.595.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 1 Unit | 40.018.805 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | ***Persentase Jumlah Produksi Pertanian***<br>***Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Komoditi Unggulan*** | | **76 %**<br>**22 %** | **8.728.842.000** | | | | **80 %**<br>**28 %** | **15.878.507.369** | |
| 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | *Rasio kelompok tani yang berusaha tani sesuai anjuran* | | 19.6 % | 5.901.524.000 | | | | 33 % | 5.303.107.369 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Laporan | 5.085.976.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 568 Laporan | 4.000.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan | 815.548.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 1.303.107.369 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | *Terlaksananya peningkatan produksi dan mutu produksi pertanian* | | 100 % | 2.284.629.500 | | | | 18.500 Poho n/ Ha | 8.717.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6 Dokumen | 1.723.044.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 83300 Dokumen | 5.692.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 75000 Dokumen | 25.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Varietas Unggul Baru (VUB) | 561.585.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Varietas Unggul Baru (VUB) | 3.000.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.02.2.03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota* | | 100 % | - | | | | 10.500 Ekor | - | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.02.2.03.0001 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 10500 Laporan | - | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.02.2.03.0002 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Laporan | - | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.02.2.04 | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | *Terlaksananya pengawasan obat hewan ditingkat pengecer* | | 100 % | - | | | | 0 Kali | - | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.02.2.04.0001 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 0 Laporan | - | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.02.2.04.0002 | Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Kasus | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 0 Kasus | - | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.02.2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | *persentase cakupan trehadap pengendalian dan pengawasan penyediaan bibit ternak* | | 100 % | 206.596.000 | | | | 6.000 Kg/ Ek or | 110.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.02.2.05.0002 | Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak | | | | | | | | | | |
| | | *Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2000 Dokumen | 22.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.02.2.05.0006 | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 0 Laporan | 22.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.02.2.05.0007 | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1000 Laporan | 27.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.02.2.05.0008 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah benih/bibit ternak yang beredar* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2000 Laporan | 22.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.02.2.05.0009 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 Laporan | 206.596.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 16.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | *Persentase benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang disediakan* | | 100 % | 336.092.500 | | | | 86 % | 1.747.900.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.02.2.06.0002 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 Ton | 67.612.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 150000 Ton | 262.900.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 Ekor | 268.480.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 210 Ekor | 1.485.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | ***Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia*** | | **90 %** | **19.235.445.000** | | | | **90 %<br>90 %** | **6.843.900.000** | |
| 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | *Terbangunnya kawasan pertanian berbasis komoditas<br>Terbangunnya kawasan pertanian berbasis komoditas* | | 3 Dokumen<br>100 % | - | | | | 2 Dokumen | 575.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 375.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 3.27.03.2.01.0016 | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 200.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.03.2.01.0017 | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 0 Dokumen | - | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | *Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian* | | 100 % | 19.235.445.000 | | | | 0 Unit | 6.268.900.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.03.2.02.0002 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK, DAU | | 4 Unit | - | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | | | | |
| | | *Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit | 6.086.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK, DAU | | 4 Unit | 880.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.03.2.02.0004 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6 Unit | 995.485.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 3 Unit | 924.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.03.2.02.0008 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Unit | 1.143.960.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 1 Unit | 715.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Unit | 3.984.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 5 Unit | 1.433.300.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20 Unit | 7.026.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 9 Unit | 2.316.600.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | ***Persentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular*** | | **12.44 %** | **598.985.650** | | | | **9.44 %** | **413.600.000** | |
| 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | *Persentase wabah penyakit hewan yang berhasil dikendalikan* | | 14 % | 319.963.750 | | | | 14 persen | 220.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 264 Laporan | 319.963.750 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 5000 Laporan | 220.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.04.2.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase pengawasan pemasukan atau pengeluaran hewan dan produk hewan* | | 60 % | 28.048.000 | | | | 60 Persen | 28.600.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.04.2.02.0004 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 182 laporan | 28.048.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 700 laporan | 28.600.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 3.27.04.2.02.0006 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Laporan | - | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase aparatur petugas pelayanan medik dan paramedik veteriner* | | 100 % | 150.575.000 | | | | 100 persen | - | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.04.2.03.0001 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | - | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Laporan | 150.575.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 8 Laporan | - | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | *Terlaksananya pendampingan dan pengawasan masyarakat veteriner veteriner* | | 100 % | 100.398.900 | | | | 100 persen | 137.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 15 Laporan | 27.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.04.2.04.0004 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 300 Dokumen | 27.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.04.2.04.0010 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150 Unit Usaha | 100.398.900 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Unit Usaha | 82.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.04.2.05 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | *Terlaksananya penerapan dan pengawasan terhadap persyaratan teknis kesejahteraan hewan* | | 100 % | - | | | | 100 persen | 27.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.04.2.05.0003 | Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 6500 Unit | 27.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | ***Persentase Bencana Pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi*** | | **87 %** | **319.719.500** | | | | **90 %** | **324.500.000** | |
| 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | *Menurunnya Kasus serangan OPT* | | 295.000.000 Kasus | 319.719.500 | | | | 295.000.000 Kasus | 324.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5000 Ha | 297.117.750 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Ha | 220.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.05.2.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50 Ha | 6.017.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Ha | 66.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.05.2.01.0003 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10000 Ha | 16.584.750 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Ha | 38.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | ***Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin*** | | **50 %** | **29.752.000** | | | | **50 %** | **204.396.380** | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya penerbitan izin usaha pertanian dalam daerah* | | 100 % | 29.752.000 | | | | 120 Unit Usaha | 159.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.06.2.01.0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30 Dokumen | 29.752.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 60 Dokumen | 110.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.06.2.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 250 Laporan | 49.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.06.2.02 | Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | *Terlaksananya penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan/pasar hewan rumah potong hewan* | | 100 % | - | | | | 0 Unit Usaha | 11.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.06.2.02.0001 | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 0 Dokumen | 2.750.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.06.2.02.0002 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 0 Laporan | 2.750.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.06.2.02.0003 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 0 Laporan | 2.750.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.06.2.02.0005 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 0 Laporan | 2.750.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.06.2.03 | Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan | *Terlaksananya pengawasan perijinan usaha pengecer* | | 100 % | - | | | | 0 Kali | 33.896.380 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.06.2.03.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 0 Laporan | 28.396.380 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.06.2.03.0002 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 0 Laporan | 5.500.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | ***Persentase Kelompok Tani yang dibina***<br>***Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh*** | | **59 %**<br>**19.00 %** | **391.817.090** | | | | **19.00 %**<br>**61 %** | **679.250.000** | |
| 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | *Meningkatnya Produksi/Produktivitas Pertanian* | | 100 % | 391.817.090 | | | | 100 % | 679.250.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit | 276.318.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 15 Unit | 297.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit | 35.490.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 140 Unit | 77.000.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit | 80.009.090 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK, DAU | | 1 Unit | 305.250.000 | Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan |
| | **DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. BULUKUMBA** | | | | **65.541.847.740** | | | | | **34.047.138.667** | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **8.733.874.590** | | | | | **12.127.790.708** | |
| **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | **8.733.874.590** | | | | | **12.127.790.708** | |
| **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik*** | | **100 %** | **7.871.279.790** | | | | **100 %** | **10.714.189.607** | |
| 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen* | | 100 % | 88.272.400 | | | | 100 % | 121.313.280 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Dokumen | 55.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Dokumen | 60.500.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 13.050.350 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 26.050.090 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 4.776.850 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 10.493.670 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | 7.071.400 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 7.778.540 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 8.373.800 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 16.490.980 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Gaji, Tunjangan dan Honorarium* | | 100 % | 4.584.914.244 | | | | 100 % | 5.350.905.917 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56 Orang/ bulan | 4.440.991.644 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 56 Orang/ bulan | 5.168.912.292 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 18.840.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 16.956.500 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 108.180.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 140.250.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | 6.460.750 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 13.301.090 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 10.441.850 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 11.486.035 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Pegawai yang ikut Pelatihan* | | 100 % | 199.509.000 | | | | 100 % | 173.727.400 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Orang | 42.355.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Orang | 44.506.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50 Orang | 10.568.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 50 Orang | 10.991.200 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Orang | 146.586.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 10 Orang | 118.230.200 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Administrasi Umum Kantor* | | 100 % | 672.796.860 | | | | 100 % | 1.139.980.903 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Paket | 70.544.500 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Paket | 82.846.143 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Paket | 6.539.800 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Paket | 11.000.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Paket | 13.547.560 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Paket | 14.905.605 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Paket | 122.138.750 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Paket | 164.997.910 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Paket | 36.340.250 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Paket | 72.973.945 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | 43.300.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokumen | 47.630.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65 Laporan | 380.386.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 65 Laporan | 745.627.300 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Kendaraan dan Peralatan Kantor* | | 100 % | 1.058.841.000 | | | | 100 % | 1.661.000.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Unit | 900.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Unit | 1.430.000.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit | 9.850.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 10 Unit | 11.000.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 98.991.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 165.000.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 50.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 55.000.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Perlengkapan Kebutuhan Kantor* | | 100 % | 680.574.800 | | | | 100 % | 856.525.307 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | 4.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 4.400.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 185.433.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 187.989.307 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.17.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | 29.760.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 32.736.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 461.381.800 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 631.400.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah* | | 100 % | 586.371.486 | | | | 100 % | 1.410.736.800 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43 Unit | 112.500.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 43 Unit | 82.500.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Unit | 5.500.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Unit | 8.236.800 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 468.371.486 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 1.320.000.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| **2.17.02** | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | ***Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada*** | | **100 %** | **7.343.250** | | | | **100 %** | **16.155.150** | |
| 2.17.02.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Fasilitasi Penerbitan Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota* | | 2 Ijin | 7.343.250 | | | | 100 % | 16.155.150 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.17.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Unit Usaha | 7.343.250 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Unit Usaha | 16.155.150 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | ***Persentase Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Yang Dilakukan*** | | **75,1 %** | **4.629.000** | | | | **76,8 %**<br>**76,8 %** | **22.000.000** | |
| 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | *Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | 100 % | 4.629.000 | | | | 100 % | 22.000.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 290 Unit Usaha | 4.629.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 290 Unit Usaha | 22.000.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | ***Persentase Koperasi Kategori Sehat*** | | **76,3 %** | **24.859.200** | | | | **80,3 %** | **34.648.295** | |
| 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Usaha Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang di Nilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota* | | 100 % | 24.859.200 | | | | 100 % | 34.648.295 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 267 Unit Usaha | 6.639.250 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 267 Unit Usaha | 14.606.350 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.04.2.01.0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Unit Usaha | 18.219.950 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Unit Usaha | 20.041.945 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | ***Persentase Diklat Perkoperasian Yang Diadakan*** | | **65 %** | **369.370.000** | | | | **85 %** | **480.322.986** | |
| 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi yang Wilayah Keanggotan dalam daerah Kabupaten/Kota* | | 50 % | 369.370.000 | | | | 75 % | 480.322.986 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 Orang | 369.370.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK | | 100 Orang | 480.322.986 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | ***Persentase Peningkatan Volume Usaha dan Modal Usaha Koperasi*** | | **99,0 %** | **10.357.950** | | | | **99,5 %** | 11.293.800 | |
| 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah kabupaten/Kota (Fasilitasi Pembiayaan, Pemasaran, Pendampingan dan Kemitraan)* | | 100 % | 10.357.950 | | | | 100 % | 11.293.800 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Unit Usaha | 10.357.950 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 5 Unit Usaha | 11.293.800 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | ***Persentase UMKM Yang Diberdayakan*** | | **3,2 %** | **324.520.400** | | | | **4,2 %** | 64.781.695 | |
| 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | *Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melakukan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.* | | 100 % | 324.520.400 | | | | 100 % | 64.781.695 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3330 Unit Usaha | 10.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 3330 Unit Usaha | 11.000.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500 Unit Usaha | 6.139.700 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 500 Unit Usaha | 13.507.890 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21 Unit Usaha | 300.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 21 Unit Usaha | 16.446.045 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33178 Orang | 2.550.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 33178 Orang | 11.000.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Orang | 5.830.700 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Orang | 12.827.760 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | ***Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha*** | | **100 %** | **121.515.000** | | | | **100 %** | **784.299.175** | |
| 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | *Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha* | | 2 % | 121.515.000 | | | | 3,24 % | 784.299.175 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 2.17.08.2.01.0002 | Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40 Unit Usaha | 121.515.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU | | 40 Unit Usaha | 784.299.175 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | **56.807.973.150** | | | | | **21.919.347.959** | |
| **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | **47.092.141.750** | | | | | **11.058.678.854** | |
| **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | ***Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal*** | | **50 %** | **46.677.898.350** | | | | **50 %** | **10.583.255.114** | |
| 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | *Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bangun dan di Rehabilitasi* | | 100 % | 45.042.490.000 | | | | 100 % | 8.777.509.524 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit | 45.042.490.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 10 Unit | 8.777.509.524 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | *Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bina dan di Kelola* | | 100 % | 1.635.408.350 | | | | 100 % | 1.805.745.590 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 1.635.408.350 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 1.805.745.590 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | ***Presentase Peningkatan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok*** | | **27.90 %** | **41.771.000** | | | | **32.23 %** | **80.268.100** | |
| 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | *Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting* | | 100 % | 41.771.000 | | | | 100 % | 80.268.100 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 3.30.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 41.771.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 80.268.100 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | ***Promosi Komoditi Ekspor*** | | **100 %** | **220.900.000** | | | | **100 %** | **148.500.000** | |
| 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Pelaksanaan Pameran* | | 4 Klai | 220.900.000 | | | | 4 Kali | 148.500.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Pelaku Usaha | 168.110.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Pelaku Usaha | 110.000.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 3.30.05.2.01.0003 | Pameran Dagang Lokal | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Pelaku Usaha | 52.790.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Pelaku Usaha | 38.500.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | ***Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku*** | | **40 %** | **151.572.400** | | | | **50 %** | **246.655.640** | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | *Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku* | | 40 % | 151.572.400 | | | | 50 % | 246.655.640 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250 Unit | 105.202.400 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 250 Unit | 153.342.640 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Orang | 46.370.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 10 Orang | 93.313.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | **9.715.831.400** | | | | | **10.860.669.105** | |
| **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | ***Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi*** | | **8.03 %** | **9.690.835.300** | | | | **9.15 %** | **10.822.172.900** | |
| 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | *Jumlah IKM yang di Bina dan yang di Bantu* | | 100 % | 9.690.835.300 | | | | 100 % | 10.822.172.900 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 15.186.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 42.004.600 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 20.352.300 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 384.114.500 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 9.655.297.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK, DAK | | 1 Dokumen | 10.396.053.800 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| **3.31.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | ***Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait*** | | **90 %** | **9.996.550** | | | | **95 %** | **10.996.205** | |
| 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang di Awasi* | | 100 % | 9.996.550 | | | | 100 % | 10.996.205 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 3.31.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 9.996.550 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 10.996.205 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | ***Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini*** | | **83.33 %** | **14.999.550** | | | | **83.33 %** | **27.500.000** | |
| 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | *Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini* | | 83,33% % | 14.999.550 | | | | 100 % | 27.500.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |
| 3.31.04.2.01.0002 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 14.999.550 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 27.500.000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | **SEKRETARIAT DAERAH KAB. BULUKUMBA** | | | | **22.658.107.508** | | | | | **30.310.367.193** | |
| **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | **22.658.107.508** | | | | | **30.310.367.193** | |
| **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | **22.658.107.508** | | | | | **30.310.367.193** | |
| **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Sekretariat Daerah)*** | | **100 %** | **19.745.261.158** | | | | **100 %** | **26.948.336.813** | |
| 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan*<br>*[deleted]*<br>*Meningkatnya pelaksanaan pelayanan Administrasi perkantoran,sarana dan Prasarana aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan* | | 100 %<br>100 % | 144.516.650 | | | | 100 % | 180.112.295 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 12 Dokumen | 144.516.650 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Dokumen | 180.112.295 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan*<br>*Terlaksananya Administrasi keuangan dan Perangkat daerah* | | 100 %<br>100 % | 10.583.104.173 | | | | 100 % | 13.874.254.999 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Ujung Bulu, Loka | 12 Orang/ bulan | 10.306.175.823 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Orang/ bulan | 13.569.023.149 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Ujung Bulu, Loka Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 206.926.500 | Ujung Bulu, Loka Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 228.229.870 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 70.001.850 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 77.001.980 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan*<br>*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | | 100 %<br>1 Dokumen | 74.729.150 | | | | 1 Dokumen | 81.432.450 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 12 Dokumen | 74.729.150 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Dokumen | 81.432.450 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | -<br>*Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan.* | | 100 %<br>100 % | 139.638.000 | | | | 100 % | 177.939.300 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 139.638.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Paket | 153.601.800 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Orang | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Orang | 24.337.500 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *terlaksananya pelayanan administrasi umum Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan* | | 100 %<br>100 % | 1.973.635.590 | | | | 100 % | 2.429.783.458 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 65.388.550 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Paket | 71.927.405 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 83.683.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Paket | 92.062.300 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Paket | 133.267.190 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Paket | 163.751.379 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Dokumen | 93.240.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Dokumen | 131.076.000 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 775.755.850 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 872.196.435 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 822.301.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 1.098.769.939 | Sekretariat Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - *Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan* | | 100 % 100 % | 340.172.053 | | | | 100 % | 1.948.839.258 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Unit | - | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 3 Unit | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 3 Unit | 984.459.355 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Unit | 23.944.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Unit | 85.219.200 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Unit | 56.902.090 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Unit | 65.882.234 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Unit | 69.177.463 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Unit | 595.602.329 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Unit | 190.148.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Unit | 217.676.140 | Sekretariat Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -<br>*Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan* | | 100 %<br>100 % | 2.119.236.001 | | | | 100 % | 2.331.159.601 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 867.622.460 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 954.384.706 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | - | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 1.251.613.541 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 1.376.774.895 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan*<br>- | | 100 %<br>100 % | 1.161.154.800 | | | | 100 % | 2.244.772.607 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Ujung Bulu, Loka<br>- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Unit | 340.780.000 | Ujung Bulu, Loka<br>- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Unit | 374.858.000 | Sekretariat Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Loka | 24 Unit | 353.760.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 24 Unit | 321.046.000 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | Ujung Bulu, Loka | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | - | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Loka | 1 Unit | 395.900.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | 1.448.780.432 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Loka | 2 Unit | 70.714.800 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Unit | 100.088.175 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | -<br>*Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan.* | | 100 %<br>100 % | 774.875.641 | | | | 100 % | 889.863.200 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 2 Orang/ Bulan | 174.875.641 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Orang/ Bulan | 192.363.200 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | Ujung Bulu, Bentengnge | 2 Orang | - | Ujung Bulu, Bentengnge | DAU | | 2 Orang | 37.500.000 | Sekretariat Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 2 Orang/ Bulan | 600.000.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Orang/ Bulan | 660.000.000 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | -<br>*Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan* | | 100 %<br>100 % | 1.612.889.350 | | | | 100 % | 1.776.055.105 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 100 Paket | 918.305.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Paket | 1.008.500.570 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan* | Ujung Bulu, Kasimpureng | 70 Paket | 694.583.850 | Ujung Bulu, Kasimpureng | DAU | | 70 Paket | 767.554.535 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | -<br>*Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah* | | 100 %<br>100 % | 431.946.700 | | | | 100 % | 529.316.645 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 82.739.150 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 130.142.320 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | 46.653.650 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Laporan | 101.001.065 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 70.653.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 90.511.740 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 175.808.350 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 102.639.515 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 56.092.550 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 105.022.005 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | -<br>*Meningkatnya komunikasi pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan informasi publik.* | | 100 %<br>100 % | 389.363.050 | | | | 100 % | 484.807.895 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | 167.512.850 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Laporan | 200.270.345 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | 78.947.150 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Laporan | 127.343.920 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | 142.903.050 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Laporan | 157.193.630 | Sekretariat Daerah |
| **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | ***Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu*** | | **100 %** | **2.380.853.150** | | | | 100% | **2.709.783.015** | |
| 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | *Persentase penyelesaian Tapal Batas wilayah administrasi antar daerah, Penyediaan dokumen LKPJ, Penyusunan Dokumen LPPD, terpahaminya PATEN bagi aparatur Kecamatan.* | | 100 % | 398.273.650 | | | | 100 % | 476.033.360 | Sekretariat Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 73.519.100 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 87.701.955 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 110.256.350 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 124.923.040 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 214.498.200 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 263.408.365 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | *Meningkatnya guru kontrak TKA/TPA sebagai penerima gaji, terlaksananya kegiatan STQ dan Pembinaan Mental Spiritual serta Pengajian Rutin.* | | 100 % | 1.662.909.750 | | | | 100 % | 1.858.852.655 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 1.570.311.750 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 1.756.994.690 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 51.916.700 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 57.108.205 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 40.681.300 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 44.749.760 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Terlaksananya bantuan hukum penanganan kasus, tersedianya dokumen LHP, terlaksananaya penyuluhan hukum terpadu dan terselesaikannya Draf rancangan Perdan serta kajian produk hukum daerah.* | | 5 Dokumen 100 % | 319.669.750 | | | | 5 Dokumen 100 % | 374.897.000 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 117.806.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 129.587.260 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum* | Ujung Bulu, Loka | 1 Kasus | 91.800.550 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Kasus | 124.240.770 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 110.062.700 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 121.068.970 | Sekretariat Daerah |
| **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | ***Peningkatan jumlah lembaga Ekonomi Kab/Kota yang berdaya saing, Persentase Jumlah Laporan DAK dan APBD dari OPD tepat waktu, Persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana.*** | | **100 %** | **531.993.200** | | | | **100 %** | **652.247.365** | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | *Meningkatnya dokumen potensi produksi daerah secara berkala, terlaksananya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi yang berbasis kerakyatan. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD* | | 100 % 4 Dokumen | 254.202.900 | | | | 100 % 4 Dokumen | 250.167.390 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 129.574.850 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 145.073.335 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | 101.244.050 | Ujung Bulu, Loka | DAU, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | | 1 Laporan | 79.371.765 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 23.384.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 25.722.290 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | *Tersedianya dokumen penyusunan perencanan sekertariat Daerah,Jumlah dokumen Data laporan Tepra secara berkala dan laporan Capaian Fisik serta data laporan hasil Monitirin pelaksanaan kegiatan Pembangunan Daerah.* | | 100 % | 98.266.500 | | | | 100 % | 114.241.820 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 52.485.350 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 61.737.885 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | 22.310.250 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Laporan | 24.540.945 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | 23.470.900 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Laporan | 27.962.990 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | *terlaksananya pelatihan Aplikasi Sirup dan Aplikasi SPSE dan Asosiasi/penyedia Barang Jasa.* | | 100 % | 179.523.800 | | | | 100 % | 287.838.155 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 40.828.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 83.827.150 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 76.854.800 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 117.899.980 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa* | Ujung Bulu, Loka | 1 Orang | 61.841.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Orang | 86.111.025 | Sekretariat Daerah |
| | **SEKRETARIAT DPRD KAB. BULUKUMBA** | | | | **40.722.607.786** | | | | | **43.380.345.526** | |
| **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | **40.722.607.786** | | | | | **43.380.345.526** | |
| **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | **40.722.607.786** | | | | | **43.380.345.526** | |
| **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Sekretariat DPRD)*** | | **100 %** | **30.817.597.886** | | | | 100% | **32.346.308.799** | |
| 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Dokumen, Penganggaran dan Pelaporan Tepat waktu* | | 100 % | 35.838.350 | | | | 100 % | 41.764.686 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Bintarore | 5 Dokumen | 14.007.050 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 5 Dokumen | 17.689.062 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Laporan | 13.499.900 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 1 Laporan | 14.384.453 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Bintarore | 10 Laporan | 8.331.400 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 12 Laporan | 9.691.171 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Sekretariat DPRD Pengelolaan Administrasi Keuangan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pengeloaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan* | | 100 % | 3.464.775.026 | | | | 100 % | 4.318.648.826 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Ujung Bulu, Bintarore | 44 Orang/ bulan | 3.326.965.426 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 44 Orang/ bulan | 4.175.606.467 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Ujung Bulu, Bintarore | 10 Dokumen | 117.180.700 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 10 Dokumen | 119.625.000 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | Ujung Bulu, Bintarore | 11 Dokumen | 7.842.300 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 11 Dokumen | 8.630.559 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Laporan | 3.999.550 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 1 Laporan | 4.999.550 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | Ujung Bulu, Bintarore | 2 Dokumen | 8.787.050 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 2 Dokumen | 9.787.250 | Sekretariat Dprd |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 4.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penatausahaannya* | | 100 % | 9.539.850 | | | | 100 % | 9.879.397 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | Ujung Bulu, Bintarore | 2 Laporan | 9.539.850 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 2 Laporan | 9.879.397 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | 100 % | 512.769.800 | | | | 100 % | 557.688.880 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Paket | 400.000.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 85 Paket | 440.000.000 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | Ujung Bulu, Bintarore | 85 Orang | 99.999.800 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 85 Orang | 99.999.800 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | Ujung Bulu, Bintarore | 44 Orang | 12.770.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 44 Orang | 17.689.080 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | 100 % | 979.823.020 | | | | 100 % | 1.084.707.070 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Paket | 15.060.640 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 1 Paket | 17.015.570 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Paket | 5.762.700 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 1 Paket | 6.231.500 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Bintarore | 1 Paket | 527.999.680 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 1 Paket | 628.000.000 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Bintarore | 40 Dokumen | 25.000.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 40 Dokumen | 27.000.000 | Sekretariat Dprd |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Bintarore | 44 Laporan | 406.000.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 44 Laporan | 406.460.000 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | 100 % | 121.642.600 | | | | 100 % | 133.987.600 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Unit | 3.850.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Unit | 4.850.000 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Bintarore | 7 Unit | 17.792.600 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 7 Unit | 19.137.600 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Bintarore | 10 Unit | 100.000.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 10 Unit | 110.000.000 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintan Daerah* | | 100 % | 1.633.918.240 | | | | 100 % | 1.858.876.400 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | Ujung Bulu, Bintarore | 10 Laporan | 1.908.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 10 Laporan | 2.106.500 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Bintarore | 12 Laporan | 419.939.040 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 12 Laporan | 554.398.700 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Bintarore | 19 Laporan | - | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 19 Laporan | 1.100.000 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Bintarore | 12 Laporan | 1.212.071.200 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 12 Laporan | 1.301.271.200 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | 100 % | 462.731.500 | | | | 100 % | 732.066.240 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Ujung Bulu, Bintarore | 4 Unit | 33.885.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 4 Unit | 200.000.000 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Bintarore Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16 Unit | 83.220.000 | Ujung Bulu, Bintarore Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 16 Unit | 170.000.000 | Sekretariat Dprd |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Bintarore Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Unit | 83.220.000 | Ujung Bulu, Bintarore Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 16 Unit | 170.000.000 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0 Unit | 1.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 10 Unit | 1.100.000 | Sekretariat Dprd |
| | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit | 1.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 10 Unit | 1.100.000 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Bintarore | 2 Unit | 150.019.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 2 Unit | 155.076.120 | Sekretariat Dprd |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 4.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Bintarore | 10 Unit | 44.367.500 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 10 Unit | 45.100.120 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Bintarore | 10 Unit | 150.240.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 10 Unit | 160.790.000 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | *Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD* | | 100 % | 23.501.000.000 | | | | 100 % | 23.508.689.700 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD* | Ujung Bulu, Bintarore | 40 Orang/ Bulan | 23.401.000.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 40 Orang/ Bulan | 23.401.000.000 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD* | Ujung Bulu, Bintarore | 40 Orang | 100.000.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 40 Orang | 107.689.700 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | *Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD* | | | 95.559.500 | | | | - | 100.000.000 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD* | Ujung Bulu, Bintarore | 4 Laporan | 95.559.500 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 4 Laporan | 100.000.000 | Sekretariat Dprd |
| **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | ***Persentase PROLEGDA yang Terealisir, "Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD, Persentase Jumlah Ranperda yang difasilitasi pembahasannya*** | | **100 %** | **9.905.009.900** | | | | **100 %** | **11.034.036.727** | |
| 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | *Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi pembahasannya* | | 100 % | 790.337.600 | | | | 100 % | 884.894.637 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah* | Ujung Bulu, Bintarore | 20 Dokumen | 200.311.300 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 19 Dokumen | 218.488.387 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah* | Ujung Bulu, Bintarore | 4 Dokumen | 279.401.300 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 4 Dokumen | 302.781.250 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan* | Ujung Bulu, Bintarore | 20 Dokumen | 110.625.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 19 Dokumen | 113.625.000 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi* | Ujung Bulu, Bintarore | 4 Dokumen | 200.000.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 4 Dokumen | 250.000.000 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | *Cakupan Anggota DPRD yang Kompeten dibidangnya* | | 100 % | 2.387.089.050 | | | | 100 % | 3.316.098.221 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.02.2.04.0001 | Orientasi DPRD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD* | Ujung Bulu, Bintarore | 40 Dokumen | 359.748.800 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 40 Dokumen | 625.000.000 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD* | Ujung Bulu, Bintarore | 200 Dokumen | 1.325.154.450 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 200 Dokumen | 1.960.485.992 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli* | Ujung Bulu, Bintarore | 5 Orang | 37.000.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 5 Orang | 36.000.000 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Tenaga Ahli Fraksi* | Ujung Bulu, Bintarore | 8 Orang | 336.000.000 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 8 Orang | 336.000.000 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD* | Ujung Bulu, Bintarore | 40 Dokumen | 329.185.800 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 40 Dokumen | 358.612.229 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | *Terfasilitasinya Kegiatan Reses dalam Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat* | | 100 % | 2.758.951.400 | | | | 100 % | 2.764.411.790 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40 Laporan | 24.910.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 40 Laporan | 27.537.813 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun* | Ujung Bulu, Bintarore | 40 Dokumen | 32.563.300 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 40 Dokumen | 35.382.344 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | |
| | | *Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120 Dokumen | 2.701.478.100 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 120 Dokumen | 2.701.491.633 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | *Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD serta Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD* | | 100 % | 3.968.631.850 | | | | 100 % | 4.068.632.079 | Sekretariat Dprd |
| 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD* | Ujung Bulu, Bintarore | 200 Dokumen | 3.968.631.850 | Ujung Bulu, Bintarore | DAU | | 200 Dokumen | 4.068.632.079 | Sekretariat Dprd |
| | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. BULUKUMBA** | | | | **9.602.860.157** | | | | | **14.336.798.213** | |
| **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | **9.602.860.157** | | | | | **14.336.798.213** | |
| **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | **9.172.872.907** | | | | | **13.766.983.007** | |
| **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Bappelitbangda)*** | | **100 %** | **6.993.862.007** | | | | **100 %** | **10.022.066.391** | |
| 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persenntase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu* | | 100 % | 214.093.850 | | | | 100 % | 407.250.062 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 11 Dokumen | 123.229.450 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 8 Dokumen | 182.804.662 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 2 Dokumen | 15.639.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Dokumen | 55.550.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 2 Dokumen | 8.357.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Dokumen | 55.550.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 14 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 14 Laporan | 42.218.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 27 Laporan | 66.867.400 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Laporan | 71.127.400 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persenntase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu* | | 100 % | 4.827.033.607 | | | | 100 % | 5.103.364.292 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Ujung Bulu, Loka | 47 Orang/ bulan | 4.670.518.057 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Orang/ bulan | 4.824.843.466 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 12 Dokumen | 131.225.900 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Dokumen | 222.200.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | 9.289.750 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Laporan | 16.665.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | Ujung Bulu, Loka | 2 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Dokumen | 17.435.826 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | 15.999.900 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Laporan | 22.220.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *pemenuhan terhadap pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah* | | 100 % | 92.116.050 | | | | 100 % | 499.116.750 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | Ujung Bulu, Loka | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | 27.775.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | Ujung Bulu, Loka | 100 Paket | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Paket | 111.100.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Ujung Bulu, Loka | 7 Orang | 42.355.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Orang | 49.161.750 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | Ujung Bulu, Loka | 50 Orang | 49.761.050 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 50 Orang | 311.080.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *persentase pemenuhan adminstrasi umum kantor* | | 100 % | 315.793.110 | | | | 100 % | 834.765.287 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 6.499.750 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Paket | 16.665.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Paket | 72.215.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 7.000.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Paket | 16.665.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 109.131.750 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Paket | 166.650.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 12.220.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Paket | 12.221.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 9.541.610 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 38.885.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 100 Laporan | 171.400.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 98 Laporan | 288.860.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 50 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 60 Dokumen | 83.325.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 50 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 85 Dokumen | 139.279.287 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah* | | 100 % | 776.216.750 | | | | 100 % | 2.055.350.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Unit | 579.180.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | 555.500.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Unit | 35.329.800 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 8 Unit | 499.950.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Unit | 20.523.450 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | 388.850.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | 277.750.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Unit | 120.987.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | 222.200.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 3 Unit | 20.196.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | 111.100.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *pemenuhan terhadap penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah* | | 100 % | 638.776.140 | | | | 100 % | 555.500.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 123.016.140 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 166.650.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 0 Laporan | 111.100.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 515.760.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 277.750.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik* | | 100 % | 129.832.500 | | | | 100 % | 566.720.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Ujung Bulu, Loka | 1 Unit | 27.000.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | 77.770.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Loka | 9 Unit | 56.500.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 10 Unit | 166.650.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | Ujung Bulu, Loka | 5 Unit | 14.400.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | 44.550.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Loka | 1 Unit | 17.902.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | 111.100.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Loka | 1 Unit | 14.030.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | 166.650.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | ***Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD*** | | **100 %** | **1.266.735.950** | | | | **100 %** | **1.513.351.898** | |
| 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | *Persentase pemenuhan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah* | | 100 % | 572.927.800 | | | | 100 % | 741.642.086 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.02.2.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 2 Dokumen | 189.080.000 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 20 Dokumen | 132.261.886 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Berita Acara | 49.450.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Berita Acara | 55.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 3 Berita Acara | 100.000.000 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 1 Berita Acara | 82.500.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Loka | 1 Berita Acara | 41.837.850 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Berita Acara | 82.500.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.02.2.01.0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan* | Ujung Bulu, Loka | 10 Usulan | 30.154.150 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 10 Usulan | 86.880.200 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)* | Ujung Bulu, Loka | 4 Dokumen | 162.405.800 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 1 Dokumen | 302.500.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | *pemenuhan terhadap analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidan perencanaan pembangunan daerah* | | 100 % | 412.443.000 | | | | 100 % | 561.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 83.560.000 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 1 Dokumen | 275.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi* | Ujung Bulu, Loka | 5 Orang | 253.767.000 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 4 Orang | 148.500.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.02.2.02.0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Buku | 75.116.000 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 1 Buku | 137.500.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | *Pemenuhan terhadap pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah* | | 100 % | 281.365.150 | | | | 100 % | 210.709.812 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan* | Ujung Bulu, Loka | 3 Laporan | 281.365.150 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK, DAU | | 3 Laporan | 110.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 3 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 4 Laporan | 100.709.812 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | ***Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan*** | | **100 %** | **912.274.950** | | | | **100 %** | **2.231.564.718** | |
| 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | *pemenuhan terhadap dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembanguan manusia* | | 100 % | 332.643.700 | | | | 100 % | 728.200.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | Ujung Bulu, Loka | 4 Dokumen | 126.780.850 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 18 Dokumen | 143.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan* | Ujung Bulu, Loka | 4 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 4 Laporan | 55.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan* | Ujung Bulu, Loka | 4 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 4 Laporan | 55.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan* | Ujung Bulu, Loka | 4 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 4 Laporan | 55.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | Ujung Bulu, Loka | 2 Dokumen | 135.473.550 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 15 Dokumen | 112.200.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia* | Ujung Bulu, Loka | 2 Laporan | 70.389.300 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 4 Laporan | 110.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia* | Ujung Bulu, Loka | 4 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 4 Laporan | 132.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia* | Ujung Bulu, Loka | 24 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 24 Laporan | 66.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | *pemenuhan terhadap dokumen pertencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)* | | 100 % | 264.687.150 | | | | 100 % | 700.364.718 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | Ujung Bulu, Loka | 21 Dokumen | 37.324.100 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 29 Dokumen | 149.600.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* | Ujung Bulu, Loka | 7 Laporan | 24.228.000 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 4 Laporan | 132.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* | Ujung Bulu, Loka | 28 Laporan | 57.096.000 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 4 Laporan | 89.831.500 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 24 Laporan | 77.731.500 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | Ujung Bulu, Loka | 12 Dokumen | 57.820.050 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 19 Dokumen | 119.201.718 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA* | Ujung Bulu, Loka | 4 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 4 Laporan | 33.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA* | Ujung Bulu, Loka | 16 Laporan | 54.109.000 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 4 Laporan | 55.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA* | Ujung Bulu, Loka | 16 Laporan | 34.110.000 | Ujung Bulu, Loka | PAJAK ROKOK | | 24 Laporan | 44.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | *Pemenuhan terhadap dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan* | | 100 % | 314.944.100 | | | | 100 % | 803.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | Ujung Bulu, Loka | 3 Dokumen | 161.387.100 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 27 Dokumen | 143.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur* | Ujung Bulu, Loka | 5 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 4 Laporan | 82.500.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur* | Ujung Bulu, Loka | 4 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 4 Laporan | 55.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur* | Ujung Bulu, Loka | 30 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 23 Laporan | 110.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | Ujung Bulu, Loka | 3 Dokumen | 153.557.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 27 Dokumen | 165.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan* | Ujung Bulu, Loka | 3 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 4 Laporan | 82.500.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan* | Ujung Bulu, Loka | 4 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 4 Laporan | 55.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan* | Ujung Bulu, Loka | 31 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 31 Laporan | 110.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | **429.987.250** | | | | | **569.815.206** | |
| **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | ***Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan,, Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah, Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah Penerapan Sida*** | | **100 %** | **429.987.250** | | | | **100 %** | **569.815.206** | |
| 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | *"Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan"* | | 100 % | - | | | | 100 % | 60.415.040 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.01.0011 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Laporan | 27.500.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Laporan | 10.915.040 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 5.05.02.2.01.0013 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Rekomendasi | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Rekomendasi | 22.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.01.0014 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Laporan | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | *Persentase Penelitian dan Pengembanhan Bidang Sosial dan Kependudukan* | | 100 % | 89.272.300 | | | | 100 % | 104.500.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Dokumen | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.02.0002 | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Dokumen | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.02.0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 89.272.300 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Dokumen | 38.500.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.02.0005 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Dokumen | 38.500.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.02.0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Dokumen | 27.500.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | *Persentase Penelitian dan Pengembanhan Bidang Ekonomi dan Pembangunan* | | 100 % | 223.213.600 | | | | 100 % | 362.882.782 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.03.0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Dokumen | 60.500.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.03.0005 | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 123.213.600 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Dokumen | 54.882.782 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.03.0006 | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Dokumen | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.03.0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Dokumen | 66.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.03.0008 | Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Dokumen | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 5.05.02.2.03.0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Dokumen | 71.500.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.03.0010 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 100.000.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 110.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.03.0011 | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Dokumen | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.03.0012 | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Dokumen | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | *Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi* | | 100 % | 117.501.350 | | | | 100 % | 42.017.384 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Dokumen | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.04.0002 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Laporan | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.04.0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | 117.501.350 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Laporan | 27.735.968 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02.2.04.0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 100 Laporan | 14.281.416 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BULUKUMBA** | | | | **201.885.312.379** | | | | | **227.272.474.594** | |
| **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | **201.885.312.379** | | | | | **227.272.474.594** | |
| **5.02** | **KEUANGAN** | | | | **201.885.312.379** | | | | | **227.272.474.594** | |
| **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BPKPD)*** | | **100 %** | **18.007.423.004** | | | | **100 %** | **19.924.307.534** | |
| 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai standar* | | 100 % | 148.921.200 | | | | 100 % | 271.077.605 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 2 Dokumen | 62.260.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 4 Dokumen | 71.048.732 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 11.533.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 4 Dokumen | 13.721.938 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Dokumen | 13.742.695 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 8.242.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Dokumen | 12.582.438 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Dokumen | 12.582.438 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | 6.531.800 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Laporan | 4.400.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 60.353.400 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 143.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)* | | 100 % | 14.560.526.473 | | | | 100 % | 14.157.657.814 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Ujung Bulu, Loka | 12 Orang/ bulan | 14.247.434.823 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 101 Orang/ bulan | 13.612.831.266 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | Ujung Bulu, Loka | 12 Dokumen | 22.749.600 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Dokumen | 110.309.027 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 12 Dokumen | 280.568.900 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Dokumen | 415.053.782 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Laporan | 5.773.250 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Laporan | 8.463.739 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | 2.000.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Laporan | 5.500.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | Ujung Bulu, Loka | 1 Dokumen | 1.999.900 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Dokumen | 5.500.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian yang berstandar* | | 100 % | 75.870.450 | | | | 100 % | 199.776.974 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | Ujung Bulu, Loka | 98 Dokumen | 2.000.250 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 57 Dokumen | 8.943.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Ujung Bulu, Loka | 5 Orang | 62.580.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 3 Orang | 134.337.500 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | Ujung Bulu, Loka | 5 Orang | 3.000.200 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 6 Orang | 17.377.272 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 5.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | Ujung Bulu, Loka | 5 Orang | 8.290.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 11 Orang | 39.119.202 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum perangkat daerah* | | 100 % | 676.316.590 | | | | 100 % | 1.193.429.031 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 13.150.450 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Paket | 20.833.781 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 23.000.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Paket | 33.572.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 5.441.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Paket | 17.558.299 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 275.177.440 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Paket | 417.836.870 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 186.862.800 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Paket | 290.382.335 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Dokumen | 2.000.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Dokumen | 3.741.257 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | 50.588.900 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 79.335.603 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | 120.096.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 330.168.886 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase sarana dan prasarana kantor / barang miilik daerah penunjang urusan pemerintah daerah* | | 100 % | 633.502.275 | | | | 100 % | 1.672.969.760 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | 567.050.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 4 Unit | 258.649.600 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 6 Unit | 440.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 25 Unit | 40.460.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 75 Unit | 190.436.045 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 9 Unit | 288.132.675 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 5 Unit | 258.500.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Unit | 36.150.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | 49.500.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 15 Unit | 10.110.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 35 Unit | 138.610.932 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 7 Unit | - | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 7 Unit | 28.872.783 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase jasa administrasi perkantoran* | | 95 % | 1.727.984.516 | | | | 95 % | 1.907.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | 288.364.516 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Laporan | 407.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | 1.439.620.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 1.500.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor / pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* | | 95 % | 184.301.500 | | | | 95 % | 522.396.350 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Ujung Bulu, Loka | 1 Unit | 13.500.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | 33.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Loka | 52 Unit | 118.800.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 52 Unit | 197.801.170 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | Ujung Bulu, Loka | 5 Unit | 1.501.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 5 Unit | 44.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Loka | 1 Unit | 25.080.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Unit | 223.656.750 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Loka | 24 Unit | 25.420.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 24 Unit | 23.938.430 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | ***Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa, Penetapan APBD (Tepat Waktu), Persentase SILPA terhadap APBD, Persentase Belanja Pendidikan (20%), Persentase Belanja Kesehatan (10%), Opini BPK terhadap Laporan Keuangan*** | | **95 %** | **181.834.768.175** | | | | **95 %** | **203.876.170.456** | |
| 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | *Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun* | | 95 % | 1.010.505.450 | | | | 95 % | 2.605.411.512 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | 132.920.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokumen | 181.753.836 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | 65.213.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokumen | 159.686.736 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37 Dokumen | 97.310.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 36 Dokumen | 228.872.600 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37 Dokumen | 38.720.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 36 Dokumen | 174.630.500 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37 Dokumen | 24.595.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 36 Dokumen | 59.157.670 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37 Dokumen | 18.700.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 36 Dokumen | 59.157.670 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | 129.773.750 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokumen | 432.834.050 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | 185.685.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokumen | 466.623.850 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | 42.573.700 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokumen | 98.257.500 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.01.0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 33.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 135.769.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 1 Dokumen | 487.015.100 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.01.0012 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 77.785.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 1 Dokumen | 93.665.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37 Orang | 61.460.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 36 Orang | 130.757.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | *Persentase realisasi pengeluaran kas terhadap realisasi penerimaan kas daerah* | | 95 % | 389.588.300 | | | | 95 % | 1.115.607.284 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 25.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 137.500.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 33.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37 Dokumen | 25.819.800 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 36 Dokumen | 78.100.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.02.0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 22.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Dokumen | 120.835.450 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 4 Dokumen | 225.500.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.02.0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 36 Dokumen | 77.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Laporan | 6.999.700 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Laporan | 77.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokumen | 22.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 76.797.600 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 12 Dokumen | 256.577.145 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 22.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37 Orang | 134.135.750 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 36 Orang | 164.930.139 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | *Persentase dokumen akuntansi pelaporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP)* | | 95 % | 621.000.050 | | | | 95 % | 929.917.934 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.03.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 70.832.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 12 Laporan | 146.188.900 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | 31.050.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokumen | 94.786.472 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Laporan | 20.430.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Laporan | 59.399.989 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Laporan | 132.380.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Laporan | 76.381.822 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55 Dokumen | 116.364.050 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 55 Dokumen | 124.136.122 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.03.0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 11.950.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 24.049.982 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 20.960.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 39.162.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.03.0008 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | 72.376.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokumen | 81.608.913 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 27.800.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 28.628.300 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.03.0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 22.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37 Orang | 32.470.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 36 Orang | 99.864.809 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.03.0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Lembaga | 84.388.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Lembaga | 49.005.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.03.0013 | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 53.305.626 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | *Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah* | | 95 % | 179.651.949.375 | | | | 95 % | 198.943.432.426 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.04.0003 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 2.530.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 109 Laporan | 169.900.144.461 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 109 Laporan | 175.948.524.546 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | 1.439.629.972 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 11.000.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.04.0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 109 Laporan | 8.312.174.942 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 109 Laporan | 9.464.907.880 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.05 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | *Persentase pengguna system aplikasi terhadap jumlah OPD* | | 95 % | 161.725.000 | | | | 95 % | 281.801.300 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Dokumen | 105.995.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 4 Dokumen | 109.915.300 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.02.2.05.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37 Orang | 55.730.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 36 Orang | 171.886.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | ***Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Manajemen Aset*** | | **95 %** | **384.921.550** | | | | **95 %** | **955.769.221** | |
| 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | *Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik* | | 95 % | 384.921.550 | | | | 95 % | 955.769.221 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Standar Harga yang Disusun* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 40.184.500 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 109.858.111 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.03.2.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 11.970.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 15.839.659 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | 12.570.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokumen | 129.577.965 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.03.2.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 10.960.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 27.500.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Laporan | 85.561.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Laporan | 99.963.853 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Laporan | 13.196.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Laporan | 146.949.594 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | 13.992.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 42.581.803 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Laporan | 22.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Laporan | 21.427.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Laporan | 41.771.422 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Dokumen | 96.726.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 3 Dokumen | 166.645.600 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan | 19.952.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Laporan | 19.237.284 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | 38.105.350 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 1 Laporan | 72.952.506 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 521 Orang | 20.277.700 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 521 Orang | 60.891.424 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | ***Persentase PAD terhadap pendapatan*** | | **100 %** | **1.658.199.650** | | | | **100 %** | **2.516.227.383** | |
| 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Jumlah buku Standar Harga yang disusun* | | 100 % | 1.658.199.650 | | | | 100 % | 2.516.227.383 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 5.949.950 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 22.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 226.931.950 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 330.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 48.395.650 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 103.345.878 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 351.353.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | | 1 Unit | 440.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | 67.300.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 315.452.531 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | 227.100.200 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 354.678.286 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10000 Obyek Pajak | 186.641.600 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 10000 Obyek Pajak | 27.500.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 49.790.650 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 128.155.518 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Layanan | 5.590.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Layanan | 16.500.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 35.979.600 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 110.401.670 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 223.997.700 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 320.500.290 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.04.2.01.0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Dokumen | 16.500.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 229.169.350 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 276.193.210 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 55.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah |
| | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. BULUKUMBA** | | | | **5.330.592.955** | | | | | **11.081.444.593** | |
| **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | **5.330.592.955** | | | | | **11.081.444.593** | |
| **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | **5.239.107.955** | | | | | **7.584.423.593** | |
| **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Presentase Penyusunan perencanaan,keuangan dan administrasi umum urusan pemerintahan daerah*** | | **100 %** | **4.364.145.605** | | | | **100 %** | **5.417.423.593** | |
| 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | 19 Dok | 44.428.500 | | | | 19 Dokumen | 96.042.980 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 6 Dokumen | 39.531.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 3 Dokumen | 87.792.980 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 2 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Dokumen | 1.100.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 2 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Dokumen | 1.650.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 4.897.500 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 5.500.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Presentase terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | 100 % | 3.535.584.295 | | | | 100 % | 4.114.128.897 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Ujung Bulu, Caile | 39 Orang/ bulan | 3.449.544.295 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 45 Orang/ bulan | 4.018.384.897 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 12 Dokumen | 86.040.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Dokumen | 94.644.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Laporan | 1.100.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Presentase terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | 100 % | - | | | | 100 % | 44.550.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | Ujung Bulu, Caile | 39 Paket | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 45 Paket | 550.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | Ujung Bulu, Caile | 38 Orang | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 5 Orang | 22.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | Ujung Bulu, Caile | 39 Orang | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 39 Orang | 22.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Presentase terlaksananya administrasi umum perangkat Daerah* | | 100 % | 403.788.910 | | | | 100 % | 519.750.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Paket | 3.711.500 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 7.700.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Paket | 4.180.700 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 4 Paket | 5.500.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Paket | 91.681.710 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 110.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Paket | 5.191.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 8.250.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 6 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 5 Dokumen | 3.300.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 97 Laporan | 201.024.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 100 Laporan | 275.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 98.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 110.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | 100 % | 2.789.900 | | | | 100 % | 221.827.716 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 2 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 0 Unit | 133.827.716 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 3 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 11.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 2 Unit | 2.789.900 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Unit | 77.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | 100 % | 302.544.000 | | | | 100 % | 325.424.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 1.100.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 145.584.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 165.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 156.960.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 159.324.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara dengan Baik* | | 100 % | 75.010.000 | | | | 100 % | 95.700.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | 23.850.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 44.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Caile | 11 Unit | 42.920.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 11 Unit | 33.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 5.03.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | Ujung Bulu, Caile | 24 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 24 Unit | 2.200.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | Ujung Bulu, Caile | 25 Unit | 8.240.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 25 Unit | 5.500.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 11.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | ***Peningkatan Pelayanan administrasi kepegawaian, Pengadaan Pegawai yang transparan dan akuntabel, Sistem Informasi Kepegawaian Satu data dengan Sistem yang lain, Meningkatkan Disiplin ASN, Pemberian insentif berdasarkan kinerja ASN*** | | **55 %** | **874.962.350** | | | | **60 %** | **2.167.000.000** | |
| 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | *Presentase terlaksananya Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN* | | 100 % | 197.351.000 | | | | 100 % | 737.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK* | Ujung Bulu, Caile | 397 Dokumen | 81.950.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 321 Dokumen | 275.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian* | Ujung Bulu, Caile | 250 Dokumen | 63.246.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 30 Dokumen | 220.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 44.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.02.2.01.0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian* | Ujung Bulu, Caile | 5853 Laporan | 52.155.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 6031 Laporan | 198.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | *Presentase Terlaksananya Mutasi dan Promosi Jabatan* | | 100 % | 415.520.350 | | | | 100 % | 825.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 868 Dokumen | 189.427.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 866 Dokumen | 550.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN* | Ujung Bulu, Caile | 2 Dokumen | 226.093.350 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Dokumen | 275.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | *Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis* | | 100 % | 48.115.000 | | | | 100 % | 374.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.02.2.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya* | Ujung Bulu, Caile | 200 Orang | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 200 Orang | 27.500.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.02.2.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center* | Ujung Bulu, Caile | 50 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 50 Dokumen | 165.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Orang | 48.115.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 35 Orang | 165.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.02.2.03.0009 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional* | Ujung Bulu, Caile | 50 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 50 Dokumen | 16.500.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | *Presentase Penilain dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | | 100 % | 213.976.000 | | | | 100 % | 231.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | Ujung Bulu, Caile | 5853 Dokumen | 56.710.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 5970 Dokumen | 33.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan* | Ujung Bulu, Caile | 700 Orang | 7.280.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 700 Orang | 33.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50 Laporan | 149.986.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 50 Laporan | 165.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | **91.485.000** | | | | | **3.497.021.000** | |
| **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | ***Peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural,fungsional serta pelatihan teknis lainnya*** | | **72 %** | **91.485.000** | | | | **80 %** | **3.497.021.000** | |
| 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | *PresentaseAparatur sipil Negara Yang Mengikuti Diklat Pengembangan Komptensi Teknis/Fungsional* | | 100 % | 46.800.000 | | | | 100 % | 77.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi* | Ujung Bulu, Caile | 50 Orang | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 100 Orang | 22.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.04.02.2.01.0004 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum* | Ujung Bulu, Caile | 12 Dokumen | 46.800.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Dokumen | 55.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | *Presentase Aparatur sipil Negara yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi Struktural* | | 100 % | 44.685.000 | | | | 100 % | 3.420.021.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.04.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota* | Ujung Bulu, Caile | 200 Orang | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 200 Orang | 22.000.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan* | Ujung Bulu, Caile | 200 Laporan | 44.685.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 200 Laporan | 3.398.021.000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | **INSPEKTORAT DAERAH KAB. BULUKUMBA** | | | | **12.171.473.210** | | | | | **15.458.686.003** | |
| **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | **12.171.473.210** | | | | | **15.458.686.003** | |
| **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | **9.912.849.210** | | | | | **13.163.483.920** | |
| **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Inspektorat Daerah)*** | | **100 %** | **6.744.026.210** | | | | **100 %** | **9.253.378.841** | |
| 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | 100 % | 6.504.850 | | | | 100 % | 7.621.373 | Inspektorat Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 6 Dokumen | 6.504.850 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 6 Dokumen | 7.621.373 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase administrasi keuangan perangkat daerah terkait ketersediaan gaji dan tunjangan* | | 100 % | 4.820.696.720 | | | | 100 % | 6.311.602.924 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Ujung Bulu, Loka | 40 Orang/ bulan | 4.731.998.020 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 40 Orang/ bulan | 6.173.243.373 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 12 Dokumen | 85.109.950 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Dokumen | 124.609.551 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 1 Laporan | 1.095.050 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Laporan | 7.700.000 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 17 Laporan | 2.493.700 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 17 Laporan | 6.050.000 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur pengawasan* | | 100 % | 748.867.000 | | | | 100 % | 1.430.000.000 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Ujung Bulu, Loka | 60 Orang | 748.867.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 60 Orang | 1.430.000.000 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah* | | 100 % | 554.079.190 | | | | 100 % | 685.141.689 | Inspektorat Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 1 Paket | 2.321.910 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Paket | 3.302.377 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 2 Paket | 146.454.730 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 3 Paket | 153.839.312 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 4 Paket | 46.003.550 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 4 Paket | 66.000.000 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Loka | 102 Laporan | 359.299.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 102 Laporan | 462.000.000 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase pengadaan barang milik daerah dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya* | | 100 % | 243.647.350 | | | | 100 % | 125.595.575 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 3 Unit | 26.140.650 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 3 Unit | 66.000.000 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 11 Unit | 217.506.700 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 11 Unit | 59.595.575 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase jasa penunjang dalam hal penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta layanan umum kantor* | | 100 % | 187.512.100 | | | | 100 % | 235.038.200 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 51.684.600 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 68.591.889 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Loka | 12 Laporan | 135.827.500 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 Laporan | 166.446.311 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah dalam hal persentase penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan* | | 100 % | 182.719.000 | | | | 100 % | 458.379.080 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Ujung Bulu, Loka | 1 Unit | 17.859.375 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 1 Unit | 51.416.530 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Loka | 13 Unit | 120.415.625 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 13 Unit | 210.790.137 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | Ujung Bulu, Loka | 18 Unit | 12.340.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 18 Unit | 20.973.693 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Caile | 1 Unit | 32.104.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Unit | 175.198.720 | Inspektorat Daerah |
| **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | ***Persentase Jumlah Temuan BPK dan Persentase Pelanggaran Pegawai*** | | **57 %** | **3.168.823.000** | | | | **55 %** | **3.910.105.079** | |
| 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | *Persentase ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku*<br>*Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku* | | 100 %<br>100 % | 3.168.823.000 | | | | 100 % | 3.910.105.079 | Inspektorat Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14 Laporan | 333.063.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 14 Laporan | 543.308.990 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 1.243.560.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 1.819.331.005 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8 Laporan | 240.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 8 Laporan | 223.045.900 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25 Laporan | 413.120.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 25 Laporan | 460.581.484 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8 Laporan | 381.700.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 8 Laporan | 434.837.700 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Dokumen | 557.380.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Dokumen | 429.000.000 | Inspektorat Daerah |
| **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | **2.258.624.000** | | | | | **2.295.202.083** | |
| 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | *Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu* | | 100 % | 307.200.000 | | | | 100 % | 605.000.000 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu* | Ujung Bulu, Loka | 20 Laporan | 307.200.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 20 Laporan | 605.000.000 | Inspektorat Daerah |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | ***Persenatse Tindak Lanjut Temuan*** | | **60 %** | **1.951.424.000** | | | | **65 %** | **1.690.202.083** | |
| 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | *Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan* | | 100 % | 230.005.000 | | | | 100 % | 225.383.554 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.03.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun* | Ujung Bulu, Loka | 2 Rekomendasi | 230.005.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 2 Rekomendasi | 225.383.554 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | *Persentase cakupan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah* | | 100 % | 1.721.419.000 | | | | 100 % | 1.464.818.529 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah* | Ujung Bulu, Loka | 36 perangkat daerah | 150.330.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 36 perangkat daerah | 110.000.000 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi* | Ujung Bulu, Loka | 12 perangkat daerah | 127.180.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 12 perangkat daerah | 174.520.720 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi* | Ujung Bulu, Loka | 3 Kegiatan | 1.394.947.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 3 Kegiatan | 913.000.000 | Inspektorat Daerah |
| 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas* | Ujung Bulu, Loka | 36 perangkat daerah | 48.962.000 | Ujung Bulu, Loka | DAU | | 36 perangkat daerah | 267.297.809 | Inspektorat Daerah |
| | **KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU** | | | | **11.604.419.570** | | | | | **19.765.094.011** | |
| **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **11.604.419.570** | | | | | **19.765.094.011** | |
| **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **11.604.419.570** | | | | | **19.765.094.011** | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik ( UJUNGBULU)*** | | **100 %** | **7.971.862.640** | | | | **100 %** | **10.206.576.063** | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terlakasanaya administrasi keuangan perangkat daerah persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu* | | 12 Bulan 100 % | 6.860.628.235 | | | | 100 % | 8.696.445.399 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Orang/ bulan | 6.527.358.235 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Orang/ bulan | 8.332.164.427 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 333.270.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 359.313.680 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 4.967.292 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *persentase kepergawaian perangkat daerah terlaksanya Administrasi kepegawaian perangkat daerah* | | 100 % 100 % | 66.874.000 | | | | 100 % | 99.000.000 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 4 Orang | 66.874.000 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Orang | 99.000.000 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *persentase pemenuhan administrasi umum kantor terlaksanaya administrasi umum perangkat daerah* | | 100 % 12 Bulan | 383.179.450 | | | | 100 % | 393.954.547 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 12 Paket | - | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Paket | 44.000.000 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 12 Paket | 5.059.750 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Paket | 18.661.817 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 12 Paket | 65.522.500 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Paket | 44.000.000 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 12 Paket | 18.571.200 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Paket | 24.555.885 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 74.970.000 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 110.033.842 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 219.056.000 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 152.703.003 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlakasanaya pengadaan barang milik daerah* | | 100 % 12 Bulan | 207.048.005 | | | | 100 % | 219.056.599 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 12 Unit | - | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Unit | 66.000.000 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 12 Unit | 84.234.000 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Unit | 55.305.800 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 12 Unit | 122.814.005 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Unit | 97.750.799 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *terlaksanaya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah* | | 12 Bulan 100 % | 386.609.950 | | | | 100 % | 697.128.452 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | 4.880.000 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 21.236.600 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 117.609.950 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 110.817.452 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 264.120.000 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 565.074.400 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah* | | 100 % 12 Bulan | 67.523.000 | | | | 100 % | 100.991.066 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 12 Unit | 15.672.500 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Unit | 35.297.350 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 12 Unit | 38.810.000 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Unit | 43.629.729 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | 12 Unit | 13.040.500 | Ujung Bulu, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Unit | 22.063.987 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik ( UJUNGBULU)*** | | **100 %** | **3.632.556.930** | | | | **100 %** | **9.558.517.948** | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan* | | 100 % 100 % | 3.632.556.930 | | | | 100 % | 9.558.517.948 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 1.031.614.600 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 6.963.136.334 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Pokmas / Ormas | 2.600.942.330 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Pokmas / Ormas | 2.595.381.614 | Kantor Kecamatan Ujungbulu |
| | **KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE** | | | | **3.052.770.954** | | | | | **4.408.105.236** | |
| **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **3.052.770.954** | | | | | **4.408.105.236** | |
| **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **3.052.770.954** | | | | | **4.408.105.236** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik ( UJUNG LOE)*** | | **100 %** | **2.631.771.154** | | | | **100 %** | **3.430.558.761** | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase administrasi keuangan perangkat daerah* | | 100 % | 2.301.637.282 | | | | 100 % | 3.011.619.671 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Ujungloe, Dannuang | 12 Orang/ bulan | 2.247.937.282 | Ujungloe, Dannuang | DAU | | 100 Orang/ bulan | 2.943.181.486 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | Ujungloe, Dannuang | 12 Dokumen | 53.700.000 | Ujungloe, Dannuang | DAU | | 100 Dokumen | 68.438.185 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase administrasi umum perangkat daerah* | | 100 % | 111.163.400 | | | | 100 % | 208.290.153 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Ujungloe, Dannuang | 5 Paket | 19.950.200 | Ujungloe, Dannuang | DAU | | 6 Paket | 26.876.300 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Ujungloe, Dannuang | 1 Paket | 1.115.800 | Ujungloe, Dannuang | DAU | | 1 Paket | 11.550.000 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujungloe, Dannuang | 12 Paket | 20.543.950 | Ujungloe, Dannuang | DAU | | 12 Paket | 24.530.035 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Ujungloe, Dannuang | 12 Paket | 2.699.600 | Ujungloe, Dannuang | DAU | | 12 Paket | 4.928.097 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | Ujungloe, Dannuang | 12 Laporan | 26.945.850 | Ujungloe, Dannuang | DAU | | 12 Laporan | 42.900.000 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujungloe, Dannuang | 12 Laporan | 39.908.000 | Ujungloe, Dannuang | DAU | | 12 Laporan | 97.505.721 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara* | | 100 % | 28.513.600 | | | | 100 % | 12.463.000 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Ujungloe, Dannuang | 0 Unit | 23.513.600 | Ujungloe, Dannuang | DAU | | 0 Unit | - | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Ujungloe, Dannuang | 8 Unit | 5.000.000 | Ujungloe, Dannuang | DAU | | 8 Unit | 12.463.000 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah* | | 100 % | 143.486.872 | | | | 100 % | 157.663.286 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujungloe, Dannuang | 12 Laporan | 20.986.872 | Ujungloe, Dannuang | DAU | | 12 Laporan | 25.605.385 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Ujungloe, Dannuang | 5 Laporan | 6.820.000 | Ujungloe, Dannuang | DAU | | 5 Laporan | 4.457.901 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujungloe, Dannuang | 12 Laporan | 115.680.000 | Ujungloe, Dannuang | DAU | | 12 Laporan | 127.600.000 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | 100 % | 46.970.000 | | | | 100 % | 40.522.651 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Ujungloe, Dannuang | 1 Unit | 11.000.000 | Ujungloe, Dannuang | DAU | | 1 Unit | 12.253.395 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujungloe, Dannuang | 3 Unit | 4.600.000 | Ujungloe, Dannuang | DAU | | 5 Unit | 7.702.134 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | Ujungloe, Dannuang | 5 Unit | 3.370.000 | Ujungloe, Dannuang | DAU | | 10 Unit | 4.387.882 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujungloe, Dannuang | 1 Unit | 28.000.000 | Ujungloe, Dannuang | DAU | | 1 Unit | 16.179.240 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik ( UJUNG LOE)*** | | **100 %** | **420.999.800** | | | | **100 %** | **968.210.555** | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan* | | 100 % | 420.999.800 | | | | 100 % | 968.210.555 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | Ujungloe, Dannuang | 1 Lembaga K emasyarak at an | 20.999.800 | Ujungloe, Dannuang | DAU | | 1 Lembaga K emasyarak at an | 51.700.000 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | Ujungloe, Dannuang | 8 Unit | 156.200.000 | Ujungloe, Dannuang | DAU | | 13 Unit | 647.288.192 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | Ujungloe, Dannuang | 1 Pokmas / Ormas | 243.800.000 | Ujungloe, Dannuang | DAU | | 1 Pokmas / Ormas | 269.222.363 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | ***Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa ( UJUNG LOE)*** | | **100 %** | **-** | | | | **100 %** | **9.335.920** | |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase jumlah desa yang melakukan koordinasi dan asistensi APBDesa di kecamatan*<br>*Persentase pemenuhan asistensi APBDesa* | | 100 %<br>100 % | - | | | | 100 % | 9.335.920 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa* | Ujungloe, Dannuang | 2 Dokumen | - | Ujungloe, Dannuang | DAU | | 2 Dokumen | 9.335.920 | Kantor Kecamatan Ujung Loe |
| | **KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA** | | | | **5.037.565.920** | | | | | **7.450.252.787** | |
| **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **5.037.565.920** | | | | | **7.450.252.787** | |
| **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **5.037.565.920** | | | | | **7.450.252.787** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik ( BULUKUMPA)*** | | **100 %** | **3.837.566.671** | | | | **100 %** | **5.048.014.787** | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | 100 % | 56.184.850 | | | | 100 % | 55.726.110 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 56.184.850 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 55.726.110 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | 100 % | 2.977.192.514 | | | | 100 % | 4.430.143.887 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 37 Orang/ bulan | 2.921.005.014 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 37 Orang/ bulan | 4.380.308.887 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 56.187.500 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 49.835.000 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah* | | 100 % | 29.491.760 | | | | 100 % | 29.928.536 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 29.491.760 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 29.928.536 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | 100 % | 339.323.635 | | | | 100 % | 201.870.592 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 4 Paket | 6.535.955 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Paket | 6.367.725 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 5 Paket | 85.683.250 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 5 Paket | 35.166.174 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 4 Paket | 9.119.130 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Paket | 7.717.500 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 4 Paket | 56.414.850 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Paket | 57.166.593 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 4 Paket | 18.028.850 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Paket | 5.070.000 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 69.921.600 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 22.748.000 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 325 Laporan | 93.620.000 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 325 Laporan | 67.634.600 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | 100 % | 203.515.144 | | | | 100 % | 105.781.504 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 2 Unit | 133.861.144 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Unit | 48.575.646 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 6 Unit | 24.874.000 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 6 Unit | 30.316.999 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 5 Unit | 44.780.000 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 5 Unit | 26.888.859 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | 100 % | 176.603.608 | | | | 100 % | 170.554.301 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 35.643.608 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 35.294.301 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 8.000.000 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 7.100.000 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 132.960.000 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 128.160.000 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik* | | 100 % | 55.255.160 | | | | 100 % | 54.009.857 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 3 Unit | 1.500.000 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Unit | 1.540.000 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 10 Unit | 14.610.000 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 10 Unit | 7.830.900 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 4 Unit | 39.145.160 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 4 Unit | 44.638.957 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik ( BULUKUMPA)*** | | **100 %** | **1.199.999.249** | | | | **100 %** | **2.402.238.000** | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | 100 % | 1.199.999.249 | | | | 100 % | 2.402.238.000 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 15 Unit | 554.823.249 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 15 Unit | 1.681.566.600 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 19 Pokmas / Ormas | 645.176.000 | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 19 Pokmas / Ormas | 720.671.400 | Kantor Kecamatan Bulukumpa |
| | **KANTOR KECAMATAN RILAU ALE** | | | | **3.644.655.392** | | | | | **5.728.312.903** | |
| **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **3.644.655.392** | | | | | **5.728.312.903** | |
| **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **3.644.655.392** | | | | | **5.728.312.903** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik ( RILAU ALE)*** | | **100 %** | **3.244.655.392** | | | | **100 %** | **4.846.378.358** | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang tersedia* | | 100 % | 2.960.988.880 | | | | 100 % | 4.613.403.064 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Rilauale, Semua Kel/Desa | 39 Orang/ bulan | 2.863.680.130 | Rilauale, Semua Kel/Desa | DAU | | 39 Orang/ bulan | 4.383.867.785 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Rilauale, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 96.285.000 | Rilauale, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 228.555.846 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Rilauale, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | 1.023.750 | Rilauale, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 979.433 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah ASN yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan* | | 100 % | - | | | | 100 % | 1.100.945 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Rilauale, Semua Kel/Desa | 2 Orang | - | Rilauale, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Orang | 1.100.945 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Menunjang Administrasi umum perangkat Daerah* | | 100 % | 156.994.090 | | | | 100 % | 123.745.192 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Rilauale, Semua Kel/Desa | 18 Paket | 5.283.670 | Rilauale, Semua Kel/Desa | DAU | | 18 Paket | 7.776.486 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Rilauale, Semua Kel/Desa | 15 Paket | 30.609.320 | Rilauale, Semua Kel/Desa | DAU | | 15 Paket | 36.007.400 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Rilauale, Semua Kel/Desa | 2 Paket | 3.155.100 | Rilauale, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Paket | 3.031.379 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | Rilauale, Semua Kel/Desa | 10 Laporan | 51.780.000 | Rilauale, Semua Kel/Desa | DAU | | 10 Laporan | 66.063.232 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Rilauale, Semua Kel/Desa | 341 Laporan | 66.166.000 | Rilauale, Semua Kel/Desa | DAU | | 341 Laporan | 10.866.695 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya Barang milik daerah* | | 100 % | 49.558.700 | | | | 100 % | 19.347.281 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Rilauale, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 24.458.500 | Rilauale, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 1.103.945 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Rilauale, Semua Kel/Desa | 3 Unit | 1.700.000 | Rilauale, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Unit | 11.390.513 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | Rilauale, Semua Kel/Desa | 3 Unit | 15.696.350 | Rilauale, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Unit | 3.103.602 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Rilauale, Semua Kel/Desa | 2 Unit | 7.703.850 | Rilauale, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Unit | 3.749.221 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terciptanya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah* | | 100 % | 58.137.962 | | | | 100 % | 53.276.129 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Rilauale, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 14.817.962 | Rilauale, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 17.033.293 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Rilauale, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | - | Rilauale, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 2.824.486 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Rilauale, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 43.320.000 | Rilauale, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 33.418.350 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpeliharannya Barang Milik Daerah* | | 100 % | 18.975.760 | | | | 100 % | 35.505.747 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Rilauale, Semua Kel/Desa | 2 Unit | 18.975.760 | Rilauale, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Unit | 14.513.274 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 10 Unit | 7.522.650 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Rilauale, Semua Kel/Desa | 1 Unit | - | Rilauale, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 13.469.823 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana (RILAU ALE))*** | | **100 %** | **-** | | | | **100 %** | **1.113.945** | |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana* | | 100 % | - | | | | 100 % | 1.113.945 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | Rilauale, Semua Kel/Desa | 2 Laporan | - | Rilauale, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Laporan | 1.113.945 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik ( RILAU ALE)*** | | **100 %** | **400.000.000** | | | | **100 %** | **880.820.600** | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan* | | 100 % | 400.000.000 | | | | 100 % | 880.820.600 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | Rilauale, Semua Kel/Desa | 5 Unit | 174.402.000 | Rilauale, Semua Kel/Desa | DAU | | 5 Unit | 597.020.600 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | Rilauale, Semua Kel/Desa | 6 Pokmas / Ormas | 225.598.000 | Rilauale, Semua Kel/Desa | DAU | | 6 Pokmas / Ormas | 283.800.000 | Kantor Kecamatan Rilau Ale |
| | **KANTOR KECAMATAN GANTARANG** | | | | **5.371.691.752** | | | | | **8.941.199.320** | |
| **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **5.371.691.752** | | | | | **8.941.199.320** | |
| **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **5.371.691.752** | | | | | **8.941.199.320** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Gantarang)*** | | **100 Persen** | **4.171.563.202** | | | | **100 Persen** | **6.113.453.630** | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu* | | 100 Persen | 3.655.636.988 | | | | 100 Persen | 5.457.152.580 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Gantorang, Semua Kel/Desa | 12 Orang/ bulan | 3.530.312.988 | Gantorang, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Orang/ bulan | 5.248.936.550 | Kantor Kecamatan Gantarang |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Gantorang, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 120.220.000 | Gantorang, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Dokumen | 202.460.500 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 5.104.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 5.755.530 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN* | | 100 Persen | - | | | | 100 Persen | 27.500.000 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Orang | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Orang | 27.500.000 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | - | 274.193.680 | | | | 100 Persen | 295.974.374 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20 Paket | 9.177.750 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 20 Paket | 10.188.530 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26 Jenis Paket | 137.840.930 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 26 Jenis Paket | 148.269.564 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15 Paket | 14.550.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 15 Paket | 16.108.400 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 349 Laporan | 112.625.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 349 Laporan | 121.407.880 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | 100 Persen | 60.578.950 | | | | 100 Persen | 56.874.895 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7 Unit | 15.300.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 7 Unit | 17.363.500 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Unit | 34.928.950 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 5 Unit | 27.258.000 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Unit | 10.350.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Unit | 12.253.395 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *% Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang* | | 100 Persen | 157.207.824 | | | | 100 Persen | 250.738.112 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 37.207.824 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 40.913.310 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 120.000.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 209.824.802 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik* | | 100 Persen | 23.945.760 | | | | 100 Persen | 25.213.669 | Kantor Kecamatan Gantarang |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Unit | 15.015.760 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Unit | 17.931.651 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6 Unit | 8.930.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 6 Unit | 7.282.018 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | ***Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana ( Ujung Loe) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana*** | | **0 Persen 100 Persen** | **-** | | | | **100 Persen 100 Persen** | **24.359.500** | |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *% Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat* | | 100 Persen | - | | | | 100 Persen | 24.359.500 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Laporan | - | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Laporan | 24.359.500 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Gantarang)*** | | **100 Persen** | **1.200.128.550** | | | | **100 Persen 100 Persen** | **2.803.386.190** | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana* | | 100 Persen | 1.200.128.550 | | | | 100 Persen | 2.803.386.190 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20 Unit | 641.528.550 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 20 Unit | 2.193.438.500 | Kantor Kecamatan Gantarang |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Pokmas / Ormas | 558.600.000 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Pokmas / Ormas | 609.947.690 | Kantor Kecamatan Gantarang |
| | **KANTOR KECAMATAN KINDANG** | | | | **2.293.812.300** | | | | | **200.000.000** | |
| **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **2.293.812.300** | | | | | **200.000.000** | |
| **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **2.293.812.300** | | | | | **200.000.000** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (KINDANG)*** | | **100 Persen** | **1.893.812.300** | | | | **100 Persen** | **-** | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *meningkatnya pengatministrasian aparatur pemerintah* | | 100 Persen | 1.683.156.910 | | | | 100 Persen | - | Kantor Kecamatan Kindang |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Kindang, Semua Kel/Desa | 19 Orang/ bulan | 1.623.666.910 | Kindang, Semua Kel/Desa | DAU | | 19 Orang/ bulan | - | Kantor Kecamatan Kindang |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Kindang, Semua Kel/Desa | 20 Dokumen | 59.490.000 | Kindang, Semua Kel/Desa | DAU | | 20 Dokumen | - | Kantor Kecamatan Kindang |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Meningkatnya pelaksanaan pelayanan Administrasi perkantoran,sarana dan Prasarana aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan* | | 100 % | 89.928.940 | | | | 100 % | - | Kantor Kecamatan Kindang |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Kindang, Semua Kel/Desa | 3 Paket | - | Kindang, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Paket | - | Kantor Kecamatan Kindang |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Kindang, Semua Kel/Desa | 20 Paket | 42.002.000 | Kindang, Semua Kel/Desa | DAU | | 20 Paket | - | Kantor Kecamatan Kindang |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Kindang, Semua Kel/Desa | 20 Paket | 2.583.900 | Kindang, Semua Kel/Desa | DAU | | 20 Paket | - | Kantor Kecamatan Kindang |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Kindang, Semua Kel/Desa | 100 Laporan | 45.343.040 | Kindang, Semua Kel/Desa | DAU | | 100 Laporan | - | Kantor Kecamatan Kindang |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *tersedianya barang kebutuhan aparat* | | 100 % | 21.819.850 | | | | 100 % | - | Kantor Kecamatan Kindang |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Kindang, Semua Kel/Desa | 3 Unit | - | Kindang, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Unit | - | Kantor Kecamatan Kindang |
| 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Kindang, Semua Kel/Desa | 5 Unit | 21.819.850 | Kindang, Semua Kel/Desa | DAU | | 5 Unit | - | Kantor Kecamatan Kindang |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *tersedianya jasa penunjang di kindang* | | 100 % | 77.520.000 | | | | 100 % | - | Kantor Kecamatan Kindang |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Kindang, Semua Kel/Desa | 24 Laporan | 10.980.000 | Kindang, Semua Kel/Desa | DAU | | 24 Laporan | - | Kantor Kecamatan Kindang |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Kindang, Semua Kel/Desa | 24 Laporan | 66.540.000 | Kindang, Semua Kel/Desa | DAU | | 24 Laporan | - | Kantor Kecamatan Kindang |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *terpeliharanya barang milik daerah* | | 100 % | 21.386.600 | | | | 100 % | - | Kantor Kecamatan Kindang |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Kindang, Semua Kel/Desa | 7 Unit | 21.386.600 | Kindang, Semua Kel/Desa | DAU | | 7 Unit | - | Kantor Kecamatan Kindang |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | 1 Unit | - | Bulukumpa, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | - | Kantor Kecamatan Kindang |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (KINDANG)*** | | **100 Persen** | **400.000.000** | | | | **100 Persen** | **200.000.000** | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *diberdayakannya masyarakat di kelurahan* | | 100 % | 400.000.000 | | | | 100 % | 200.000.000 | Kantor Kecamatan Kindang |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | Kindang, Semua Kel/Desa | 6 Unit | 230.000.000 | Kindang, Semua Kel/Desa | DAU | | 6 Unit | - | Kantor Kecamatan Kindang |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | Kindang, Semua Kel/Desa | 5 Pokmas / Ormas | 170.000.000 | Kindang, Semua Kel/Desa | DAU | | 5 Pokmas / Ormas | 200.000.000 | Kantor Kecamatan Kindang |
| | **KANTOR KECAMATAN HERLANG** | | | | **2.946.396.506** | | | | | **5.109.998.306** | |
| **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **2.946.396.506** | | | | | **5.109.998.306** | |
| **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **2.946.396.506** | | | | | **5.109.998.306** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik ( HERLANG)*** | | **100 %** | **2.149.761.506** | | | | **100 %** | **3.341.899.769** | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Keuangan perangkat Daerah* | | 100 % | 1.950.018.200 | | | | 100 % | 2.828.686.519 | Kantor Kecamatan Herlang |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Herlang, Tanuntung | 23 Orang/ bulan | 1.851.438.200 | Herlang, Tanuntung | DAU | | 23 Orang/ bulan | 2.723.623.561 | Kantor Kecamatan Herlang |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Herlang, Tanuntung | 12 Dokumen | 98.580.000 | Herlang, Tanuntung | DAU | | 12 Dokumen | 105.062.958 | Kantor Kecamatan Herlang |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Umum Perangkat Daerah* | | 100 % | 97.623.110 | | | | 100 % | 251.833.901 | Kantor Kecamatan Herlang |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Herlang, Tanuntung | 100 Paket | 45.421.410 | Herlang, Tanuntung | DAU | | 100 Paket | 138.609.254 | Kantor Kecamatan Herlang |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Herlang, Tanuntung | 100 Paket | 3.500.700 | Herlang, Tanuntung | DAU | | 100 Paket | 5.598.201 | Kantor Kecamatan Herlang |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Herlang, Tanuntung | 100 Laporan | 48.701.000 | Herlang, Tanuntung | DAU | | 100 Laporan | 107.626.446 | Kantor Kecamatan Herlang |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | 100 % | 5.585.000 | | | | 100 % | 104.248.027 | Kantor Kecamatan Herlang |
| 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Herlang, Tanuntung | 1 Unit | - | Herlang, Tanuntung | DAU | | 1 Unit | 29.452.500 | Kantor Kecamatan Herlang |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Herlang, Tanuntung | 3 Unit | - | Herlang, Tanuntung | DAU | | 3 Unit | 27.222.727 | Kantor Kecamatan Herlang |
| 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Herlang, Tanuntung | 5 Unit | 5.585.000 | Herlang, Tanuntung | DAU | | 5 Unit | 47.572.800 | Kantor Kecamatan Herlang |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | 100 % | 91.613.406 | | | | 100 % | 116.820.811 | Kantor Kecamatan Herlang |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Herlang, Tanuntung | 12 Laporan | 14.213.406 | Herlang, Tanuntung | DAU | | 12 Laporan | 12.050.695 | Kantor Kecamatan Herlang |
| 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Herlang, Tanuntung | 1 Laporan | - | Herlang, Tanuntung | DAU | | 1 Laporan | 5.890.500 | Kantor Kecamatan Herlang |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Herlang, Tanuntung | 12 Laporan | 77.400.000 | Herlang, Tanuntung | DAU | | 12 Laporan | 98.879.616 | Kantor Kecamatan Herlang |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | 100 % | 4.921.790 | | | | 100 % | 40.310.511 | Kantor Kecamatan Herlang |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Herlang, Tanuntung | 4 Unit | 4.921.790 | Herlang, Tanuntung | DAU | | 4 Unit | 23.344.076 | Kantor Kecamatan Herlang |
| 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Herlang, Tanuntung | 3 Unit | - | Herlang, Tanuntung | DAU | | 3 Unit | 16.966.435 | Kantor Kecamatan Herlang |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik ( HERLANG)*** | | **100 %** | **796.635.000** | | | | **100 %** | **1.768.098.537** | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | 100 % | 796.635.000 | | | | 100 Persen | 1.768.098.537 | Kantor Kecamatan Herlang |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | Herlang, Tanuntung | 6 Unit | 400.635.000 | Herlang, Tanuntung | DAU | | 6 Unit | 1.443.585.538 | Kantor Kecamatan Herlang |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | Herlang, Tanuntung | 12 Pokmas / Ormas | 396.000.000 | Herlang, Tanuntung | DAU | | 12 Pokmas / Ormas | 324.512.999 | Kantor Kecamatan Herlang |
| | **KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO** | | | | **2.943.666.764** | | | | | **5.944.514.210** | |
| **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **2.943.666.764** | | | | | **5.944.514.210** | |
| **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **2.943.666.764** | | | | | **5.944.514.210** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik ( BONTO TIRO)*** | | **100 %** | **2.543.666.764** | | | | **100 %** | **5.063.693.610** | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Penatausahaan Keuangan* | | 100 % | 2.229.339.916 | | | | 95 % | 4.540.313.401 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | 35 Orang/ bulan | 2.165.259.916 | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | DAU | | 35 Orang/ bulan | 3.464.750.836 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | 50 Dokumen | 64.080.000 | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | DAU | | 50 Dokumen | 1.075.562.565 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN* | | 100 % | - | | | | 100 % | 22.125.000 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | 1 Orang | - | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Orang | 22.125.000 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | 90 % | 129.838.350 | | | | 100 % | 156.117.100 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | 50 Paket | 26.158.000 | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | DAU | | 50 Paket | 22.140.969 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | 25 Paket | 3.150.350 | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | DAU | | 25 Paket | 4.522.345 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | 25 Laporan | 34.860.000 | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | DAU | | 25 Laporan | 50.935.500 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | 75 Laporan | 65.670.000 | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | DAU | | 75 Laporan | 78.518.286 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | 100 % | 28.518.850 | | | | 100 % | 90.676.453 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | 1 Unit | - | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 45.000.000 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | 5 Unit | - | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | DAU | | 5 Unit | 16.500.000 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | 3 Unit | 28.518.850 | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Unit | 20.000.000 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | 2 Unit | - | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Unit | 9.176.453 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *% Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang* | | 100 % | 137.761.388 | | | | 100 % | 194.976.188 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | 36 Laporan | 26.161.388 | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | DAU | | 36 Laporan | 26.161.388 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | 24 Laporan | 111.600.000 | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | DAU | | 24 Laporan | 168.814.800 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik* | | 100 % | 18.208.260 | | | | 100 % | 59.485.468 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | 7 Unit | 11.798.260 | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | DAU | | 7 Unit | 28.433.845 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | 9 Unit | 6.410.000 | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | DAU | | 9 Unit | 6.051.623 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | 1 Unit | - | Bonto Tiro, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Unit | 25.000.000 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik ( BONTO TIRO)*** | | **100 %** | **400.000.000** | | | | **100 %** | **880.820.600** | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana* | | 100 % | 400.000.000 | | | | 100 % | 880.820.600 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | Bonto Tiro, Eka Tiro | 1 Unit | 127.600.000 | Bonto Tiro, Eka Tiro | DAU | | 1 Unit | 498.020.600 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | Bonto Tiro, Eka Tiro | 4 Pokmas / Ormas | 272.400.000 | Bonto Tiro, Eka Tiro | DAU | | 4 Pokmas / Ormas | 382.800.000 | Kantor Kecamatan Bonto Tiro |
| | **KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI** | | | | **5.616.814.800** | | | | | **9.314.729.071** | |
| **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **5.616.814.800** | | | | | **9.314.729.071** | |
| **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **5.616.814.800** | | | | | **9.314.729.071** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik ( BONTO BAHARI)*** | | **100 %** | **4.025.814.800** | | | | **100 %** | **5.624.729.071** | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Honorarium PNS Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun 12 Bulan dan 43 ASN* | | 100 Persen 12 Bulan | 3.597.995.996 | | | | 12 Bulan | 4.642.957.806 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | 43 Orang/ bulan | 3.468.845.996 | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | DAU | | 43 Orang/ bulan | 4.402.379.556 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | 43 Dokumen | 129.150.000 | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | DAU | | 43 Dokumen | 240.578.250 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *meningkatnya kinerja aparatur pemerintah kecamatan bonto bahari* | | 100 % | - | | | | 100 % | 66.000.000 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |
| 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | 2 Orang | - | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | DAU | | 2 Orang | 66.000.000 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Tersedianya Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Rapat Rapat Konsultasi dan Koordinasi 27 Paket dan 36 Laporan* | | 100 persen 100 Persen | 203.162.340 | | | | 100 Persen | 349.914.745 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | 600 Paket | 113.859.540 | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | DAU | | 600 Paket | 165.578.450 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | 20000 Paket | 10.166.800 | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | DAU | | 20000 Paket | 18.700.000 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | 400 Laporan | 79.136.000 | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | DAU | | 400 Laporan | 165.636.295 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *10 Unit Persentase Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Mebeler Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* | | 100 Persen 100 Persen | - | | | | 100 Persen | 135.079.250 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | 1 Unit | - | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | DAU | | 1 Unit | 26.500.000 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | 10 Unit | - | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | DAU | | 10 Unit | 22.574.250 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |
| 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | 8 Unit | - | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | DAU | | 8 Unit | 55.000.000 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |
| 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | 10 Unit | - | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | DAU | | 10 Unit | 11.000.000 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *12 Laporan Terbayarnya Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor* | | 12 Bulan 12 Bulan | 203.301.564 | | | | 12 Bulan | 261.910.000 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | 72 Laporan | 31.101.564 | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | DAU | | 72 Laporan | 55.000.000 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | 12 Laporan | 172.200.000 | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | DAU | | 12 Laporan | 206.910.000 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *7 Unit Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [deleted]* | | 100 Persen 100 Persen | 21.354.900 | | | | 100 Persen | 168.867.270 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | 5 Unit | 9.094.900 | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | DAU | | 5 Unit | 14.867.270 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | 1 Unit | - | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | DAU | | 1 Unit | 110.000.000 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |
| 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | 0 Unit | 12.260.000 | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | DAU | | 0 Unit | 44.000.000 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (BONTO BAHARI)***<br>***Meningkatnya Partisipasi dan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan*** | | **100 %** | **1.591.000.000** | | | | **100 %** | **3.690.000.000** | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *2021 Unit dan 2021 Pokmas / Ormas*<br>*Persentase Bertambahnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | 100 Persen<br>100 Persen | 1.591.000.000 | | | | 100 Persen | 3.690.000.000 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | 41 Unit | 800.000.000 | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | DAU | | 41 Unit | 2.750.000.000 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | 200 Pokmas / Ormas | 791.000.000 | Bonto Bahari, Tanahl Lemo | DAU | | 200 Pokmas / Ormas | 940.000.000 | Kantor Kecamatan Bonto Bahari |
| | **KANTOR KECAMATAN KAJANG** | | | | **3.820.582.743** | | | | | **6.489.000.000** | |
| **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | **3.820.582.743** | | | | | **6.489.000.000** | |
| **7.01** | **KECAMATAN** | | | | **3.820.582.743** | | | | | **6.489.000.000** | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik ( KAJANG)*** | | **100 %** | **3.083.582.743** | | | | **100 %** | **4.839.000.000** | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *terbayarnya gajidan tunjangan ASN dan terbayarnya Honorarium PNS* | | 100 % | 2.943.239.550 | | | | 100 % | 3.930.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Kajang, Semua Kel/Desa | 36 Orang/ bulan | 2.701.829.550 | Kajang, Semua Kel/Desa | DAU | | 36 Orang/ bulan | 3.500.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Kajang, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 241.410.000 | Kajang, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Dokumen | 430.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *meningkatnya sumber daya aparatur kecmatan kajang* | | 100 Persen | 22.125.000 | | | | 100 Persen | 70.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Kajang, Semua Kel/Desa | 3 Orang | 22.125.000 | Kajang, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Orang | 70.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersedianya Logistik Kantor, Tersedianya Makanan dan minuman serta terlaksananya Rapat Konsultasi dan Koordinasi* | | 100 % | 83.832.500 | | | | 100 % | 328.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Kajang, Semua Kel/Desa | 3 Paket | 17.467.500 | Kajang, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Paket | 100.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Kajang, Semua Kel/Desa | 3 Paket | - | Kajang, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Paket | 18.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | Kajang, Semua Kel/Desa | 3 Laporan | 29.400.000 | Kajang, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Laporan | 110.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Kajang, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | 36.965.000 | Kajang, Semua Kel/Desa | DAU | | 1 Laporan | 100.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya Mebeler Kantor dan Peralatan dan Mesin Lainnya* | | 100 % | 16.231.250 | | | | 100 % | 355.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Kajang, Semua Kel/Desa | 20 Unit | - | Kajang, Semua Kel/Desa | - | | 20 Unit | 75.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | Kajang, Semua Kel/Desa | 20 Unit | 11.981.250 | Kajang, Semua Kel/Desa | DAU | | 20 Unit | 160.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Kajang, Semua Kel/Desa | 20 Unit | 4.250.000 | Kajang, Semua Kel/Desa | DAU | | 20 Unit | 120.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran,terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik serta terbayarnya jasa pelayanan umum kantor* | | 100 % | 6.382.683 | | | | 100 % | 16.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Kajang, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 6.382.683 | Kajang, Semua Kel/Desa | DAU | | 12 Laporan | 16.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *tersedianya jasa pemeliharaan biaya , pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas serta tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya* | | 100 % | 11.771.760 | | | | 100 % | 140.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Kajang, Semua Kel/Desa | 14 Unit | 11.771.760 | Kajang, Semua Kel/Desa | DAU | | 14 Unit | 55.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | Kajang, Semua Kel/Desa | 10 Unit | - | Kajang, Semua Kel/Desa | DAU | | 10 Unit | 20.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Kajang, Semua Kel/Desa | 3 Unit | - | Kajang, Semua Kel/Desa | DAU | | 3 Unit | 65.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | ***Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik ( KAJANG)*** | | **100 %** | **737.000.000** | | | | **100 %** | **1.650.000.000** | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan* | | 100 % | 737.000.000 | | | | 100 % | 1.650.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | Kajang, Semua Kel/Desa | 2 Unit | 555.200.000 | Kajang, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Unit | 1.500.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | Kajang, Semua Kel/Desa | 2 Pokmas / Ormas | 181.800.000 | Kajang, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Pokmas / Ormas | 150.000.000 | Kantor Kecamatan Kajang |
| | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | **34.897.515.470** | | | | | **38.810.653.769** | |
| **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | **34.897.515.470** | | | | | **38.810.653.769** | |
| **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | **34.897.515.470** | | | | | **38.810.653.769** | |
| **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BADAN KESBANGPOL)*** | | **100 %** | **2.122.738.004** | | | | 1 | **2.999.730.053** | |
| 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase keterpenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu* | | 100 Persen | 57.890.000 | | | | 100 Persen | 28.902.060 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 12 Dokumen | 32.361.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Dokumen | 18.012.060 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 8.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | 8.350.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 1.815.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | 4.535.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 1.815.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | 6.529.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 1.815.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | 6.115.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 1.815.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 1.815.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 4 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 4 Laporan | 1.815.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase keterpoenuhan dokumen laporan administrasi dan keuangan perangkat daerah* | | 100 Persen | 1.642.755.557 | | | | 100 Persen | 2.183.942.660 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Ujung Bulu, Caile | 14 Orang/ bulan | 1.570.640.557 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 14 Orang/ bulan | 2.106.744.660 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 12 Dokumen | 63.120.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Dokumen | 73.568.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Laporan | 5.865.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Laporan | 1.815.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 18 Laporan | 3.130.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 18 Laporan | 1.815.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi barang milik daerah yang terdata dengan baik* | | 100 Persen | 10.040.000 | | | | 100 Persen | 10.623.800 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 1 Dokumen | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Dokumen | 1.815.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 2 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Laporan | 2.420.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 10.040.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 6.388.800 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *meningkatnya administrasi kepegawaian badan kesatuan bangsa dan politik* | | 100 Persen | 20.230.000 | | | | 100 Persen | 73.810.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | Ujung Bulu, Caile | 2 Orang | 20.230.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Orang | 73.810.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah* | | 100 Persen | 147.501.875 | | | | 100 Persen | 363.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Paket | 2.769.450 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 3.025.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Paket | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 30.250.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Paket | 2.751.200 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 3.025.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Paket | 27.487.100 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 36.300.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 1 Paket | 10.031.250 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 1 Paket | 12.100.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 13.418.875 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 36.300.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 91.044.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 242.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana* | | 100 Persen | 76.208.950 | | | | 100 Persen | 76.800.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 2 Unit | 40.965.100 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Unit | 68.500.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 8.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 6 Unit | 7.500.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 6 Unit | 12.500.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Unit | 27.743.850 | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU | | 2 Unit | 12.500.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 2 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 2 Unit | 12.500.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah persentase terpenuhinya unsur penunjang gedung kantor* | | 100 Persen | 112.182.500 | | | | 100 Persen | 179.126.533 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 19.182.500 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 25.676.533 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 18.150.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | 93.000.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 135.300.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik* | | 100 Persen | 55.929.122 | | | | 100 Persen | 63.525.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Ujung Bulu, Caile | 4 Unit | 45.779.122 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 4 Unit | 36.300.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | Ujung Bulu, Caile | 3 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 3 Unit | 9.075.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | Ujung Bulu, Caile | 25 Unit | 10.150.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 25 Unit | 12.100.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | Ujung Bulu, Caile | 25 Unit | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 25 Unit | 6.050.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | ***Persentase Kegiatan Penyuluhan, Seminar Dan Sosialisasi*** | | **100 %** | **358.460.420** | | | | **100 %** | **124.025.000** | |
| 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | *Persentase Kegiatan Penyuluhan Seminar dan Sosialisasi* | | 100 Persen | 358.460.420 | | | | 100 Persen | 124.025.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.02.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun* | Ujung Bulu, Caile | 100 Dokumen | 358.460.420 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 100 Dokumen | 121.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 3.025.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | ***Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat*** | | **75 %** | **32.103.061.546** | | | | **75 %** | **34.842.698.847** | |
| 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | *Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat* | | 100 Persen | 32.103.061.546 | | | | 100 Persen | 34.842.698.847 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 150 Orang | 32.103.061.546 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 150 Orang | 34.839.673.847 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 3.025.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | ***Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi*** | | **85 %** | **48.615.000** | | | | **85 %** | **575.025.000** | |
| 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | *Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan di awasi* | | 100 Persen | 48.615.000 | | | | 100 Persen | 575.025.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.04.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 50 Orang | 48.615.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 100 Orang | 572.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 3.025.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | ***Indeks Kerukunan Umat Beragama Dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi*** | | **75 %** | **101.050.000** | | | | **75 %** | **145.149.869** | |
| 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | *Indeks Kerukunan umat beragama dan kasus intoleransi yang terjadi* | | 100 Persen | 101.050.000 | | | | 100 Persen | 145.149.869 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 100 Orang | 101.050.000 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 100 Orang | 121.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.05.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 24.149.869 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | ***Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah*** | | **15 %** | **163.590.500** | | | | **15 %** | **124.025.000** | |
| 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | *Persentase Peningkatan Penanganan Konflik di daerah* | | 100 Persen | 163.590.500 | | | | 100 Persen | 124.025.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 50 Orang | 163.590.500 | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 150 Orang | 121.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | |
| | | | Lokasi | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | Ujung Bulu, Caile | 12 Laporan | - | Ujung Bulu, Caile | DAU | | 12 Laporan | 3.025.000 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| **J U M L A H** | | | | | **1.555.095.998.416** | | | | | **1.942.202.168.911** | |

# BAB VI
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran target dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan berupa indikator makro pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## 6.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembanguan merupakan indicator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yangdiselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta danpihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun indikator makro pembangunan terdiri dari:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4. Pertumbuhan Ekonomi
5. PDRB Perkapita ADHB
6. Gini Ratio
7. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Adapun target kinerja makro pembangunan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel VI-1**
**Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2022-2024**

| No. | Indikator Kinerja Makro | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka/ Nilai | 70,61 | 71,09 | 71,69 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 7,39 | 5,99 | 6,70 |
| | Jumlah Penduduk Miskin | Ribu Orang | 31.290 | 27.063 | 26.152 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 1,26 | 2,91 | 2,50 |
| | Jumlah Penganggur | Orang | 2.698 | 3.540 | 2.675 |
| 4 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 3,81 | 5,19-6,01 | 5,15 |
| 5 | PDRB Perkapita ADHB | Juta Rp. | 38,55 | 40,92 | 42,85 |
| 6 | Gini Ratio | Angka | 0,361 | 0,355 | 0,350 |
| 7 | Penurunan Emisi GRK | Gg Co2-Eq | 462.952,25 | 462.026,34 | 462.026,34 |

*Sumber : BPS, DLHK , Bappelitbangda Kab. Bulukumba 2023, diolah*

## 6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untukmengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan Target indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel VI-2**
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2024 Kabupaten Bulukumba**

| No. | Indikator | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Angka | 70 | 71 | 71 |
| 2 | Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | CC (59,46) | CC | B |
| 4 | Skor LPPD/Kategori | Skor | n/a | 3,526 | 3,5415 |
| 5 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 3,25 | 3,26-4,00 | 3,26-4,00 |
| 6 | Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB | % | 24,42 | 22,28 | 22,04 |
| 7 | Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian | % | 3,81 | 4,37 | 8,14 |
| 8 | Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan terhadap PDRB | % | 12,57 | 13,21 | 13,55 |
| 9 | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan | % | -0,31 | 6,75 | 7,66 |
| 10 | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 70,34 | 71,09 | 71,69 |
| 11 | Indeks Pendidikan | Angka | 63,98 | 65,13 | 66,21 |
| 12 | Indeks Kesehatan | Angka | 74,63 | 75,62 | 76,36 |
| 13 | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 68,51 | 69,15 | 69,63 |
| 14 | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD | % | 4,47 | 3,05 | 3,26 |
| 15 | Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata | % | 22,48 | 6,11 | 6,76 |
| 16 | Gini Ratio | Angka | 0,361 | 0,349 | 0,350 |
| 17 | Indeks Daya saing infrastruktur | Angka | 80 | 90 | 92 |
| 18 | Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB | % | 24,12 | 24,91 | 25,36 |
| 19 | Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri | % | 6,68 | 10,84 | 10,63 |
| 20 | Indeks Pembangunan Pemuda | Angka | 68,86 | 58,38 | 59,94 |
| 21 | Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi | % | 18 | 27 | 27 |
| 22 | Indeks Desa Membangun | Angka | 0,72 | 0,76 | 0,78 |
| 23 | Persentase Desa Mandiri | % | 1,83 | 2,75 | 4,59 |
| 24 | Indeks Rasa Aman | Angka | 14 | 15 | 15 |
| 25 | Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani | % | 58,46 | 89,11 | 89,66 |

*Sumber : Bappelitbanga Kab. Bulukumba 2023, diolah*

## 6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi.Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disa

**Tabel VI-3**
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022 dan Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023-2024 Kabupaten Bulukumba**

| Nomor | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **INDIKATOR KIERJA KUNCI (IKK)** | | | | | |
| **1** | | | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | |
| **1** | | | **Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi** | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 3,81 | 4,25 | 5,15 | |
| 1 | 1 | 2 | PDRB ADHK | Rp, Miliar | 9.357,11 | 9.065,34 | 9.267,01 | |
| 1 | 1 | 3 | Laju inflasi | % | 4,12 | 2,55 | 2,41 | |
| 1 | 1 | 4 | PDRB Perkapita ADHB | Rp, Juta | 38,88 | 40,92 | 45,04 | |
| 1 | 1 | 5 | Gini Ratio | % | 0,361 | 0,368 | 0,35 | |
| 1 | 1 | 6 | Persentase Penduduk miskin | % | 7,39 | 5,99 | 6,05 | |
| **1** | | | **Kesejahteraan sosial** | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 70,34 | 70,61 | 71,69 | |
| 1 | 2 | 2 | Angka Usia Harapan Hidup | angka | 68,51 | 69,33 | 70,47 | |
| 1 | 2 | 3 | Angka Harapan Lama Sekolah | angka | 13,42 | 14,28 | 15,37 | |
| 1 | 2 | 4 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | angka | 8,01 | 7,89 | 7,91 | |
| 1 | 2 | 5 | Pengeluaran Per Kapita Riil | Juta Rupiah | 10,94 | 10.657 | 10.725 | |
| 1 | 2 | 6 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | % | 65,27 | 71,50 | 74,19 | |
| 1 | 2 | 7 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 1,26 | 2,91 | 2,50 | |
| 1 | 2 | 8 | Persentase Balita Gizi Buruk | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Dinas Kesehatan |
| **1** | | | **Seni Budaya Dan Olahraga** | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya | kali | 1 | 5 | 8 | Disparpora |
| 1 | 3 | 2 | Cakupan Pembinaan Olahraga | % | 85,71 | 3,37 | 3,85 | Disparpora |
| **2** | | | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | |
| **2** | | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | |
| **2** | **1** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan** | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | **Angka Partisipasi Kasar (APK)** | | | | | |
| | | | *SD* | *%* | 113,27 | 114,54 | 115,19 | Disdikbud |
| | | | *SMP* | *%* | 86,46 | 97,14 | 101,72 | Disdikbud |
| 2 | 1 | 2 | **Angka Partisipasi Murni (APM)** | | | | | |

| Nomor | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *SD* | % | 99,55 | 98,69 | 98,72 | Disdikbud |
| | | | *SMP* | % | 83,05 | 84,85 | 85,50 | Disdikbud |
| 2 | 1 | 3 | **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** | | | | | |
| | | | *7-12 Tahun* | % | 99,55 | 98,87 | 98,87 | Disdikbud |
| | | | *14-15 Tahun* | % | 92,72 | 92,24 | 92,21 | Disdikbud |
| | | | *16-18 Tahun* | % | 74,39 | 75,85 | 76,31 | Disdikbud |
| 2 | 1 | 4 | **Angka Putus Sekolah** | | | | | |
| | | | *SD* | % | 0,57 | 0,00 | 0,00 | Disdikbud |
| | | | *SMP* | % | 0,15 | 0,00 | 0,00 | Disdikbud |
| 2 | 1 | 5 | **Angka Kelulusan** | | | | | |
| | | | *SD* | % | 99,55 | 100 | 100 | Disdikbud |
| | | | *SMP* | % | 92,72 | 100 | 100 | Disdikbud |
| 2 | 1 | 6 | Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-Iv | % | 98,68 | 100 | 100 | Disdikbud |
| 2 | 1 | 7 | Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar | rasio | 85,15 | 1:8 | 1:6 | Disdikbud |
| 2 | 1 | 8 | Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah | rasio | 1:13 | 1:7 | 1:6 | Disdikbud |
| 2 | 1 | 9 | Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas | % | 1:9 | 91,53 | 91,47 | Disdikbud |
| **2** | **2** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan** | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | Angka Kematian Bayi Kelahiran Hidup | | 5,24 | 4,57 | 3,78 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 2 | 2 | Angka Kematian Balita Kelahiran Hidup | | 9,99 | 9,94 | 9,84 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 2 | 3 | Angka Kematian Neonatal Kelahiran Hidup | | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 2 | 4 | Angka Kematian Ibu | | 137,99 | 46,71 | 35,47 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 2 | 5 | Rasio Posyandu Per Satuan Balita | | 22,65 | 29,92 | 35,49 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 2 | 6 | Rasio Puskesmas Dan Pustu | | 0,17 | 0,19 | 0,19 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 2 | 7 | Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk | | 0,004 | 0,002 | 0,002 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 2 | 8 | Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 2 | 9 | Rasio Dokter Per Satuan Penduduk | | 0,25 | 0,095 | 0,096 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 2 | 10 | Rasio Tenaga Medis/Penduduk | | 0,33 | 0,242 | 0,258 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 2 | 11 | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | % | 90,44 | 86,30 | 88,59 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 2 | 12 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | % | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 2 | 13 | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan | % | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 2 | 14 | Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta | % | 64 | 41,3 | 35,6 | Dinas Kesehatan |

| Nomor | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 15 | Tingkat Prevalensi Tuberkolosis | *Per 1000 Penduduk* | 165,31 | 93,82 | 78,81 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 2 | 16 | Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis | *Per 1000 Penduduk* | 8,41 | 2,56 | 1,22 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 2 | 17 | Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD | % | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 2 | 18 | Angka Kejadian Malaria | *Per 1000 Penduduk* | 4,96 | 0,24 | 0 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 2 | 19 | Prevalensi Hiv/Aids (Persen) Dari Total Populasi | % | 13,79 | 0,005 | 0 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 2 | 20 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | % | 8,27 | 10,40 | 15,97 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 2 | 21 | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 | % | 70,21 | 73,17 | 72,53 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 2 | 22 | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin | % | 52,65 | 50,43 | 46,71 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 2 | 23 | Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin | % | 85,68 | 89,19 | 95,37 | Dinas Kesehatan |
| **2** | **3** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang** | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik | % | 0,890 | 0,699 | 0,880 | Dinas PUPR |
| 2 | 3 | 2 | Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk | | 0,0030 | 0,0031 | 0,0029 | Dinas PUPR |
| 2 | 3 | 3 | Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air | % | 98,97 | 100 | 100 | Dinas PUPR |
| 2 | 3 | 4 | Persentase Luas irigasi dalam kondisi baik | % | 81,16 | 81,70 | 83,52 | Dinas PUPR |
| 2 | 3 | 5 | Rasio Jaringan Irigasi | | 0,49 | 0,19 | 0,18 | Dinas PUPR |
| **2** | **4** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman** | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | Rasio Rumah Layak Huni | | 0,434 | 0,249 | 0,251 | DPKPP |
| 2 | 4 | 2 | Persentase Pemukiman Yang Tertata | % | 58,83 | 74,46 | 80,25 | DPKPP |
| 2 | 4 | 3 | Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh | % | 9,41 | 12,15 | 13,06 | DPKPP |
| 2 | 4 | 4 | Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau | % | 92,54 | 94,08 | 94,62 | DPKPP |
| 2 | 4 | 5 | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi | % | 64,60 | 84,74 | 87,08 | DPKPP |
| 2 | 4 | 6 | Persentase Penduduk Berakses Air Minum | % | 85,48 | 84,96 | 85,07 | DPKPP |
| 2 | 4 | 7 | Persentase Areal Kawasan Kumuh | % | 12,02 | 0,00 | 0,00 | DPKPP |
| 2 | 4 | 8 | Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan | | 0,42 | 20,44 | 59,46 | DPKPP |

| Nomor | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **5** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** | | | | | |
| 6 | 5 | 1 | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | % | 0,30 | 0,31 | 0,30 | Satpol PP, PP |
| 2 | 5 | 2 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | | 100 | 100 | 100 | Satpol PP, PP |
| 2 | 5 | 3 | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota | % | 0,00271 | 0,00305 | 0,00309 | Satpol PP, PP |
| 2 | 5 | 4 | Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | | 100 | 100 | 100 | Satpol PP, PP |
| 2 | 5 | 5 | Persentase Penegakan Perda | % | 100 | 100 | 100 | Satpol PP, PP |
| **2** | **6** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Sosial** | | | | | |
| 2 | 6 | 1 | Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi | unit | | 12 | 12 | Dinas Sosial |
| 2 | 6 | 2 | Perentase Jumlah Korban Bencana Yang Ditangani | % | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial |
| 2 | 6 | 3 | Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial | % | 100,00 | 99,69 | 100 | Dinas Sosial |
| 2 | 6 | 4 | Persentase PMKS Yang Tertangani | % | 57,53 | 65,25 | 54,15 | Dinas Sosial |
| 2 | 6 | 5 | Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat | % | 100,00 | 91,82 | 92,08 | Dinas Sosial |
| 2 | 6 | 6 | Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial | % | 97,23 | 81,32 | 78,96 | Dinas Sosial |
| **2** | | | **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** | | | | | |
| **2** | **1** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja** | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun | % | 23,26 | 0,00 | 0,00 | PMPTSP dan Tenaga Keja |
| 2 | 1 | 2 | Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) | % | 100,0 | 0,02 | 0,00 | PMPTSP dan Tenaga Keja |
| 2 | 1 | 3 | Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek | % | 97,30 | 3,92 | 6,95 | PMPTSP dan Tenaga Keja |
| 2 | 1 | 4 | Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan | % | 66,47 | 2,09 | 2,36 | PMPTSP dan Tenaga Keja |
| 2 | 1 | 5 | Besaran Pemeriksaan Perusahaan | % | 0,24 | 0,23 | 0,21 | PMPTSP dan Tenaga Keja |

| Nomor | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan | % | 0,06 | 0,05 | 0,03 | PMPTSP dan Tenaga Keja |
| 2 | 1 | 7 | Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | % | 91,43 | 0,79 | 0,87 | PMPTSP dan Tenaga Keja |
| 2 | 1 | 8 | Rasio Lulusan S1/S2/S3 | Per 10,000 | 741,80 | 762,88 | 798,09 | PMPTSP dan Tenaga Keja |
| 2 | 1 | 9 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | | 43,21 | 86,22 | 99,40 | PMPTSP dan Tenaga Keja |
| 2 | 1 | 10 | Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan | | 100 | 1,05 | 1,13 | PMPTSP dan Tenaga Keja |
| 2 | 1 | 11 | Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat | | 0,47 | 0,47 | 0,51 | PMPTSP dan Tenaga Keja |
| **2** | **2** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak** | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah | % | 4,40 | 4,3 | 4,2 | Dinas PPKB & P3A |
| 2 | 2 | 2 | Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD | % | 17,50 | 26,36 | 32,15 | Dinas PPKB & P3A |
| 2 | 2 | 3 | Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta | % | 96,00 | 84,52 | 86,04 | Dinas PPKB & P3A |
| 2 | 2 | 4 | Rasio KDRT | | 0,034 | 0,002 | 0,001 | Dinas PPKB & P3A |
| 2 | 2 | 5 | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | % | 96,00 | | | Dinas PPKB & P3A |
| 2 | 2 | 6 | Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu | % | 100,00 | 100 | 100 | Dinas PPKB & P3A |
| 2 | 2 | 7 | Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A Dan Ppt/Pkt Di Rumah Sakit | % | 8,06 | 100 | 100 | Dinas PPKB & P3A |
| 2 | 2 | 8 | Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak | % | 100,00 | 100 | 100 | Dinas PPKB & P3A |
| **2** | **3** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Pangan** | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | Ketersediaan Pangan Utama | | 100 | 465,15 | 507,44 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| Nomor | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | Ketersediaan Energi (Kkl/Kap/Hari) | | 17.766,98 | 13.353,36 | 24.676,00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 3 | 3 | Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari) | | 919,76 | 404,03 | 1.031,60 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 3 | 4 | Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) | | 90 | 83,09 | 90,95 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **2** | **4** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan** | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | Persentase Luas Lahan Bersetifikat | % | 25,74 | 28,06 | 31,18 | DPKPP |
| 2 | 4 | 2 | Penyelesaian Kasus Tanah Negara | % | 20,00 | 88,05 | 100,00 | DPKPP |
| **2** | **5** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup** | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 60,31 | 63,45 | 64,53 | DLHK |
| 2 | 5 | 2 | Indeks Kualitas Air | Poin | 55,00 | 58,95 | 59,15 | DLHK |
| 2 | 5 | 3 | Indeks Kualitas Udara | Poin | 92,13 | 84,84 | 85,04 | DLHK |
| 2 | 5 | 5 | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota | % | 100 | 100 | 100 | DLHK |
| 2 | 5 | 6 | Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA | % | 1 | 1 | 1 | DLHK |
| 2 | 5 | 7 | Terverifikasinya MHA Dan Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional | Kelompok | 1 | 1 | 1 | DLHK |
| 2 | 5 | 8 | Penetapan Hak MHA | Kelompok | 1 | 1 | 1 | DLHK |
| 2 | 5 | 9 | Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan | Kelompok | 100 | 100 | 100 | DLHK |
| 2 | 5 | 10 | Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana | Kelompok | 100 | 100 | 100 | DLHK |
| 2 | 5 | 11 | Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat | Kelompok | 1 | 1 | 1 | DLHK |
| 2 | 5 | 12 | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup | Kelompok | Tidak Ada | Ada | Ada | DLHK |
| 2 | 5 | 13 | Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan PUU LH yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota, | sekolah | 100 | 100 | 100 | DLHK |
| 2 | 5 | 14 | Timbulan Sampah Yang Ditangani | % | 26,03 | 29,18 | 32,47 | DLHK |
| 2 | 5 | 15 | Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani | % | 73,13 | 100 | 100 | DLHK |

| Nomor | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 16 | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota | % | 74 | 24,30 | 22,81 | DLHK |
| 2 | 5 | 17 | Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Sektor Industri) | Ton/Kg | 35 | 41,28 | 46,15 | DLHK |
| 2 | 5 | 18 | Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001 | Buah | 1 | 1 | 2 | DLHK |
| 2 | 5 | 19 | Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan | % | 29,86 | 33,85 | 36,95 | DLHK |
| 2 | 5 | 20 | Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan | % | 32,36 | 36,62 | 39,93 | DLHK |
| 2 | 5 | 21 | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati | Dok | 0 | 0 | 0 | DLHK |
| **2** | **6** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil** | | | | | |
| 2 | 6 | 1 | Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk, | | 1,095 | 1 | 1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 6 | 2 | Rasio bayi berakta kelahiran, | | 0,950 | 0,8 | 0,8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 6 | 3 | Rasio pasangan berakta nikah, | | 1,000 | 0,5 | 0,5 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 6 | 4 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | | Ada | 100 | 100 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 6 | 5 | Cakupan penerbitan KTP-el | % | 109,55 | 100 | 100 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 6 | 6 | Cakupan penerbitan akte kelahiran | % | 111,06 | 80 | 80 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **7** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa** | | | | | |
| 2 | 7 | 1 | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik | % | 73,39 | 100 | 100 | DPMD |
| 2 | 7 | 2 | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan (LPM) | | 100,00 | 146 | 146 | DPMD |
| 2 | 7 | 3 | Persentase Lsm Aktif | % | 9,09 | 100 | 100 | DPMD |
| 2 | 7 | 4 | Persentase PKK Aktif | % | 100,00 | 100 | 100 | DPMD |
| 2 | 7 | 5 | Persentase Posyandu Aktif | % | 100,00 | 100 | 100 | DPMD |
| 2 | 7 | 6 | Jumlah Aparat Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | 100 | 100 | DPMD |

| Nomor | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 7 | Rata-rata jumlah kelompok Binaan PKK | | 100,00 | 93 | 93 | DPMD |
| **2** | **8** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** | | | | | |
| *2* | 8 | 1 | Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | % | 0,63 | 0,53 | 0,52 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 2 | Total Fertility Rate (TFR) | % | 2,130 | 2,50 | 2,61 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 3 | Persentase perangkat daerah(dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB | % | 81,48 | 78,58 | 86,92 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 4 | Persentase Perangakat Daerah Dinas/ Badan Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | % | 11,11 | 26,42 | 63,57 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 5 | Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tengtang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk | % | 1 | 1 | 1 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 6 | Jumlah Sektor Yang Menyapakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Program Pembangunan | | 1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB | 1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB | 1, Dinas DUK CAPIL 2, BAPPEDA 3, DIKNAS 4, DINKES 5, BPS 6, DPPKB | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 7 | Jumlah Kerja Sama Penyelengaraan Pendidikan Formal, Non Formal, Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan, | | 1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM | 1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM | 1, Dinas Pendidikan 2, IBI 3, PKBM | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 8 | Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga | % | 20,76 | 16,85 | 15,37 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 9 | Ratio Akseptor Kb | % | 13,47 | 18,33 | 21,60 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 10 | Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 | % | 74,97 | 74,86 | 74,36 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 11 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)per 1,000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) | | 23,5 | 89,79 | 89,79 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 12 | Cakupan Pasangan Usia Subur (Pus) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun | % | 4,76 | 4,45 | 4,53 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 13 | Cakupan Pus Yang Ingin Ber-Kb Tidak Terpenuhi (Unmet Need) | % | 11,62 | 11,84 | 10,57 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 14 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | % | 20,77 | 39,09 | 42,04 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 15 | Persentase Tinggkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi | % | 35,77 | 53,50 | 66,97 | Dinas PPKB & P3A |

| Nomor | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2* | 8 | 16 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | % | 80,95 | 100 | 100 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 17 | Cakupan Bina Keluarga Remaja Ber- Kb | % | 71,54 | 79,78 | 88,55 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 18 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Ber- KB | % | 72,09 | 91,16 | 100 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 19 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan | % | 10 | 10 | 10 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 20 | Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa | % | 2,5 | 1,03 | 0,63 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 21 | Cakupan Pkb/Plkb Yang Didaya Gunakan Perangkat Derah Kb Untuk Perencanaan Dan Pelaksaaan Pembangunan Daerah Di Bdang Pengendalian Penduduk | % | 100 | 100 | 100 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 22 | Cakupan Pus Peserta Kb Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Yang Ber-Kb Mandiri | % | 26,00 | 25,16 | 23,84 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 23 | Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 24 | Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 25 | Persentase Faskes Dan Jejarinya ( Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerja Sama Dengan Bpjs Dan Memberikan Pelayanan Kb/Kr Yang Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan | % | 86,91 | 65,05 | 100 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 26 | Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Disetiap Desa | % | 100 | 100 | 100 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 27 | Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Sesual (Ims) | % | 0,000 | 0 | 0 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 28 | Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga | % | 100,00 | 100 | 100 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 29 | Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yng Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak | % | 83,90 | 38,87 | 39,68 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 30 | Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita | % | 22,00 | 22,79 | 23,05 | Dinas PPKB & P3A |
| *2* | 8 | 31 | Persentase Pembiayaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Dinas PPKB & P3A |
| **2** | **9** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan** | | | | | |
| 2 | 9 | 1 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | Unit | 3 | 3 | 3 | Dinas Perhubungan |

| Nomor | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 2 | Jumlah arus penumpang angkutan Umum | Unit | 9.125 | 12.911 | 10.924 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 9 | 3 | Persentase Layanan Angkutan Darat | % | 1,15 | 1,17 | 1,07 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 9 | 4 | Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum | % | 98,67 | 100,00 | 100,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 9 | 5 | Pemasangan Rambu-Rambu | | 0,00 | 68,66 | 74,68 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 9 | 6 | Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum | Orang/Barang | 3.994.925 | 28.134 | 28.237 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 9 | 7 | Rasio Ijin Trayek | | 0,0005 | 0,010 | 0,014 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **10** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika** | | | | | |
| 2 | 10 | 1 | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer | | N/A | 91 | 99 | Diskominfosan |
| 2 | 10 | 2 | Cakupan Layanan Telekomunikasi | % | N/A | 0,79 | 0,83 | Diskominfosan |
| 2 | 10 | 3 | Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon | % | N/A | 84,60 | 86,00 | Diskominfosan |
| 2 | 10 | 4 | Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet | | N/A | 57,91 | 63,38 | Diskominfosan |
| 2 | 10 | 5 | Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi | | N/A | 91,33 | 98,74 | Diskominfosan |
| **2** | **11** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah** | | | | | |
| 2 | 11 | 1 | Persentase koperasi aktif | % | 67,80 | 75,21 | 76,00 | Dina Perdagangan, Perindustrian, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 11 | 2 | Persentase Usaha Mikro Dan Kecil | % | 97,99 | 98,97 | 99,65 | Dina Perdagangan, Perindustrian, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **12** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal** | | | | | |
| 2 | 12 | 1 | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) | Investor | 35 | 69 | 74 | Dinas PMPTSP dan Tenaga Keja |
| 2 | 12 | 2 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | Rp (juta) | 54.322 | 780.755 | 814.435 | Dinas PMPTSP dan Tenaga Keja |
| 2 | 12 | 3 | Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN | % | -79,55 | 25 | 30 | Dinas PMPTSP dan Tenaga Keja |
| **2** | **13** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga** | | | | | |
| 2 | 13 | 1 | Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif | % | 89,29 | 90,71 | 94,28 | Disparpora |
| 2 | 13 | 2 | Persentase wirausaha muda | | 2,59 | 3,37 | 3,85 | Disparpora |
| 2 | 13 | 3 | Cakupan Pembinaan Olahraga | % | 85,71 | 21,57 | 20,55 | Disparpora |

| Nomor | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 4 | Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat/Lisensi Kepelatihan | % | 29,31 | 41,03 | 50,69 | Disparpora |
| 2 | 13 | 5 | Cakupan pembinaan atlet muda | % | 73,65 | 52,30 | 57,43 | Disparpora |
| 2 | 13 | 6 | Jumlah atlet berprestasi | | 3 | 19 | 19 | Disparpora |
| 2 | 13 | 7 | Jumlah prestasi olahraga | | 2 | 3 | 3 | Disparpora |
| **2** | **14** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Statistik** | | | | | |
| 2 | 14 | 1 | Buku "Kabupaten Dalam Angka" | | Ada | Ada | Ada | Statistik |
| 2 | 14 | 2 | Buku "PDRB" | | Ada | Ada | Ada | Statistik |
| **2** | **15** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Persandian** | | | | | |
| 2 | 15 | 1 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah, | % | 100 | 100 | 100 | Diskominfosan |
| **2** | **16** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan** | | | | | |
| 2 | 16 | 1 | Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya | | 1 | 3 | 3 | Disdikbud |
| 2 | 16 | 2 | Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan | | 58 | 59 | 60 | Disdikbud |
| 2 | 16 | 3 | Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu | | 2 | 2 | 2 | Disdikbud |
| **2** | **17** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan** | | | | | |
| 2 | 17 | 1 | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | | 6,34 | 34,67 | 28,23 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2 | 17 | 2 | Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah | | 71,54 | 45,16 | 49,12 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2 | 17 | 3 | Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk | | 1,61 | 1,79 | 2,71 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2 | 17 | 4 | Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun | Orang | 27.884 | 69.007 | 84.714 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2 | 17 | 5 | Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan | Judul | 15.933 | 12.288 | 13.456 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2 | 17 | 6 | Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat | % | 53,26 | 63,78 | 81,30 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **2** | **18** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan** | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan | % | 100.00 | 100.00 | 100 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2 | 18 | 2 | Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku | % | 5,56 | 1,39 | 1,84 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

| Nomor | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | | | **Urusan Pemerintahan Pilihan** | | | | | |
| **2** | **1** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan** | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | Cakupan Produksi perikanan | % | 92,61 | 130 | 134 | Dinas Perikanan |
| 2 | 1 | 2 | Perikanan tangkap | ton | 54.911 | 57.120,4 | 59.165,0 | Dinas Perikanan |
| 2 | 1 | 3 | Perikanan Budidaya | ton | 168.040 | 5176 | 5176 | Dinas Perikanan |
| 2 | 1 | 4 | Cakupan Bina Kelompok Perikanan | % | 73,28 | 72,2 | 74,7 | Dinas Perikanan |
| **2** | **2** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata** | | | | | |
| **2** | **2** | 1 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara | Orang | 373.095 | 395.675 | 460.991 | Disparpora |
| 2 | 2 | 2 | Lama Kunjungan Wisata | Hari | 2-4 | 2-4 | 2-4 | Disparpora |
| 2 | 2 | 3 | PAD Sektor Pariwisata | % | 5,37 | 6,11 | 7,34 | Disparpora |
| **2** | **3** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian** | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan terhadap PDRB | | 25,48* | 25,15 | 24,46 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 3 | 2 | Cakupan bina kelompok tani | % | 53,35 | 79,42 | 85,86 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 | 3 | 3 | Jumlah Populasi Ternak | | 5.295.632 | 3.276.782 | 3.408.295 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | *Sapi Potong* | *Ekor* | 71.801 | 79.324 | 80.329 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | *Ayam Ras Pedaging* | *Ekor* | 4.384.830 | 2.445.959 | 2.499.367 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | *Ayam Ras Petelur* | *Ekor* | 839.001 | 751.499 | 828.599 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| **2** | **4** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral** | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | Jumlah rumah tangga pengguna listrik | RT | 129572 | 101.663 | 103.209 | PLN |
| **2** | **5** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan** | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | % | 0,72 | 0,74 | 0,78 | Dina Perdagangan, Perindustrian, Usaha Kecil dan Menengah |

| Nomor | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 2 | Jumlah Pasar | Unit | 40 | 43 | 43 | Dina Perdagangan, Perindustrian, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **6** | | **Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian** | | | | | |
| **2** | | 1 | Cakupan bina kelompok pengrajin | % | 0,17 | 0,18 | 0,21 | Dina Perdagangan, Perindustrian, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | | | **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan** | | | | | |
| **2** | **1** | | **Sekretariat Daerah** | | | | | |
| **2** | **1** | 1 | Rasio tempat ibadah persatuan penduduk | | 2,60 | 2,76 | 2,87 | Sekretariad Daerah |
| **2** | **2** | | **Sekretariat DPRD** | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten | | Ada | Ada | Ada | DPRD |
| 2 | 2 | 2 | Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | | Ada | Ada | Ada | DPRD |
| 2 | 2 | 3 | Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | | Ada | Ada | Ada | DPRD |
| **2** | | | **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** | | | | | |
| **2** | **1** | | **Perencanaan** | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Bappelitbangda |
| 2 | 1 | 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Bappelitbangda |
| 2 | 1 | 3 | Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda | Ada/ Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Bappelitbangda |
| 2 | 1 | 4 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD | % | 100 | 100 | 100 | Bappelitbangda |
| 2 | 1 | 5 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD | % | 100 | 100 | 100 | Bappelitbangda |
| 2 | 1 | 6 | Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW | % | 100 | 100 | 100 | Bappelitbangda |

| Nomor | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **2** | | **Keuangan** | | | | | |
| **2** | **2** | 1 | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | | | WTP | WTP | BPKP |
| 2 | 2 | 2 | Persentase SILPA Terhadap APBD | % | 6,77 | 3,00 | 2,50 | BPKP |
| 2 | 2 | 3 | Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana | % | | 0 | 0 | BPKP |
| 2 | 2 | 4 | Persentase Belanja Pendidikan (20%) | % | 28,05 | 21,40 | 21,80 | BPKP |
| 2 | 2 | 5 | Persentase Belanja Kesehatan (10%) | % | 18,44 | 19,44 | 19,84 | BPKP |
| 2 | 2 | 6 | Penetapan APBD (Tepat Waktu/Tidak) | Tepat Waktu/ Tidak | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | BPKP |
| 2 | 2 | 7 | Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa | | 0,54 | 0,62 | 1,02 | BPKP |
| 2 | 2 | 8 | Persentase PAD terhadap Pendapatan | % | 11,95 | 11,76 | 11,41 | BPKP |
| **2** | **3** | | **Kepegawaian** | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan | Bulan | 3 | 3 | 3 | BKPSDM |
| 2 | 3 | 2 | Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal | % | 74,53 | 89,35 | 89,99 | BKPSDM |
| 2 | 3 | 3 | Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural | % | 37,73 | 84,94 | 96,68 | BKPSDM |
| **2** | **4** | | **Pendidikan Dan Pelatihan** | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah | Jabatan | 32 | 29 | 29 | BKPSDM |
| 2 | 4 | 2 | Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah | Jabatan | 538 | 1703,112 | 1440,75968 | BKPSDM |
| **2** | **5** | | **Penelitian Dan Pengembangan** | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | Persentase implementasi rencana Kelitbangan | % | 60 | 9,56 | 12,55 | Bappelitbangda |
| 2 | 5 | 2 | Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah | % | 100 | 12,06 | 13,91 | Bappelitbangda |
| 2 | 5 | 3 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | % | 100 | 61,01 | 61,35 | Bappelitbangda |
| 2 | 5 | 4 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah, | | 100 | | | Bappelitbangda |
| **2** | | | **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan** | | | | | |
| **2** | **6** | | **Inspektorat Daerah** | | | | | |
| 2 | 6 | 1 | Persentase tindak lanjut temuan | % | 68,4 | 79,47 | 100 | Inspektorat |
| 2 | 6 | 2 | Persentase pelanggaran Pegawai | % | 0,13 | 0,181 | 0,000 | Inspektorat |
| 2 | 6 | 3 | Jumlah temuan BPK | Temuan | 7 | 6 | 4 | Inspektorat |
| **2** | | | **Unsur Pemerintahan Umum** | | | | | |
| **2** | **7** | | **Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | | |

| Nomor | | | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 1 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Angka | N/A | 70,5 | 71,5 | Kesbangpol |
| 2 | 7 | 2 | Persentase peningkatan penanganan konflik di daerah | % | 100 | 100 | 100 | Kesbangpol |
| 2 | 7 | 3 | Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat | Kali | 5 | 5 | 5 | Kesbangpol |
| **3** | | | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | |
| **3** | | | **Kemampuan Ekonomi Daerah** | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | Rata-rata Nilai Konsumsi Pengeluaran Per Rumah Tangga | | 980.966 | 985.837 | 1.080.641 | BPS |
| 3 | 2 | 2 | Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita | | 459.488 | 472.763 | 532.129 | BPS |
| 3 | 3 | 3 | Nilai Tukar Petani | | 100,39 | 104,83 | 107,22 | BPS |
| **3** | | | **Fasilitas Wilayah/Infrastruktur** | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukan Tata Ruang | % | 100 | 92 | 99 | PUTR |
| **3** | | | **Iklim Berinvestasi** | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | Angka Kriminalitas yang tertangani | % | 11,62 | 25,95 | 26,92 | Polres |
| **3** | | | **Sumberdaya Manusia** | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | Rasio Ketergantungan | | 41,75 | 37,22 | 33,56 | BPS |

*Sumber : Instansi Vertikal, Organiasi Perangkat Daerah, Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba 2023, diolah*

## 6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis danMutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yangberhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan,keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii)perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikanpada tabel berikut ini:

**Tabel VI-4**
**Capaian Indikator SPM Tahun 2022 dan Target Indikator SPM Tahun 2023-2024 Kabupaten Bulukumba**

| No | Uraian | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PENDIDIKAN** | | | | |
| **1.1** | **Pendidikan Dasar** | | | | |
| 1 | persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) | % | 94,6 | 100 | 100 |
| 1.a | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa bedasarkan hasil asesmen nasional | | | 100 | 100 |
| **1.2** | **Pendidikan Kesetaraan** | | | | |
| 2 | Persentase WargaNegara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. | % | 94,2 | 100 | 100 |
| 2.a | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa bedasarkan hasil asesmen nasional | | | 100 | 100 |
| **1.3** | **Pendidikan anak usia dini** | | | | |
| 3 | Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | % | 83,9 | 100 | 100 |
| 3.a | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa bedasarkan hasil asesmen nasional | | | 100 | 100 |
| **2** | **KESEHATAN** | | | | |
| **2.1** | **Pelayanan Kesehatan ibu hamil jumlah** | | | | |
| 4 | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar | % | 100 | 100 | 100 |
| **2.2** | **Pelayanan kesehatan ibu bersalin** | | | | |
| 5 | Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) | % | 100 | 100 | 100 |
| **2.3** | **Pelayanan kesehatan bayi baru lahir** | | | | |
| 6 | Persentas bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | % | 100 | 100 | 100 |
| **2.4** | **Pelayanan kesehatan balita** | | | | |
| 7 | Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | 100 | 100 | 100 |

| No | Uraian | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.5** | **Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar** | | | | |
| 8 | Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | % | 100 | 100 | 100 |
| **2.6** | **Pelayanan kesehatan pada usia produktif** | | | | |
| 9 | Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | % | 100 | 100 | 100 |
| **2.7** | **Pelayanan kesehatan pada usia lanjut** | | | | |
| 10 | Persentas orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | % | 67 | 100 | 100 |
| **2.8** | **Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi** | | | | |
| 11 | Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | % | 100 | 100 | 100 |
| **2.9** | **Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus** | | | | |
| 12 | Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | % | 100 | 100 | 100 |
| **2.10** | **Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat** | | | | |
| 13 | Persentas orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | % | 84 | 100 | 100 |
| **2.11** | **Pelayanan kesehatan orang terduga tubercolosis** | | | | |
| 14 | Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC)yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | % | 100 | 100 | 100 |
| **2.12** | **Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefic ieny Virus)** | | | | |
| 15 | Persentas orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar | % | 100 | 100 | 100 |
| **3** | **PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG** | | | | |
| **3.1** | **Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari** | | | | |
| 16 | Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum seharihari | % | 90,26 | 100 | 100 |
| **3.2** | **Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic** | | | | |
| 17 | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic | % | 97,49 | 100 | 100 |
| **4** | **PERUMAHAN DA PEMUKIMAN** | | | | |
| **4.1** | **Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;** | | | | |
| 18 | Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. | % | 1000 | 100 | 100 |
| **4.2** | **Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota** | | | | |
| 18 | Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. | % | 93 | 100 | 100 |
| **5** | **KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | |
| **5.1** | **Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum** | | | | |

| No | Uraian | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkadat | % | 100 | 100 | 100 |
| **5.2** | **Pelayanan informasi rawan bencana** | | | | |
| 21 | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | % | 100 | 100 | 100 |
| **5.3** | **Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** | | | | |
| 22 | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | % | 100 | 100 | 100 |
| **5.4** | **Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana** | | | | |
| 23 | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | % | 100 | 100 | 100 |
| **5.5** | **Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** | | | | |
| 24 | Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | % | 100 | 100 | 100 |
| **6** | **SOSIAL** | | | | |
| **6.1** | **Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantardiluar panti** | | | | |
| 25 | Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | % | 97,64 | 100 | 100 |
| **6.2** | **Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti** | | | | |
| 26 | persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | % | 94,20 | 100 | 100 |
| **6.3** | **Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti** | | | | |
| 27 | Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | % | 99,13 | 100 | 100 |
| **6.4** | **Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti** | | | | |
| 28 | persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | % | 94,28 | 100 | 100 |
| **6.5** | **Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota** | | | | |
| 29 | persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social | % | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Sekretariat Daerah, Bappelitbangda Kab. Bulukumba 2023, diolah*

## 6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Suistainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan PembangunanBerkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untukmengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional

dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadiprioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Kabupaten.

Penetapan target tahun 2024 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Suistainable Development Goals*(TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel VI-5**
**Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2024**

| No | Uraian | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Development Goals (TPB/SDGs)** | | | | | |
| **1** | **Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun** | | | | | |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Persen | 7,39 | 6,43528304 | 6,21371072 | Dinas Sosial |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | Persen | NA | 93,51221659 | 97,04962212 | Dinas Kesehatan |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | Persen | NA | 12,33081791 | 14,65142388 | Dinas Sosial |
| 1.3.1.(c) | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. | Persen | 97,36 | 100 | 100 | Dinas Sosial |
| 1.3.1.(d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. | Rumah Tangga | 14945 | 11641,6 | 10956,8 | Dinas Sosial |
| 1.4.1.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Persen | 99 | 89,11724752 | 90,0229967 | Dinas Kesehatan |
| 1.4.1.(b) | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. | Persen | 99 | 99,0757 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 1.4.1.(c) | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | Persen | NA | 65,59945 | 65,9226 | Dinas PPKB,PPPA |
| 1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. | Persen | 85,46 | 86,932 | 87,776 | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| 1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. | Persen | 76,87 | 76,752 | 90,036 | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| 1.4.1.(g) | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. | Persen | 87,53 | 100,1616 | 103,7388 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 1.4.1.(h) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. | Persen | 84,48 | 91,3187 | 96,6016 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 1.4.1.(j) | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. | Persen | 9829,00% | 65,87% | 66,51% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 1.4.1.(k) | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. | Rumah Tangga | NA | 32812,44864 | 27167,59818 | PLN |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Orang | 4 | - | - | BPBD |
| 1.5.1.(a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. | Lokasi | 10 | 25 | 30 | BPBD |
| 1.5.1.(b) | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. | Orang | 26 | 449 | 483 | Dinas Sosial |

| No | Uraian | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1.(c) | Pendampingan psikososial korban bencana sosial. | Orang | NA | 496 | 547 | Dinas Sosial |
| 1.5.1.(d) | Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) | | NA | | | Dinas Sosial |
| 1.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | Rp | 500.000.000 | 125.000.000 | - | BPBD |
| 1.5.3* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | Dokumen | 1 | Ada | Ada | BPBD |
| 1.a.1* | Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. | Persen | NA | 24,17862029 | 24,43816038 | Dinas Sosial |
| 1.a.2* | Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. | Persen | NA | 27,7514 | 28,5152 | Dinas Sosial |
| **2** | **Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan** | | | | | |
| 2.1.1* | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). | Persen | | 0 | 0 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2.1.1.(a) | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. | Persen | 5,96 | 5,995 | 4,36 | Dinas Kesehatan |
| 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. | Persen | | 0 | 0 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2.1.2.(a) | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. | Persen | | 0 | 0 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2.2.1* | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. | Persen | 5,4 | 5,789 | 4,962 | Dinas Kesehatan |
| 2.2.1.(a) | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. | Persen | 5,4 | 1,683 | 1,224 | Dinas Kesehatan |
| 2.2.2* | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | Persen | 3,17 | 1,172 | 0,586 | Dinas Kesehatan |
| 2.2.2.(a) | Prevalensi anemia pada ibu hamil. | Persen | 12 | 11,522 | 9,876 | Dinas Kesehatan |
| 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. | Persen | 54,65 | 83,90926109 | 87,21234812 | Dinas Kesehatan |
| 2.2.2.(c) | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. | Persen | 88,5 | 82,88 | 85,84 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2.3.1* | Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). | | NA | 0 | 0 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| **3** | **Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia** | | | | | |
| 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI). | Angka | 8 | 2,43 | 1,91 | Dinas Kesehatan |
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. | Persen | 99 | 89,12 | 90,02 | Dinas Kesehatan |
| 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang | Persen | 99 | 87,87 | 88,59 | Dinas Kesehatan |

| No | Uraian | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | | | | | |
| 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. | Angka | 0 | 6,78 | 6,38 | Dinas Kesehatan |
| 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | Angka | 1,27 | 5,65 | 5,32 | Dinas Kesehatan |
| 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | Angka | 1,27 | 6,40 | 6,02 | Dinas Kesehatan |
| 3.2.2.(b) | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | Persen | 100 | 99,19 | 99,67 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | Persen | 0,76 | 0,01 | 0,01 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | Orang | NA | 118,86 | 117,64 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.3* | Kejadian Malaria per 1000 orang. | Orang | 0,05 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.4.(a) | Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. | Persen | 100 | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| 3.3.5* | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). | Orang | NA | 96,60 | 82,80 | Dinas Kesehatan |
| 3.4.1.(a) | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. | Persen | NA | 0,17 | 0,14 | Dinas Kesehatan |
| 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi. | Persen | 16,48 | 6,83 | 6,61 | Dinas Kesehatan |
| 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. | Persen | 32,24 | -0,07 | -0,14 | Dinas Kesehatan |
| 3.4.2* | Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. | | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| 3.5.1.(e) | Prevalensi penyalahgunaan narkoba. | | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| 3.5.2* | Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. | | NA | 0,00 | 0,00 | Dinas Kesehatan |
| 3.7.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. | | 55,79 | 0,00 | 0,00 | Dinas PPKB,PPPA |
| 3.7.1.(a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | Persen | 55,75 | 83,14 | 85,86 | Dinas PPKB,PPPA |
| 3.7.1.(b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. | Persen | 10,2 | 29,04 | 32,55 | Dinas PPKB,PPPA |
| 3.7.2* | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | | 23,05 | 0,00 | 0,00 | Dinas PPKB,PPPA |
| 3.7.2.(a) | Total Fertility Rate (TFR). | TFR | 2,13 | 1,62 | 1,39 | Dinas PPKB,PPPA |
| 3.8.1 | Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung). | Persen | NA | 77,39 | 80,31 | |
| 3.8.1.(a) | Unmet need pelayanan kesehatan. | Persen | NA | 9,98 | 9,39 | Dinas Kesehatan |
| 3.8.2* | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. | Penduduk | NA | 400128,32 | 417248,76 | Dinas Kesehatan |
| 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | Persen | NA | 84,76 | 89,07 | Dinas Kesehatan |
| 3.9.3.(a) | Proporsi kematian akibat keracunan. | | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kesehatan |

| No | Uraian | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.a.1* | Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. | Persen | 23,75 | 34,77 | 31,38 | Dinas Kesehatan |
| 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. | Persen | 100% | 100,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. | Persen | NA | 1,32 | 1,63 | Dinas Kesehatan |
| **4** | **Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua** | | | | | |
| 4.1.1* | Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. | Persen | 92 | 95,4 | 97,2 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 4.1.1.(a) | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. | Persen | 89,71 | 100,0 | 100,0 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 4.1.1.(b) | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. | Persen | 68,11 | 84,3 | 88,6 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 4.1.1.(d) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. | Persen | 100,9 | 112,8 | 112,9 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 4.1.1.(e) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. | Persen | 92,03 | 104,4 | 108,9 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 4.1.1.(g) | Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. | Tahun | 100 | 9,7 | 10,6 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 4.2.2.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | Persen | 93,33 | 65,5 | 76,6 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 4.4.1* | Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). | Persen | 32 | 23,2 | 25,6 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 4.5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. | Persen | 82 | 111,1 | 113,2 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | Persen | 92,56 | 99,8 | 99,9 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 4.6.1.(b) | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. | Persen | 92,56 | 93,2 | 93,3 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). | Persen | 91 | 95,4 | 97,2 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| 4.c.1* | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. | Persen | 47,05 | 58,0 | 61,8 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
| **5** | **Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan** | | | | | |
| 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | Kebijakan | 4 | 5,20 | 5,60 | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.2.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. | Persen | 9,3 | 15,22 | 13,04 | Dinas PPKB,PPPA |

| No | Uraian | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | Persen | 23 | 49,70 | 42,60 | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.2.2* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | Persen | NA | 15,40 | 13,20 | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | Persen | 100 | 72,80 | 78,40 | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. | Persen | 27 | 1,00 | 1,00 | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.3.1.(a) | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. | | NA | 0,00 | 0,00 | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.3.1.(b) | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | | 23,5 | 0,00 | 0,00 | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | Persen | NA | 22,04 | 22,72 | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | Persen | NA | 19,50 | 19,87 | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.6.1* | Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. | Persen | | 0,00 | 0,00 | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.6.1.(a) | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). | Persen | 28,49 | 9,98 | 9,39 | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.6.1.(b) | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. | Persen | NA | 4,61 | 4,73 | Dinas PPKB,PPPA |
| 5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | Persen | 84,46 | 96,82 | 98,27 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| **6** | **Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan** | | | | | |
| 6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | Persen | 92,43 | 91,57 | 92,46 | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| 6.1.1.(b) | Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. | NA | 92,43 | 0,00 | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| 6.1.1.(c) | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. | Persen | 85,46 | 91,57 | 92,46 | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| 6.2.1.(a) | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. | | 97,88 | 0,00 | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | Persen | 136 | 54,61 | 60,52 | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | Persen | 136 | 144,16 | 146,88 | Dinas Kesehatan |
| 6.2.1.(d) | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | Desa | NA | 140,08 | 141,44 | Dinas Kesehatan |
| 6.2.1.(f) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. | Desa | 74,71 | 2,13 | 2,47 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

| No | Uraian | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1 | Proporsi limbah cair yang diolah secara aman | % | 8 | 22,78 | 24,04 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 6.3.1.(b) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. | | NA | 0,00 | 0,00 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 6.3.2.(b) | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. | Indeks | NA | 78,22 | 82,63 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 6.5.1.(a) | Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). | Sungai | 55 | 5,00 | 6,00 | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| 6.5.1.(c) | Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. | | NA | 0,00 | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| 6.5.1.(g) | Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. | | Ada | Ada | Ada | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| **7** | **Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua** | | | | | |
| 7.2.1* | Bauran energi terbarukan. | | NA | 0,00 | 0,00 | Sekda, Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 7.3.1* | Intensitas energi primer. | | NA | 0,00 | 0,00 | Sekda, Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral |
| **8** | **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua** | | | | | |
| 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDB per kapita. | Persen | 0.43 | 1,46 | 1,81 | Bappelitbangda |
| 8.1.1.(a) | PDB per kapita. | Juta | 34,43 | 41,88 | 44,36 | Bappelitbangda |
| 8.2.1* | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. | Persen | 8,1 | 9,09 | 9,43 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. | Persen | 0,22 | 0,35 | 0,40 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 8.3.1.(a) | Persentase tenaga kerja formal. | Persen | 21,68 | 45,19 | 45,33 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 8.3.1.(b) | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. | Persen | 35,26 | 36,46 | 36,86 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. | Persen | 61,33 | 16,90 | 18,98 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja. | Rp | Rp34.143 | 50531,64 | 55994,52 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. | Persen | 0,03 | 0,03 | 0,02 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 8.5.2.(a) | Tingkat setengah pengangguran. | Persen | 0,1 | 0,09 | 0,08 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). | Persen | 58,3 | 49,52 | 53,33 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. | | 38 | 0,00 | 0,00 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |

| No | Uraian | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara. | Orang | | 688,55 | 820,40 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | Orang | | 286679,90 | 289463,20 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 8.9.1.(c) | Jumlah devisa sektor pariwisata. | Rp | | 0,00 | 0,00 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 8.9.2* | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. | | | 0,00 | 0,00 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 8.10.1* | Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa | ATM | 1 | 1,60 | 1,80 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 8.10.1.(a) | Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum). | | 2,5 | 0,00 | 0,00 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 8.10.1.(b) | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. | Persen | 45,38 | 46,12 | 50,29 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **9** | **Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi** | | | | | |
| 9.1.2.(b) | Jumlah dermaga penyeberangan. | Dermaga | 3 | 18,80 | 24,40 | Dinas Perhubungan |
| 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. | Persen | 6,68 | 7,96 | 8,12 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 9.2.1.(a) | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. | Persen | 5,72 | 5,56 | 5,62 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 9.2.2* | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. | | | 0,00 | 0,00 | Dinas PM,PSTP & Tenaga Kerja |
| 9.3.1* | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. | | | 0,00 | 0,00 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 9.3.2* | Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. | | | 0,00 | 0,00 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 9.c.1* | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. | Persen | | 65,00 | 70,00 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 9.c.1.(a) | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | Persen | 84,46 | 97,29 | 98,24 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 9.c.1.(b) | Proporsi individu yang menggunakan internet | Persen | 57,91 | 44,29 | 44,72 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| **10** | **Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara** | | | | | |
| 10.1.1* | Koefisien Gini. | Koefisien | NA | 0,36 | 0,36 | Dinas Sosial |
| 10.1.1.(a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Persen | 7,39 | 6,38 | 6,14 | Dinas Sosial |
| 10.1.1.(b) | Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. | Desa | 109 | 0,00 | 0,00 | Dinas Pemberdayaan |

| No | Uraian | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Masyarakat dan Desa |
| 10.1.1.(c) | Jumlah desa tertinggal. | Desa | 0 | 4,40 | 2,20 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 10.1.1.(d) | Jumlah Desa Mandiri. | Desa | 14 | 121,33 | 125,44 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 10.1.1.(e) | Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. | Desa | NA | 0,00 | 0,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 10.2.1* | Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. | Persen | NA | 7,71 | 7,66 | Dinas Sosial |
| 10.3.1.(a) | Indeks Kebebasan Sipil. | | NA | 0,00 | 0,00 | Dinas Sosial |
| 10.3.1.(d) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | | NA | 0,00 | 0,00 | Sekda, Bagian Hukum dan HAM |
| 10.4.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | Persen | NA | 12,33 | 14,65 | Dinas Sosial |
| **11** | **Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan** | | | | | |
| 11.1.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. | Persen | 100 | 95,04 | 95,94 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 11.3.2.(b) | Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. | | | 0,00 | 0,00 | Bappelitbangda |
| 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Orang | 4 | 0,00 | 0,00 | BPBD |
| 11.5.1.(a) | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | Persen | 100 | 70,00 | 60,00 | BPBD |
| 11.5.1.(c) | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. | | ada | Ada | Ada | BPBD |
| 11.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | Rp | 500.000.000 | 125.000.000 | 0,00 | BPBD |
| 11.6.1.(a) | Persentase sampah perkotaan yang tertangani. | Persen | 94,77 | 77,97 | 79,44 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 11.b.2* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. | | Ada | Ada | Ada | BPBD |
| **12** | **Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan** | | | | | |
| 12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). | Ton | 35 | 62,83 | 75,39 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 12.5.1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | Ton | 24,95 | 64,64 | 65,27 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 12.6.1.(a) | Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. | Perusahaan | 1 | 2,50 | 3,00 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 12.7.1.(a) | Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. | Ton | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **13** | **Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya** | | | | | |
| 13.1.1* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | | 1 | Ada | Ada | BPBD |

| No | Uraian | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.2* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Orang | 4 | 0,00 | 0,00 | BPBD |
| **14** | **Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan** | | | | | |
| 14.4.1* | Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman. | Ton | 55.522,60 | 56833,05 | 57824,03 | Dinas Perikanan |
| 14.6.1.(a) | Persentase kepatuhan pelaku usaha. | Persen | 100 | 100,00 | 100,00 | Dinas Perikanan |
| 14.b.1.(b) | Jumlah nelayan yang terlindungi. | Nelayan | NA | 997,05 | 1040,40 | Dinas Perikanan |
| **15** | **Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati** | | | | | |
| 15.1.1.(a) | Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. | Persen | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 15.3.1.(a) | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. | Persen | 0 | 0,00 | 0,00 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 15.9.1.(a) | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. | Dokumen | ada | Ada | Ada | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **16** | **Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan** | | | | | |
| 16.1.1.(a) | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. | Kasus | 2 | 6,16 | 5,88 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 16.1.2.(a) | Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. | Kematian | 0 | 0,00 | 0,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 16.1.3.(a) | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. | Kasus | 78 | 0,00 | 0,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 16.1.4* | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. | Persen | 100 | 0,00 | 0,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 16.2.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. | RT | | 1,00 | 1,00 | Dinas PPKB,PPPA |
| 16.2.1.(b) | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. | Orang | | 51,20 | 25,60 | Dinas PPKB,PPPA |
| 16.2.3.(a) | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. | Orang | | 206,80 | 103,40 | Dinas PPKB,PPPA |
| 16.5.1.(a) | Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). | | | 0,00 | 0,00 | Inspektorat |
| 16.6.1* | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. | Persen | 85,12 | 94,26 | 95,17 | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 16.6.1.(a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan | | WTP (100%) | WTP (100%) | WTP (100%) | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah |

| No | Uraian | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). | | | | | |
| 16.6.1.(b) | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Persen | B | 70,60 | 73,75 | Inspektorat |
| 16.6.1.(c) | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. | Persen | 97% | 98,62 | 99,10 | Sekda, Bagian Pembangunan |
| 16.6.1.(d) | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Persen | 68,91 | 62,40 | 64,62 | Sekda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
| 16.6.2.(a) | Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | | | 0,00 | 0,00 | Bappelitbangda |
| 16.7.1.(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | Persen | 20 | 22,04 | 22,72 | Dinas PPKB,PPPA |
| 16.7.1.(b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | Persen | 0,2 | 46,95 | 57,60 | Dinas PPKB,PPPA |
| 16.9.1* | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. | | 97,31 | 88,64 | 93,15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 16.9.1.(a) | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. | | 97,31 | 0,00 | 0,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 16.9.1.(b) | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. | Persen | NA | 80,34 | 81,12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 16.10.2.(c) | Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | ASN | 98,29 | 2,50 | 3,00 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 16.b.1.(a) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | | | Ada | Ada | Setda, Bagian Hukum dan HAM |
| **17** | **Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan** | | | | | |
| 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. | Rp (Jt) | 1.375.869 | 1.339.627 | 1.352.633 | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 17.1.1.(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | Persen | | 0,99 | 1,20 | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 17.1.2* | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. | Persen | 2,43 | 0,99 | 1,00 | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 17.6.2.(b) | Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. | | 50 | 0,00 | 0,00 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 17.6.2.(c) | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband | Persen | NA | 65,00 | 70,00 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |

| No | Uraian | Satuan | Capaian 2022 | Asumsi 2023 | Target 2024 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8.1* | Proporsi individu yang menggunakan internet. | Persen | 100 | 45,35 | 46,14 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 17.17.1.(a) | Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | | | 0,00 | 0,00 | Bappelitbangda |
| 17.17.1.(b) | Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | | | 0,00 | 0,00 | Bappelitbangda |
| 17.18.1.(a) | Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. | Persen | 100 | 100,00 | 100,00 | Bappelitbangda |
| 17.18.1.(b) | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. | Persen | 100 | 86,67 | 93,34 | Bappelitbangda |
| 17.18.1.(c) | Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). | | NA | 11,69 | 13,59 | Bappelitbangda |
| 17.18.1.(d) | Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. | | | 0,00 | 0,00 | Bappelitbangda |
| 17.19.2.(b) | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) | | Ada | Ada | Ada | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 17.19.2.(c) | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. | Orang | NA | 9781,56 | 10376,75 | Bappelitbangda |
| 17.19.2.(d) | Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). | Persen | | 100,00 | 100,00 | Bappelitbangda |

# BAB VII
# PENUTUP

Bab Penutup Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

## 7.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran yang berpedoman pada RPJPD 2005-2025, RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026, serta memperhatikan RPD Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, dan RKP Tahun 2024.

Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba berfungsi sebagai landasan,pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif, yang mana nota kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2024 ini sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2024. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD Tahun 2024 yang mana untuk memastikan APBD Tahun 2024 telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan - penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencanayang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan Daerah.

Kunci sukses pembangunan daerah adalah perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dankonsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut diatas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat,kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan danpenyelenggara Pemerintah Daerah. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparasi informasi publik, maka RKPD agardipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dankegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja,akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2024 yang nantinya menjadi harapan untuk pelaksanaanya, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2024.
2. OPD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2024 dengan sebaik baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJPD dan RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

## 7.2 Kesimpulan

1. RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunanlainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2024.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2024 yaitu : "***Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Melalui Perwujudan Kawasan Mandiri***" sehingga program kegiatan di masing-masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut

dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.

4. RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, diharapkan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah,sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

**BUPATI BULUKUMBA,**

**MUCHTAR ALI YUSUF**

# BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
## PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
## KABUPATEN BULUKUMBA

Jalan Kenari No.1  Bulukumba Telp. (0413) 81011 Kode Pos 92511

Email : bappelitbangdabulukumba@gmail.com